#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2025 - 2029



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Riau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Riau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
17. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

26. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
27. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan Daerah; dan

b. program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada:

a. RPJPD;

b. RTRW;

c. RPJMN; dan

d. RPJMD Provinsi Riau.

Bagian Kedua
Sistematika RPJMD

Pasal 5

(1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;

d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Perangkat Daerah; dan

e. BAB V : Penutup.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan

c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Bupati dapat dibantu oleh Tim.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2025
BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 3 OKTOBER 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ERSAN SAPUTRA TH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU (9.53.A/2025)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR xii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya; I-5
1.4 Maksud dan Tujuan I-6
1.5 Sistematika penulisan I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-46
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-88
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-126
2.1.5 Evaluasi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ..... II-222
2.2 Gambaran Keuangan Daerah II-225
2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir II-225
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan II-247
2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis II-261
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah II-261
2.3.2 Isu Strategis Daerah II-276
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 Visi dan Misi III-1
3.1.1 Visi III-1
3.1.2 Misi III-2
3.2 Tujuan dan Sasaran III-7
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan III-14
3.4 Arah Kebijakan Spasial III-24
3.4.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis III-24
3.4.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis III-30
3.4.3 Kawasan Strategis Kabupaten III-32

3.5 Empat Klaster Pembangunan Kawasan III-33
3.6 Arah Kebijakan Pengembangan Industri Kabupten Bengkalis III-34
3.7 Arahan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dalam RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-39
3.8 Dukungan Arah kebijakan dan Program Pembangunan Spasial Kabupaten Bengkalis terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau III-41
3.9 Program Prioritas Daerah III-47
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah IV-54
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) IV-54
4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah IV-61
BAB V PENUTUP V-1
5.1 Kaidah Pelaksanaan V-1
5.2 Manajemen Resiko V-2
5.3 Pembiayaan Pembangunan V-3

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ..... II-2

Tabel II.2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ..... II-4

Tabel II.3 Kondisi Curah Hujan, Kelembaban dan Suhu Kabupaten Bengkalis 2023 ..... II-8

Tabel II.4 Sebaran Tutupan Lahan Kabupaten Bengkalis II-9

Tabel II.5 Rekapitulasi Luas Tanam, Luas Panen Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ..... II-12

Tabel II.6 Data Potensi Pengembangan Produksi Pertanian di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 II-13

Tabel II.7 Rekapitulasi Ternak Besar di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024..... II-14

Tabel II.8 Rekapitulasi Ternak Unggas di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024..... II-15

Tabel II.9 Potensi Kelapa Sawit, Karet dan Kelapa Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 ..... II-16

Tabel II.10 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024..... II-23

Tabel II.11 Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2024 ..... II-24

Tabel II.12 Persentase Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024..... II-25

Tabel II.13 Data Kejadian Bencana di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ..... II-33

Tabel II.14 Jumlah Kejadian Bencana Abrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024..... II-34

Tabel II.15 Rekapitulasi Penanganan Bencana Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024..... II-35

Tabel II.16 Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 ..... II-38

Tabel II.17 Jumlah Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ..... II-39

Tabel II.18 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ..... II-41

Tabel II.19 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ..... II-41

Tabel II.20 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Tahun 2024 ..... II-45

Tabel II.21 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2024 ..... II-52

Tabel II.22 Angka Literasi dan Numerasi Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ..... II-71

Tabel II.23 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022-2023 ..... II-75

Tabel II.24 Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023 ..... II-76

Tabel II.25 Pekerja Disabilitas Kabupaten Bengkalis yang Bekerja di Sektor Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit Tahun 2023 ..... II-78

Tabel II.26 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 ..... II-78

Tabel II.27 Perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 ..... II-79

Tabel II.28 IPA, IPHA, IPKA Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 ..... II-82

Tabel II.29 Dimensi IKK Provinsi Riau Berdasarkan Metadata Lama dan Metadata Baru, 2022 – 2023 ..... II-83

Tabel II.30 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Riau Tahun 2020-2023 ..... II-86

Tabel II.31 Indikator Kepemudaan Kabupaten Bengkalis dalam Mendukung Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Riau Tahun 2020-2024 ..... II-87

Tabel II.32 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bengkalis 2020-2024 ..... II-89

Tabel II.33 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 ..... II-90

Tabel II.34 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Bengkalis Tabel 2020-2024 ... II-91

Tabel II.35 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Bengkalis (%) Tahun 2019-2023 ..... II-95

Tabel II.36 Luasan Nilai Konservasi Tinggi Kabupaten Bengkalis II-100

Tabel II.37 Capaian Bauran Energi Provinsi Riau 2022-2023 ..... II-100

Tabel II.38 Potensi EBT Riau dan Pemanfaatannya II-101

Tabel II.39 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Riau Tahun 2020-2023 ..... II-102

Tabel II.40 Data Rekapitulasi Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ..... II-107

Tabel II.41 Layanan SPAM di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ..... II-119

Tabel II.42 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 ..... II-123

Tabel II.43 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 ..... II-123

Tabel II.44 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .II-125

Tabel II.45 Tingkat Inflasi di Provinsi Riau Tahun 2020-2024 .....II-126

Tabel II.46 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 .....II-128

Tabel II.47 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2024 .....II-130

Tabel II.48 Indeks Integritas Nasional Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024 .....II-131

Tabel II.49 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau menurut Indikator Tahun 2021-2023.II-134

Tabel II.50 Angka Kriminalitas yang Tercatat di Kebupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-135

Tabel II.51 Rasio Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Bengkalis 2020-2024 .....II-135

Tabel II.52 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2024 .....II-137

Tabel II.53 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-139

Tabel II.54 Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-140

Tabel II.55 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-140

Tabel II.56 Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-141

Tabel II.57 Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .....II-142

Tabel II.58 Perkembangan Angka Melanjutkan Studi Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-143

Tabel II.59 Rasio Guru-Murid Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-144

Tabel II.60 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024.....II-145

Tabel II.61 Capaian SPM Pendidikan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2024 .....II-146

Tabel II.62 Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.II-147

Tabel II.63 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahriran Hidup Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024 .....II-149

Tabel II.64 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....II-149

Tabel II.65 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024 .....II-151

Tabel II.66 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup dalam kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024 .....II-152

Tabel II.67 Rasio Posyandu per 100 Balita Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .II-152

Tabel II.68 Rasio Tenaga Medis per 1000 Penduduk Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .....II-153

Tabel II.69 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .....II-153

Tabel II.70 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Per Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .....II-154

Tabel II.71 Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .....II-155

Tabel II.72 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .....II-155

Tabel II.73 Cakupan Kunjungan Bayi per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024....II-156

Tabel II.74 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K6 per Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .....II-157

Tabel II.75 Cakupan Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .....II-158

Tabel II.76 Cakupan Puskesmas Pembantu per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .....II-158

Tabel II.77 Cakupan Pelayanan Nifas per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024...II-159

Tabel II.78 Cakupan Pemebrian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .....II-159

Tabel II.79 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat per Kecamatan di Kabuapten Bengkalis Tahun 2024.....II-160

Tabel II.80 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin per Kecamatan di Kabupaten bengkalis Tahun 2024 .....II-161

Tabel II.81 Pencapaian SPM Urusan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....II-161

Tabel II.82 Perkembangan Indikator Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-163

Tabel II.83 Realisasi Capaian Urusan pekerjaan Umum 2024.....II-164

Tabel II.84 Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-165

Tabel II.85 Daftar Kawasan Kumuh Kabupaten Bengkalis Berdasarkan SK Nomor 528/KPTS/VIII/2024 .....II-166

Tabel II.86 Data *Backlog* Perumahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.....II-169

Tabel II.87 Capaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2024.....II-170

Tabel II.88 Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyrakat (Linmas) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 (%) II-171

Tabel II.89 Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiba Umum Tahun 2024...II-172

Tabel II.90 Capaian SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....II-173

Tabel II.91 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bengkalis Urusan Ketentraman Ketertiban Umum 2024.....II-174

Tabel II.92 Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 (%).....II-174

Tabel II.93 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .....II-175

Tabel II.94 Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemerintahan Kebutuhan Dasar Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .....II-176

Tabel II.95 Persentase PPKS yang tertangani Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....II-177

Tabel II.96 Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024 .....II-177

Tabel II.97 Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024...II-179

Tabel II.98 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-180

Tabel II.99 Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penyandang Disabilitas di Sektor Formal Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 .....II-180

Tabel II.100 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-181

Tabel II.101 Indikator Urusan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-183

Tabel II.102 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-185

Tabel II.103 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-188

Tabel II.104 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024 .....II-189

Tabel II.105 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-189

Tabel II.106 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-192

Tabel II.107 Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 II-193

Tabel II.108 Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informastika di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-194

Tabel II.109 Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakt pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....II-195

Tabel II.110 Prestasi PPID Utama Kabupaten Bengkalis 2020-2024.....II-195

Tabel II.111 Data Wilayah (Kelurahan/Desa) yang Belum Tercover Mobile Broadband 4G di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....II-195

Tabel II.112 Perkembangan Indikator Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-197

Tabel II.113 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2020-2024.....II-199

Tabel II.114 Perkembangan Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 - 2024.....II-200

Tabel II.115 Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024.....II-201

Tabel II.116 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024.....II-201

Tabel II.117 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024..II-204

Tabel II.118 Jumlah Pengunjung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabuapten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-205

Tabel II.119 Koleksi Buku yang Tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-205

Tabel II.120 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .II-205

Tabel II.121 Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-206

Tabel II.122 Capaian Indikator Perikanan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-207

Tabel II.123 Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Bengkalis 2020-2024.....II-209

Tabel II.124 Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-209

Tabel II.125 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-210

Tabel II.126 Banyaknya Produksi Tenaga Listrik Dirinci Menurut Golongan Tarif di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .....II-211

Tabel II.127 Perkembangan Ekspor Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-213

Tabel II.128 Capain Indikator Perdagangan Kabupaten bengkalis Tahun 2023-2024 .....II-213

Tabel II.129 Capaian indikator Perindustrian Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024 .....II-214

Tabel II.130 Perkembangan Indikator Perencanaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.II-215

Tabel II.131 Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020–2024.....II-216

Tabel II.132 Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2024 .....II-217

Tabel II.133 Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-217

Tabel II.134 Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis 2020-2024 .....II-219

Tabel II.135 Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2024 ....II-219

Tabel II.136 Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-220

Tabel II.137 Perkembangan indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 .....II-221

Tabel II.138 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan Tahun 2021-2024 .....II-221

Tabel II.139 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020-2024 .....II-227

Tabel II.140 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020-2024.....II-230

Tabel II.141 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020-2024 .....II-232

Tabel II.142 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020-2024 .....II-233

Tabel II.143 Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020-2024 .....II-235

Tabel II.144 Neraca Daerah Kabupaten Bengkalis 2020-2024 .....II-237

Tabel II.145 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020-2024 .....II-239

Tabel II.146 Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2020-2024 Kabupaten Bengkalis II-241

Tabel II.147 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupten Bengkalis II-243

Tabel II.148 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-245

Tabel II.149 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020-2024 .....II-245

Tabel II.150 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkalis (dalam persen).II-246

Tabel II.151 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025-2030.....II-252

Tabel II.152 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025-2030 .....II-253

Tabel II.153 Poyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025-2030II-254

Tabel II.154 Rekapitulasi Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2025-2030.....II-255

Tabel II.155 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025-2030 ..... II-257

Tabel II.156 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2030 ..... II-259

Tabel II.157 Isu Strategis Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 ..... II-285

Tabel II.158 Perumusan Isu Strategis Kabupaten Bengkalis II-287

Tabel III.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 ..... III-9

Tabel III.2 Perumusan Arah Kebijakan Kabupaten Bengkalis III-17

Tabel III.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan dan Strategi Kabupaten Bengkalis III-19

Tabel III.4 Sistem Pusat Pemukiman Kabupaten Bengkalis III-24

Tabel III.5 Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten Bengkalis III-25

Tabel III.6 Kawasan Lindung Kabupaten Bengkalis III-30

Tabel III.7 Kawasan Budidaya Kabupaten Bengkalis III-31

Tabel III.8 Industri Prioritas Kabupaten Bengkalis III-35

Tabel III.9 Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Spasial Kabupaten Bengkalis untuk Mendukung Pembangunan Spasial Provinsi Riau (Wilayah Pengembangan Pilar BERNILAI) III-42

Tabel III.10 Program Prioritas Kabupaten Bengkalis III-49

Tabel III.11 Program Unggulan Daerah III-66

Tabel III.12 Penjelasan Program Strategis Daerah III-69

Tabel III.13 Program Strategis Daerah Kabupaten Bengkalis III-71

Tabel III.14 Penyelarasan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Riau dan RPJMD Kabupaten Bengkalis III-74

Tabel IV.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2030 ..... IV-3

Tabel IV.2 Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2030 . IV-55

Tabel IV.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2030 ..... IV-60

Tabel IV.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2030 ..... IV-62

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Keterkaitan RPJMD didalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan.....I-5

Gambar II.1 Administratif Kabupaten Bengkalis.....II-2

Gambar II.2 Peta Topografi Kabupaten Bengkalis.....II-6

Gambar II.3 Peta Geologi Kabupaten Bengkalis.....II-7

Gambar II.4 Peta Hidrologi Kabupaten Bengkalis.....II-8

Gambar II.5 Peta Klimatologi Kabupaten Bengkalis.....II-9

Gambar II.6 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Bengkalis.....II-10

Gambar II.7 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-11

Gambar II.8 Produksi Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-17

Gambar II.9 Peta Batas Wilayah Fungsional Kabupaten Bengkalis.....II-19

Gambar II.10 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Pangan Kabupaten Bengkalis.....II-20

Gambar II.11 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Air Kabupaten Bengkalis II-21

Gambar II.12 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-22

Gambar II.13 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024.....II-23

Gambar II.14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-27

Gambar II.15 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-29

Gambar II.16 Komposisi Sampah bedasarkan Jenis Sampah Kabupaten Bengkalis.....II-30

Gambar II.17 Komposisi sampah berdasarkan sumber sampah Kabupaten Bengkalis.....II-30

Gambar II.18 Tren Emisi GRK kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023 (Gg CO2 eq).....II-31

Gambar II.19 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-32

Gambar II.20 Peta Wilayah Rawan Abrasi Kabupaten Bengkalis.....II-35

Gambar II.21 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bengkalis.....II-36

Gambar II.22 Peta Rawan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Bengkalis.....II-39

Gambar II.23 Peta Kerentanan Perubahan Iklim di Kabupaten Bengkalis.....II-40

Gambar II.24 Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 ..II-42

Gambar II.25 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .....II-43

Gambar II.26Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .....II-44

Gambar II.27 Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku (Dalam Triliun) Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024 .....II-47

Gambar II.28 Struktur Perekonomian Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-49

Gambar II.29 Struktur Perekonomian (PDRB) Kabupaten Bengkalis Menurut Pengeluaran Tahun 2024 .....II-50

Gambar II.30 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 - 2024 .....II-51

Gambar II.31 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 .....II-53

Gambar II.32 PDRB per Kapita ADHK dan ADHB Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah) II-55

Gambar II.33 Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 (%) II-56

Gambar II.34 Posisi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau tahun 2024 .....II-56

Gambar II.35 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2024 .....II-57

Gambar II.36 Ketimpangan Williamson Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 .....II-59

Gambar II.37 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Riil (Rp 000/Orang/Tahun) Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024 .....II-59

Gambar II.38 Posisi Capaian Pengeluaran Riil per Kapita (Rp 000/Kapita/Bulan) Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau Tahun 2024 .....II-60

Gambar II.39 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-61

Gambar II.40 Posisi Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .....II-61

Gambar II.41 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 .....II-62

Gambar II.42 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 2020-2024 .....II-63

Gambar II.43 Perkembangan Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-64

Gambar II.44 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Riau Tahun 2023 .....II-66

Gambar II.45 Prevalensi Stunting Balita Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023 .....II-67

Gambar II.46 Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Tahun 2024 .II-68

Gambar II.47 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-69

Gambar II.48 Posisi Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau Tahun 2024 .....II-69

Gambar II.49 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-70

Gambar II.50 Posisi Capaian Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau tahun 2024 .....II-71

Gambar II.51 Indek Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2024 II-72

Gambar II.52 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024.....II-73

Gambar II.53 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Menurut Unsur Penyusun Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2024.....II-74

Gambar II.54 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023.....II-77

Gambar II.55 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020–2023.....II-80

Gambar II.56 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....II-85

Gambar II.57 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....II-86

Gambar II.58 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah S1/S2/S3 .....II-88

Gambar II.59 Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Bengkalis (%) Tahun 2020-2024 .....II-93

Gambar II.60 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 (%) II-94

Gambar II.61 Posisi Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau tahun 2024.....II-94

Gambar II.62 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024.....II-96

Gambar II.63 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Riau Tahun 2019-2023 .....II-97

Gambar II.64 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 II-98

Gambar II.65 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-103

Gambar II.66 Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-103

Gambar II.67 Ekspor Kabupaten Bengkalis Menurut Negara Tujuan Tahun 2023 (Ribu US$).II-104

Gambar II.68 Jalan Kabupaten Bengkalis dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024 .....II-105

Gambar II.69 Panjang dan Persentase Jalan Kabupaten Bengkalis Dalam Kondisi Mantap Tahun 2021-2024.....II-106

Gambar II.70 Jumlah SPAM yang Berfungsi dan Tidak Berfungsi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 (Unit).....II-122

Gambar II.71 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024 .....II-127

Gambar II.72 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 – 2024.....II-129

Gambar II.73 Persentase Penegakan Perda Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-132

Gambar II.74 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-136

Gambar II.75 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-143

Gambar II.76 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.....II-145

Gambar II.77 Jumlah Kematian Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 .II-151

Gambar II.78 Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 (Ha).....II-166

Gambar II.79 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020.....II-185

Gambar II.80 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-191

Gambar II.81 Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-202

Gambar II.82 Organisasi Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Email Senapati dan Sertifikat Eletronik di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....II-202

Gambar II.83 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 .....II-208

Gambar II.84 Kawasan Hutan di Kabupaten Bengkalis.....II-211

Gambar II.85 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024...II-212

Gambar II.86 Perkembangan Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024.....II-214

Gambar III.1 Pentahapan Pembangunan Kabupaten Bengkalis.....III-15

Gambar III.2 Target Capai Indikator Makro RPJMN Terhadap Provinsi Riau Tahun 2025-2029III-39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-undang SPPN tersebut, mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 untuk periode masa jabatan 2025-2029 yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara memperhatikan Arah Kebijakan periode Pertama RPJPD Tahun 2025-2045 dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabuapaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya dan disertai dengan berbagai bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan terjalin sinergi antara perangkat daerah.

Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

a. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
c. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029 juga mempertimabangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, KLHS berperan sebagai pedoman dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan selaras dengan kebijakan nasional, termasuk dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029.

Dokumen RPJMD ini juga dirancang untuk mengintegrasikan berbagai kerangka peraturan lainnya dan area fokus substantif yang secara intrinsik terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sehingga memperkuat komitmen Kabuaten Bengkalis terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata di wilayah tersebut. Pendekatan holistik ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada tetapi juga memfasilitasi penyelarasan strategi pembangunan lokal dengan tujuan keberlanjutan nasional dan internasional yang lebih luas, yang pada akhirnya mendorong paradigma pembangunan komprehensif yang inklusif.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

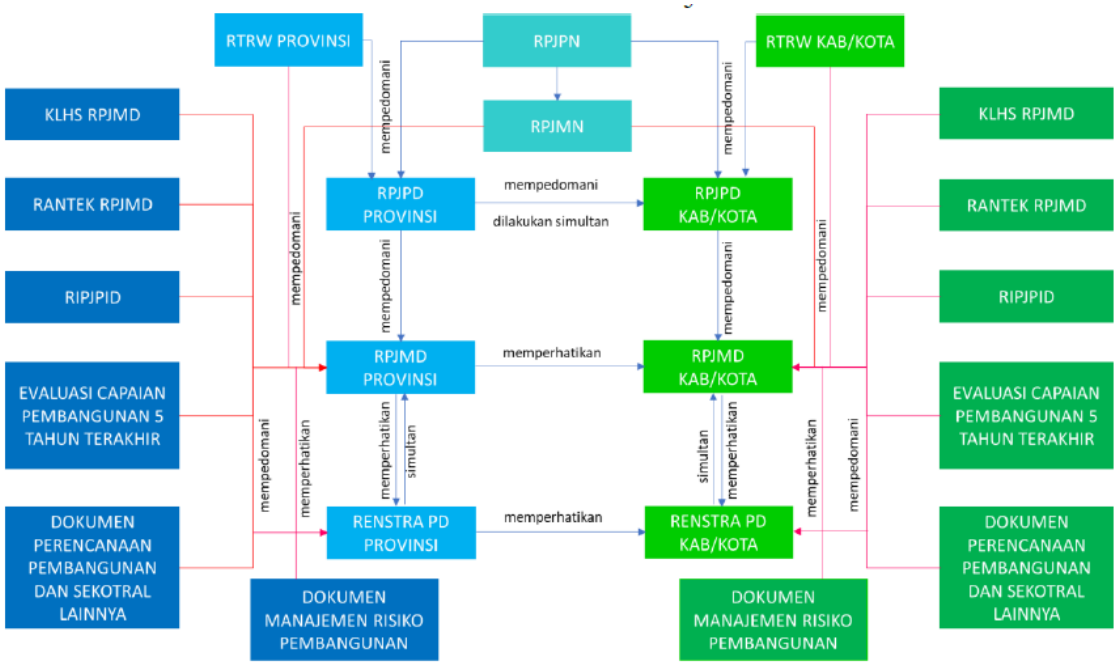
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor: 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Bengkalis 2025-2045.

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang didalamnya terdiri dari unsur-unsur perencanaan program dan penganggaran yang berkaitan dengan rencana strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis periode 2025-2029. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar I.1 Keterkaitan RPJMD didalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan

RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu dan selaras pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2045, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Secara struktural, RPJMD ini juga memedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis tahun 2022-2024, sebagai upaya untuk menjamin bahwa arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tetap selaras dan tidak bertentangan dengan arah kebijakan penataan ruang wilayah, serta memperhatikan berbagai dokumen teknis pendukung lainnya seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD), Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ PID) dan dokumen perencanaan sektoral lainnya, serta hasil evaluasi capaian pembangunan 5 Tahun Terakhir.

Dalam kerangka pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan masa depan, kebijakan perencanaan pembangunan dalam RPJMD disusun secara berbasis bukti, yaitu berlandaskan pada hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh seluruh unsur kelembagaan, sumber daya, dan jejaring iptek yang dibangun oleh pemerintah daerah, baik di lingkup daerah, antar-daerah, maupun nasional. RIPJPID menjadi dokumen perencanaan yang sistemik, komprehensif, dan partisipatif, yang memuat peran strategis

ilmu pengetahuan, teknologi, serta riset dan inovasi dalam menjawab permasalahan prioritas pembangunan daerah. Peta jalan pelaksanaan program riset dan inovasi yang tercantum dalam RIPJPID diintegrasikan secara langsung ke dalam strategi, arah kebijakan tahunan, dan program prioritas RPJMD, sehingga memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis bukti dan berorientasi pada kebermanfaatan nyata bagi masyarakat.

Sebagai dokumen utama perencanaan menengah daerah, RPJMD menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra tersebut menjabarkan program dan kegiatan secara operasional untuk setiap urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan arah kebijakan RPJMD dan struktur kelembagaan masing-masing perangkat daerah.

Lebih lanjut, pelaksanaan RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta perumusan usulan prioritas pembangunan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen strategis pembangunan jangka menengah, tetapi juga berperan sebagai simpul integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar dokumen sektoral, spasial, lingkungan, dan indikator kinerja pembangunan lainnya, sebagaimana digambarkan dalam skema sistematika perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi guna mendukung penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025- 2029. Sementara itu, tujuan penyusunan RPJMD ini adalah:

1) Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Bengkalis lima tahun terakhir baik berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah maupun analisis gambaran umum keuangan daerah.
2) Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah provinsi selama 5 (lima) tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan Daerah.
3) Menelaah Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045 tahap Pertama.
4) Merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah.

1.5 Sistematika penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud

	dan tujuan, dan sistematika penulisan.
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah	berisi tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayananumum, dan aspek daya saing daerah. kinerja keuangan masa lalu; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan kerangka pendanaan serta permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
Bab III Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	berisi visi, penjelasan unsur visi, misi, tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
Bab IV Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Perangkat Daerah	berisi tentang program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Serta indikator kinerja utama, dan indikator kinerja daerah.
Bab V Penutup	Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

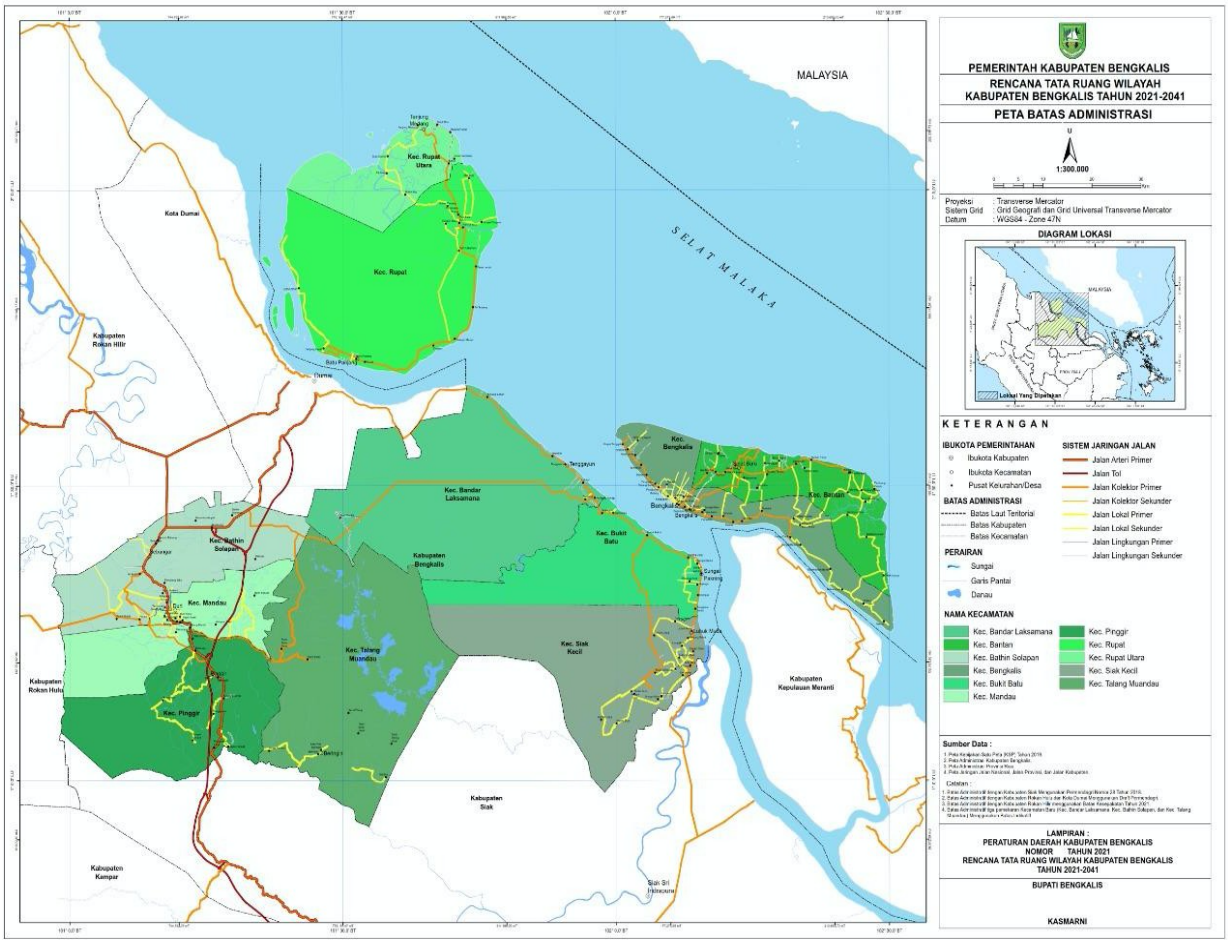
2.1 Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera dengan luas wilayah semula 30.646,843 Km. dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka luas wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi 11.481,77 Km dengan jumlah Kecamatan sebanyak 13 Kecamatan. Selanjutnya pada Tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis menjadi 8 (Delapan) Kecamatan dengan luas wilayah 7.773,93 Km2. Terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatan sebanyak 16 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Bengkalis menurut data dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis memiliki luas 8.628,07 Km^2, yang terdiri dari kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan lepas pantai. Terdapat dua pulau utama di samping pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pulau Bengkalis merupakan pulau utama tempat pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Sementara pusat perekonomian penduduk sebagian besar berada di daratan bagian timur Pulau Sumatera dimana terdapat 7 dari 11 kecamatan yang berlokasi di daratan tersebut. Pulau utama lainnya adalah pulau Rupat yang menjadi destinasi wisata penting di Kabupaten Bengkalis. Berikut adalah peta administrasi Kabupaten Bengkalis.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Gambar II.1 Administratif Kabupaten Bengkalis

Secara administrasi Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 155 Desa. Adapun (11) sebelas kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupat dan Rupat Utara terletak di Pulau Rupat, Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, dan Bandar Laksamana di pesisir Pulau Sumatera, serta Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau yang terletak di daratan Pulau Sumatera. Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut.

Tabel II.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Hektare)	Persentase Luas Wilayah (%)
1	Bengkalis	Bengkalis Kota	3	28	44.010	5,38
2	Bantan	Selat Baru	-	23	46.128	5,14
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	1	9	59.744	6,94
4	Bandar Laksamana	Tenggayun	-	7	130.145	15,11
5	Siak Kecil	Lubuk Muda	-	17	94.750	10,99
6	Mandau	Air Jamban	9	2	51.706	6
7	BathinSolapan	Sebangar	-	13	67.371	7,81

No	Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Hektare)	Persentase Luas Wilayah (%)
8	Pinggir	Pinggir	2	8	77.442	8,98
9	Talang Muandau	Beringin	-	9	137.874	15,99
10	Rupat	Batu Panjang	4	12	114.372	13,27
11	Rupat Utara	Tanjung Medang	-	8	37.714	4,39
Kabupaten Bengkalis			19	136	861.256	100

Sumber: RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 – 2042

Jika dirinci luas wilayah kecamatan dan dibandingkan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Talang Muandau merupakan kecamatan terluas, yaitu 137.874 Ha (15,99%) dan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Rupat Utara dengan luas 37.714 Ha (4,39%).

A. Luas dan Kondisi Geografis

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi 100°57'57,6" – 102°30'25,2" Bujur Timur dan 2°7'37,2" - 0°55'33,6" Lintang Utara. Sedangkan secara geografis wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis berada bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur.

Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dengan luas total daratan dan perairan sekelilingnya 907,33 Km^2 dan Pulau Rupat yang terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dengan luas daratan dan perairan sekelilingnya 1.523,70 Km^2. Pulau Rupat memiliki 15 buah pulau-pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik yang merupakan endapan-endapan geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya.

Kawasan geografis pesisir Kabupaten Bengkalis terdiri terdiri dari Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas daratan dan perairan 2.850,53 Km^2. Kawasan tersebut berada di perairan Selat Pakning yang menghubungkan Pulau Bengkalis dan Pulau Merbau (Kabupaten Kepulauan Meranti). Sedangkan kawasan geografis daratan terdiri dari Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau yang merupakan bentangan tengah dan timur yang terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi elevasi daratan yang bergelombang dengan luas total daratan 3.346,51 Km^2.

Letak Kabupaten Bengkalis dipandang strategis dimana dua pulaunya terletak berdekatan dengan Negara Malaysia dan Jalur Pelayaran Internasional menjadikan posisi Kabupaten Bengkalis sangat strategis. Waktu tempuh dari dari dua pulau yang berdekatan dengan Selat Malaka kebeberapa kota di pesisir barat Semenanjung Malaysia cukup singkat. Jarak tempuh antara Desa Tanjung Medang Ibukota Kecamatan Rupat Utara di Pulau Rupat ke Kota Port Dickson yang berjarak 48,5 km dengan waktu tempuh ± 45 menit melalui Selat Malaka, sedangkan ke Kota Malaka yang berjarak 67 Km dari Tanjung Medang dapat ditempuh ± 1,5 jam. Sementara jika melayari Selat Malaka dari Pelabuhan Feri yang

berlokasi di Desa Selat Baru Ibukota Kecamatan Bantan Pulau Bengkalis menuju Kota Malaka yang berjarak 75 Km dapat memakan waktu ± 1,5 jam, Kota Muar adalah kota terdekat dari Pulau Bengkalis hanya berjarak 62 Km dengan waktu tempuh pelayaran selama ± 45 menit, sedangkan untuk mencapai Kota Batu Pahat yang berjarak 76 Km dari Pulau Bengkalis dapat ditempuh dalam waktu ± 1 jam.

Posisi ini menempatkan Kabupaten Bengkalis dalam kawasan yang sangat strategis berada di tepi alur Pelayaran Internasional yang paling sibuk di dunia melalui Selat Malaka, berada pada kawasan segitiga pertumbuhan Ekonomi Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle (IMT-GT), program Indonesia Malaysia Singapore-Growth Triangle (IMS-GT) serta Dunia Melayu Dunia Islam

B. Topografi

Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2 - 6 mdpl. Sebagian besar wilayah daratan berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0 - 3 mdpl, yaitu mencakup 71% dari luas wilayah atau sekitar dengan 551.949 Ha, kecuali pada sebagian kecil di wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3-8 mdpl yang mencakup sekitar 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 Ha. Sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki kemiringan antara 8 - 16 mdpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 Ha dan wilayah dengan kemiringan >16 mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakup 8% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 Ha.

Wilayah daratan Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan berada pada letak wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan pada pulau dan pesisir. Wilayah Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Mandau merupakan dua kecamatan dengan wilayah tertinggi, yaitu mencapai 55 mdpl. Sedangkan wilayah Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bengkalis dan Bantan merupakan wilayah terendah dengan tinggi hanya 5 mdpl. Wilayah pesisir yang lebih rendah cenderung rentan terdampak banjir dan abrasi dibanding daerah yang lebih tinggi. Ancaman abrasi terbesar dihadapi oleh Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. Selain berhadapat langsung dengan laut terbuka, yaitu Selat Melaka dengan bangkitan angin yang cukup kencang yang menghasilkan gelombang laut yang cukup besar dan tinggi . Selain itu, kondisi mangrove dan ekosistem pantai yang mulai rusak menjadi penyebab abrasi yang semakin mengancam pada kedua pulau tersebut. Secara rinci ketinggian wilayah dan jarak ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten disajikan pada Tabel II-2 berikut ini.

Tabel II.2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibu kota Kabupaten (Km)
1	Mandau	55	103
2	Pinggir	45	100
3	Bathin Solapan	55	106
4	Talang Muandau	45	90

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibu kota Kabupaten (Km)
5	Bukit Batu	6	15
6	Siak Kecil	6	25
7	Bandar Laksamana	6	24
8	Rupat	5	71
9	Rupat Utara	5	86
10	Bengkalis	5	-
11	Bantan	5	15

Sumber: RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 - 2042

Fisiografi wilayah Kabupaten Bengkalis pada umumnya terbagi pada dua klasifikasi, yaitu fisiograsi cekungan rawa dan fisografi daratar, dengan karakteristik sebagai berikut:

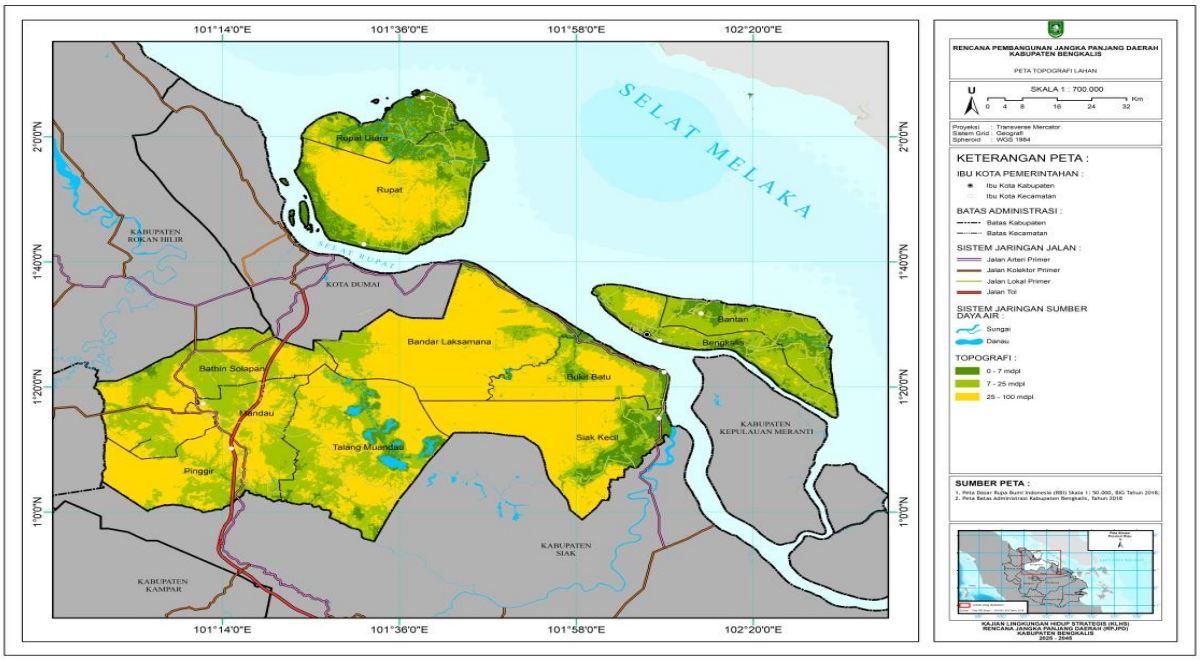
1. **Cekungan Rawa**

   Daerah ini dijumpai di bagian tengah, berupa cekungan tertutup yang terdiri dari rawa gambut yang berasal dari bahan endapan aluvial. Bentuk wilayah datar sampai cekung (0- 3 mdpl) dengan bentukan drainase alam yang jelek. Daerah ini mencakup 71% dari luas kabupaten yang tersebar di Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil.

2. **Dataran**

   Fisiografi ini berasal dari endapan aluvial mencapai 21% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah pada unit fisiografi ini adalah bergelombang sampai berombak (3-18 mdpl) dengan bentukan drainase sedang sampai baik. Disamping yang terbentuk dari endapan aluvial, bentuk dataran ini juga berasal dari sabuk meander dan teras laut tua. Bentuk wilayah ini terdapat pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau, Pinggir dan sedikit di Kecamatan Bukit Batu.

Uraian di atas menunjukkan wilayah Kabupaten Bengkalis didominasi oleh kelompok kubah gambut dan kelompok marin. Kelompok kubah gambut berkembang dari endapan organik dan semakin tebal jika semakin jauh dari pantai. Gambut yang dipengaruhi oleh air laut mempunyai potensi asam sulfat tinggi. Sedangkan kelompok marin berkembang dari endapan mineral yang dipengaruhi pasang surut air laut dan mempunyai lebar bervariasi antara 0,5-5 km.



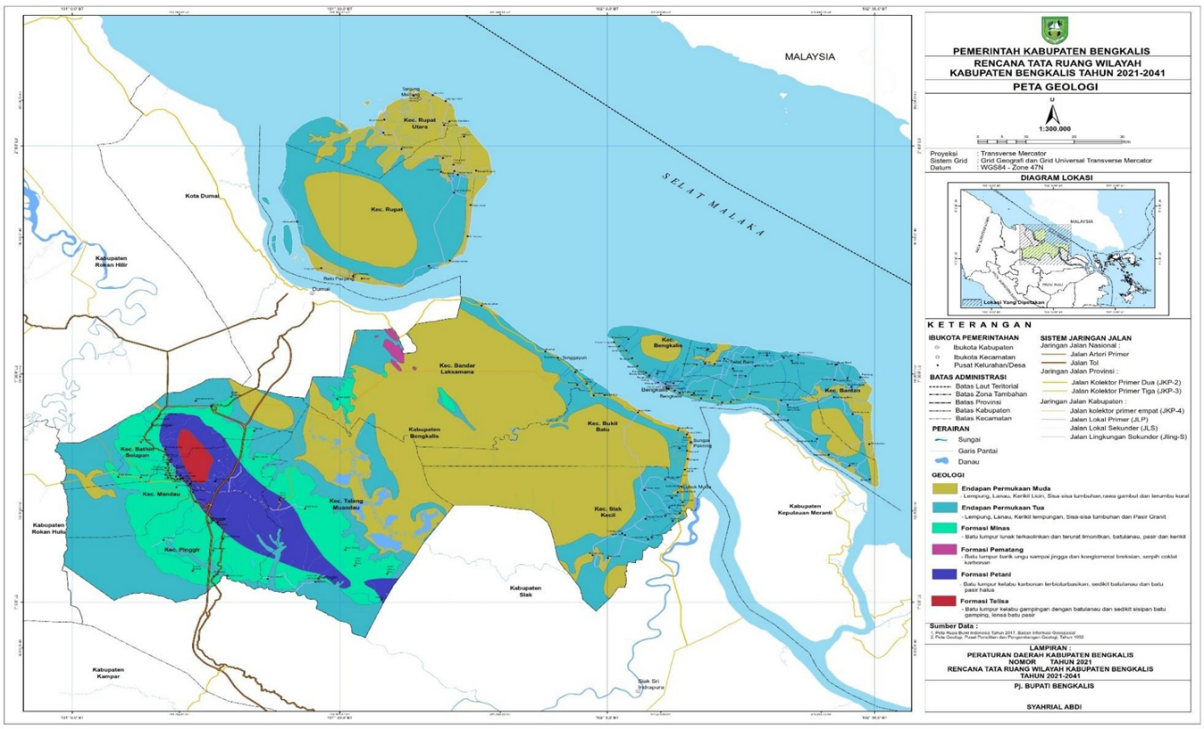
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bengkalis 2025-2045

Gambar II.2 Peta Topografi Kabupaten Bengkalis

C. Geologi

Pembentukan geologi wilayah Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari sejarah pembentukan geologi Pulau Sumatera pada masa ratusan juta tahun yang lalu, dimana sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu dan Siak Kecil berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera yang terbentuk dari endapan gambut masa lalu sebagai akibat dari erosi besar pada bagian hulu sungai- sungai besar di Pulau Sumatera dimana semakin ke muara endapan yang terbawa semakin besar mengendap sehingga di beberapa bagian timur pesisir Pulau Sumatera (terutama yang masuk pada bagian cekungan tengah) telah membentuk formasi endapan gambut pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya yang diantaranya membentuk Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.

Secara umum kondisi geologi wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari tiga formasi yaitu: formasi petani (Tup), formasi telisa (TMT) dan formasi pematang (TLpe). Formasi petani disebut sebagai lapisan palembang tengah dan bawah, sedangkan kuarter terdiri dari formasi minas (Qpmi), endapan permukaan muda (Qh) dan endapan permukaan tua (Qp). Aluvium tua umumnya merupakan bagian kering yang terdapat di Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bukit Batu. Sedangkan aluvium muda menempati cekungan atau daerah belakang pantai yang berawa dan alur-alur pasang surut yang terdapat di Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. Khusus Kecamatan Mandau dan Pinggir terletak dalam struktur tersier dan cekungan deposit yang sering disebut sebagai cekungan Sumatera Tengah dimana endapan dan cekungan ini terdiri atas lapisan yang tebal di antara deposit minyak bumi dan batu-batuan. Untuk lebih jelasnya geologi tanah di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat apda gambar dibawah ini:



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

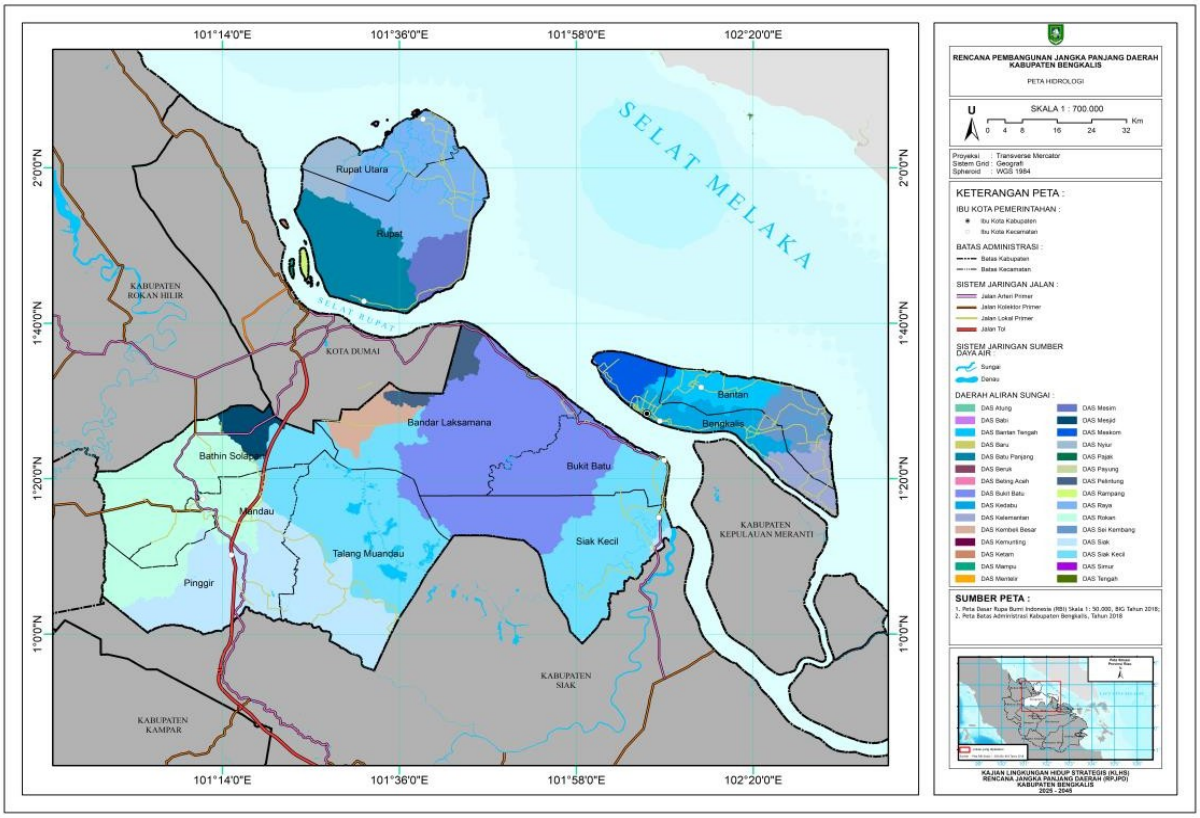
Gambar II.3 Peta Geologi Kabupaten Bengkalis

D. Hidrologi

Kabupaten Bengkalis memiliki dua belas aliran sungai yang berada di Kecamatan Rupat, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bukit Batu. Kedua belas aliran sungai tersebut adalah: Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Senebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Sair, Sungai Penonton, Sungai Jangkang, Sungai Bantan Tengah dan Sungai Kembung Luar. Diantara sungai yang ada di Kabupaten Bengkalis yang sangat penting peranannya sebagai prasarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah aliran Sungai Siak dan Siak Kecil dengan panjang ± 90 Km.

Beberapa sungai yang mencirikan kondisi hidrologi daerah rawa diantaranya adalah Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Penebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Suir, Sungai Penonton, Sungai Jangkang dan Sungai Bantan Tengah. Sungai-sungai tersebut dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sehingga intrusi air laut tersebut berpotensi menyebabkan kualitas air tanah di wilayah ini bersifat payau/asin dengan salinitas sedang sampai tinggi.

Keadaan drainase wilayah sebagian besar dicirikan oleh adanya tanah gambut yang tersebar di Kecamatan Bukit Batu, Mandau dan Rupat. Pada beberapa bagian wilayah banyak yang masih mengalami genangan, terjadi di Kecamatan Rupat dan Mandau. Keberadaan lahan gambut yang mendominasi wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan kantong-kantong penyimpanan air yang sangat besar. Pada gambar berikut dapat dilihat Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bengkalis.



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045

Gambar II.4 Peta Hidrologi Kabupaten Bengkalis

E. Klimatologi

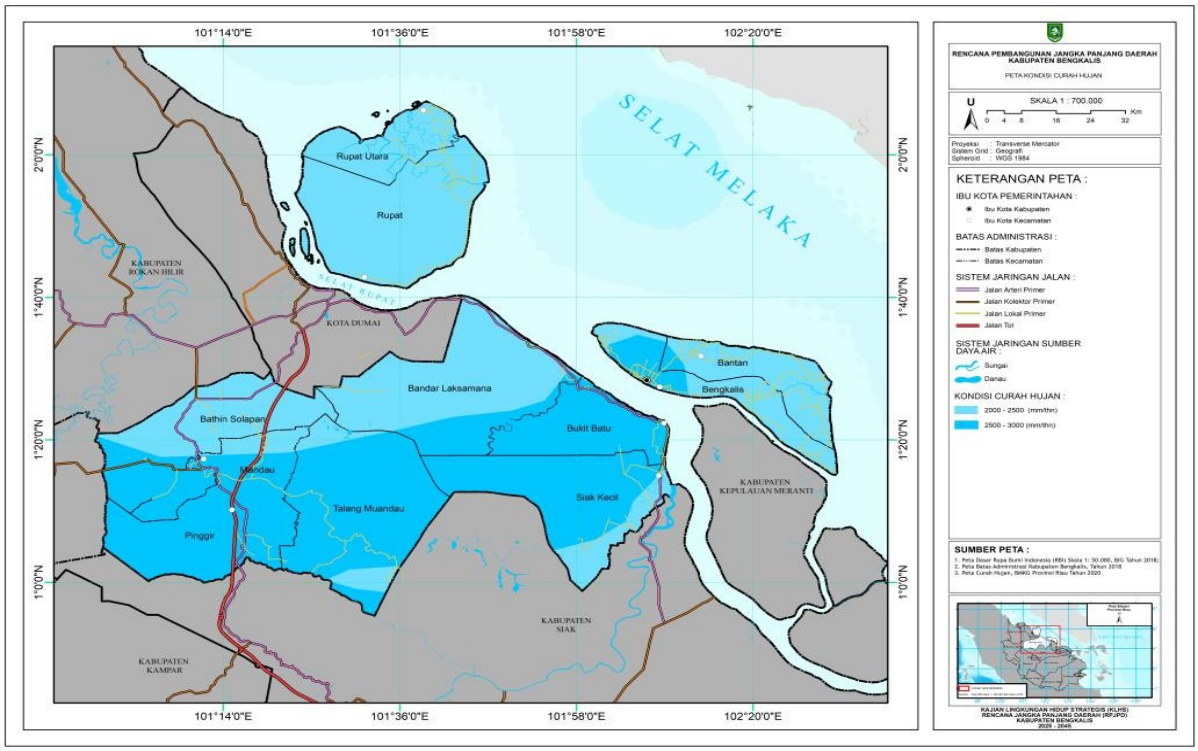
Wilayah Kabupaten Bengkalis secara umum memiliki iklim Tropis yang sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut dan temperatur berkisar 26oC-34oC serta kelembaban rata- rata berkisar antara 75% - 85%. Musim hujan biasa terjadi pada bulan Agustus- Desember. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan januari hingga bulan juli. Lebih rinci kondisi iklim Kabupaten Bengkalis disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.3 Kondisi Curah Hujan, Kelembaban dan Suhu Kabupaten Bengkalis 2023

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)	Suhu			Kelembaban		
			Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
Januari	61	8	22,8	26,5	32,4	62	84	97
Februari	207	16	23,2	26,5	32,4	66	75	98
Maret	190	10	23,3	27,4	33,3	60	82	98
April	200	20	23,5	26,2	33,4	66	83	98
Mei	239	10	23,8	27,7	33,8	62	78	97
Juni	159	17	22,9	26,2	31,8	67	82	97
Juli	123	9	23,3	27,2	33,2	64	85	98
Agustus	180	21	23,2	26,7	31,8	69	79	97
September	108	20	23,3	26,6	32,4	64	82	97
Oktober	360	22	22,4	26,5	32,4	66	83	98
November	175	24	23,7	26,5	30,5	68	80	97
Desember	252	20	23,1	26,5	31,5	67	82	98
Rata-rata	187,83	16,42	23,2	26,71	32,4	65,08	81,21	97,46
Maksimal	239	24	23,8	27,7	33,8	69	84	98

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)	Suhu			Kelembaban		
			Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
Minimal	61	8	22,4	26,2	31,5	62	75	97

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2024



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045

Gambar II.5 Peta Klimatologi Kabupaten Bengkalis

F. Penggunaan Lahan

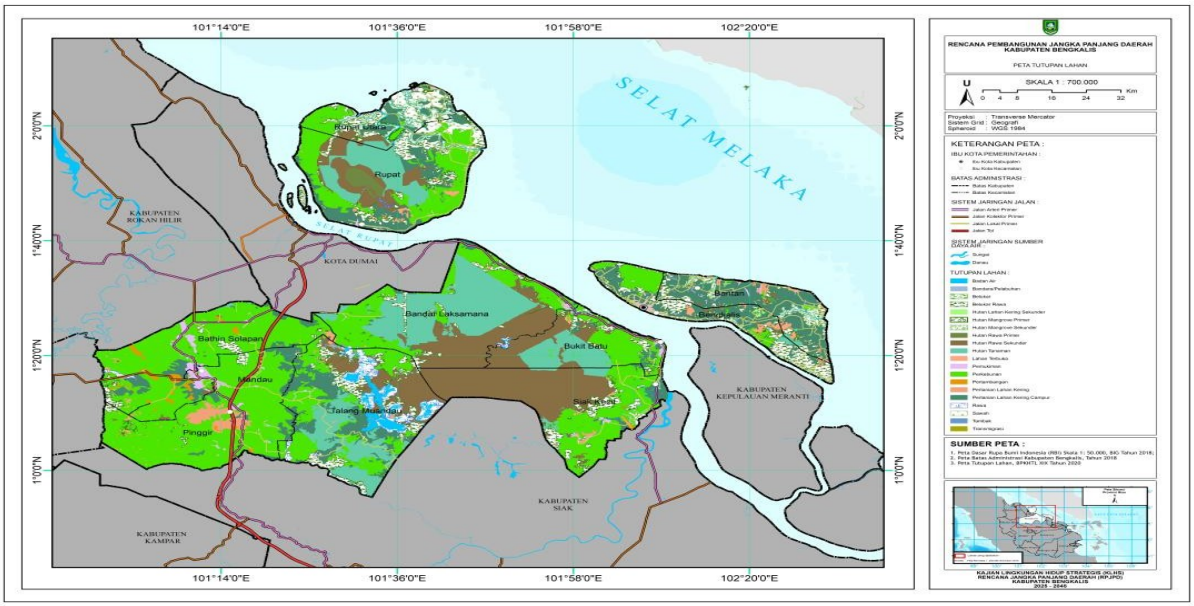
Pola tutupan lahan atau penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bengkalis dihasilkan dari hasil penafsiran data citra satelit secara manual (digitasi on-screen) menggunakan Landsat 8 OLI & dan Landsat 7 ETM + skala 1:250.000 menggunakan Peta Penutup Lahan Kementerian LHK Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Dit. IPSDH) tahun 2018.

Tabel II.4 Sebaran Tutupan Lahan Kabupaten Bengkalis

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	397,26	0,05%
2	Hutan mangrove primer	1.936,74	0,22%
3	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	24.332,01	2,81%
4	Hutan rawa primer	4.157,33	0,48%
5	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	132.399,51	15,28%
6	Hutan tanaman	111.863,17	12,91%
7	Lahan terbuka	2.272,98	0,26%
8	Perkebunan / Kebun	286.877,08	33,12%
9	Permukiman / Lahan terbangun	8.567,53	0,99%
10	Pertambangan	5.609,89	0,65%
11	Pertanian lahan kering	14.876,19	1,72%

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
12	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	149.771,37	17,29%
13	Rawa	13.371,44	1,54%
14	Sawah	12.184,14	1,41%
15	Semak belukar	147,48	0,02%
16	Semak belukar rawa	94.504,85	10,91%
17	Tambak	256,63	0,03%
18	Tubuh air	2.692,39	0,31%
Total		**866.218,00**	**100%**

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045



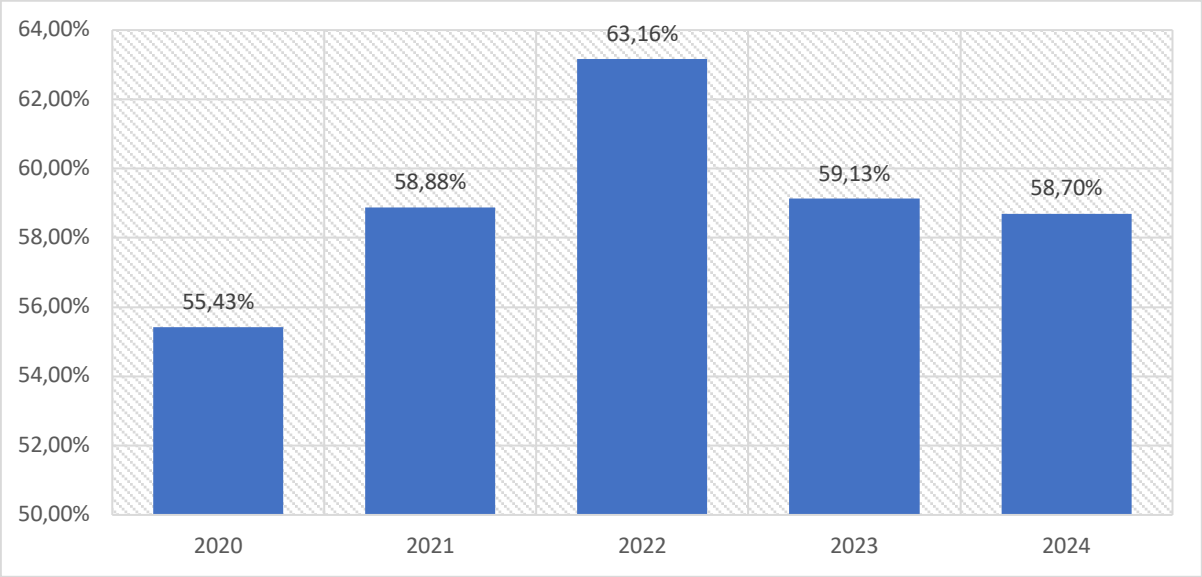
Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045

Gambar II.6 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Bengkalis

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

A. Sektor Minyak dan Gas

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi sektor minyak dan gas yang sangat besar dengan kontribusi sebesar 58,70% dari total PDRB pada tahun 2024. Ladang minyak Kabupaten Bengkalis berada dilapangan duri yang masuk dalam Wilayah Kerja (WK) Rokan pernah menjadi blok penghasil minyak terbesar di Indonesa yang mencapai 159,5 MBOPD atau setara dengan 24% terhadap produksi minyak nasional pada tahun 2021. Selama lebih dari enam dekade, WK Rokan merupakan salah satu penyumbang terbesar produksi minyak nasional. Selain itu, WK Rokan merupakan WK Migas paling produktif sepanjang sejarah perminyakan Indonesia yang memiliki lebih dari 11 ribu sumur aktif.



Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.7 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Dua lapangan paling produktif adalah Lapangan Minas dan Lapangan Duri, yang tercatat sebagai Lapangan terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 2,7 miliar barel minyak telah disumbangkan Lapangan Duri untuk produksi migas nasional. Lapangan duri diperkirakan menyumbang sebanyak 35% dari total produksi minyak di WK Rokan. Hingga tahun 2030 WK Rokan ditargetkan mencapi produksi 1 juta BOPD pada tahun 2030.

B. Pertanian

1. Tanaman Padi dan Palawija

Luas panen tanaman padi dan palawija di Kabupaten Bengkalis berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Bengkalis tahun 2024 menunjukkan komoditas hortikultura khususnya tanaman sayuran, kegiatan budidaya telah tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan. Berdasarkan rekapitulasi luas tanam, luas panen, dan produksi tanaman sayuran tahun 2024, tercatat luas tanam mencapai 934,30 hektar, luas panen 917,75 hektar, dengan total produksi sebesar 8.998,75 ton. Komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total produksi sayuran adalah kangkung sebesar 1.518,80 ton, cabai rawit sebesar 1.266,98 ton, dan bayam sebesar 1.142,18 ton. Ketiga komoditas tersebut menjadi indikator penting bagi peningkatan diversifikasi pangan lokal.

Meskipun sektor hortikultura belum menjadi perhatian utama bagi sebagian besar petani, tren permintaan terhadap komoditas sayuran dan buah-buahan terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai gizi dan vitamin dari produk hortikultura, serta perbaikan daya beli masyarakat seiring pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, kapasitas produksi daerah masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih cukup tinggi.

Ke depan, arah pengembangan subsektor hortikultura di Kabupaten Bengkalis perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, pengembangan kawasan hortikultura terpadu, serta perbaikan sistem distribusi dan rantai pasok. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan. Perkembangan luas tanam, panen dan produksi tanaman sayuran tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah:

Tabel II.5 Rekapitulasi Luas Tanam, Luas Panen Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Jenis Sayuran	Luas Tanam / Luas Pertanaman (Ha)	Luas Panen / Tanaman yang menghasilkan (Ha)	Produksi Ton/Kg
1	Bawang Merah	1,00	1,00	40,00
2	Petsai / Sawi	74,53	74,61	597,32
3	Bayam	141,85	145,10	1142,18
4	Cabai Besar/TW/Teropong	71,00	55,65	586,40
5	Cabai Keriting	80,80	79,64	763,55
6	Cabai Rawit	124,92	128,03	1266,98
7	Jamur Tiram *)	0,00	0,00	0,00
8	Kacang Panjang	64,74	72,17	704,28
9	Kangkung	177,91	180,18	1518,80
10	Mentimun	68,55	68,68	1044,60
11	Terung	37,57	34,32	348,70
12	Tomat	7,53	7,37	130,94
13	Melon	2,70	2,00	20,00
14	Semangka	81,20	69,00	835,00
Jumlah		**934,30**	**917,75**	**8.998,75**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Bengkalis, 2025

Selanjutnya luas panen tanaman pangan utama di Kabupaten Bengkalis tercatat mencapai 3.797,80 hektar dengan total produksi sebesar 24.625,34 ton. Komoditas padi masih menjadi yang dominan dengan luas panen 3.345,80 hektar dan produksi 14.353,60 ton, disusul oleh ubi kayu dengan luas panen 364,20 hektar dan produksi 9.786,50 ton. Sementara itu, jagung dan ubi jalar memberikan kontribusi yang lebih kecil dengan masing-masing produksi sebesar 246,17 ton dan 239,07 ton. Data ini menunjukkan bahwa subsektor tanaman pangan di Kabupaten Bengkalis masih sangat bergantung pada komoditas padi sebagai penopang utama ketahanan pangan daerah, sedangkan komoditas umbi-umbian mulai menunjukkan potensi yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut.

Secara spasial, Kecamatan Siak Kecil merupakan wilayah dengan produksi tertinggi, yaitu 8.811,93 ton, didominasi oleh komoditas padi yang mencapai 8.170,30 ton, diikuti oleh Kecamatan Pinggir dengan produksi 4.073,35 ton, terutama dari komoditas ubi kayu, serta Kecamatan Mandau dengan total produksi 3.427,46 ton. Ketiga kecamatan tersebut menjadi wilayah dengan produksi tanaman pangan tertinggi di Kabupaten Bengkalis. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengembangan tanaman pangan di daerah masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah dengan dukungan lahan pertanian yang luas dan infrastruktur irigasi

yang relatif baik. Ke depan, penguatan sektor tanaman pangan perlu diarahkan pada optimalisasi produktivitas lahan, diversifikasi komoditas berbasis potensi lokal, serta penguatan kelembagaan petani guna mendukung kemandirian dan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Potensi Pengembangan Produksi Pertanian di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.6 Data Potensi Pengembangan Produksi Pertanian di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Tanaman (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Bengkalis			
	- Padi	15,0	15	64,4
	- Jagung	5,6	6,4	22,9
	- Ubi Jalar	0,0	0	0
	- Ubi Kayu	8,1	8,1	217,7
	Jumlah	28,7	29,5	305,0
2	Bantan			
	- Padi	515,00	515,0	2209,4
	- Jagung	0,00	0,00	0,00
	- Ubi Jalar	0,00	0,6	7,6
	- Ubi Kayu	19,10	26,5	712,1
	Jumlah	534,1	542,1	2.929,05
3	Siak Kecil			
	- Padi	2266,5	1904,5	8.170,30
	- Jagung	41,0	39,0	139,54
	- Ubi Jalar	10,0	10,0	125,89
	- Ubi Kayu	14,0	14,0	376,2
	Jumlah	2.331,5	1.967,5	8.811,93
4	Bukit Batu			
	- Padi	157,0	128,5	551,3
	- Jagung	0,00	0,00	0,00
	- Ubi Jalar	0,6	1,7	21,40
	- Ubi Kayu	2,0	6,8	182,7
	Jumlah	159,6	137	755,4
5	Bandar Laksamana			
	- Padi	95,0	94,0	403,3
	- Jagung	0,00	0,00	0,00
	- Ubi Jalar	0,00	0,00	0,00
	- Ubi Kayu	0,6	1,0	26,9
	Jumlah	95,6	95	430,2
6	Rupat			
	- Padi	84,0	87,0	373,2
	- Jagung	0,00	0,00	0,00
	- Ubi Jalar	1,2	1,2	14,98
	- Ubi Kayu	45,1	44,0	1.182,1
	Jumlah	130,3	132,2	1.570,28
7	Rupat Utara			
	- Padi	1,0	1,0	4,3
	- Jagung	0,00	0,00	0,00
	- Ubi Jalar	0,00	0,00	0,00
	- Ubi Kayu	1,3	3,2	86,0
	Jumlah	2,3	4,2	90,3

No	Kecamatan	Luas Tanaman (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
8	Mandau			
	- Padi	321,3	327,3	1.404,1
	- Jagung	3,0	2,0	7,16
	- Ubi Jalar	2,2	2,2	27,70
	- Ubi Kayu	72,0	74,0	1.988,5
	Jumlah	398,5	405,5	3.427,46
9	Bathin Solapan			
	- Padi	24,0	36,5	156,6
	- Jagung	0,4	0,4	1,43
	- Ubi Jalar	2,8	2,1	26,44
	- Ubi Kayu	47,2	63,8	1.714,4
	Jumlah	74,4	102,8	1.898,87
10	Pinggir			
	- Padi	134,0	187,0	802,2
	- Jagung	16,5	20,5	73,35
	- Ubi Jalar	0,00	0,00	0,00
	- Ubi Kayu	100,0	119,0	3.197,8
	Jumlah	250,5	326,5	4.073,35
11	Talang Muandau			
	- Padi	80,0	50,0	214,5
	- Jagung	2,0	0,5	1,79
	- Ubi Jalar	1,5	1,2	15,11
	- Ubi Kayu	3,5	3,8	102,1
	Jumlah	87	55,5	333,5
	TOTAL - PADI	**3.692,80**	**3.345,80**	**14.353,60**
	TOTAL - JAGUNG	**68,50**	**68,80**	**246,17**
	TOTAL - UBI JALAR	**18,30**	**19,00**	**239,07**
	TOTAL - UBI KAYU	**312,90**	**364,20**	**9.786,50**
	TOTAL	**4.092,50**	**3.797,80**	**24.625,34**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Bengkalis, 2024

2. Peternakan

Pembangunan sub-sektor peternakan di Kabupaten Bengkalis memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Seiring meningkatnya jumlah penduduk serta pendapatan per kapita, pola konsumsi masyarakat menunjukkan pergeseran dari dominasi karbohidrat menuju konsumsi produk hewani seperti daging dan telur. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, populasi ternak besar dan kecil terdiri atas 16.229 ekor sapi, 435 ekor kerbau, 36.584 ekor kambing, 106 ekor kambing perah, 765 ekor domba, 4.140 ekor babi, dan 5 ekor kuda. Angka ini menunjukkan bahwa sapi dan kambing masih menjadi komoditas utama penyumbang produksi daging, sedangkan ternak babi dan domba hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan populasi ternak di wilayah ini.

Tabel II.7 Rekapitulasi Ternak Besar di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Kambing Perah	Domba	Babi	Kuda
1	Bantan	751	0	15.921	0	0	0	0

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Kambing Perah	Domba	Babi	Kuda
2	Bengkalis	916	10	7.946	0	0	995	0
3	Bukit Batu	1.196	9	1.297	0	158	0	0
4	Siak Kecil	3.493	102	2.675	0	4	0	0
5	Bandar Laksamana	2.385	0	2.310	0	0	0	0
6	Bathin Solapan	1.158	182	1.068	106	145	941	0
7	Mandau	681	7	223	0	0	686	0
8	Pinggir	1.031	109	477	0	231	241	0
9	Talang Muandau	1.327	0	873	0	67	0	0
10	Rupat	2.806	16	2.004	0	0	877	0
11	Rupat Utara	485	0	1.790	0	160	400	5
JUMLAH		**16.229**	**435**	**36.584**	**106**	**765**	**4.140**	**5**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Bengkalis, 2025

Sementara itu, untuk jenis ternak unggas, jumlah populasi pada tahun 2024 mencapai 188.865 ekor ayam buras, 189.609 ekor ayam ras pedaging, 6.208 ekor itik, 12.749 ekor itik manila, 75 ekor merpati, dan 750 ekor puyuh. Berdasarkan distribusi wilayah, populasi ayam buras tertinggi terdapat di Kecamatan Siak Kecil sebanyak 84.176 ekor, disusul oleh Kecamatan Pinggir dengan 32.900 ekor, sedangkan ayam ras pedaging terkonsentrasi di Kecamatan Mandau sebanyak 134.000 ekor. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan ternak unggas di Kabupaten Bengkalis cukup potensial dan tersebar di wilayah-wilayah dengan akses pasar dan infrastruktur peternakan yang memadai. Ke depan, arah pengembangan sub-sektor peternakan di Kabupaten Bengkalis perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas ternak ruminansia dan unggas, penguatan kelembagaan peternak, serta pengembangan industri hilir berbasis hasil peternakan guna meningkatkan nilai tambah dan kemandirian pangan hewani daerah secara berkelanjutan.

Tabel II.8 Rekapitulasi Ternak Unggas di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik	Itik Manila	Merpati	Puyuh
1	Bantan	0	0	0	0	0	0
2	Bengkalis	13.460	0	0	1.615	0	0
3	Bukit Batu	4.745	0	3.838	0	0	0
4	Siak Kecil	84.176	0	0	8.925	0	0
5	Bandar Laksamana	14.982	0	0	0	0	0
6	Bathin Solapan	891	8.609	472	606	0	0
7	Mandau	858	134.000	135	0	0	0
8	Pinggir	32.900	47.000	245	300	75	750
9	Talang Muandau	6.246	0	1.240	1.303	0	0
10	Rupat	28.569	0	0	0	0	0
11	Rupat Utara	2.038	0	278	0	0	0
JUMLAH		**188.865**	**189.609**	**6.208**	**12.749**	**75**	**750**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Bengkalis, 2025

C. Perkebunan

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi di sektor perkebunan yaitu perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet dan kelapa. Sektor perkebunan ini sebagian besar dikuasai oleh perkebunan masyarakat. Besarnya potensi perkebunan di Kabupaten Bengkalis belum dioptimalkan dengan baik. Berikut disajikan potensi perkebunan di Kabupaten Bengkalis, yaitu:

Tabel II.9 Potensi Kelapa Sawit, Karet dan Kelapa Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

KOMODITAS UNGGULAN	2020		2021		2022		2023		2024	
	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)
KELAPA SAWIT	262.291,89	142.830,70	238.664,29	130.547,70	238.507,59	130.657,70	558.101,49	283.881,24	647.058,25	283.033,88
KARET	19.141,57	31.440,70	20.807,51	32.038,70	20.822,82	32.084,20	21.014,31	32.075,20	21.002,00	32.065,20
KELAPA	4.062,34	6.080,45	4.180,47	6.080,45	3.277,11	6.080,45	3.306,85	6.096,55	3.363,76	6.091,55

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Bengkalis, 2024

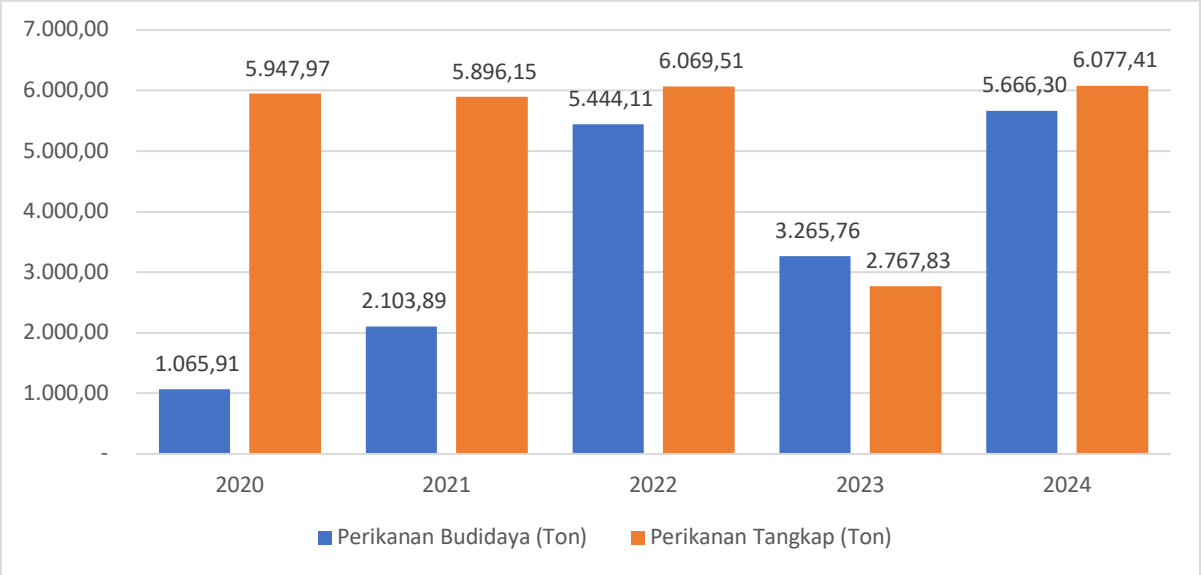
Potensi terbesar pada subsektor perkebunan di Kabupaten Bengkalis dari komoditas kelapa sawit. Pada tahun 2020, luas areal perkebunan kelapa sawit tercatat sebesar 142.830,70 hektare dengan total produksi mencapai 262.291,89 ton. Selama periode 2020–2024, luas areal dan produksi kelapa sawit mengalami fluktuasi, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 283.033,88 hektare dengan produksi sebesar 647.058,25 ton.

Sementara itu, komoditas karet menunjukkan peningkatan yang relatif stabil. Pada tahun 2020, luas areal karet tercatat sebesar 31.440,70 hektare dengan produksi mencapai 19.141,57 ton. Hingga tahun 2024, luas areal karet meningkat menjadi 32.065,20 hektare, disertai kenaikan produksi menjadi 21.002,00 ton.

Adapun komoditas kelapa juga mengalami perubahan selama periode tersebut. Pada tahun 2020, luas areal kelapa tercatat sebesar 6.080,45 hektare dengan produksi sebesar 4.062,34 ton. Meskipun luas areal pada tahun 2024 sedikit meningkat menjadi 6.091,55 hektare, produksi kelapa justru mengalami penurunan menjadi 3.363,76 ton..

D. Perikanan

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi perikanan yang besar besar meliputi potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sebagian besar produksi perikanan Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh perikanan tangkap yaitu sebesar 52,72%, namun produksi perikanan budidaya trendnya mengalami peningkatan. Berikut adalah potensi perikanan Kabupaten Bengkalis, yaitu:



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.8 Produksi Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis (2025), produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 tercatat sebesar 5.947,97 ton, kemudian sedikit menurun menjadi 5.896,15 ton pada tahun 2021. Selanjutnya, produksi mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai 6.069,51 ton, namun kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 2.767,83 ton. Pada tahun 2024, kinerja perikanan tangkap kembali pulih dengan produksi mencapai 6.077,41 ton, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Fluktuasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain penurunan kualitas sarana dan prasarana tangkap, terutama kapal kayu yang mulai tidak layak pakai, serta terbatasnya bahan baku untuk perbaikan kapal nelayan. Selain itu, kebijakan kewenangan wilayah laut yang berada di bawah pemerintah provinsi dan pusat menyebabkan dukungan langsung pemerintah daerah terhadap nelayan menjadi terbatas, terutama dalam bentuk bantuan sarana tangkap dan permodalan.

Berbeda dengan pola perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Produksi perikanan budidaya meningkat tajam dari 1.065,91 ton pada tahun 2020 menjadi 5.444,11 ton pada tahun 2022, sempat menurun pada tahun 2023 menjadi 3.265,76 ton, namun kembali melonjak pada tahun 2024 mencapai 5.666,30 ton. Kenaikan ini didorong oleh berkembangnya budidaya tambak udang vaname yang tersebar di enam kecamatan utama, yaitu Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Rupat, dan Rupat Utara. Meskipun demikian, sektor budidaya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait perizinan usaha tambak, ketersediaan benih berkualitas, serta infrastruktur pendukung seperti saluran air dan pengelolaan limbah tambak. Ke depan, peningkatan kapasitas perikanan budidaya melalui penguatan kelembagaan pelaku usaha, fasilitasi akses permodalan, dan penerapan teknologi budidaya berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat kontribusi subsektor perikanan terhadap perekonomian daerah..

E. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah khususnya wilayah strategis di Kabupaten Bengkalis berpedoman kepada kajian Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bengkalis tahun 2022 - 2052.

1. Pengembangan Wilayah Strategis Duri

Kawasan strategis Duri berfungsi sebagai pusat niaga skala regional, pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis, khususnya untuk instansi yang melayani kegiatan perkotaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan industri berbasis pertanian/perkebunan dan kawasan pertambangan minyak bumi. Dimana pengembangan kawasan strategis ini perlu diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perkotaan Bengkalis, Buruk Bakul dan Sei Pakning dalam satu koridor pengembangan kegiatan ekonomi.

2. Pengembangan Wilayah Strategis Sei Pakning-Buruk Bakul dan Bengkalis

Kawasan strategis ini ditetapkan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kegiatan ekonomi yang potensial adalah kegiatan sentra perniagaan Asean (perdagangan dan jasa), kawasan permukiman perkotaan, pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat budaya melayu, kawasan Industri dan kawasan pariwisata yang didukung oleh pelayanan pelabuhan yang memadai.

3. Pengembangan Wilayah Strategis Tanjung Medang (Pulau Rupat)

Pengembangan kawasan strategis Tanjung Medang difungsikan sebagai kawasan pariwisata (Pantai Tanjung Medang), permukiman perkotaan dan sentra perikanan yang dikembangkan secara terpadu dengan pengembangan kawasan pertanian dengan pola Kota Terpadu Mandiri. Namun, upaya pengembangan kawasan strategis ini perlu memperhatikan upaya pelestarian lingkungan, khususnya pengamanan dan pelestarian kawasan hutan bakau (mangrove).

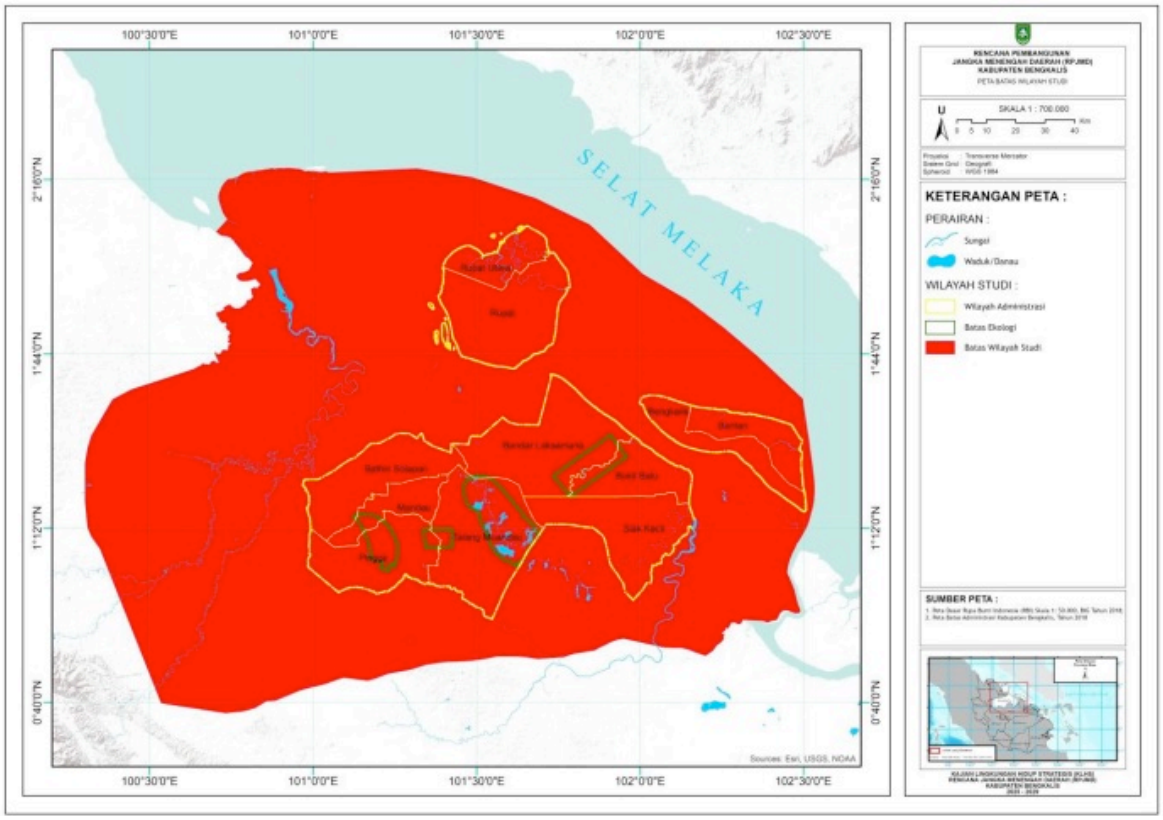
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Wilayah Fungsional

Batas fungsional atau biasa juga dikatakan batas ekologis, adalah deliniasi yang mempertimbangkan wilayah sekitarnya yang memiliki interkoneksi yan didelineasi berdasarkan batas ekologis. Batas ekologis atau fungsional yang didelineasi berdasarkan pertimbangan aspek karekterisktik bentang alam dan vegetasi asli (Peta Wilayah Ecoregion), dan batas Daerah Aliran Sungai (Peta DAS) dengan luasan mencapai ± 3,2 Juta ha. Batas fungsional /ekologis tersebut melintasi batas berbagai wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Siak dan Kab. Kepulauan Meranti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Dumai, Kab. Rokan Hilir dan Kab. Rokan Hulu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kab. Kepulauan Meranti.

Peta batas Wilayah Fungsional Kabupaten Bengkalis disajikan pada Gambar berikut.

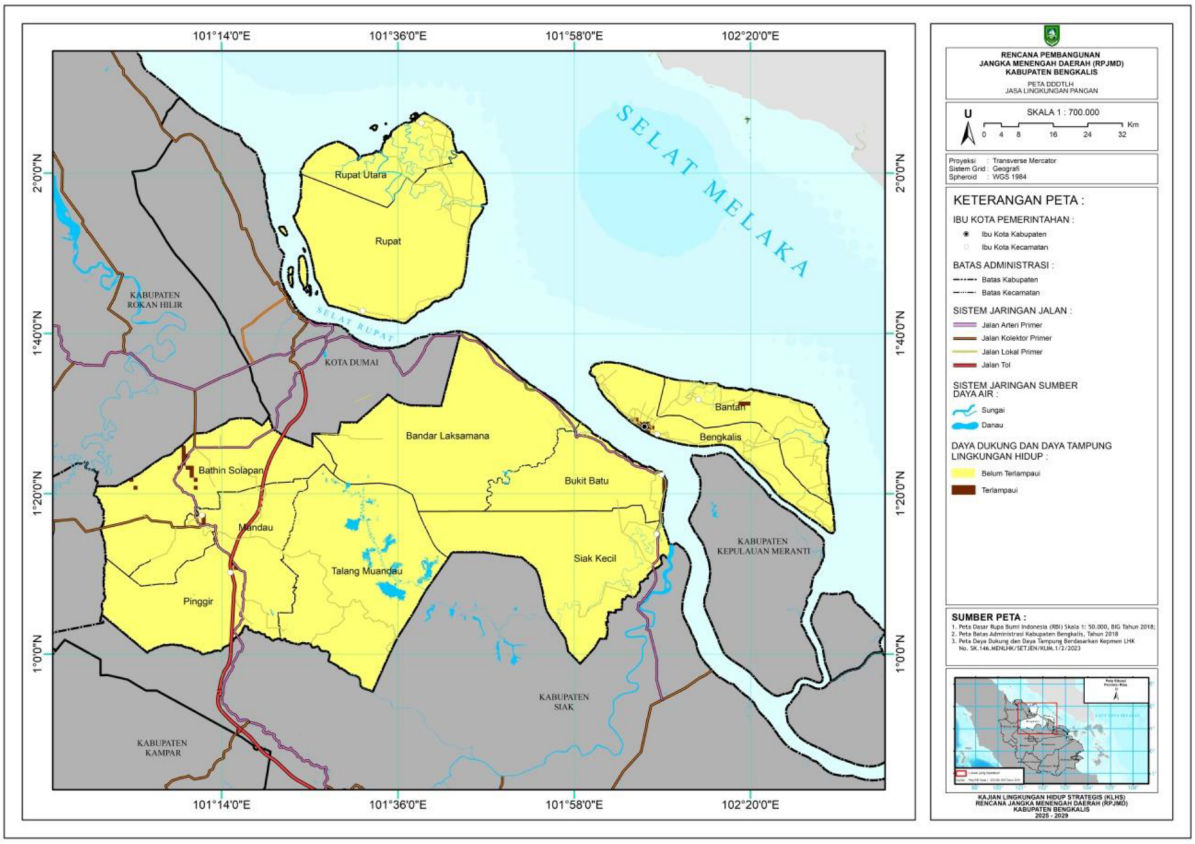


Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029

Gambar II.9 Peta Batas Wilayah Fungsional Kabupaten Bengkalis

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Analisis D3TLH pangan, dilakukan menggunakan peta D3TLH yang bersumber dari KepmenLH Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang penetapan daya dukung dan daya tamping air nasional, ditemukan bahwa Daya Dukung dan Daya Tampung untuk jasa lingkungan Pangan Kabupaten Bengkalis seluas 848.518,75 ha, (98,52%) berada pada kategori Belum Terlampaui dan seluas 12.737,25 ha atau 1,48% pada kategori Terlampaui, adapun Peta Daya Dukung dan Daya Tampung untuk jasa lingkungan Pangan Kabupaten Bengkalis disajikan pada Gambar berikut.

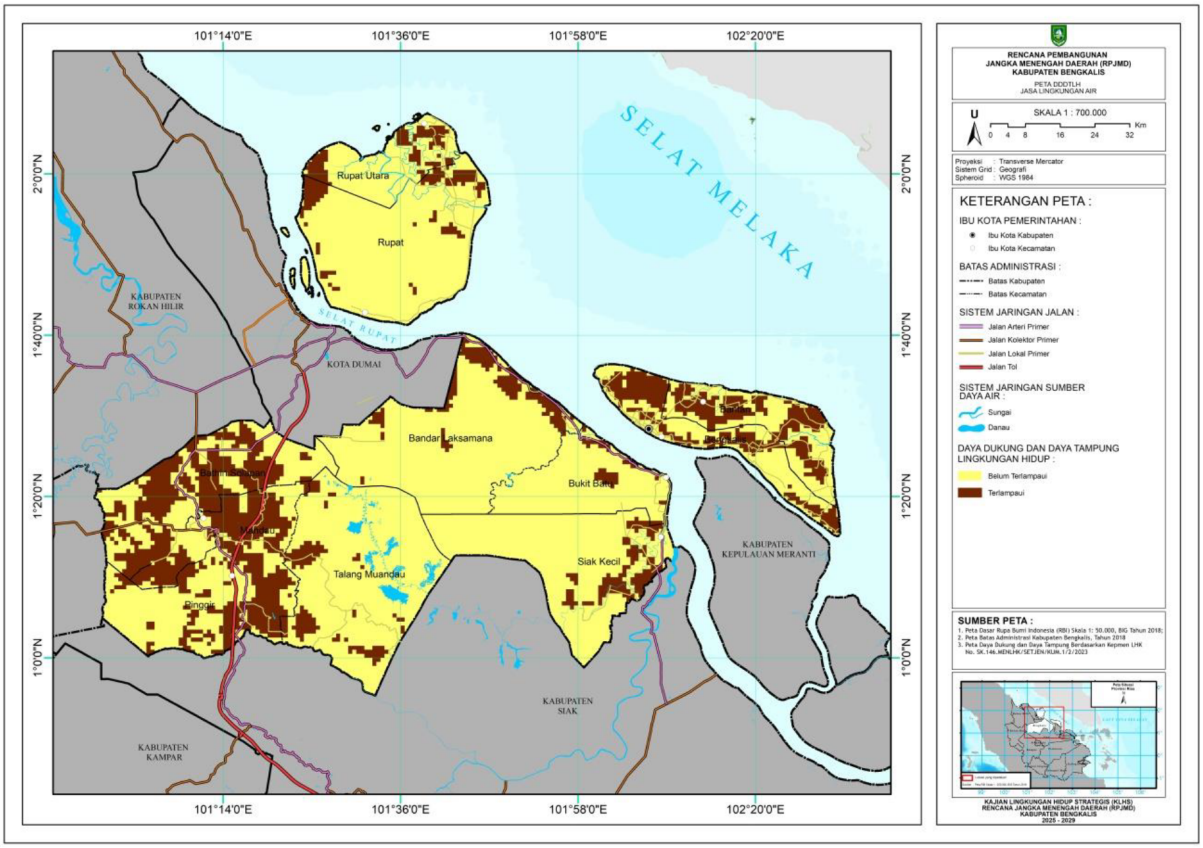


Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029

Gambar II.10 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Pangan Kabupaten Bengkalis

Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Bengkalis seluas 656.869,35 ha atau 76,27% berada pada kategori Belum Terlampaui dan seluas 204.386,64 ha atau 23,73% pada kategori Terlampaui. Analisis D3TLH air memperhitungkan ketersediaan air , kebutuhan air dan Penduduk. Berdasarkan hasil analisis ketersediaan air dan kebutuhan air maka dapat diketahui kondisi indikatif status daya dukung air di Kabupaten Bengkalis. Diketahui kebutuhan air pada lahan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 sebesar 4.107.258.152,00 m3/tahun,sedangkan kebutuhan air domestik sebesar 24.377.976 m3/tahun sehingga kebutuhan air total Kabupaten Bengkalis sebesar 4.131.636.128 m3/tahun. Adapun ketersediaan air adalah 18.647.882.550 m3/tahun, sehingga terdapat selisih kebutuhan dan ketersediaan air sebesar 14.516.246.422 m3/tahun.

Selanjutnya dilakukan analisis D3TLH air, dilakukan dengan memproyeksikan ketersediaan Air pada Tahun 2029. Diketahui jumlah penduduk sebesar 649.256 jiwa dengan kebutuhan air pada tahun 2029 adalah sebesar 4.311.531.891,20 m3/tahun, untuk kebutuhan air domestik sebesar 33.627.907,20 m3/tahun dengan total kebutuhan air sebesar 4.345.159.798,40 m3/tahun. Adapun ketersediaan air sebesar 18.647.882.550 m3/tahun, sehingga terdapat selisih kebutuhan dan ketersediaan sebesar 14.302.722.752 m3/tahun. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Bengkalis disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029

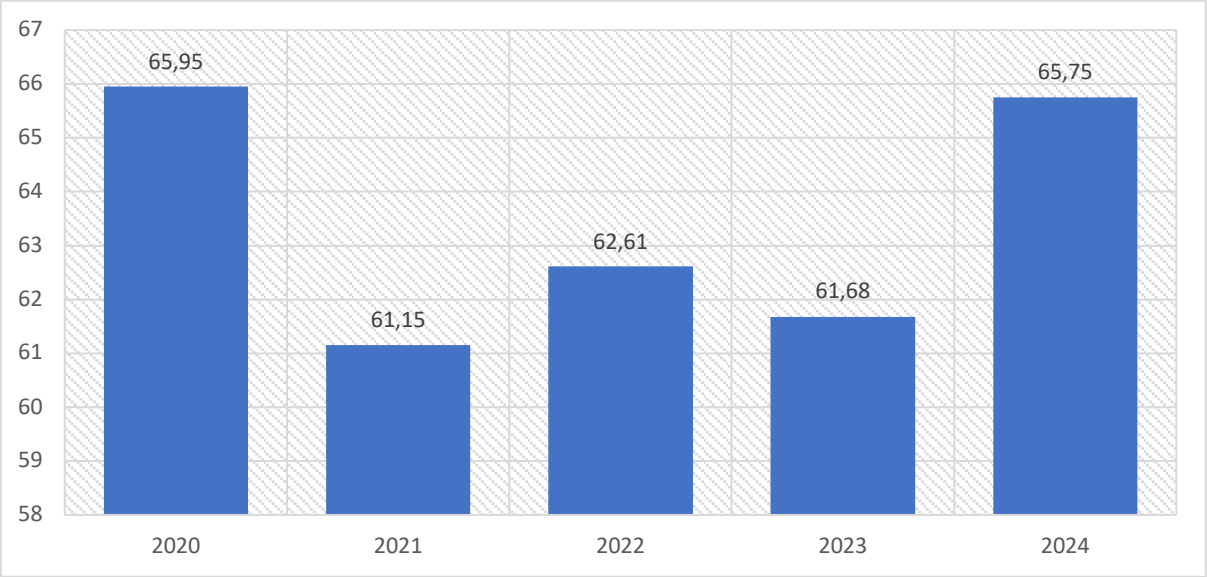
Gambar II.11 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Air Kabupaten Bengkalis

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilaya. IKP memiliki peran dalam mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan. Indeks ini dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional dan digunakan untuk mengukur ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan diukur menurut bobot aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Hasil Indeks Ketahanan Pangan dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah yang memiliki ketahanan pangan yang baik atau buruk, dan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah ketahanan pangan.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Gambar II.12 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sebesar 65,95, turun menjadi 61,15 pada tahun 2021, kembali naik menjadi 62,61 pada tahun 2022, namun kembali turun menjadi 61,68 pada tahun 2023 dan kembali naik menjadi 65,75 pada tahun 2024.

IKP Kabupaten Bengkalis masuk kategori tahan pangan rendah, untuk itu perlu penguatan pada aspek aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan

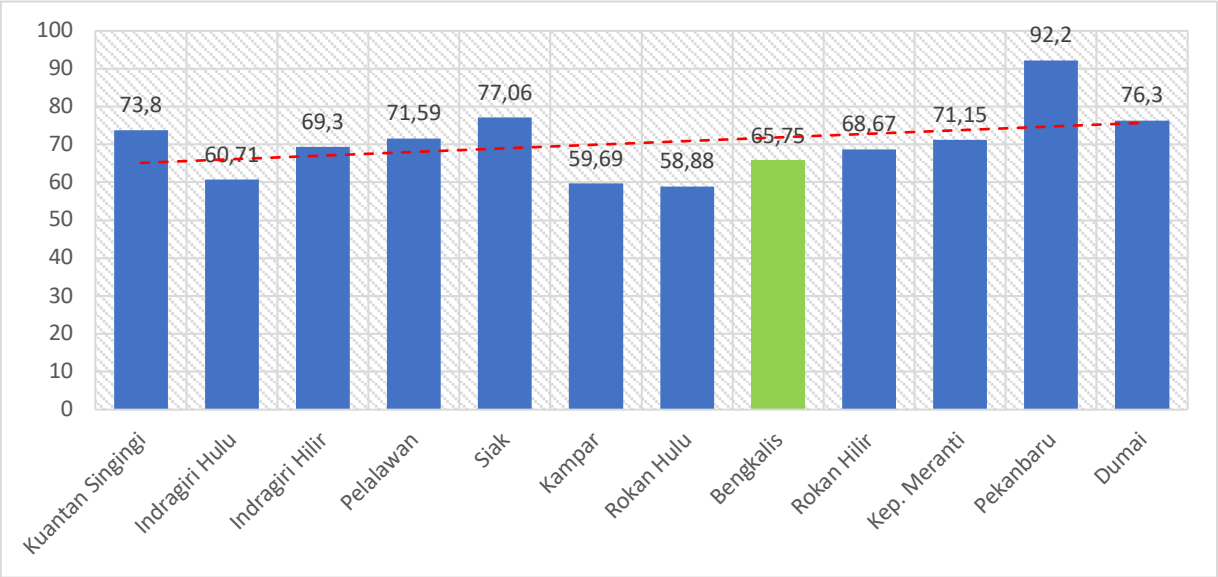
Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyadari bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan perhatian serius dan langkah-langkah strategis.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mendorong produksi pangan lokal secara optimal. Pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat guna, diversifikasi komoditas pangan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi pilar utama. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), yang bertujuan untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan alternatif bagi masyarakat.

Selanjutnya, pada aspek keterjangkauan pangan, upaya dilakukan untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat terhadap pangan, melalui stabilisasi harga bahan pokok, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan pasar lokal yang inklusif dan efisien. Program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan di Kampung Tangguh—yang kini tersebar di 51 titik di wilayah Kabupaten Bengkalis—menjadi contoh konkret dari inisiatif yang mendekatkan sumber pangan langsung kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang rawan.

Sementara itu, pada dimensi pemanfaatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola konsumsi bergizi seimbang. Melalui program edukasi dan penyuluhan, masyarakat dibekali pengetahuan

mengenai pengolahan pangan yang aman dan sehat, serta pentingnya pemenuhan gizi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Gambar II.13 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis berada pada peringkat sembilan setelah Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kota Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kebupaten, Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hilir.

2.1.1.4.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan, yang merupakan gambaran dari kemampuan penduduk untuk menjangkau dan memanfaatkan pangan yang tersedia. PoU mempunyai hubungan signifikan dengan Indeks Ketahanan Pangan suatu daerah.

Tabel II.10 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kuantan Singingi	10,87	9,02	15,80	13,75	11,47
2	Indragiri Hulu	9,11	10,80	15,22	12,31	11,22
3	Indragiri Hilir	13,91	14,10	22,03	17,06	13,23
4	Pelalawan	7,14	9,08	14,42	10,96	10,38
5	Siak	7,02	8,75	13,07	10,33	10,75
6	Kampar	9,34	10,52	14,69	12,01	10,75
7	Rokan Hulu	9,64	9,78	14,58	9,32	9,27
8	Bengkalis	9,45	12,00	15,75	12,77	9,92
9	Rokan Hilir	8,24	10,19	15,93	12,62	10,47
10	Kepulauan Meranti	10,41	14,51	18,81	15,95	12,72
11	Pekanbaru	7,51	10,11	11,81	11,75	10,08

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
12	Dumai	8,35	9,59	12,58	12,42	11,31

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Perkembangan PoU Kabupaten Bengkalis menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, PoU tercatat sebesar 9,45, meningkat tajam menjadi 15,75 pada tahun 2022, dan kembali menurun ke angka 9,92 pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan dalam dua tahun terakhir, angka ini tetap menunjukkan bahwa hampir 1 dari 10 penduduk Kabupaten Bengkalis masih menghadapi kerawanan pangan.

Pergerakan angka PoU ini berbanding lurus dengan skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Bengkalis tahun 2024 yang hanya mencapai 64,14 dan menempatkan daerah ini dalam kategori tahan pangan rendah. Artinya, tingginya tingkat *undernourishment* menjadi cerminan langsung dari lemahnya aspek pemanfaatan pangan, khususnya dalam hal kecukupan asupan gizi dan distribusi pangan yang merata.

Tingginya PoU pada tahun 2022 bisa dihubungkan dengan tantangan distribusi pangan, ketimpangan akses ekonomi, serta dampak lanjutan dari krisis global dan pandemi COVID-19 yang memengaruhi daya beli masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menjalankan sejumlah kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dari hulu ke hilir. Dalam aspek ketersediaan pangan, pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan daerah melalui pemanfaatan teknologi pertanian, diversifikasi komoditas, dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Program seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L) telah dilaksanakan untuk mengoptimalkan sumber pangan alternatif di tingkat rumah tangga.

Pada aspek keterjangkauan, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan akses ekonomi masyarakat terhadap pangan, seperti penguatan kelembagaan petani, stabilisasi harga pangan, serta pengembangan pasar lokal yang inklusif dan efisien. Implementasi Kampung Tangguh Pangan di 51 titik wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi langkah konkret dalam memperpendek rantai distribusi pangan dan memperluas akses masyarakat.

Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan—yang sangat berkorelasi dengan penurunan PoU—pemerintah terus meningkatkan penyuluhan dan edukasi gizi masyarakat melalui posyandu, sekolah, dan kelompok wanita tani. Pemerintah daerah juga berupaya memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia, melalui sinergi lintas sektor dengan lembaga kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.1.4.3 Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Bengkalis selama periode tahun 2022 hingga 2024 mencerminkan menunjukkan peningkatan dalam pola konsumsi energi masyarakat. Pada tahun 2022, konsumsi listrik per kapita tercatat sebesar 3.977,17 kWh, yang kemudian meningkat menjadi 4.130,27 kWh pada tahun 2023, dan mencapai 4.425,63 kWh pada tahun 2024.

Tabel II.11 Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2024

Keterangan	2022	2023	2024
Penggunaan Listrik (kWh)	2.572.096.001	2.721.213.602	2.972.805.214
Jumlah Penduduk (Jiwa)	646.715	658.846	671.725
Konsumsi Listrik Per Kapita (Jiwa/kWh)	3.977,17	4.130,27	4.425,63

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025 (diolah)

Kenaikan ini dapatoleh beberapa faktor, diantaranya peningkatan pendapatan perkapita pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari 288.307,80 ribu pada tahun 2023 menjadi 296.914,14 ribu pada tahun 2024, yang memungkinkan masyarakat memiliki daya beli lebih tinggi untuk mengakses lebih banyak perangkat listrik. Selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur kelistrikan, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (CCGT), yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus berkembang. Selain itu, perubahan pola konsumsi energi disebabkan masyarakat semakin bergantung pada perangkat elektronik dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah tangga, perkantoran, maupun sektor industri.

2.1.1.4.4 Akses Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak

Salah satu kebutuhan hakiki manusia adalah kebutuhan air minum bersih yang dapat dimanfaatkan untuk air minum maupun memasak. Kondisi pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat dilihat dari persentase rumah tangga berdasarkan sumber air minum bersih dan persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum layak.

Yang dimaksud dengan sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang terdiri atas air kemasan, air isi ulang, leding dan (sumur bor/sumur pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/ tinja terdekat ≥ 10 m. Adapun yang dimaksud dengan Akses air minum layak adalah jika sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Termasuk juga ketika sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang, namun sumber air utama untuk mandi/cuci/dll. Yang digunakan adalah leding, sumur boratau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindung, dan air hujan.

Kebijakan dan program peningkatan penggunaan sumber air minum bersih dan layak sebagai bagian dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terus dilaksanakan. Akses rumah tangga terhadap sumber air minum bersih menunjukkan fluktuasi, yaitu sebesar 67,69% pada tahun 2020, menurun hingga 55,57% pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 72,88% pada tahun 2024. Meskipun demikian, capaian akses air minum bersih Kabupaten Bengkalis masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau. Sementara itu, perkembangan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak relatif lebih stabil. Pada tahun 2020, capaian sebesar 93,73% mengalami penurunan menjadi 93,26% pada tahun 2021, namun kemudian meningkat kembali hingga mencapai 95,72% pada tahun 2024. Capaian ini menempatkan Kabupaten Bengkalis di atas rata-rata Provinsi Riau untuk indikator akses air minum layak..

Tabel II.12 Persentase Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
A	**Kabupaten Bengkalis**					
1	Sumber Air Minum Bersih	67,69	60,4	55,57	63,12	72,88
2	Sumber Air Minum Layak	93,73	93,26	94,2	95,64	95,72
B	**Provinsi Riau**					
1	Sumber Air Minum Bersih	71,68	71,56	70,15	72,7	81,5
2	Sumber Air Minum Layak	88,25	89,76	90,07	90,47	92,24

Sumber: BPS Riau, 2025

Upaya pemenuhan infrastruktur dasar berdasarkan kebutuhan air minum masyarakat Bengkalis dilakukan dengan pengoptimalan penyediaan air minum melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun bagi daerah-daerah yang belum mendapatkan pelayanan air bersih, penduduk biasanya menggunakan air hujan untuk memenuhi kebutuhan akan air minum. Suplai air sebagian besar masyarakat bersumber dari PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk. Permasalahan air bersih perlu di antisipasi mengingat ketersediaan air bersih semakin terbatas dan beban kebutuhan yang semakin meningkat selanjutnya Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai sanitasi dan air minum dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut: a), Pemantauan rutin terhadap kuallitas air sungai, air danau/waduk, air laut, dan air tanah, b) Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan.

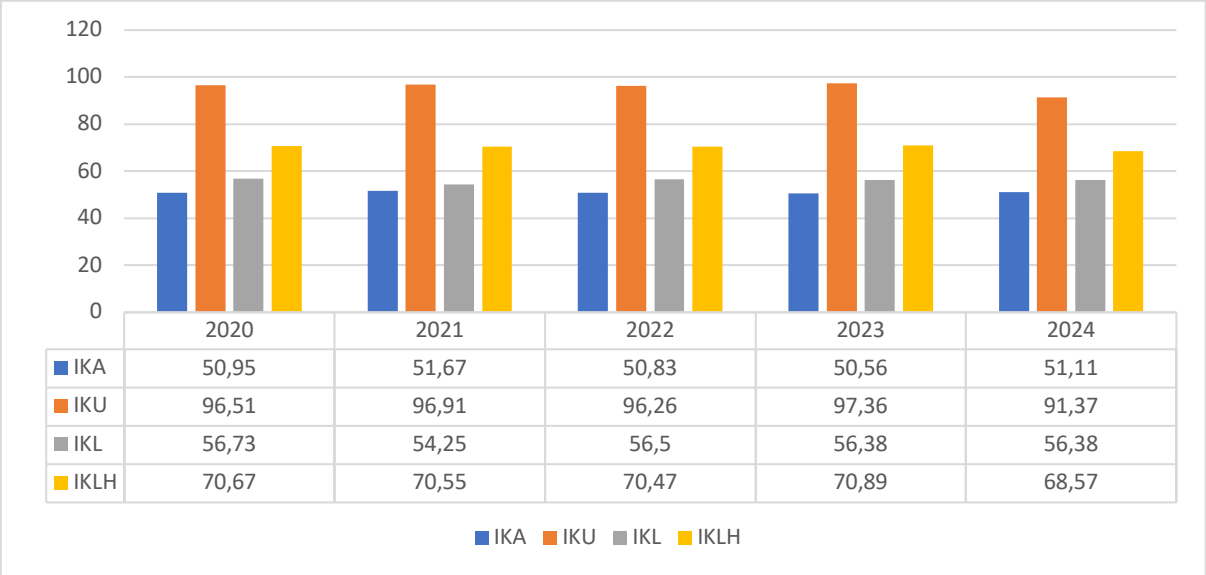
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekosistem, Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH mengintegrasikan berbagai parameter lingkungan, seperti kualitas air, udara dan lahan. IKLH dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Trend Perkembangan IKLH Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi dari 70,67 pada tahun 2020, turun menjadi 70,47 pada tahun 2022 dan meningkat kembali menjadi 70,89 pada tahun 2023, namun kembali turun pada tahun 2024 menjadi 68,57. Penurunan ini menyebabkan predikat IKLH Kabupaten Bengkalis turun dari kategori baik pada periode 2020–2023 menjadi cukup baik pada tahun 2024.



	2020	2021	2022	2023	2024
IKA	50,95	51,67	50,83	50,56	51,11
IKU	96,51	96,91	96,26	97,36	91,37
IKL	56,73	54,25	56,5	56,38	56,38
IKLH	70,67	70,55	70,47	70,89	68,57

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Penurunan IKLH pada tahun 2024 disebabkan oleh menurunnya Indeks Kualitas Udara dari 97,36 pada tahun 2023, menjadi 91,37 pada tahun 2024. IKU merupakan penyumbang terbesar dalam penentuan nilai IKLH sebesar 40,5%, saat ini nilai IKU Kabupaten Bengkalis tahun 2024 sudah berprediket Sangat Baik.

Sementara itu perkembangan Indeks Kualitas Lahan (IKL) turun dari 56,5 pada tahun 2022, menjadi 56,38 pada tahun 2023 dan nilainya tetap pada tahun 2024. IKL Kabupaten Bengkalis masuk predikat sedang dengan presentase luas tutupan lahan 36% dari total luas wilayah Kabupaten Bengkalis ditutupi oleh hutan dan non hutan, Berpotensi terjadinya alih fungsi Lahan, Masih adanya pembukaan lahan dengan bakar yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan, Tahun 2022 Lahan Kritis seluas 90.954,37 ha.

Sementara itu perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA) sempat turun dari 51,67 pada tahun 2021, menjadi 50,56 pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 51,11 pada tahun 2024. Tekanan terhadap sumber daya air di wilayah Kabupaten Bengkalis adalah limbah domestik. Kemudian disusul dengan limbah lainnya berupa limbah pertanian, bahkan limbah industri yang dibuang ke tanah, sungai maupun badan air lainnya yang kemudian berpengaruh terhadap penurunan kualitas air, Sama halnya dengan limbah domestik, kegiatan perindustrian juga mempengaruhi kualitas air sungai dan laut. Faktanya aliran limbah dari masing-masing industri/pabrik dialirkan ke sungai dan bermuara ke laut. Meskipun setiap industri/pabrik telah menerapkan pengolahan limbah melalui IPAL, namun tidak menjamin bahwa air limbah yang dibuang ke badan air telah aman. Selain itu, sebagian besar industri kecil melakukan pembuangan air limbah secara langsung ke badan air tanpa melalui tahapan pengolahan. Perkembangan kota merupakan tuntutan sekaligus jawaban dari perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan. Perkembangan tersebut cenderung sulit dikontrol sehingga seringkali menimbulkan persoalan yang menyangkut persoalan lingkungan baik yang menyangkut fasilitas, sistem dan area.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menyusun sejumlah rencana tindak lanjut dalam upaya menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan, khususnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Untuk menjaga kualitas air, DLH melakukan pemantauan secara berkala terhadap badan air dan menambah titik pantau pada sungai-sungai yang belum tercemar, memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang berdampak pada lingkungan, serta meningkatkan sarana dan prasarana pemantauan. Selain itu, DLH memperkuat peran laboratorium lingkungan dan menjalin sinergi dengan para pemangku kepentingan guna menurunkan beban pencemaran melalui penyediaan SPALD-S di wilayah padat aktivitas domestik dan SPALD-T secara bertahap di tiap kecamatan. Langkah ini mendukung peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) dan mengurangi pencemar dari sumber tidak langsung, sejalan dengan rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya ini juga diperkuat dengan pemberdayaan masyarakat melalui program Prokasih dan pembentukan kelompok peduli sungai.

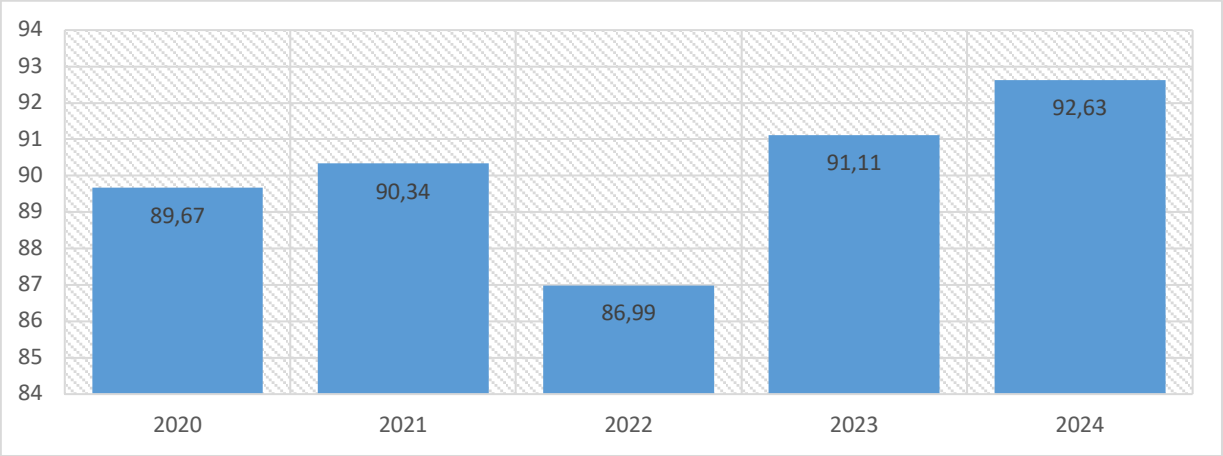
Dalam menjaga kualitas udara, DLH Kabupaten Bengkalis merancang penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap polusi, serta mengendalikan emisi dari sektor industri dan pemerintahan. Langkah strategis lainnya adalah perluasan ruang terbuka hijau (RTH) melalui penanaman pohon di berbagai wilayah, termasuk kota, jalan utama, dan pemukiman. Penyediaan informasi akurat tentang kualitas udara serta pemasangan alat pemantau (AQMS) juga menjadi prioritas. Di samping itu, DLH mendorong partisipasi masyarakat dan organisasi untuk bersama-sama meningkatkan kualitas udara, mengingat saat ini luas RTH baru mencapai 6,94 hektar, jauh dari target 20% sesuai Peraturan Menteri ATR Nomor 14 Tahun 2022.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas lahan, tantangan utama yang dihadapi adalah lemahnya koordinasi lintas sektor serta keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, DLH merancang upaya intensifikasi penanaman pohon pada lahan kritis, sempadan sungai, kawasan mangrove, sempadan jalan, hingga pekarangan, guna memperluas tutupan lahan. Pembangunan RTH di tingkat kecamatan hingga RT/RW serta penyediaan Kebun Raya dan Taman Kehati akan dilakukan melalui penetapan kebijakan oleh Bupati sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan upaya terpadu ini, Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2.1.1.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Pengolahan limbah domestik merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal untuk Bidang Pekerjaan Umum yang merupakan pelayanan dasar. Salah satu indikator kinerja dalam pembangunan pengolahan limbah domestik adalah akses sanitasi layak. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat.

Perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sebesar 87,67%, meningkat pada tahun 2021 menjadi 90,34%, namun turun menjadi 86,99% pada tahun 2022 dan kembali meningkat hingga tahun 2024 menjadi 92,63%.



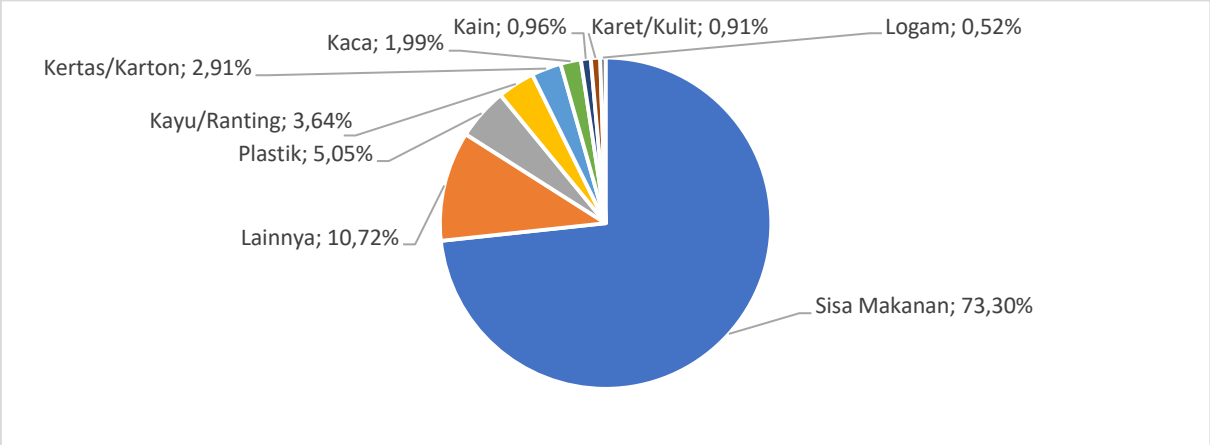
Sumber: BPS Riau, 2024

Gambar II.15 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memprioritaskan peningkatan akses sanitasi layak untuk masyarakatnya sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah utama dalam kebijakan sanitasi adalah berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas saluran drainase serta penyediaan fasilitas sanitasi lainnya. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Kabupaten Bengkalis juga meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan prasarana utilitas umum, termasuk fasilitas sanitasi, guna memastikan akses yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.1.1.5.3 Persampahan

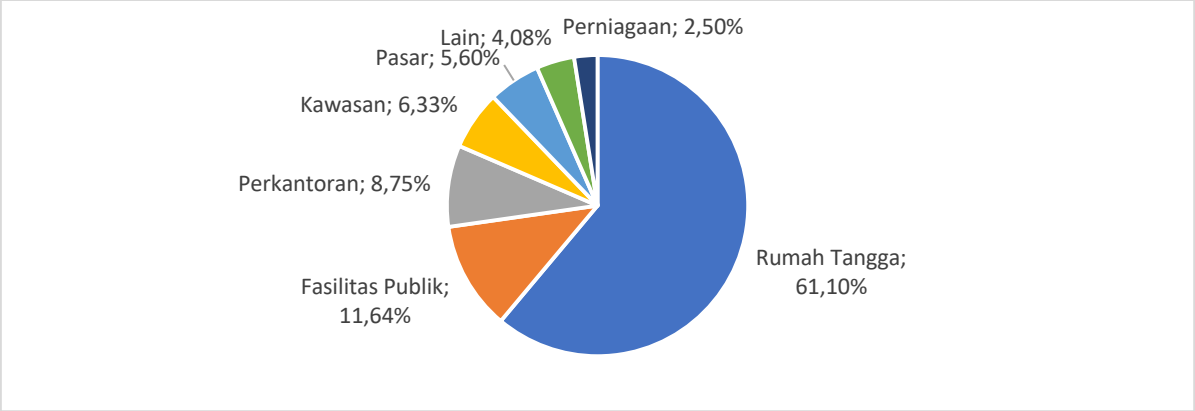
Timbulan sampah di Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2023 berjumlah 260,56 Ton perhari dengan total timbulan sampah pertahun 95.114,96 ton. Kabupaten Bengkalis memiliki 4 TPA yaitu TPA pinggir dengan sampah masuk pertahun sebanyak 13,536.55 ton pertahun, TPA Bukit Batu dengan sampah masuk pertahun sebanyak 6,833.64 ton pertahun, TPA Mandau dengan sampah masuk pertahun sebanyak 28,285.42 ton pertahun dan TPA Bantan dengan sampah masuk pertahun sebanyak 18,970.98 ton pertahun. Jika dilihat komposisi sampah di Kabupaten Bengkalis diketahui jumlah sampah yang paling dominan adalah sisa makanan sebanyak 73,3%. Sedangkan plastik sebanyak 5,05%, untuk melihat secara rinci komposisi sampah di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

Gambar II.16 Komposisi Sampah bedasarkan Jenis Sampah Kabupaten Bengkalis

Jika dilihat komposisi sampah berdasarkan sumber sampah diketahui sumber sampah terbesar di Kabupeten Bengkalis bersumber dari rumah tangga sebesar 61,1% dan fasilitas pablik sebesar 11,54%. Sedangkan sumber sampah terkecil adalah perniagaan sebesar 2,5%. Untuk melihat secara rinci komposisi sampah berdasarkan sumber sampah dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

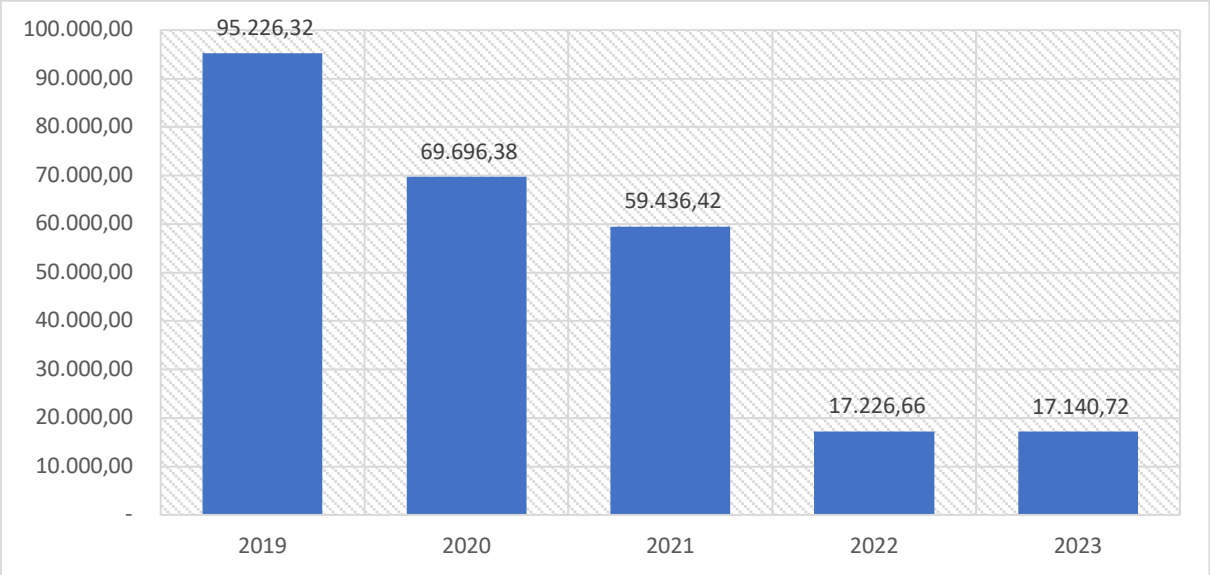
Gambar II.17 Komposisi sampah berdasarkan sumber sampah Kabupaten Bengkalis

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah peran serta masyarakat. Pemerintah Daerah tidak akan mampu menjalankan pengelolaan sampah secara efektif tanpa dukungan dari masyarakat. Masyarakat memegang peranan penting sebagai ujung tombak dalam kegiatan pengurangan sampah di sumbernya. Namun, peran serta ini sangat bergantung pada kesadaran setiap individu akan tanggung jawabnya dalam mengelola sampah. Terutama bagi rumah tangga, peran serta masyarakat akan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis.

2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.6.1 Penurunan Intensitas Emisi GRK

Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya berfokus pada 3 sektor dari 4 sektor utama yaitu : sektor energi; sektor pertanian, kehutanan, dan sektor pemanfaatan lahan (AFOLU); dan sektor limbah dengan total emisi sebesar 30.262,23 Gg CO2 eq. Sektor AFOLU dilaporkan sebagai kontributor utama gas rumah kaca pada Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dengan jumlah emisi sebesar 30.107,20 Gg CO2 eq/tahun yang menunjukkan persentase sebesar 99,49% dari total emisi GRK di Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya diikuti oleh emisi sektor energi sebesar 143,61 Gg CO2 eq/tahun dengan persentase sebesar 0,47%, dan sektor limbah yang menunjukkan emisi GRK sebesar 11,42 Gg CO2 eq/tahun dengan persentase sebesar 0,04%. Nilai emisi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 pada sektor AFOLU adalah sebesar 17.140,72 Gg CO2 eq dengan simpanan karbon sebesar 215.049,53 Gg CO2 eq. Tren Emisi GRK kabupaten Bengkalis disajikan pada Gambar berikut.



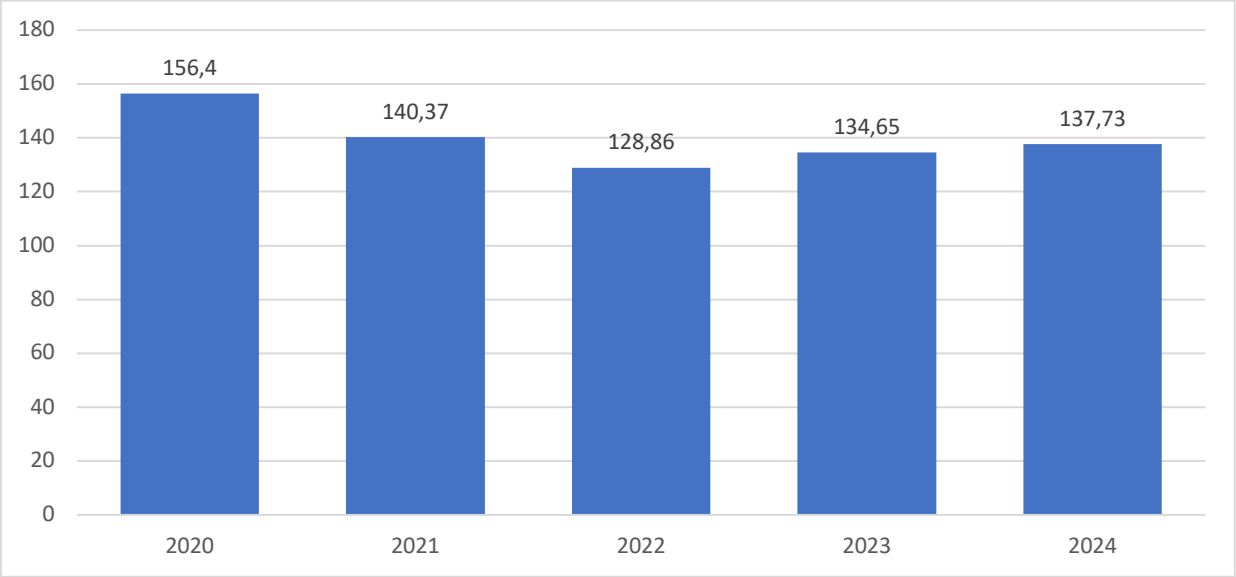
Sumber: KLHS Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

Gambar II.18 Tren Emisi GRK kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023 (Gg CO2 eq)

2.1.1.6.2 Indeks Risiko Bencana

Karakteristik rawan bencana di Kabupaten Bengkalis menggambarkan jenis-jenis rawan bencana yang berpotensi dan dapat mengancam perkembangan pembangunan daerah ke depan. Mengenali wilayah rawan bencana dan potensi jenis bencana menjadi landasan penting dalam upaya imitagasi bencana di Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah dengan potensi bencana yang cukup tinggi dan beragam baik berupa bencana alam, bencana ulah manusia ataupun kedaruratan komplek. Berdasarkan catatan dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis yang berpotensi menimbulkan kerugian jiwa maupun materi adalah adalah Banjir, kebakaran hutan dan lahan serta abrasi. Berdasarkan buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan hasil perhitungan untuk multi ancaman dan diurutkan berdasarkan total skor yang tergolong sedang dengan skor 134,73 pada tahun 2024. Adapun Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkalis disajikan pada Gambar berikut:



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, 2025

Gambar II.19 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Karakteristik rawan bencana di Kabupaten Bengkalis menggambarkan jenis-jenis rawan bencana yang berpotensi dan dapat mengancam perkembangan pembangunan daerah ke depan. Mengenali wilayah rawan bencana dan potensi jenis bencana menjadi landasan penting dalam upaya imitagasi bencana di Kabupaten Bengkalis.

Jumlah kejadian bencana pada tahun 2024 menunjukkan jumlah bencana hotspot sebanyak 60, jumlah bencana angin puting beliuang sebanyak 1 kejadian dengan 3 rumah yang terdampak. Sedangkan banjir sebanyak 9 kejadian dengan jumlah rumah yang terdampak sebanyak 1.325 rumah. Bencana karhutla sebanyak 46 kejadian dengan luas kebakaran mencapai 145,33 ha. Jumlah abrasi pantai sebanyak 6 kejadian dengan luas abrasi mencapai 1.850 meter. Adapun jumlah kejadian tenggelam sebanyak 1 kejadian dengan korban jiwa sebanyak 2 orang. Adapun jenis dan wilayah rawan bencana di Kabupaten Bengkalis disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel II.13 Data Kejadian Bencana di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Hotspot	Angin Puting Beliung		Banjir		Karhutla		Abrasi Pantai / Longsor		Amukan Gajah		Korban Tenggelam Dan Kejadian	
		Kejadian	Jumlah/ Kejadian	Jumlah/ Rumah	Jumlah/ Kejadian	Jumlah/ Rumah	Jumlah/ Kejadian	Luas/ Ha	Jumlah/ Kejadian	Luas/Ha	Jumlah/ Kejadian	Jumlah/ Rumah	Jumlah/ Kejadian	Jumlah/ Jiwa
1	Mandau	0					3	7						
2	Pinggir	15					4	17						
3	BathinSolapan	8			2	15	6	22						
4	Talang Muandau	10			1	9	8	43						
5	Bukit Batu	3					2	2,5					1	2
6	Siak Kecil	5			4	1257	3	4,5						
7	Bandar Laksamana	10			1	30	6	32,03	1	20				
8	Rupat	5			1	14	7	9,5	1	350				
9	Rupat Utara	0					1	2	1	1000				
10	Bengkalis	1	1	3			2	2	1	40				
11	Bantan	3					4	3,8	2	440				
	Jumlah	60	1	3	9	1325	46	145,33	6	1850	0	0	1	2

Sumber : BPBD Kabupaten Bengkalis, 2025

1. Rawan Abrasi

Abrasi pantai merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungannya yang disebabkan oleh rusaknya ekosisitem mangrove/tumbuhan pantai dan karakteristik daratan pantai umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap penggerusan oleh energi gelombang laut, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat di lokasi tersebut.

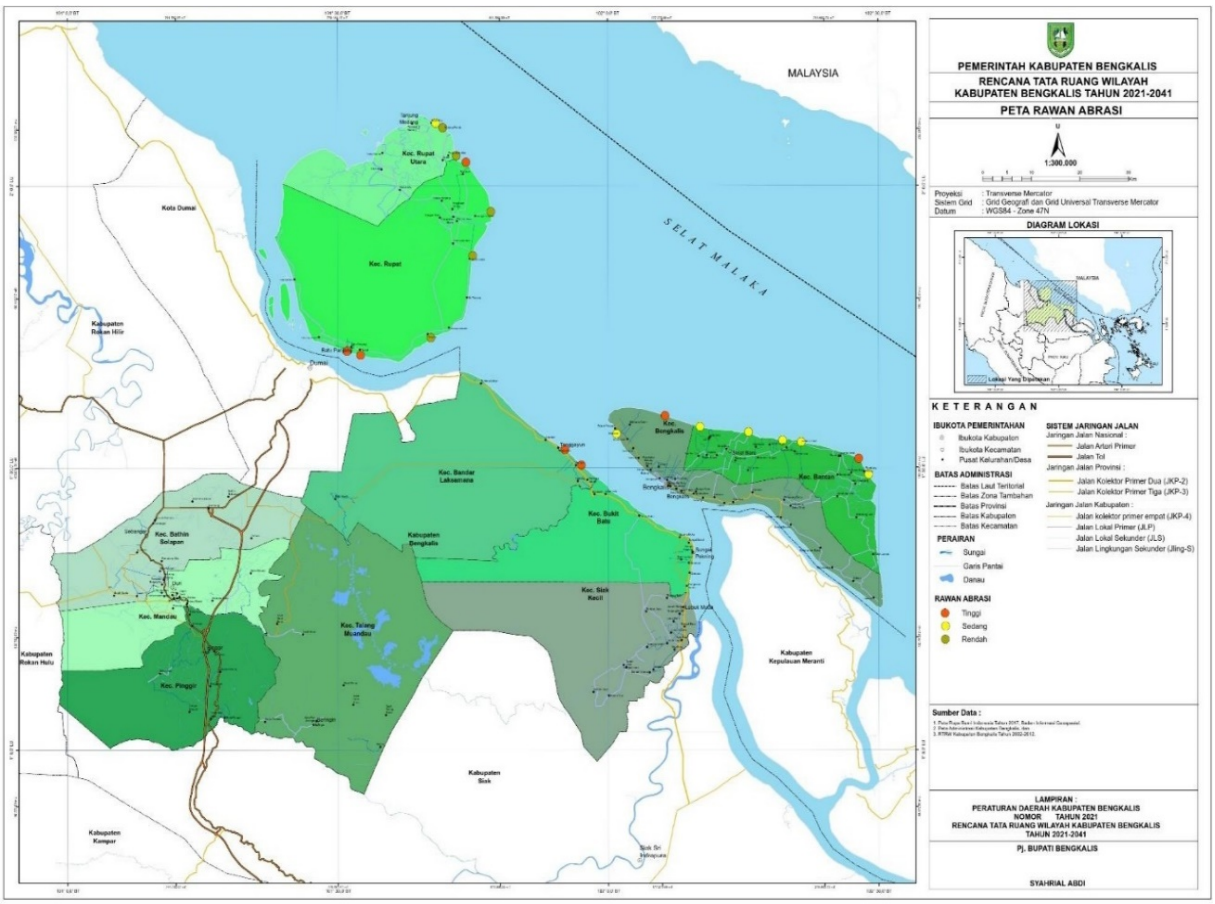
Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Bengkalis tahun 2025, tercatat enam kejadian bencana abrasi di Kabupaten Bengkalis selama tahun 2024 dengan total luas terdampak mencapai 1.850 hektar. Kecamatan yang mengalami abrasi tertinggi adalah Kecamatan Rupat Utara yang terdampak seluas 1.000 hektar. Adapun Kawasan yang memiliki potensi rawan abrasi di Kabupaten Bengkalis berada pada pesisir bagian utara Pulau Rupat yang berhadapan dengan Selat Malaka, Kecamatan Bukit Batu yang berhadapan langsung dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati dan bagian utara Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati serta bagian timur Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Malaka.

Tabel II.14 Jumlah Kejadian Bencana Abrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Kejadian	Luas/Ha
1	Bandar Laksamana	1	20
2	Rupat	1	350
3	Rupat Utara	1	1000
4	Bengkalis	1	40
5	Bantan	2	440
6	Jumlah	6	1850

Sumber : BPBD Kabupaten Bengkalis, 2025

Berdasarkan tingkat kerusakan pantai akibat abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis dapat di klasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu pantai terabrasi dengan tingkat kerusakan tinggi, sedang, dan rendah, sebagaimana terdapat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Gambar II.20 Peta Wilayah Rawan Abrasi Kabupaten Bengkalis

2. Rawan Banjir dan Gelombang Tinggi

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bengkalis terjadi di wilayah pesisir pulau baik di Pulau Sumatera seperti di Kecamatan Bukit Batu maupun di Pulau Bengkalis dan Rupat. Intensitas hujan yang tinggi di musim-musim tertentu menaikkan air di sepanjang sungai-sungai. Selain itu, bencana banjir juga dapat disebabkan oleh naiknya air laut pada saat terjadinya pasang sebagai akibat rendahnya permukaan tanah di wilayah pesisir yang dapat menggenangi rumah- rumah penduduk dan jalan raya. Rekapitulasi penanganan bencana banjir menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

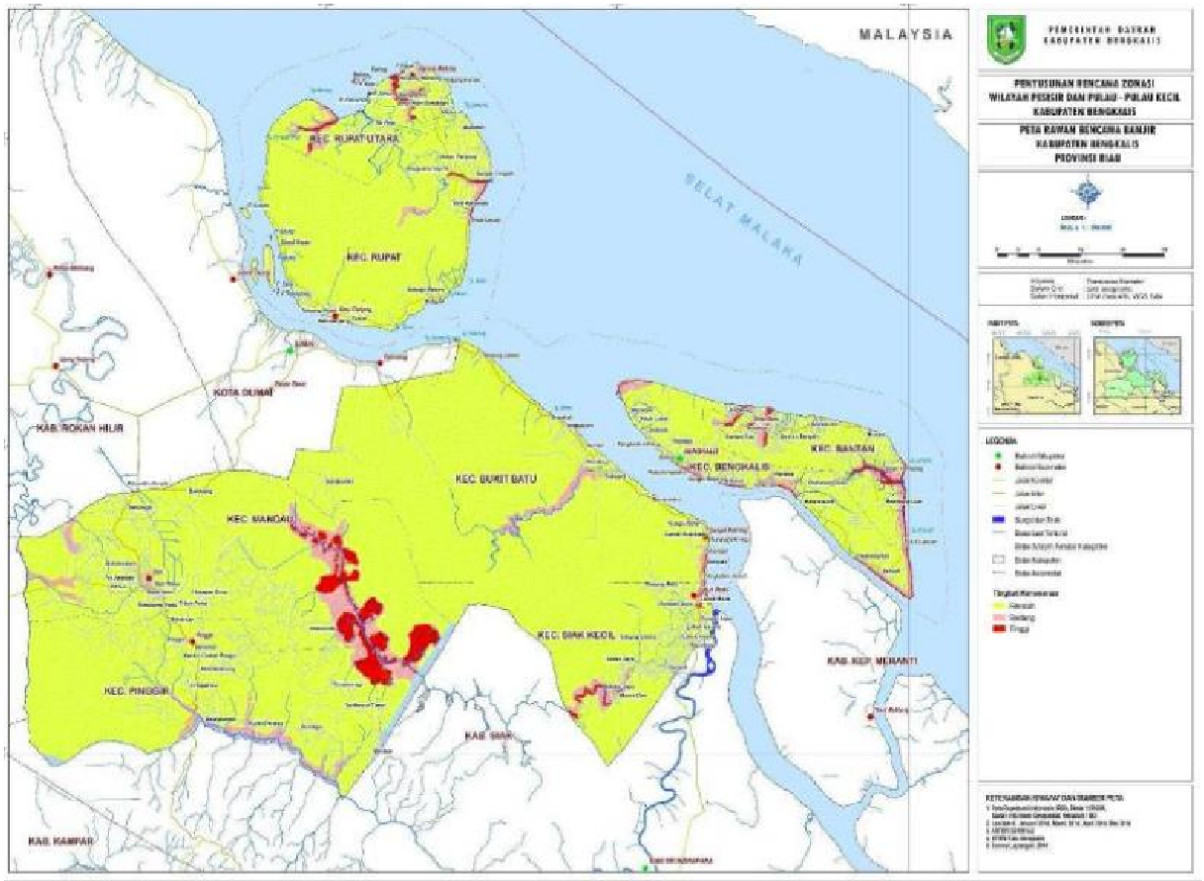
Tabel II.15 Rekapitulasi Penanganan Bencana Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penanganan	Jumlah/rumah
Mandau		
Pinggir		
Bathin Solapan	2	15
Talang Muandau	1	9
Bukit Batu		

Kecamatan	Jumlah Penanganan	Jumlah/rumah
Siak Kecil	4	1.257
Bandar Laksamana	1	30
Rupat	1	14
Rupat Utara		
Bengkalis		
Bantan		
Total	9	1.325

Sumber : BPBD Kabupaten Bengkalis, 2025

Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Bengkalis tahun 2025, tercatat sembilan upaya penanganan bencana banjir yang tersebar di beberapa kecamatan selama tahun 2024. Kecamatan yang menerima penanganan di antaranya Bathin Solapan dengan dua penanganan yang mencakup 15 rumah, Talang Muandau dengan satu penanganan yang berdampak pada 9 rumah, Siak Kecil dengan empat penanganan yang 1.257 rumah, Bandar Laksamana dengan satu penanganan yang mencakup 30 rumah, serta Rupat dengan satu penanganan yang berdampak pada 14 rumah. Secara keseluruhan, total rumah yang terdampak dan telah mendapatkan penanganan mencapai 1.325 unit.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Gambar II.21 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bengkalis

Selain banjir, terdapat juga potensi gelombang tinggi di Kabupaten Bengkalis. Kawasan yang memiliki potensi rawan gelombang tinggi berlokasi di Desa Tanjung Medang dan Selat Baru sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan masyarakat Bengkalis terutama kegiatan pariwisata yang ada di lokasi tersebut. Sehingga pada kawasan tersebut dibutuhkan rambu-rambu yang dapat memberitahukan adanya bahaya gelombang tinggi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melakukan kegiatan di lokasi tersebut.

3. Rawan Kebakaran Lahan dan Hutan

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis secara umum terjadi di wilayah daratan Pulau Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis biasanya diawali dengan pembukaan lahan oleh pemilik lahan pada musim kering dengan intensitas hujan rendah dan frekuensi hujan yang jarang. Pada tahun 2020, jumlah kejadian kebakaran mencapai 100 kejadian dengan total luas kebakaran mencapai 404,4 hektar. Namun, pada tahun 2021, angka kejadian kebakaran kembali meningkat menjadi 132 kasus dengan luas area terbakar sebesar 435,8 hektar. Tahun 2022 mencatat penurunan jumlah kebakaran menjadi 76 kejadian dengan luas terdampak sebesar 159,05 hektar. Kemudian, pada tahun 2023, terjadi lonjakan jumlah kebakaran menjadi 106 kejadian dengan luas lahan yang terbakar mencapai 370,62 hektar. Pada tahun 2024, angka kejadian kebakaran turun menjadi 46 kejadian dengan luas area yang terdampak mencapai 145,33 hektar.

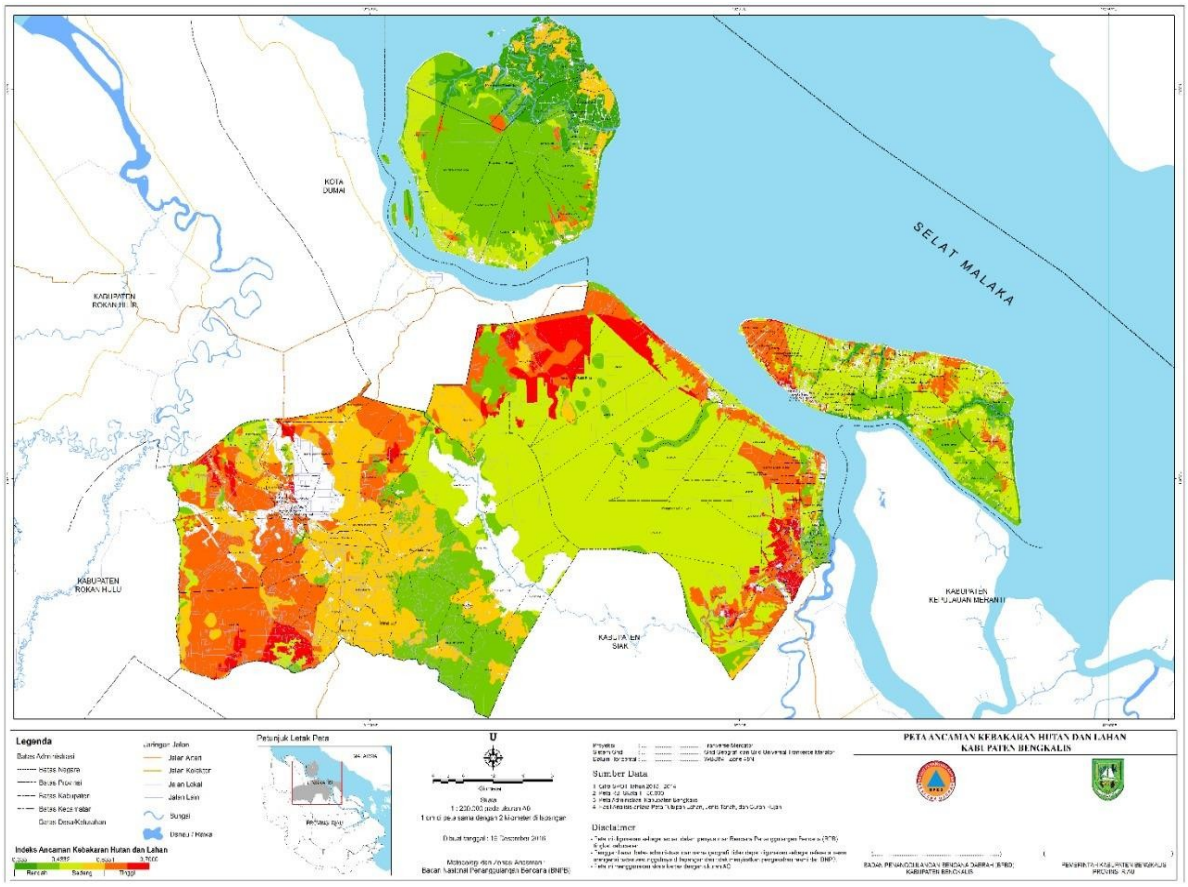
Dalam menanggapi kejadian kebakaran hutan dan lahan ini, pemerintah daerah telah menggencarkan kegiatan sosialisasi pencegahan pembakaran lahan pada masyarakat dan perusahaan. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pengawasan dan memberkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan pembukaan lahan dengan dibakar. Diharapkan ke depannya masyarakat dan perusahaan akan semakin paham akan bahaya pembakaran lahan sehingga akan terjadi pengurangan kejadian kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel II.16 Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Kejadian	Luas/ Ha	Kejadian	Luas/ Ha	Kejadian	Luas/ Ha	Kejadian	Luas/ Ha	Kejadian	Luas/ Ha
1	Bengkalis	5	21	13	132,95	8	9	4	9,75	2	2
2	Bantan	9	8,4	13	62,3	7	14,3	6	69,70	4	3,8
3	Bukit Batu	1	0,5	1	2	1	11	5	4,03	2	2,5
4	Bandar Laksamana	8	13	9	30	0	0	9	62,50	6	32,03
5	Siak Kecil	11	14	2	2	3	7	4	5,00	3	4,5
6	Rupat	18	233	12	40	5	36	11	87,20	7	9,5
7	Rupat Utara	9	27	7	3,8	1	0,5	1	0,50	1	2
8	Mandau	5	12	16	23	18	18	24	19,60	3	7
9	Bathin Solapan	23	34	39	69,25	23	29,8	23	40,65	6	22
10	Pinggir	4	14,5	10	30,5	4	16,5	9	38,20	4	17
11	Talang Muandau	7	27	10	40	6	17	10	33,50	8	43
Total		100	404,4	132	435,8	76	159,05	106	370,62	46	145,33

Sumber: BPBD Kabupaten Bengkalis, 2025

Kecamatan Talang Muandau merupakan Kecamatan dengan kejadian kebakaran hutan terbanyak yaitu yaitu 8 kejadian dengan luas terdampak mencapai 43 Ha pada tahun 2024. Berdasarkan peta kerawanan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis yang ditunjukkan oleh Indeks ancaman kebakaran lahan dan hutan, menunjukkan wilayah dengan potensi kebakaran paling tinggi ditandai dengan warna merah dan oranye. Wilayah-wilayah ini memiliki risiko tinggi hingga sangat tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama karena kondisi lahan yang didominasi oleh lahan gambut dan vegetasi yang mudah terbakar. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan pada wilayah ini lebih diprioritaskan. Lebih lanjut dapat diamati pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Gambar II.22 Peta Rawan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Bengkalis

Dari beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, dapat dikatakan sudah semuanya ditangani dengan baik. Dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak, penanganan bencana di Kabupaten Bengkalis dapat dilakukan dengan maksimal. Berikut ini adalah capaian penangan bencana di Kabupaten Bengkalis tahun 2024.

Tabel II.17 Jumlah Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penanganan	Luas Area Penanganan (Ha)
1	Mandau	3	7
2	Pinggir	4	17

No	Kecamatan	Jumlah Penanganan	Luas Area Penanganan (Ha)
3	BathinSolapan	6	22
4	Talang Muandau	8	43
5	Bukit Batu	2	2,5
6	Siak Kecil	3	4,5
7	Bandar Laksamana	6	32,03
8	Rupat	7	9,5
9	Rupat Utara	1	2
10	Bengkalis	2	2
11	Bantan	4	3,8
Total		46	145,33

Sumber: BPBD Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.1.6.3 Indeks Kerentanan Daerah

Berdasarkan peta Kerentanan Perubahan Iklim yang didapatkan melalui Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) dan dari Direktorat Inventarisasi dan Perpetaan Sumber Daya Hutan (IPSDH) KLHK pada Tahun 2020, diketahui bahwa Kabupaten Bengkalis seluruh wilayah perencanaan WPR dan wilayah fungsional berada pada kategori sedang. Pada Peta SIDIK, kategori sedang ini adalah wilayah yang memiliki tingkat kerentanan perubahan iklim sedang. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: KLHS Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

Gambar II.23 Peta Kerentanan Perubahan Iklim di Kabupaten Bengkalis

2.1.1.7 Kondisi Demografi

2.1.1.7.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2024 mencapai 81 jiwa per Km^2. Kabupaten Bengkalis temasuk kategori penduduk sangat jarang di Provinsi Riau. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tiap tahun semakin bertambah

dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk akibat berkembangan kegiatan ekonomi lokal dan regional di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Tabel II.18 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	Bengkalis	462,24	94.168	13,81	204
2	Bantan	442,93	46.931	6,88	106
3	Bukit Batu	526,62	23.608	3,46	45
4	Mandau	372,25	172.139	25,24	462
5	Rupat	1.136,31	41.900	6,14	37
6	Rupat Utara	378,68	17.482	2,56	46
7	Siak Kecil	957,95	29.067	4,26	30
8	Pinggir	811,46	80.463	11,80	99
9	Bandar Laksamana	1.237,70	19.901	2,92	16
10	Talang Muandau	1.244,71	34.601	5,07	28
11	Bathin Solapan	855,62	121.624	17,84	142
Kabupaten Bengkalis		**8.426,47**	**681.884**	**100,00**	**81**

Sumber: Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Mandau yang merupakan pusat kegiatan perekonomian dan industri di Kabupaten Bengkalis, yaitu sebanyak 462 jiwa/km^2, dengan jumlah penduduk sebanyak 172.139 jiwa atau sebesar 25,24% dari total penduduk pada Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Rupat Utara yaitu sebanyak 17.482 Jiwa atau 2,56% dari total penduduk Kabupaten Bengkalis. Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan industri sehingga akan memicu peningkatan harga lahan dan keterbatasan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan memicu terjadinya persolaan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah, termasuk permasalahan kriminalitas dan persoalan lingkungan hidup.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki di Kabupaten Bengkalis sebesar 348.949 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 332.935 jiwa. Penduduk berdasarkan sex ratio di Kabupaten Bengkalis terlihat masih didominasi oleh penduduk laki-laki, dengan perbandingan 105 dari 100 penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki pada semua Kecamatan lebih banyak dari penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kecamatan Bandar Laksamana yaitu sebanyak 107 laki- laki per 100 orang wanita. Secara rinci perbandingkan penduduk laku-laki dan perempuan menurun kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II.19 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

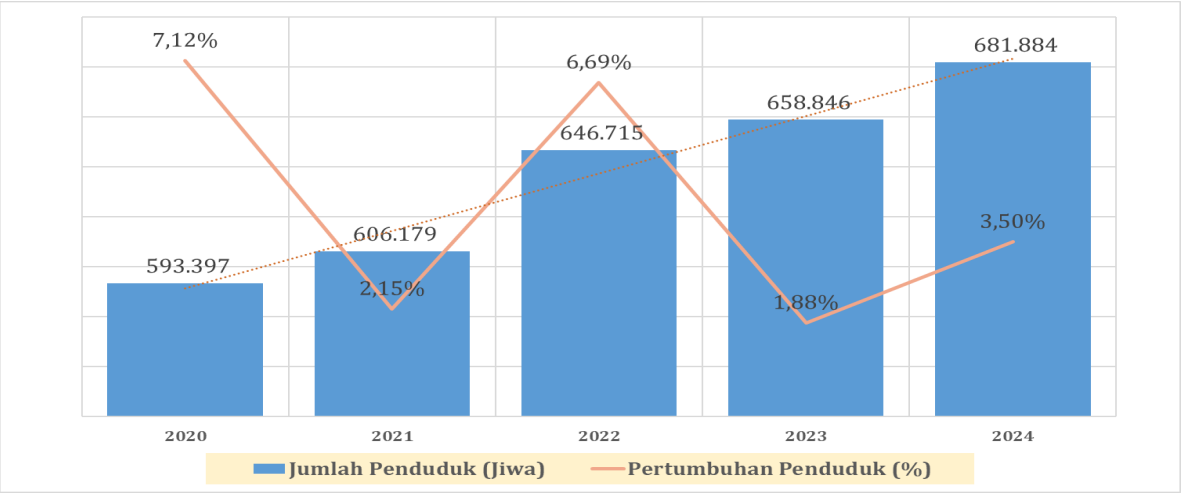
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Bengkalis	47.994	46.174	94.168	104
2	Bantan	24.012	22.919	46.931	105
3	Bukit Batu	12.018	11.590	23.608	104
4	Mandau	87.748	84.391	172.139	104
5	Rupat	21.532	20.368	41.900	106
6	Rupat Utara	8.923	8.559	17.482	104
7	Siak Kecil	14.852	14.215	29.067	104
8	Pinggir	41.225	39.238	80.463	105
9	Bandar Laksamana	10.274	9.627	19.901	107
10	Talang Muandau	17.819	16.782	34.601	106
11	Bathin Solapan	62.552	59.072	121.624	106
Kabupaten Bengkalis		**348.949**	**332.935**	**681.884**	**105**

Sumber: Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2025

Sejalan dengan kondisi kependudukan diatas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya berkomitmen untuk mendorong pengarusutamaan gender dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Upaya ini dimaksudkan agar baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, serta manfaat yang seimbang dari berbagai program pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan yang disusun diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, sehingga mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan

2.1.1.7.2 Pertumbuhan Penduduk

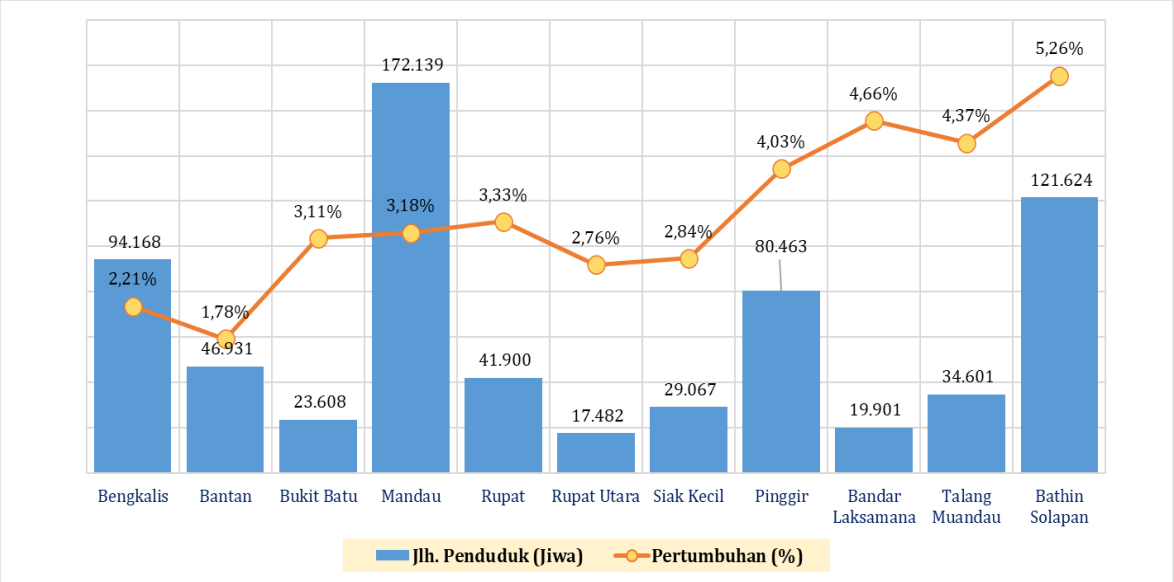
Pertambahan penduduk di Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020 mencapai 7,12%, turun pada tahun 2021 menjadi 2,15%, kembali naik pada tahun 2022 menjadi 6,69%, namun turun menjadi 1,88% pada tahun 2023 dan sedikit naik pada tahun 2024 menjadi 3,50%. Berikut disajikan perkembangan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024 yaitu:



Sumber: Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2025

Gambar II.24 Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Pertumbuhan penduduk pada disebagian besar Kecamatan di Kabupaten Bengkalis tergolong sedang. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Bathin Solapan yaitu sebesar 5,26%, Kecamatan Bandar Laksamana sebesar 4,66%, Kecamatan Talang Muandau sebesar 4,37% dan Kecamatan Pinggir sebesar 4,03%. Hal ini disebabkan oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkalis menurut Kecamatan disajikan pada gambar dibawah ini, yaitu:



Sumber: Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2025

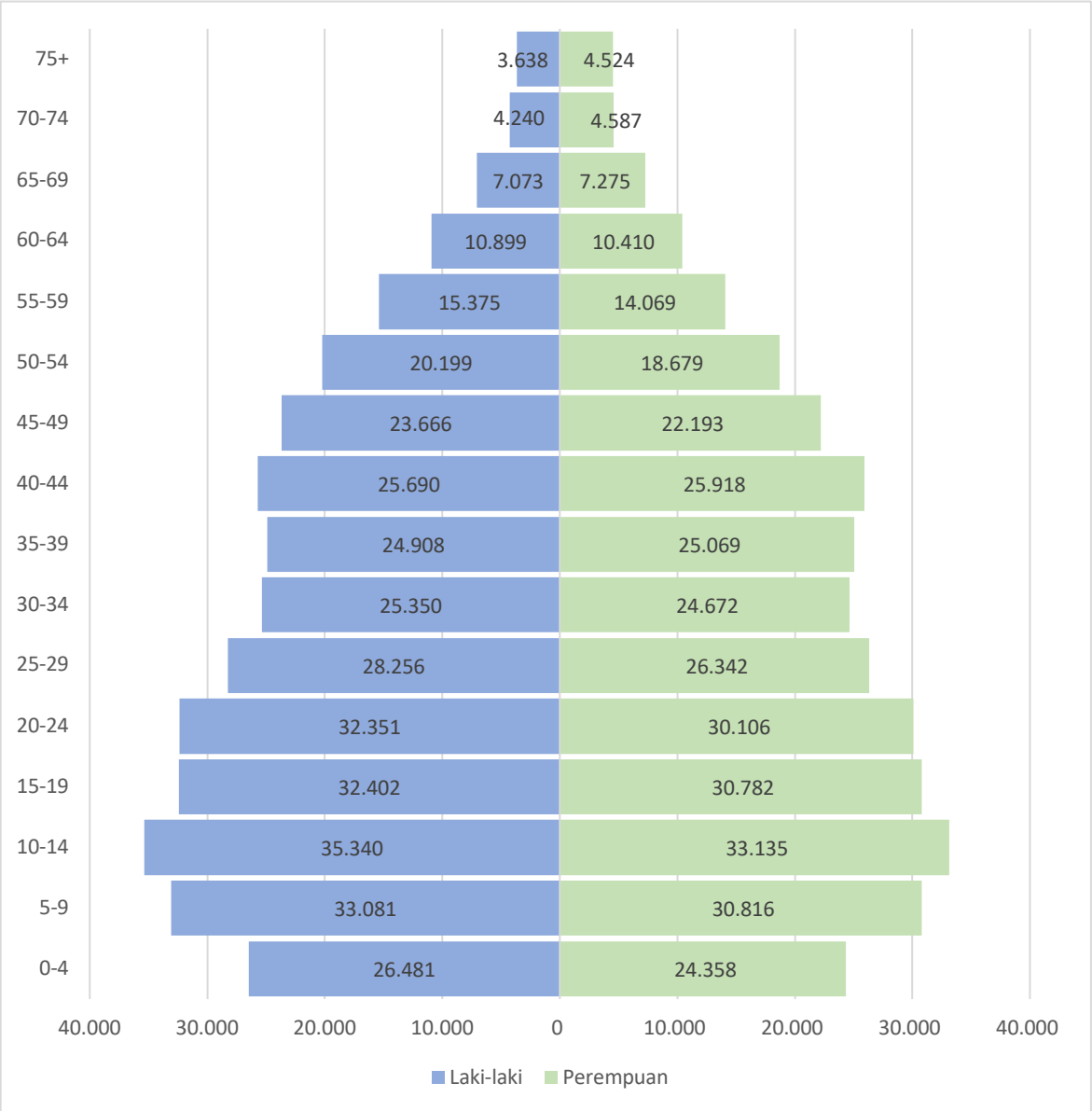
Gambar II.25 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis pada beberapa Kecamatan, dikarenakan tingginya migrasi dari luar Kabupaten yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena pendidikan hingga mencari pekerjaan. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi masuk perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, pengembangan potensi sumber daya daerah, menarik investasi baru, dan perkembangan wilayah/kawasan sehingga memungkinkan terjadi pemekaran wilayah baru. Sedangkan dampak negatif pertambahan penduduk adalah peningkatan tekanan terhadap kebutuhan lahan, berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, mendorong degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak diantisipa dengan program penanganan yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.1.1.7.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Piramida penduduk Kabupaten Bengkalis termasuk ke dalam kategori piramida penduduk *expansive*, dimana penduduk usia muda berada pada jumlah paling banyak, sedangkan penduduk tua jumlahnya sangat sedikit. Piramida penduduk ini juga mengindikasikan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat kelahiran lebih tinggi dibanding tingkat kematian. Penduduk Kabupaten Bengkalis banyak berada pada usia produktif (15-64) yaitu berjumlah 467.336 jiwa pada tahun 2024. Sedangkan penduduk yang berada pada kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 183.211 jiwa dan penduduk pada usia tidak produktif (>64 tahun) berjumlah 31.337 jiwa.



Sumber: Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2025

Gambar II.26Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Berdasarkan komposisi penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2024 yang digambarkan melalui piramida penduduk, terlihat bahwa jumlah penduduk relatif seimbang pada hampir

setiap kelompok umur, meskipun masih terdapat dominasi penduduk laki-laki pada sebagian besar kelompok usia produktif. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam penerapan pengarusutamaan gender, mengingat setiap kelompok umur memiliki kebutuhan, peran, serta potensi yang berbeda, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah perlu diarahkan tidak hanya pada aspek kuantitatif jumlah penduduk, tetapi juga pada upaya untuk menjamin pemenuhan hak, kesempatan, serta partisipasi yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, jumlah penduduk perempuan yang hampir mencapai setengah dari total penduduk Kabupaten Bengkalis merupakan modal pembangunan yang memiliki potensi setara dengan penduduk laki-laki untuk didayagunakan sebagai sumber daya strategis dalam pembangunan daerah. Perempuan tidak hanya berperan dalam lingkup keluarga dan sosial, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun lingkungan. Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, keterampilan, lapangan kerja, serta ruang partisipasi publik akan memperkuat kontribusinya dalam pembangunan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan secara responsif gender, sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.1.1.7.4 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk Kabupaten Bengkalis berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di kabupaten Bengkalis tahun 2024 didominasi oleh penduduk yang bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai sebanyak 119.101 jiwa dan penduduk yang berusaha sendiri sebanyak 53.153 jiwa.

Tabel II.20 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Tahun 2024

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	31.731	21.422	53.153
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar	29.776	7.340	37.116
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	8.140	1.193	9.333
Buruh/Karyawan/Pegawai	80.046	39.055	119.101
Pekerja bebas	18.452	2.171	20.623
Pekerja keluarga /takdibayar	8.854	16.704	25.558
Jumlah	176.999	87.885	264.884

Sumber: BPS Bengkalis Dalam Angka, 2025

Berdasarkan komposisi penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2024 yang digambarkan melalui piramida penduduk, terlihat bahwa jumlah penduduk relatif seimbang pada hampir setiap kelompok umur, meskipun masih terdapat dominasi penduduk laki-laki pada sebagian besar kelompok usia produktif. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian

penting dalam penerapan pengarusutamaan gender, mengingat setiap kelompok umur memiliki kebutuhan, peran, serta potensi yang berbeda, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah perlu diarahkan tidak hanya pada aspek kuantitatif jumlah penduduk, tetapi juga pada upaya untuk menjamin pemenuhan hak, kesempatan, serta partisipasi yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, jumlah penduduk perempuan yang hampir mencapai setengah dari total penduduk Kabupaten Bengkalis merupakan modal pembangunan yang memiliki potensi setara dengan penduduk laki-laki untuk didayagunakan sebagai sumber daya strategis dalam pembangunan daerah. Perempuan tidak hanya berperan dalam lingkup keluarga dan sosial, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun lingkungan. Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, keterampilan, lapangan kerja, serta ruang partisipasi publik akan memperkuat kontribusinya dalam pembangunan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan secara responsif gender, sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 3 fokus yaitu (i) fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (ii) fokus kesejahteraan sosial dan (iii) fokus seni budaya dan olahraga.

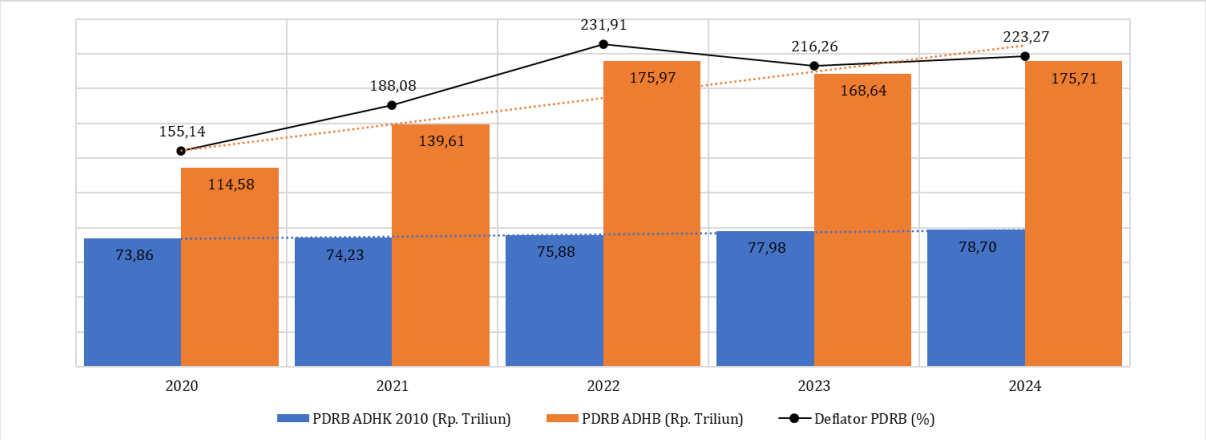
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Tinjauan dan analisis terhadap kesejahteraan ekonomi mennggambarkan kondisi perkembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bengkalis selama periode 5 tahun terkahir. Indikator-indikator yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah adalah PDRB, Struktur Perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Ketimpangan Williamson, dan Indeks Pembangunan Manusia. Capaiana-capaian indikator tersebut mengindikasikan perkembangan perekonomian daerah yang berdampak pada pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah.

2.1.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan meskipun masih dalam tren yang relatif lambat. Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, tercatat kenaikan dari Rp. 73,86 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 78,70 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi pasca kontraksi akibat pandemi Covid-19, meskipun laju pertumbuhannya belum sepenuhnya optimal. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ini adalah menurunnya kinerja sektor migas yang selama ini menjadi sektor dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Bengkalis. Namun, di sisi lain, sektor-sektor di luar migas terus menunjukkan

perkembangan positif, berkontribusi terhadap perbaikan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan nilai PDRB ini juga mengindikasikan adanya upaya diversifikasi ekonomi, yang meskipun bertahap, dapat menjadi pondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.



Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.27 Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku (Dalam Triliun) Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024

Perkembangan PDRB harga berlaku (ADHB) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif tetapi secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHB tercatat sebesar Rp. 114,58 triliun, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp. 139,61 triliun pada 2021 dan kembali mengingkat pada tahun 2022 menjadi Rp. 175,97 triliun. Kenaikan ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi, di mana aktivitas produksi dan konsumsi mulai meningkat seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi secara nasional dan regional.

Namun, pada tahun 2023, PDRB ADHB mengalami penurunan menjadi Rp. 168,64 triliun, yang mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi secara agregar. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini adalah masih terbatasnya daya dorong sektor utama, terutama sektor migas yang mengalami tren penurunan produksi. Meskipun demikian, sektor non-migas tetap menunjukkan perkembangan yang relatif baik, sehingga mampu menjadi penopang perekonomian pada sektor non migas. Pada tahun 2024, PDRB ADHB kembali meningkat menjadi Rp. 175,71 triliun, yang mencerminkan adanya pemulihan dan penguatan kembali aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Apabila dibandingkan, nilai PDRB harga konstan (ADHK) Kabupaten Bengkalis selama 2020-2024 jauh lebih rendah dibandingkan dengan PDRB ADHB. Hal ini terjadi karena PDRB ADHK mengukur output ekonomi berdasarkan harga tetap tahun dasar 2010, sedangkan PDRB ADHB mencerminkan nilai ekonomi berdasarkan harga aktual tahun berjalan. Gap ini semakin terlihat seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa yang tercermin dalam deflator PDRB. Pada tahun 2024, deflator PDRB meningkat menjadi 223,27, menunjukkan bahwa harga barang dan jasa telah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2010. Kenaikan deflator ini menunjukkan bahwa perkembangan PDRB nominal (ADHB) lebih banyak dipengaruhi oleh inflasi, sedangkan perkembangan

PDRB riil (ADHK) masih relatif rendah. Dengan demikian, meskipun PDRB ADHB terus meningkat secara nominal, PDRB riil yang mencerminkan produksi dan daya beli masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sama, sehingga perlu adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara PDRB riil dan pengendalian inflasi di Kabupaten Bengkalis.

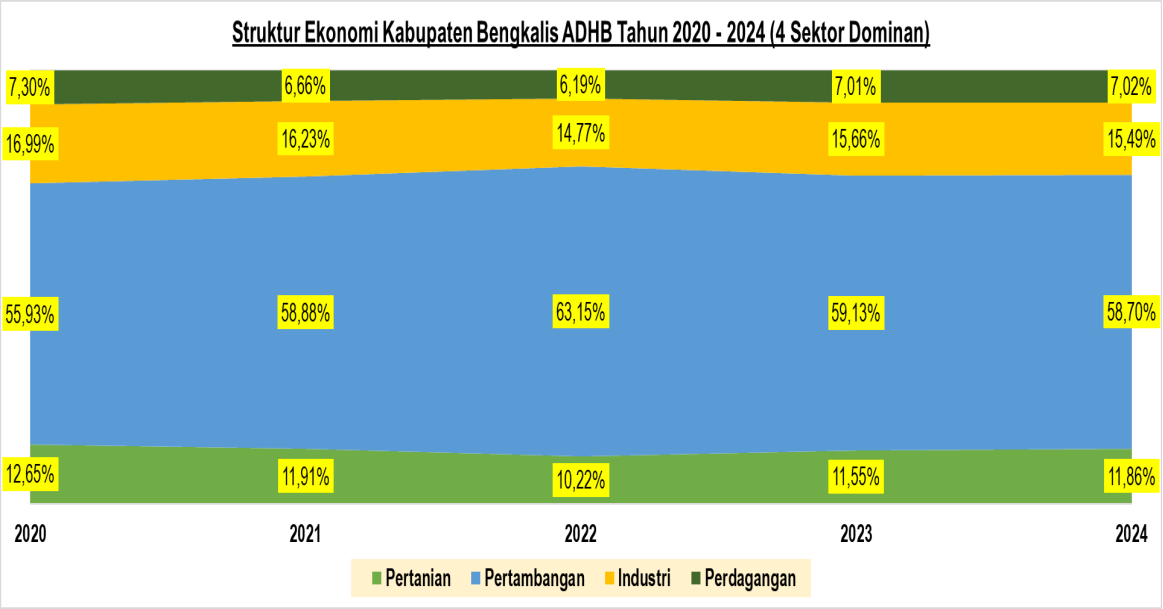
2.1.2.1.2 Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis dalam periode 2020-2024 masih didominasi oleh sektor pertambangan, meskipun kontribusinya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, sektor ini berkontribusi sebesar 55,93% terhadap PDRB ADHB, kemudian meningkat menjadi 63,15% pada tahun 2022, sebelum mengalami penurunan kembali menjadi 58,70% pada tahun 2024. Dominasi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bengkalis masih sangat bergantung pada sektor migas, yang rentan terhadap volatilitas harga global serta kebijakan transisi energi yang berpotensi mengurangi kontribusinya dalam jangka panjang.

Sementara itu, sektor pertanian, yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, memiliki kontribusi yang relatif stabil, berkisar antara 10,22% hingga 12,65% dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan sawit dapat menjadi alternatif penopang perekonomian daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, sektor industri mengalami sedikit fluktuasi, dengan kontribusi 16,99% pada tahun 2020, turun menjadi 14,77% pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 15,49% pada tahun 2024. Industri di Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang menunjukkan bahwa aktivitas industri masih berfokus pada pengolahan bahan mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga CPO di pasar global serta perubahan kebijakan kelapa sawit baik dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, diversifikasi produk berbasis kelapa sawit dapat menjadi alternatif strategis dalam menopang transformasi ekonomi Kabupaten Bengkalis, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor migas dan meningkatkan nilai tambah industri daerah.

Selanjutnya sektor perdagangan berkontribusi sekitar 6-7% terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir. Meskipun bukan sektor utama, perdagangan tetap memiliki peran penting dalam mendukung sektor lainnya, terutama dalam pemasaran hasil perkebunan dan industri. Penguatan infrastruktur logistik, digitalisasi UMKM, serta peningkatan akses pasar dapat menjadi strategi untuk mendorong pertumbuhan sektor ini.

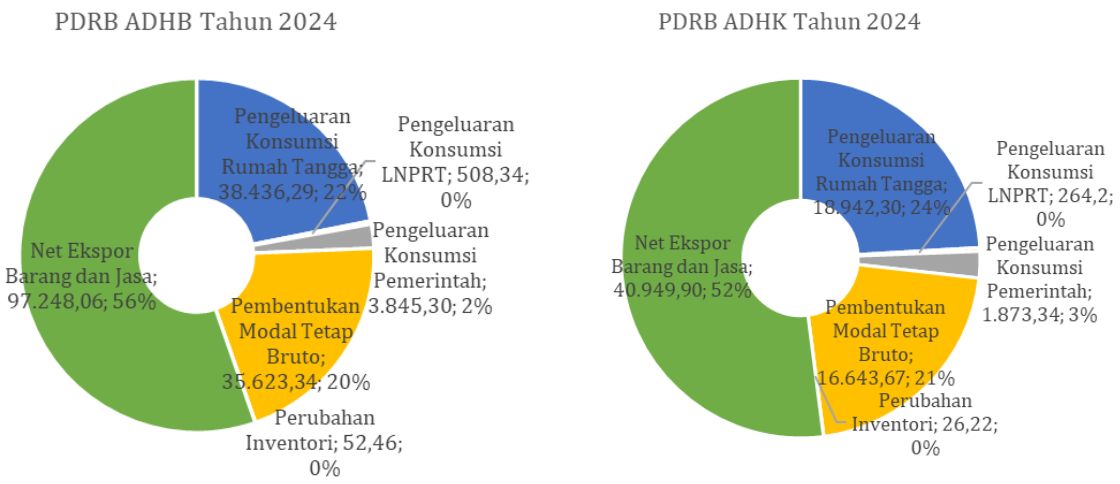


Sumber: BPS Bengkalis, 2025

Gambar II.28 Struktur Perekonomian Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Memperhatikan uraian tentang struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2020-2024, maka transformasi struktur ekonomi perlu menjadi pemikiran untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertamabangan, khususnya minyak. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan ekonomi harus disusun untuk berfungsi untuk mengatur rumah tangga daerah dalam menciptakan sistem perekonomian yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya lokal diluar sektor pertambangan. Upaya integrasi ekonomi sektor hulu (input) dan sektor hilir (output) yang melibatkan pelaku-pelaku ekonomi daerah perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, termasuk pertimbangan dinamika pasar domestik dan pasar internasional.

Perekonomian Kabupaten Bengkalis berdasarkan PDRB pengeluaran didominasi oleh perdagangan luar negeri, dengan kontribusi ekspor dan impor mencapai 56% menurut ADHB dan 52% menurut ADHK. Besarnya kontribusi perdagangan luar negeri terhadap perekonomian Kabupaten Bengkalis berkaitan erat dengan aktivitas sektor pertambangan dan industri besar, terutama minyak dan gas serta minyak nabati. Hal ini mencerminkan bahwa perekonomian Bengkalis bersifat terbuka dan sangat bergantung pada perdagangan luar negeri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah..



Sumber: BPS Riau, 2024

Gambar II.29 Struktur Perekonomian (PDRB) Kabupaten Bengkalis Menurut Pengeluaran Tahun 2024

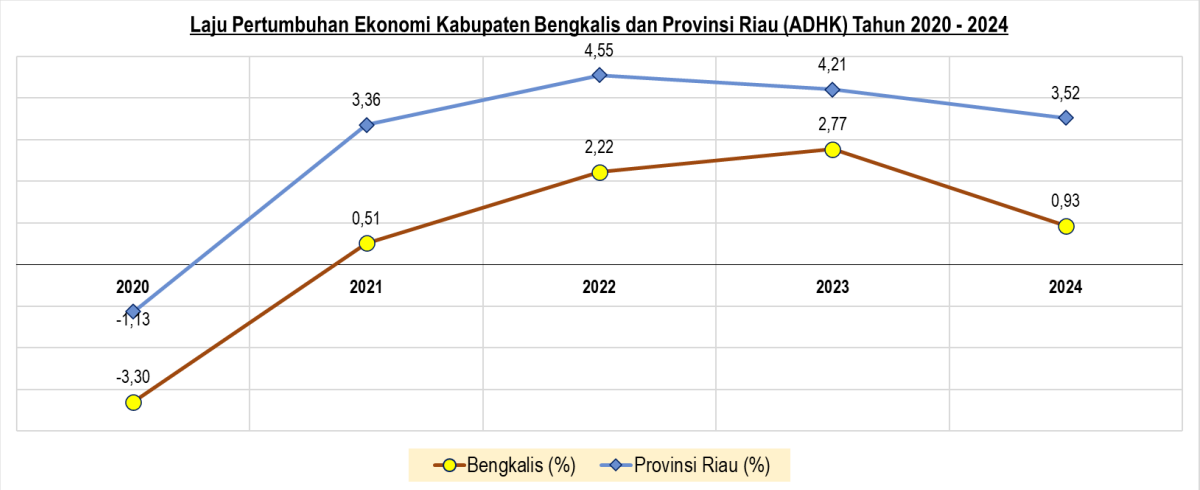
Selain aktivitas perdagangan, aktivitas pengeluaran yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 22% dalam PDRB nominal dan 24% pada PDRB riil (konstan). Kemudian pembentukan modal bruto yang merupakan konsumsi dan investasi sektor dunia usaha dengan kontribusi 20% dalam PDRB nominal dan 21% pada PDRB riil (konstan).

Jika dicermati lebih dalam, maka secara keseluruhan struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis pada sisi lapangan usaha didominasi oleh pertambangan dan sektor industri, yang kemudian menjadi aktivitas ekonomi pada perdagangan luar negeri dan juga pembentukan modal atau investasi dalam sektor tersebut. Maka penopang berikutnya dalam perekonomian Bengkalis adalah konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu, jaminan terhadap daya beli masyarakat perlu menjadi perhatian untuk memperhatankan struktur ekonomi yang kuat, dengan mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi produksi pada tingkat masyarakat dan menjadi masyarakat tetap memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebuuhan sehari-hari. Peredaran jumlah uang yang beredar dalam perekonomian yang distribusi sampai keapda sumber rumah tangga menjadi penting untuk menjaga dinamika perekonomian Bengkalis di masa mendatang.

2.1.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kondisi perekonomian daerah dari waktu ke waktu yang diukur dari tahun 2020-2024. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur tingkat dinamika perkembangan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dihitung dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan tahun 2010. PDRB Kabupaten Bengkalis adalah kemampuan produksi barang dan jasa pada seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis sebagai ukuran nilai tambah dari aktivitas ekonomi daerah. Berdasarkan data yang dikumpulkan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis selama tahun 2020-

2023 mengalami perbaikan, yang ditunjukkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut, namun pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis turun menjadi 0,93% dari 2,77% pada tahun 2023.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.30 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 - 2024

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 mengalami kontraksi secara total dengan pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, dan kembali membaik pada kurun waktu 2021-2024, hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis lebih ekspansif dan mencapai pertumbuhan yang positif. Namun, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Kondisi ini disebabkan oleh dominasi sektor pertambangan, khususnya minyak dan gas (migas), yang kinerjanya terus menurun. Penurunan ini berdampak langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Meskipun sektor migas mengalami penurunan, sektor-sektor di luar migas menunjukkan pertumbuhan positif selama 2018-2023. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang tetap stabil mencerminkan daya tahan perekonomian Kabupaten Bengkalis terhadap perubahan struktur industri. Meskipun kontribusi sektor-sektor di luar migas masih di bawah 50% terhadap total perekonomian, sektor-sektor ini justru menjadi pendorong utama dalam memperkuat struktur ekonomi Bengkalis, menunjukkan potensi diversifikasi yang lebih berkelanjutan..

2.1.2.1.4 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk msikinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah

penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis cenderung menurun baik secara absolut, maupun secara proporsional terhadap total jumlah penduduk.

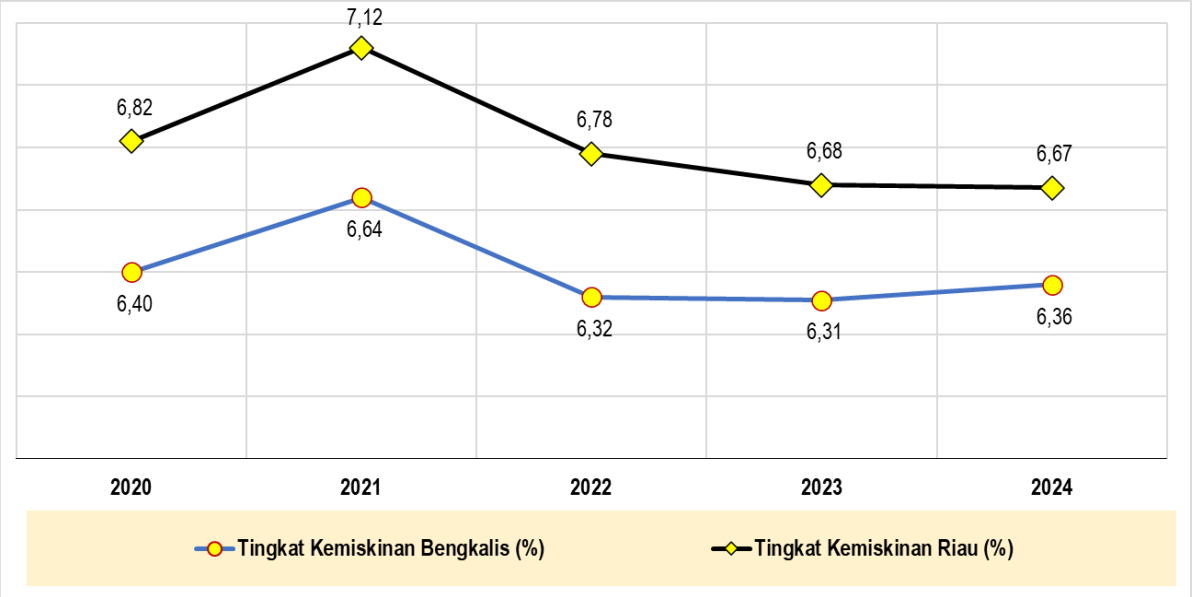
Jika diperhatikan lebih jauh, bahwa salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Bengkalis adalah efek inflasi, dimana garis kemiskinan terus meningkat dari Rp. 581.416/kapita/bulan pada tahun 2020 menjadi Rp. 755.572/kapita/bulan. Dengan pengertian, sebuah rumah tangga dengan empat anggota, di mana hanya kepala keluarga yang berpenghasilan, akan dikategorikan sebagai miskin jika memiliki pendapatan kurang dari Rp3 juta per bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa beban hidup penduduk miskin semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga. Pengendalian inflasi dan kondisi ekonomi makro menjadi penting dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan dengan menggunakan *headcount ratio* atau jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk, memberikan gambaran tingkat kemiskinan, namun tidak menggambarkan tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. *Headcount index* memenuhi aksioma fokus, namun informasi kemiskinan yang diberikan masih sangat terbatas karena tidak memberikan informasi 'seberapa miskin' orang miskin tersebut atau pemenuhan aksioma kesamaan, serta tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan atau pengeluaran diantara penduduk miskin atau disebut dengan aksioma transfer.

Tabel II.21 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2024

Kondisi Kemiskinan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	36,96	37,66	36,03	36,10	36,56
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,40	6,64	6,32	6,31	6,36
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	581.416	604.925	648.933	713.826	755.572
Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,72	0,73	0,81	1,03	0,72
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,14	0,13	0,15	0,23	0,12

Sumber: BPS Riau, 2025

Secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan dari 6,40% pada tahun 2020 menjadi 6,31% pada tahun 2023, namun sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 6,36%. Sedangkan kemiskinan di Riau dari 6,82% pada tahun 2020 menjadi 6,67 pada tahun 2024.



Sumber: BPS Riau, 2024

Gambar II.31 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

Indek kedalaman kemiskinan atau disebut juga dengan *poverty gap* menggambarkan jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan (defisit pendapatan). Dengan kata lain, *poverty gap* merupakan selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan rumah tangga miskin. Dengan demikian *poverty gap* disebut sebagai ukuran kedalaman kemiskinan. Sedangkan bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan dianggap memiliki nilai indeks *poverty gap* sama dengan nol. Perkembangan poverty gap di Kabupaten Bengkalis semakin membaik hingga tahun 2022, namun meningkat menjadi 1,03 pada tahun 2023, dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 0,72 yang berarti tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Bengkalis turun pada tahun 2024.

Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin semakin merata. Perkembangan keparahan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sebesar 0,14 menjadi 0,23 pada tahun 2023, dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 0,12 yang berarti terjadi penurunan keparahan kemiskinan selama periode tersebut.

Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bengkalis hanya mencapai 9,74 tahun, setara dengan kelas 1 SMA. Hal ini mencerminkan rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMA yang hanya sebesar 93,13 dan Angka Partisipasi Murni (APM), yaitu hanya 69,99. Kondisi ini disebabkan oleh masih belum meratanya sarana dan prasaran pendidikan Kabupaten Bengkalis. Di beberapa daerah terpencil, fasilitas pendidikan cukup minim, sehingga berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam melanjutkan studinya.

Selain aspek pendidikan, distribusi sarana dan prasarana kesehatan juga masih menjadi masalah di Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 22 puskesmas, namun masih terdapat Kecamatan dengan jumlah 1 puskesmas yang meliputi Kecamatan Pinggir, Kecamatan Talang Muandau, dan Kecamatan Bandar Laksamana. Selanjutnya pada tahun 2024, terdapat 479 tenaga medis, namun distribusinya masih belum merata pada beberapa Kecamatan dengan jumlah tenaga medis yang paling kecil terdapat di Kecamatan Rupat Utara yaitu hanya 5 tenaga medis. Selain itu, cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin hanya mencapai 60,08% pada tahun 2023. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dapat berdampak terhadap kualiatas hidup masyakat miskin yang dapat memperparah kondisi kemiskinan.

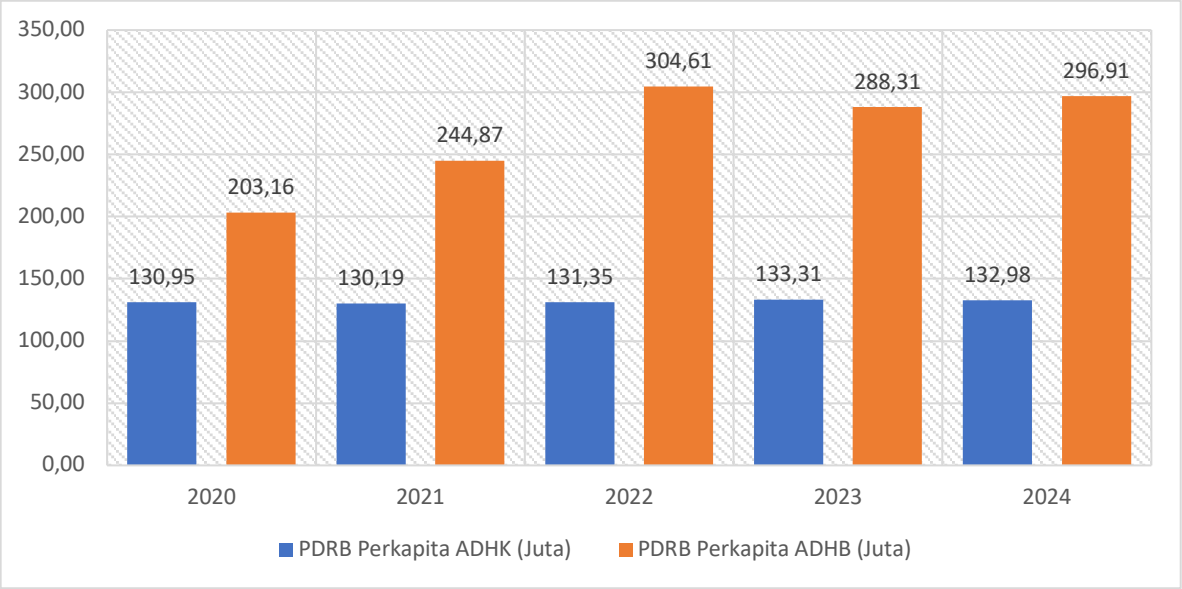
Infrastruktur jalan yang buruk juga menjadi faktor yang memperparah kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Hanya 41,03% jalan yang berada dalam kondisi baik pada tahun 2024 dan indeks aksesibilitas masuk kategori rendah dengan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah hanya sebesar 0,16. Kondisi ini apabila tidak segera diatasi akan dapat memperparah kondisi kemiskinan karna akan berdampak terhadap meningkatnya biaya dalam mengakses layanan dasar dan sumber ekonomi.

Selain itu, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bengkalis masuk kategori tahan pangan dengan nilai indeks sebesar 65,75, namun pada dimensi ketersediaan pangan masih realtif rendah. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap *supply* pangan dari luar. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat menyebabkan fluktuasi harga pangan yang tinggi.

Secara keseluruhan, kemiskinan di Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural yang saling terkait. Upaya penanggulangannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, dengan fokus pada peningkatan akses pendidikan, pemerataan fasilitas kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta penguatan ketahanan pangan.

2.1.2.1.5 PDRB Perkapita

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bengkalis merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Bengkalis dari keseluruhan perekonomian. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan pada suatu negara atau daerah. Dengan demikian, semakin besar pendapatan per kapita penduduk, maka semakin makmur penduduk di negara atau daerah tersebut.



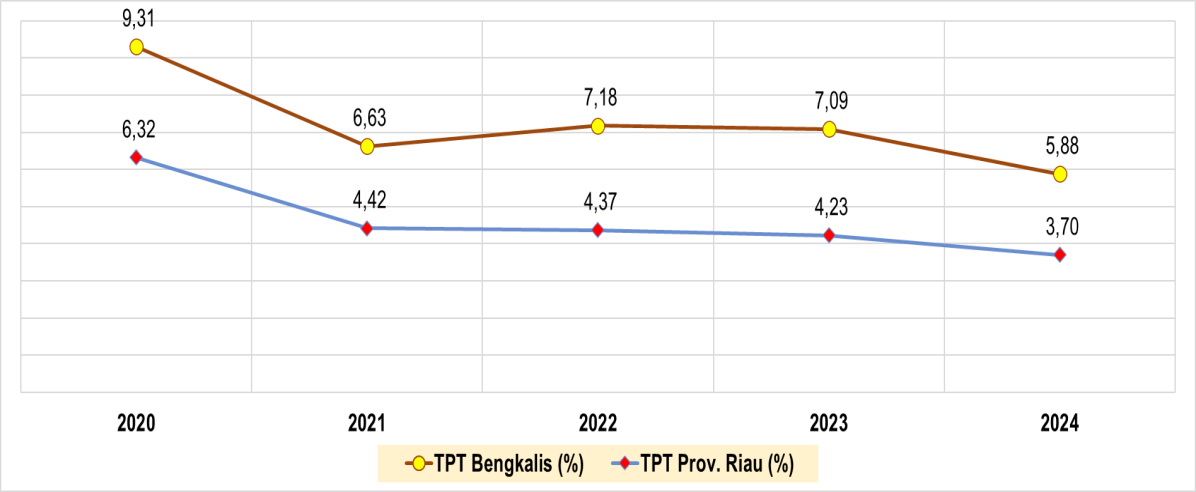
Ket: BPS Provinsi Riau, 2025

Gambar II.32 PDRB per Kapita ADHK dan ADHB Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)

Berdasarkan data PDRB per kapita Kabupaten Bengkalis, terjadi peningkatan PDRB per kapita ADHB dari Rp. 203,16 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 304,61 juta pada tahun 2022, namun turun pada tahun 2023 menjadi Rp. 288,31 juta dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi Rp. 296,91 juta. Namun, jika dilihat dari PDRB per kapita ADHK 2010 mengalami fluktuasi, dari Rp 130,95 juta pada tahun 2020, turun pada tahun 2021 menjadi Rp. 130,19 juta dan kembali meningkat hingga tahun 2023 menjadi 133,31 juta, namun turun kembali menjadi 132,98 pada tahun 2024. Gap antara PDRB per kapita ADHB dan ADHK semakin melebar, mengindikasikan bahwa peningkatan ekonomi lebih dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi dibandingkan pertumbuhan output riil. Dengan demikian, perhatian pada pengendalian inflasi menjadi penting dalam perekonomian Bengkalis dimasa mendatang untuk mengelola tekanan harga yang dapat berdampak terhadap perekonomian.

2.1.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

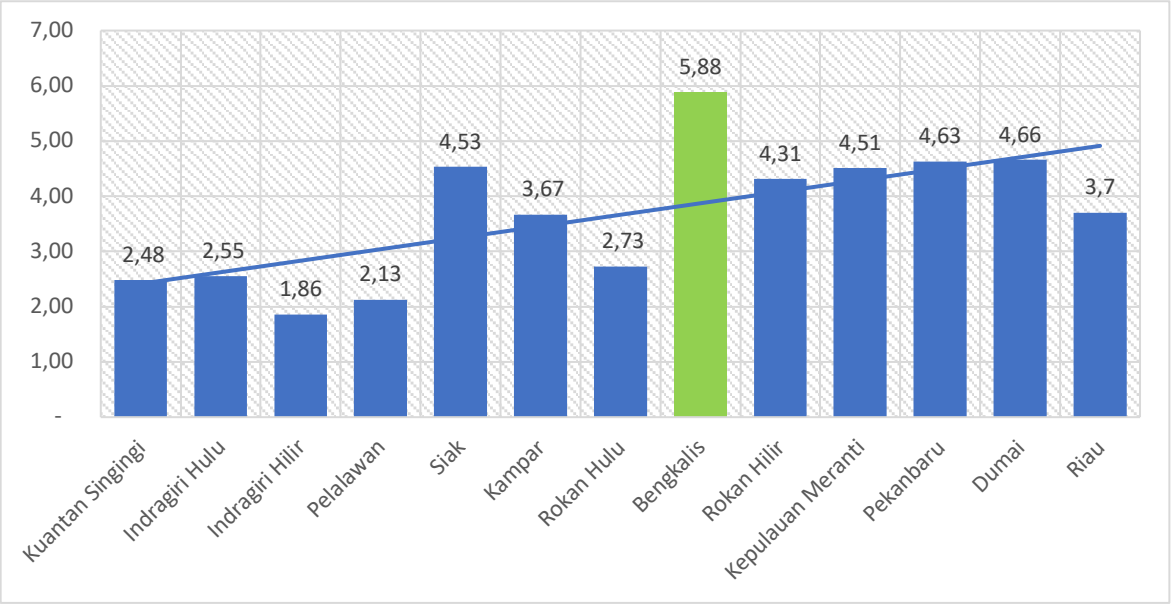
Pengangguran terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi akibat angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau malas bekerja. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Bengkalis pada sektor ketenagakerjaan, dapat dilihat seberapa besar tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Bengkalis. Indikator tingkat pengangguran menjadi ukuran terhadap kemampuan perekonomian menyerap angkatan kerja kerja. Secara umum, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penangguran terbuka Provinsi Riau selama periode 2020-2024.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.33 Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 (%)

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sebesar 9,31%, kemudian turun menjadi 6,63% pada tahun 2021, kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 7,18% dan turun hingga tahun 2024 menjadi 5,88%. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis memiliki trend fluktuasi menurun sepanjang 2020-2024.



Sumber: BPS Riau, 2025

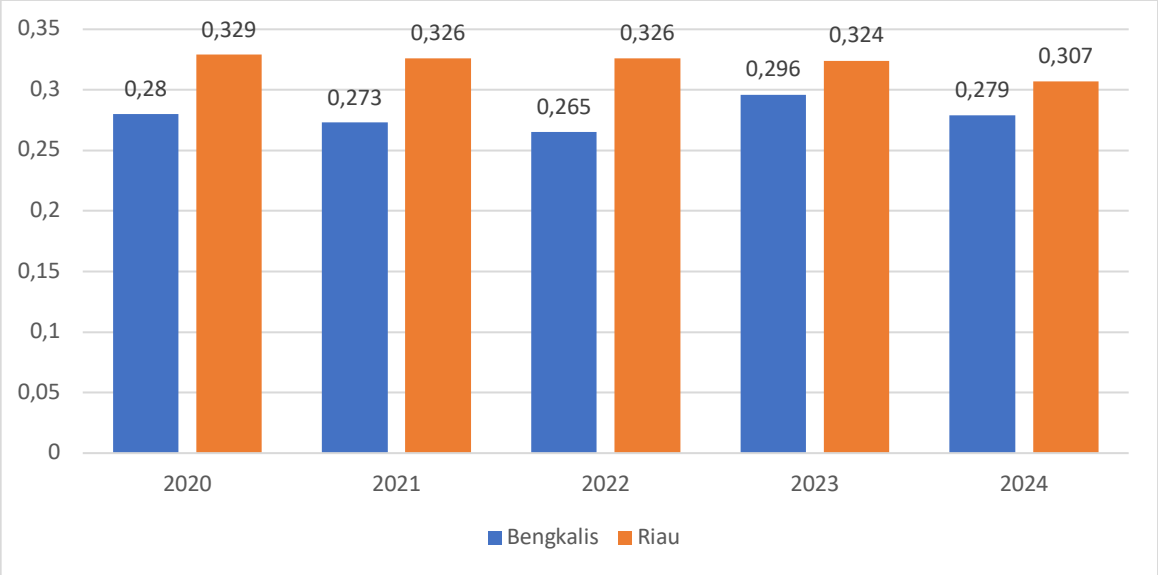
Gambar II.34 Posisi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau tahun 2024

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 menempati posisi tertinggi di Provinsi Riau, meskipun terdapat penurunan pada tahun sebelumnya. Salah satu faktor penyebab tingginya pengangguran di daerah ini adalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Selain itu, kesenjangan keterampilan menjadi masalah ketenagkerjaan, di mana sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Bengkalis memiliki

tingkat pendidikan rendah dan keterbatasan sertifikasi profesi. Hal Ini menghambat angkatan kerja yang ada untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Sebagai upaya mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan berbagai program, salah satunya pelatihan berbasis unit kompetensi, yang telah memberikan sertifikat kompetensi kepada 832 orang melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selanjutnya *Job fair* atau bursa kerja yang diadakan selama tiga tahun berturut-turut, berhasil menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja lokal yang memiliki KTP Kabupaten Bengkalis. Upaya tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mengurangi tingkat pengangguran, namun agar tren penurunan angka pengangguran terus berlanjut, sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan dunia pendidikan perlu terus diperkuat. Kerjasama ini penting untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang dapat menjawab tantangan pasar kerja yang terus berkembang..

2.1.2.1.7 Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dalam perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh. Secara umum ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih merata dibabdingkan dengan ketimpanga pendapatan antar penduduk Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari angka gini rasio Kabupaten Bengkalis selalu lebih rendah dibandingkan dengan angka gini rasio Provinsi Riau selama periode 2020-2024.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.35 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2024

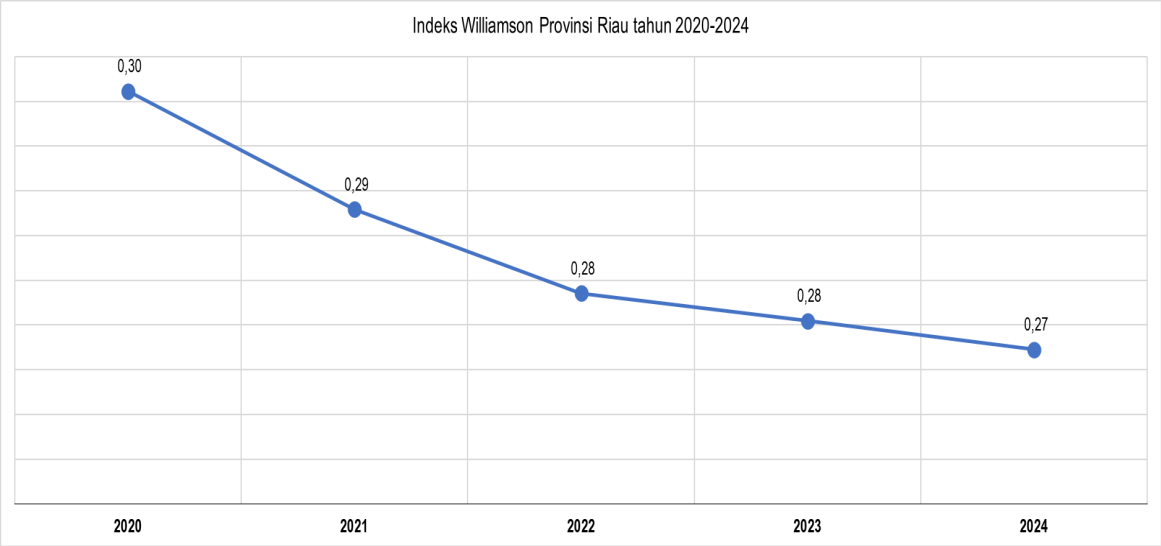
Berdasarkan data di atas, Gini Rasio Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau, yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Bengkalis relatif lebih merata. Namun, terjadi peningkatan Gini Rasio di Kabupaten Bengkalis dari

0,265 pada tahun 2022 menjadi 0,296 pada tahun 2023, namun kembali turun menjadi 0,279 pada tahun 2024, yang masih masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Sementara itu, Gini Rasio Provinsi Riau berada pada angka 0,324 pada tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 0,307 pada tahun 2024, yang termasuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Adanya kecenderungan meningkatnya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bengkalis perlu menjadi perhatian, meskipun masih dalam batas yang relatif terkendali. Hal ini dikarenakan ketimpangan yang tinggi dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang berpotensi memicu berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu, upaya pemerataan pendapatan harus terus menjadi fokus dalam kebijakan pembangunan daerah agar mendorong inklusivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan yang nantinya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.1.8 Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Kesenjangan wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah tertentu. Untuk memahami posisi Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Riau dapat dilihat dari perbandingan perkembangan nilai Indeks Williamson antar kabupaten di Provinsi riau. Pola pembangunan yang tidak merata serta perbedaan karakteristik setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau menjadi masalah yang timbul sehingga menyebabkan pola pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah kabupaten/kota menjadi berbeda-beda. Perbedaan nilai PDRB dalam perekonomian dan perbedaan jumlah penduduk mengakibatkan PDRB per kapita penduduk setiap kebupaten/koda di Provinsi Riau juga berbeda. Kapasitas produksi daerah dan jumlah penduduk menjadi variabel penting dalam pendistribusian pendapatan kepada masyarakat yang dapat menyebabkan terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah. Berdasarkan hasil perhitungan Indek Williamson, ditemukan bahwa terjadinya penurunan trend ketimpangan williamson di Provinsi Riau pada tahun 2020-2024. Gambar berikut menjelaskan perkembangan Indeks Williamson di Provinsi Riau selama periode 2020- 2024.

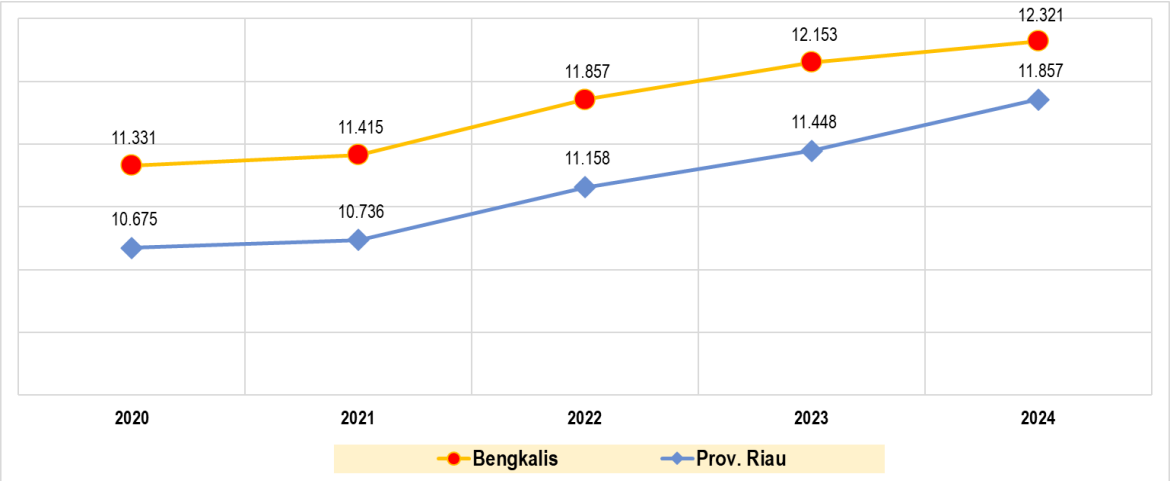


Sumber: BPS Riau, 2025 (diolah)

Gambar II.36 Ketimpangan Williamson Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

2.1.2.1.9 Pengeluaran Per Kapita

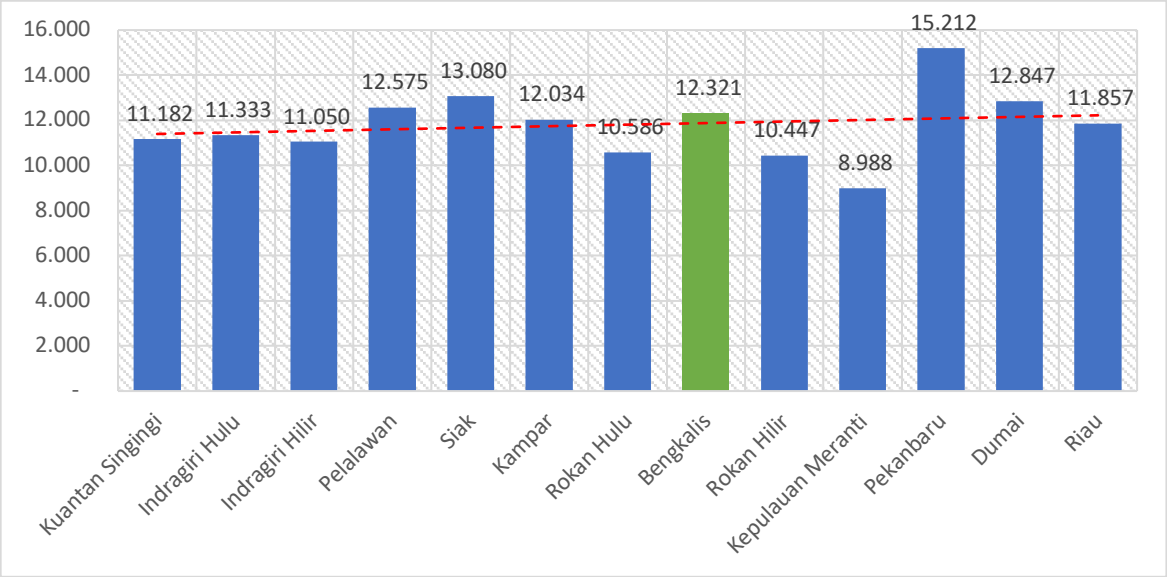
Tingkat pengeluaran riil dalam perhitungan IPM merupakan gambaran kondisi tingkat daya beli penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat hidup dengan layak. Pengeluaran perkapita riil dalam perhitungan IPM merupakan rata-rata pengeluaran perkapita konstan atau rill yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran per kapita riil merupakan besaran biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi makan dan non makanan semua anggota rumah tangga selama sebulan. Pengeluaran per kapita riil akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk dari dimensi ekonomi dalam perhitungan IPM. Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.37 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Riil (Rp 000/Orang/Tahun) Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024

Selama periode 2020-2024, pengeluaran per kapita riil penduduk Kabupaten Bengkalis cenderung meningkat dari 11.331 ribu/orang/tahun pada tahun 2020, menjadi 12.321 ribu/orang/tahun pada tahun 2024. Pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Bengkalis berada pada peringkat kelima tertinggi di Riau dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran riil per kapita penduduk Riau selama periode 2020-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat kesejahteraan dan tingkat hidup layak yang lebih baik jika dibandingkan dengan penduduk Riau.



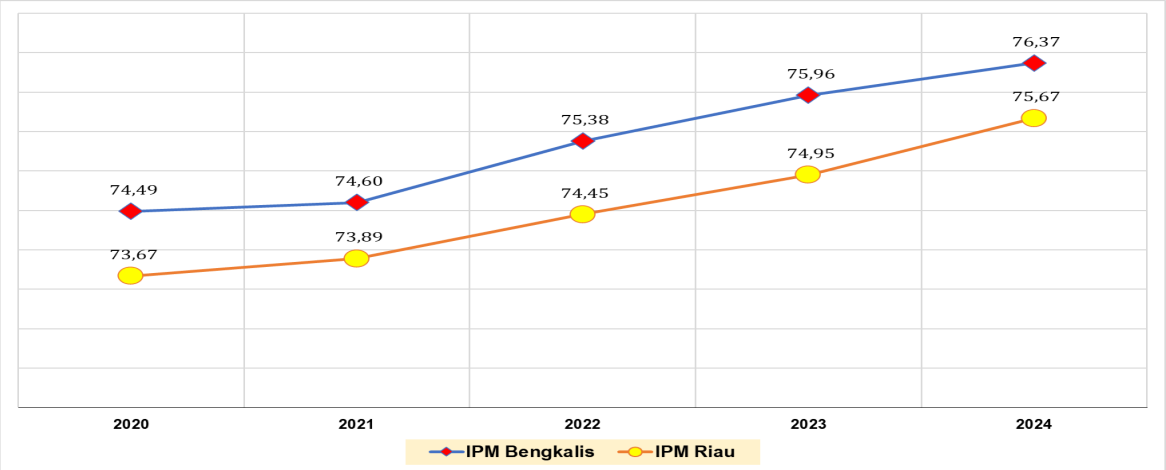
Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.38 Posisi Capaian Pengeluaran Riil per Kapita (Rp 000/Kapita/Bulan) Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau Tahun 2024

2.1.2.1.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Analisis kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang diakui oleh semua negara di seluruh dunia.

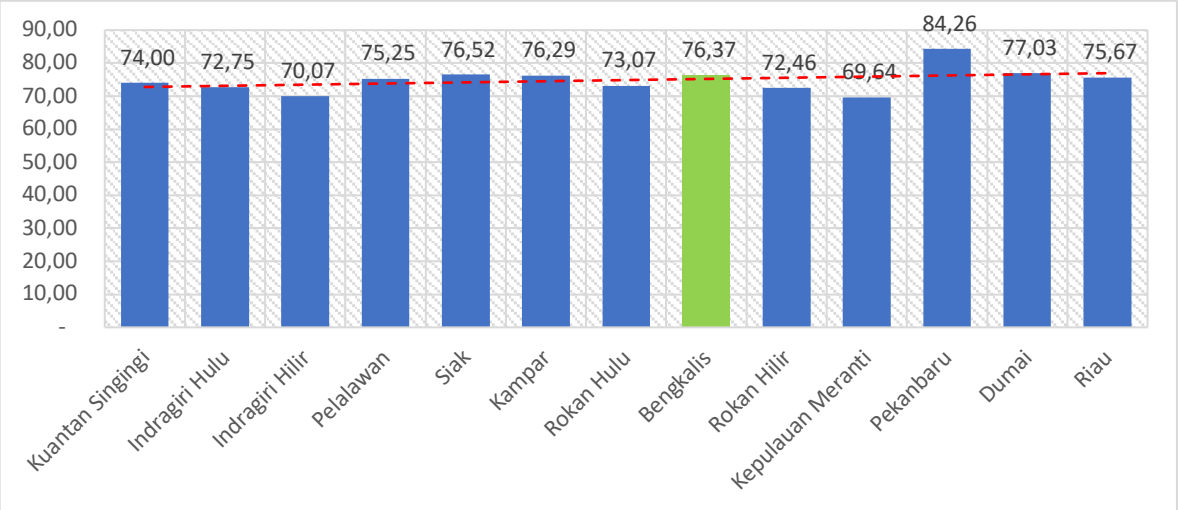
Nilai IPM dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional sebagai ukuran perkembangan pembangunan manusia seutuhnya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran IPM akan menggambarkan perkembangan kualitas hidup manusia dari waktu ke waktu seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Hakekat pembangunan pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan, pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan perlu keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan manusia seutuhnya.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.39 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan selama periode 2020-2024, berada diatas capaian IPM Riau dan menempati peringkat keempat tertinggi setelah Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kabupaten Siak. Nilai IPM Kabupaten Bengkalis naik dari 74,49 pada tahun 2020 menjadi 76,37 pada tahun 2024, masuk dalam kategori tinggi. Perkembangan IPM menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat, sehingga secara umum kualitas hidup penduduk Kabupaten Bengkalis terus membaik selama periode tersebut.



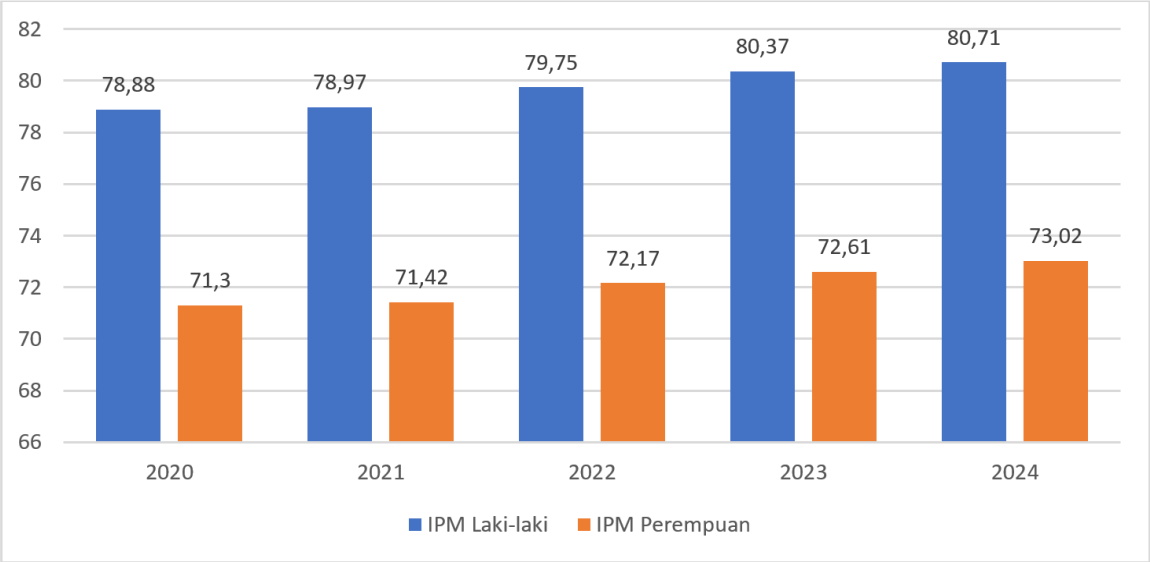
Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.40 Posisi Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis tahun 2020–2024 menurut jenis kelamin, terlihat adanya peningkatan capaian baik pada laki-laki maupun perempuan. IPM laki-laki meningkat dari 78,88 pada tahun 2020 menjadi 80,71 pada tahun 2024, sedangkan IPM perempuan juga menunjukkan peningkatan dari

71,30 pada tahun 2020 menjadi 73,02 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan, meskipun masih terdapat kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks pengarusutamaan gender, kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus mendorong agar pembangunan manusia dapat berjalan lebih seimbang. Upaya yang dilakukan diarahkan pada peningkatan akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, melalui program-program yang responsif terhadap kebutuhan keduanya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender diharapkan mampu memperkuat kualitas pembangunan manusia, sehingga terwujud masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



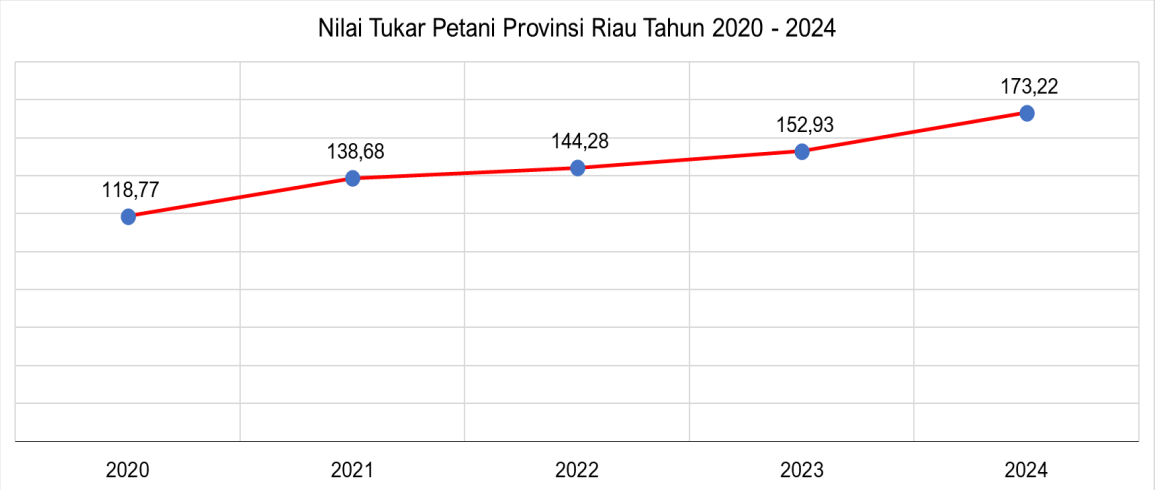
Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.41 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

2.1.2.1.11 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) merupakan indikator penting dalam pembangunan, karena menggambarkan tingkat daya tukar atau daya beli petani terhadap produk yang dibeli atau bayar baik untuk pemenuhan konsumsi sehari-hari maupun untuk pemenuhan input produksi untuk menghasilkan barang-barang pertanian. Dengan demikian, nilai tukar petani yang semakin tinggi menggambarkan daya beli petani produk konsumsi dan input produksi pertanian semakin baik. Nilai tukar petani yang semakin tinggi mengindikasikan kesejahteraan petani yang lebih sejahtera secara relatif. Nilai tukar pada tingkat 100 mengindikasikan bahwa nilai produksi yang dihasilkan baru mencukupi untuk membeli kebutuhan konsumsi rumah tangga petani dan membeli kebutuhan produksi yang diperlukan petani dalam berusahatani. Perkembangan nilai tukar petani Kabupaten Bengkalis diukur dari nilai tukar petani Provinsi Riau, hal ini disebabkan ketersediaan data nilai tukar petani kabupaten yang tidak lengkap. Secara umum, nilai tukar petani di

Provinsi Riau menunjukkan trend yang meningkat, mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.42 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 2020-2024

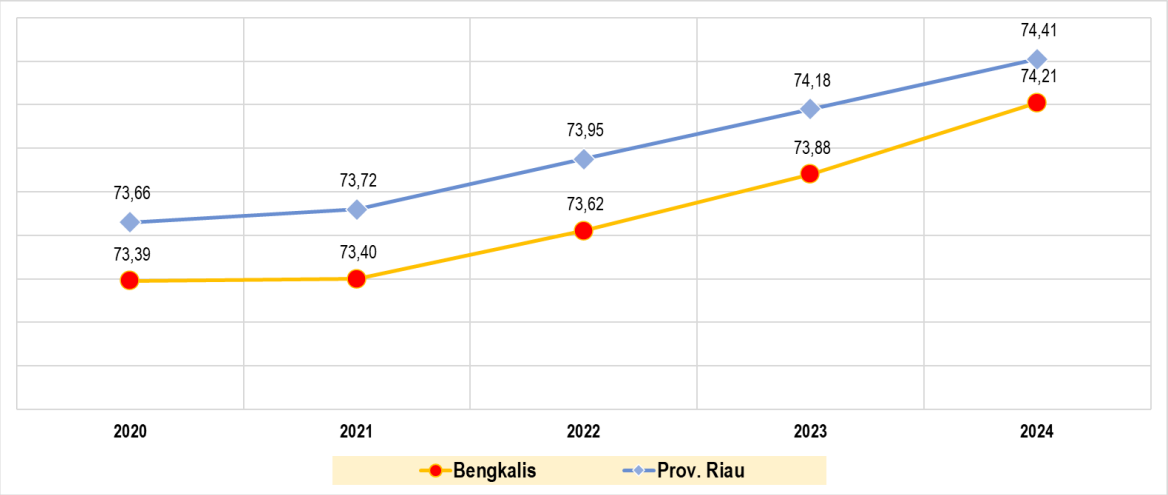
Nilai tukar petani selama periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan nilai tukar petani di Riau menggambarkan bahwa daya saing ekonomi daerah sangat rentan dengan kondisi pasar dunia, khususnya kelapa sawit dan minyak bumi. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat kerentanan harga komoditi dunia terhadap harga komiditi yang dihasilkan petani perlu menjadi perhatian untuk mengurangi pengaruh kondisi ekonomi global terhadap petani di daerah. Pengembangan industri pengolahan yang terintegrasi antara petani dan industri besar di daerah dapat menjadi pertimbangan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Jaminan stabilitas harga komoditi sampai pada tingkat petani dan kontrol terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan petani menjadi hal penting dalam pembangunan daerah.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata estimasi lama tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Perhitungan angka harapan hidup dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*), yaitu dengan menggunakan pendekatan data Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH). Umur harapan hidup menggambarkan kondisi kesehatan manusia. Semakin lama harapan angka harapan hidup penduduk maka akan semakin baik kondisi pembangunan kesehatan manusia pada daerah tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan membaiknya angka harapan hidup antara lain sistem pelayanan kesehatan yang baik, respon yang cepat dalam keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan menjangkau tenaga kesehatan.

Capaian usia harapan hidup penduduk pada suatu daerah dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Peningkatan usia harapan hidup penduduk pada suatu daerah disebabkan karena hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, peningkatan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan dan peningkatan pendapatan perkapita penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Usia harapan hidup penduduk merupakan jumlah rata-rata usia penduduk yang diperkirakan atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah pada masa mendatang. Usia harapan hidup penduduk menjadi sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.43 Perkembangan Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Usia harapan hidup saat lahir penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan 0,82 selama periode 2020-2024, yaitu dari umur harapan hidup 73,39 tahun pada tahun 2020 menjadi 74,21 tahun pada tahun 2024. Secara umum usia harapan hidup penduduk Kabupaten Bengkalis sedikit rendah dari rata-rata angka harapan hidup penduduk Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan penduduk secara umum di Kabupaten Bengkalis masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau umumnya, termasuk respon cepat terhadap keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan jangkauan tenaga kesehatan. Selain faktor-faktor tersebut, hal-hal lain yang mempengaruhi terhadap perbaikan usia harapan hidup penduduk pada suatu daerah adalah gaya hidup sehat penduduk. Secara umum, keberhasilan pembangunan kesehatan, termasuk pembinaan gaya hidup sehat bagi peningkatan kualitas hidup penduduk di Provinsi Riau masih lebih baik jika dibandingkan dengan di Kabupaten Bengkalis selama periode 2020 - 2024.

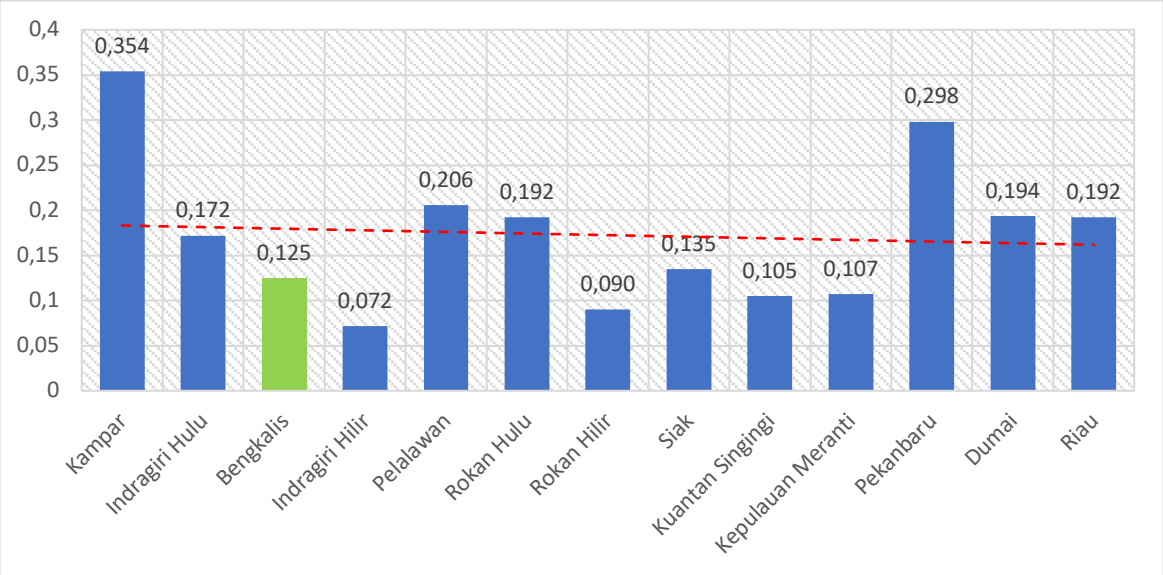
2.1.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1 yang dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni Keluarga Sehat bila nilai IKS > 0,8, Keluarga

Pra Sehat bila nilai IKS 0,5 <0,8 dan Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS < 0,5. Adapun 12 indikator pembentuk Indek keluarga sehat yakni :

1. Keluarga mengikuti program KB, dimana tidak sekedar membatasi jumlah anak tapi juga meningkatkan kesehatan ibu dan anak, terkait ASI, kecukupan pemenuhan gizi yang berkualitas, maupun pola asuh.
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten sehingga ibu dan bayi bisa mendapatkan penanganan segera jika terjadi komplikasi. Selain itu, bayi juga akan mendapat IMD (Inisiasi Menyusu Dini) yang baik untuk pertumbuhannya.
3. Bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap, berfungsi untuk melindungi anak dari penyakit berbahaya seperti polio, difteri, hepatitis B, hingga meningitis.
4. Bayi mendapat ASI ekslusif, diberikan hingga anak berusia dua tahun. Pemberian ASI menunjang tumbuh kembang yang optimal. Bayi yang diberi ASI pun tidak mudah sakit. Sebab, ASI merupakan sumber makanan terbaik untuk bayi. Proses pemberian ASI juga baik untuk membangun hubungan emosional antara ibu dan anak
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, sehingga dapat dipantau perkembangannya, dan jika tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan dapat segera dilakukan perbaikan.
6. Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar, apabila tidak segera mendapat pengobatan, pasien bukan hanya membahayakan dirinya, tapi juga anggota keluarga yang lain. Oleh karenanya, jika ada anggota keluarga yang menunjukkan gejala TBC, segera dilakukan pemerikaan ke ke dokter untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan.
7. Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan, Hipertensi atau tekanan darah rendah adalah penyakit berbahaya yang sering disepelekan karena tidak bergejala. Padahal, dampaknya bisa fatal. Pencegahan hipertensi bisa dilakukan dengan metode CERDIK: Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet seimbang, Istirahat cukup, dan Kelola stress.
8. Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan. Gangguan jiwa dapat menurunkan kualitas hidup seseorang. Bila ada anggota keluarga yang memiliki tanda-tanda gangguan jiwa, seperti perubahan emosi atau perilaku, dampingi dan ajak dia untuk berobat guna mendapatkan penanganan yang tepat.
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok, Dalam satu barang rokok, terdapat sekitar 4.000 zat kimia beracun. Dampaknya bahkan tidak hanya merugikan orang yang merokok (perokok aktif), tapi juga orangorang di sekitarnya (perokok pasif). Untuk itu, sebaiknya kebiasaan merokok dikurangi atau dihentikan.
10. Keluarga mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seluruh anggota keluarga mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan

11. Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih, dengan Sumber air harus selalu dijaga kebersihannya dan dilengkapi saluran pembuangan air, dimana tempat penyimpanan air juga harus bebas kotoran dan lumut. Letak sumber air harus berjauhan dengan jamban dan pembuangan sampah (minimal 10 meter).
12. Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih, dengan buang air kecil dan besar di jamban, sumber air dan tanah pun tidak tercemar. Ini akan menghindarkan keluarga dari penyakit diare, kolera, disentri, tifus, hingga infeksi saluran pencernaan.



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2024

Gambar II.44 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Riau Tahun 2023

Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Bengkalis yang tercatat sebesar 0,124 menempatkannya dalam kategori "keluarga tidak sehat" dan berada di peringkat ke-8 dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Capaian IKS di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau masih tergolong rendah, dengan nilai 0,192 pada tahun 2023. Angka ini menempatkan Riau di antara lima provinsi dengan capaian IKS terendah di Indonesia, bersama Maluku, Kalimantan Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur.

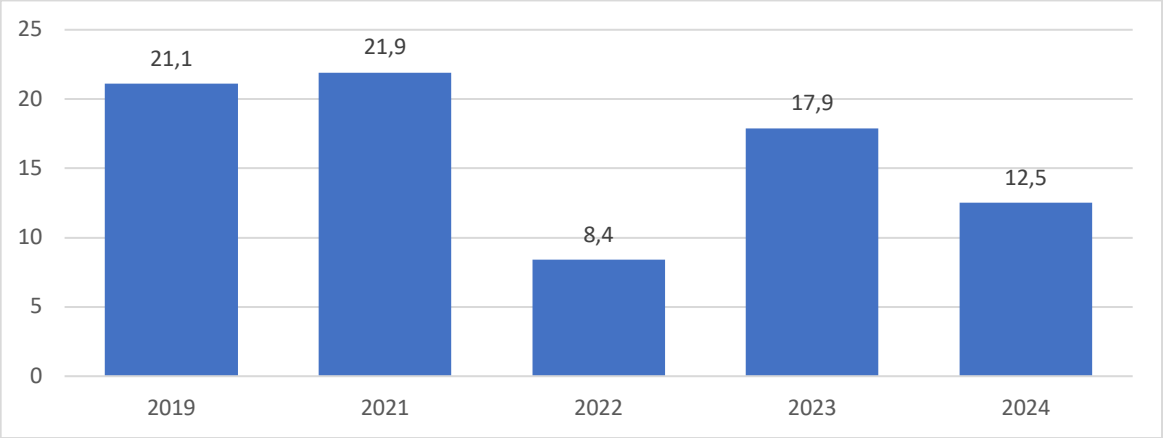
Rendahnya IKS di Riau mencerminkan bahwa sebagian besar keluarga belum memenuhi indikator-indikator kesehatan yang ditetapkan dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kondisi ini antara lain adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat, dan tantangan dalam pelaksanaan program kesehatan di tingkat lokal.

Untuk meningkatkan IKS di Provinsi Riau, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya indikator kesehatan keluarga. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara Dinas Kesehatan,

Puskesmas, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa program PIS-PK dapat berjalan efektif dan efisien.

2.1.2.2.3 Prevalensi Stunting

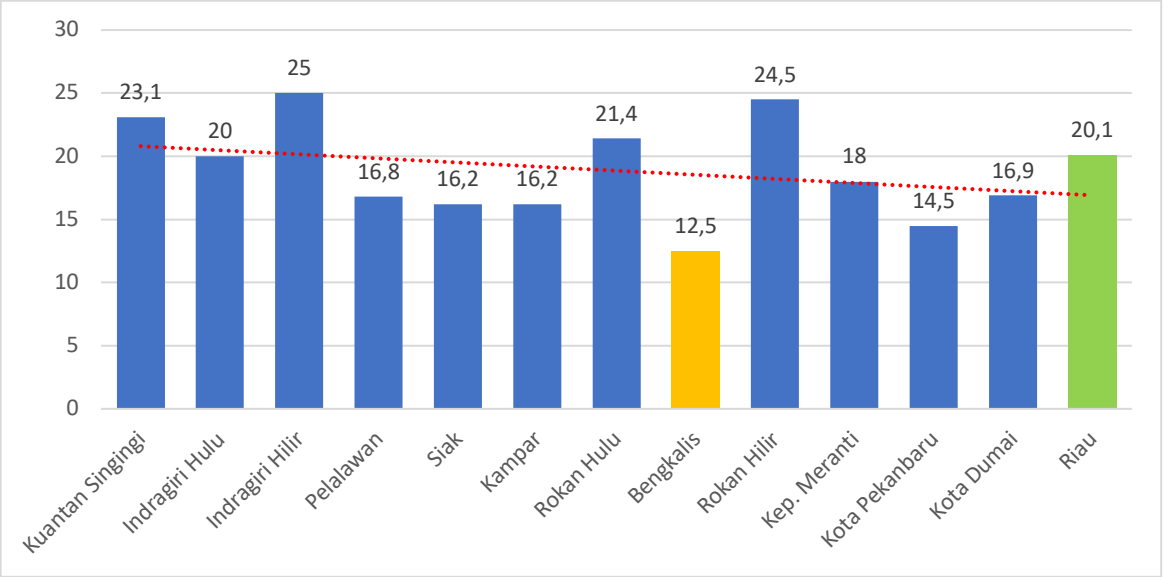
Prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Bengkalis menunjukkan fluktuasi pada kurun waktu 2019-2024. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pada tahun 2019 prevalensi stunting di Kabupaten Bengkalis tercatat sebesar 21,1%, yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 21,9% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, prevalensi stunting turun signifikan menjadi 8,4%, dan naik kembali naik menjadi 17,0% pada tahun 2023 dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 12,5. Berikut disajikan data perkembangan prevalensi stunting Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019-2024, yaitu:



Sumber: RISKESDAS, SSGBI, SKI, dan SSGI, 2025

Gambar II.45 Prevalensi Stunting Balita Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023

Berdasarkan data prevalensi stunting tahun 2024, Kabupaten Bengkalis mencatat angka 12,5 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau sebesar 20,1 persen. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya penurunan stunting, sekaligus menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus memperkuat intervensi gizi spesifik dan sensitif, meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pemerintah berkomitmen menjaga tren positif ini melalui program berkelanjutan agar target penurunan stunting dapat tercapai secara konsisten dan merata di seluruh wilayah.



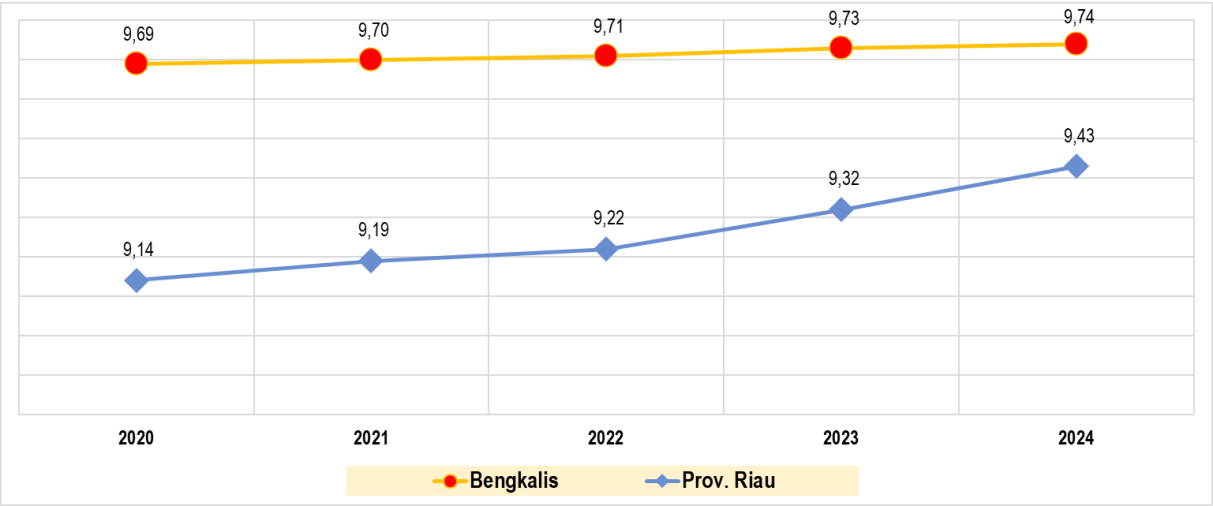
Sumber: RISKESDAS, SSGBI, SKI, dan SSGI, 2025

Gambar II.46 Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Tahun 2024

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

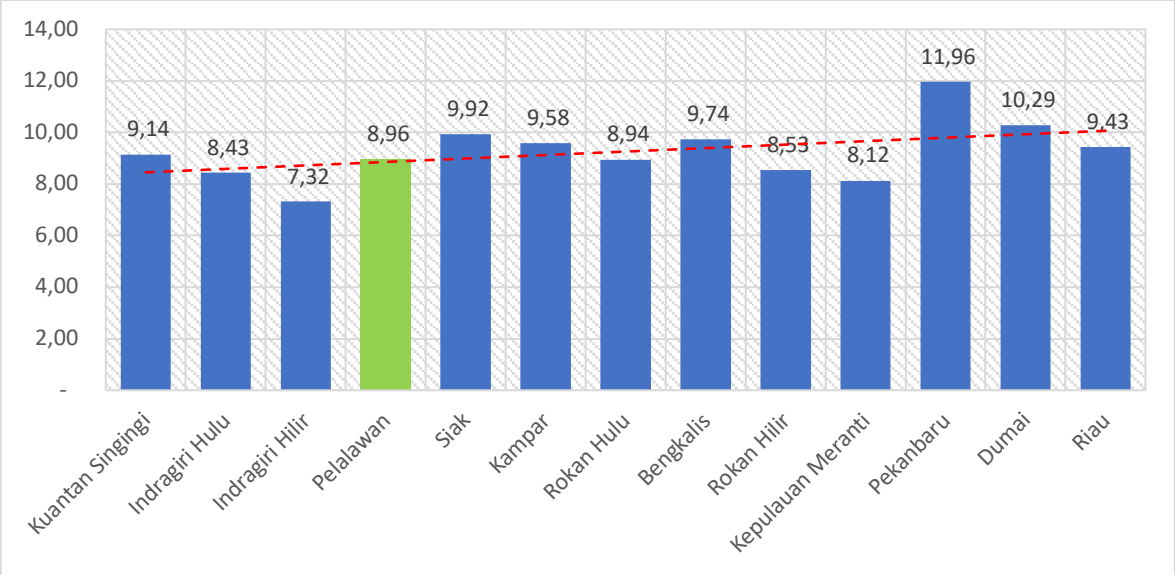
Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dalam pengukuran IPM merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenjang pendidikan. Rata-rata lama sekolah menjadi ukuran kualitas pembangunan pendidikan dalam pembangunan kualitas hidup manusia. Rata-rata lama sekolah merupakan lama tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun. Batas maksimum rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2024, masih diperlukan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk sampai 5,26 tahun lagi untuk mencapai batas maksimal rata-rata lama sekolah yang diharapkan bagi Kabupaten Bengkalis.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.47 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 adalah 9,74 tahun, lebih tinggi capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Riau dan menempati urutan keempat tertinggi di Riau setelah Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Siak. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 adalah 9,69 tahun atau rata-rata kelas satu SMA dan meningkat menjadi 9,74 tahun pada tahun 2024. Secara umum, kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata keberhasilan pembangunan pendidikan di Provinsi Riau. Meski demikian tentu capaian ini masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kualitas pendidikan ideal dalam konteks pembangunan kualis sumberdaya manusia daerah.



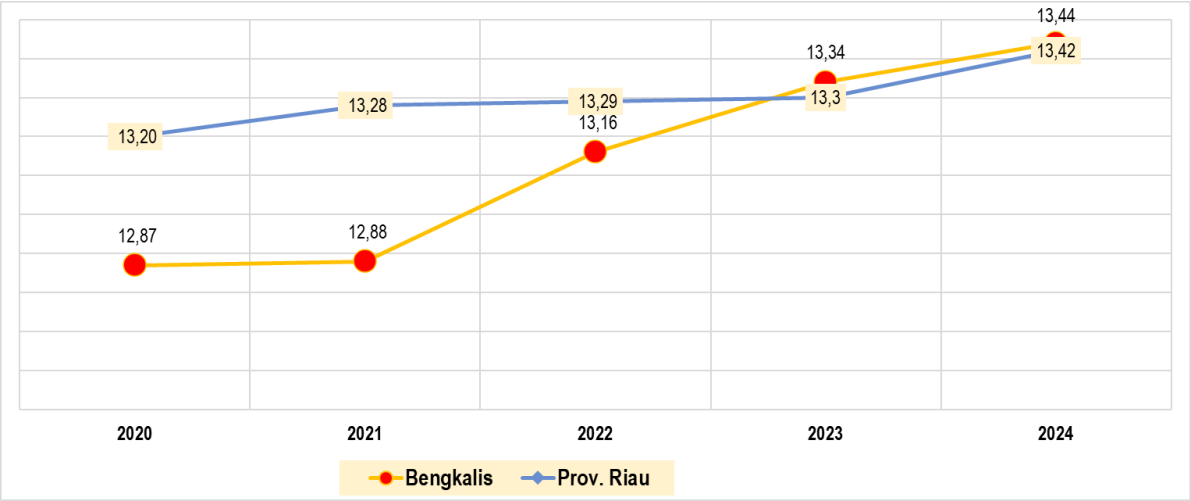
Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.48 Posisi Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau Tahun 2024

2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah adalah lama sekolah formal (diukur dalam tahun) yang diharapkan penduduk datang. Lama sekolah yang diharapkan dapat disebut angka harapan sekolah yang diperkirakan dapat ditempuh oleh anak. Dengan demikian, lama sekolah akan berkaitan dengan kondisi pembangunan sistem pendidikan yang dilakukan oleh daerah untuk menjamin anak-anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan secara maksimal. Pengukuran angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dalam perhitungan IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Dalam perhitungan angka harapan lama

skeolah, peluang anak pada umur tertentu akan tetap bersekolah diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah pada umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan IPM dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Secara umum, angka harapan lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau pada tahun 2020-2022, namun berada diatas Provinsi pada periode 2023-2024, meskipun demikian Kabupaten Bengkalis berada di posisi ketigas pada tahun 2024 setelah Kabupaten Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

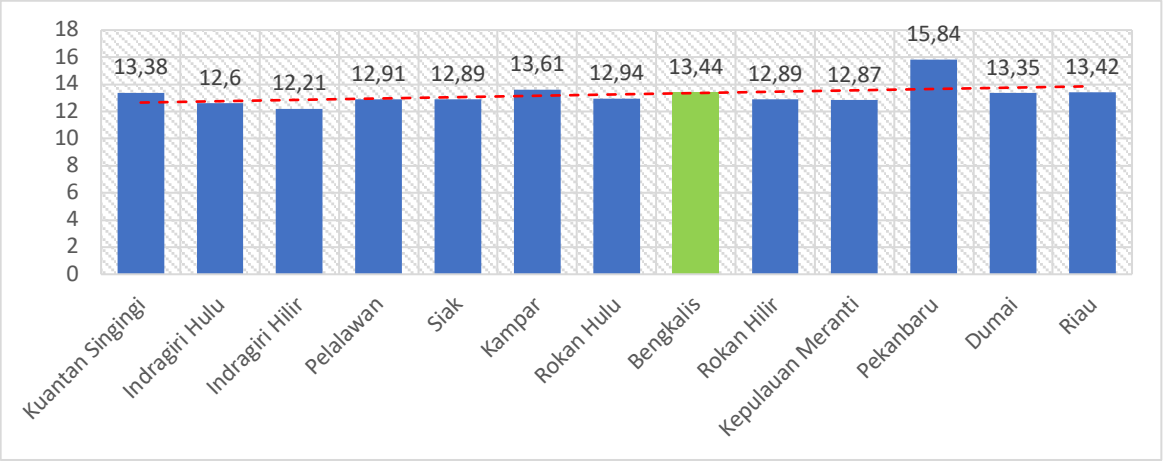


Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.49 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis adalah 12,87 tahun dan meningkat menjadi 13,44 tahun pada tahun 2024. Sedangkan angka harapan lama sekolah penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2020 adalah 13,20 tahun dan meningkat menjadi 13,42 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kabupaten Bengkalis lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Riau pada periode 2023-2024.

Harapan lama sekolah penduduk baru pada tingkat menamatkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan tepatnya masuk jenjang pendidikan perguruang tinggi semester satu. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Dengan demikian masih diperlukan peningkatan secara gradual harapan lama sekolah penduduk hingga 4,56 tahun lagi untuk mencapai angka 18 tahun sesuai dengan harapan lama sekolah maksimum dalam pembangunan pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Bengkalis. Kebijakan pendidikan terkait pemberian kemudahan akses masuk perguruan tinggi dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah. Salah satu bentuk kebijakan yang tersebut adalah pemberian beasiswa pendidikan bagi penduduk Bengkalis yang ingin melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.50 Posisi Capaian Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau tahun 2024

2.1.2.3.3 Angka Literasi/Numerasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan pada pasal 11 yang menyatakan bahwa kualitas hasil belajar peserta didik mencakup Literasi dan Numerasi. Kemampuan Literasi dianggap sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Literasi merujuk pada kemampuan sesorang untuk membaca, menulis dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk kepada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Literasi dan numerasi sangat penting dalam kehidupan modern karena hampir semua aspek kehidupan memerlukan keterampilan ini. Misalnya, untuk memahami instruksi dokter, membaca label makanan, atau mengelola keuangan pribadi seseorang harus memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Kemampuan literasi dan numerasi juga sangat penting dalam pendidikan. Siswa yang memiliki keterampilan literasi numerasi yang baik memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Oleh karena itu literasi numerasi adalah dua keterampilan dasar yang harus dipelajari dan dikuasai oleh semua orang terutama anak-anak di usia sekolah. Berikut ini disajikan angka literasi/numerasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Tabel II.22 Angka Literasi dan Numerasi Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Kemampuan	
	Literasi	Numerasi
SD	59,88	52,96
SMP	70,68	62,55

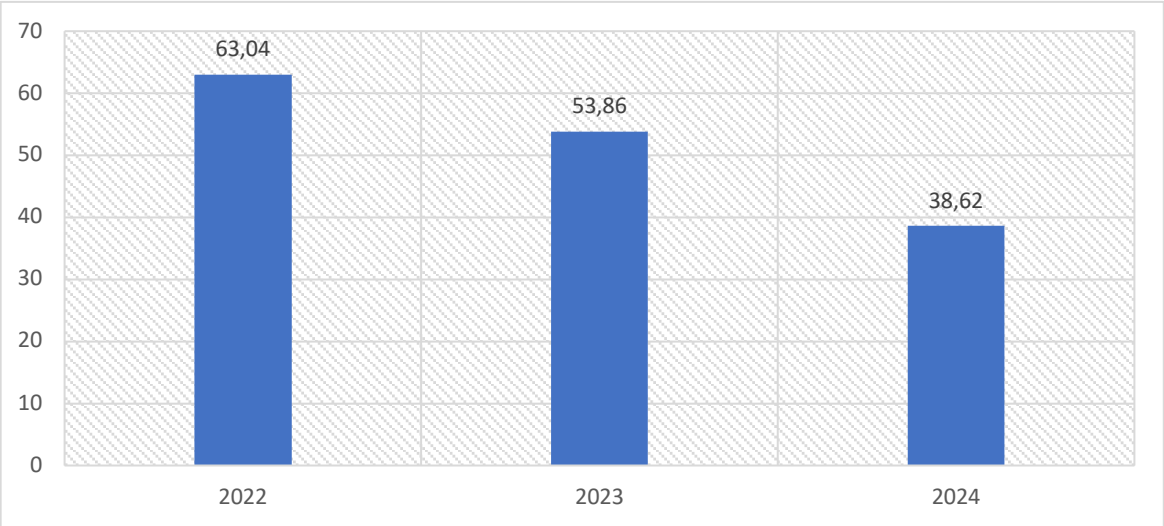
Sumber: Surat Kemdiknas Nomor: 1422/MDM.A/PR.07.05/2025

Capaian kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 menunjukkan perbedaan menurut jenjang pendidikan. Pada jenjang Sekolah

Dasar (SD), nilai literasi berada pada angka 59,88 dan numerasi sebesar 52,96, sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) capaian meningkat dengan nilai literasi 70,68 dan numerasi 62,55. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan program literasi dan numerasi yang berkesinambungan, penyediaan sarana pendukung, peningkatan kapasitas pendidik, serta membangun kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan guna mewujudkan pemerataan mutu pendidikan di seluruh jenjang.

2.1.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

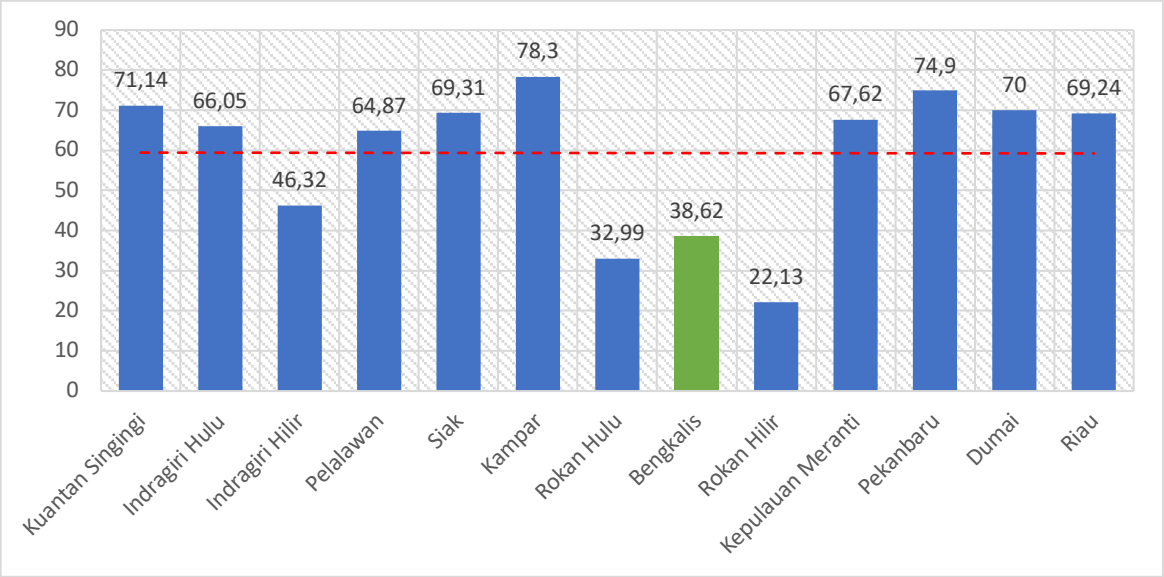
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam meningkatkan literasi masyarakat. Indeks ini terdiri dari 7 dimensi pembangunan literasi masyarakat, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi, dan anggota perpustakaan.



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.51 Indek Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2024

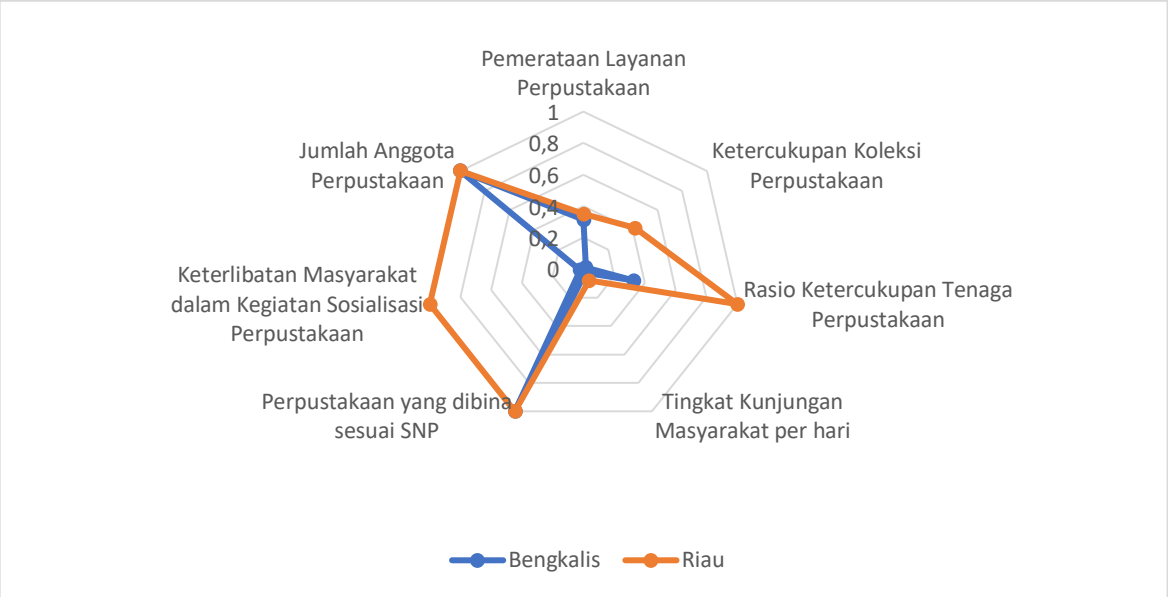
Pencapaian nilai IPLM Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan dari 63,04 pada tahun 2022, menjadi 38,63 pada tahun 2024. IPLM Kabupaten Bengkalis berada pada perinkat 10 dari Kabupaten/Kota lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya rasio ketercukupan koleksi perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat dan rasio keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan sehingga membuat capaian IPLM Kabupaten Bengkalis masih dibawah 9 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.52 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Bengkalis berdasarkan unsur penyusunnya menunjukkan capaian pada unsur penyusun Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari dan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan masih berada dibawah capaian rata-rata Provinsi Riau. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah akan terus melakukan upaya strategis dan terukur melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan, penambahan dan pemerataan koleksi yang sesuai kebutuhan, serta mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam berbagai kegiatan literasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat budaya baca, memperluas akses masyarakat terhadap informasi, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis secara berkelanjutan. Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menurut unsur penyusun Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau tahun 2024, yaitu:



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.53 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Menurut Unsur Penyusun Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2024

2.1.2.3.5 Literasi Digital

UNESCO mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, berkomunikasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman melalui teknologi digital untuk ketenagakerjaan, pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. UNESCO juga mengembangkan kerangka kerja bernama *Digital Literacy Global Framework* (DLGF) yang mencakup enam komponen keterampilan digital inti, yaitu pengoperasian dasar perangkat TIK, aplikasi, dan internet; literasi informasi dan data; komunikasi dan kolaborasi; keamanan; pemecahan masalah; serta kompetensi terkait pekerjaan.

Pada tahun 2021, Indonesia meluncurkan Survei Nasional Literasi Digital untuk mengukur tingkat literasi digital masyarakat Indonesia. Survei ini terdiri dari empat pilar, yaitu Kecakapan Digital, Etika Digital, Keamanan Digital, dan Budaya Digital. Sebelumnya, Uni Eropa telah memiliki model referensi konseptual yang sejalan. Konsep yang diterbitkan pada DigComp 2.1, terdiri dari lima dimensi, yaitu informasi, komunikasi, pembuatan konten digital, keamanan dan perlindungan, serta pemecahan masalah.

Dalam Indeks Masyarakat Digital Indonesia IMDI, tiga kerangka pikir terkait literasi digital oleh UNESCO, Survei Nasional Literasi Digital, dan Uni Eropa tersebut diadopsi dalam membentuk Pilar Keterampilan Digital. Beberapa penyesuaian menghasilkan tiga subpilar dalam pengukuran keterampilan digital, yaitu Komplementaritas, Pengenalan, dan Keamanan TIK, dan terdiri dari enam indikator. Indikator-indikator ini diperoleh dari survei individu yang mengukur tingkat keterampilan digital mereka melalui pernyataan dan penilaian.

Transformasi digital mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan beraktivitas sehari-hari, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia

(SDM) di bidang digital. Sebagai salah satu upaya strategis, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkenalkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) pada tahun 2022. IMDI dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi masyarakat digital di Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota, sekaligus menjadi acuan utama bagi penyusunan kebijakan dan program pengembangan masyarakat digital. IMDI memiliki peran penting dalam mendukung Visi Indonesia Digital (VID) 2045, yang menjadikan masyarakat digital sebagai pilar utama transformasi menuju Indonesia yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing global. Dengan mengadopsi G20 *Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy* yang dirumuskan pada Presidensi G20 Indonesia 2022, framework IMDI berfokus pada empat pilar utama yaitu infrastruktur dan ekosistem, pemberdayaan, keterampilan digital dan pekerjaan.

IMDI merupakan instrumen strategis yang tidak hanya memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia, tetapi juga mendukung upaya akselerasi transformasi digital yang merata dan inklusif. Melalui hasil pengukuran yang dilaksanakan secara tahunan, IMDI dapat membantu *stakeholder* terkait dalam merumuskan kebijakan dan program kegiatan terkait pengembangan SDM yang berbasis data. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi multisektor, transformasi digital dapat menjadi katalisator untuk mewujudkan Indonesia Digital yang kuat, sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Tabel II.23 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022-2023

No	Kabupaten/ Kota	Pilar IMDI Tahun 2024				Nilai IMDI			Kategori IMDI 2024
		Infrastruktur & Ekosistem	Ketera mpilan Digital	Pemb erdayaan	Peker jaan	2022	2023	2024	
1	Bengkalis	54,46	63,84	31,94	35,84	44,25	42,89	46,94	Cukup
2	Indragiri Hilir	52,55	69,02	29,64	36,56	44,53	44,42	47,29	Tinggi
3	Indragiri Hulu	53,40	58,86	24,70	33,40	32,51	41,29	42,62	Cukup
4	Kampar	54,60	67,97	25,14	34,24	41,95	42,94	45,71	Cukup
5	Kepulauan Meranti	53,79	67,15	26,68	33,37	40,10	45,87	44,17	Cukup
6	Dumai	57,94	56,39	27,53	34,74	27,75	43,47	45,63	Cukup
7	Pekanbaru	68,43	59,36	28,15	34,66	39,29	43,07	47,77	Tinggi
8	Kuantan Singingi	54,32	57,73	22,07	33,33	28,46	46,62	41,7	Cukup
9	Pelalawan	49,86	53,80	24,70	33,90	37,52	42,34	40,44	Cukup
10	Rokan Hilir	52,83	66,79	33,32	35,37	37,80	43,80	47,71	Tinggi
11	Rokan Hulu	54,10	58,18	27,50	34,12	34,01	46,38	43,61	Cukup
12	Siak	53,62	53,00	20,68	31,49	31,22	42,48	39,48	Cukup
	Riau	54,99	61,01	26,84	34,35	36,58	43,80	44,42	Cukup

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2025

Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 sebesar 44,25, turun menjadi 42,89 pada tahun 2023, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 46,94, dengan nilai pilar tertinggi adalah Pilar Keterampilan Digital 63,84 dan nilai pilar terendah adalah Pilar Pemberdayaan 31,94. IMDI Kabupaten Bengkalis berada diatas IMDI

Provinsi Riau Tahun 2024 yaitu 44,42 dengan nilai pilar tertinggi adalah Pilar Keterampilan Digital 61,01 dan nilai pilar terendah adalah Pilar Pemberdayaan 26,84.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jamsostek pun juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja.

Pemberian perlindungan pekerja harus diberikan sejak usia produktif bekerja dan mudah diakses bagi seluruh pekerja Indonesia, terlepas apakah mereka bekerja di sektor formal maupun informal. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus dirancang sedemikian rupa untuk adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi global, yang mempengaruhi ekosistem industri dan ketidakpastian pasar dan secara langsung berpengaruh kepada keberlangsungan hubungan kerja. Berikut ini jumlah kepesertaan Jamianan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Riau Tahun 2023.

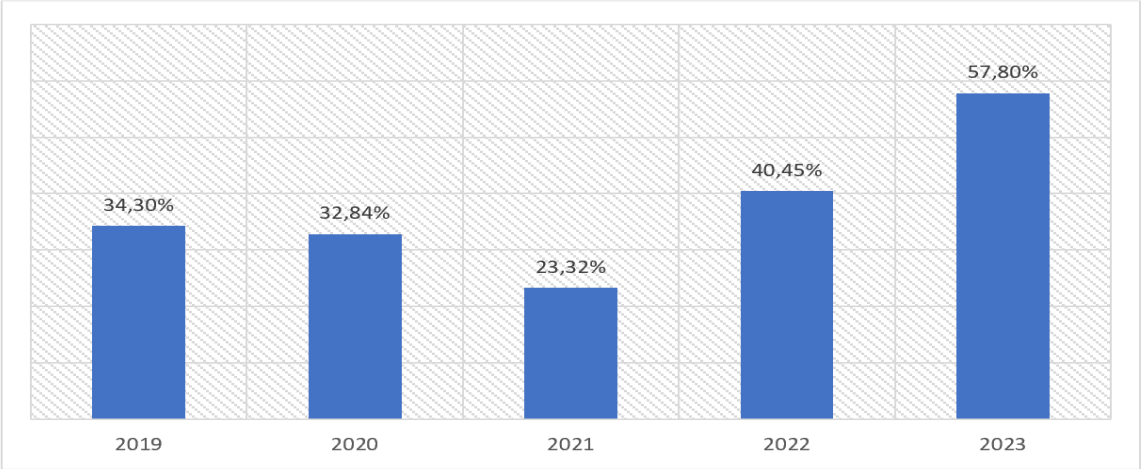
Tabel II.24 Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

No	Kabupaten Kota	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Jumlah
1	Kampar	66.439	20.858	87.297
2	Indragiri Hulu	43.105	19.862	62.967
3	Bengkalis	75.880	50.218	126.098
4	Indragiri Hilir	50.466	15.624	66.090
5	Pelalawan	44.839	11.145	55.984
6	Rokan Hulu	42.580	18.379	60.959
7	Rokan Hilir	45.425	15.970	61.395
8	Siak	50.518	14.487	65.005
9	Kuantan Singingi	26.387	10.560	36.947
10	Kepulauan Meranti	1.645	1.228	2.873
11	Pekanbaru	119.654	53.953	173.607
12	Dumai	37.525	14.459	51.984
Provinsi Riau		604.463	246.743	851.206

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 2024

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap penduduk bekerja. Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja,

penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, 2024 (Diolah)

Gambar II.54 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023

Perkembangan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan kabupaten Bengkalis menunjukkan trend peningkatan dari 34,30% pada tahun 2019, menjadi 23,32% pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 57,80% pada tahun 2023.

2.1.2.4.2 Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Lebih dari satu Milyar orang atau 15 persen penduduk dunia adalah penyandang Disabilitas dan 70 persen adalah Penduduk Usia Kerja.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen pekerja dengan disabilitas dari total pegawai, dan (2) Perusahaan Swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen pekerja dengan disabilitas dari total pekerja di perusahaan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tanpa diskriminasi serta memperoleh upah yang sama.

Tingginya penyandang disabilitas yang termasuk bukan angkatan kerja karena memilih untuk melakukan kegiatan lainnya atau berumah tangga, perlu menjadi perhatian Pemerintah, karena ternyata masih ada penyandang disabilitas yang belum termanfaatkan oleh pasar kerja. Perlu dilakukan kebijakan khusus yang berpihak pada penyandang penyandang disabilitas sekaligus menciptakan dunia kerja dan kondisi kerja yang ramah penyandang disabilitas. Program-program wirausaha mandiri juga perlu dipermudah agar bisa diakses atau dimasuki oleh penyandang disabilitas.

Pada tahun 2023, sebanyak 18 penyandang disabilitas di Kabupaten Bengkalis tercatat bekerja di sektor perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit. Jumlah tersebut terdiri atas 14 penyandang disabilitas daksa, 3 penyandang disabilitas rungu, dan 1 penyandang disabilitas wicara.

Tabel II.25 Pekerja Disabilitas Kabupaten Bengkalis yang Bekerja di Sektor Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit Tahun 2023

No	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja	1.445	280	1.725
2	Tenaga Kerja Disabilitas	14	4	18
	a. Daksa	11	3	14
	b. Rungu	2	1	3
	c. Wicara	1		1

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 2024

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.

Tabel II.26 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

No	Kabupaten/ Provinsi	Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal	Angkatan Kerja Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
1	Bengkalis	28	866	3,23%
2	Riau	166	8890	1,87%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, 2023 (Diolah)

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau tahun 2023 menunjukkan jumlah pekerja penyandang disabilitas sektor formal Kabupaten Bengkalis sebanyak 28 orang penyandang disabilitas dan Provinsi Riau sebanyak 166 penyandang disabilitas. Adapun persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal Kabupaten Bengkalis yaitu sebesar 3,23% lebih tinggi dari capaian Provinsi Riau yang hanya mencapai 1,87%.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) bertujuan untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia. Kerukunan merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara persatuan rakyat dan bangsa Indonesia. Indeks KUB terdiri

dari tiga indikator yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Secara rinci perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.27 Perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

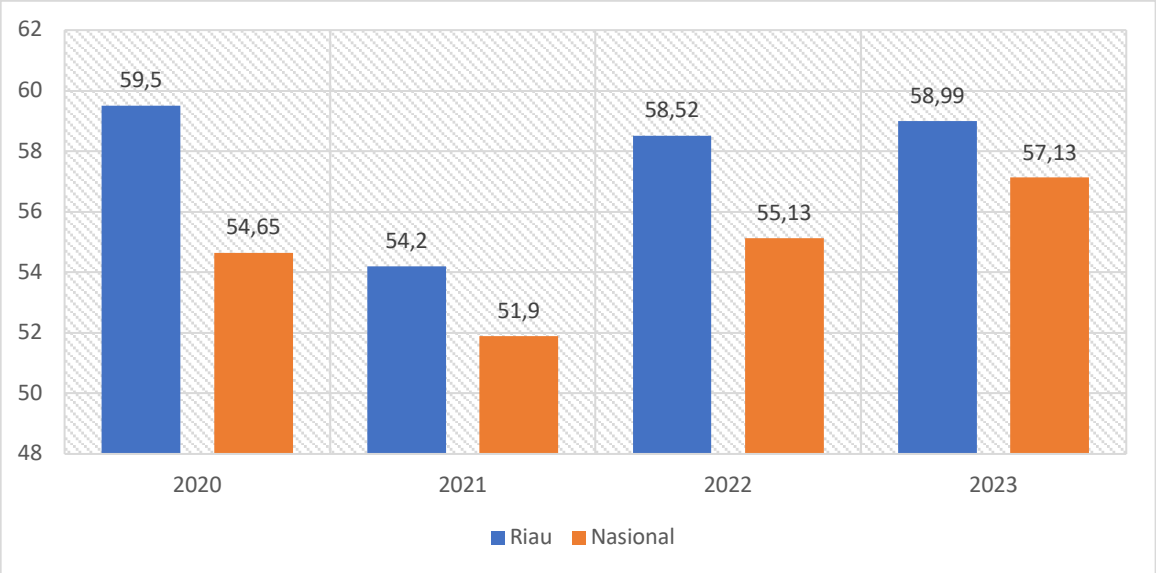
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kerukunan Umat Beragama	69,26	69,26	75,11	74,32	71,60
- Indeks Dimensi Kesetaraan	68,30	68,30	76,60	75,99	73,59
- Indeks Dimensi Kerja Sama	71,18	71,18	74,40	75,95	68,71
- Indeks Dimensi Toleransi	68,30	68,30	74,30	71,03	72,50
Peringkat Nasional	31	31	31	16	31

Sumber: Badan Litbang dan Dilat Kemenag RI, 2024

Indeks KUB Provinsi Riau pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,72 poin dari tahun 2022. Meskipun secara rata-rata ketiga indeks mengalami kenaikan dan kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Riau cukup baik, namun berdasarkan data dari Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, beberapa Provinsi lain di Indonesia mengalami kenaikan indeks kerukunan umat beragama yang lebih signifikan, sehingga kenaikan indeks KUB Provinsi Riau secara nasional masuk pada kategori tidak tinggi.

2.1.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Peran kebudayaan dalam pembangunan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Salah satu instrument yang memberikan gambaran kemajuan kebudayaan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang memberikan gambaran kemajuan Pembangunan kebudayaan suatu daerah. IPK dibentuk melalui tujuh dimensi yang terdiri dari ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Adapun perkembangan IPK Provinsi Riau sebagai berikut:



Sumber Data : Ditjen Kebudayaan - Kemendikbudristek RI, 2024

Gambar II.55 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020–2023

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa perkembangan IPK Provinsi Riau mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2020 nilai IPK Provinsi Riau sebesar 59,5, namun turun menjadi 54,2 pada tahun 2021 dan naik kembali hingga tahun 2023 menjadi 58,99. Secara umum IPK Riau diatas rata- rata IPK Nasional.

Sejalan dengan upaya peningkatan pembangunan kebudayaan di tingkat provinsi tersebut, Kabupaten Bengkalis turut memberikan kontribusi melalui pelestarian dan perlindungan warisan budaya daerah. Dari total 70 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang telah teridentifikasi di Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan arahan Bidang Kebudayaan telah dilakukan proses penyaringan sehingga ditetapkan sebanyak 8 objek untuk dibahas dalam sidang penetapan tahun 2025. Kedelapan objek tersebut adalah:

1. Bangunan Jil (Jail) Belanda Bengkalis.
2. Struktur Tugu Perjuangan Bengkalis
3. Situs Makam Tengku Bagus Said Toha
4. Situs Makam Panglima Minal
5. Situs Makam Raja Siantar Naulah Damanik
6. Bangunan Rumah Datuk Laksamana di Bukit Batu.
7. Meriam kuno di Kuala Bukit Batu (CB bergerak)
8. Situs komplek makam Datuk Gigi Putih di Desa Temiang kecamatan Bandar Laksamana..

Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai sejarah dan kebudayaan Kabupaten Bengkalis, sekaligus menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan IPK Provinsi Riau secara berkelanjutan.

Selanjutnya telah disusun dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tahun Kabupaten Bengkalis 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 180/KPTS/III/2025 yang berisi upaya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bengkalis dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat. Upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap obyek-obyek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bengkalis meliputi:

1. Pengusulan dan penetapan warisan budaya baik warisan budaya tak benda maupun warisan budaya bendawi untuk menjadi jati diri dan kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis. Tercatat sudah 2 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang telah ditetapkan secara nasional sebagai Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Bengkalis. Sedangkan untuk Warisan Budaya Bendawi sudah ditetapkan 11 warisan budaya sebagai cagar budaya.
2. Kabupaten Bengkalis belum mempunyai TACB, untuk itu perlu adanya pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di Kabupaten Bengkalis.

3. Penerapan kurikulum berbasis Muatan Lokal Budaya Melayu Riau pada lembaga pendidikan di setiap tingkatannya.
4. Melaksanakan upaya pelindungan (inventarisasi, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi) terhadap objek pemajuan kebudayaan.
5. Berusaha agar proses pengembangan (penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keragaman) objek pemajuan kebudayaan tetap terus dilaksanakan.
6. Berusaha agar pemanfaatan (internalisasi nilai budaya, adaptasi, komunikasi budaya, kolaborasi budaya) dan pembinaan pada setiap objek pemajuan kebudayaan walaupun dengan kuantitas yang masih minim terus dilaksanakan.
7. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam mendaftarkan karya budayanya untuk ditetapkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
8. Mengusulkan objek pemajuan kebudayaan untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya.
9. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan untuk dibahas dan ditetapkan.

Selanjutnya rekomendasi untuk menjawab permasalahan-permasalahan umum yang mengemuka sekaligus menjadi prioritas perhatian pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bengkalis dalam setiap kurun waktu pembangunan lima tahunan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah penggiat, pelaku, pemerhati budaya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Peningkatan secara kuantitatif dilakukan melalui proses regenerasi secara ilmiah ataupun melalui berbagai program kegiatan kebudayaan. Peningkatan secara kualitatif, dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan formal atau non formal serta peningkatan kompetensi melalui sertifikasi keahlian.
2. Perlunya kehendak bersama para pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bengkalis, stakeholder, dan masyarakat untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana kebudayaan bagi upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak di Indonesia membutuhkan pendekatan yang terukur dan berbasis data, agar dapat menjawab tantangan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara tepat sasaran. Sebagai instrumen evaluatif, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengembangkan pengukuran Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Ketiga indeks ini digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan perlindungan anak pada berbagai level wilayah, serta menjadi acuan dalam penentuan kebijakan nasional dan daerah.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator komposit yang mencerminkan capaian perlindungan anak secara menyeluruh. IPA terdiri atas dua indeks utama, yaitu IPHA dan IPKA. IPHA mengukur sejauh mana hak-hak dasar anak terpenuhi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti identitas, kesehatan, pendidikan, serta pengasuhan. Sementara IPKA berfokus pada pengukuran upaya perlindungan terhadap anak dalam kondisi khusus, seperti anak korban kekerasan, eksploitasi, atau bencana.

Pengukuran IPA, IPHA, dan IPKA mengacu pada lima klaster utama yang diturunkan dari prinsip Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, (2) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, (3) Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (4) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, serta (5) Klaster Perlindungan Khusus. Keempat klaster pertama menjadi komponen penyusun IPHA, sementara klaster kelima sepenuhnya menjadi domain pengukuran IPKA. Berikut adalah perkembangan IPA, IPHA dan IPKA Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota tahun 2023.

Tabel II.28 IPA, IPHA, IPKA Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Kuantan Singingi	50,82	83,42	71,91	29,51	80,69	64,52	59,89	83,84
Indragiri Hulu	50,4	70,49	74,12	29,84	71,38	60,01	56,75	74,53
Indragiri Hilir	43,64	59,94	62,89	26,01	74,25	54,25	48,58	75,69
Pelalawan	45,82	83,64	76,14	26,36	76,66	62,88	58,91	77,33
Siak	46,99	86,85	82,3	26,5	79,8	65,65	61,56	82,67
Kampar	48,09	85,9	81,54	29,53	76,69	65,38	62,1	80,7
Rokan Hulu	49,62	91,05	77,71	27,64	75,35	65,5	62,63	77,74
Bengkalis	46,48	81,88	83,36	27,04	67,58	62,05	60,4	73,92
Rokan Hilir	46	81,85	70,54	28,29	69,07	60,2	57,61	70,72
Kepulauan Meranti	52,03	80,18	72,89	27,18	71,76	61,84	58,99	75,95
Pekanbaru	43,12	86,42	83,96	38	82,28	67,69	63,46	83,02
Dumai	44,55	82,53	80,93	26,11	79,79	63,89	59,31	81,05
Riau	46,2	82,4	77,32	29,26	78,81	63,89	59,6	80,09

Sumber: Kementerian PPPA, 2024

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) tahun 2023, Kabupaten Bengkalis memperoleh nilai IPA sebesar 62,05, IPHA sebesar 60,40, dan IPKA sebesar 73,92. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian perlindungan anak secara umum di Bengkalis tergolong dalam kategori menengah, dengan capaian perlindungan khusus anak (IPKA) yang relatif lebih tinggi dibandingkan pemenuhan hak anak (IPHA).

Jika ditinjau berdasarkan lima klaster penyusun, capaian tertinggi diperoleh pada Klaster 3, yaitu Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dengan skor 83,36, yang mencerminkan kualitas layanan kesehatan anak yang relatif baik. Hal ini diperkuat oleh capaian Klaster 2 (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) sebesar 81,88 serta Klaster 5 (Perlindungan Khusus) sebesar 67,58. Sementara itu, Klaster 1 (Hak Sipil dan

Kebebasan) masih perlu mendapat perhatian lebih dengan skor 46,48, dan Klaster 4 (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya) mencatat skor terendah yaitu 27,04.

Rendahnya capaian pada Klaster 1 dan Klaster 4 menunjukkan masih terbatasnya akses anak terhadap partisipasi sosial, kegiatan budaya, serta pengembangan minat dan bakat di luar pendidikan formal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya mendorong penguatan identitas dan partisipasi anak, serta peningkatan ketersediaan ruang ramah anak untuk kegiatan pengembangan diri. Dengan melakukan intervensi yang terarah pada klaster-klaster yang masih lemah, diharapkan capaian IPHA dan IPA Kabupaten Bengkalis dapat meningkat secara menyeluruh di tahun-tahun mendatang.

2.1.2.6.2 Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga merupakan indeks yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan keluarga dan selanjutnya mempersiapkan penyusunan intervensi kebijakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. IKK merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan kualitas keluarga di Indonesia dan menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan kualitas keluarga di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penghitungan IKK dimulai pada Tahun 2020 dilakukan atas Kerjasama Kemen PPPA dan BPS.

Penyajian data IKK dari Kementerian PPPA berdasarkan metadata lama dan metadata baru bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kualitas keluarga secara lebih komprehensif dan kontekstual. Metadata lama digunakan sebagai acuan dalam penghitungan capaian IKK pada Rencana Strategis Kemen PPPA 2020–2024, sedangkan metadata baru disusun sebagai hasil evaluasi untuk menyesuaikan indikator dengan kebutuhan terkini, terutama dalam mewujudkan keluarga yang responsif terhadap isu gender dan pemenuhan hak anak. Perbedaan keduanya terletak pada penyesuaian indikator, metode pengukuran, dan sumber data, sehingga dapat memperkuat akurasi serta relevansi kebijakan dalam pembangunan kualitas keluarga di tingkat nasional maupun daerah. Perkembangan Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.29 Dimensi IKK Provinsi Riau Berdasarkan Metadata Lama dan Metadata Baru, 2022 – 2023

Dimensi	Meta Data Lama			Meta Data Baru		
	2022	2023	Perubahan	2022	2023	Perubahan
Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	**75,62**	**77,39**	**1,77**	**76,39**	**77,99**	**1,6**
Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS)	86,37	89,73	3,36	89,15	91,28	2,13
Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)	80,69	79,64	-1,05	80,08	79,03	-1,05

Dimensi	Meta Data Lama			Meta Data Baru		
	2022	2023	Perubahan	2022	2023	Perubahan
Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)	70,47	72,93	2,46	68,46	70,38	1,92
Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP)	67,24	70,65	3,41	71,23	75,78	4,55
Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB)	64,61	66,37	1,76	64,61	66,37	1,76

Sumber: Kementerian PPPA, 2024

Pada tahun 2023, berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metadata lama maupun metadata baru, Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) Provinsi Riau menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari lima dimensi penyusun IKK, empat dimensi mengalami peningkatan, yaitu dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS), dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP), dan dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB). Sementara itu, satu dimensi, yaitu dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun 2022.

Peningkatan tertinggi tercatat pada dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP). Berdasarkan metadata lama, nilai KKSP meningkat sebesar 3,41 poin, dari 67,24 persen pada tahun 2022 menjadi 70,65 persen pada tahun 2023. Sedangkan berdasarkan metadata baru, peningkatan tercatat sebesar 4,55 poin, dari 71,23 persen menjadi 75,78 persen pada periode yang sama.

Secara keseluruhan, nilai IKK Provinsi Riau juga menunjukkan tren positif. Menggunakan metadata lama, terjadi peningkatan sebesar 1,77 poin dari 75,62 persen pada tahun 2022 menjadi 77,39 persen pada tahun 2023. Sedangkan dengan metadata baru, peningkatan tercatat sebesar 1,60 poin dari 76,39 persen menjadi 77,99 persen.

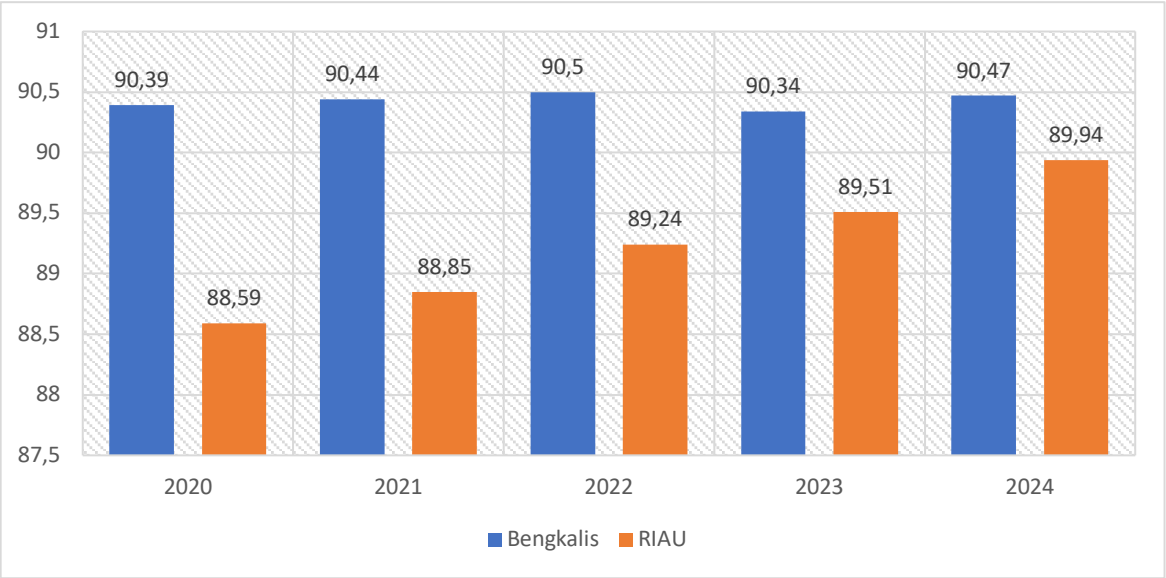
Pencapaian ini menunjukkan bahwa kualitas ketahanan keluarga di Provinsi Riau pada tahun 2023 lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 7 Tahun 2022, nilai IKK Provinsi Riau tersebut berada dalam kategori "Responsif Gender dan Hak Anak", yang mencerminkan komitmen daerah dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang inklusif dan berkeadilan.

2.1.2.6.3 Indeks Pembangunan dan Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati 100, maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara lakilaki dan perempuan.

Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan,

kesehatan, dan ekonomi. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi). Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



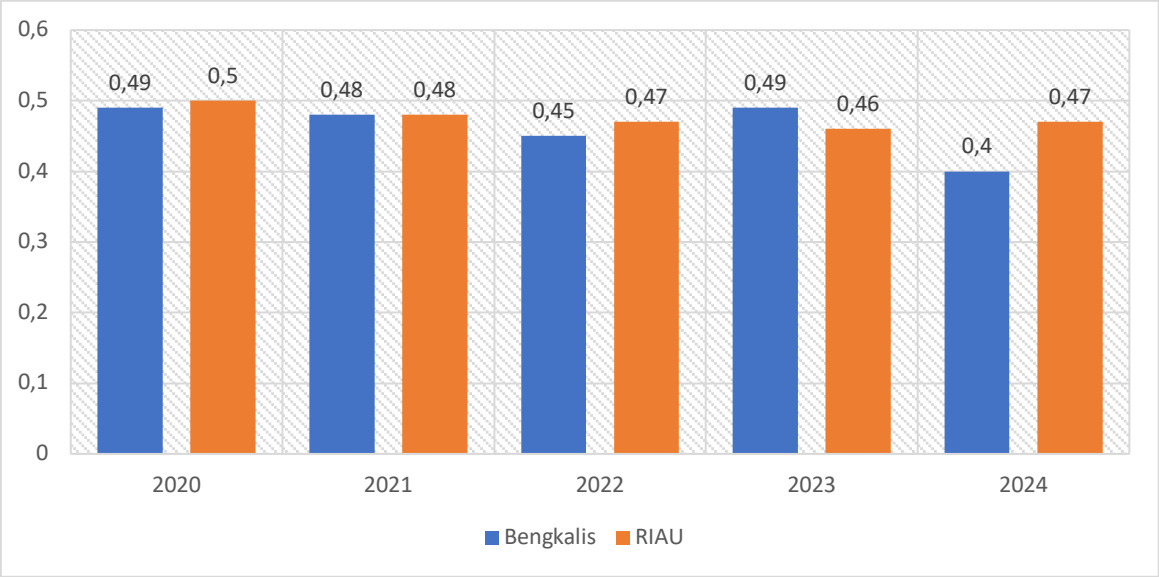
Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025

Gambar II.56 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Perkembangan IPG Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sebesar 90,39, meningkat hingga tahun 2022 menjadi 90,05, namun sedikit turun menjadi 90,34 pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 90,47 pada tahun 2024. Capain IPG Kabupaten Bengkalis lebih tinggi dari capaian IPG Provinsi Riau yaitu sebesar 89,94 pada tahun 2024.

Analisis gender memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan. Keseimbangan dalam jumlah antara laki-laki dan perempuan belum disertai dengan kesimbangan dalam aspek lain, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik. Kesadaran akan hal ini memunculkan pemikiran bahwa kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat diwujudkan apabila kesetaraan dalam berbagai aspek tersebut ditingkatkan, atau ketimpangan dalam berbagai aspek tersebut diminimalkan, yaitu dengan memanfaatkan potensi dan peran laki-laki dan perempuan yang selama ini belum teroptimalkan.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai salah satu indikator pembangunan yang mengukur ketimpangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Berikut disajikan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bengkalis, yaitu:



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025

Gambar II.57 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Perkembangan IKG Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi menurun dari 0,49 pada tahun 2020 menjadi 0,45 pada tahun 2022, namun meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,49 dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 0,4. Capain IKG Kabupaten Bengkalis lebih rendah dari capaian IKG Provinsi Riau yaitu sebesar 0,47 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis.

2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan instrumen penting untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia, dan digunakan sebagai alat ukur pembangunan pemuda yang terdiri dari lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Berikut disajikan data perkembangan IPP Provinsi Riau tahun 2020 sampai dengan 2023.

Tabel II.30 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Riau Tahun 2020-2023

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan	50	53,3	53,3	56,67
2	Kesehatan & Kesejahteraan	43,33	40	40	36,67
3	Lapangan Kerja & Kesempatan Kerja	40	45	45	50
4	Partisipasi & Kepemimpinan	50	72,5	52,5	62,5
5	Gender & Diskriminasi	70	70	70	70
IPP RIAU		50,67	56,2	52,2	55,17
IPP NASIONAL		51	53,33	53,33	56,33

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, 2024

Pada tahun 2023, Provinsi Riau memiliki jumlah pemuda sebesar 24,03 persen (Statistik Pemuda Indonesia, 2023) dan mengalami peningkatan IPP sebesar 3 poin, menjadi

55,17 dari 52,17 di tahun 2022. Peningkatan capaian IPP Provinsi Riau ditopang oleh peningkatan yang signifikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan, dari 52,5 menjadi 62,50 pada tahun 2023. Selain itu, capaian domain lapangan dan kesempatan kerja juga meningkat dari 45 menjadi 50. Begitu pula dengan domain gender dan diskriminasi yang meningkat dari 53,33 menjadi 56,67. Hanya domain partisipasi dan kepemimpinan yang mengalami penurunan dari 40 menjadi 36,67. Sedangkan domain pendidikan mengalami stagnasi sebesar 70 selama 3 tahun berturut-turut.

Jika dibandingkan dengan nilai nasional, terdapat dua domain yang lebih tinggi dari capaian nasional, yaitu domain lapangan dan kesempatan kerja yaitu 50 (nasional 45), serta domain gender dan diskriminasi dengan capaian 56,67. Sedangkan domain kesehatan dan kesejahteraan serta partisipasi dan kepemimpinan lebih rendah daripada rata-rata nasional (7,5 poin dan 6,66 poin). Adapun domain pendidikan Provinsi Riau memiliki capaian yang setara dengan nasional yaitu 70.

Tabel II.31 Indikator Kepemudaan Kabupaten Bengkalis dalam Mendukung Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sarana Olahraga Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis	Jumah	67	67	67	72	95
Jumlah Pemuda Berprestasi atau Pelopor	Angka	3	4	2	3	3
Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang	12	14	26	24	10
Persentase Wirausaha Muda	Persen	0,17	0,17	0,04	0,04	0,04
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	39	75	122	96	103

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, kepemilikan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2025

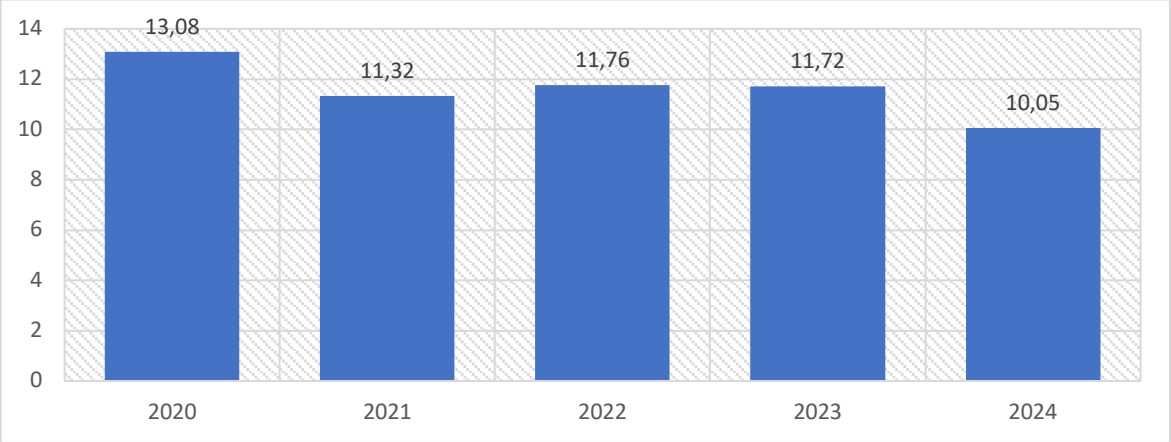
Dalam kerangka capaian IPP Provinsi Riau tersebut, Kabupaten Bengkalis turut memberikan kontribusi melalui perkembangan indikator kepemudaan di tingkat daerah. Data menunjukkan adanya peningkatan sarana olahraga dari 67 unit pada tahun 2020 menjadi 95 unit pada tahun 2024, serta jumlah atlet berprestasi yang meningkat signifikan dari 39 orang menjadi 103 orang pada periode yang sama. Capaian ini selaras dengan peningkatan domain kesehatan dan kesejahteraan serta kesempatan kerja di tingkat provinsi, karena fasilitas olahraga dan pembinaan atlet berperan dalam mendorong kualitas kesehatan pemuda dan membuka peluang ekonomi kreatif berbasis olahraga. Namun, masih terdapat tantangan pada aspek kepemimpinan dan partisipasi pemuda yang relatif stagnan, khususnya jumlah pemuda pelopor yang terbatas dan persentase wirausaha muda yang masih rendah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menempatkan program kepemudaan sebagai bagian penting dalam mendukung pencapaian IPP Provinsi Riau, dengan fokus pada penguatan kapasitas, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda agar sejalan dengan target pembangunan kepemudaan di tingkat provinsi maupun nasional.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1 Kualitas Tenaga kerja

Kualitas tenaga kerja dapat diukur melalui persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah S1/S2/S3, yang mencerminkan sejauh mana perkembangan pendidikan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang berpendidikan akan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan daerah. Berdasarkan data yang ada, persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan ijazah S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perkembangan fluktuasi yang menurun dari periode 2020-2024. Pada tahun 2020, persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan ijazah S1/S2/S3 berada pada angka 13,08%, turun menjadi 11,32% pada tahun 2021, kembali meningkat menjadi 11,76% pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 10,05% pada tahun 2024.



Sumber: BPS Bengkalis dan Riau, 2025

Gambar II.58 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah S1/S2/S3

Sebagai langkah strategis dalam mengatasi tren penurunan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan ijazah S1/S2/S3 selama periode 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya memperkuat kebijakan pendidikan agar mampu mendorong peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menyediakan berbagai program beasiswa dan dukungan finansial bagi mahasiswa, serta memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang melibatkan stakeholders yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah.

2.1.3.1.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan, semakin besar beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan yang

sudah tidak produktif lagi. Sebaliknya, semakin rendah persentase rasio ketergantungan, semakin ringan beban yang ditanggung penduduk produktif. Seiring waktu, rasio ketergantungan di Kabupaten Bengkalis terus berkurang. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk yang memasuki usia produktif, yakni kelompok usia 15-64 tahun. Kondisi ini tentu merupakan hal positif, karena semakin rendahnya rasio ketergantungan menandakan bahwa kesejahteraan penduduk meningkat dan beban perekonomian berkurang. Penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 tahun) biasanya menanggung beban perekonomian dan kebutuhan penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun.

Tabel II.32 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bengkalis 2020-2024

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0-14	166.372	162.377	163.140	183.388	183.211
15-64	375.974	386.916	393.577	446.565	467.336
>64	22.343	24.211	26.247	28.893	31.337
Jumlah Penduduk	564.689	573.504	582.973	658.846	681.884
Rasio Ketergantungan	50,19%	48,22%	48,12	47,54%	45,91%

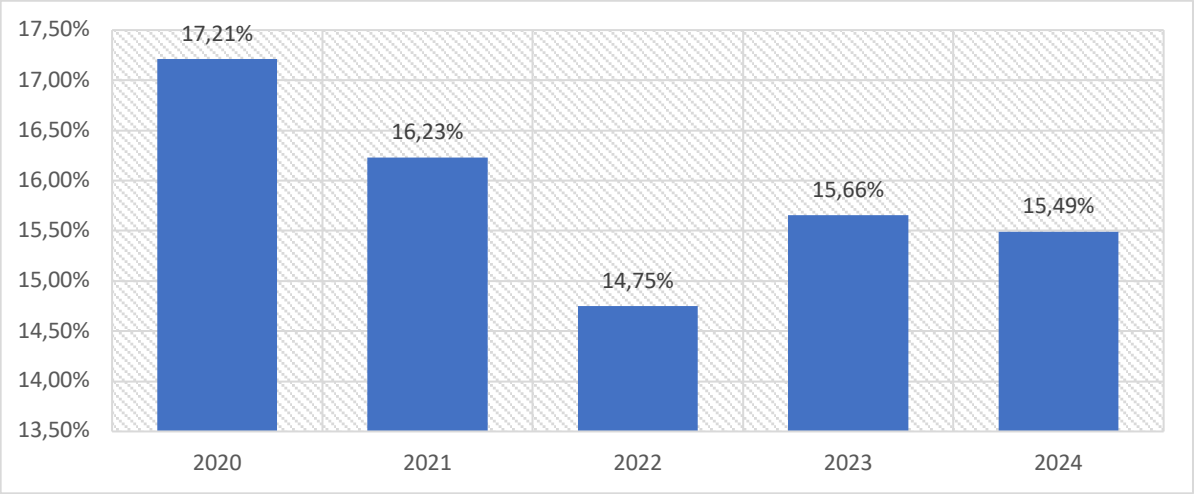
Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2024

Penurunan rasio ketergantungan dari 50,19% pada tahun 2020 menjadi 45,91% pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan struktur demografi di Kabupaten Bengkalis. Rasio ini mengindikasikan bahwa beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lanjut usia) semakin ringan. Dengan kata lain, pada tahun 2024 setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 45,91 orang penduduk tidak produktif, dibandingkan dengan 50,19 orang pada tahun 2020. Kondisi ini memberikan sinyal positif bagi pembangunan ekonomi daerah karena meningkatnya proporsi penduduk yang dapat bekerja dan berkontribusi terhadap perekonomian. Momentum ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi bonus demografi yang tengah berlangsung

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan merujuk pada proporsi kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bengkalis. Rasio ini mencerminkan tingkat keterlibatan sektor industri dalam membentuk output ekonomi daerah, sekaligus menjadi indikator penting dalam menilai transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder. Berikut adalah perkembangan rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Bengkalis pada periode 2020-2024.



Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Tabel II.33 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Selama periode 2020–2024, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren menurun pada awal periode, dari 17,21% pada tahun 2020 menjadi 14,75% pada tahun 2022. Namun, kontribusi tersebut mulai mengalami pemulihan pada tahun 2023 menjadi 15,66%, namun sedikit turun pada tahun 2024 menjadi 15,49%.

Sektor industri pengolahan di Bengkalis didominasi oleh industri berbasis hasil perkebunan, terutama kelapa sawit. Keterkaitan antara industri pengolahan dengan sektor perkebunan sangat kuat, mengingat kelapa sawit merupakan komoditas unggulan daerah yang berkontribusi besar dalam menyediakan bahan baku bagi industri pengolahan, seperti Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Oleh karena itu, fluktuasi kinerja sektor pengolahan turut dipengaruhi oleh stabilitas produksi dan harga komoditas perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul (KIBB) sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor industri pengolahan, khususnya dalam mendukung hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit dan hasil perikanan. Kawasan ini dirancang dengan konsep *Eco Industrial Park* (EIP) yang mengintegrasikan aspek bisnis, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan masyarakat sekitar, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja kawasan industri dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara berkelanjutan.

KIBB terletak di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu. Lokasinya yang strategis di pesisir Pulau Sumatera dan berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka memberikan keunggulan dalam aksesibilitas ekspor-impor. Selain itu, kawasan ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dari sektor perkebunan dan perikanan yang melimpah di wilayah sekitarnya, serta infrastruktur jalan yang menghubungkan kawasan ini dengan wilayah lainnya secara efektif.

Sebagai bagian dari upaya menarik investasi, Pemerintah Kabupaten Bengkalis secara aktif mempromosikan KIBB kepada calon investor, baik domestik maupun internasional.

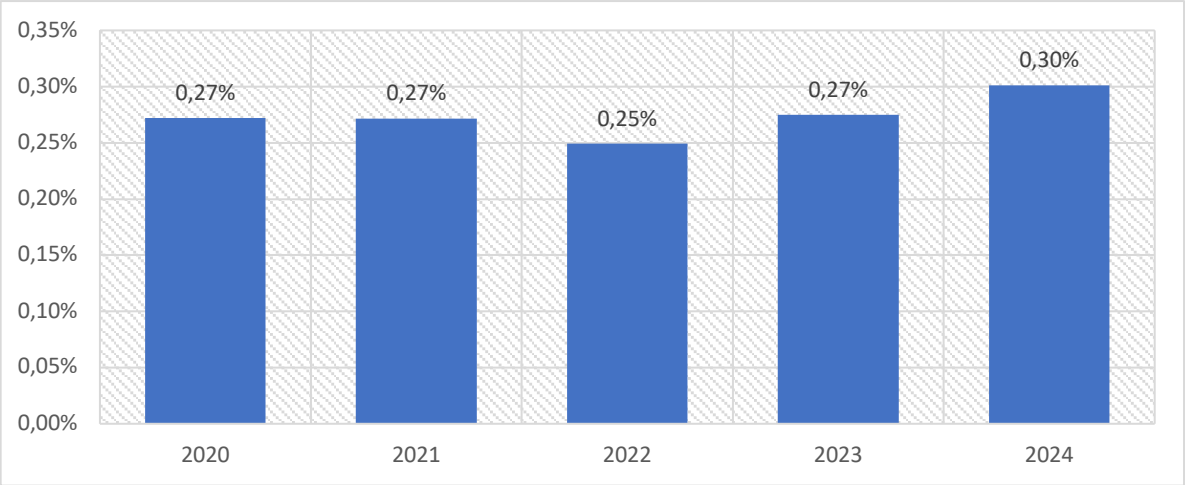
Kunjungan investor dari Tiongkok dan Jakarta pada April 2025 menunjukkan minat yang tinggi terhadap potensi kawasan ini. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi perizinan, infrastruktur, dan kerja sama yang saling menguntungkan guna mendukung pengembangan KIBB.

Pengembangan KIBB diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pendukung seperti perdagangan, jasa, dan kuliner. Dengan demikian, KIBB tidak hanya berfungsi sebagai pusat industri, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi ekonomi Kabupaten Bengkalis menuju struktur ekonomi yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

2.1.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum merupakan indikator yang menunjukkan kontribusi sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bengkalis.

Perkembangan Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,27% dan tetap pada tahun 2021, pada tahun 2022 sedikit turun menjadi 0,25% dan kembali naik hingga tahun 2024 menjadi 0,30%. Peningkatan pada tahun 2024 disebabkan banyaknya event yang diselenggarakan di Kabupaten Bengkalis sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha khususnya penyedia akomodasi makan dan minum untuk menjajakan usahanya sehingga output penyedia akomodasi makan dan minum mengalami peningkatan. Namun, kecilnya kontribusi sektor ini menunjukkan kontribusi sektor swasta terhadap perekonomian Kabupaten Bengkalis masih sangat kecil.



Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Tabel II.34 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Bengkalis Tabel 2020-2024

Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong pembangunan sektor pariwisata melalui beberapa kebijakan strategis daerah dibidang pariwisata diantaranya yaitu pembangunan Balai Raja Ecopark, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pulau Rupat, dan revitalisasi Kebun Binatang Selat Baru . Selain itu, program

unggulan Satu Miliar Satu Desa yang telah disalurkan ke 136 desa juga diarahkan untuk mendukung pengembangan desa wisata, dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi lokal, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menjaga kelestarian alam dan budaya Kabupaten Bengkalis.

2.1.3.2.3 Ekonomi Kreatif

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif sebagai pilar penting pembangunan ekonomi daerah. Berbagai inisiatif strategis telah dilaksanakan, antara lain melalui penyelenggaraan Expo Ekonomi Kreatif Pesona Bermasa yang menjadi bagian dari Musrenbang Kolaborasi, dengan melibatkan lebih dari 50 komunitas dan ratusan pelaku UMKM. Kegiatan ini berhasil menciptakan perputaran ekonomi daerah, sekaligus menjadi wadah promosi produk lokal dan penguatan jejaring antar pelaku ekonomi kreatif .

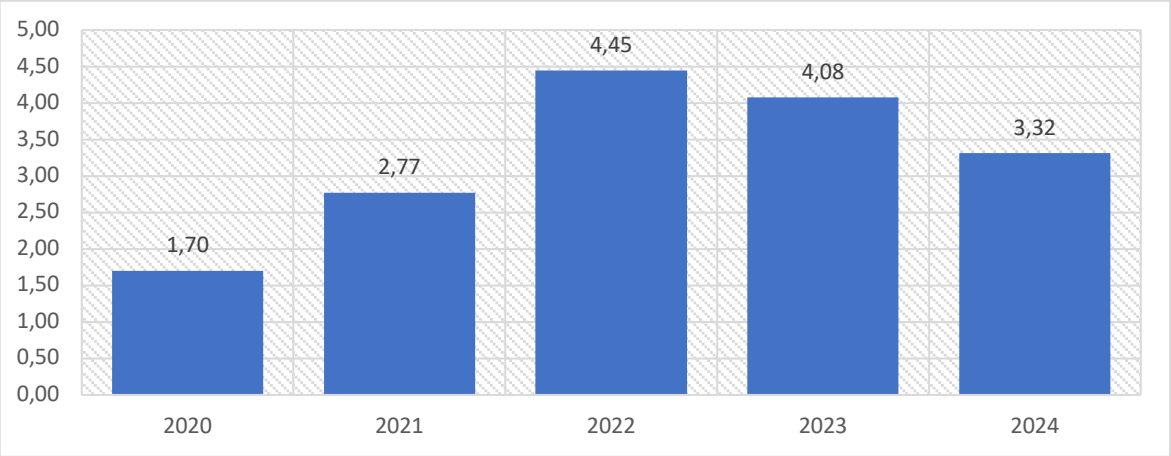
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menggelar berbagai festival dan expo, seperti Festival E-Kraf di Desa Wonosari yang difokuskan pada lima subsektor unggulan: kuliner, kriya, fashion, fotografi, dan seni pertunjukan. Kegiatan ini bertujuan untuk memasarkan produk lokal serta memperkuat sinergi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal .

Di sisi peningkatan kapasitas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan Bengkalis Creative Network (BCN) menyelenggarakan workshop ekonomi kreatif yang diikuti oleh puluhan pelaku UMKM dari berbagai kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha dalam menghasilkan, mempromosikan, dan memasarkan produk unggulan daerah, sehingga mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Upaya-upaya tersebut mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjadikan ekonomi kreatif sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat identitas budaya lokal.

2.1.3.2.4 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.



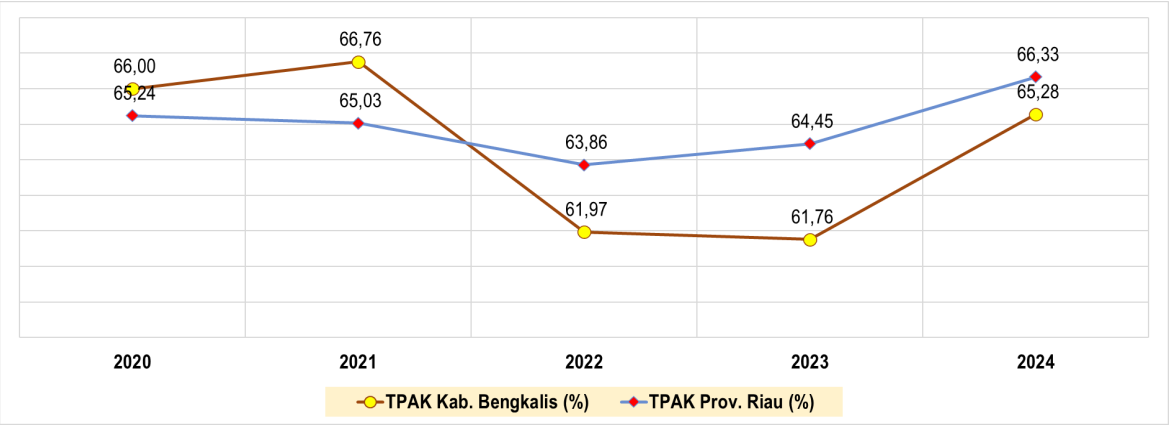
Sumber: BPS Bengkalis, 2025 (Diolah)

Gambar II.59 Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Bengkalis (%) Tahun 2020-2024

Rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi dari 1,70% pada tahun 2020, meningkat hingga tahun 2022 menjadi 4,45% pada tahun 2022, dan kembali turun hingga tahun 2024 menjadi 3,34% pada tahun 2024. Semakin meningkat rasio kewirausahaan derah maka semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha

2.1.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

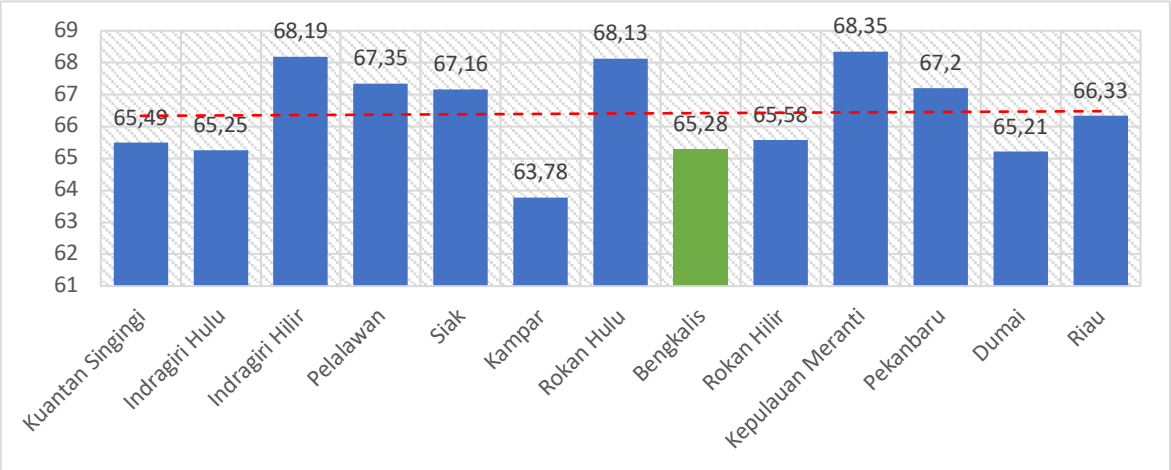
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang terlibat aktif dalam perekonomian. TPAK Kabupaten Bengkalis digunakan untuk mengukur besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam seluruh aktivitas perekonomian daerah. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada suatu daerah merupakan salah satu indikator penting dalam kegiatan perekonomian daerah karena menjadi ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesediaan tenaga kerja pada suatu daerah. TPAK memiliki arti penting bagi keperluan perencanaan pembangunan khusunya dibidang ketenagakerjaan.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.60 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 (%)

TPAK digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Tingkat partisipasi tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis mengalami perkembangan yang berfluktuasi selama periode 2020-2024. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi menurun dari 66% pada tahun 2020 menjadi 61,76% pada tahun 2023, namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 65,28% dan berada di bawah tingkat partisipasi tenaga kerja Provinsi Riau.



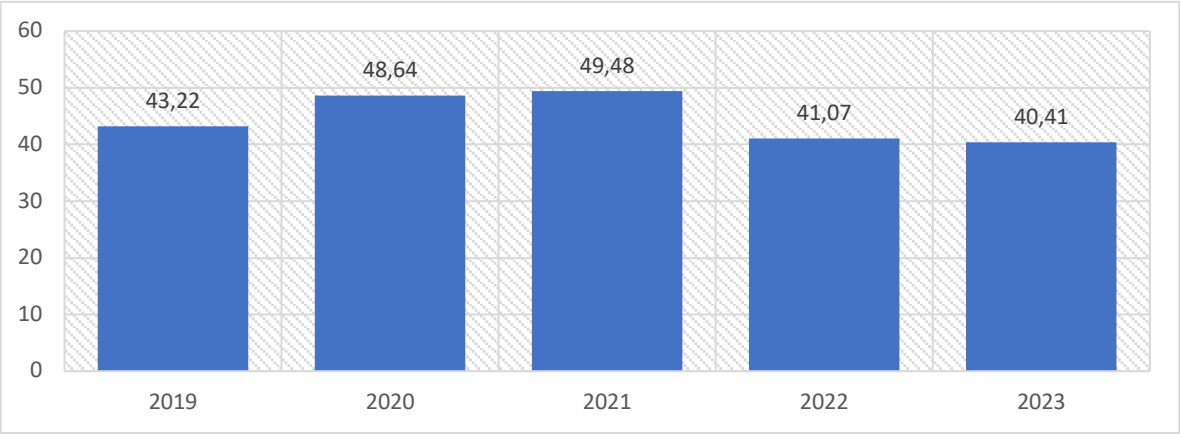
Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II.61 Posisi Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau tahun 2024

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bengkalis berada pada posisi terendah empat setelah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kampar dan pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi angkatan kerja tidak memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja termasuk rendah, namun tingkat kemiskinan tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Beberapa daerah terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja lebih tinggi dari Provinsi Riau, tetapi tingkat kemiskinan justru berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Riau, seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hulu dan Pelalawan. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang diperlukan dalam perekonomian dan juga merupakan faktor penting dalam mengerakkan pembangunan. Beberapa faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah adalah perubahan struktur penduduk menurut usia, tingkat upah dan tingkat pendidikan. Peningkatan jumlah tenaga kerja disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu permasalahan lain yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja adalah posisi Kabupaten Bengkalis yang berada di daerah perbatasan telah terpengaruhi oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali dari Malaysia pada saat pandemi Covid-19. Meskipun demikian ditemukan

permasalahan bahwa para PMI ini bukan termasuk pekerja legal yang terdaftar sebagai penduduk bekerja.

Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan merupakan persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.



Sumber: BPS Riau, 2024

Tabel II.35 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Bengkalis (%) Tahun 2019-2023

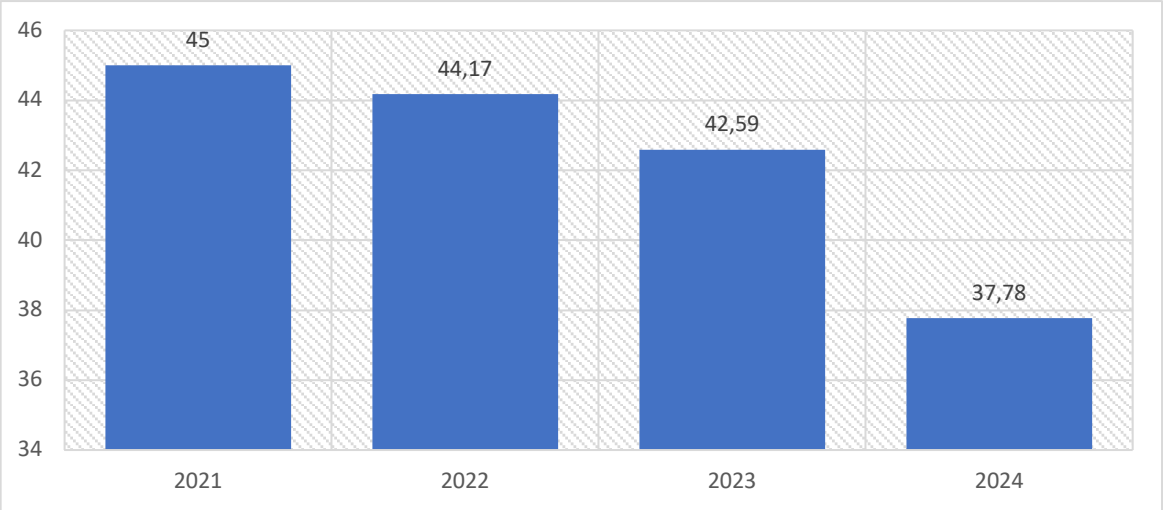
Perkembangan TPAK perempuan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 sebesar 43,22%, selanjutnya meningkat hingga tahun 2021 menjadi 49,48%, namun kembali turun hingga tahun 2023 menjadi 40,41%.

2.1.3.2.6 Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatanya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah.

Hal ini diharapkan dapat lebih memacu kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan, serta memotivasi Pemerintah Daerah lainnya untuk lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kebijakannya di seluruh aspek, yang merupakan salah satu bentuk pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi”.

Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) akan diberikan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam bentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berikut disajikan data Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu:



Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.62 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024

Indeks inovasi daerah Kabupaten Bengkalis terus mengalami penurunan dari 45 pada tahun 2021, menjadi 37,78 pada tahun 2024. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dalam merancang dan melaporkan inovasi. Untuk itu kedepan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya dalam melakukan penguatan koordinasi antara perangkat daerah.

Dalam upaya meningkatkan Indeks Inovasi Daerah (IID), Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan berbagai inisiatif strategis selama beberapa tahun terakhir. Salah satu langkah utama adalah penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah (LIDA) yang bertujuan untuk mendorong semangat berinovasi di kalangan perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dan desa. Lomba ini mencakup kategori inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi lainnya yang relevan dengan urusan pemerintahan daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta budaya inovasi yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, pembentukan Tim Inovasi Daerah oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Bengkalis merupakan langkah konkret dalam memperkuat koordinasi dan tata kelola inovasi di tingkat daerah. Tim ini bertugas mengoordinasikan pelaksanaan inovasi di berbagai perangkat daerah, menyusun database inovasi, serta menyiapkan regulasi dan pedoman teknis yang mendukung ekosistem inovasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaporan dan pengakuan terhadap inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

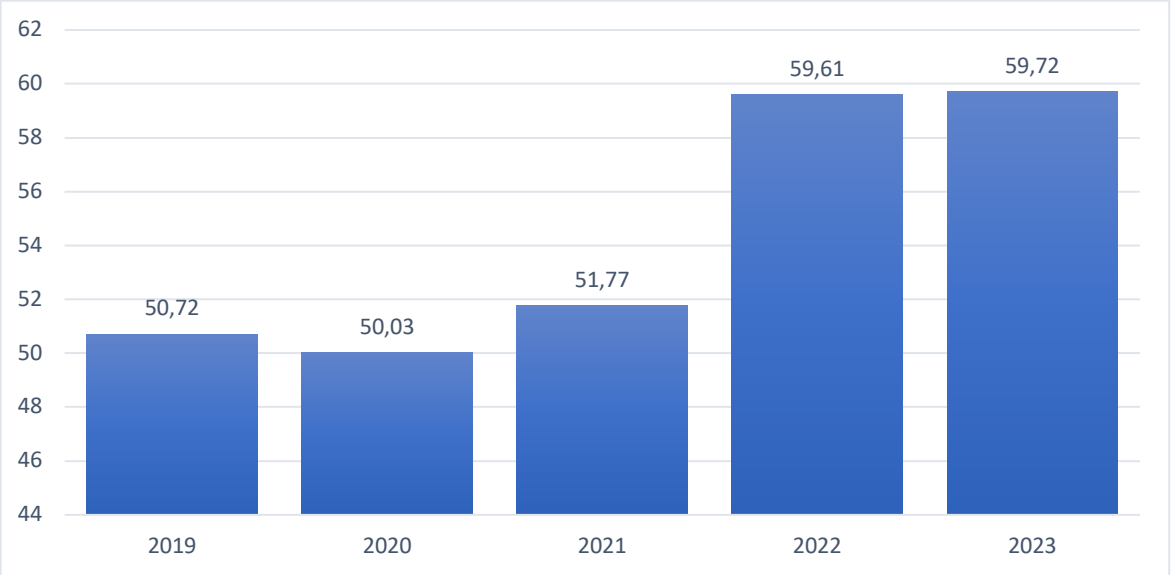
Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga telah mengeluarkan surat edaran yang mendorong seluruh perangkat daerah untuk aktif dalam menciptakan dan melaporkan inovasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang dihasilkan terdokumentasi dengan baik dan dapat diikutsertakan dalam penilaian IID oleh Kementerian Dalam Negeri.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.1.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau merupakan model pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”. Strategi Ekonomi Hijau ini diharapkan dapat membantu Indonesia menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Dalam implementasinya, Ekonomi Hijau diharapkan dapat mendukung promosi investasi hijau, penyediaan modal dan infrastruktur berkelanjutan, serta lapangan kerja dan keterampilan yang layak untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan serta pertumbuhan ekonomi.

Indeks Ekonomi Hijau nasional ini terdiri dari 16 (enam belas) indikator di bawah 3 (tiga) pilar, yaitu pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial. Perkembangan indeks ekonomi hijau Provinsi Riau disajikan pada tabel berikut:



Sumber: Bappenas, 2024

Gambar II.63 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Indeks ekonomi hijau Provinsi Riau tahun 2019-2023 menunjukkan trend peningkatan. Indeks ekonomi hijau tahun 2021 sebesar 51,77, angka ini meningkat sebesar 3,5 persen dari tahun 2020. Beberapa parameter yang sudah sangat baik (nilai 75-100) diantaranya tingkat pengangguran, angka harapan hidup, produktivitas perikanan budidaya, produktivitas tenaga kerja sektor industri, intensitas energy final dan kualitas udara pada parameter NO2.

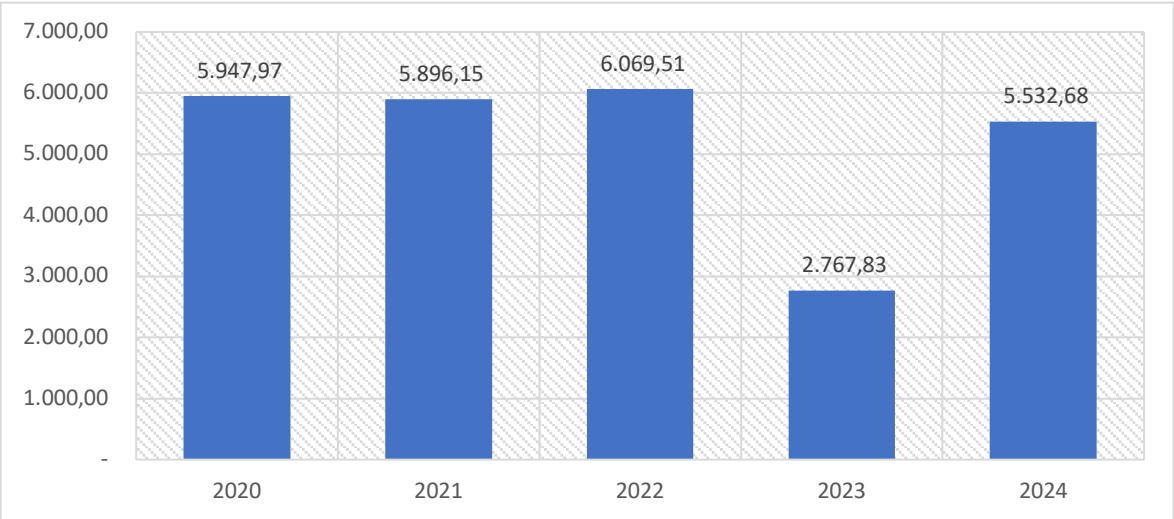
Sedangkan parameter yang berada dalam kategori kurang (nilai 0-25) antara lain kualitas air permukaan pada parameter BOD, persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline, produktivitas padi dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa. Hal yang perlu menjadi catatan untuk indikator ini adalah beberapa parameter dalam tujuh tahun terakhir berada pada kategori kurang, seperti: bauran energi, kualitas air permukaan, persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline, produktivitas padi dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa. Hingga tahun 2023 terjadi peningkatan Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Riau menjadi 59,72.

2.1.3.3.2 Ekonomi Biru

Ekonomi biru adalah pembangunan yang berbasis pada nilai ekonomi sumber daya laut, yang menciptakan nilai tambah pada rantai suplai (langsung dan tidak langsung) sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi ekonomi biru yang cukup besar. Tercatat sebanyak 17 pulau utama di samping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis serta memiliki kawasan Pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang 446 Km yang berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Siak dan Kab. Kepulauan Meranti; Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Dumai, Kab. Rokan Hilir dan Kab. Rokan Hulu; Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kab. Kepulauan Meranti.

Selanjutnya Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 km, Sungai Siak Kecil 90 km dan Sungai Mandau 87 km. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 861.256,00 ha terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Potensi biru yang dapat dikembangkan adalah sektor perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan ekowisata bahari yang berkelanjutan.



Gambar II.64 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Dalam sektor perikanan tangkap, produksi ikan oleh kelompok nelayan menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, produksi mencapai 5.947,97 ton, sedikit menurun menjadi 5.896,15 ton pada 2021, dan meningkat menjadi 6.069,51 ton pada 2022. Namun, pada 2023 terjadi penurunan signifikan menjadi 2.767,83 ton, sebelum kembali meningkat menjadi 5.532,68 ton pada 2024. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan angin yang memengaruhi aktivitas penangkapan ikan.

Sektor budidaya perikanan, khususnya budidaya udang vaname, menunjukkan potensi besar namun menghadapi tantangan dalam hal perizinan. Dari 73 pelaku usaha tambak udang vaname yang tersebar di enam kecamatan, hanya empat yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Kendala utama dalam pengembangan budidaya ini adalah proses perizinan yang kompleks dan memakan waktu, serta keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan legalitas formal. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengadakan workshop perizinan untuk memberikan penjelasan dan solusi kepada pelaku usaha dalam mengurus SIUP, dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadikan Bengkalis sebagai sentra produksi udang vaname.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga aktif dalam mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai usulan kepada pemerintah pusat, termasuk pengelolaan tambak udang di kawasan mangrove, pengembangan perikanan tangkap, dan perlindungan nelayan yang beraktivitas di perairan perbatasan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor ekonomi biru sebagai pilar pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Penetapan Pulau Rupat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) memberikan peluang besar dalam mendukung pengembangan ekonomi biru di Kabupaten Bengkalis. Dengan status KSPN, Pulau Rupat diakui secara nasional sebagai destinasi wisata prioritas yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor kelautan dan pariwisata berkelanjutan.

Sebagai pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pulau Rupat memiliki posisi strategis di perairan internasional Selat Malaka. Keunggulan ini menjadikan Pulau Rupat sebagai pintu gerbang potensial bagi wisatawan mancanegara, khususnya dari negara tetangga. Daya tarik utama Pulau Rupat meliputi pantai pasir putih sepanjang ±17 km, budaya lokal seperti Tari Zapin Api dan tradisi Mandi Safar, serta ekowisata di Pulau Beting Aceh yang kaya akan keanekaragaman hayati. Pengembangan destinasi ini sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang mengintegrasikan konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis, bersama dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telah mengusulkan perpanjangan status KSPN Pulau Rupat, mengingat regulasi yang mengatur KSPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 akan berakhir pada tahun 2025. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan infrastruktur pendukung pariwisata, seperti pembangunan dermaga Ro-Ro, pelabuhan penyeberangan, dan peningkatan aksesibilitas jalan. Selain itu, pengembangan homestay

dan penginapan lokal diutamakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata .

Dengan demikian, status KSPN Pulau Rupat berperan penting dalam mendukung ekonomi biru di Kabupaten Bengkalis melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Selanjutnya berdasarkan peta RTRW kabupaten bengkalis Tahun 2022-2042 ditemukan total luasan Nilai Konservasi tinggi di Kabupaten Bengkalis seluas 809.347,04 ha dengan luasan terbesar berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 318.135,04 ha dan luasan terkecil berupa Kawasan Ekosistem Mangrove seluas 9,24 ha, selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel II.36 Luasan Nilai Konservasi Tinggi Kabupaten Bengkalis

NILAI KONSERVASI TINGGI	LUAS (ha)
KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG	**88.731,44**
Badan Air	9.686,51
Kawasan Ekosistem Mangrove	9,24
Kawasan Hutan Lindung	30,74
Kawasan Lindung Gambut	1.017,24
Kawasan Perlindungan Setempat	1.128,07
Suaka Margasatwa	76.859,65
KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA	**720.615,60**
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	107.839,81
Kawasan Hutan Produksi Tetap	318.135,04
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	52.584,76
Kawasan Peruntukan Industri	2.910,41
Kawasan Perikanan Budi Daya	3.597,31
Kawasan Perkebunan	165.945,85
Kawasan Permukiman Perdesaan	41.606,81
Kawasan Permukiman Perkotaan	25.951,28
Kawasan Tanaman Pangan	2.044,33
TOTAL	**809.347,04**

Sumber: Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Bengkalis, Tahun 2022-2042

2.1.3.3.3 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Penggunaan energi baru terbarukan Provinsi Riau menargetkan sebesar ditargetkan sebesar sebesar 31,22 persen pada tahun 2025 dan 46,63 pada tahun 2050 (RUED Provinsi Riau 2021-2050).

Tabel II.37 Capaian Bauran Energi Provinsi Riau 2022-2023

Tahun	Penggunaan Energi (%)			
	Minyak Bumi	Gas Bumi	Batu Bara	Bauran Energi
2022	26,98	16,1	27,58	29,34
2023	28,93	15,04	29,9	26,13

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau, 2024

Capaian Bauran energi Provinsi Riau pada tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini disebabkan karena adanya peningkatan data pemanfaatan

energi yang bersumberkan minyak bumi dan batubara. Dari capaian EBT tahun 2023 sebesar 26,13 persen masih perlu upaya untuk penambahan EBT di tahun 2025 sebesar 5,09 persen. Provinsi Riau memiliki potensi Energi Baru terbarukan yang cukup besar yang terdiri dari laut, biomassa, biogas, surya, angin, panas bumi dan sampah.

Tabel II.38 Potensi EBT Riau dan Pemanfaatannya

No	Jenis Pemanfaatan	Kapasitas (MW)	Potensi (MW)	Persentase Pemanfaatan Dari Potensi
1	PLTS	19,58	1.700,00	1,15%
2	PLTBm	640,3	2.142,37	29,89%
3	PLTBg	30,4	4.354,55	0,70%
4	PLTMH	0,28	894	12,78%
5	PLTA	114		
6	PLTP	0	15	0,00%
7	PLTSa	0	10	0,00%
Total		804,55	9.115,92	8,83%

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau, 2024

Dari potensi EBT Provinsi Riau sebesar 9.115,92MW yang baru termanfaatkan sebesar 8,83 persen atau sebesar 804.936 MW. Potensi EBT terbesar bersumberkan dari kelapa sawit berupa biogas sebesar 4.354,55 MW dan biomassa sebesar 2.142,37 MW dan diikuti energi surya sebesar 1.700 MW.

Provinsi Riau memiliki potensi/cadangan bahan tambang sebagai sumber energi primer yang banyak terdapat di Provinsi Riau yaitu minyak bumi, gas bumi, batubara, bitumin dan gambut. Cadangan minyak bumi di Provinsi Riau diperkirakan sebesar 4,27 MMSTB (*million metric stock tanks barrels*) yang terdapat Kabupaten Bengkalis, Siak, Rohil, Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan dan Indragiri Hulu. Potensi/cadangan gas bumi sebesar 7,75 trilliun standart cubic feet (TSCF) terdapat di Kabupaten Pelalawan, Siak, Kota Pekanbaru dan Bengkalis. Potensi/cadangan batubara sebesar 2,37 milyar ton berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar. Potensi/cadangan bitumin (oil shale) sebesar 52,8 juta ton berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Potensi/cadangan gambut sebesar 12,88 milyar ton berada di Kabupaten Siak, Bengkalis dan Indragiri Hilir.

2.1.3.4 Transformasi Digital

2.1.3.4.1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi

Peranan TIK bermanfaat untuk mempercepat dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Manfaat konektivitas terhadap TIK dan internet sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di pedalaman. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan Indikator TIK di Indonesia, BPS melakukan penghitungan *ICT Development Index* (IDI) dengan nama Indeks Pembangunan TIK pada level nasional dan provinsi sejak tahun 2016. Penghitungan Indeks Pembangunan TIK mengacu pada metodologi International *Telecommunication Union* (ITU).

Berdasarkan metode ITU (2016), terdapat 11 indikator penyusun Indeks Pembangunan TIK yang terbagi menjadi 3 subindeks yaitu subindeks akses dan infrastruktur TIK, subindeks penggunaan TIK, dan subindeks keahlian TIK. Data yang digunakan untuk penghitungan Indeks Pembangunan TIK bersumber dari BPS dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sumber data terkait indikator TIK rumah tangga diperoleh dari survei rumah tangga BPS yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 sedangkan data terkait indikator telekomunikasi diperoleh dari data administrasi Kementerian Kominfo.

Tabel II.39 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Riau Tahun 2020-2023

Subindeks	2020	2021	2022	2023
Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK	5,99	6,00	6,07	6,07
Subindeks Penggunaan TIK	5,23	5,61	5,84	5,96
Subindeks Keahlian TIK	6,24	6,28	6,27	6,29
Indeks Pembangunan TIK Riau	5,74	5,90	6,02	6,07
Indeks Pembangunan TIK Nasional	5,59	5,76	5,85	5,90

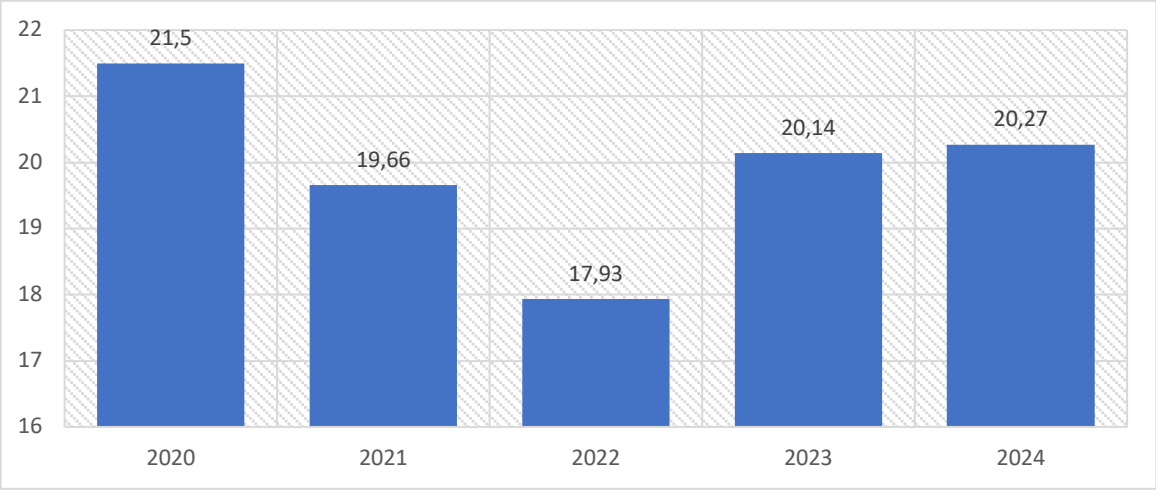
Sumber: BPS, 2024

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Riau pada tahun 2020 tercatat sebesar 5,74, dan mengalami peningkatan menjadi 6,07 pada tahun 2023. Capaian indeks pembangunan TIK Provinsi Riau tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang tercatat sebesar 5,90 pada tahun 2024. Subindeks tertinggi dalam Indeks Pembangunan TIK Provinsi Riau adalah Subindeks Keahlian TIK dengan nilai 6,29, diikuti oleh Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK yang mencapai 6,07, serta Subindeks Pemanfaatan TIK dengan nilai 5,96.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kontribusi penanaman modal terhadap PDRB di Kabupaten Bengkalis.



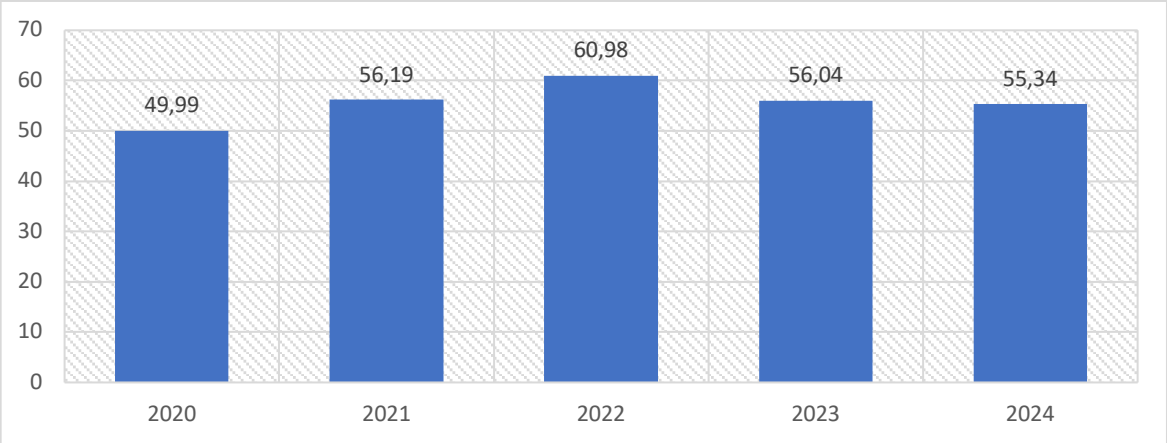
Sumber: BPS Bengkalis, 2024

Gambar II.65 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menurut harga berlaku di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sebesar 21,5%, turun menjadi 17,93% pada tahun 2022 yang disebabkan oleh dampak covid 19. Pada tahun 2023 kembali naik menjadi 20,14% dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 20,27%.

2.1.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

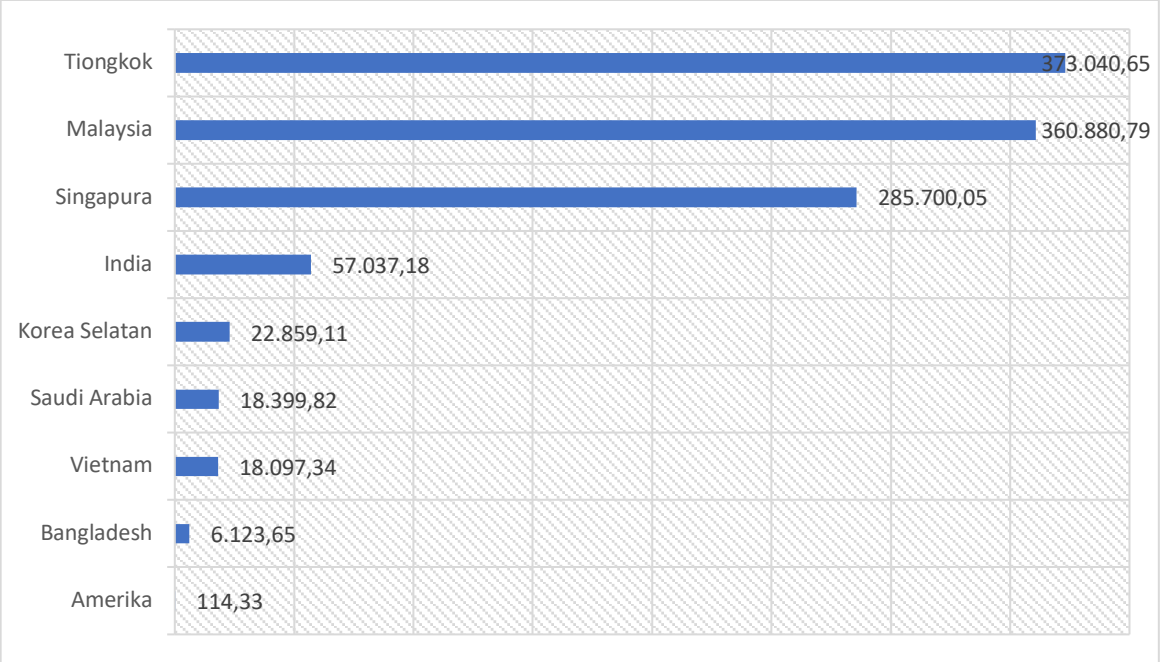
Rasio perdagangan terhadap PDRB merupakan indikator pengaruh relatif perdagangan luar negeri dalam perekonomian suatu negara atau daerah. Rasio perdagangan luar negeri terhadap PDRB dengan membagi nilai agregat ekspor dan impor tahun 2020-2024 dengan produk domestik bruto pada periode waktu yang sama. Nilai rasio ini merupakan gambaran keterbukaan perekonomian daerah terhadap perekonomian dunia. Berdasarkan nilai rasio perdagangan dan PDRB Kabupaten Bengkalis terlihat bahwa perekonomian Bengkalis sangat terbuka dengan kondisi perekonomian dunia.



Sumber: BPS Bengkalis, 2025

Gambar II.66 Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Net ekspor Kabupaten Bengkalis sangat dominan, baik dari sisi nilai maupun kontribusinya terhadap total nilai PDRB. Meskipun nilai nominal ekspor cukup berfluktuatif, pada tahun 2024 kontribusinya mencapai 55,34%. Angka kontribusi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh produk yang diproduksi di Kabupaten Bengkalis digunakan untuk memenuhi permintaan ekspor atau diperdagangkan ke luar wilayah Kabupaten Bengkalis. Komoditi ekspor Kabupaten Bengkalis didominasi oleh ekspor migas dan industri pengolahan CPO.



Sumber: BPS Riau, 2024

Gambar II.67 Ekspor Kabupaten Bengkalis Menurut Negara Tujuan Tahun 2023 (Ribu US$)

Selanjutnya adalah perkembangan ekspor Kabupaten Bengkalis menurut negara tujuan yang masih didominasi oleh Negara Tiongkok 373.040,65 ribu US$, Malaysia sebesar 360.880,70 ribu US$ dan Singapura sebesar 285.700,05 ribu US$.

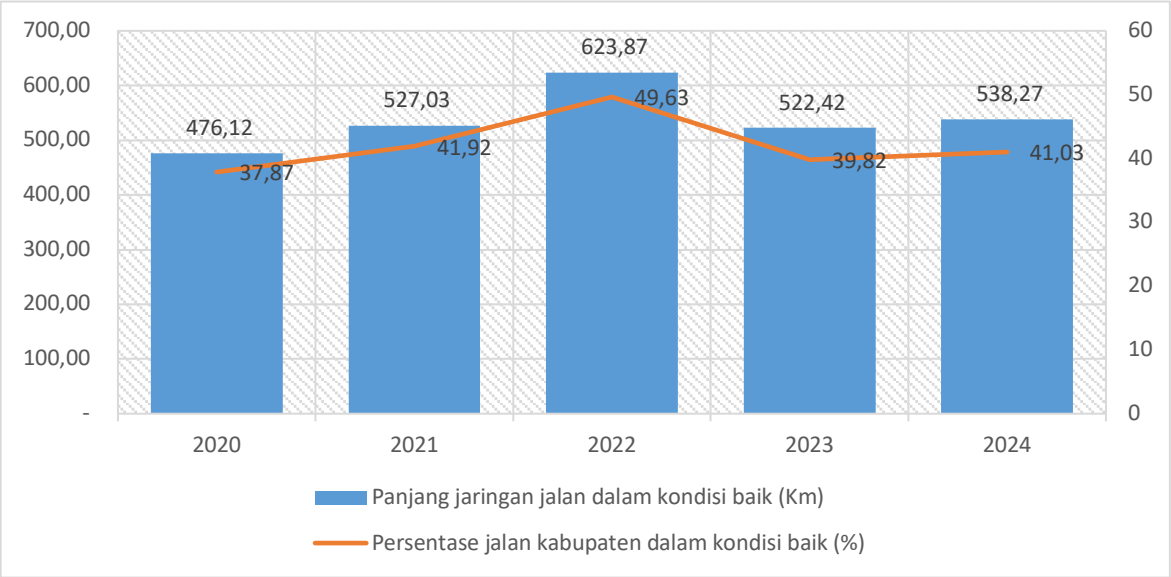
2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1 Kualitas Layanan Infrastruktur

A. Infrastruktur Jalan

Panjang jaringan jalan yang berada dalam kondisi baik tercatat sebesar 476,12 km dengan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 37,87%. Selanjutnya, pada tahun 2021, panjang jaringan jalan yang baik meningkat menjadi 527,03 km diikuti dengan peningkatan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik menjadi 41,92%. Peningkatan serupa juga terlihat pada tahun 2022 dengan panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 623,87 km dan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik menjadi 49,63%. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023, di mana panjang jalan dalam kondisi baik tercatat 522,42 km dan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik menurun menjadi 39,82%, namun pada tahun 2024, kembali meningkat dengan panjang

jalan dalam kondisi baik meningkat menjadi 538,27 km dan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik menjadi 41,03%.



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2025

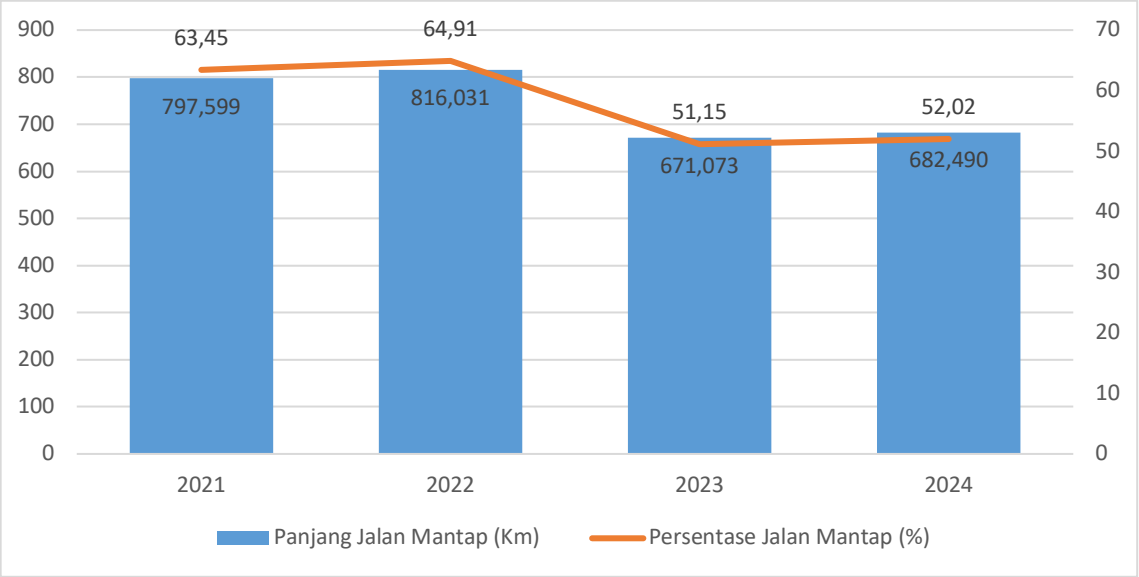
Gambar II.68 Jalan Kabupaten Bengkalis dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kebijakan strategis untuk meningkatkan kondisi jalan dan konektivitas wilayah yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur daerah.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bengkalis memfokuskan upaya peningkatan infrastruktur jalan dengan mengalokasikan anggaran untuk proyek infrasturktur jalan. Diantaranya adalah peningkatan jalan yang menghubungkan sejumlah kecamatan, seperti peningkatan Jalan Bantan Air–Muntai dan Jalan Pambang–Teluk Lancar, serta beberapa proyek infrastruktur lainnya. Selain itu, pembangunan jalan lingkar di Kecamatan Bantan menjadi prioritas.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menetapkan pembangunan jalan dan infrastruktur sebagai prioritas utama. Berbagai proyek yang diusulkan mencakup peningkatan jalan antar kecamatan, pembangunan prasarana utilitas umum perumahan, serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Selain itu, revitalisasi dan pengembangan fasilitas publik seperti masjid dan saluran drainase juga menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah.

Pada tahun 2025, Kabupaten Bengkalis melanjutkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, diantaranya pembangunan jembatan dan peningkatan jalan, serta optimalisasi saluran drainase di beberapa area menjadi bagian dari proyek yang dilaksanakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat setempat.



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.69 Panjang dan Persentase Jalan Kabupaten Bengkalis Dalam Kondisi Mantap Tahun 2021-2024

Berdasarkan data panjang dan persentase jalan Kabupaten Bengkalis dalam kondisi mantap periode 2021–2024, terlihat bahwa capaian kinerja infrastruktur jalan mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2021 panjang jalan mantap tercatat sebesar 797,599 km atau 63,45 persen, meningkat pada tahun 2022 menjadi 816,031 km atau 64,91 persen, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 dengan panjang jalan mantap hanya 671,073 km atau 51,15 persen dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 682,490 km atau 52,02 persen. Pemerintah terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas jalan melalui program pemeliharaan rutin, rehabilitasi, serta pembangunan jalan baru yang lebih terarah, dengan memperhatikan standar teknis, efisiensi penggunaan anggaran, serta pemerataan pembangunan antarwilayah, sehingga konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat dapat terjamin secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Berikut disajikan data rekapitulasi kondisi ruas jalan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024, yaitu:

Tabel II.40 Data Rekapitulasi Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR RUAS (M)	JENIS PERKERASAN (KM)					PANJANG TIAP KONDISI							
										BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
					HOTMIX	Lapen / Makadam	Perkerasan Beton	Telford/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
14 03 01 - 001	BENGKALIS - PRAPAT TUNGGAL	BENGKALIS	12,772	6,00	12,772		0,000	0,000	0,000	12,522	98,04	0,000	0,00	0,250	1,96	0,000	0,00
14 03 01 - 002	PRAPAT TUNGGAL - SIMPANG AYAM	BENGKALIS	3,323	3,38	0,121		2,522	0,680	0,000	0,883	26,57	1,522	45,80	0,918	27,63	0,000	0,00
14 03 01 - 003	MESKOM - SIMPANG AYAM	BENGKALIS	5,621	4,88	1,630		3,351	0,640	0,000	3,180	56,57	1,501	26,70	0,940	16,72	0,000	0,00
14 03 01 - 004	TELUK LATAK - SIMPANG AYAM	BENGKALIS	3,546	3,53	2,006		1,540	0,000	0,000	2,806	79,13	0,140	3,95	0,600	16,92	0,000	0,00
14 03 01 - 005	JL. M. TOHA (PANGKALAN BATANG)	BENGKALIS	2,311	4,54	1,650		0,661	0,000	0,000	2,311	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 006	JL. NELAYAN (PANGKALAN BATANG)	BENGKALIS	0,859	3,07	0,453		0,000	0,000	0,406	0,000	0,00	0,453	52,74	0,000	0,00	0,406	47,26
14 03 01 - 007	JL. POROS LAMA NELAYAN	BENGKALIS	1,016	3,00	0,000		0,400	0,600	0,016	0,000	0,00	0,400	39,37	0,600	59,06	0,016	1,57
14 03 01 - 008	JL. PAHLAWAN (SIMPANG BANGKINANG)	BENGKALIS	2,577	5,13	2,577		0,000	0,000	0,000	2,217	86,03	0,140	5,43	0,220	8,54	0,000	0,00
14 03 01 - 009	JL. JEND. SUDIRMAN (PEDEKIK)	BENGKALIS	1,349	3,29	0,000		1,349	0,000	0,000	0,400	29,65	0,949	70,35	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 010	JL. KHA. RASYID (PEDEKIK)	BENGKALIS	1,730	4,60	1,730		0,000	0,000	0,000	0,530	30,64	1,200	69,36	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 011	JL. M. TAYIB (PEDEKIK)	BENGKALIS	0,246	6,00	0,246		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,246	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 012	JL. HR. SUBRANTAS (PEDEKIK)	BENGKALIS	0,536	6,00	0,536		0,000	0,000	0,000	0,536	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 013	JL. KELAPAPATI LAUT	BENGKALIS	3,497	6,00	3,487		0,010	0,000	0,000	3,097	88,56	0,400	11,44	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 014	JL. KELAPAPATI TENGAH	BENGKALIS	3,245	6,00	3,245		0,000	0,000	0,000	3,245	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 015	JL. KELAPAPATI DARAT	BENGKALIS	3,045	6,00	3,045		0,000	0,000	0,000	2,845	93,43	0,200	6,57	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 016	JL. WONOSARI BARAT	BENGKALIS	5,071	5,13	0,775		4,296	0,000	0,000	1,665	32,83	3,175	62,61	0,231	4,56	0,000	0,00
14 03 01 - 017	JL. WONOSARI TENGAH	BENGKALIS	4,523	5,79	1,920		2,280	0,323	0,000	2,200	48,64	2,000	44,22	0,123	2,72	0,200	4,42
14 03 01 - 018	WONOSARI - PEDEKIK	BENGKALIS	4,679	6,00	4,679		0,000	0,000	0,000	4,679	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 019	JL. LEMBAGA	BENGKALIS	0,954	6,00	0,954		0,000	0,000	0,000	0,954	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 020	JL. WADUK PDAM	BENGKALIS	0,309	5,00	0,309		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,309	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 021	JL. KELAPASARI	BENGKALIS	4,361	3,88	0,000		4,200	0,000	0,161	0,866	19,86	1,420	32,56	1,914	43,89	0,161	3,69
14 03 01 - 022	JL. JEND. SUDIRMAN	BENGKALIS	1,352	11,00	1,352		0,000	0,000	0,000	1,352	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 023	JL. SYAHBANDAR	BENGKALIS	0,167	7,00	0,000		0,167	0,000	0,000	0,167	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00

NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR RUAS (M)	JENIS PERKERASAN (KM)					PANJANG TIAP KONDISI							
					HOTMIX	Lapen / Makadam	Perkerasan Beton	Telford/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
14 03 01 - 024	JL. YOS SUDARSO	BENGKALIS	0,417	6,60	0,379		0,038	0,000	0,000	0,417	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 025	JL. KURAU	BENGKALIS	0,080	4,00	0,080		0,000	0,000	0,000	0,080	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 026	JL. TENGGIRI	BENGKALIS	0,079	2,00	0,079		0,000	0,000	0,000	0,079	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 027	JL. TEUKU UMAR	BENGKALIS	0,556	4,50	0,556		0,000	0,000	0,000	0,556	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 028	JL. PATTIMURA	BENGKALIS	0,519	6,00	0,519		0,000	0,000	0,000	0,519	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 029	JL. SULTAN SYARIF KASIM	BENGKALIS	0,531	6,00	0,531		0,000	0,000	0,000	0,531	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 030	JL. HASANUDDIN	BENGKALIS	0,380	6,00	0,380		0,000	0,000	0,000	0,380	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 031	JL. DIPONEGORO	BENGKALIS	0,686	7,00	0,686		0,000	0,000	0,000	0,686	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 032	JL. HANG TUAH	BENGKALIS	1,068	8,00	1,068		0,000	0,000	0,000	1,068	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 033	JL. SMPN 2	BENGKALIS	0,177	4,00	0,177		0,000	0,000	0,000	0,177	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 034	JL. AHMAD YANI	BENGKALIS	1,299	8,00	1,299		0,000	0,000	0,000	1,299	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 035	JL. R.A. KARTINI	BENGKALIS	0,558	5,83	0,558		0,000	0,000	0,000	0,558	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 036	JL. TUGU	BENGKALIS	0,102	4,00	0,102		0,000	0,000	0,000	0,102	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 037	JL. PERWIRA	BENGKALIS	0,199	5,00	0,199		0,000	0,000	0,000	0,199	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 038	JL. PAHLAWAN	BENGKALIS	0,501	6,00	0,501		0,000	0,000	0,000	0,501	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 039	JL. HARAPAN	BENGKALIS	0,200	4,00	0,200		0,000	0,000	0,000	0,200	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 040	JL. SRI PULAU	BENGKALIS	0,508	5,00	0,508		0,000	0,000	0,000	0,508	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 041	JL. HOS COKROAMINOTO	BENGKALIS	0,514	6,00	0,514		0,000	0,000	0,000	0,514	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 042	JL. GATOT SUBROTO	BENGKALIS	0,898	6,00	0,898		0,000	0,000	0,000	0,898	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 043	JL. KARIMUN	BENGKALIS	0,491	6,00	0,491		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,491	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 044	JL. ARIF RAHMAN	BENGKALIS	0,480	6,00	0,480		0,000	0,000	0,000	0,480	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 045	JL. BATU HAMPAR	BENGKALIS	0,126	0,00	0,126		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,126	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 046	JL. CEMARA	BENGKALIS	0,316	4,67	0,316		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,316	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 047	JL. MUSLIHIN	BENGKALIS	0,351	4,00	0,351		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,351	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 048	JL. RUMBIA	BENGKALIS	0,694	6,00	0,694		0,000	0,000	0,000	0,694	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00

NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR RUAS (M)	JENIS PERKERASAN (KM)					PANJANG TIAP KONDISI							
										BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
					HOTMIX	Lapen / Makadam	Perkerasan Beton	Telford/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
14 03 01 - 049	JL. TANDUN	BENGKALIS	0,690	6,00	0,690		0,000	0,000	0,000	0,690	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 050	JL. SENAYAN	BENGKALIS	0,655	5,00	0,655		0,000	0,000	0,000	0,655	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 051	JL. SDN 4	BENGKALIS	0,652	5,40	0,652		0,000	0,000	0,000	0,200	30,67	0,452	69,33	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 052	JL. PEMBANGUNAN I	BENGKALIS	0,326	6,00	0,326		0,000	0,000	0,000	0,326	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 053	JL. PEMBANGUNAN II	BENGKALIS	0,304	6,00	0,304		0,000	0,000	0,000	0,304	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 054	JL. PEMBANGUNAN III	BENGKALIS	0,693	6,00	0,693		0,000	0,000	0,000	0,693	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 055	JL. GURU	BENGKALIS	0,232	6,00	0,232		0,000	0,000	0,000	0,232	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 056	JL. GERILYA	BENGKALIS	0,557	5,00	0,557		0,000	0,000	0,000	0,508	91,20	0,049	8,80	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 057	BENGKALIS - AIR PUTIH	BENGKALIS	3,474	6,00	3,474		0,000	0,000	0,000	3,344	96,26	0,130	3,74	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 058	JL. ANTARA	BENGKALIS	3,044	9,06	3,044		0,000	0,000	0,000	1,844	60,58	1,200	39,42	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 059	JL. HR. SUBRANTAS	BENGKALIS	1,799	6,00	1,799		0,000	0,000	0,000	1,799	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 060	JL. MUSLIHUN	BENGKALIS	0,894	5,00	0,894		0,000	0,000	0,000	0,894	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 061	JL. ABD. HAMID	BENGKALIS	0,520	5,00	0,520		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,520	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 062	JL. PERJUANGAN	BENGKALIS	0,983	4,00	0,783		0,200	0,000	0,000	0,983	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 063	JL. PERTANIAN	BENGKALIS	1,778	8,17	1,778		0,000	0,000	0,000	1,778	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 064	JL. BANTAN	BENGKALIS	0,652	8,00	0,652		0,000	0,000	0,000	0,452	69,33	0,200	30,67	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 065	JL. PRAMUKA	BENGKALIS	2,160	8,00	2,160		0,000	0,000	0,000	2,160	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 066	JL. SMAN 2	BENGKALIS	0,451	6,00	0,451		0,000	0,000	0,000	0,451	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 067	JL. MOHD. ALI	BENGKALIS	0,351	6,00	0,351		0,000	0,000	0,000	0,351	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 068	JL. H. M. NUH	BENGKALIS	0,352	4,00	0,352		0,000	0,000	0,000	0,352	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 069	JL. H. SULAIMAN	BENGKALIS	0,319	5,00	0,319		0,000	0,000	0,000	0,119	37,30	0,200	62,70	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 070	PRAMUKA UJUNG - BATHIN ALAM	BENGKALIS	3,176	5,56	3,176		0,000	0,000	0,000	3,176	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 071	JL. LINGKAR UTARA	BENGKALIS	1,610	1,33	0,000		0,000	0,800	0,810	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,610	100,00
14 03 01 - 072	KETAM PUTIH - SEKODI	BENGKALIS	24,449	5,01	0,620		18,619	5,210	0,000	12,749	52,15	1,470	6,01	9,270	37,92	0,960	3,93
14 03 01 - 073	SEKODI - TAMAN KERA JINAK	BENGKALIS	5,510	4,00	0,200		3,400	1,910	0,000	0,000	0,00	3,000	54,45	2,510	45,55	0,000	0,00

NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR RUAS (M)	JENIS PERKERASAN (KM)					PANJANG TIAP KONDISI							
										BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
					HOTMIX	Lapen / Makadam	Perkerasan Beton	Telford/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
14 03 01 - 074	JL. H. ILYAS	BENGKALIS - BANTAN	8,120	3,00	0,000		5,520	2,600	0,000	0,000	0,00	4,320	53,20	1,400	17,24	2,400	29,56
14 03 01 - 075	BENGKALIS - SELAT BARU	BENGKALIS - BANTAN	17,066	5,52	15,080		1,986	0,000	0,000	17,066	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 076	AIR PUTIH - SELAT BARU	BENGKALIS - BANTAN	14,843	4,34	2,315		1,335	11,193	0,000	3,650	24,59	0,000	0,00	0,150	1,01	11,043	74,40
14 03 01 - 077	KELEBUK - RESAM LAPIS	BENGKALIS - BANTAN	7,154	2,86	0,000		4,922	1,032	1,200	0,000	0,00	3,222	45,04	2,732	38,19	1,200	16,77
14 03 01 - 078	JL. TAMBAK LAMA	BENGKALIS - BANTAN	0,765	4,00	0,000		0,400	0,000	0,365	0,000	0,00	0,000	0,00	0,400	52,29	0,365	47,71
14 03 01 - 079	PEMATANG DUKU - PAMBANG	BENGKALIS - BANTAN	15,917	6,00	0,000		15,917	0,000	0,000	15,917	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 01 - 080	PEMATANG DUKU - KEMBUNG BARU	BENGKALIS - BANTAN	14,532	4,33	0,290		13,412	0,830	0,000	1,642	11,30	9,850	67,78	3,040	20,92	0,000	0,00
14 03 01 - 081	KELEMANTAN - TELUK LANCAR	BENGKALIS - BANTAN	7,981	2,37	0,000		1,031	0,200	6,750	0,000	0,00	1,031	12,92	0,200	2,51	6,750	84,58
14 03 02 - 082	RESAM LAPIS - JL. R.A. KARTINI	BANTAN	2,169	3,27	0,000		2,169	0,000	0,000	0,000	0,00	2,029	93,55	0,140	6,45	0,000	0,00
14 03 02 - 083	BANTAN TENGAH - MUNTAI	BANTAN	20,573	5,03	0,000		18,663	1,910	0,000	12,793	62,18	1,440	7,00	6,340	30,82	0,000	0,00
14 03 02 - 084	MUNTAI - PAMBANG	BANTAN	10,450	5,64	2,770		6,480	1,200	0,000	8,650	82,78	0,600	5,74	1,200	11,48	0,000	0,00
14 03 02 - 085	PAMBANG - TELUK LANCAR	BANTAN	18,707	4,66	3,977		7,763	6,967	0,000	7,110	38,01	1,830	9,78	9,517	50,87	0,250	1,34
14 03 02 - 086	JL. TELUK ONDAN	BANTAN	1,898	3,50	0,000		1,898	0,000	0,000	0,000	0,00	1,636	86,20	0,262	13,80	0,000	0,00
14 03 02 - 087	BANTAN TENGAH - BANTAN AIR	BANTAN	3,601	3,00	0,000		3,601	0,000	0,000	0,000	0,00	3,401	94,45	0,200	5,55	0,000	0,00
14 03 02 - 088	MUNTAI - PAMBANG PESISIR	BANTAN	10,509	3,55	0,000		5,572	4,937	0,000	0,100	0,95	3,500	33,30	6,909	65,74	0,000	0,00
14 03 02 - 089	JL. PATTIMURA (PAMBANG BARU)	BANTAN	1,512	3,60	0,000		0,960	0,552	0,000	0,034	2,25	0,926	61,24	0,552	36,51	0,000	0,00
14 03 02 - 090	JL. PANTAI TANJUNG SENEKIP (TELUK PAMBANG)	BANTAN	2,304	3,00	0,000		2,060	0,000	0,244	0,000	0,00	0,860	37,33	1,200	52,08	0,244	10,59
14 03 02 - 091	JL. RAJIMUN (PESANTREN BANTAN TUA)	BANTAN	2,283	3,73	0,000		2,283	0,000	0,000	0,000	0,00	2,283	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 02 - 092	JL. DELIK	BANTAN	7,096	3,15	0,000		7,096	0,000	0,000	0,000	0,00	2,896	40,81	4,200	59,19	0,000	0,00
14 03 02 - 093	JL. UTAMA JANGKANG	BANTAN	4,766	4,71	3,750		0,230	0,786	0,000	0,230	4,83	3,750	78,68	0,786	16,49	0,000	0,00
14 03 02 - 094	SELAT BARU - DELUK	BANTAN	5,607	2,72	0,474		1,406	2,207	1,520	0,474	8,45	0,393	7,01	3,220	57,43	1,520	27,11
14 03 02 - 095	JL. DELUK	BANTAN	0,960	5,00	0,000		0,960	0,000	0,000	0,000	0,00	0,960	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 02 - 096	JL. ANTARA (SELAT BARU)	BANTAN	1,479	4,92	0,000		1,179	0,300	0,000	0,668	45,17	0,511	34,55	0,300	20,28	0,000	0,00
14 03 02 - 097	SELAT BARU - PANTAI	BANTAN	7,094	6,86	0,864		6,230	0,000	0,000	7,094	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00

NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR RUAS (M)	JENIS PERKERASAN (KM)					PANJANG TIAP KONDISI							
					HOTMIX	Lapen / Makadam	Perkerasan Beton	Telford/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
14 03 02 - 098	JL. DAMAI	BANTAN	3,315	3,00	0,000		3,315	0,000	0,000	0,000	0,00	2,915	87,93	0,400	12,07	0,000	0,00
14 03 02 - 099	JL. R.A KARTINI (RESAM LAPIS)	BANTAN	2,054	3,28	0,950		1,104	0,000	0,000	0,000	0,00	1,510	73,52	0,544	26,48	0,000	0,00
14 03 02 - 100	JL. SIMPANG SIRAP - ULU PULAU	BANTAN	2,134	3,00	0,000		1,948	0,186	0,000	0,000	0,00	1,734	81,26	0,400	18,74	0,000	0,00
14 03 02 - 101	JL. POROS MENTAYAN	BANTAN	3,844	3,29	0,546		2,584	0,714	0,000	0,000	0,00	1,214	31,58	2,630	68,42	0,000	0,00
14 03 02 - 102	MENTAYAN - TELUK PAPAL	BANTAN	3,744	3,16	0,000		3,524	0,220	0,000	0,000	0,00	3,124	83,44	0,620	16,56	0,000	0,00
14 03 02 - 103	TELUK ONDAN - TELUK PAPAL	BANTAN	2,823	3,00	0,000		0,938	1,885	0,000	0,000	0,00	0,938	33,23	1,885	66,77	0,000	0,00
14 03 02 - 104	JL. MARIMAN HATCERY	BANTAN	2,227	4,21	0,000		0,000	2,010	0,217	0,000	0,00	0,000	0,00	2,010	90,26	0,217	9,74
14 03 02 - 105	TELUK LANCAR - SEKODI	BANTAN - BENGKALIS	9,276	3,71	0,000		7,006	2,270	0,000	1,020	11,00	1,200	12,94	7,056	76,07	0,000	0,00
14 03 02 - 106	BANTAN TIMUR - PEMATANG DUKU	BANTAN - BENGKALIS	12,257	1,27	0,000		4,857	0,000	7,400	0,060	0,49	3,340	27,25	1,457	11,89	7,400	60,37
14 03 02 - 107	BERANCAH - TEMERAN	BANTAN - BENGKALIS	10,429	3,05	0,000		9,919	0,000	0,510	0,000	0,00	5,890	56,48	4,029	38,63	0,510	4,89
14 03 03 - 108	SEI. SELARI - DOMPAS	BUKIT BATU	10,607	6,00	9,737		0,870	0,000	0,000	10,537	99,34	0,070	0,66	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 03 - 109	JL. SULTAN SYARIF KASIM SEI. SELARI	BUKIT BATU	2,686	5,14	2,686		0,000	0,000	0,000	2,686	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 03 - 110	JL. SUKAJADI	BUKIT BATU	2,940	3,05	1,165		1,095	0,680	0,000	0,995	33,84	1,065	36,22	0,880	29,93	0,000	0,00
14 03 03 - 111	JL. AHMAD YANI	BUKIT BATU	3,059	5,00	3,059		0,000	0,000	0,000	2,772	90,62	0,287	9,38	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 03 - 112	JL. LINTAS PROVINSI - BURUK BAKUL	BUKIT BATU	1,494	4,15	0,000		1,494	0,000	0,000	1,076	72,02	0,418	27,98	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 03 - 113	JL. BUKIT BATU LAUT	BUKIT BATU	1,063	6,00	0,000		0,662	0,401	0,000	0,662	62,28	0,000	0,00	0,401	37,72	0,000	0,00
14 03 03 - 114	SUKAJADI - BUKIT BATU	BUKIT BATU	1,799	3,27	0,000		1,799	0,000	0,000	0,800	44,47	0,399	22,18	0,600	33,35	0,000	0,00
14 03 03 - 115	LINGKAR BUKIT BATU - SIAK KECIL	BUKIT BATU - SIAK KECIL	36,766	6,85	0,000		6,216	17,350	13,200	6,216	16,91	0,000	0,00	17,350	47,19	13,200	35,90
14 03 03 - 116	JL. DAMAI - TANJUNG BELIT	BUKIT BATU - SIAK KECIL	4,507	3,31	0,000		2,707	1,800	0,000	0,200	4,44	2,307	51,19	2,000	44,38	0,000	0,00
14 03 09 - 117	JL. BABUSSALAM - KAMPUNG LALANG	MANDAU	2,247	3,79	2,247		0,000	0,000	0,000	2,247	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 118	JL. SEJAHTERA	MANDAU	1,222	3,57	1,222		0,000	0,000	0,000	0,200	16,37	1,022	83,63	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 119	JL. ROKAN - JL . KARANG ANYER II	MANDAU	1,225	4,00	1,225		0,000	0,000	0,000	1,225	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 120	JL. KARANG ANYER	MANDAU	1,361	4,44	1,361		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	1,361	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 121	JL. SOEBRANTRAS	MANDAU	0,915	5,00	0,915		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,915	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 122	JL. KESEHATAN	MANDAU	0,869	3,50	0,869		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,869	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00

NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR RUAS (M)	JENIS PERKERASAN (KM)					PANJANG TIAP KONDISI							
					HOTMIX	Lapen / Makadam	Perkerasan Beton	Telford/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
14 03 09 - 123	JL. AL HAMRA	MANDAU	1,040	3,93	1,040		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	1,040	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 124	JL. BAITUL RAHMAN	MANDAU	0,224	6,00	0,224		0,000	0,000	0,000	0,224	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 125	JL. GAYA BARU	MANDAU	1,443	4,63	1,443		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	1,443	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 126	JL. DAMAI	MANDAU	0,765	5,00	0,765		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,765	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 127	JL. JAWA	MANDAU	1,796	5,00	1,796		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	1,796	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 128	JL. DESA HARAPAN DURI	MANDAU	1,568	10,00	1,568		0,000	0,000	0,000	1,568	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 129	JL. NUSANTARA I	MANDAU	1,419	5,00	1,419		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	1,419	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 130	JL. PERTANIAN (DURI)	MANDAU	1,314	4,38	1,314		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	1,314	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 131	JL. KH. AHMAD DAHLAN	MANDAU	0,843	5,00	0,843		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,843	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 132	JL. STADION	MANDAU	4,855	5,32	2,000		0,000	2,855	0,000	1,600	32,96	0,400	8,24	0,000	0,00	2,855	58,81
14 03 09 - 133	JL. KAYANGAN	MANDAU	2,222	6,00	2,222		0,000	0,000	0,000	2,222	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 134	JL. AMAN	MANDAU	4,024	5,62	4,024		0,000	0,000	0,000	3,400	84,49	0,624	15,51	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 135	JL. BATHIN BERTUAH	MANDAU	2,046	5,00	2,046		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	2,046	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 09 - 136	JL. ASRAMA TRIBATRA	MANDAU	2,230	5,00	2,230		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	2,085	93,50	0,145	6,50	0,000	0,00
14 03 09 - 137	JL. ABDURRAHMAN PEMATANG PUDU	MANDAU	1,326	5,00	1,200		0,000	0,126	0,000	0,000	0,00	1,200	90,50	0,126	9,50	0,000	0,00
14 03 09 - 138	JL. SMAN 4	MANDAU	1,267	4,00	1,196		0,000	0,071	0,000	0,000	0,00	1,196	94,40	0,071	5,60	0,000	0,00
14 03 09 - 139	JL. KUD (SIMP. TIGA PASAR HARAPAN BARU)	MANDAU	7,903	5,00	4,753		0,000	3,150	0,000	4,000	50,61	0,753	9,53	3,150	39,86	0,000	0,00
14 03 09 - 140	JL.. KUSUMA BAKTI	MANDAU	3,636	4,07	2,486		0,000	1,150	0,000	2,486	68,37	0,000	0,00	1,150	31,63	0,000	0,00
14 03 09 - 141	TALANG MANDI - BATHIN BETUAH	MANDAU	13,021	4,97	1,960		0,000	11,061	0,000	1,640	12,60	0,300	2,30	10,800	82,94	0,281	2,16
14 03 09 - 142	GAJAH MADA - LINGKAR TIMUR DURI	MANDAU - PINGGIR - TALANG MUANDAU - BATHIN SOLAPAN	64,915	6,00	0,050		27,180	37,685	0,000	27,230	41,95	0,000	0,00	26,370	40,62	11,315	17,43
14 03 10 - 143	TANJUNG KAPAL - DARUL AMAN	RUPAT	25,466	4,42	0,000		12,576	12,890	0,000	1,770	6,95	5,400	21,20	18,296	71,84	0,000	0,00
14 03 10 - 144	JL. PELABUHAN DUSUN TELUK TUNGKU	RUPAT	0,674	3,00	0,000		0,674	0,000	0,000	0,000	0,00	0,200	29,67	0,474	70,33	0,000	0,00
14 03 10 - 145	BATU PANJANG - TANJUNG KAPAL	RUPAT	3,087	5,00	0,000		3,087	0,000	0,000	1,681	54,45	0,434	14,06	0,972	31,49	0,000	0,00

NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR RUAS (M)	JENIS PERKERASAN (KM)					PANJANG TIAP KONDISI							
										BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
					HOTMIX	Lapen / Makadam	Perkerasan Beton	Telford/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
14 03 10 - 146	TANJUNG KAPAL - JL. PEMUDA	RUPAT	4,500	6,00	0,000		0,209	4,291	0,000	0,209	4,64	0,000	0,00	4,291	95,36	0,000	0,00
14 03 10 - 147	JL. PEMUDA (BATU PANJANG)	RUPAT	2,877	6,00	0,000		2,877	0,000	0,000	0,000	0,00	2,800	97,32	0,077	2,68	0,000	0,00
14 03 10 - 148	BATU PANJANG - PANGKALAN NYIRIH	RUPAT	52,335	6,07	0,000		49,735	2,600	0,000	47,800	91,33	1,335	2,55	3,200	6,11	0,000	0,00
14 03 10 - 149	JL. HANGTUAH	RUPAT	1,313	3,93	0,000		1,313	0,000	0,000	0,000	0,00	0,913	69,54	0,400	30,46	0,000	0,00
14 03 10 - 150	JL. MASJID (BATU PANJANG)	RUPAT	1,875	4,46	0,000		1,875	0,000	0,000	0,000	0,00	1,485	79,20	0,390	20,80	0,000	0,00
14 03 10 - 151	JL. DATUK LAMA	RUPAT	0,964	3,50	0,000		0,964	0,000	0,000	0,000	0,00	0,764	79,25	0,200	20,75	0,000	0,00
14 03 10 - 152	JL. SULTAN SYARIF KASIM	RUPAT	1,793	4,11	0,000		1,600	0,193	0,000	0,600	33,46	0,600	33,46	0,593	33,07	0,000	0,00
14 03 10 - 153	JL. INPRES	RUPAT	1,309	3,43	0,000		0,800	0,000	0,509	0,000	0,00	0,600	45,84	0,200	15,28	0,509	38,88
14 03 10 - 154	JL. UTAMA	RUPAT	1,113	3,50	0,000		1,113	0,000	0,000	0,000	0,00	0,713	64,06	0,400	35,94	0,000	0,00
14 03 10 - 155	JL. BANDES	RUPAT	1,279	1,71	0,000		0,400	0,000	0,879	0,000	0,00	0,400	31,27	0,000	0,00	0,879	68,73
14 03 10 - 156	JL. STADION	RUPAT	0,629	3,40	0,000		0,629	0,000	0,000	0,149	23,69	0,000	0,00	0,480	76,31	0,000	0,00
14 03 10 - 157	JL. PELAJAR	RUPAT	0,897	4,00	0,000		0,897	0,000	0,000	0,000	0,00	0,897	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 10 - 158	JL. H. SIHI	RUPAT	1,211	3,61	0,000		1,211	0,000	0,000	0,827	68,29	0,364	30,06	0,020	1,65	0,000	0,00
14 03 10 - 159	JL. TELUK LECAH - PELABUHAN	RUPAT	5,203	2,95	0,000		3,800	1,403	0,000	0,000	0,00	1,530	29,41	3,673	70,59	0,000	0,00
14 03 10 - 160	KEBUMEN - PANCUR	RUPAT	5,589	3,59	0,000		2,389	3,200	0,000	0,000	0,00	1,389	24,85	3,518	62,95	0,682	12,20
14 03 10 - 161	PANCUR JAYA - DUNGUN BARU	RUPAT	5,155	3,29	0,000		2,155	3,000	0,000	0,000	0,00	2,155	41,80	3,000	58,20	0,000	0,00
14 03 10 - 162	PANCUR - PANGKALAN BUAH	RUPAT	2,384	3,42	0,000		1,673	0,711	0,000	0,000	0,00	1,584	66,44	0,800	33,56	0,000	0,00
14 03 10 - 163	PANGKALAN NYIRIH - PANTAI KETAPANG	RUPAT	8,069	5,92	0,000		2,920	5,149	0,000	2,920	36,19	0,000	0,00	5,149	63,81	0,000	0,00
14 03 10 - 164	PANGKALAN NYIRIH - MAKERUH	RUPAT	11,325	3,52	0,000		7,113	4,212	0,000	0,000	0,00	3,325	29,36	8,000	70,64	0,000	0,00
14 03 10 - 165	PANGKALAN NYIRIH - DUSUN PARIT BARU	RUPAT	8,257	3,35	0,000		7,178	1,079	0,000	0,000	0,00	4,457	53,98	3,800	46,02	0,000	0,00
14 03 10 - 166	MAKAREUH - PANTAI	RUPAT	1,952	3,00	0,000		1,952	0,000	0,000	0,000	0,00	0,800	40,98	1,152	59,02	0,000	0,00
14 03 10 - 167	PANGKALAN NYIRIH - TANJUNG MEDANG	RUPAT - RUPAT UTARA	22,529	5,93	0,000		18,209	4,320	0,000	18,209	80,82	0,000	0,00	4,320	19,18	0,000	0,00
14 03 10 - 168	PANGKALAN NYIRIH - TITI AKAR	RUPAT - RUPAT UTARA	21,659	3,82	0,000		2,739	18,920	0,000	2,380	10,99	0,259	1,20	19,020	87,82	0,000	0,00
14 03 11 - 169	TELUK KADOR - TANJUNG MEDANG	RUPAT UTARA	12,748	5,70	0,000		8,941	3,807	0,000	8,941	70,14	0,000	0,00	3,807	29,86	0,000	0,00

NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR RUAS (M)	JENIS PERKERASAN (KM)					PANJANG TIAP KONDISI							
					HOTMIX	Lapen / Makadam	Perkerasan Beton	Telford/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
14 03 11 - 170	JL. NUSANTARA	RUPAT UTARA	0,699	5,00	0,000		0,699	0,000	0,000	0,699	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 11 - 171	JL ANTARA (PUTRI SEMBILAN)	RUPAT UTARA	2,693	3,61	0,000		2,319	0,374	0,000	0,258	9,58	2,061	76,53	0,374	13,89	0,000	0,00
14 03 11 - 172	JL. PANTAI TANJUNG LAPIN	RUPAT UTARA	0,847	5,00	0,000		0,043	0,804	0,000	0,043	5,08	0,000	0,00	0,804	94,92	0,000	0,00
14 03 11 - 173	JL. TELUK RHU	RUPAT UTARA	2,117	5,50	0,000		2,117	0,000	0,000	1,850	87,39	0,117	5,53	0,150	7,09	0,000	0,00
14 03 11 - 174	JL. PASAR - INTERCONECTION (JEMBATAN KUISENG)	RUPAT UTARA	1,007	3,50	0,000		0,000	1,007	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,007	100,00	0,000	0,00
14 03 11 - 175	TANJUNG MEDANG - PELABUHAN	RUPAT UTARA	2,440	6,00	0,000		2,440	0,000	0,000	2,440	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 11 - 176	TJ. MEDANG - TITI AKAR	RUPAT UTARA	19,401	4,19	0,000		6,557	10,164	2,680	0,267	1,38	1,450	7,47	15,004	77,34	2,680	13,81
14 03 12 - 177	LUBUK MUDA - TANJUNG BELIT	SIAK KECIL	9,871	4,94	0,000		7,501	2,370	0,000	5,200	52,68	1,570	15,91	1,071	10,85	2,030	20,57
14 03 12 - 178	JL. HANG TUAH (LUBUK MUDA)	SIAK KECIL	1,316	3,81	1,316		0,000	0,000	0,000	1,116	84,80	0,170	12,92	0,030	2,28	0,000	0,00
14 03 12 - 179	JL. ZALIK ARIS	SIAK KECIL	5,171	2,92	2,730		0,940	0,000	1,501	3,470	67,11	0,200	3,87	0,000	0,00	1,501	29,03
14 03 12 - 180	SUNGAI SIPUT - KOTO RAJA	SIAK KECIL	3,966	3,16	1,000		2,890	0,076	0,000	1,400	35,30	2,159	54,44	0,407	10,26	0,000	0,00
14 03 12 - 181	JL. KAMPUNG BARU (LUBUK GARAM)	SIAK KECIL	1,381	3,05	0,400		0,761	0,220	0,000	0,000	0,00	0,581	42,07	0,800	57,93	0,000	0,00
14 03 12 - 182	JL. SEPOTONG KANAN (LUBUK GARAM)	SIAK KECIL	1,142	3,45	0,000		1,142	0,000	0,000	0,000	0,00	1,052	92,12	0,090	7,88	0,000	0,00
14 03 12 - 183	JL. KANAL (LUBUK GARAM)	SIAK KECIL	2,966	3,30	0,000		2,966	0,000	0,000	0,000	0,00	2,157	72,72	0,809	27,28	0,000	0,00
14 03 12 - 184	JL. BERINGIN (LUBUK GARAM)	SIAK KECIL	0,958	3,50	0,000		0,958	0,000	0,000	0,000	0,00	0,958	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 12 - 185	SIMPANG LIMA - KOTO RAJA	SIAK KECIL	11,101	6,00	2,280		0,000	8,821	0,000	0,880	7,93	0,600	5,40	9,621	86,67	0,000	0,00
14 03 12 - 186	JL. MENUJU JEMB. SEI MANGGIS	SIAK KECIL	1,019	5,00	0,000		0,000	1,019	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,019	100,00	0,000	0,00
14 03 12 - 187	SIMP. LIMA - SEI. NIBUNG	SIAK KECIL	8,866	4,85	6,130		0,000	2,736	0,000	3,600	40,60	2,370	26,73	2,896	32,66	0,000	0,00
14 03 12 - 188	TANJUNG DAMAI - LUBUK GAUNG	SIAK KECIL	9,980	3,69	0,000		4,789	5,191	0,000	0,824	8,26	3,684	36,91	5,472	54,83	0,000	0,00
14 03 12 - 189	LANGKAT - DESA LAKSAMANA (BATAS KAB. SIAK)	SIAK KECIL	2,035	5,25	1,525		0,000	0,510	0,000	1,525	74,94	0,000	0,00	0,510	25,06	0,000	0,00
14 03 12 - 190	JALAN POROS LANGKAT	SIAK KECIL	2,267	4,92	0,000		0,000	2,267	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,267	100,00	0,000	0,00
14 03 12 - 191	JL. POROS SEI. NIBUNG (BOB) -SADAR JAYA	SIAK KECIL	5,564	5,38	0,000		3,600	1,964	0,000	2,800	50,32	0,000	0,00	2,764	49,68	0,000	0,00
14 03 12 - 192	SUNGAI LINAU - BANDAR JAYA	SIAK KECIL	9,927	6,00	1,554		2,555	5,818	0,000	4,109	41,39	0,000	0,00	5,818	58,61	0,000	0,00
14 03 12 - 193	SUNGAI LINAU - SADAR JAYA	SIAK KECIL	1,530	6,00	0,000		0,876	0,654	0,000	0,876	57,25	0,000	0,00	0,654	42,75	0,000	0,00

NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR RUAS (M)	JENIS PERKERASAN (KM)					PANJANG TIAP KONDISI							
										BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
					HOTMIX	Lapen / Makadam	Perkerasan Beton	Telford/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
14 03 12 - 194	SADAR JAYA - BANDAR JAYA	SIAK KECIL	14,834	4,11	0,000		2,355	12,245	0,234	0,755	5,09	0,000	0,00	13,845	93,33	0,234	1,58
14 03 13 - 195	JL. BATHIN MUAJOLELO	PINGGIR	16,819	5,13	2,410		0,200	14,209	0,000	2,410	14,33	0,200	1,19	14,209	84,48	0,000	0,00
14 03 13 - 196	JL. SWADAYA (BALAI RAJA)	PINGGIR	2,693	5,00	0,400		0,000	2,293	0,000	0,000	0,00	0,400	14,85	2,293	85,15	0,000	0,00
14 03 13 - 197	JL. BENGKALIS INDAH	PINGGIR	3,769	5,00	3,769		0,000	0,000	0,000	3,044	80,76	0,391	10,37	0,334	8,86	0,000	0,00
14 03 13 - 198	JL. BENIH IKAN	PINGGIR	1,421	3,28	0,871		0,000	0,550	0,000	0,871	61,29	0,000	0,00	0,550	38,71	0,000	0,00
14 03 13 - 199	JL. POROS BULUH APO	PINGGIR	6,826	4,00	2,200		0,000	4,626	0,000	2,200	32,23	0,000	0,00	4,626	67,77	0,000	0,00
14 03 13 - 200	JL. TAMBUSAI BULUH APO	PINGGIR	13,464	5,00	3,374		0,000	10,090	0,000	3,174	23,57	0,000	0,00	10,290	76,43	0,000	0,00
14 03 13 - 201	JL. SUNGAI MERANTI	PINGGIR	4,550	5,34	3,280		0,000	1,270	0,000	3,280	72,09	0,000	0,00	1,270	27,91	0,000	0,00
14 03 13 - 202	JL. R. HIDAYAT	PINGGIR	3,038	4,88	2,600		0,438	0,000	0,000	2,928	96,38	0,070	2,30	0,040	1,32	0,000	0,00
14 03 13 - 203	JL. POROS (BALAI PUNGUT)	PINGGIR	2,694	4,00	2,470		0,200	0,024	0,000	1,000	37,12	1,670	61,99	0,024	0,89	0,000	0,00
14 03 13 - 204	JL. PELABUHAN (BALAI PUNGUT)	PINGGIR	1,060	5,00	1,060		0,000	0,000	0,000	1,060	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 13 - 205	SIMPANG INTAN - KUALA PENASO	PINGGIR	13,321	6,00	0,000		0,184	13,137	0,000	0,184	1,38	0,000	0,00	13,137	98,62	0,000	0,00
14 03 13 - 206	JL. PAKIH BERTUAH - TENGGANAU	PINGGIR	7,848	4,81	4,598		0,000	3,250	0,000	3,276	41,74	1,200	15,29	3,372	42,97	0,000	0,00
14 03 13 - 207	JL. BATHIN TARAK	PINGGIR	3,154	5,00	3,154		0,000	0,000	0,000	3,154	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 13 - 208	JL. AMPANG - AMPANG	PINGGIR	5,050	5,00	0,070		0,000	4,980	0,000	0,070	1,39	0,000	0,00	4,980	98,61	0,000	0,00
14 03 13 - 209	JL. SIALANG RIMBUN	PINGGIR	4,069	5,00	3,486		0,000	0,583	0,000	3,486	85,67	0,000	0,00	0,583	14,33	0,000	0,00
14 03 13 - 210	JL. GAJAHAN	PINGGIR	5,586	6,00	0,000		3,490	2,096	0,000	3,490	62,48	0,000	0,00	1,470	26,32	0,626	11,21
14 03 13 - 211	JL. TENDA BIRU (MUARA BASUNG)	PINGGIR	2,052	6,00	0,000		1,250	0,802	0,000	1,250	60,92	0,000	0,00	0,802	39,08	0,000	0,00
14 03 14 - 212	JL. PARIT I API-API	BANDAR LAKSAMANA	1,062	5,00	0,000		1,062	0,000	0,000	1,062	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 14 - 213	JL. LINTAS PROVINSI - TEMIANG	BANDAR LAKSAMANA	2,261	5,00	0,000		2,261	0,000	0,000	2,261	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 14 - 214	JL. API - API DARAT	BANDAR LAKSAMANA	3,518	2,98	0,318		3,200	0,000	0,000	0,432	12,28	1,632	46,39	1,454	41,33	0,000	0,00
14 03 14 - 215	JL. API-API LAUT	BANDAR LAKSAMANA	0,799	3,10	0,000		0,550	0,249	0,000	0,000	0,00	0,550	68,84	0,000	0,00	0,249	31,16
14 03 14 - 216	JL. AKI SALI API-API	BANDAR LAKSAMANA	2,402	6,00	0,000		2,402	0,000	0,000	2,402	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 14 - 217	KM 35 PROVINSI	BANDAR LAKSAMANA	3,776	2,95	0,000		0,000	0,000	3,776	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,776	100,00
14 03 14 - 218	JL. LINGKAR PANTAI TENGGAYUN	BANDAR LAKSAMANA	0,961	5,50	0,000		0,961	0,000	0,000	0,482	50,16	0,479	49,84	0,000	0,00	0,000	0,00

NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR RUAS (M)	JENIS PERKERASAN (KM)					PANJANG TIAP KONDISI							
										BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
					HOTMIX	Lapen / Makadam	Perkerasan Beton	Telford/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
14 03 14 - 219	JL. SUDIRMAN (SEPAHAT)	BANDAR LAKSAMANA	3,012	3,89	0,000		3,012	0,000	0,000	3,012	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 14 - 220	JL. LINTAS PPROVINSI - PANTAI TANJUNG LEBAN	BANDAR LAKSAMANA	1,093	4,57	0,000		0,722	0,371	0,000	0,000	0,00	0,722	66,06	0,371	33,94	0,000	0,00
14 03 14 - 221	JL. GAPOKTAN	BANDAR LAKSAMANA	5,937	4,00	1,396		1,758	2,783	0,000	1,814	30,55	0,940	15,83	3,183	53,61	0,000	0,00
14 03 14 - 222	JL. SMA 3 BUKIT KERIKIL	BANDAR LAKSAMANA	1,599	4,00	0,000		0,380	1,219	0,000	0,000	0,00	0,380	23,76	1,219	76,24	0,000	0,00
14 03 14 - 223	JL. MULYONO (BUKIT KERIKIL)	BANDAR LAKSAMANA	0,871	3,00	0,000		0,871	0,000	0,000	0,000	0,00	0,871	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 14 - 224	JL. SIMP. KULIM (BUKIT KERIKIL)	BANDAR LAKSAMANA	6,404	5,00	0,000		0,000	6,404	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	6,404	100,00	0,000	0,00
14 03 14 - 225	JL. SENTOSA (BUKIT KERIKIL)	BANDAR LAKSAMANA	3,691	4,73	2,190		0,371	1,130	0,000	2,190	59,33	0,371	10,05	1,130	30,62	0,000	0,00
14 03 14 - 226	JL. DANAN (DUSUN SUKA DAMAL)	BANDAR LAKSAMANA	3,161	4,61	0,000		1,110	1,830	0,221	0,000	0,00	1,000	31,64	1,940	61,37	0,221	6,99
14 03 14 - 227	DURI - SEI. PAKNING	BANDAR LAKSAMANA - TALANG MUANDAU - BATHIN SOLAPAN	70,912	6,00	0,000		0,000	34,000	36,912	0,000	0,00	0,000	0,00	32,800	46,25	38,112	53,75
14 03 15 - 228	TASIK SERAI - SERAI WANGI	TALANG MUANDAU	27,917	6,90	0,707		5,035	22,175	0,000	4,680	16,76	0,782	2,80	22,455	80,43	0,000	0,00
14 03 15 - 229	JL. BAGAN BENIO DESA TASIK SERAI	TALANG MUANDAU	15,370	2,68	0,000		0,557	9,443	5,370	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	65,06	5,370	34,94
14 03 15 - 230	SERAI WANGI -TASIK SERAI TIMUR	TALANG MUANDAU	7,102	4,00	0,709		0,955	5,438	0,000	0,000	0,00	1,664	23,43	5,438	76,57	0,000	0,00
14 03 15 - 231	TASIK SERAI TIMUR - WISATA TASIK	TALANG MUANDAU	5,006	5,00	0,000		1,075	3,931	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	5,006	100,00	0,000	0,00
14 03 15 - 232	TASIK SERAI TIMUR - MELIBUR	TALANG MUANDAU	18,469	5,77	0,000		0,939	17,530	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	18,469	100,00	0,000	0,00
14 03 15 - 233	BERINGIN - MELIBUR	TALANG MUANDAU	17,027	5,25	0,660		4,809	11,558	0,000	0,200	1,17	1,609	9,45	15,218	89,38	0,000	0,00
14 03 15 - 234	JL. BERINGIN - TASIK SERAI TIMUR	TALANG MUANDAU	16,837	4,92	4,800		1,800	10,237	0,000	5,400	32,07	0,600	3,56	10,837	64,36	0,000	0,00
14 03 15 - 235	JL. KAYU API (KUALA PENASO)	TALANG MUANDAU	10,457	5,23	0,000		3,340	7,117	0,000	3,340	31,94	0,000	0,00	7,117	68,06	0,000	0,00
14 03 16 - 236	JL. SAKABOTIK KM 16	BATHIN SOLAPAN	6,276	5,00	6,276		0,000	0,000	0,000	5,300	84,45	0,000	0,00	0,976	15,55	0,000	0,00
14 03 16 - 237	JL. PERTANIAN	BATHIN SOLAPAN	2,443	5,00	2,443		0,000	0,000	0,000	2,303	94,27	0,140	5,73	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 16 - 238	JL. REJOSARI KM 12	BATHIN SOLAPAN	3,790	5,60	2,400		0,000	1,000	0,390	2,225	58,71	0,175	4,62	1,000	26,39	0,390	10,29
14 03 16 - 239	JL. TEGAL SARI - DURI 4	BATHIN SOLAPAN	1,743	5,00	1,375		0,062	0,306	0,000	1,222	70,11	0,215	12,34	0,306	17,56	0,000	0,00
14 03 16 - 240	JL. PIPA AIR BERSIH	BATHIN SOLAPAN	9,109	6,00	9,109		0,000	0,000	0,000	5,909	64,87	2,400	26,35	0,800	8,78	0,000	0,00
14 03 16 - 241	JL. SIAK	BATHIN SOLAPAN	7,558	6,00	7,558		0,000	0,000	0,000	6,158	81,48	1,000	13,23	0,400	5,29	0,000	0,00

NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR RUAS (M)	JENIS PERKERASAN (KM)					PANJANG TIAP KONDISI							
					HOTMIX	Lapen / Makadam	Perkerasan Beton	Telford/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
14 03 16 - 242	JL. BATHIN KUAT	BATHIN SOLAPAN	3,776	4,43	2,290		0,806	0,680	0,000	2,000	52,97	1,046	27,70	0,730	19,33	0,000	0,00
14 03 16 - 243	JL. BARU CPI	BATHIN SOLAPAN	5,319	6,00	3,950		0,000	1,369	0,000	2,816	52,94	0,820	15,42	1,683	31,64	0,000	0,00
14 03 16 - 244	JL. DURI - RANGAU	BATHIN SOLAPAN	9,663	6,00	9,663		0,000	0,000	0,000	9,663	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14 03 16 - 245	JL. BUKIT ABBAS	BATHIN SOLAPAN	4,081	4,57	0,000		0,000	2,800	1,281	0,000	0,00	0,000	0,00	2,800	68,61	1,281	31,39
14 03 16 - 246	LINGKAR BARAT (DURI)	BATHIN SOLAPAN - MANDAU - PINGGIR	33,074	6,00	30,164		0,640	2,270	0,000	30,614	92,56	0,190	0,57	2,270	6,86	0,000	0,00
14 03 16 - 247	JL. JENDERAL SUDIRMAN	BATHIN SOLAPAN - MANDAU	4,225	6,00	4,225		0,000	0,000	0,000	4,225	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TOTAL			**1.311,96**		**310,85**		**462,30**	**452,26**	**86,55**	**493,64**	**37,63**	**188,85**	**14,39**	**508,03**	**38,72**	**121,44**	**9,26**

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2025

B. Air Minum

Layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Bengkalis berdasarkan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan pelayanan pengolahan air limbah domestik, terlihat bahwa tingkat keterlayanan masyarakat Kabupaten Bengkalis masih bervariasi. Untuk layanan air minum, dari total 658.846 jiwa yang berhak menerima layanan, sebanyak 470.091 jiwa atau 71,35 persen telah terlayani. Namun, jika ditinjau dari indikator kuantitas dan kualitas SPAM, jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan akses masih relatif rendah, terutama pada jaringan perpipaan yang hanya mencapai 13,13 persen untuk kuantitas dan 2,56 persen untuk kualitas. Sementara itu, pada aspek pelayanan pengolahan air limbah domestik, capaian menunjukkan hasil yang lebih baik, di mana dari 192.870 rumah tangga, sebanyak 181.142 rumah tangga atau 93,92 persen telah terlayani, termasuk melalui sistem setempat (SPAL-S) dengan keterlayanan sebesar 93,92 persen. Untuk itu, pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur air minum agar capaian layanan sistem penyediaan air minum dapat terus dioptimalkan. Berikut disajikan data layanan SPAM di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, yaitu:

Tabel II.41 Layanan SPAM di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

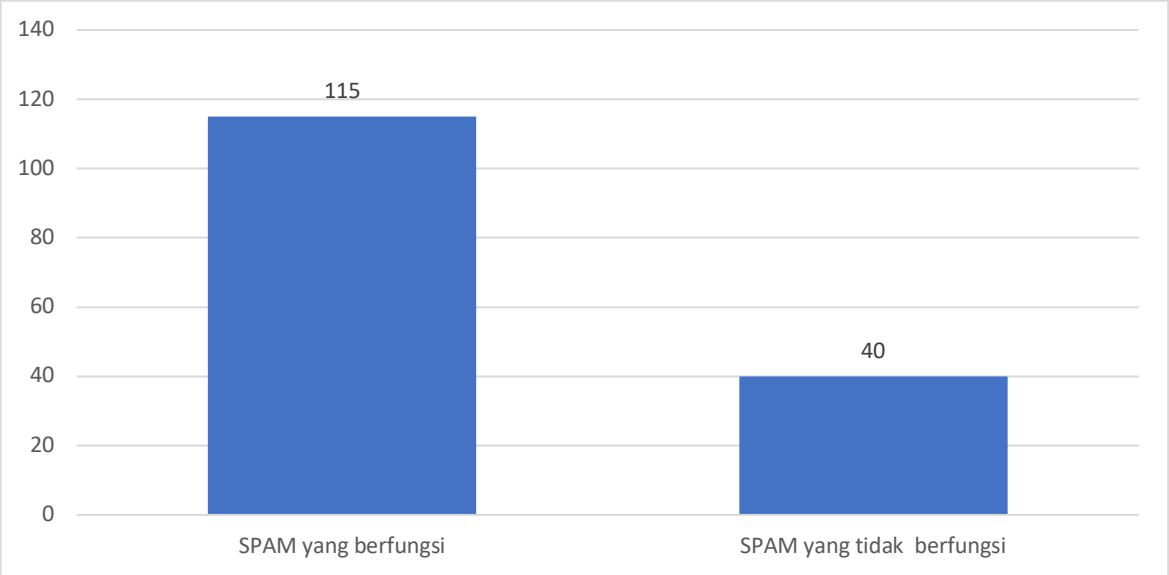
Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak Menerima Layanan Dasar	Jumlah yang Terlayani	Persentase Terlayani
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari			***Orang***	**658.846**	**470.091**	**71,35%**
		PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	*Orang*			
		Jaringan Perpipaaan				
		Kuantitas SPAM				
	1	*Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)*	*Rumah Tangga*	**192.870**	**25.332**	**13,13%**
		Kualitas SPAM				
	2	*Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)*	*Rumah Tangga*	192.870	4.947	**2,56%**
		Bukan Jaringan Perpipaan				
		Kuantitas SPAM				
	1	*Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)*	*Rumah Tangga*	**192.870**	**112.282**	**58,22%**
		Kualitas SPAM				

Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak Menerima Layanan Dasar	Jumlah yang Terlayani	Persentase Terlayani
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	2	*Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.*	*Rumah Tangga*	**192.870**	**0**	**0**
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik			***Orang***	**658.846**	**618.783**	**93,92%**
		PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	*Orang*			
		SPALD Kabupaten/Kota				
	1	KUANTITAS SPALD				
		a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	*Rumah Tangga*	**192.870**	**181.142**	**93,92%**
	2	KUALITAS SPALD				
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)				
		a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	*Rumah Tangga*	**0**	**0**	**0**
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)				

Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak Menerima Layanan Dasar	Jumlah yang Terlayani	Persentase Terlayani
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan ≥ 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	*Rumah Tangga*	**49.217**	**46.224**	**93,92%**
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	*Rumah Tangga*	**143.653**	**134.918**	**93,92%**

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kabupaten Bengkalis, 2025

Adapun jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Bengkalis tahun 2024, tercatat sebanyak 115 unit SPAM dalam kondisi berfungsi dan 40 unit SPAM dalam kondisi tidak berfungsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur SPAM masih dapat dimanfaatkan untuk mendukung akses masyarakat terhadap layanan air minum, meskipun masih terdapat sejumlah unit yang belum optimal. Untuk itu pemerintah terus berupaya melakukan penguatan pengelolaan, pemeliharaan, serta rehabilitasi terhadap SPAM yang tidak berfungsi, sehingga ketersediaan layanan air minum dapat lebih merata, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar pelayanan dasar yang ditetapkan pemerintah.

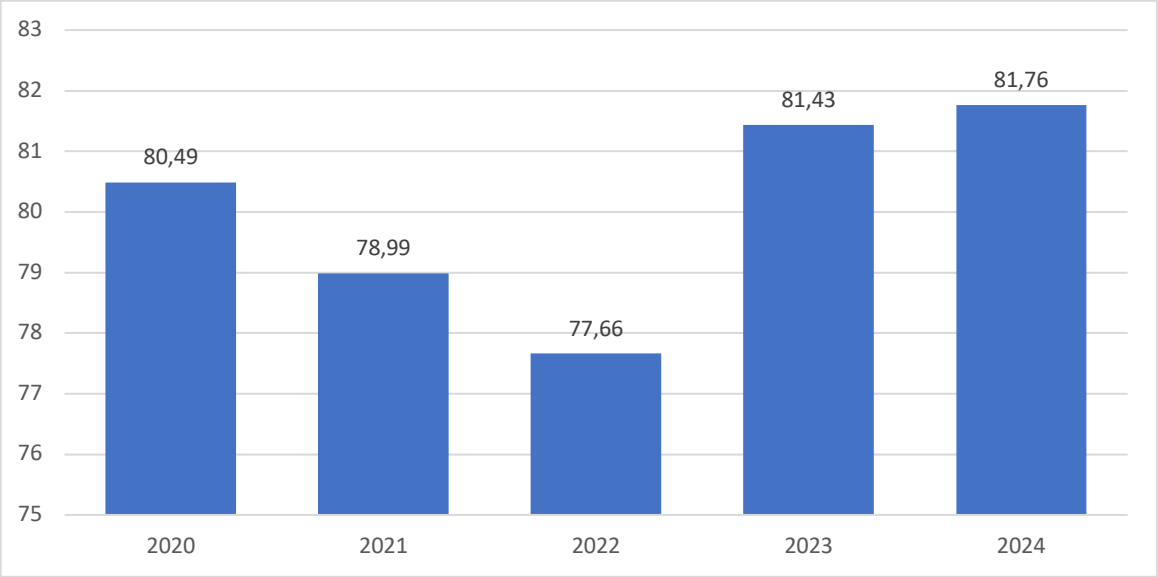


Sumber: Dinas PERKIMTAN Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.70 Jumlah SPAM yang Berfungsi dan Tidak Berfungsi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 (Unit)

2.1.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kabupaten Bengkalis menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Indikator ini, dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS), memperhitungkan empat kriteria utama, yaitu kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per kapita, akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, serta ketahanan bangunan. Kriteria-kriteria tersebut dirancang untuk memastikan bahwa hunian yang tersedia bagi masyarakat tidak hanya memenuhi standar fisik yang layak, tetapi juga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat baik melalui kepemilikan maupun penyewaan dengan harga yang terjangkau.



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025

Tabel II.42 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Berdasarkan data BPS, capaian Kabupaten Bengkalis terhadap indikator hunian layak dan terjangkau mengalami mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, capaian indikator ini berada di angka 80,49%. Namun, pada tahun 2021, capaian indikator ini sedikit menurun menjadi 78,99%, diikuti oleh penurunan lebih lanjut pada tahun 2022 menjadi 77,66%. Selanjutnya, kembali meningkat hingga tahun 2024 menjadi 81,76%, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bengkalis memiliki akses yang lebih baik terhadap hunian yang memenuhi standar kelayakan.

2.1.3.6.3 Persentase Desa Mandiri

Pengukuran kemajuan dan kemandirian desa dapat dilihat dari Indeks Desa Mandiri (IDM), yang diukur dari ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan/ekologi. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 tercatat Indeks Desa Membangun Kabupaten Bengkalis meningkat dari 0,7273 tahun 2020 dengan status IDM Maju, menjadi 0,9074 dengan status IDM Mandiri pada tahun 2024. Selengkapnya mengenai perkembangan IDM Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.43 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai IDM	0,7273	0,7466	0,7699	0,8374	0,9074
Status IDM	Maju	Maju	Maju	Mandiri	Mandiri

Sumber: https://idm.kemendesa.go.id/

Kabupaten Bengkalis telah menetapkan salah satu kawasan yang dapat dikembangkan sebagai Kawasan Perdesaan, yaitu Kawasan Perdesaan Agrosilvopastura Bumi Terpadu di Kecamatan Siak Kecil, melalui Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 809/KPTS/XII/2022.

Selain itu, terdapat beberapa kawasan lain yang berpotensi untuk dikembangkan, antara lain:

1. Kecamatan Bengkalis yang terdiri dari 19 (sembilan belas) desa, yaitu Desa Sekodi, Desa Palkun, Desa Kelemantan, Desa Kelemantan Barat, Desa Sungai Batang, Desa Ketam Putih, Desa Pematang Duku Timur, Desa Pematang Duku, Desa Penampi, Desa Kelebuk, Desa Damai, Desa Temeran, Desa Penebal, Desa Kuala Alam, Desa Sungai Alam, Desa Air Putih, Desa Senggoro, Desa Wonosari, dan Desa Pedekik. Usulan pengembangan kawasan perdesaan pada wilayah ini adalah Kawasan Perdesaan Agrominapolitan Bengkalis Terbilang, dengan fokus pada:
    a. Sentra Pengembangan Ekonomi Mangrove (ekowisata mangrove, pengolahan hasil perikanan, pusat rehabilitasi dan pembibitan mangrove).
    b. Sentra Pengolahan Hasil Pertanian (nanas, sagu, dan limbah pertanian).
    c. Sentra Budidaya Pertanian (nanas dan sagu).
2. Kecamatan Siak Kecil yang terdiri dari 6 (enam) desa, yaitu Desa Sumber Jaya, Desa Tanjung Damai, Desa Sungai Linau, Desa Bandar Jaya, Desa Sadar Jaya, dan Desa Muara Dua. Usulan pengembangan kawasan perdesaan pada wilayah ini adalah Kawasan Perdesaan Bandar Agro Siak Kecil, dengan pengembangan sebagai berikut:
    a. Desa Sumber Jaya sebagai pusat pengolahan produk turunan daging sapi.
    b. Desa Tanjung Damai sebagai pusat produksi pakan modern untuk ternak sapi.
    c. Desa Sungai Linau sebagai pusat peternakan sapi dengan lahan awal 200 Ha milik Pemda yang dapat diperluas sesuai kebutuhan.
    d. Desa Bandar Jaya sebagai pusat pengolahan limbah menjadi pupuk organik bernilai ekonomi.
    e. Desa Sadar Jaya sebagai pusat pemasaran produk kawasan.
    f. Desa Muara Dua sebagai pusat rumah potong hewan (RPH) sapi.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan indikator penting dalam mengukur kontribusi sektor pajak terhadap perekonomian suatu daerah. Rasio ini menggambarkan seberapa besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut dalam periode tertentu. Secara sederhana, rasio ini memberikan gambaran

tentang kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak serta ketergantungan ekonomi daerah terhadap pendapatan pajak.

Tabel II.44 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak (Miliar)	63,66	82,36	94,21	106,09	137,79
PDRB ADHK (Miliar)	114.583,99	139.613,50	175.972,46	168.635,85	175.713,79
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,056	0,059	0,054	0,063	0,078

Sumber: BPS dan Bapenda Kabupaten Bengkalis, 2025

Berdasarkan data diatas, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis menunjukkan fluktuasi sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio pajak terhadap PDRB tercatat sebesar 0,056%, yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,059%. Pada tahun 2022, rasio ini sedikit menurun menjadi 0,054%, sebelum kembali meningkat hingga tahun 2024 menjadi 0,078%.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, diantaranya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada 15 September 2022. Kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan, data perizinan, serta informasi lainnya, guna meningkatkan pemungutan pajak pusat dan daerah .

Selain itu, pada 19 Desember 2024, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Riau mengenai optimalisasi pemungutan pajak daerah. Kesepakatan ini mencakup sinergi pelayanan publik bidang pendapatan daerah dan penguatan pemungutan pajak daerah melalui opsi tambahan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang akan berlaku efektif pada 5 Januari 2025 .

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis menggelar sosialisasi dan edukasi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada 6 Desember 2022. Sosialisasi ini diikuti oleh berbagai kelompok wajib pajak dan pejabat pengelola pendapatan daerah, dengan harapan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi terbaru .

Bapenda juga memanfaatkan teknologi informasi melalui layanan SIPBUKAS, yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara online melalui perangkat gadget. Selain itu, pendekatan *door-to-door* dan pendataan lapangan dilakukan untuk menggali potensi objek pajak yang belum terdata, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal seperti Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah.

2.1.3.7.2 Tingkat Inflasi

Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum menjadi penomena ekonomi yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai riil mata uang. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas, namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pengendalian inflasi bertujuan untuk menciptakan dampak positif sekaligus mencegah dampak negatif terhadap perekonomian, tanpa menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi. Inflasi sering kali terjadi secara tiba-tiba, sehingga pengendalian yang cepat dan efektif diperlukan untuk memitigasi dampaknya. Secara umum, tingkat inflasi di Riau, yang juga terjadi di Kabupaten Bengkalis masih pada tingkat inflasi rendah (dibawah 10%). Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum masih dibawah 10%. Inflasi rendah biasanya masih mudah dikendalikan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian.

Tabel II.45 Tingkat Inflasi di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Riau	2,42	1,54	6,81	2,50	2,50
Tembilahan	3,30	1,09	4,82	1,53	2,45
Pekanbaru	2,24	1,55	7,04	2,50	1,89
Dumai	2,88	1,66	6,46	2,78	2,68
Kampar	na	na	na	na	3,25

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025

Data inflasi yang digunakan berasal dari Kota Dumai, karena perhitungan inflasi di Provinsi Riau hanya mencakup tiga wilayah, yaitu Kota Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan. Namun, pada tahun 2024, cakupan wilayah perhitungan inflasi diperluas dengan penambahan Kabupaten Kampar.

Penggunaan data inflasi Kota Dumai disebabkan karena secara geografis Kota Dumai berdekatan dengan Kabupaten Bengkalis. Selain itu tingkat inflasi di Kabupaten Bengkalis dan banyak kabupaten kota di Riau pada umumnya banyak dipengaruhi oleh tingkat inflasi di Kota Pekanbaru, yang mana Kota Pekanbaru sebagai sentra distribusi barang dan jasa di Provinsi Riau. Sedikit banyak pergerakan harga di Kota Pekanbaru akan berpengaruh langsung terhadap harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Bengkalis. Secara umum inflasi Provinsi Riau berdasarkan data BPS cenderung fluktuatif dari tahun 2020-2024. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022, namun kondisi ini masih terkendali.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

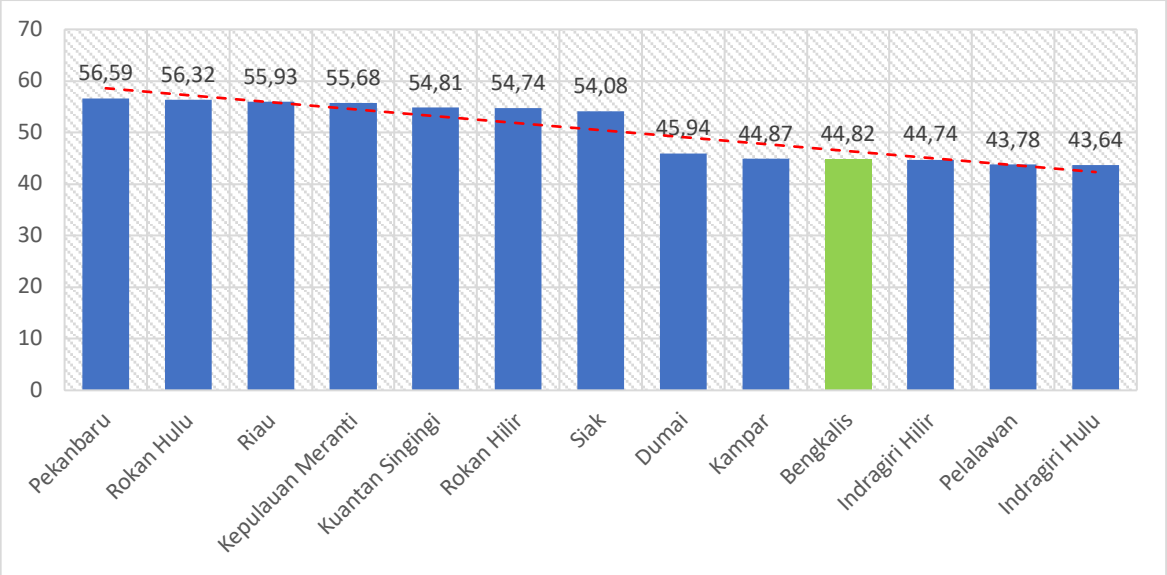
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Aspek pelayanan umum terdiri Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif; Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial; Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan, sera Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana daerah telah melaksanakan reformasi hukum, termasuk dalam hal peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, keadilan, dan transparansi dalam sistem pemerintahan. IRH membantu dalam mengidentifikasi, memetakan, dan mengevaluasi regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan, serta memperkuat sistem regulasi nasional.

Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.



Sumber: Kemenkumham, 2024

Gambar II.71 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 tercatat sebesar 44,82 poin, berada peringkat keempat terendah di Provinsi Riau. Namun, Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih terus berupaya medorong pengutan reformasi hukum diantaranya harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), deregulasi, dan penataan basis data peraturan perundang-undangan.

Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah penyusunan dan pengesahan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis. Perbup ini menjadi landasan strategis dalam merencanakan dan melaksanakan reformasi birokrasi di daerah, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi organisasi. Selanjutnya, pada tahun 2024, Perbup ini

diperbarui melalui Perbup Nomor 14 Tahun 2024 untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan terkini dalam reformasi birokrasi daerah .

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga aktif dalam proses harmonisasi regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada 6 Februari 2025, Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau menggelar harmonisasi rancangan peraturan bupati untuk tahun anggaran 2025. Kegiatan ini bertujuan memastikan keselarasan regulasi daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, serta meningkatkan kualitas peraturan daerah yang dihasilkan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengimplementasikan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi informasi. Program seperti "Dukcapil Simpel" dan "Molduk" (Mobil Layanan Dukcapil) dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang responsif dan transparan .

Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan Indeks Reformasi Hukum daerah. Upaya harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi ASN, serta inovasi dalam pelayanan publik merupakan bagian integral dari strategi untuk menciptakan sistem hukum daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.4.1.2 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk itu, Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan daerah akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan. Berikut adalah indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024, yaitu:

Tabel II.46 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	48,62	52,74	61,07	64,82
Ketgori Indeks Reformasi Birokrasi	Kurang (C)	Cukup (Memadai) (CC)	Baik (B)	Baik (B)

Sumber: KEMENPANRB, 2025

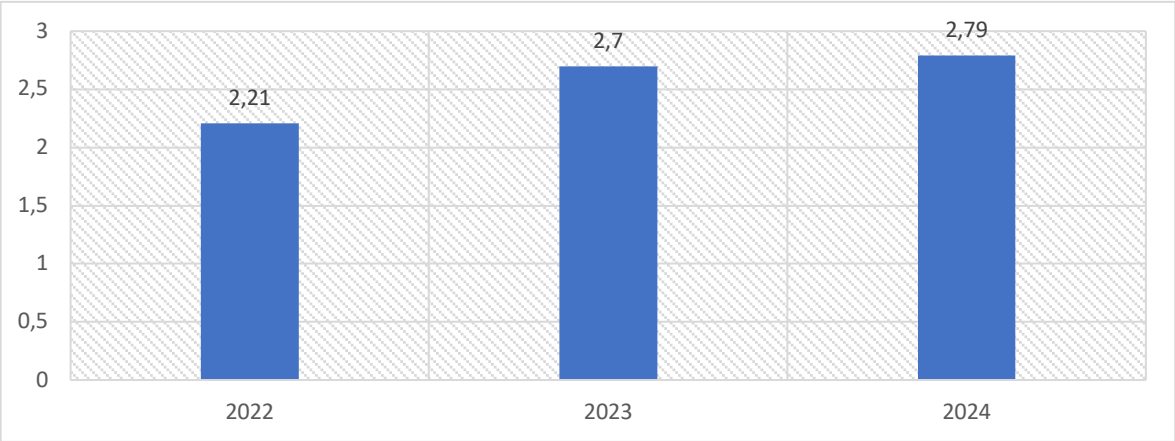
Perkembangan indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 sebesar 48,62 masuk kategori Kurang, meningkat pada tahun 2022 menjadi 52,74 masuk dalam

kategori Cukup (Memadai), selanjutnya kembali meningkat hingga tahun 2024 menjadi 64,82 masuk kategori Baik. Hal ini menunjukkan Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu melakukan perbaikan khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

2.1.4.1.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik

Pada tahun 2021 lalu Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksa) Kabupaten Bengkalis telah menyusun arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE. Adapun arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE memiliki tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan publik, mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pada tahun 2022 Indeks SPBE Kabupaten Bengkalis sebesar 2,21, meningkat hingga tahun 2024 menjadi 2,79 masuk kategori Baik.



Sumber: KEMENPANRB, 2025

Gambar II.72 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 – 2024

2.1.4.1.4 Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik khususnya dilingkungan pemerintah daerah berdasarkan 6 aspek yaitu

kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan.

Indeks pelayanan publik wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Berikut disajikan data Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis, yaitu:

Tabel II.47 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2024

Indeks	Nilai	Kategori
2022	3,74	B- (Baik(dengan catatan))
2023	3,81	B (Baik)
2024	4,39	A- (Sangat Baik)

Sumber: KEMENPANRB, 2024

Pada tahun 2022 nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis sebesar 3,74 atau dengan kategori Baik (dengan catatan). Pada tahun 2023 meningkat menjadi 3,81 dengan kategori baik. Pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 4,39 dengan kategori Sangat Baik.

2.1.4.1.5 Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan instrumen pengukuran yang dikembangkan untuk menilai tingkat integritas serta efektivitas tata kelola pemerintahan di berbagai instansi dan wilayah. Indeks ini dibentuk dari tiga komponen utama, yaitu Indeks Internal, Indeks Eksternal, dan Indeks Eksper. Penilaian internal mencerminkan persepsi dan pengalaman pegawai terhadap praktik integritas di lingkungan instansinya, eksternal berasal dari masyarakat pengguna layanan, sementara penilaian eksper diberikan oleh kalangan profesional atau ahli yang menilai objektivitas sistem tata kelola instansi.

Untuk mengukur indeks integritas nasional, dilakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang merupakan upaya untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD peserta SPI 2024. Sehingga tujuan dari SPI adalah menyediakan ukuran dampak upaya perbaikan/pencegahan korupsi yang telah dilakukan serta berbagai risiko korupsi di instansi. Berdasarkan hasil ukuran tersebut, KPK kemudian menjadikan hasil pemetaan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Selanjutnya, seluruh K/L/PD peserta SPI 2024 menyusun rencana aksi yang sesuai dengan karakteristik.

Penilaian internal terdiri atas tujuh dimensi, yaitu transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan sumber daya manusia (SDM), serta sosialisasi antikorupsi. Ketujuh dimensi ini terbentuk dari 43 variabel yang mencakup antara lain ketersediaan informasi, keteladanan pimpinan, konflik kepentingan,

praktik nepotisme, penyelewengan anggaran dan jabatan, serta efektivitas sosialisasi antikorupsi. Penilaian eksternal mencakup tiga indikator utama dengan 12 variabel, yaitu transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, serta integritas pegawai, yang menilai persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik dan tindakan antikorupsi. Sementara itu, penilaian eksper disusun dari 12 variabel yang mencakup aspek transparansi, keberpihakan pada kepentingan umum, kepatuhan terhadap prosedur, serta risiko penyalahgunaan wewenang dan praktik suap.

Tabel II.48 Indeks Integritas Nasional Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

No	Kabupaten	Indeks Internal	Indeks Eksternal	Indeks Eksper	Indeks Integritas
1	Kuantan Singingi	71,54	83,16	57,68	63,12
2	Indragiri Hulu	71,67	83,18	72,9	69,51
3	Indragiri Hilir	74,89	88,51	74,61	75,41
4	Pelalawan	69,67	88,25	74,01	72,13
5	Siak	72,53	87,37	72,36	71,5
6	Kampar	72,54	83,01	72,52	72,09
7	Rokan Hulu	73,8	88,16	76,16	73,81
8	Bengkalis	73,55	90,04	64,25	71,19
9	Rokan Hilir	67,79	87,11	72,05	71,52
10	Kepulauan Meranti	72,49	87,85	68,49	69,36
11	Pekanbaru	69,79	83,74	61,52	68,09
12	Dumai	74,69	87,96	71,21	75,18
Riau		**70,41**	**88,93**	**55,72**	**62,83**
Nasional		**72,34**	**86,44**	**69,68**	**71,53**

Sumber: KPK, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran, Indeks Integritas Kabupaten Bengkalis tercatat sebesar 71,19, yang menempatkan wilayah ini dalam kategori Rentan, menurut klasifikasi indeks SPI (Survei Penilaian Integritas) dengan rentang nilai <73 (Rentan), 73–77 (Waspada), dan 78–100 (Terjaga). Meski berada di atas rata-rata Provinsi, capaian ini masih di bawah rata-rata nasional. Komposisi indeks menunjukkan bahwa Indeks Eksternal mendominasi dengan nilai tinggi sebesar 90,04, yang mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang cukup baik terhadap pelayanan pemerintah. Sementara itu, Indeks Internal tercatat sebesar 73,55, dan Indeks Eksper hanya 64,25, menandakan adanya tantangan dalam penguatan sistem internal dan persepsi ahli terhadap integritas tata kelola pemerintahan daerah.

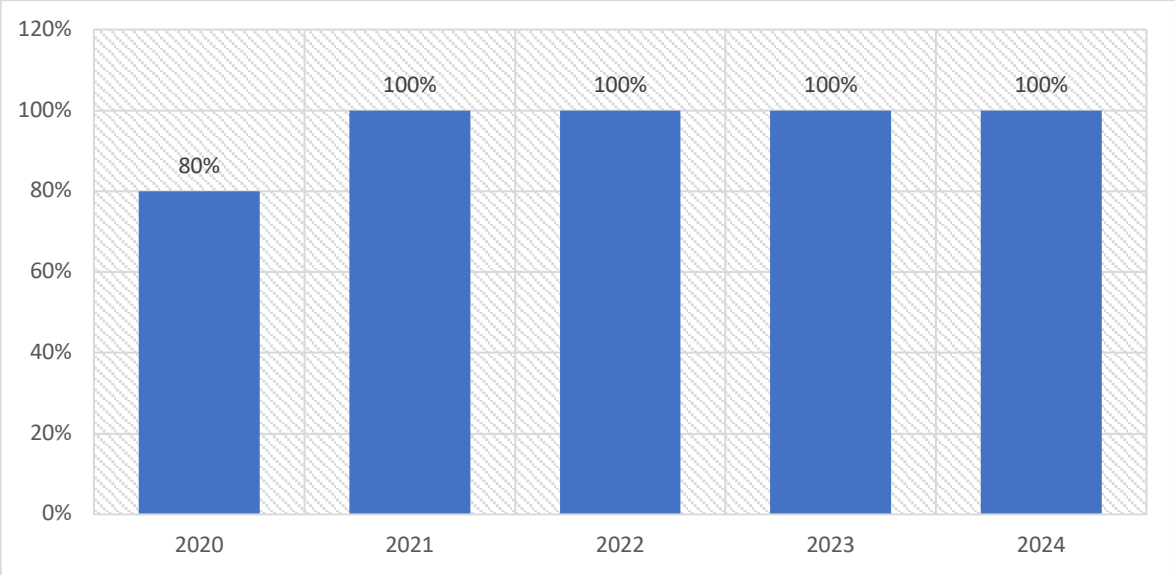
Capaian ini mencerminkan adanya ketimpangan antara persepsi masyarakat dan penilaian objektif terhadap integritas institusi. Hal ini menjadi indikasi bahwa meskipun pelayanan publik telah dirasakan baik oleh masyarakat, masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan internal, pengendalian praktik KKN, serta belum optimalnya pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sebagai respon, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan sejumlah langkah strategis, seperti penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan antikorupsi, digitalisasi layanan, serta pengembangan saluran pengaduan masyarakat yang responsif. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperbaiki penilaian internal dan eksper secara bertahap,

serta menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mencapai 100% penegakan Peraturan Daerah (Perda) selama periode 2021–2024 tidak terlepas dari peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan regulasi daerah. Satpol PP secara konsisten menjalankan berbagai strategi penegakan, termasuk peningkatan kapasitas personel, intensifikasi patroli pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.



Sumber: Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.73 Persentase Penegakan Perda Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Satpol PP Bengkalis juga aktif melakukan sosialisasi Perda kepada masyarakat, termasuk kepada pelaku usaha, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran Perda dan menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi seluruh warga.

Dengan pendekatan yang komprehensif, meliputi penegakan hukum, patroli rutin, dan sosialisasi, Satpol PP Kabupaten Bengkalis berhasil meningkatkan efektivitas penegakan Perda. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta menciptakan masyarakat yang tertib dan sejahtera.

2.1.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu dan dijamin oleh negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan HAM diatur melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021. RANHAM bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah, dengan fokus pada kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan aksi HAM melalui berbagai kebijakan strategis selama periode 2021–2024. Salah satu capaian penting adalah diraihnya penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM pada tahun 2024, yang diserahkan bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024. Penghargaan ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: MHA-01.HA.02.01.01 Tahun 2024, yang menetapkan kabupaten/kota dengan kriteria peduli HAM tahun 2023 .

Capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai kebijakan strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Beberapa langkah konkret yang telah diambil antara lain:

- Peningkatan Akses Layanan Kesehatan: Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan jaminan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar atas kesehatan.
- Penyelesaian Sengketa Lahan: Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait sengketa lahan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memediasi dan mencari solusi atas konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan .
- Sosialisasi dan Edukasi HAM: Melalui berbagai forum dan kegiatan, pemerintah daerah aktif menyosialisasikan pentingnya penghormatan dan perlindungan HAM kepada masyarakat, guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga hak-hak dasar.

Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam tata kelola pemerintahan daerah, serta memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap HAM, tetapi juga menjadi landasan kuat dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial

2.1.4.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah. IDI merupakan komposit dari tiga aspek antara lain aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kelembagaan demokrasi. Indeks ini merupakan acuan baru yang belum diukur di tingkat Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, sebagai gambaran terdekat mengenai IDI ini diambil data dari Provinsi Riau.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau pada tahun 2021 tercatat 75,66 turun pada tahun 2022 menjadi 73,64 dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 775,55.

Jika diperhatikan menurut komponen penyusunnya, nilai aspek kebebasan IDI di Provinsi Riau berada di peringkat paling tinggi dibandingkan dengan aspek lainnya. Berikut adalah IDI Provinsi Riau menurut indikator Tahun 2021-2023, yaitu:

Tabel II.49 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau menurut Indikator Tahun 2021-2023

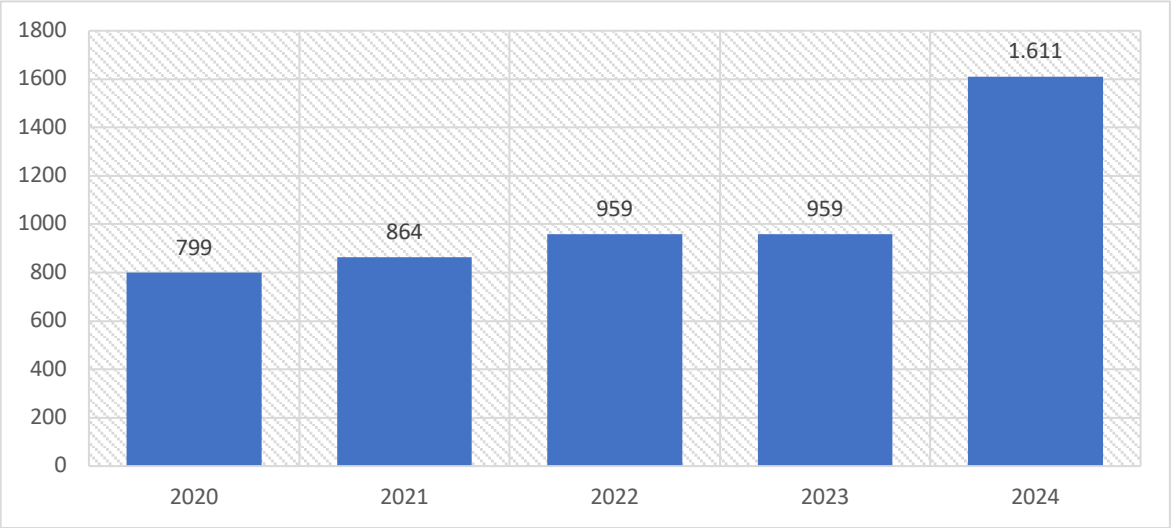
Komponen IDI	2021	2022	2023
I. Kebebasan	**88,4**	**84,46**	**79,39**
I.1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	95,53	95,59	95,67
I.2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	100	88,98	89,19
I.3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100	77,97	63,95
I.4 Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	76,92	76,92	76,92
I.5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	91,76	91,76	91,76
I.6. Pemenuhan hak-hak pekerja	74,77	79,03	64,83
I.7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	76,42	82,01	74,79
II. Kesetaraan	**75,88**	**70,53**	**80,13**
II.1. Kesetaraan Gender	93,09	93,84	95,33
II.2. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100	46,15	100
II.3. Anti monopoli sumber daya ekonomi	59,33	60,83	63,17
II.4. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	54,7	56,24	65,34
II.5. Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	95,58	95,63	95,77
II.6. Akses masyarakat terhadap informasi publik	75,22	79,59	84,87
II.7. Kesetaraan dalam pelayanan dasar	72,92	72,8	72,64
III. Kapasitas Lembaga Demokrasi	**62,83**	**66,69**	**66,3**
III.1. Kinerja Lembaga Legislatif	14,29	33,33	31,82
III.2. Kinerja Lembaga Yudikatif	88,9	85,04	87,55
III.3. Netralitas Penyelenggara Pemilu	30,77	30,77	30,77
III.4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	-	23,08	7,69
III.5. Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	70,72	72,1	70,42
III.6. Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100	100	100
III.7. Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	73,6	74,2	80,8
III.8. Pendidikan Politik pada kader partai politik	100	100	100
IDI Komposit	**75,66**	**73,64**	**75,55**

Sumber: BPS Riau, 2024

2.1.4.2.4 Rasa Aman

Rasa aman merupakan indikator yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap tingkat keamanan dan ketertiban di wilayahnya, yang secara langsung berkaitan dengan tingkat kriminalitas. Semakin rendah angka kriminalitas, semakin tinggi rasa aman yang dirasakan masyarakat, sehingga indeks ini menjadi tolok ukur penting dalam

mengevaluasi keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam menekan tindak kejahatan dan menjaga stabilitas sosial.. Berikut ini adalah angka kriminalitas yang ditangani oleh Polres Bengkalis dari kurun waktu 2020-2024.



Sumber: BPS Riau, 2025

Tabel II.50 Angka Kriminalitas yang Tercatat di Kebupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir trend kasus kriminalitas yang dilaporkan ke Polres Bengkalis meningkat. Pada tahun 2020 sebanyak 799 kasus kejahatan yang dilaporkan, terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 1.611 kasus kejahatan yang dilaporkan.

Tabel II.51 Rasio Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Bengkalis 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	799	864	959	959	1.611
Jumlah Penduduk	593.397	606.179	646.715	658.846	681.884
Rasio Kriminalitas Per 10.000 penduduk	13,46	14,25	14,83	14,56	23,63

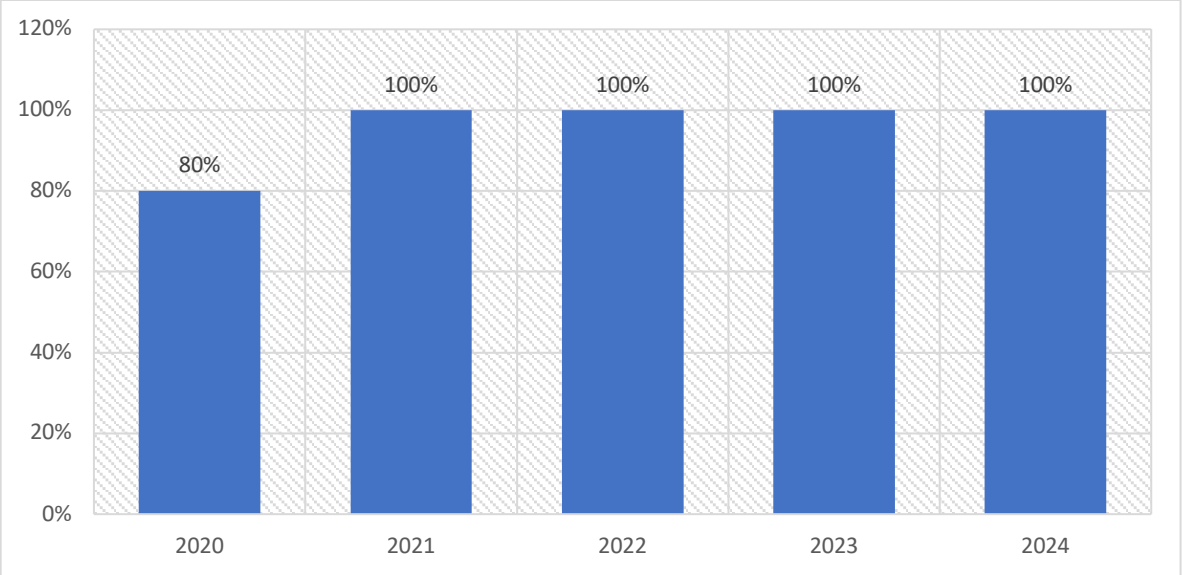
Sumber: Bengkalis dalam Angka, 2025 (diolah)

Secara rasio, tingkat kriminalitas di Kabupaten Bengkalis tampak mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Rasio kriminalitas pada tahun 2020 sebesar 13,56 kasus kejahatan per 10.000 penduduk, naik menjadi 14,83 pada tahun 2022, sedikit turun pada tahun 2023 menjadi 14,56 dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 23,63 kasus kejahatan per 10.000 penduduk. Trend peningkatan rasio kriminalitas sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Adanya kecenderungan peningkatan kasus kriminal, jika tidak segera ditangani, berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan wilayah serta dapat menghambat kelancaran proses pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk meningkatkan upaya preventif dan penegakan peraturan daerah guna menjaga stabilitas dan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.

2.1.4.2.5 Ketenteraman dan Ketertiban

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kondisi dinamis yang mencerminkan situasi aman, tertib, dan tertangani dari segala bentuk gangguan yang dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Ketenteraman mencakup rasa tenang dan bebas dari ancaman, sementara ketertiban mengacu pada keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Kedua aspek ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks pengukuran kinerja daerah, indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) yang dapat diselesaikan digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu merespons dan menuntaskan berbagai bentuk gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin mencerminkan efektivitas pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, menjamin perlindungan masyarakat, serta mewujudkan ruang publik yang aman dan kondusif.



Sumber: Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.74 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) yang dapat diselesaikan di Kabupaten Bengkalis telah mencapai 100% selama periode 2021–2024. Capaian ini menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah. Indikator ini mengukur jumlah gangguan Trantibum yang berhasil ditangani dibandingkan dengan total gangguan yang terjadi, sehingga menjadi tolok ukur penting dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari sejumlah kebijakan strategis yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Salah satunya adalah penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui peningkatan kapasitas personel, intensifikasi patroli pengawasan, serta respons cepat terhadap laporan gangguan Trantibum. Selain itu, sinergi yang kuat dengan aparat penegak hukum seperti Polres Bengkalis juga

menjadi faktor pendukung utama. Kerja sama ini diperkuat melalui koordinasi rutin dan penempatan personel di wilayah-wilayah strategis.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global. IDSD bersifat teknokratikanalitik karena pengukurannya didasarkan pada data dan fakta yang terukur secara objektif, bukan berdasarkan pada asumsi atau pandangan subjektif.

Adanya IDSD akan membantu pemerintah daerah dalam memahami keunggulan kompetitif wilayahnya sendiri sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan daya saing daerah tersebut. IDSD menjadi penting karena era globalisasi yang makin memperketat persaingan antardaerah dan antarnegara. Persaingan yang makin ketat dan mengglobal memosisikan daerah untuk mengoptimalkan seluruh potensinya dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. IDSD menjadi alat penting yang mampu memonitor dan mengevaluasi upaya pengoptimalan potensi tersebut secara komprehensif.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan IDSD tidak hanya untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai, tetapi juga untuk mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan itu sendiri. Singkatnya, dengan menggunakan IDSD sebagai rujukan, pemerintah daerah dapat memperbaiki kekurangan dan pada saat yang bersamaan, memperkuat keunggulan daya saing wilayahnya.

IDSD dibentuk berdasarkan 12 pilar daya saing wilayah yang diturunkan dari *Global Competitiveness Index*. Masing-masing pilar kemudian diukur dengan sejumlah indikator, yaitu infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, akses ke pasar, kondisi perekonomian, dan sebagainya. Penghitungan skor IDSD dilakukan dengan melakukan standardisasi data dari seluruh indikator tersebut yang kemudian dikompositkan dengan menggunakan rata-rata aritmetika. Berikut disajikan indeks daya saing daerah Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau, yaitu:

Tabel II.52 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2024

Dimensi	Pilar	Indikator	2022	2023	2024
Dimensi Lingkungan Pendukung	Pilar 1	Institusi	4,09	4,28	4,46
	Pilar 2	Infrastruktur	2,68	2,28	3,59
	Pilar 3	Adopsi TIK	3,05	4,03	4,23
	Pilar 4	Stabilitas Ekonomi Makro	3,32	2,88	3,8
Dimensi SDM	Pilar 5	Kesehatan	3,92	3,96	3,9
	Pilar 6	Keterampilan	3,46	3,75	3,72
Dimensi Pasar	Pilar 7	Pasar Produk	0,67	0,61	2,17
	Pilar 8	Pasar Tenaga Kerja	2,82	3,41	3,09
	Pilar 9	Sistem Keuangan	2,52	0,90	1,46

Dimensi	Pilar	Indikator	2022	2023	2024
	Pilar 10	Ukuran Pasar	4,87	5,00	5
Dimensi Ekosistem Inovasi	Pilar 11	Dinamika Bisnis	5,00	2,12	3,28
	Pilar 12	Kapabilitas Inovasi	1,29	1,85	1,95
Skor IDSD Bengkalis			**3,14**	**2,92**	**3,39**
Skor IDSD Riau			**3,16**	**3,25**	**3,35**

Sumber: Badan Riset Nasional, 2025

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 sebesar 3,14, turun pada tahun 2023 menjadi 2,92 dan kembali meningkat menjadi 3,39 pada tahun 2024. Capaian IDSD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 berada diatas rata-rata capaian Provinsi yaitu 3,35. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang kontribusinya masih tergolong rendah terhadap indeks secara keseluruhan, di antaranya adalah sistem keuangan, kapabilitas inovasi, pasar produk, dan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya melakukan intervensi strategis yang terarah dan berkelanjutan pada beberapa indikator tersebut guna memperkuat daya saing daerah secara menyeluruh serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.4.4.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

2.1.4.4.1.1 Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sehingga Pemerintah minimal harus mengalokasikan dana 20% dari APBD untuk pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan pendidikan dapat dinilai dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah ukuran partisipasi penduduk dalam mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidian ditempuh tanpa melihat batas usia sekolah yang diharuskan. Perkembangan APK pada jenjang pendidikan SD/MI selama periode 2020-2024 sudah sangat baik dengan capaian lebih dari 100%. Namun untuk tingkat pendidikan nilai APK pada jenjang pendidikan SMP masih terdapat anak usia sekolah SMP yang tidak bersekolah. Hal ini terlihat dari APK SMP/MTs pada tahun 2020 sebesar 97,41, turun pada tahun 2021 menjadi 96,67, kembali meningkat hingga tahun 2023 menjadi 98,22 dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 93,09. Sementara itu, pada

jenjang pendidikan SMA sederajat, APK belum mencapai 100%, namun terus meningkat dari 79,38 pada tahun 2020 menjadi 93,13 pada tahun 2024.

Tabel II.53 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	APK SD/MI	106,72	107,45	108,09	107,49	103,01
2.	APK SMP/MTs	97,41	96,67	97,03	98,22	93,09
3.	APK SMA/MA/SMK	79,38	77,45	78,69	81,14	93,13

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Beberapa alasan APK SMP/MTs belum mencapai 100% adalah ketersediaan jumlah sekolah yang masih kurang untuk menampung penduduk usia sekolah SMP untuk bersekolah, masih terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP, angka putus sekolah, penyebaran sekolah SMP/MTs yang tidak merata sehingga sebagian anak kesulitan untuk menjangkau sekolah, alasan ekonomi seperti orangtua tidak mampu membiayai sekolah anak atau anak harus berkerja membantu orang tua mencari nafkah. Pada beberapa daerah seperti di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara, akses menuju sekolah sangat jauh, memakan waktu yang lama dan juga biaya yang besar. Pengorbanan cukup besar yang dibutuhkan oleh beberapa masyarakat di wilayah pedalaman, membuat angka partisipasi sekolah menjadi kurang dari 100%.

Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang banyak pulau menjadi kendala dalam pemerataan pendidikan. Penyebaran sarana pendidikan menjadi penting dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin kurang merata penyebarannya di Kabupaten Bengkalis, sehingga anak usia sekolah yang ada di pulau-pulau dan daerah terpencil dihadapkan pada keterbatasan akses pendidikan lanjutan.

Namun demikian, Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkat partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan, seperti pemberian dukungan peningkatan akses menuju sekolah, kepastian usia sekolah untuk dapat bersekolah dari pemerintah melalui pemberian bantuan pendidikan/beasiswa serta kebijakan daerah yang menyelenggarakan pendidikan hingga 12 tahun.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APM digunakan sebagai indikator yang mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Hal ini karena APM mengindikasikan partisipasi sekolah yang tepat waktu, yaitu jenjang SD/sederajat (7-12 tahun), SMP/sederajat (13-15 tahun), dan SM/sederajat (16-18 tahun). APM menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Oleh karena itu, nilai APM kurang dari atau sama dengan nilai APK karena APK ikut memperhitungkan anak yang berusia di luar rentang pada jenjang pendidikan yang

bersangkutan. Sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang sesuai. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar perbedaan nilai antara APK dan APM. Artinya, partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar lebih cenderung tepat waktu dibandingkan jenjang pendidikan menengah.

Tabel II.54 Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	APM SD/MI	98,06	98,29	97,97	99,15	98,35
2.	APM SMP/MTs	86,5	87,31	87,79	84,75	85,92
3.	APM SMA/MA/SMK	66,97	67,05	67,22	65,28	69,99

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Secara umum, angka partisipasi murni pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. APM pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan nilai APM pada tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2024 nilai APM SD/MI turun menjadi 98,35 dibanding tahun 2023 yaitu 99,15. Hal tersebut menunjukkan adanya sedikit penurunan pada persentase penduduk yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan SD/MI.

Sementara itu APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs sedikit meningkat dari 84,75 pada tahun 2023 menjadi 85,92 diikuti oleh APM SMAMA/SMK yang meningkat dari 65,28 pada tahun 2023 menjadi 69,99 pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada persentase penduduk yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024.

Nilai APM yang belum mencapai 100 disebabkan oleh perkembangan pertumbuhan peserta didik pada semua jenjang pendidikan belum sepenuhnya tertampung pada semua jenjang pendidikan pada semua wilayah di Kabupaten Bengkalis, sehingga menyebkan masih terdapat peserta didik yang terlambat bersekolah. Untuk itu, pemerataan fasilitas pendidikan di semua daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan angka partisipasi murni di Kabupaten Bengkalis. Selain pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan transportasi dan ekonomi juga dapat memperlancar akses penduduk usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut untuk 1000 penduduk. Indikator ini juga menggambarkan seberapa besar kesempatan individu memperoleh pendidikan pada suatu wilayah.

Tabel II.55 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	APS PAUD	65,43	35,92	59,16	63,48	77,50
2.	APS SD/MI/Paket A	99,66	90,87	91,35	100,17	98,52

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
3.	APS SMP/MTs/Paket B	94,56	87,41	76,94	86,81	83,22

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Perkembangan APS pada jenjang pendidikan PAUD mengalami penurunan dari 65,43 pada tahun 2020 menjadi 35,92 pada tahun 2021, kembali meningkat hingga tahun 2024 menjadi 77,50. Artinya, dari setiap 1.000 penduduk usia 5-6 tahun, sebanyak 775 orang bersekolah di PAUD, atau setara dengan 77,50% dari total penduduk dalam kelompok usia tersebut. Adapun perkembangan APS pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A mengalami penurunan dari 99,66 pada tahun 2020 menjadi 97,80 pada tahun 2021, kembali meningkat hingga tahun 2023 menjadi 100,17, namun sedikit turun menjadi 98,52 pada tahun 2024. Artinya, dari setiap 1.000 penduduk usia 7-12 tahun, sebanyak 985 orang bersekolah di SD/MI/Paket A, atau setara dengan 98,52% dari total penduduk dalam kelompok usia tersebut. Sementara itu APS pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B mengalami fluktuasi menurun dari 94,56 pada tahun 2020 menjadi 76,94 pada tahun 2022, kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 86,81 dan kembali turun menjadi 83,22 pada tahun 2024. Artinya, dari setiap 1.000 penduduk usia 13-15 tahun, sebanyak 832 orang bersekolah di SMP/MTs/Paket B, atau setara dengan 83,22% dari total penduduk dalam kelompok usia tersebut.

Trend penurunan APS di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa faktor ekonomi berperan dalam keputusan peserta didik, terutama pada usia 13-15 tahun, untuk melanjutkan sekolah atau berhenti demi bekerja. Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan pendidikan harus berfokus pada perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan keberlanjutan upaya peningkatan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung partisipasi pendidikan yang lebih baik.

4. Angka Kelulusan

Indikator lain dari urusan pendidikan di Kabupaten Bengkalis adalah perkembangan angka kelulusan di Kabupaten Bengkalis. Indikator ini menggambarkan sejauh mana siswa di Kabupaten Bengkalis dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu.

Tabel II.56 Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2025

Angka Kelulusan di Kabupaten Bengkalis sudah mencapai 100% untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2020-2024. Hal ini sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai dan juga sesuai dengan standar penilaian minimal Dinas Pendidikan. Secara umum hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkalis sudah baik.

Namun demikian tingkat melanjutkan pendidikan perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan lanjutan, yaitu sekolah menengah atas dan perguruan tinggi.

5. Sekolah

Berdasarkan data jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Bengkalis tahun 2024, terlihat bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan masih belum merata antar kecamatan. Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, dan Bengkalis memiliki jumlah sekolah yang relatif lebih banyak, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga menjadi pusat konsentrasi layanan pendidikan. Sebaliknya, beberapa kecamatan seperti Rupat Utara, Bandar Laksamana, dan Talang Muandau masih memiliki jumlah sekolah yang terbatas, khususnya pada jenjang SMP dan MTs, yang berpotensi memengaruhi aksesibilitas layanan pendidikan bagi masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis memandang hal ini sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan pendidikan, dengan berkomitmen untuk memperkuat pemerataan sarana dan prasarana sekolah di seluruh wilayah, sehingga kualitas layanan pendidikan dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh peserta didik. Berikut disajikan data jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan dan kecamatan di Kabupaten Bengkalis tahun 2024, yaitu:

Tabel II.57 Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenjang Pendidikan					
		TK	RA*	SD	MI*	SMP	MTS*
1	Mandau	48	15	66	7	23	3
2	Pinggir	36	5	28	5	17	5
3	Bathin Solapan	28	8	45	8	13	11
4	Talang Muandau	13	1	20	1	7	5
5	Bukit Batu	8		21		7	1
6	Siak Kecil	8	1	22		7	2
7	Bandar Laksamana	8	1	14		4	2
8	Rupat	15		40		12	6
9	Rupat Utara	3		14	1	5	1
10	Bengkalis	23	5	62		19	9
11	Bantan	23	6	33	4	8	9
Kabupaten Bengkalis		213	42	365	26	122	54

Sumber: BPS Bengkalis, 2025
*Ket: *data 2023*

6. Angka Melanjutkan Studi

Indikator selanjutnya adalah angka melanjutkan studi yang menggambarkan seberapa banyak siswa pada jenjang pendidikan tertentu bisa melanjutkan pendidikannya menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Secara umum dapat dilihat bahwa tingkat melanjutkan pendidikan di Kabupaten Bengkalis belum mencapai 100%, artinya belum seluruh siswa yang lulus dari pendidikan sekolah dasar sederajat dapat melanjutkan

pendidikan pada tingkat SMP sederajat. Jumlah angka melanjutkan studi di Kabupaten Bengkalis untuk jenjang SMP/MTS terus mengalami penurunan hingga tahun 2023. Namun pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 90,81%.

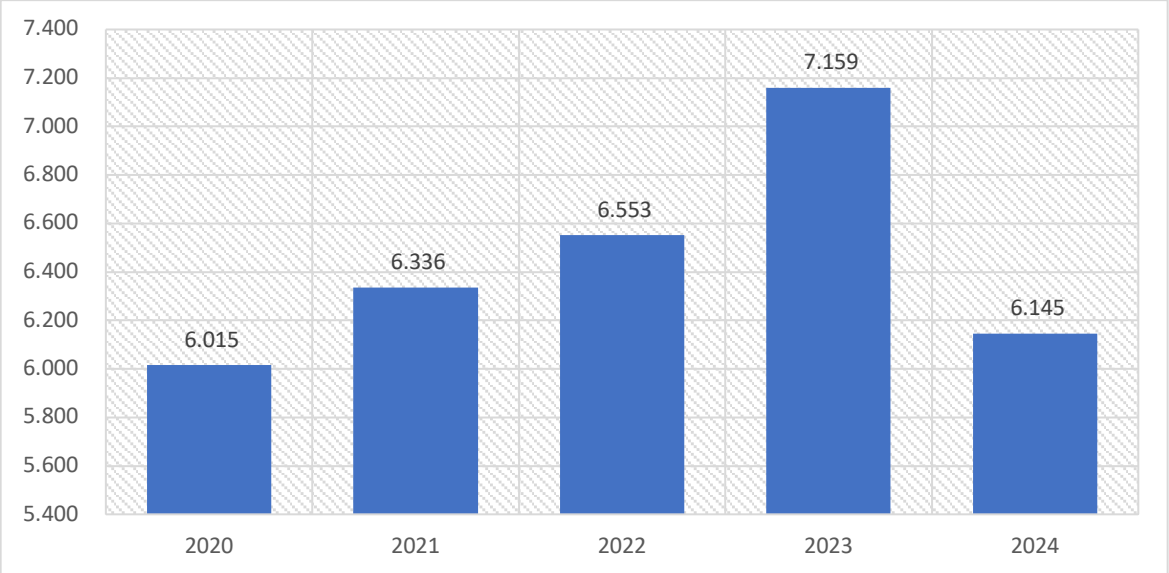
Tabel II.58 Perkembangan Angka Melanjutkan Studi Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Siswa Baru Tingkat I pada Jenjang SMP/MTs	11.598	11.598	11.935	9.357	11.622
2	Jumlah Kelulusan pada Jenjang SD/MI Tahun Ajaran Sebelumnya	12.240	11.964	13.619	12.120	12.798
3	Angka Melanjutkan Studi SMP/MTs	94,75	96,94	87,63	77,20	90,81

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2025

7. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualitas guru saat ini dipandang sesuatu hal yang sangat penting karena seorang guru memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya sebagai pendidik guru juga turut serta dalam menghasilkan lulusan peserta didik yang berkualitas dan bermutu. Sehingga guru diharuskan memiliki sertifikasi pendidikan minimal S1/D-IV, adapun perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bengkalis, 2025

Gambar II.75 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Gambar diatas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan S1/D-IV yang dimiliki guru cenderung meningkat setiap tahunnya, dimana peningkatan paling tinggi jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV terjadi peningkatan dari 6.015 pada tahun 2020, menjadi 7.159 pada tahun 2023, namun kembali turun pada tahun 2024 menjadi 6.145.

8. Rasio Guru/Murid Sekolah

Rasio guru dan murid sekolah menggambarkan bagaimana beban kerja guru dalam mengajar, melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin berkurang tinggkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid di kelas.

Tabel II.59 Rasio Guru-Murid Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

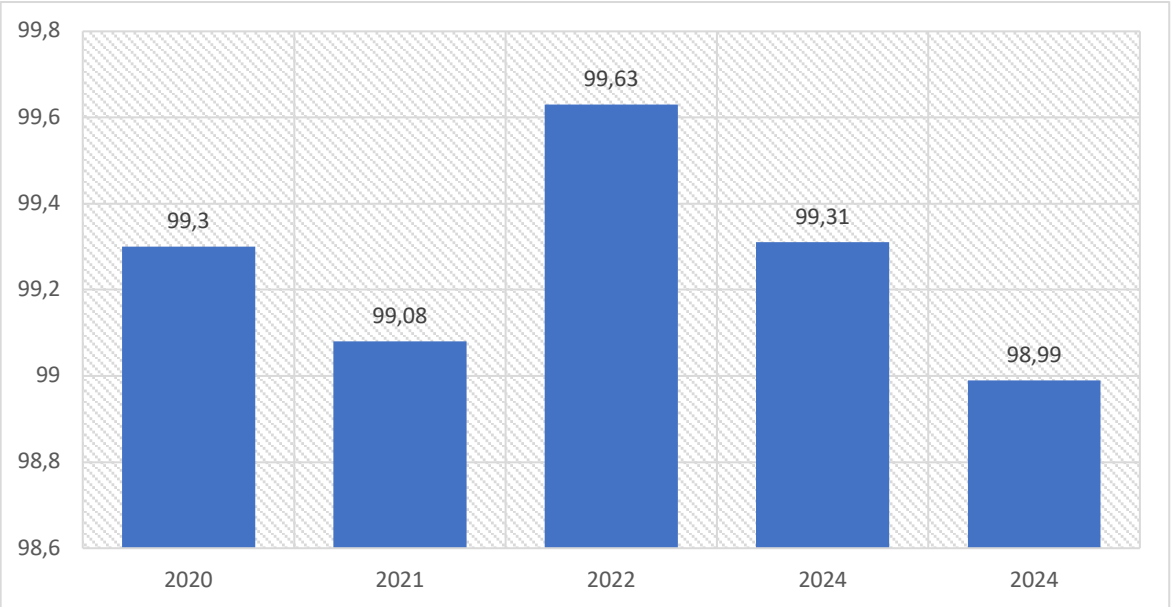
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Murid SD/MI	81.090	79.359	79.346	74.741	73.975
2	Jumlah Guru	5.432	5.274	5.393	4.973	4.727
3	Rasio per 10.000	670	665	680	665	639
4	Jumlah Murid SMP/MTS	35.864	35.487	35.124	35.241	28.350
5	Jumlah Guru SMP/MTS	2.941	2.870	3.015	3.043	2.052
6	Rasio per 10.000	820	809	858	863	724
7	Jumlah Murid SMA/SMK/MA	35.569	32.197	31.340	27.825	29.510
8	Jumlah Guru SMA/SMK/MA	2.748	2.636	2.815	2.115	2.185
9	Rasio per 10.000	773	819	898	760	740

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2025 (Diolah)

Perkembangan rasio-guru murid pada jenjang pendidikan SD/MI menunjukkan trend fluktuasi menurun dari 670 pada tahun 2020 menjadi 639 pada tahun 2024. Sama halnya dengan rasio Guru/Murid pada jenjang pendidikan SMP/MTS juga menunjukkan trend fluktuasi menurun dari 820 pada tahun 2020 menjadi 724 pada tahun 2024. Hal yang sama juga terjadi pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dari 773 pada tahun 2020 menjadi 740 pada tahun 2024. Kondisi ini disebabkan terjadinya penurunan jumlah peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan yang menyebabkan berkurangnya beban guru di Kabupaten Bengkalis.

9. Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahu ke Atas

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk dalam fase usia produktif dan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Salah satu faktor penting yang harus dimiliki penduduk pada fase ini adalah kemampuan membaca atau melek huruf.



Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.76 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Angka melek huruf penduduk 15 tahun pada tahun 2020 sebesar 99,3, turun menjadi 99,08 pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 99,63, namun kembali turun hingga tahun 2024 menjadi 98,99. Penduduk yang tidak melek huruf ini kebanyakan adalah penduduk lanjut usia dan penduduk yang tinggal di pedesaan. Faktor usia dan kondisi pedesaan menjadi faktor penghambat penduduk usia lanjut sebagian masih belum melek huruf. Hal ini pula yang menyebabkan capaian angka melek huruf >15 belum mampu mencapai 100%.

10. Capain Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan

Amanat Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Selaras SPM Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, maka Pemerintah daerah Kabupaten Kabupaten Bengkalis dalam penerapan SPM memprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan.

Tabel II.60 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Pendidikan Dasar Usia Dini	100%	94,22%
2	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Pendidikan Dasar	100%	96,79%
3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Pendidikan Kesetaraan	100%	94,97%
Capaian SPM Urusan Pendidikan				95,33%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2025

Untuk capaian indikator pada tahun 2024, tercapai 95,33% dan atau kategori indeks pencapaian SPM nya TUNTAS UTAMA. Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Untuk Pendidikan Anak Usia Dini capaian indikator sebesar 94,22%.
- Untuk Pendidikan Dasar capaian indikator sebesar 96,79%.
  Untuk Pendidikan Kesetaraan capaian indikator sebesar 94,97%.

Tabel II.61 Capaian SPM Pendidikan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2024

Indikator	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan
A.1 Skor Kemampuan Literasi		Baik (72,48)	Baik (77,9)	
A.2 Skor Kemampuan Numerasi		Sedang (69,76)	Baik (73,29)	
B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Kurang (54,03)			
B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15		Tinggi (98,83)		
B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan				Rendah (21,33)
B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Sedang (55,1)			
C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Sedang (58,6)			
D.4 Iklim Keamanan		Baik (75,15)	Baik (72,2)	
D.8 Iklim Kebinekaan		Baik (70,78)	Baik (72,53)	
D.10 Iklim Inklusivitas		Baik (58)	Baik (58,57)	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2025

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 tercatat sebesar 71,68 dengan kategori Tuntas Pratama, yang mencerminkan adanya kemajuan dalam pemenuhan indikator-indikator layanan pendidikan dasar, meskipun masih terdapat beberapa indikator SPM yang perlu diperkuat. Secara umum, indikator pada jenjang SD dan SMP menunjukkan kinerja yang relatif baik, khususnya pada kemampuan literasi, numerasi, serta iklim sekolah yang mendukung keamanan, kebinekaan, dan inklusivitas. Namun demikian, capaian pada jenjang PAUD dan pendidikan kesetaraan masih berada pada kategori sedang hingga rendah, seperti terlihat pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun yang masih tergolong kurang, serta rendahnya partisipasi pada program kesetaraan usia 7–18 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan masih perlu diperkuat, terutama untuk kelompok rentan dan jenjang pendidikan dasar awal. Dengan demikian, capaian menjadi fokus pemerintah sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan, agar arah pembangunan pendidikan ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan angka partisipasi, tetapi juga pada pemerataan mutu layanan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh jenjang pendidikan.

2.1.4.4.1.2 Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah

masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.

Perkembangan indikator urusan kesehatan di Kabupaten Bengkalis selama periode 2020-2024 mengalami dinamika yang cukup beragam. Secara umum, perkembangan indikator urusan kesehatan cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan kedepannya.

Salah satu indikator yang perlu mendapatkan perhatian adalah Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, yang mengalami peningkatan dari 4 pada tahun 2020 menjadi 6,93 pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah kasus kematian bayi, dari 42 kasus pada tahun 2020 menjadi 69 kasus pada tahun 2024. Indikator lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup, yang naik dari 3,6 pada tahun 2020 menjadi 6,53 pada tahun 2024. Selain itu, cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi mengalami sedikit fluktuasi, dengan persentase yang menurun dari 80,50% pada tahun 2020 menjadi 78,12% pada tahun 2024. Persentase anak usia 1 tahun yang menerima imunisasi campak juga menunjukkan penurunan, dari 100% pada tahun 2020 menjadi 65% pada tahun 2024. Sementara itu, cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) menunjukkan peningkatan selama periode 2020-2023, namun sedikit turun pada tahun 2024 menjadi 65%. Selain itu, tingkat prevalensi TBC per 100.000 penduduk mengalami kenaikan dari 100 pada tahun 2022 menjadi 208 pada tahun 2024.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terpadu dari seluruh stakeholders terkait untuk mengatasi permasalahan urusan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis. Berikut adalah perkembangan indikator kinerja kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024, yaitu:

Tabel II.62 Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4	4,6	6	6,14	6,93
2	Jumlah Kematian bayi	42	51	60	60	69
3	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	201	189	102	102,38	50,23
4	Jumlah Kematian Ibu	21	20	10	10	5
5	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K6	na	na	62	79,9	85,2
6	Cakupan Pelayanan Nifas	75%	86,50%	75,00%	75,03%	81,40%
7	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	14%	11,16%	3,50%	3%	100%
8	Angka Kelangsungan Hidup	1-4,0	na	na	1-4,0	1-0,4
9	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	4,1	5,1	6,1	5,4	7,1
10	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	3,6	4,7	5,7	5,7	6,53
11	Rasio Posyandu Per 100 Balita	1,1	0,89	0,89	0,89	0,94
12	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
13	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
14	Rasio Dokter per 1000 penduduk	0,67	0,51	0,50	0,53	0,68
15	Rasio Tenaga Medis Per 1000 Penduduk	0,67	na	na	0,49	0,71
16	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	61,30%	71,40%	73,01%	73,01%	71,08%
17	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	79%	92,40%	82,20%	79,10%	79,60%
18	Persentase Persalinan di fasilitas kesehatan	76,1	90,10%	80,4	82,81%	86,90%
19	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan	49%	96%	98%	92,50%	119,44
20	Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi	80,50%	82%	81,78%	85,43%	78,12%
21	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	69%	78%	80,65	80,65	67,74
22	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
23	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak	100%	81,50%	82,80%	85,43%	65%
24	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	0	0	0	0	0
25	Cakupan Balita Pneumonia yang di Tangani	100%	100%	100%	100%	100%
26	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	28%	40,40%	61,18%	68%	71,40%
27	Tingkat Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	121	115	100	191	208
28	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	2	2,7	3,3	2,9	2,2
29	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS	47,80%	40,40%	61,18%	68%	96,40%
30	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	12%	90,08%	90,03%	68,06%	0%
31	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100
32	Penderita Diare yang di Tangani	10%	88,60%	12,69%	12,69%	64,84
33	Jumlah Kejadian Malaria	11	0	3	4	8
34	Tingkat Kematian Akibat Malaria	0	0	0	0	0
35	Proporsi Anak Balita dengan Demam yang diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat	100%	100%	100%	100%	100%
36	Prevalensi HIV/AIDS (%) dari Total Populasi	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01
37	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	60%	14,38%	0,17%	11,76%	11,76%
38	Cakupan Kunjungan Bayi	81,60%	97%	87%	81,60%	140,70%
39	Cakupan Puskesmas	86,36%	86,36%	86,36%	86,36%	86,36%
40	Cakupan Pembantu Puskesmas	36%	39%	39%	39%	35%
41	Cakupan Pelayanan Anak Balita	23%	51%	81%	77%	13,30%

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
42	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	5%	5%	5%	5%	13,30%
43	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	40%	na	134,53%	134,53%	95%
44	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	60%	50,87%	31,87%	60,08%	60%
45	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS)	100%	100%	100%	100%	100%
46	Cakupan Desa Siaga Aktif	92,86%	87%	87%	87,01%	87,01%
47	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Kasus kematian bayi di Kabupaten Bengkalis tahun 2024 sebanyak 69, meningkat sebanyak 9 kasus kematian bayi dari tahun 2023. Kasus kematian bayi berumur kurang 1 tahun paling banyak ditemukan di Kecamatan Mandau sebanyak 20 kematian bayi dan Kecamatan Mandau sebanyak 14 kasus kematian bayi. Adapun Kecamatan lainmya tidak memiliki kasus kematian bayi adalah Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rupat Utara.

Tabel II.63 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahriran Hidup Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	2023	2024
1	Bengkalis	13	9
2	Bantan	5	4
3	Bukit Batu	0	0
4	Bandar Laksmana	2	3
5	Siak Kecil	2	3
6	BathinSolapan	8	10
7	Mandau	15	20
8	Pinggir	8	14
9	Talang Muandau	5	1
10	Rupat	1	5
11	Rupat Utara	1	0
Jumlah		60	69
AKB Per 1000 Kelahiran Hidup		6,14	6,93

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Secara total Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup sebesar 6,93 pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 yang berjumlah 6,14, hal ini berarti ada sekitar 6,93 (7 kasus kematian bayi) kematian tiap 1000 bayi lahir hidup di Kabupaten Bengkalis. Jumlah terus diupayakan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkalis agar terus berkurang hingga mencapai 0 dalam tahun-tahun ke depan.

Tabel II.64 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

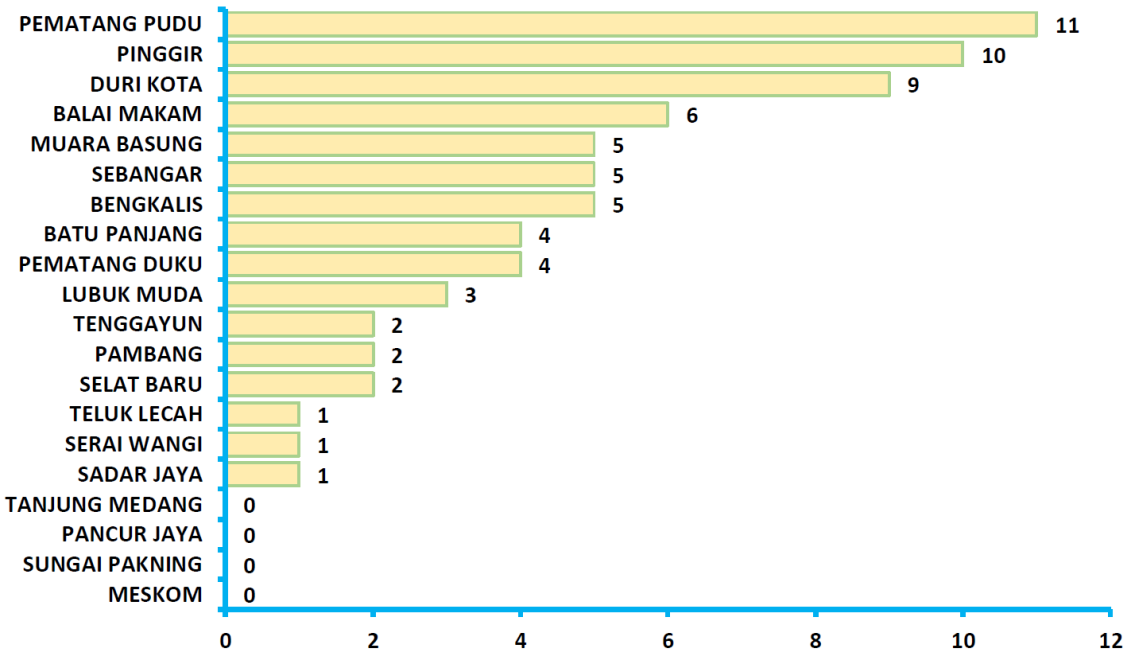
No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kelangsungan Hidup Bayi
1	Bengkalis	1	1.388	0,7	1-0,7
2	Bukit Batu	1	273	3,7	1-3,7
3	Bantan	0	592	0	1-0,0
4	Mandau	1	2.743	0,4	1-0,4
5	Rupat	0	565	0	1-0,0
6	Rupat Utara	0	201	0	1-0,0
7	Siak Kecil	1	303	3,3	1-3,3
8	Pinggir	0	1.568	0	1-0,0
9	Bandar Laksamana	0	292	0	1-0,0
10	Talang Muandau	0	402	0	1-0,0
11	Bathin Solapan	0	1.628	0	1-0,0
12	Kebupaten Bengkalis	4	9.955	0,4	1-0,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2025, angka kelangsungan hidup bayi di berbagai kecamatan menunjukkan kondisi yang relatif baik. Sebagian besar kecamatan mencatat angka kelangsungan hidup bayi mendekati 1, yang berarti hampir semua bayi yang lahir dalam periode tersebut dapat bertahan hidup hingga usia satu tahun. Beberapa kecamatan seperti Bantan, Rupat, Rupat Utara, Pinggir, Bandar Laksamana, Talang Muandau, dan Bathin Solapan memiliki angka kelangsungan hidup bayi sebesar 1-0,0, yang menunjukkan tidak adanya kasus kematian bayi dalam periode tersebut.

Namun, terdapat beberapa kecamatan yang mencatat angka kelangsungan hidup bayi sedikit lebih rendah, seperti Bukit Batu (1-3,7) dan Siak Kecil (1-3,3), yang berarti terdapat beberapa kasus kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Secara keseluruhan, di tingkat Kabupaten Bengkalis, angka kelangsungan hidup bayi berada pada 1-0,4, yang masih menunjukkan tingkat kelangsungan hidup bayi yang cukup tinggi.

Meskipun secara umum angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Bengkalis berada dalam kondisi baik, tetap diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan layanan kesehatan ibu dan bayi. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, imunisasi, serta edukasi bagi ibu hamil dan keluarga menjadi langkah penting untuk memastikan kesehatan bayi tetap optimal di seluruh kecamatan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.77 Jumlah Kematian Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Angka kematian balita (dilaporkan) per-1000 kelahiran hidup di Kabupaten Bengkalis dari tahun 2024 adalah 7,1 per-1000 kelahiran hidup meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun jumlah kematian balita tertinggi berada di Puskesmas Pematang Pudu, Pinggir dan Duri. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan harus lebih ditingkatkan agar dapat menghasilkan kualitas yang optimal, sehingga angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup dapat ditekan serendah mungkin.

Tabel II.65 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	2023	2024
1	Bengkalis	12	8
2	Bantan	3	3
3	Bukit Batu	0	0
4	Bandar Laksmana	2	2
5	Siak Kecil	2	3
6	BathinSolapan	8	10
7	Mandau	15	19
8	Pinggir	8	14
9	Talang Muandau	5	1
10	Rupat	1	5
11	Rupat Utara	0	0
Jumlah		56	65
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup		**5,57**	**6,53**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 berjumlah 6,53, yang berati setiap 1000 kelahiran hidup, terdapat 6,53 bayi yang berumur kurang dari 1 bulan meninggal dunia. Kematian bayi neonatal paling banyak ditemukan di Kecamatan Mandau sebanyak 19 kematian dan Kecamatan Pinggir sebanyak 14 kemtian. Untuk itu, pelayanan kesehatan dan peningkatan kesadaran Ibu hamil dalam pemeriksanaan kehamilan dan perilaku hidup sehat menjadi penting dalam pembangunan kesehatan bayi di Kabupaten Bengkalis.

Tabel II.66 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup dalam kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	2023		2024
		Kelahiran Hidup	Kematian Ibu	
1	Bengkalis	1381	3	0
2	Bantan	606	0	1
3	Bukit Batu	278	0	0
4	Bandar Laksmana	300	0	0
5	Siak Kecil	475	0	0
6	BathinSolapan	1648	2	0
7	Mandau	2393	1	1
8	Pinggir	1274	3	1
9	Talang Muandau	523	0	0
10	Rupat	615	1	1
11	Rupat Utara	274	0	1
Jumlah		9767	10	5
AKI Per 100.000 Kelahiran Hidup			102,38	50,23

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2025

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan dari 10 kasus pada tahun 2023 menjadi 5 kasus pada tahun 2024, yang tersebar di Kecamatan Bantan, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupat, dan Kecamatan Rupat Utara. Sementara itu, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 tercatat sebesar 50,23, yang berarti terdapat sekitar 50 kasus kematian ibu dalam setiap 100.000 kelahiran hidup.

Tabel II.67 Rasio Posyandu per 100 Balita Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Posyandu
1	Bengkalis	Bengkalis	34
2		Meskom	14
3		Pematang Duku	20
4	Bantan	Selat Baru	25
5		Pambang	20
6	Bukit Batu	Sungai Pakning	25
7	Bandar Laksmana	Tenggayun	18
8	Siak Kecil	Lubuk Muda	20
9		Sadar Jaya	15
10	Bathin Solapan	Sebangar	32
11		Balai Makam	35
12	Mandau	Duri Kota	73

No	Kecamatan	Puskesmas	Posyandu
13		Pematang Pudu	19
14	Pinggir	Muara Basung	35
15		Pinggir	30
16	Talang Muandau	Serai Wangi	31
17	Rupat	Batu Panjang	31
18		Teluk Lecah	32
19		Pancur Jaya	0
20	Rupat Utara	Tanjung Medang	20
Kabupaten Bengkalis			**529**
Rasio Posyandu Per 100 Balita			**0,94**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2025

Jumlah posyandu di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, rasio posyandu per 100 balita tercatat sebesar 0,94, yang berarti setiap 100 balita terdapat setidaknya satu posyandu yang beroperasi. Kecamatan Mandau memiliki jumlah posyandu terbanyak, yaitu 92 posyandu, diikuti oleh Kecamatan Bengkalis dengan 68 posyandu pada tahun yang sama.

Tabel II.68 Rasio Tenaga Medis per 1000 Penduduk Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Kecamatan	Tenaga Medis	Jumlah Penduduk	Rasio Tenaga Medis per 1000 Penduduk
Mandau	240	170.071	1,411
Pinggir	25	79.185	0,316
Bathin Solapan	25	118.646	0,211
Talang Muandau	9	33.889	0,266
Bukit Batu	8	23.322	0,343
Siak Kecil	13	28.690	0,453
Bandar Laksamana	13	19.425	0,669
Rupat	14	41.304	0,339
Rupat Utara	5	17.256	0,290
Bengkalis	101	93.316	1,082
Bantan	26	46.621	0,558
Kabupaten Bengkalis	479	671.725	0,713

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Jumlah tenaga medis di suatu daerah berperan penting dalam mendukung kinerja pelayanan kesehatan. Di Kabupaten Bengkalis, terdapat 479 tenaga medis pada tahun 2024. Namun, distribusinya di setiap kecamatan masih belum merata. Kecamatan Mandau memiliki jumlah tenaga medis tertinggi, yaitu 240 tenaga medis, sementara Kecamatan Rupat Utara tercatat memiliki 5 tenaga medis. Perbedaan ini dapat memengaruhi akses dan kualitas pelayanan kesehatan di beberapa wilayah. Oleh karena itu, pemerataan distribusi tenaga medis perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Tabel II.69 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Bumil Dengan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	
			Jumlah	%
1	Bengkalis	Bengkalis	219	89,24
2		Meskom	25	42,73
3		Pematang Duku	39	68,08
4	Bantan	Selat Baru	109	91,07
5		Pambang	53	86,75
6	Bukit Batu	Sungai Pakning	98	109,18
7	Bandar Laksmana	Tenggayun	50	67,08
8	Siak Kecil	Lubuk Muda	64	108,40
9		Sadar Jaya	50	96,60
10	Bathin Solapan	Sebangar	96	52,26
11		Balai Makam	47	17,45
12	Mandau	Duri Kota	146	29,46
13		Pematang Pudu	61	38,51
14	Pinggir	Muara Basung	25	19,11
15		Pinggir	46	26,68
16	Talang Muandau	Serai Wangi	249	191,59
17	Rupat	Batu Panjang	127	169,69
18		Teluk Lecah	35	112,27
19		Pancur Jaya	22	41,55
20	Rupat Utara	Tanjung Medang	53	79,46
Kabupaten Bengkalis			1614	71,08

Sumber: Diolah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2024, cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten Bengkalis mencapai 71,08% dari total kasus yang terjadi, menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa puskesma dengan cakupan penanganan yang relatif rendah diantaranya Balai Makam, Muara Basung, Pinggir, Duri Kota, Pematang Pudu, Pancur Jaya. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak perlu terus diperkuat.

Tabel II.70 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Per Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
1	Bengkalis	1.399	1.746	80,1
2	Bukit Batu	270	434	62,2
3	Bantan	592	874	67,7
4	Mandau	2.746	3.162	86,8
5	Rupat	557	769	72,4
6	Rupat Utara	169	322	52,5
7	Siak Kecil	306	536	57,1
8	Pinggir	1.566	1.466	106,8
9	Bandar Laksamana	294	360	81,7
10	Talang Muandau	398	628	63,4
11	Bathin Solapan	1.643	2.190	75

No	Kecamatan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Kabupaten Bengkalis		9.940	12.487	79,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2024, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan di Kabupaten Bengkalis mencapai 79,6%. Capaian ini tergolong baik, namun masih terdapat beberapa kecamatan dengan cakupan yang relatif rendah, seperti Kecamatan Rupat Utara dan Kecamatan Siak Kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan di Kabupaten Bengkalis secara umum sudah cukup baik, tetapi belum merata di beberapa wilayah. Sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong program "Satu Desa, Satu Bidan" yang diharapkan dapat memperluas akses dan memperbaiki layanan kesehatan ibu dan bayi di seluruh daerah.

Tabel II.71 Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan UCI	Cakupan Desa/Kelurahan UCI
1	Bengkalis	31	22	70,97
2	Bantan	23	14	60,87
3	Bukit Batu	10	6	60,00
4	Bandar Laksmana	7	4	57,14
5	Siak Kecil	17	15	88,24
6	BathinSolapan	13	8	61,54
7	Mandau	11	9	81,82
8	Pinggir	10	6	60,00
9	Talang Muandau	9	5	55,56
10	Rupat	16	10	62,50
11	Rupat Utara	8	6	75,00
Jumlah		155	105	67,74

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2024, cakupan desa/kelurahan yang telah mencapai *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Bengkalis mencapai 67,74%. Dari total 155 desa/kelurahan, sebanyak 105 di antaranya telah memenuhi status UCI. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya desa/kelurahan mencapai imunisasi dasar lengkap pada bayi. Selain itu, beberapa kecamatan masih memiliki cakupan UCI di bawah 65%, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi dasar bagi bayi.

Tabel II.72 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	≤ 4 Tahun	0	0	0
2	5 - 14 Tahun	2	0	2
3	15 - 19 Tahun	1	0	1
4	20 - 24 Tahun	9	1	10
5	25 - 49 Tahun	34	12	46
6	≥ 50 Tahun	1	2	3
Jumlah Kasus HIV		47	15	62
Jumlah Penduduk		343.463	328.262	671.725
Prevalensi HIV/AIDS		0,0137	0,0046	0,0092

Sumber: Diolah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Pada tahun 2024, prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Bengkalis tercatat sangat rendah, yakni sebesar 0,0092% dari total penduduk. Walau masih tergolong rendah namun patut untuk dilakukan strategi prepentif mengingat kabupaten Bengkalis merupakan salah satu pintu masuk ke negara tentanga. Berdasarkan data, kasus HIV/AIDS paling banyak ditemukan pada kelompok usia 25–49 tahun, dengan mayoritas penderita berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 34 jiwa.

Tabel II.73 Cakupan Kunjungan Bayi per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup	Cakupan Kunjungan Bayi
1	Bengkalis	1.366	1.388	98,40
2	Bukit Batu	379	273	138,80
3	Bantan	1.246	592	210,50
4	Mandau	2.376	2.743	86,60
5	Rupat	839	565	148,50
6	Rupat Utara	344	201	171,10
7	Siak Kecil	962	303	317,50
8	Pinggir	4.095	1.568	261,20
9	Bandar Laksamana	362	292	124,00
10	Talang Muandau	852	402	211,90
11	Bathin Solapan	1.383	1.628	85,00
KabupatenBengkalis		**14.204**	**9.955**	**142,70**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2024, cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Bengkalis mencapai 142,70% dari total bayi yang lahir hidup. Secara keseluruhan, distribusi cakupan kunjungan bayi di setiap kecamatan sudah menunjukkan pemerataan yang baik. Tingginya cakupan kunjungan ini berperan penting dalam meningkatkan kesehatan bayi serta membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan yang mungkin terjadi.

Tabel II.74 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K6 per Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Kunjungan Ibu Hamil K6	
			Jumlah Ibu Hamil Yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K6	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K6 (%)
1	Bengkalis	Bengkalis	1.158	94,4
2		Meskom	183	62,4
3		Pematang Duku	176	61,4
4	Bantan	Selat Baru	421	70,4
5		Pambang	151	49,4
6	Bukit Batu	Sungai Pakning	285	63,5
7	Bandar Laksamana	Tenggayun	266	71,4
8	Siak Kecil	Lubuk Muda	179	60,7
9		Sadar Jaya	125	48,3
10	Bathin Solapan	Sebangar	513	55,9
11		Balai Makam	905	67,2
12	Mandau	Duri Kota	2.258	91,1
13		Pematang Pudu	474	59,9
14	Pinggir	Muara Basung	685	104,7
15		Pinggir	1.048	121,6
16	Talang Muandau	Serai Wangi	300	46
17	Rupat	Batu Panjang	184	49
18		Teluk Lecah	102	65,4
19		Pancur Jaya	175	66,1
20	Rupat Utara	Tanjung Medang	85	25,5
Kabupaten Bengkalis			9.673	85,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Indikator cakupan K6 merupakan indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan antenatal care (ANC) terhadap ibu hamil pada usia kehamilan 24 hingga 40 minggu, yang bertujuan untuk mendeteksi komplikasi kehamilan, memastikan kesehatan ibu dan janin/bayi, serta mempersiapkan proses persalinan. Cakupan kunjungan ibu hamil K6 di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 mencapai 85,2%. Capaian ini tergolong cukup baik dan relatif merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya kepada tenaga kesehatan yang berkompeten, sehingga diharapkan dapat mendukung kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman. Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan terus berupaya meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, agar dapat mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa mendatang.

Tabel II.75 Cakupan Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Seluruh Kecamatan	Cakupan Puskesmas
Mandau	2	2	100,00%
Pinggir	1	1	100,00%
BathinSolapan	3	3	100,00%
Talang Muandau	1	1	100,00%
Bukit Batu	1	1	100,00%
Siak Kecil	2	2	100,00%
Bandar Laksamana	1	1	100,00%
Rupat	2	3	66,67%
Rupat Utara	1	3	33,33%
Bengkalis	3	2	150,00%
Bantan	2	3	66,67%
Kabupaten Bengkalis	19	22	86,36%

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Indikator pelayanan kesehatan berupa cakupan puskesmas di Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik, yaitu mencapai 86,36% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata terdapat lebih satu Puskesmas pada setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Setidaknya setiap kecamatan terdapat satu puskesmas yang melayani kesehatan masyarakat, bahkan terdapat 6 (enam) kecamatan yang memiliki Puskesmas lebih dari satu unit, khususnya pada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk lebih padat dan daerah perkotaan. Selain tersedianya Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dasar masyarakat atau disebut juga fasilitas pelayanan kesehatan primer, juga tersedia Puskesmas Pembantu yang tersebar pada setiap kecamatan. Puskesmas Pambantu merupakan jaringan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu dan menunjang memperluas jangkauan pelayanan kesehatan primes kepada masyarakat yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan seperti halnya Puskesmas.

Tabel II.76 Cakupan Puskesmas Pembantu per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Kecamatan	Puskesmas Pembantu	Jumlah Seluruh Desa/Kel	Cakupan Puskesmas Pembantu
Mandau	8	11	73%
Pinggir	3	10	30%
BathinSolapan	5	13	38%
Talang Muandau	2	9	22%
Bukit Batu	4	10	40%
Siak Kecil	4	17	24%
Bandar Laksamana	6	7	86%
Rupat	3	16	19%
Rupat Utara	7	8	88%
Bengkalis	5	31	16%
Bantan	8	23	35%
Kabupaten Bengkalis	55	155	35%

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Indikator pelayanan kesehatan melalui cakupan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bengkalis saat ini mencapai 35% dari total kelurahan/desa yang ada. Hingga tahun 2024, terdapat 55 Puskesmas Pembantu yang tersebar di berbagai kecamatan. Kecamatan Mandau memiliki jumlah Puskesmas Pembantu terbanyak, yaitu sebanyak 8 unit. Secara keseluruhan, rata-rata setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis memiliki setidaknya 3 unit Puskesmas Pembantu. Dengan ketersediaan ini, pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat dapat dikatakan cukup memadai, meskipun upaya peningkatan akses dan pemerataan fasilitas kesehatan tetap menjadi prioritas dalam mendukung pelayanan yang lebih optimal kedepannya.

Tabel II.77 Cakupan Pelayanan Nifas per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Peserta Ibu Nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Seluruh Ibu Nifas	Cakupan Pelayanan Nifas
1	Bengkalis	1.463	1.746	83,8
2	Bantan	661	434	152,3
3	Bukit Batu	287	874	32,8
4	Bandar Laksmana	321	3162	10,2
5	Siak Kecil	328	769	42,7
6	Bathin Solapan	1.668	322	518
7	Mandau	2.950	536	550,4
8	Pinggir	1.378	1.466	94
9	Talang Muandau	437	360	121,4
10	Rupat	460	628	73,2
11	Rupat Utara	206	2.190	9,4
Jumlah		10.159	12.487	81,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2024, cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Bengkalis mencapai 81,4% dari total ibu nifas yang ada. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu nifas telah mendapatkan layanan kesehatan pascapersalinan. Namun, masih terdapat beberapa kecamatan dengan cakupan pelayanan yang relatif rendah, seperti Kecamatan Rupat Utara dengan 9,4% dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan 10,2%. Pemerataan akses layanan kesehatan bagi ibu nifas tetap menjadi prioritas pemerintah dan akan terus dilakukan guna memastikan kesehatan ibu pascapersalinan tetap terjaga.

Tabel II.78 Cakupan Pemebrian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Yang Mendapat MP-ASI	Jumlah Seluruh Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

No	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Yang Mendapat MP-ASI	Jumlah Seluruh Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin
1	Bengkalis	302	2.021	14,9
2	Bukit Batu	59	386	15,3
3	Bantan	179	847	21,1
4	Mandau	214	2.327	9,2
5	Rupat	179	917	19,5
6	Rupat Utara	58	197	29,4
7	Siak Kecil	194	699	27,8
8	Pinggir	219	1.829	12
9	Bandar Laksamana	88	434	20,3
10	Talang Muandau	91	890	10,2
11	Bathin Solapan	195	2.829	6,9
Kabupaten Bengkalis		**1.778**	**13.376**	**13,3**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2024, cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) bagi anak usia 6–24 bulan dari keluarga miskin di Kabupaten Bengkalis baru mencapai 13,3%. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, angka ini masih tergolong rendah. Dari total 13.376 anak dalam kategori tersebut, baru 1.778 anak yang telah mendapatkan MP-ASI. Capaian ini perlu terus ditingkatkan, mengingat MP-ASI berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pemenuhan gizi bagi anak, terutama anak dari keluarga kurang mampu, guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Tabel II.79 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat per Kecamatan di Kabuapten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Peserta Didik SD	Jumlah Peserta Didik SD mendapat Pelayanan Kesehatan	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
1	Bengkalis	1.657	1.628	98
2	Bantan	689	680	99
3	Bukit Batu	448	389	87
4	Bandar Laksmana	433	398	92
5	Siak Kecil	477	477	100
6	BathinSolapan	2.762	2.642	96
7	Mandau	3.078	2.999	97
8	Pinggir	1491	1.452	97
9	Talang Muandau	1413	1129	80
10	Rupat	897	878	98
11	Rupat Utara	326	326	100
Jumlah		13.671	12.998	95

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2025

Pada tahun 2024, cakupan penjaringan kesehatan bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan setingkat di Kabupaten Bengkalis mencapai 95%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari upaya pemantauan dan pencegahan dini masalah kesehatan anak usia sekolah. Kecamatan Siak Kecil dan Rupat Utara tercatat sebagai wilayah dengan cakupan penjaringan kesehatan tertinggi. Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi siswa guna mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal.

Tabel II.80 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin per Kecamatan di Kabupaten bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
1	Bengkalis	49,969
2	Bukit Batu	21,313
3	Bantan	39,371
4	Mandau	124,355
5	Rupat	26,439
6	Rupat Utara	6133
7	Siak Kecil	15,826
8	Pinggir	16,048
9	Bandar Laksamana	4,467
10	Talang Muandau	41.75
11	BathinSolapan	47,561
KebupatenBengkalis		351,482

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Dari data tersebut, Kecamatan Mandau mencatat jumlah penerima layanan kesehatan dasar tertinggi, yaitu sebanyak 124.355 jiwa, disusul oleh Kecamatan Bengkalis (49.969 jiwa) dan Bathin Solapan (47.561 jiwa). Sementara itu, Kecamatan Bandar Laksamana (4.467 jiwa) dan Talang Muandau (4.175 jiwa) masih menunjukkan angka cakupan yang relatif rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, agar pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan.

- Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bengkalis

Realisasi pencanpaian SPM pada Urusan Kesehatan mengacu penyusunan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan realisasi sebagai tabel berikut :

Tabel II.81 Pencapaian SPM Urusan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase (%) Pendidikan Dasar Usia Dini	100%	88,85%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase (%) Pendidikan Dasar	100%	82,82%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase (%) Pendidikan Kesetaraan	100%	85,17%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan Balita	100%	76,98%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	104,77%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	84,90%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	111,58%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	100%	76,18%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	68,84%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	122,33%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan ResikoTerinfeksi HIV	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan Orang dengan ResikoTerinfeksi HIV	100%	100,59%
Jumlah			100%	91,92%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ,2025

Dalam rangka melakukan penguatan terhadap SPM Kesehatan, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya melakukan menguatan kebijakan yang terintegrasi dari tingkat tapak (kelurahan/desa) hingga tingkat kabupaten melalui penguatan program Kampung Keluarga Berkualitas, revitalisasi Posyandu, dan percepatan pembangunan desa. Pendekatan ini menitikberatkan pada koordinasi lintas sektor, sinkronisasi perencanaan berbasis data keluarga, serta penguatan kelembagaan di tingkat desa sebagai ujung tombak layanan dasar. Program Kampung Keluarga Berkualitas menjadi landasan dalam pemetaan kebutuhan intervensi, sementara Posyandu direvitalisasi sebagai simpul layanan kesehatan ibu dan anak, gizi, dan pengasuhan.

2.1.4.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keberhasilan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Bengkalis dapat diukur melalui berbagai indikator infrastruktur dan tata ruang yang ditetapkan pemerintah daerah. Berdasarkan data terbaru tahun 2024, sejumlah indikator menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lanjutan. Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 527,03 km pada tahun 2021 menjadi 538,27 km pada tahun 2024, menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam infrastruktur transportasi darat. Sementara itu, persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik tercatat sebesar 41,03% pada tahun 2024, mengalami penurunan dibandingkan capaian tertinggi 49,63% pada tahun 2022, namun masih lebih baik dibandingkan kondisi awal tahun 2021 sebesar 41,92%. Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk juga mengalami sedikit penurunan dari 0,0029 pada tahun 2021 menjadi 0,00195 pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan jalan belum sebanding dengan

pertumbuhan jumlah penduduk. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi peningkatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur jalan, terutama pada wilayah-wilayah pedesaan dan perbatasan yang masih memiliki akses terbatas.

Selain sektor jalan, beberapa indikator lain juga memperlihatkan capaian yang menggembirakan. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik meningkat dari 69,18% pada tahun 2021 menjadi 75,77% pada tahun 2024, yang berdampak positif terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah. Sistem drainase telah mencapai kondisi optimal dengan capaian 100% selama empat tahun berturut-turut. Dari sisi penataan ruang, tingkat ketaatan terhadap RTRW tercatat stabil sebesar 90%, sedangkan persentase bangunan gedung yang memiliki IMB berada pada kisaran 79,25–79,78%, mencerminkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan bangunan yang relatif baik. Sementara itu, cakupan rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik meningkat signifikan dari 60,76% pada tahun 2021 menjadi 93,92% pada tahun 2024, disertai dengan peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum layak sebesar 71,26% dan layanan sanitasi layak sebesar 93,92%. Namun demikian, indikator pengamanan tebing dan pantai serta perlindungan garis pantai rawan abrasi masih stagnan di kisaran 29,6%, yang menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur pesisir masih menjadi tantangan utama. Secara keseluruhan, pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Bengkalis tahun 2024 telah menunjukkan kinerja yang positif dan berkelanjutan, terutama dalam aspek jalan, irigasi, drainase, serta sanitasi, namun masih diperlukan upaya terpadu untuk meningkatkan ketahanan wilayah pesisir dan pemerataan pembangunan infrastruktur antar kecamatan.

Tabel II.82 Perkembangan Indikator Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km)	527,030	623,867	522,416	538,269
2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	41,92	49,63	39,82	41,03
3	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	0,0029	0,0022	0,0022	0,00195
4	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	1:456	1:464	1:444	1:512
5	Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	79,25	79,36	79,78	na
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	na	na	93,74	93,92
7	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	na	na	70,64	71,26
8	Ketaatan Terhadap RTRW	90	90	90	90
9	Persentase pengamanan tebing/pantai dalam kondisi baik	36,6	29,5	29,5	29,6
10	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	69,18	71,04	73,41	75,77
11	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak	100	100	100	100

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
	Tersumbat				
12	Panjang garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur	36,6	29,5	29,5	29,6
13	Panjang infrastruktur pengaman daerah istrasi isd rawan longsor	4,44	4,44	4,44	4,44
14	Jumlah unit air baku dalam kondisi baik	5	5	6	6
15	Persentase luas kawasan bebas banjir	77,1	89,94	89,94	89,94
16	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	60,76	61,08	61,23	93,92
17	Persentase RT akses air bersih	58,03	60,53	71,35	71,35

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2025

- Capaian SPM Urusan Pekerjan Umum

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang teridiri atas 4 indikator dengan batas waktu pencapaian setiap tahun. Untuk Realisasi capaian SPM urusan Pekerjan Umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.83 Realisasi Capaian Urusan pekerjaan Umum 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase (%) penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	86,45%
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Persentase (%) Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic	100%	76,20%
Capaian SPM				**81,33%**

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2025

Untuk capaian indikator pada Tahun 2024, tercapai secara keseluruhan 81,33% dan atau kategori indeks pencapaian SPM nya TUNTAS MADYA. Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Untuk Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan capaian SPM sebesar 86,45%.
- Untuk penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik dengan capaian SPM sebesar 76,20%.

2.1.4.4.1.4 Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Keberhasilan pelayanan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan di Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren yang cukup positif selama periode 2020–2024. Berdasarkan data terbaru, rasio rumah layak huni mengalami peningkatan yang konsisten dari 97,79% pada tahun 2020 menjadi 100,73% pada tahun 2023, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 99,96% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah di Kabupaten Bengkalis telah memenuhi standar kelayakan huni sesuai dengan kriteria rumah sehat, aman, dan layak. Rasio permukiman layak huni juga memperlihatkan tren yang membaik, dari 98,16% pada tahun 2022 menjadi 99,40% pada tahun 2024, yang mencerminkan meningkatnya kualitas tata permukiman serta keberhasilan program penataan lingkungan berbasis masyarakat.

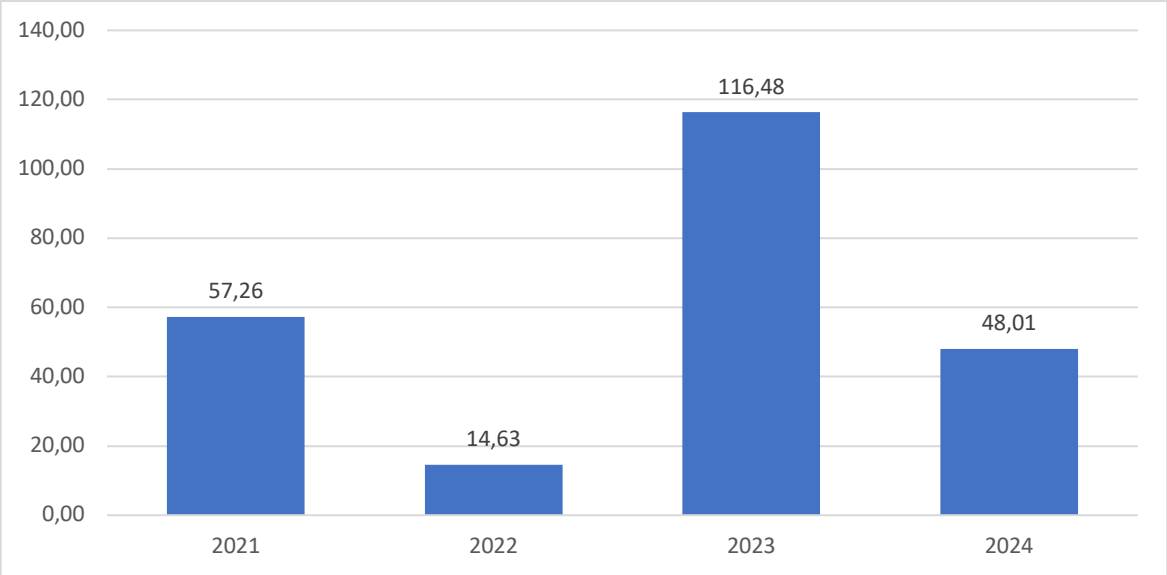
Di sisi lain, persentase lingkungan permukiman kumuh terus menurun signifikan, dari 4,40% pada tahun 2020 menjadi hanya 1,28% pada tahun 2024, menandakan efektivitas intervensi pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh. Namun demikian, luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sempat meningkat dari 2,27% pada tahun 2023 menjadi 6,12% pada tahun 2024, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam pengendalian pertumbuhan kawasan padat penduduk di wilayah urban. Di sisi lain, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) juga tetap terjaga dengan capaian 54% pada tahun 2024, meskipun sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Secara umum, kondisi ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah berhasil meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan permukiman secara signifikan, namun masih perlu memperkuat pengawasan dan penataan kawasan perkotaan agar tidak terjadi perluasan kawasan kumuh di masa mendatang. Upaya keberlanjutan program rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengembangan PSU, serta penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi diharapkan menjadi prioritas utama dalam mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat, tertata, dan berkelanjutan.

Tabel II.84 Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio rumah layak huni	97,79	97,85	99,51	100,73	99,96
2	Rasio pemukiman layak huni	na	na	98,16	98.25	99,4
3	Rehabilitasi rumah layak huni	na	na	495	599	20
4	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	na	na	0	0	0
5	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	4,4	16,72	3,67	3,38	1,28
6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	na	na	16,72	2.27	6,12
7	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	46,45	32,26	49,68	65,98	54
8	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	na	na	20%	20%	20%

Sumber: Dinas Perkimtan Kabupaten Bengkalis, 2025

Capaian pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Bengkalis pada periode 2021–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi, di mana pada tahun 2021 seluas 57,26 ha, menurun menjadi 14,63 ha pada tahun 2022, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2023 hingga mencapai 116,48 ha, dan kembali menurun pada tahun 2024 sebesar 48,01 ha. Dinamika tersebut mencerminkan adanya upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih layak, meskipun di sisi lain juga mengindikasikan perlunya penguatan strategi dan konsistensi program agar pengurangan kawasan kumuh dapat dilaksanakan secara lebih terarah, berkesinambungan, serta selaras dengan tujuan pembangunan berwawasan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Sumber: Dinas Perkimtan Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.78 Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 (Ha)

Adapun SK Kawasan Kumuh Nomor 528/KPTS/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 menetapkan sebanyak 14 kawasan kumuh dengan total luasan mencapai 105,99 hektare. Penetapan ini menjadi dasar hukum sekaligus acuan dalam penyusunan perencanaan serta pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Rincian kawasan kumuh sebagaimana tercantum dalam SK tersebut disajikan pada lampiran berikut.

Tabel II.85 Daftar Kawasan Kumuh Kabupaten Bengkalis Berdasarkan SK Nomor 528/KPTS/VIII/2024

No	Nama Lokasi	RT /RW	Desa	Kecamatan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Perkotaan Bengkalis - Parit Bangkung	RT001-RW001	Damon	Bengkalis	0,88
		RT002-RW001			0,67
		RT003-RW001			0,89

No	Nama Lokasi	RT /RW	Desa	Kecamatan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		RT004-RW001			2,03
		RT001-RW003			0,74
2	Kawasan Perkotaan Bengkalis - Cik Mas Ayu	RT003-RW001	Rimba Sekampung	Bengkalis	3,38
		RT002-RW002			4,00
		RT005-RW002			1,00
		RT006-RW002			3,11
3	Pantai Indah Selat Baru	RT001-RW014	Selat Baru	Bantan	3,02
		RT001-RW015			2,06
		RT001-RW013			3,81
		RT002-RW013			2,95
		RT002-RW014			2,72
		RT002-RW015			2,41
4	Batu Panjang	RT001-RW001	Batu Panjang	Rupat	0,00
		RT002-RW001			0,00
		RT003-RW001			0,00
		RT004-RW001			0,00
		RT005-RW001			0,00
		RT008-RW001			0,00
5	Permukiman Nelayan Tanjung Medang	RT001-RW001	Desa Tanjung Medang	Rupat Utara	2,89
		RT002-RW001			2,86
		RT003-RW002			0,00
		RT005-RW003			1,76
6	Kawasan Perkotaan Duri - Duri Barat	RT003-RW013	Duri Barat	Mandau	0,00
7	Kawasan Perkotaan Duri - Balik Alam	RT003-RW006	Balik Alam	Mandau	0,00
		RT001-RW007			0,00
		RT004-RW007			0,00
8	Kawasan Perkotaan Duri - Talang Mandi	RT002-RW002	Talang Mandi	Mandau	0,00
		RT003-RW002			1,12
		RT004-RW002			0,00
		RT001-RW003			1,45
		RT002-RW003			1,74
		RT003-RW003			0,00
		RT004-RW003			0,96
		RT005-RW003			0,00
		RT004-RW010			0,75
		RT002-RW014			1,93
9	Kawasan Perkotaan Duri - Pematang Pudu	RT002-RW010	Pematang Pudu	Mandau	2,31
		RT001-RW013			4,53
		RT002-RW013			4,37
		RT003-RW013			3,88
		RT004-RW013			0,00
10	Kawasan Perkotaan Duri - Air Jamban	RT004-RW002	Air Jamban	Mandau	0,00
		RT001-RW003			0,00
		RT002-RW003			0,00
		RT003-RW003			1,27
		RT004-RW003			0,73
		RT005-RW003			0,00

No	Nama Lokasi	RT /RW	Desa	Kecamatan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		RT006-RW003			0,00
		RT001-RW007			0,00
		RT002-RW007			0,84
		RT003-RW007			0,00
		RT006-RW007			0,00
		RT007-RW007			0,00
		RT001-RW009			0,00
		RT002-RW009			0,60
		RT005-RW009			1,05
		RT005-RW010			1,38
		RT001-RW011			0,00
		RT003-RW011			0,00
		RT004-RW011			0,00
		RT005-RW011			0,00
		RT006-RW011			1,37
		RT005-RW016			0,00
		RT006-RW017			0,00
		RT001-RW022			0,00
		RT002-RW022			2,73
11	Kawasan Perkotaan Duri - Babussalam	RT002-RW001	Babussalam	Mandau	1,82
		RT002-RW002			0,00
		RT009-RW002			0,00
		RT003-RW003			0,00
		RT001-RW006			0,00
		RT001-RW008			2,17
		RT003-RW008			0,00
		RT005-RW008			1,33
12	Kawasan Perkotaan Duri - Duri Timur	RT002-RW001	Duri Timur	Mandau	0,00
		RT003-RW001			0,00
		RT003-RW005			0,00
		RT004-RW005			0,00
		RT005-RW005			0,00
13	Kawasan Perkotaan Duri - Gajah Sakti	RT002-RW002	Gajah Sakti	Mandau	0,00
		RT001-RW005			0,00
		RT002-RW005			0,41
		RT003-RW005			0,69
		RT004-RW005			0,00
		RT005-RW005			0,00
		RT001-RW007			1,16
		RT002-RW007			0,82
		RT003-RW007			0,54
		RT004-RW007			0,00
		RT005-RW007			1,39
		RT003-RW009			0,00
14	Sebangar	RT003-RW005	Sebangar	Bathin Solapan	0,99
		RT002-RW007			3,05
15	Balai Makam	RT001-RW004	Balai Makam	Bathin Solapan	1,14
		RT002-RW004			0,00

No	Nama Lokasi	RT /RW	Desa	Kecamatan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		RT005-RW004			0,30
		RT001-RW005			0,00
		RT002-RW005			0,00
		RT003-RW005			1,30
		RT004-RW005			0,69
		RT005-RW005			0,00
		RT001-RW007			0,64
		RT002-RW007			1,23
		RT003-RW007			1,07
16	Petani	RT002-RW001	Petani	Bathin Solapan	0,00
17	Bumbung	RT001-RW001	Bumbung	Bathin Solapan	2,38
		RT003-RW002			2,67
18	Kesumbo Ampai	RT002-RW002	Kesumbo Ampai	Bathin Solapan	2,78
		RT001-RW004			1,91
19	Pinggir	RT002-RW002	Pinggir	Pinggir	0,00
		RT003-RW002			0,00
		RT004-RW002			1,32
20	Pasar Sungai Pakning	RT001-RW001	Sungai Pakning	Bukit Batu	0,00
		RT001-RW003			0,00
		RT002-RW002			0,00
		RT002-RW003			0,00
		RT003-RW001			0,00
		RT003-RW002			0,00
		RT003-RW003			0,00
21	Pasar Lubuk Muda	RT004-RW002	Lubuk Muda	Siak Kecil	0,00
		RT006-RW003			0,00
		RT007-RW004			0,00
JUMLAH					**105,99**

Sumber: SK Nomor 528/KPTS/VIII/2024

Berdasarkan data backlog perumahan menurut kecamatan di Kabupaten Bengkalis, tercatat jumlah kebutuhan hunian yang belum terpenuhi mencapai 34.076 unit, dengan sebaran terbesar berada di Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan, sementara kecamatan dengan backlog relatif kecil antara lain Rupat Utara, Bantan, dan Bandar Laksamana. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan layak bagi masyarakat, sehingga pemerintah terus berupaya melalui program pembangunan perumahan yang proporsional, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Berikut disajikan data *backlog* perumahan menurut kecamatan, yaitu:

Tabel II.86 Data *Backlog* Perumahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis

No.	Kecamatan	Jumlah *Backlog*
1	Bengkalis	2731
2	Bantan	537
3	Bukit Batu	931

No.	Kecamatan	Jumlah *Backlog*
4	Siak Kecil	755
5	Bandar Laksamana	566
6	Bathin Solapan	4989
7	Mandau	19.287
8	Pinggir	2023
9	Talang Muandau	641
10	Rupat	1107
11	Rupat Utara	509
Jumlah		**34.076**

Sumber: RP3KP, 2022

- SPM Urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berupaya secara maksimal melaksanakan seluruh Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal, Namun ada beberapa kendala dimasa transisi penerapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana transisi pada Penerapan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008. Untuk realisasi SPM pada urusan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.87 Capaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	15%
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak Huni	100%	92,31%
Capaian SPM				**53,65%**

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2025

Untuk capaian indikator pada Tahun 2024, hanya tercapai sebesar 53,65% dan atau kategori indeks pencapaian SPM nya BELUM TUNTAS. Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dengan capaian 15%.

b. Untuk fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 92,31%.

2.1.4.4.1.5 Urusan Ketetraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diukur melalui beberapa indikator. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari tahun 2020 hingga 2021 stabil di angka 1.859 orang, namun turun menjadi 1.521 orang pada tahun 2022, tetap pada tahun 2023 dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 1678 orang. Sementara itu penegakan Peraturan Daerah (PERDA) sudah mencapai 100% dari tahun 2021-2024. Selanjutnya persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) yang dapat diselesaikan juga sudah mencapai mencapai 100% dari tahun 2021 hingga 2024.

Tabel II.88 Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyrakat (Linmas) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 (%)

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.859 Orang	1.859 Orang	1521 Orang	1521 Orang	1678 Orang
2	Persentase Penegakan PERDA	80%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	80%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	73	100	73	73	100
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	98	100	91	85.26	96.88
6	Indeks Resiko Bencana	156,4	109.48	128.86	134.7	137.73
7	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit /Wabah Zoonosis Prioritas	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	2555 Jiwa / 100%	2575 Jiwa/102%	400 Jiwa/ 100%	1000 Jiwa/ 100%	100%
9	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2000 Jiwa /100%	2100 Jiwa/ 83,23%	109 Jiwa/ 100%	355 Jiwa/ 100%	100%
10	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	115 KK/ 100%	116 KK/ 99,91 %	139 Jiwa/ 100%	200 Jiwa/ 100 %	100%

Sumber: Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, 2025

Cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bengkalis mencapai 73% pada periode 2021-2024. Sejalan dengan itu, tingkat waktu tanggap (*response time rate*) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) mengalami fluktuasi, dengan capaian 98 pada tahun 2020, menurun menjadi 68 pada tahun 2021, kemudian meningkat kembali menjadi 91 pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 85,26 pada tahun 2023.

Di sisi lain, upaya peningkatan layanan informasi bencana menunjukkan hasil yang baik, dengan cakupan 100% warga negara yang memperoleh layanan tersebut selama periode 2020-2023. Hal ini sejalan dengan peningkatan akses terhadap informasi kebencanaan yang dapat membantu masyarakat lebih siap dalam menghadapi potensi bencana. Sementara itu, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana juga sudah mencapai 100% pada tahun 2020, turun menjadi 83,23% pada tahun 2021, namun

kembali meningkat menjadi 100% pada tahun 2022 dan 2023. Lebih lanjut, Indeks Risiko Bencana menunjukkan tren penurunan yang positif dari 156,4 pada tahun 2020 menjadi 128,86 pada tahun 2022, Namun mengalami peningkatan ke angka 134,65 pada tahun 2023 dan 137,73 pada tahun 2024.

- Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum

Penyusunan Laporan Pencapaian SPM Tahun 2018 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota.

Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan seluruh Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal. Untuk data penerima layanan bersumber dari laporan dan pengaduan masyarakat serta temuan kasus dari relawan sosial di lapangan. Adapun hasil capaian SPM Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.89 Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiba Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase (%) warga negara yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100%	93,56%
Capaian SPM				97,02 %

Sumber: Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2024, capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Bengkalis, yang diukur melalui persentase warga negara yang memperoleh pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, mencapai angka 93,56%. Capaian ini menempatkan Kabupaten Bengkalis dalam kategori Indeks Pencapaian SPM TUNTAS UTAMA, yang mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan ketentraman dan ketertiban kepada masyatakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari Satu Pelayanan Dasar yang berada dalam Urusan Badan Penanggulangan Bencana, yakni adalah jenis Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum sub Urusan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis bertanggung Jawab akan Pelayanan Dasar Kententraman dan Ketertiban Umum dengan 3 (tiga) Indikator, adapun hasil capaian SPM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.90 Capaian SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase (%) wargaca negara yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	90%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) warga negara yang memperoleh Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) warga negara yang memperoleh Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	96%
Capaian SPM				95,33%

Sumber: BPBD Kabupaten Bengkalis, 2025

Untuk capaian indikator pada Tahun 2024, tercapai secara keseluruhan 95,33% dan atau kategori indeks pencapaian SPM nya TUNTAS UTAMA. Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Capaian SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebesar 90%
- Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar 100%
- Capaian SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 96%

Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya sejak tahun 2017 telah memiliki Organisasi Perangkat Daerah mandiri yang menangani sub urusan kebakaran, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis No. 41 tahun 2016 tentang Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jenis Pelayanan dasar sub urusan pemadaman kebakaran adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, wajib diterima oleh seluruh warga negara yang menjadi korban dan/atau terdampak kebakaran, dalam waktu tanggap (response time) 15 (lima belas) menit. Ketentuan teknis ini telah menjadi satu faktor untuk penghitungan Indeks Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

Tabel II.91 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bengkalis Urusan Ketentraman Ketertiban Umum 2024

No	Indikator	Target	Capaian
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)	100%	98,02%
Capaian SPM			98,02%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2024, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sub-urusan Pemadaman Kebakaran dalam Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Bengkalis mencapai angka 97,39%, yang diklasifikasikan dalam kategori Indeks Pencapaian SPM TUNTAS UTAMA. Capaian ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam aspek ketenteraman dan perlindungan, serta menjadi dasar penguatan sistem penanggulangan kebakaran yang lebih terpadu, preventif, dan berbasis partisipasi masyarakat ke depan.

2.1.4.4.1.6 Urusan Sosial

Urusan Sosial dapat diukur melalui indikator jumlah fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan, jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial, persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial, persentase PPKS yang tertangani dan persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel II.92 Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 (%)

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia telah menerima jaminansosial	75%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	80,60%	61,00%	81,80%	86,80%	83,46%
4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase PPKS Skala yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	77%	61,00%	81,80%	80%	74%
6	Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	603 KK	711 KK	144 KK	288 KK	326 KK
7	Jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial (Orang)	108 Orang	264 Orang	596 Orang	317 Orang	253 KK

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2025

Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat sudah tercapai sebesar 100% dari tahun 2020-2024. Adapun jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan mengalami fluktuasi, dari 603 KK pada 2020 meningkat menjadi 711 KK pada 2021, kemudian kembali turun menjadi 144 KK pada 2022, dan kembali naik hingga tahun 2024 menjadi 326 KK.

Selanjutnya jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial juga menunjukkan peningkatan signifikan dari 108 orang pada 2020 menjadi 596 orang pada 2022, meskipun kembali turun hingga tahun 2024 menjadi 253 orang. Penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial dalam bentuk pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, diberikan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja dan diberikan beberapa pelatihan di dalam dan di luar provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keberdayaan dan kemandirian para penyandang disabilitas agar dapat bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menguragi ketergantungan dengan orang lain, sehingga tidak menjadi permasalahan sosial baru. Selain itu Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 sudah mencapai 100%.

Sedangkan persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia telah menerima jaminan sosial meningkat dari 75% pada 2020 menjadi 100% pada tahun 2021 hingga 2024. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami penurunan dari 80,6% pada 2020 menjadi 61% pada 2021, lalu meningkat menjadi 86,8% hingga tahun 2023, namun sedikit turun pada tahun 2024 menjad 83,46%. Sejalan dengan itu, persentase PPKS yang tertangani sudah tercapai 100% dari tahun 2020-2024. Namun, persentase PPKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar turun dari 77% pada 2020 menjadi 61% pada 2021, kemudian naik kembali menjadi 81,8% pada 2022, menurun 80% pada 2023 dan 74% pada tahun 2024. Berikut adalah persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024, yaitu:

Tabel II.93 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah PPKS yang Diberikan Bantuan	Jumlah PPKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
1	Bengkalis	31.231	38.462	81,20%
2	Bukit Batu	8.436	23.499	35,90%
3	Bantan	21.937	9.907	221,43%
4	Mandau	24.856	32.749	75,90%
5	Rupat	20.626	22.126	93,22%
6	Rupat Utara	7.597	7.895	96,23%
7	Siak Kecil	9.046	9.881	91,55%
8	Pinggir	12.152	15.848	76,68%
9	Bandar Laksamana	4.702	5.649	83,24%

No	Kecamatan	Jumlah PPKS yang Diberikan Bantuan	Jumlah PPKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
10	Talang Muandau	5.902	6.844	86,24%
11	Bathin Solapan	16.965	22.987	73,80%
Kabupaten Bengkalis		163.450	195.847	83,46%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2025

Data PPKS penerima bantuan Sosial merupakan data Penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Data yang seharusnya menerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dimana berdasarkan data ini, pada tahun 2024 terdapat 195.847 orang yang terdaftar di DTKS, dan sudah sebanyak 163.450 penduduk Kabupaten Bengkalis mendapatkan bantuan sosial yang berasal dari dana APBD dan APBN.

Jumlah PPKS terbanyak berdasarkan DTKS berada di Kecamatan Bengkalis sebanyak 31.231 orang dan pada Kecamatan Mandau dengan jumlah sebanyak 24.856 orang. Sedangkan jumlah PPKS paling sedikit berada di Kecamatan Bandar Laksamana dengan jumlah 4.702 orang.

Tabel II.94 Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemerintahan Kebutuhan Dasar Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah PPKS yang Memperolah Bantuan Sosial	Jumlah PPKS yang Seharusnya Memperolah Bantuan Sosial	Persentase PPKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar
1	Bengkalis	31.231	38.462	81%
2	Bukit Batu	8.436	23.499	36%
3	Bantan	21.937	9.907	221%
4	Mandau	24.856	32.749	76%
5	Rupat	20.626	22.126	93%
6	Rupat Utara	7.597	7.895	96%
7	Siak Kecil	9.046	9.881	92%
8	Pinggir	12.152	15.848	77%
9	Bandar Laksamana	4.702	5.649	83%
10	Talang Muandau	5.902	6.844	86%
11	Bathin Solapan	16.965	22.987	74%
KabupatenBengkalis		112.992	163.45	195.847

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2024

Data Penerima Program Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial merupakan bagian dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) baik yang bersumber dari program pusat maupun otonom daerah. Data penerima seharusnya merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis validasi penerima bantuan.

Pada tahun 2024, jumlah PPKS yang tercatat dalam DTKS di Kabupaten Bengkalis mencapai 195.847 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 112.992 PPKS telah memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau sekitar 58% dari total penerima yang seharusnya mendapatkan bantuan. Capaian ini menunjukkan peningkatan upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memperluas jangkauan program sosial, meskipun masih terdapat beberapa kecamatan dengan tingkat capaian yang perlu ditingkatkan.

Tabel II.95 Persentase PPKS yang tertangani Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah PPKS yang Tertangani	Jumlah PPKS yang Ada	Persentase PPKS yang Tertangani
1	Bengkalis	181	181	100%
2	Bukit Batu	9	9	100%
3	Bantan	47	47	100%
4	Mandau	27	27	100%
5	Rupat	46	46	100%
6	Rupat Utara	1	1	100%
7	Siak Kecil	5	5	100%
8	Pinggir	8	8	100%
9	Bandar Laksamana	66	66	100%
10	Talang Muandau	0	0	100%
11	BathinSolapan	14	14	100%
Kabupaten Bengkalis		404	404	100%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2024

Data PPKS yang tertangani merupakan data PPKS yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Dimana pada tahun 2024 terdapat sebanyak 404 PPKS yang tertangani dan menerima layanan rehabilitasi sossial. Capaian ini sebesar 100% dari total 404 PPKS yang ada. Secara keseluruhan, penanganan PPKS sudah berjalan dengan baik dan relatif merata di berbagai kecamatan

- Capaian SPM Urusan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya. Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan dan penerapan SPM di daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel II.96 Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Persentase (%) penyandangdisabilitasterlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) anakterlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) lanjutusiaterlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminansosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) korban bencanaalam dan sosial yang terpenuhikebutuhan dasarnya pada saat dan setelah darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%
Capaian SPM UrusanSosial				100%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2025

Untuk capaian indikator pada tahun 2024, tercapai secara keseluruhan 100% dan atau kategori indeks pencapaian SPM nya TUNTAS PARIPURNA. Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Untuk rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti dengan capaian indikator 100%.
b) Untuk rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti dengan capaian indikator 100%.
c) Untuk rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan capaian indikator 100%.
d) Untuk rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti dengan capaian indikator 100%.
e) Untuk perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota dengan capaian indikator 100%.

2.1.4.4.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada layanan urusan wajib non pelayanan pemerintah daerah diantaranya yaitu Tenaga Kerja; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

2.1.4.4.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Perkembangan indikator kinerja urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa

indikator yang perlu mendapatkan perhatian kedepan, salah satunya adalah persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan ijazah S1/S2/S3, yang diperoleh dari publikasi BPS Provinsi Riau.

Pada tahun 2020, persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan ijazah S1/S2/S3 tercatat sebesar 9,35%, sedikit menurun tahun 2021 menjadi 8,29%, selanjutnya meningkat hingga tahun 2023 menjadi 11,72% dan sedikit turun pada tahun 2024 menjadi 10,05%. Data tahun 2023 dan 2024 merupakan persentase kumulatif dari seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah perguruan tinggi, termasuk di dalamnya data penduduk dengan ijazah diploma. Hal ini disebabkan oleh perubahan dalam publikasi dokumen BPS Riau Dalam Angka tahun 2024 dan 2025, yang tidak lagi memisahkan data penduduk dengan ijazah diploma dan ijazah S1/S2/S3, seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II.97 Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah S1/S2/S3	9,35	8,29	9,49	11,72	10,05
2	Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	100%	14,58%	0,03%	28%
3	Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100%	100%	13,40%	4.06%	3.21%
4	Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100%	100%	4,92	100%	0,76%
5	Penyelesaian Sengketa Pengusaha- Pekerja (%)	21,88%	57,14%	47,36%	8,33%	44%
6	Angka sengketa pengusaha-pekerja	31	14	19	24 Kasus	11 Kasus
7	Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	22%	50%	47,30%	54,17%	45,45%
8	Persentase Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	93,20%	24,88%	21,25%	70%	19,35%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, 2025

Selanjutnya persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2020-2021 telah mencapai 100%, namun tahun 2024 turun menjadi 28%. Hal yang sama juga terjadi pada indikator persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat pada tahun 2020-2021 telah mencapai 100%, namun turun pada tahun 2022 menjadi 13,40% dan pada tahun 2024 menjadi 3,21%. Adapun persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2020-2021 telah mencapai 100%, namun turun signifikan pada tahun 2022 menjadi 4,92% dan naik kembali menjadi 100% pada tahun 2023 lalu kembali turun signfikan menjadi 0,76% pada tahun 2024.

Sedangkan persentase penyelesaian sengketa antara pengusaha pada tahun 2020 tercatat sebesar 31,88%, meningkat menjadi 57,14% pada tahun 2021, namun turun hingga tahun 2023 menjadi 8,33% dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 44%. Angka sengketa pengusaha-pekerja juga menunjukkan kecenderungan menurun, dari 31 kasus pada 2020 menjadi 11 kasus pada 2024. Selain itu, persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) pada tahun 2020 tercatat sebesar 22%, meningkat pada tahun 2021 menjadi 50%, sedikit turun pada tahun 2022 menjadi 47,30%, kembali naik pada tahun 2023 menjadi 54,17% dan sedikit turun pada tahun 2024 menjadi 45,45%. Selain itu, persentase pekerja atau buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) tercatat sebesar 93,20% pada tahun 2020, namun turun hingga tahun 2022 menjadi 21,25% dan naik kembali pada tahun 2023 menjadi 70% dan turun kembali menjadi 19,35% pada tahun 2024.

Tabel II.98 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	766	1.391	55	103	1.148
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	1.363	1.195	1.612	1.505	1.264
3	Persentase Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	56,20%	116,40%	3,41%	6,84%	90,82%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, 2025

Perkembangan persentase besaran penempatan pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2020 sebesar 56,20%, meningkat menjadi 116,40% pada tahun 2021, turun signifikan pada tahun 2022 menjadi 3,41% dan kembali naik hingga tahun 2024 menjadi 90,82%. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalkan program ketenagakerjaan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Salah satu indikator yang mencerminkan upaya tersebut adalah peningkatan Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, yang pada tahun 2024 mencapai 28%, naik signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar 0,03%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja agar lebih siap bersaing di dunia kerja.

Selanjutnya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Pada tahun 2023 tercatat hanya 28 penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal, dengan TPAK sebesar 4,88%. Sebagian besar penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, yaitu sebanyak 556 orang, sementara 282 orang lainnya masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Dari total 886 penyandang disabilitas, 574 orang berada dalam usia angkatan kerja (15-64 tahun). Meskipun ada partisipasi di sektor formal, jumlahnya masih rendah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan akses dan dukungan untuk penyandang disabilitas agar dapat lebih berpartisipasi di sektor formal.

Tabel II.99 Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penyandang Disabilitas di Sektor Formal Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah
1	Pekerja Formal	28
2	Pekerja Informal	556
3	Pelajar/Mahasiswa	282
Total		886
Angkatan Kerja (15-64)		574
TPAK di Sektor Formal		4,88%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencacatan Sipil Provinsi Riau, 2024 (diolah)

2.1.4.4.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pembangunan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bengkalis dapat diukur melalui beberapa indikator penting selama periode 2020-2024. Salah satu indikator utama adalah proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR, yang menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD meningkat dari 8,89% pada tahun 2020, menjadi 15,55% pada tahun 2024. Indikator ini mencerminkan terjadinya peningkatan keterwakilan perempuan di ranah politik, meskipun masih perlu peningkatan untuk mencapai paritas gender yang lebih baik.

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja juga menjadi salah satu indikator penting. Pada tahun 2020, partisipasi perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi tercatat sebesar 52,17%, meningkat menjadi 54,56% pada tahun 2021, namun kemudian menurun menjadi 50,10% pada tahun 2022 dan sedikit membaik pada tahun 2023 menjadi 50,41% lalu kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 32,78%.

Tabel II.100 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	8,89	8,89	8,99	8,99	15,55
2	Rasio KDRT	0,002	0,001	0,45	0,000068	0,000107
3	Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	52,17	54,56	50,1	50,41	32,78
4	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	100	100	100	100
5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A danPPT/PKT di rumah sakit	100	100	100	100	100
6	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
7	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100	100	100	100	0
8	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100	100	0	0	0
9	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SD	90,28	90,22	88,61	88,09	107,49
10	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP	54,78	55,75	59,07	56,16	98,22
11	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMA	115,03	55,88	55,65	56,71	81,14

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, 2025

Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menunjukkan perbaikan signifikan. Rasio KDRT pada tahun 2020 tercatat sangat rendah, yaitu sebesar 0,002, mengalami fluktuasi menurun hingga tahun 2024 menjadi 0,000107. Hal ini sejalan dengan optimalnya kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT, yang didukung oleh cakupan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mencapai 100% selama periode 2020-2024. Hal serupa juga terlihat pada beberapa indikator lainnya, seperti Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit, Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum, serta Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum. Ketiga indikator ini menunjukkan capaian yang sangat baik dengan tingkat kinerja mencapai 100% pada periode 2020-2024, mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

Selain itu, penilaian terhadap kesetaraan gender melalui rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan hasil yang beragam. Di tingkat SD, rasio APM perempuan/laki-laki mengalami mengalami fluktuasi meningkat dari 90,28 pada tahun 2020, menjadi 107,49 di tahun 2024. Di tingkat SMP, rasio ini juga mengalami fluktuasi meningkat dari 54,78 pada tahun 2020 menjadi 98,22 pada tahun 2024. Namun rasio pada tingkat SMA menurun dari 115,03 pada tahun 2020, menjadi 55,88 pada tahun 2021 dan kembali mengalami perbaikan hingga tahun 2024 menjadi 81,14.

Sementara itu untuk indikator kinerja yang menjadi standar pelayanan minimal di Kabupaten Bengkalis untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sudah mencapai 59,8 dan untuk indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah mencapai 90,47 pada tahun 2024. Selain itu Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten dan persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan

bantuan hukum mencapai 100% pada tahun 2024. lebih rinci dapat disaksikan pada tabel berikut:

Tabel II.67 Perkembangan Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2024

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerjapembangunan Daerah	Satuan	2023	2024
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	54,01	59,8
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,34	90,47
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100
Persentase layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100
Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.4.4.2.3 Urusan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan daerah dapat diukur dari ketersediaan pangan utama yang diperoleh dari data produk beras dan data pasokan dari luar kabupaten. Ketersediaan pangan utama menjadi penting untuk menjamin kebutuhan asupan energi dan protein bagi semua peduduk, karena pemenuhan pangan bagi penduduk merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak azasi manusia. Selain itu, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian dalam urusan pangan untuk menciptakan masyarakat yang sehat.

Tabel II.101 Indikator Urusan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks ketahanan Pangan	65,95	61,15	62,61	61,68	65,75
Persentase desa bebas dari status rawan pangan	75,5	81,9	60	89	98,7
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,9	88,4	92,3	91,7	91,1
Ketersediaan pangan utama (Kg/kap/thn)	113,55	119,98	116,89	104,41	792
Ketersediaan Energi (kkl/kap/hari)	2.545	2.117	2.177	2.205	3.978
Ketersediaan Protein (gram/kap/hari)	66,01	59,18	59,18	71,74	38,98
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan(%)	100	100	85,71	83,9	90,5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, 2025

Perkembangan indeks ketahanan pangan pada tahun 2020 tercatat mencapai 65,95, turun hingga tahun 2023 menjadi 61,15 dan kembali meningkat hingga tahun 2024 menjadi 65,75. Selanjutnya pada jumlah ketersediaan pangan utama dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi meningkat. Pada tahun 2020 jumlah ketersediaan pangan utama sebesar 113,55 kg/kapita/hari, mengalami fluktuasi meningkat hingga tahun 2024 menjadi 792 kg/kapita/hari. Ketersediaan energi pada periode 2020-2024 mengalami

fluktuasi dari 2.545 pada tahun 2020, menjadi 3.978 kk/kap/hari pada tahu 2024. Ketersediaan energi pada tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Bengkalis telah melebihi standar yang ditetapkan, dimana dalam Widyakarya Pangan dan Gizi standar yang dianjurkan untuk ketersediaaan pangan adalah 2.400 kalori/kapita/hari.

Begitu juga halnya dengan ketersediaan protein pada tahun 2020-2024 yang sudah sangat baik. Selama periode 2020-2024 ketersediaan protein di Kabupaten Bengkalis telah melebihi standar yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi standar yang dianjurkan untuk ketersediaaan protein adalah 63 gram/kapita/hari. Akan tetapi pada tahun 2021 ketersediaan protein mengalami penurunan menjadi 59,18 gram/kapita/tahun dan naik pada tahun 2023 menjadi 71,74 gram/kapita/hari, namun mengalami penurunan menjadi 38,98 pada tahun 2024.

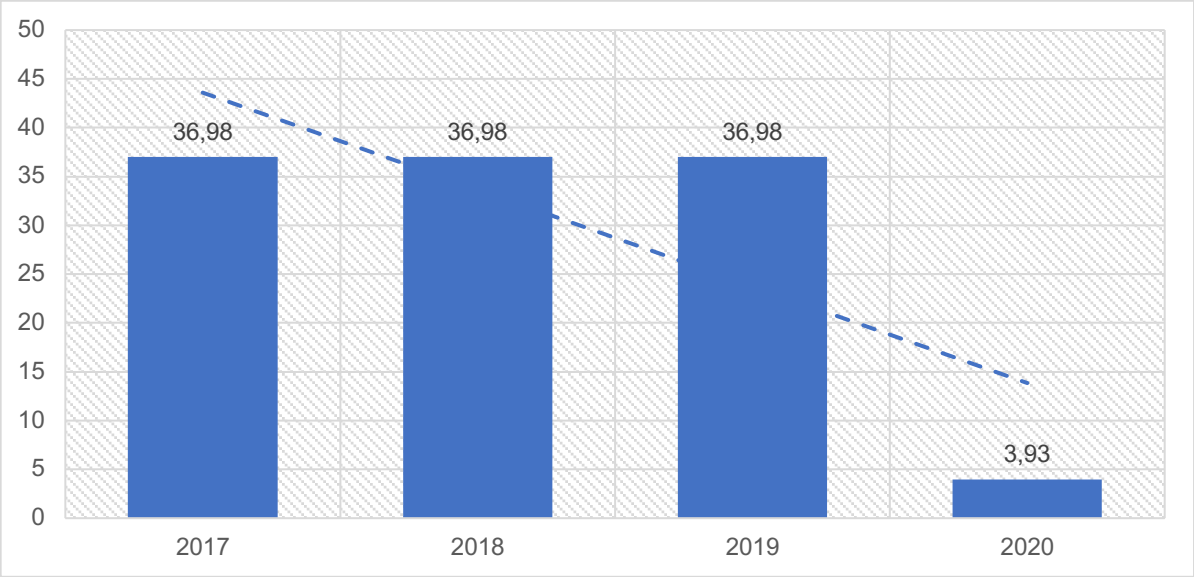
Adapun skor pola pangan harapan (PPH) pada tahun 2020 mencapai 87,9, meningkat hingga tahun 2022 menjadi 92,2 namun turun menjadi 91,1 pada tahun 2024. Sedangkan persentase desa bebas dari rawan pangan pada tahun 2020 mencapai 75,5, meningkat pada tahun 2021 menjadi 81,9, turun kembali pada tahun 2022 menjadi 60 dan meningkat menjadi 89 pada tahun 2023 dan 98,7 pada tahun 2024.

Perhatian pada aspek daya beli dan pemerataan penyebaran atau distribusi bahan pangan agar dapat diakses dengan mudah dan murah sampai pada tingkat rumah tangga masih sangat diperlukan, terutama pada beberapa wilayah terluar sepertu pulau Rupat. Jaminan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh aspek ketersediaan, tetapi juga aspek distribusi dan konsumsi. Kemampuan konsumsi akan ditentukan oleh daya beli dan pengetahuan pangan dan gizi sampai tingkat rumah tangga. Oleh sebab itu, urusan pangan tidak hanya mengurusi ketersediaan tetapi juga advokasi dan pembinaan pengetahuan pangan dan gizi bagi masyarakat.

2.1.4.4.2.4 Urusan Pertanahan

Kinerja urusan Pertanahan di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis cukup peduli dalam memfasilitasi masyarakat guna memiliki lahan yang memiliki kekuatan hukum. Sejak tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan program pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mendata aset Pemerintah berupa penerbitan sertifikat tanah melalui pendanaan secara komprehensif adalah langkah konkrit didalam menertibkan aset. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Sehingga perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap. Dimana pada tahun 2017 persentase luas lahan bersetifikat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar 36,98%, jumlah ini tidak banyak mengalami perubahan (cederung stagnan) hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan kinerja yang sangat signifikan. Dimana, Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bengkalis hanya sebesar 3,93%. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bengkalis dapat ditingkatkan, agar tidak terjadi berbagai masalah seperti konflik pertanahan.



Sumber: Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, 2022

Gambar II.79 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020

2.1.4.4.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Pengukuran terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam melakukan perumusan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan lingkungan hidup.

Pada tahun 2024, didapatkan IKLH Kabupaten Bengkalils sebesar 68,57,47 dengan capaian 93,96% dari target 70,61. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 70,47 maka capaian IKLH mengalami penurunan. Hal tersebut karena adanya penurunan indeks kualitas air akibat pencemaran, ketersediaan dan fluktuasi debit air, penggunaan air, dan tingkat erosi dan sedimentasi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya mengalami peningkatan Kategori Baik dari tahun 2020-2023, namun turun menjadi cukup baik. Nilai IKLH Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah 68,57, turun dari tahun 2020 yang mencapai 70,67. Penurunan ini disebabkan terjadinya penurunan pada Indeks Kualitas Udara (IKU) dari 50,95 pada tahun 2020, menjadi 91,37 pada tahun 2024. Selanjutnya diikuti oleh fluktuasi menurun pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 56,73 pada tahun 2020, menjadi 56,38 pada tahun 2024.

Tabel II.102 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH	Kategori
2020	50,95	96,51	56,73	70,67	Baik
2021	51,67	96,91	54,25	70,55	Baik
2022	50,83	96,26	56,5	70,47	Baik

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH	Kategori
2023	50.56	97.36	56.38	70.89	Baik
2024	51,11	91,37	56,38	68,57	Cukup Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis 2025

Selanjutnya perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti beban pencemaran, ketersediaan dan fluktuasi debit air, penggunaan air, dan tingkat erosi serta sedimentasi. Namun, hasil identifikasi menunjukkan bahwa beberapa parameter pengukuran melebihi baku mutu, yang menandakan adanya pencemaran akibat aktifitas *nonpoint source* seperti limbah pertanian, peternakan, dan limbah domestik dari aktifitas masyarakat sepanjang aliran sungai. Selain itu, kondisi sungai cenderung mengalami penurunan status mutu air. Hal ini disebabkan kualitas sungai yang menjadi titik pantau mengalami pencemaran air limbah dari proses produksi pabrik pengolahan kelapa sawit.

Altematif solusi atau rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam menjaga kualitas air adalah:

a. Melakukan pemantauan kualitas air secara terus-menerus atau periodik pada badan air atau aliran sungai dan menambah jumlah sungai yang menjadi titik pantau dengan mengutamakan sungai yang belum padat aktivitas dan belum tercemar. Penambahan jumlah sungai yang menjadi titik pantau IKA agar dapat disesuaikan dengan jumlah sungai yang ada di Kabupaten Bengkalis.
b. Meningkatkan intensifikasi pengawasan dan pembinaan terhadap aktifitas atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.
c. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan dan pengukuran kualitas air.
d. Memperkuat peran laboratorium lingkungan dalam mendukung kegiatan pemantauan dan penegakan pelaku usaha dan/ atau kegiatan
e. Meningkatkan sinergitas dengan stakeholder terkait dalam upaya penurunan beban pencemar serta pemulihan kualitas badan air melalui penyediaan SPALD-S (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat) pada wilayah sepanjang bantaran sungai yang padat aktifitas domestik dan sungainya telah tercemar dan menyediakan SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat) secara bertahap pada masing-masing kecamatan. Hal ini bisa mengurangi beban pencemar air limbah yang masuk ke sungai. Cara ini bisa meningkatkan nilai IKAdan mengurangi faktor sumber pencemar yang berasal dari nonpoint sources. Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang tertuang dalam raport hasil penilaian IKLH yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui aplikasi IKLH, yaitu pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah terutama IPAL domestik dan USK.
f. Perbaikan kualitas air sungai melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang peduli terhadap sungai seperti program prokasih (programkali bersih) dan perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat terkait sumber-sumber pencemar, serta pembentukan kelompok masyarakat peduli sungai.
g. Sedangkan Indek Kualitas Udara (IKU) dipengaruhi oleh faktor alam seperti kondisi cuaca (arah angin, kecepatan angin, suhu, curah hujan, bentang alam, bencana lingkungan dan potensi kebakaran. Selain itu capaian luasan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)terutama kebun raya dan taman kehati di Kabupaten Bengkalis belum terpenuhi. Saat ini luas RTH di Kabupaten Bengkalis masih sangat kecil yaitu sebesar 6,94 hektar atau belum mencapai 1 % dari target seharusnya berdasarkan amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2022, bahwa RTH Publik yang harus dipenuhi sebesar 20% dari total luas wilayah kota atau Kawasan perkotaan.

Altematif solusi atau rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam menjaga kualitas udara adalah:

a. Membuat aturan yang lebih kuat untuk mengontrol polusi udara, dan menegakkan hukum lingkungan.
b. Penerapan pelaksanaan pengendalian sumber emisi terutama pada sektor industri dan pemerintah yang dapat mempengaruhi kualitas udara.
c. Menanam lebih banyak pohon di kota dan di sepanjang jalan-jalan besar dan menambah luasan RTH di setiap kecamatan, desa, RT dan RW.
d. Memberikan informasi yang akurat tentang kualitas udara kepada masyarakat untuk membantu mengurangi polusi.
e. Memasang alat untuk memantau kualitas udara di kota (AQMS).
f. Mengajak orang-orang dan organisasi untuk membantu meningkatkan kualitas udara di kota.

Adapun Indeks Kualitas Lahan (IKL) dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi dan kolaborasi yang mampu menciptakan sistem dan jaringan kerja untuk mengkompilasi capaian kinerja kegiatan terkait peningkatan luasan lahan yang dilakukan para pihak, baik antar perangkat daerah, sektor swasta, mitra pembangunan dan kelompok peduli lingkungan yang melakukan kegiatannya di wilayah Kabupaten Bengkalis. Selain itu dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan luasan tutupan lahan meliputi kegiatan restorasi ekosistem mangrove, penyediaan RTH dan pemulihan lahan kritis di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis belum proporsional.

Bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas tutupan lahan dengan meningkatkan luas tutupan lahan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove, penghijauan sempadan jalan, lahan pekarangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penambahan luasan RTH sebaiknya dilakukan pada tiap kecamatan, desa, RT dan RW dalam rangka pengayaan dan pemeliharaan tutupan lahan, serta penyediaan Kebun Raya dan Taman Kehati di Kabupaten Bengkalis melalui penetapan Keputusan Bupati.

2.1.4.4.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diukur melalui beberapa indikator seperti jumlah penduduk yang memiliki KTP, rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk, rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah dan Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Tabel II.103 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Penerapan KTP Nasional Bebasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Jumlah penduduk yang memiliki KTP	419.275	10.629	423.191	440.546	468.762
4	Rasio Penduduk ber KTP per satuan	99%	99,93%	99,98%	97,66%	99,45%
5	Rasio pasangan berakte nikah	60	55.94	62,02	70,7	80,62

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, 2025

Secara umum capaian indikator administrasi dan catatan sipil di Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten yang konsisten tersedia sepanjang periode 2020-2024. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan data kependudukan yang akurat dan *up-to-date*. Ini merupakan langkah fundamental dalam upaya perbaikan administrasi kependudukan, karena database yang komprehensif dan terkelola dengan baik memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemberian layanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) juga telah dilaksanakan secara konsisten sepanjang periode tersebut. Keberadaan KTP Nasional berbasis NIK adalah indikator penting dari kemajuan dalam sistem identitas nasional, yang memastikan setiap warga negara memiliki identitas resmi yang diakui secara nasional. Hal ini tidak hanya mempermudah proses administrasi dan pelayanan publik, tetapi juga memperkuat upaya pemerintah dalam pencegahan pemalsuan identitas dan penipuan.

Selanjutnya indikator jumlah penduduk yang memiliki KTP pada tahun 2020, mencapai 419.275 orang, dan terus meningkat hingga pada tahun 2024 menjadi 468.762 orang. Hal ini diikuti oleh Rasio Penduduk ber KTP per satuan selama periode 2020-2024 menunjunjukkan capaian yang tinggi yaitu berada diatas 99%.

Selain itu perkembangan pada indikator rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2020 mencapai 60%, meningkat hingga tahun 2024 menjadi 80,62%. Peningkatan kepemilikan akta nikah juga berkontribusi terhadap naiknya persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Pada tahun 2020, angka kepemilikan KIA masih berada di angka 21,09%, namun secara bertahap meningkat hingga mencapai 62,25% pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 58,14%, upaya peningkatan cakupan kepemilikan identitas bagi anak tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah akan terus melakukan perbaikan layanan administrasi kependudukan serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan guna memastikan hak-hak warga negara, terutama anak-anak, dapat terpenuhi dengan baik.

Tabel II.104 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bengkalis	35,14%	44,76%	53,74%	72,48%	70,83%
2	Bantan	48,42%	58,44%	73,48%	78,09%	81,79%
3	Bukit Batu	43,15%	61,92%	59,94%	70,01%	87,31%
4	Mandau	8,26%	35,35%	54,06%	66,01%	79,13%
5	Rupat	36,70%	56,48%	41,61%	57,98%	73,20%
6	Rupat Utara	52,39%	61,85%	59,75%	68,38%	69,47%
7	Siak Kecil	38,27%	66,38%	63,66%	72,34%	80,06%
8	Pinggir	5,87%	22,53%	35,61%	49,02%	79,90%
9	Bandar Laksamana	31,80%	53,37%	60,33%	69,18%	58,44%
10	Talang Muandau	17,64%	34,41%	38,37%	58,14%	74,27%
11	Bathin Solapan	8,65%	29,48%	37,37%	50,05%	67,63%
Kabupaten Bengkalis		21,09%	40,26%	49,28%	62,25%	58,14%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, 2025

Sementara itu persentase kepemilikan KIA terbanyak berada di Kecamatan Bukit Batu mencapai 87,31% dan Kecamatan Bantan mencapai 81,79%. KIA yang merupakan bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya KTP untuk orang dewasa pada umumnya merupakan salah satu program baru yang menjadi wewenang pemerintah daerah untuk menerbitkannya melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Karena itu proses penerbitan KIA ini masih dalam tahap pengembangan menuju penyempurnaan sistem penerbitan, sehingga masih banyak penduduk dibawah usia 17 tahun yang belum memilikinya. Kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya KIA dapat menjadi salah satu solusi dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk membuat KIA bagi anak berusia 17 tahun kebawah.

2.1.4.4.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perkembangan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perkembangan yang sangat baik, terutama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Sepanjang tahun 2020-2024, jumlah BUMDesa aktif tercatat sebanyak 136, yang didukung dengan adanya keorganisasian yang aktif dan adanya penyertaan modal ke BUMDesa aktif. Selain itu, faktor lain yang turut mendukung keaktifan BUMDesa adalah kondisi sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang tergolong cukup baik. Dari total 136 desa yang ada di Kabupaten Bengkalis, seluruhnya telah memiliki fasilitas perkantoran yang memadai. Hal ini menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Dengan kondisi ini, diharapkan desa-desa di Kabupaten Bengkalis semakin mandiri dalam mengembangkan potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel II.105 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	BUM Desa Aktif	136	136	136	136	136
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	136	136	136	136	136

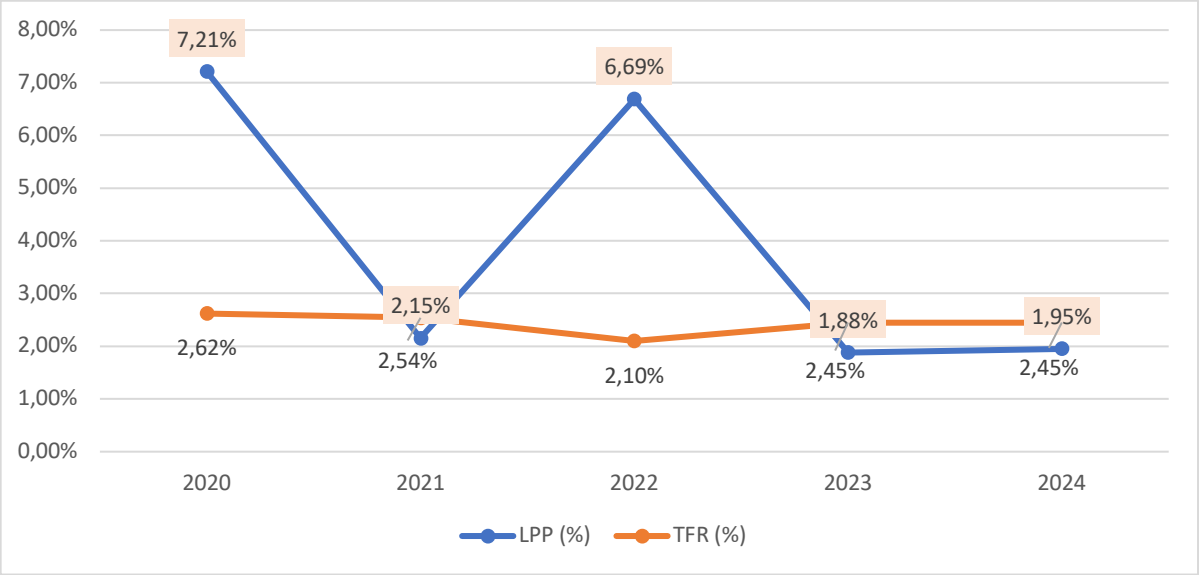
No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	155	155	155	155	155
4	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	7	7	11	11	11
5	Persentase LPM Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase PosyanduAktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, 2025

Indikator urusan pemberdayaan masyarakat desa lainnya adalah persentase LPM dan PKK aktif di Kabupaten Bengkalis. Dalam lima tahun terakhir jumlah LPM di Kabupaten Bengkalis sebanyak 155 dan sudah aktif 100%. Diikuti oleh perkembangan rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK dari 7 pada tahun 2020 menjadi 11 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa LPM dan PKK di Kabupaten Bengkalis sudah berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam penggerak kesejahteraan keluarga. Sementara itu persentase posyandu aktif telah mencapai 100% selama periode 2020-2024.

2.1.4.4.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelayanan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diukur dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total *Fertility Rate* (TFR). Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menunjukkan fluktuasi menurun dari 7,21% pada tahun 2020, menjadi 2,15% pada tahun 2021, selanjutnya kembali meningkat menjadi 6,69% pada tahun 2022, namun kembali turun menjadi 1,88% pada tahun 2023 dan sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 1,95%. Sementara itu, TFR, yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan hingga akhir masa reproduksinya berdasarkan pola fertilitas saat perhitungan dilakukan, tercatat sebesar 2,62% pada tahun 2020. Angka ini menurun hingga 2,10% pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 2,45% pada tahun 2023, dan tetap berada di angka yang sama pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan intervensi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara lebih terarah dan berkelanjutan, melalui perluasan cakupan layanan, intensifikasi edukasi kesehatan reproduksi, serta optimalisasi peran penyuluh dan kader di tingkat tapak sebagai ujung tombak perubahan perilaku masyarat. Berikut adalah Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.80 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Secara umum, indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian yaitu Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) menunjukkan penurunan dari 21,5 pada tahun 2020 menjadi 14,7. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*) juga mengalami penurunan, dari 19,50% pada tahun 2020 menjadi 6,61% pada tahun 2024. Selanjutnya Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih tergolong rendah, yaitu 11,50% pada tahun 2024. Sementara itu, Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB mengalami penurunan dari 48,80% pada tahun 2020 menjadi 36,97% pada tahun 2024, dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB juga sedikit menurun, dari 7,10% pada tahun 2020 menjadi 6,25% pada tahun 2024.

Sudah terdapat kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk di Kabupaten Bengkalis, namun didalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi diantaranya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, terutama tenaga penyuluh lapangan yang memiliki kualifikasi dan kapasitas memadai untuk mendampingi masyarakat secara efektif. Selain itu, belum optimalnya koordinasi lintas perangkat juga menghambat keterpaduan pelaksanaan program di lapangan. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengendalian jumlah dan kualitas penduduk, khususnya di wilayah perdesaan dan pesisir, menyebabkan rendahnya partisipasi dalam program KB dan edukasi kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan yang telah ada memerlukan penguatan dari sisi implementasi melalui peningkatan kapasitas SDM, integrasi lintas sektor, perluasan akses informasi, serta pengawasan dan evaluasi kebijakan yang lebih sistematis dan berbasis data. Berikut adalah perkembangan

Indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024, yaitu:

Tabel II.106 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	28,8	100%	100%	100%	100%
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	12,50%	25%	50%	50%	100%
Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	1	1	3	4	1
Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	8	8	8	8	8
Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	1	1	1	1	1
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 – 3
Rasio Akseptor KB	45,30%	47,40%	42,90%	63,45%	72,75%
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	62,00%	62,40%	62,60%	64,10%	60,67%
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15- 19 tahun (ASFR 15-19)	21,5	25,3	17,5	14,7	14,7
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun	19,80%	21,44%	21,65%	21,66%	21,66%
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	19,50%	20,01%	20,65%	12,70%	6,61%
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10,40%	14,20%	8,33%	10,44%	11,54%
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	68,25%	76,50%	78,30%	81,30%	72,75%
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	55,29%	54,20%	56,30%	54,12%	55,88%
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB	48,80%	48,70%	51,30%	36,90%	36,97%
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	7,10%	7,20%	7,00%	7,60%	6,25%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.4.4.2.9 Urusan Perhubungan

Pelayanan pada urusan perhubungan diukur salah satunya melalui indikator jumlah uji kir angkutan umum. Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian terhadap setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Jumlah uji kir angkutan umum pada tahun 2020 tercatat sebesar 4.167, namun

turun pada tahun 2021 menjadi 3.528 dan kembali meningkat hingga tahun 2024 menjadi 18.562. Selain melakukan uji kir angkutan umum, masih terdapat beberapa indikator lain yang menjadi ukuran kinerja dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis. Untuk mengetahui perkembangan indikator Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.107 Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	2.850	2.984	2.740	3.726	3.836
Rasio Izin Trayek	0,00040%	0,00060%	0,00080%	0,00050%	0,000500%
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	4.167	3.528	3.675	4.203	18.562
Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis	6	6	6	6	6
Persentase Layanan Angkutan Darat	0,089%	0,094%	0,079%	0,098%	0,10%
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	26,14 %	28,34 %	34,54 %	34,23 %	35.55%
Pemasangan Rambu-rambu	5.684	5684	5799	6040	
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0.01077	na	na	na	0.41
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	4.845	6.334	6.435	6.707	7.151
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Pertahun	27.618	41.557	148.523	174.853	16.845

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2025

Jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan, dari 2.850 pada tahun 2020 menjadi 3.836 pada tahun 2024. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum juga menunjukkan tren yang sama, meningkat dari 4.845 pada tahun 2020 menjadi 7.151 pada tahun 2024. Sementara itu, Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun mengalami penurunan signifikan, dari 27.618 pada tahun 2020 menjadi 16.845 pada tahun 2024. Rasio izin trayek juga mengalami peningkatan, dari 0,00040% pada tahun 2020 menjadi 0,000500% pada tahun 2024.

Dari sisi kepemilikan kendaraan, persentase kepemilikan KIR angkutan umum meningkat dari 26,14% pada tahun 2020 menjadi 35.55% pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus hingga tahun 2024 masih tetap berjumlah 6. Pada aspek layanan angkutan menunjukkan perkembangan persentase layanan angkutan darat mengalami fluktuasi, dari 0,89% pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,094% pada tahun 2021, namun mengalami penurunan menjadi 0,079% pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 0,098% pada tahun 2023 serta 0.10% pada tahun 2024. Selain itu, pemasangan rambu-rambu juga mengalami peningkatan, dari 5.684 pada tahun 2020 menjadi 6.040 pada tahun 2023.

2.1.4.4.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan komunikasi dan informatika di Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren yang cukup positif dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Cakupan Layanan Telekomunikasi Desa/Kelurahan tetap stabil pada angka 96,32% sejak tahun 2020

hingga 2024, mencerminkan akses telekomunikasi yang sudah merata di wilayah Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi antar Perangkat Daerah pada tahun 2020 telah mencapai 100%, namun turun menjadi 21,41% pada tahun 2021, kemudian kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 96% pada tahun 2024. Adapun perkembangan SPBE terus mengalami peningkatan dari 2,21 pada tahun 2022, menjadi 2,79 pada tahun 2024.

Tabel II.108 Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informastika di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	29,96%	29,96%	84,04%	84,04%	84,04%
Cakupan Layanan Telekomunikasi Desa/Kelurahan	96,32%	96,32%	96,32%	96,32%	96,32%
Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi antar Perangkat Daerah	100%	21.41%	23%	89,36%	96%
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Menggunakan HP/Mengakses Internet	23,25	86,89	87,68	87,59	86,1
Persentase/Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	29,96	29,96	84,04	84,04	84,04
Persentase/Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	21,43	19,33	19,08	17,5	18,89
Persentase/Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Telepon	1,41	0,93	0,42	1,2	1,2
Persentase/Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Seluler	64,66	64,66	84,69	84,69	84,69
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	na	na	2,21	2,27	2,79

Sumber: BPS dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2025

Selain itu, Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Menggunakan HP/Mengakses Internet menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dari 23,25% pada tahun 2020 menjadi 86,1% pada tahun 2024. Diikuti oleh perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet juga mengalami peningkatan signifikan, dari 29,96% pada tahun 2020 menjadi 84,04% pada tahun 2022, dan angka ini tetap stabil hingga tahun 2024. Namun, Persentase/Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi mengalami sedikit penurunan, dari 21,43% pada tahun 2020 menjadi 18,89% pada tahun 2024. Sementara itu, Persentase/Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Telepon mengalami fluktuasi, dengan angka 1,41% pada tahun 2020, sempat turun hingga 0,42% pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 1,2% pada tahun 2023 dan 2024.

Adapun indikator lain dalam urusan komunikasi dan informatika adalah Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, yaitu pada tahun 2024 sudah mecapai 445 KIM per kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan dengan jumlah Kim terbanyak adalah Kecamatan Rupat dengan 114 KIM. Sedangkan kecamatan Tualang Muandau sama sekali belum memiliki Kelompok Informasi Masyarakat.

Tabel II.109 Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakt pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah KIM	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM
1.	Bengkalis	1	34	34
2.	Bantan	1	8	8
3.	Siak Kecil	1	16	16
4.	Pinggir	1	19	19
5.	Mandau	1	17	17
6.	Bukit Batu	1	13	13
7.	Rupat	1	114	114
8.	Rupat Utara	1	87	87
9.	Bandar Laksemana	1	56	56
10.	BathinSolapan	1	81	81
11.	Talang Muandau	1	-	-
	KabupatenBengkalis	12	445	37

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2020-2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis juga berhasil mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan pengelolaan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan. Beberapa prestasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.110 Prestasi PPID Utama Kabupaten Bengkalis 2020-2024

No	Jenis Prestasi	Tahun
1	Juara II Kualifikasi Menuju Kabupaten Kota Se Provinsi Riau	2020
2	Juara II Kualifikasi Informatif Kategori Kabupaten Kota Se Provinsi Riau	2021
3	Terbaik I Informatif Katagori Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau	2022
4	JuaraIII Peringkat Informatif Katagori Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	2023
5	Peringkat VII - Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	2024

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2025

Selain beberapa indikator di atas, terdapat pula salah satu indikator yang menjadi ukuran pemerataan jaringan komunikasi antar wilayah pedesaan/keluarahan di Kabupaten Bengkalis. Data Wilayah (Kelurahan/Desa) yang belum tercover mobile broadband 4G di Kabupaten Bengkalis semakin membaik dari tahun sebelumnya. Meskipun cakupan jaringan semakin luas, namun masih terdapat cukup banyak desa yang belum terjangkau layanan mobile broadband 4G. Berikut adalah data wilayah (kelurahan/desa) yang belum tercover mobile broadband 4G di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024.

Tabel II.111 Data Wilayah (Kelurahan/Desa) yang Belum Tercover Mobile Broadband 4G di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Kelurahan/Desa	Kecamatan	Listrik	Akses Jalan	Tahun Diusulkan	Kondisi 2024
Pematang Pudu	Mandau	Ada	Ada	2020	Sudah Terealisasi

Kelurahan/Desa	Kecamatan	Listrik	Akses Jalan	Tahun Diusulkan	Kondisi 2024
Harapan Baru	Mandau	Ada	Ada	2020	Sudah Terealisasi
Batin Betuah	Mandau	Ada	Ada	2020	Sudah Terealisasi
Resam Lapis	Bantan	Ada	Ada	2020	Sudah Terealisasi
Bantan Timur	Bantan	Ada	Ada	2020	Belum Terealisasi
Muntai	Bantan	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Ulu Pulau	Bantan	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Kembung Baru	Bantan	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Bantan Tengah	Bantan	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Kuala Alam	Bengkalis	Ada	Ada	2020	Sudah Terealisasi
Teluk Latak	Bengkalis	Ada	Ada	2020	Sudah Terealisasi
Penampi	Bengkalis	Ada	Ada	2020	Belum Terealisasi
Penampi	Bengkalis	Ada	Ada	2020	Belum Terealisasi
Penampi	Bengkalis	Ada	Ada	2020	Belum Terealisasi
Pangkalan Jambi	Bukit Batu	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Bukit Batu	Bukit Batu	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Tanjung Leban	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2020	Sudah Terealisasi
Tanjung Leban	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Parit I Api-api	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Temiang	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Api-api	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Tenggayun	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Sepahat	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Bukit Kerikil	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Melibur	Talang Muandau	Ada	Ada	2020	Belum Terealisasi
Beringin	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Koto Pait Beringin	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Kuala Penaso	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Melibur	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Tasik Tebing Serai	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Tasik Serai Timur	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Serai Wangi	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Tasik Serai	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Tasik Serai Barat	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Lubuk Muda	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Tanjung Datuk	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Tanjung Belit	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Liang Banir	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Sungai Siput	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Koto Raja	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Lubuk Garam	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Sumber Jaya	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Lubuk Gaung	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Tanjung Damai	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Sepotong	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Langkat	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi

Kelurahan/Desa	Kecamatan	Listrik	Akses Jalan	Tahun Diusulkan	Kondisi 2024
Sungai Nibung	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Sadar Jaya	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Sungai Linau	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Muara Dua	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Bandar Jaya	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Pinggir	Pinggir	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Semunai	Pinggir	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Muara Basung	Pinggir	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Tengganau	Pinggir	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Buluh apo	Pinggir	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Pangkalan Libut	Pinggir	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Sungai Meranti	Pinggir	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Balai Raja	Pinggir	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Titian Antui	Pinggir	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi

Sumber: Dinas Komuniaksi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.4.4.2.11 Urusan Koperasi Usaha kecil Menengah

Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 mencapai 43,70% dan mengalami peningkatan hingga 97,56% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, angka ini mengalami penurunan menjadi 67,00%. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis, mengingat koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi rakyat yang, jika dikelola dengan baik, dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil masih menjadi sektor ekonomi utama bagi masyarakat serta menjadi salah satu sumber mata pencaharian yang penting di Kabupaten Bengkalis. Secara lengkap indikator urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.112 Perkembangan Indikator Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Koperasi Aktif	43,70%	75,15%	94,05%	97,56%	67,00%
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,38%	116%	135%	135%	115%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis, 2025

Berdasarkan data perkembangan koperasi di Kabupaten Bengkalis periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dijelaskan bahwa jumlah koperasi aktif, jumlah anggota, serta volume usaha mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 371 koperasi aktif dengan jumlah anggota 18.936 orang dan volume usaha sebesar Rp18.695.876.332. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan menjadi 390 koperasi aktif dengan 20.328 anggota dan volume usaha sebesar Rp20.050.145.486. Namun, pada tahun 2022 jumlah koperasi aktif menurun menjadi 318, sementara jumlah anggota sedikit meningkat menjadi 20.546 orang, dengan volume usaha juga mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp23.353.449.446. Selanjutnya, pada tahun 2023 jumlah koperasi aktif kembali menurun menjadi 329 dengan anggota 25.397 orang serta volume

usaha sebesar Rp29.040.817.056. Pada tahun 2024, jumlah koperasi aktif tercatat sebanyak 344 unit dengan jumlah anggota meningkat tajam menjadi 26.267 orang, dan volume usaha mencapai Rp29.668.810.303 yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Apabila dianalisis lebih lanjut untuk tahun 2024, Kecamatan dengan jumlah koperasi aktif tertinggi adalah Kecamatan Mandau dengan 80 koperasi. Dari sisi jumlah anggota, Kecamatan Mandau juga menduduki peringkat tertinggi dengan 11.208 anggota koperasi. Sementara itu, dari segi volume usaha, Kecamatan Mandau tetap menjadi yang terbesar dengan total nilai usaha sebesar Rp5.717.341.181. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Mandau berperan signifikan dalam menopang kinerja perkoperasian di Kabupaten Bengkalis, baik dari sisi kelembagaan, partisipasi anggota, maupun skala ekonomi usaha koperasi. Berikut adalah jumlah koperasi aktif menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024, yaitu:

Tabel II.113 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020			2021			2022			2023			2024		
		Aktif	Jumlah Anggota	Volume Usaha	Aktif	Jumlah Anggota	Volume Usaha	Aktif	Jumlah Anggota	Volume Usaha	Aktif	Jumlah Anggota	Volume Usaha	Aktif	Jumlah Anggota	Volume Usaha
1	Bengkalis	58	4.620	2.966.435.953	62	4.887	3.860.921.989	38	4.727	5.750.876.149	40	3.290	5.624.754.623	42	3.258	7.022.668.174
2	Bantan	19	400	2.746.768.212	26	383	1.045.615.892	25	493	1.526.205.597	26	559	2.303.502.145	27	562	2.109.859.169
3	Bukit Batu	44	1.104	3.170.070.137	46	1.094	3.726.067.993	40	925	2.972.182.948	39	715	1.989.679.866	38	1.106	2.580.522.482
4	Bandar Laksamana	23	3.089	395.910.000	23	3.089	395.910.000	21	6.047	286.380.000	21	6.047	840.028.265	22	6.494	4.094.009.673
5	Siak Kecil	32	917	109.024.000	32	917	1.026.442.000	30	709	326.865.500	31	709	210.615.500	33	716	239.515.500
6	Mandau	95	6.205	1.357.734.970	93	7.167	2.683.996.452	73	4.892	3.063.792.302	76	11.110	3.171.842.333	80	11.208	5.717.341.181
7	Bathin Solapan	69	1.822	5.837.583.073	74	1.931	5.037.568.973	60	2.016	7.136.391.750	64	2.220	6.449.773.406	67	2.156	5.960.154.879
8	Pinggir	8	116	-	8	116	123.475.200	8	116	123.475.200	10	116	8.051.731.968	12	116	123.475.200
9	Talang Muandau	5	120	-	6	120		6	120	-	6	120		7	140	-
10	Rupat	12	513	2.078.349.987	14	594	2.116.146.987	13	471	2.133.280.000	12	471	368.005.000	13	471	1.790.380.095
11	Rupat Utara	6	30	34.000.000	6	30	34.000.000	4	30	34.000.000	4	40	30.883.950	3	40	30.883.950
Jumlah		371	18.936	18.695.876.332	390	20.328	20.050.145.486	318	20.546	23.353.449.446	329	25.397	29.040.817.056	344	26.267	29.668.810.303

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.4.4.2.12 Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis diukur melalui empat indikator utama, yaitu Jumlah Investor Berskala Nasional, Nilai Realisasi Investasi, Rasio Daya Serap Tenaga Kerja, serta Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN. Selama periode 2020–2024, Jumlah Investor Berskala Nasional menunjukkan tren peningkatan. Hingga tahun 2024, jumlahnya telah mencapai 1.315 investor, mencerminkan minat investor yang semakin tinggi terhadap peluang investasi di Kabupaten Bengkalis.

Dari sisi Nilai Realisasi Investasi, terjadi fluktuasi meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai investasi berskala nasional tercatat sebesar Rp5.264.557,60 juta, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi Rp4.091.448,12 juta. Namun, pada tahun 2024, nilai investasi kembali meningkat signifikan menjadi Rp8.917.507,62 juta.

Sementara itu, Rasio Daya Serap Tenaga Kerja dari PMA/PMDN juga menunjukkan capaian yang cukup baik. Pada tahun 2024, rasio ini telah mencapai 13,50% meningkat dari tahun 2021 yaitu sebesar 7,18%, yang mencerminkan kontribusi investasi terhadap peningkatan kesempatan kerja di Kabupaten Bengkalis.

Secara keseluruhan, indikator-indikator penanaman modal di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perkembangan yang positif, dengan meningkatnya jumlah investor, pertumbuhan kembali nilai investasi, serta peningkatan daya serap tenaga kerja, yang diharapkan dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel II.114 Perkembangan Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 - 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	161	612	464	1.356	1.315
Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Jutaan)	5.264.557,60	5.760.941,10	4.091.448,12	5.599.344,02	8.917.507,62
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	20,58	7,18	na	na	13,50
Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Rp. Jutaan)	5.208.743,20	5.319.269,20	2.542.549,30	5.296.219,30	3.617.507,62

Sumber: DPMTSP Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.4.4.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat melalui indikator cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersetifikasi, cakupan pembinaan atlet muda, jumlah atlet berprestasi dan persentase Wirausaha Muda. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.115 Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024

Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sarana Olahraga Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis	Jumah	67	67	67	72	95
Jumlah Pemuda Berprestasi atau Pelopor	Angka	3	4	2	3	3
Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang	12	14	26	24	10
Persentase Wirausaha Muda	Persen	0,17	0,17	0,04	0,04	0,04
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	39	75	122	96	103

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, kepemilikan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2025

Jumlah Sarana Olahraga per Kecamatan mengalami peningkatan hingga mencapai 95 unit pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi masyarakat.

Sementara itu, Jumlah Pemuda Berprestasi mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat 3 pemuda berprestasi, meningkat menjadi 4 orang pada tahun 2021. Namun, jumlah ini menurun menjadi 2 orang pada tahun 2022, kemudian kembali meningkat menjadi 3 orang pada tahun 2023 dan bertahan pada angka yang sama hingga tahun 2024.

Selanjutnya Jumlah Prestasi Olahraga menunjukkan hingga tahun 2023, terdapat 24 cabang olahraga yang mencatatkan prestasi, namun pada tahun 2024 jumlah ini mengalami penurunan menjadi 10 cabang. Meskipun demikian, Jumlah Atlet Berprestasi justru mengalami peningkatan, dari 96 atlet pada tahun 2023 menjadi 103 atlet pada tahun 2024, menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam pembinaan atlet di Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan Persentase Wirausaha Muda mengalami penurunan dari 0,17 pada tahun 2020 menjadi 0,04 pada tahun 2024, yang dapat menjadi perhatian dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan di kalangan pemuda. Sementara itu, Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif menunjukkan angka yang cukup stabil, dengan capaian sebesar 0,86% selama periode 2020–2024.

2.1.4.4.2.14 Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Bengkalis dapat diukur oleh indikator ketersediaan Buku "kabupaten dalam angka" dan Buku "PDRB". Buku Kabupaten Bengkalis Dalam Angka telah tersedia setiap tahunnya, adapun yang telah dirilis sampai dengan tahun 2024. Begitu pula dengan buku PDRB Kabupaten Bengkalis, dimana pada tahun 2024 juga telah tersedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.116 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024

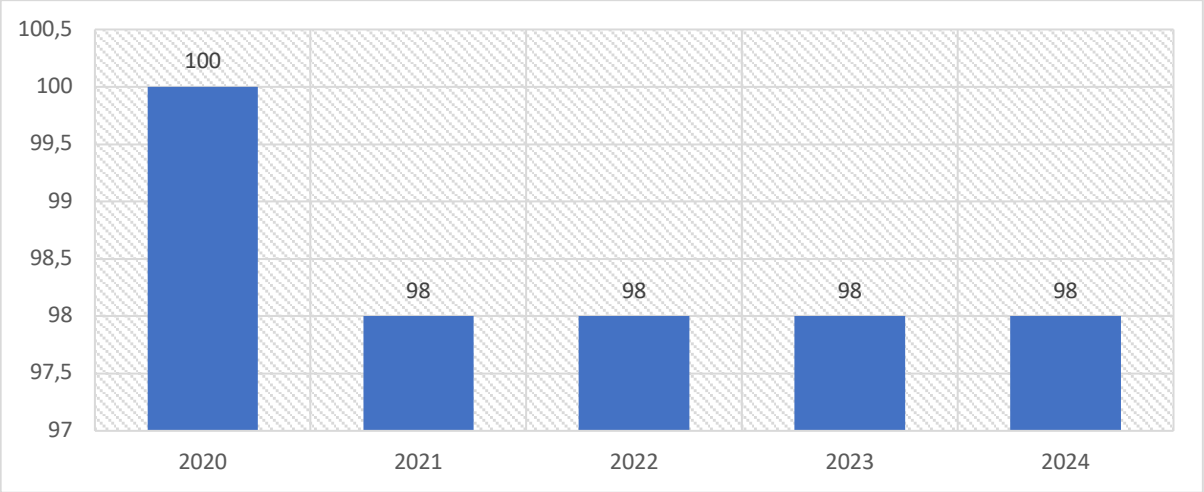
Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Buku ”kabupatendalamangka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku ”PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
TersedianyaSistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase Satu Data Kabupaten Bengkalis	65%	84,21%	96%	100%	100%

Sumber: Dinas Komuniaksi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.4.4.2.15 Urusan Persandian

Kabupaten Bengkalis telah menggunakan persandian dalam mengelola informasi penting daerah. Pada tahun 2020 persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi sudah mencapai 100%, namun turun menjadi 98% selama periode 2021-2024. Berikut adalah persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.



Sumber: Dinas Komuniaksi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.81 Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki email senapati dan sertifikat elektronik di Kabupaten Bengkalis menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Hampir seluruh OPD di Kabupaten Bengkalis telah memiliki sertifikat elektronik, namun masih terdapat dua OPD yang belum memiliki sertifikat elektronik. Lebih rinci dapat diamati pada tabel berikut.

Gambar II.82 Organisasi Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Email Senapati dan Sertifikat Eletronik di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Jenis Persandian	
		Email Senapati	Sertifikat Eletronik
1	Sekretariat Daerah	√	√
2	Sekretariat DPRD	√	√
3	Inspektorat	√	√
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	√	√
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	√

No	Nama Perangkat Daerah	Jenis Persandian	
		Email Senapati	Sertifikat Eletronik
7	Badan Penelitian dan Pengembangan	√	√
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	√
9	Badan Pendapatan Daerah	√	√
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√	√
11	Dinas Ketahanan Pangan	√	√
12	Dinas Pendidikan	√	√
13	Dinas Kesehatan	√	√
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	√	√
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	√	√
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	√	√
17	Dinas Lingkungan Hidup	√	√
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	√	√
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	√
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	√
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	√	√
22	Dinas Perhubungan	√	√
23	Dinas Sosial	√	√
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√	-
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√
26	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	√	√
27	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	√	√
28	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	√	√
29	Dinas Perikanan	√	√
30	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perternakan	√	√
31	Dinas Pemadam Kebakaran	√	-
32	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi	√	√
33	Dinas Perkebunan	-	√
34	Satuan Polisi Pamong Praja	√	√
35	RSUD Bengkalis	√	√
36	RSUD Mandau	√	√
37	Kecamatan Bengkalis	√	√
38	Kecamatan Bantan	√	√
39	Kecamatan Bukit Batu	√	√
40	Kecamatan Siak Kecil	√	√
41	Kecamatan Bandar Laksamana	√	√
42	Kecamatan Bathin Solapan	√	√
43	Kecamatan Mandau	√	√
44	Kecamatan Pinggir	√	√
45	Kecamatan Talang Muandau	√	√
46	Kecamatan Rupat	√	√
47	Kecamatan Rupat Utara	√	√

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2025

2.1.4.4.2.16 Urusan Kebudayaan

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan kebudayaan ditentukan oleh beberapa indikator yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya; benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pada tahun 2020, penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya berlangsung satu kali. Hal ini disebabkan oleh pandemi yang berdampak pada pembatasan kegiatan

masyarakat, sehingga berbagai perencanaan yang telah disusun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seiring dengan pelonggaran aktivitas dan adaptasi kebiasaan baru, jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan meningkat menjadi tiga kegiatan pada tahun 2021 dan bertambah menjadi lima kegiatan pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, jumlah festival seni dan budaya mengalami sedikit penurunan, masing-masing menjadi empat kegiatan.

Sementara itu, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkalis menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlahnya tercatat sebanyak 24 situs. Kemudian, pada tahun 2023 dan 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi 37 situs. Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya upaya identifikasi, pemeliharaan, serta pengelolaan benda, situs, dan kawasan cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya kepemilikan benda dan situs budaya, jumlahnya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021, total benda dan situs yang dimiliki daerah tercatat sebanyak 26, kemudian meningkat menjadi 42 pada tahun 2022. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024 dengan total 77 benda dan situs yang dimiliki. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.117 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	3	5	4	4
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	24	24	24	37	37
Total Benda, situs & dimiliki daerah	26	26	42	77	77
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100%	100%	48,05%	48,05%	48,05%
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	41	41	46	52	33

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2025

Jika dilihat dari persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, pada tahun 2020 dan 2021 capaian mencapai 100%. Namun, pada tahun 2022 hingga 2024, persentase ini mengalami penyesuaian menjadi 48,05%. Selain itu jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu, pada tahun 2020 dan 2021 jumlahnya tercatat sebanyak 41, kemudian mengalami peningkatan menjadi 46 pada tahun 2022 dan mencapai angka tertinggi sebesar 52 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu mengalami penyesuaian menjadi 33. Meskipun demikian, hal ini tetap mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola dan menjaga kelestarian cagar budaya agar tetap dapat dimanfaatkan dengan optimal bagi kepentingan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan.

2.1.4.4.2.17 Urusan Perpustakaan

Kinerja pelayanan pada urusan perpustakaan di Kabupaten Bengkalis diukur melalui indikator jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 260.846 orang. Namun, angka ini mengalami tren

penurunan hingga mencapai 32.929 pengunjung pada tahun 2024. Penurunan jumlah kunjungan ini sejalan dengan perubahan pola akses literasi di masyarakat, yang semakin banyak beralih ke sumber informasi digital. Selain itu, indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun 2022 mencapai 63,04, namun mengalami penurunan menjadi 38,62 pada tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemerataan pelayanan perpustakaan, ketercukupan koleksi bacaan, ketersediaan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, keberadaan perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan peningkatan jumlah anggota perpustakaan.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya mengembangkan inovasi dalam layanan perpustakaan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Penguatan program literasi digital, peningkatan akses terhadap koleksi bacaan berbasis teknologi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Lebih rinci dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel II.118 Jumlah Pengunjung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabuapten Bengkalis Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	260.846	31.459	37.297	38.371	32.929
Jumlah orang populasi yang dilayani	260.846	31.459	37.297	38.372	32.929
Pembangunan Literasi Masyarakat	0	0	63,04	53,86	38,62

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2025

Selain persentase kunjungan perpustakaan, terdapat indikator lain dalam urusan perpustakaan, yaitu rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Indikator ini dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel II.119 Koleksi Buku yang Tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	6.700	154.045	155.723	643	1.646

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2025

Untuk jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sebanyak 6.700 koleksi judul buku, meningkat signifikan hingga mencapai 155.723 koleksi buku pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 koleksi buku turun menjadi 643 dan kembali meningkat menjadi 1.646 pada tahun 2024.

Tabel II.120 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Urai an	2020	2021	2022	2023	2024

No	Urai an	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perpustakaan	295	295	460	465	465
2	Jumlah penduduk	565.569	573.504	582.970	658.846	671.725
Rasio perpustakaan Dengan jumlah penduduk		0,052	0,051	0,079	0,070	0,069

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2025

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Bengkalis meningkat dari 295 unit perpustakaan pada tahun 2020, meningkat pada tahun 2024 menjadi 465 unit. Adapun rasio perpustakaan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 0,052, meningkat hingga tahun 2022 menjadi 0,079 dan sedikit turun hingga tahun 2024 menjadi 0,069.

2.1.4.4.2.18 Urusan Kearsipan

Kinerja pelayanan pada urusan kearsipan dapat dilihat melalui indikator persentase pengelolaan arsip secara baku. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase pengelolaan arsip secara baku baru pada tahun 2020-2022 telah mencapai 80%, meningkat pada tahun 2023-2024 menjadi 96%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2024 sudah 44 dari total 46 perangkat daerah Kabupaten Bengkalis melakukan pengelolaan arsip secara baku. Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan tercatat sebesar 1% pada tahun 2020, naik menjadi 5% pada 2022, stabil di angka 5% pada 2023, dan menurun menjadi 3% pada 2024.

Tabel II.121 Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

IndikatorKinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengelolaan arsip secara baku	80%	80%	80%	96%	96%
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	1%	1%	5%	5%	3%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.4.4.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, serta kelautan dan perikanan.

2.1.4.4.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pelayanan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat melalui sejumlah indikator utama, yaitu produksi perikanan, konsumsi ikan, cakupan bina kelompok nelayan, produksi perikanan kelompok nelayan, serta pendapatan rata-rata nelayan per tahun. Selama periode 2020–2024, capaian indikator tersebut menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi namun cenderung positif pada tahun terakhir pengamatan. Produksi perikanan tercatat sebesar 7.013,87 ton pada tahun 2020, meningkat menjadi 8.000,04 ton pada tahun 2021, dan meningkat menjadi 11.513,62 ton pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 produksi mengalami penurunan signifikan menjadi 6.033,59 ton, sebelum kembali meningkat secara tajam

pada tahun 2024 sebesar 11.743,71 ton. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi cuaca ekstrem yang memengaruhi hasil tangkapan nelayan, keterbatasan sarana dan prasarana tangkap, serta pergeseran aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Meskipun demikian, peningkatan di tahun 2024 menunjukkan adanya pemulihan dan perbaikan dalam aktivitas perikanan baik tangkap maupun budidaya.

Perkembangan indikator lainnya juga menunjukkan dinamika positif. Produksi perikanan kelompok nelayan meningkat dari 5.947,97 ton pada tahun 2020 menjadi 6.077,41 ton pada tahun 2024, setelah mengalami penurunan pada tahun 2023. Cakupan bina kelompok nelayan yang sempat menurun dari 67 kelompok pada tahun 2020 menjadi 40 kelompok pada tahun 2022, kembali meningkat menjadi 52 kelompok pada tahun 2024, mencerminkan adanya penguatan kelembagaan nelayan di tingkat lapangan. Sementara itu, tingkat konsumsi ikan masyarakat menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 40,89% pada tahun 2020 menjadi 47,41% pada tahun 2024, menandakan tumbuhnya kesadaran gizi dan preferensi masyarakat terhadap protein hewani dari ikan. Dari sisi kesejahteraan, pendapatan rata-rata nelayan meningkat signifikan dari Rp37,20 juta per tahun pada 2020 menjadi Rp92,90 juta per tahun pada 2024, mencerminkan perbaikan ekonomi rumah tangga nelayan. Meskipun demikian, tantangan ke depan tetap mencakup peningkatan produktivitas berkelanjutan, stabilisasi harga hasil tangkapan, serta peningkatan kapasitas usaha nelayan agar subsektor perikanan mampu berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir..

Tabel II.122 Capaian Indikator Perikanan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi perikanan	7.013,87	8.000,04	11.513,62	6.033,59	11.743,71
Konsumsi ikan (%)	40.89	41,39	39,59	42,15	47,41
Cakupan bina kelompok nelayan	67	50	40	80	52
Produksi Perikanan kelompok nelayan	5.947,97	5.896,15	6.069,51	2.767,83	6077,41
Pendapatan Rata-rata Nelayan (Juta Rupiah/ tahun)	37,20	44,64	41,19	43,5	92,9

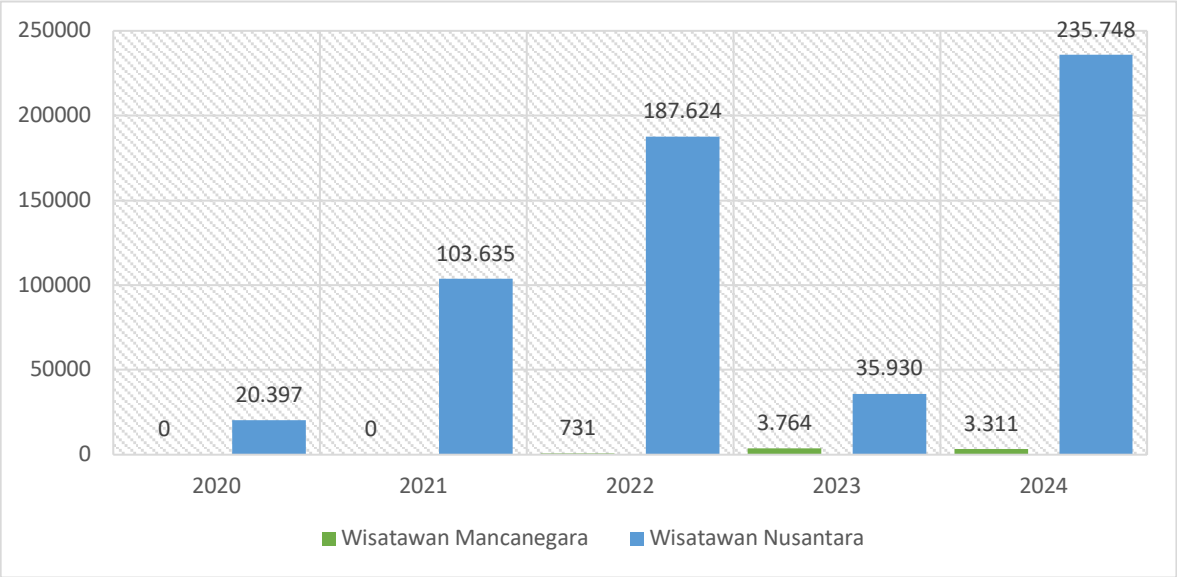
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.4.4.3.2 Urusan Pariwisata

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah jumlah kunjungan wisatawan. Di Kabupaten Bengkalis, jumlah kunjungan wisatawan masih didominasi oleh wisatawan nusantara, yang tercatat sebanyak 235.746 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara masih relatif kecil, yaitu 3.311 jiwa pada tahun yang sama. Data wisatawan mancanegara diperoleh dari Kantor Imigrasi Kabupaten Bengkalis.

Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata ke depan. Namun, masih terdapat tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas wilayah dan optimalisasi promosi kepada wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya

meningkatkan infrastruktur serta memperluas promosi pariwisata guna menarik lebih banyak wisatawan



Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.83 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Selanjutnya pada indikator rata-rata lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Bengkalis terus meningkat dari 2,52 hari pada tahun 2020, menjadi 2,74 hari pada tahun 2024. Durasi kunjungan ini berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran wisatawan selama berada di Kabupaten Bengkalis, yang berkontribusi pada perekonomian daerah. Namun tingkat hunian mengalami penurunan dari 18,85% pada tahun 2020, menjadi 13,25% pada tahun 2024. Sementara itu indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata menunjukkan tren peningkatan dari Rp 4.020,39 juta pada tahun 2020, menjadi Rp. 22.710,85 juta pada tahun 2023 dan sedikit turun menjadi Rp. 21.407,16 juta pada tahun 2024. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata masih belum menggambarkan potensi yang sebenarnya, karena sebagian pengeluaran wisatawan dilakukan langsung kepada masyarakat sehingga sulit untuk dihitung secara akurat.

Sementara itu, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bengkalis juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan domestik mencapai 235.748 jiwa, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan 35.930 jiwa. Adapun jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung pada tahun 2024 mencapai 3.764 jiwa, menunjukkan adanya potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata di masa mendatang. Peningkatan tersebut turut didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata yang juga mengalami pertumbuhan, dari 120 orang pada tahun 2020 menjadi 473 orang pada tahun 2024

Meskipun terjadi peningkatan jumlah wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut meliputi aspek aksesibilitas wilayah serta optimalisasi promosi

wisata, khususnya untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya dalam meningkatkan infrastruktur serta efektivitas promosi guna mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Bengkalis ke depannya.

Tabel II.123 Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Bengkalis 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Lama kunjungan Wisata	2,52 hari	2,52 hari	2,70 hari	2,72 hari	2,74 hari
PAD sektor pariwisata (Juta)	4.020,39	14.513,56	20.552,16	22.710,85	21.407,16
Jumlah Wisatawan Mancanegara	covid-19	covid-19	731	3.764	3.311
Jumlah Wisatawan Nusantara	20.397	103.635	187.624	35.930	235.748
Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Nusantara	20,68	39,71	45,37	45,02	56,54
Tingkat Hunian Akomodasi	18,85	19,71	13,25	13,25	13,25
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	97,86	84,49	88,76	88,76	88,76
Kontribusi Sektor Terhadap PAD Pariwisata	20.397	103.635	187.624	35.930	235.748
Jumlah SDM Sektor Pariwisata	120	120	193	193	473

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.4.4.3.3 Urusan Pertanian

Kinerja pelayanan pada urusan pertanian dapat dilihat melalui indikator produksi sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bengkalis. Selain itu dapat pula dilihat melalui cakupan bina kelompok petani. Produksi Sektor pertanian di kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 mencapai 19.293,40 ton, turun pada tahun 2021 menjadi 18.686,14 ton, meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 18.752,73 ton, namun kembali turun hingga tahun 2024 menjadi 14.353,48 ton. Kondisi fluktuasi produksi sektor pertanian disebabkan oleh fluktuasi kondisi cuaca yang berdampak terhadap gagal panen. Sementara itu produksi sektor perkebunan pada tahun 2020 sebesar 289.790,70 ton, turun hingga tahun 2022 menjadi 266,190,88 ton, dan kembali naik hingga tahun 2024 menjadi 675.053,95. Kondisi fluktuasi sektor perkebunan di Kabupaten Bengkalis erat kaitannya dengan fluktuasi harga pupuk dan harga TBS pada level petani. Adapun cakupan bina kelompok tani telah mencapai 100 pada tahun 2020-2024.

Tabel II.124 Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Sektor Pertanian (ton)	19.293,40	18.686,14	18.752,73	17.352,42	14.353,48
Produksi Sektor Perkebunan (ton)	289.790,70	268.038,36	266.190,88	586.005,36	675.053,95
Cakupan bina kelompok petani	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis, 2025

Indikator lain yang mencerminkan kinerja urusan sektor pertanian di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis. Tabel berikut menyajikan gambaran umum mengenai peran sektor pertanian dalam struktur

PDRB daerah, yang mencerminkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Bengkalis.

Tabel II.125 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ADHK (Miliar)	14.662,02	16.630,17	17.996,85	19.482,73	20.832,37
2	PDRB ADHK (Miliar)	115.882,67	139.613,49	176.013,38	168.635,85	175.713,79
3	Share Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ADHK	12,65%	11,91%	10,22%	11,55%	11,86%

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam Angka, 2025

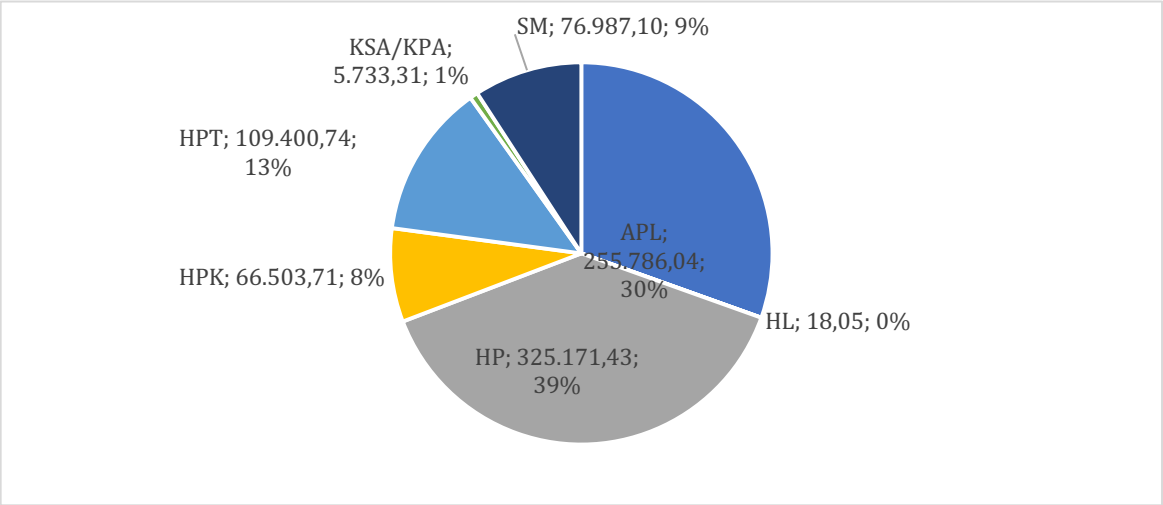
Sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian di Kabupaten Bengkalis setelah pertambangan. Selain menyerap banyak tenaga kerja, pertanian juga terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB daerah. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 12,65%, namun mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 10,22% dan kembali meningkat menjadi 11,86% pada tahun 2024.

2.1.4.4.3.4 Urusan Kehutanan

Pengelolaan hutan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah memiliki kewenangan atas kawasan hutan, mulai dari perencanaan, perizinan, dan implementasi pengelolaan hutan dan pengawasan. Pemerintah mempunyai kewenangan mengontrol proses perencanaan dan pemantauan sumber daya hutan termasuk pengukuhan kawasan hutan yang secara implementasi berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Kewenangan pengurusan kehutan oleh provinsi meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi huta, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Kewenangan kabupaten dalam pengelolaan kawasan hutan meliputi pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten/kota. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota.

Menjaga fungsi lingkungan dengan mempertahankan hutan menjadi sangat penting dalam pelestarian sumberdaya alam melalui pemeliharaan, pengendalian, pemuliaan, serta pengembangan pemanfaatan kawasa hutan untuk keseimbangan ekosistem. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Riau, ditemukan luasan terbesar berupa hutan produksi 38,73% dan luasan terkecil berupa Hutan Lindung 0,002%. Pemanfaatan hutan mangrive untuk pelestarian lingkungan dan pengembangan

ekonomi dengan tetap memperhatikan konservasi menjadai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kabupaten Bengkalis.



Sumber: Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6612/MENLHK PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Gambar II.84 Kawasan Hutan di Kabupaten Bengkalis

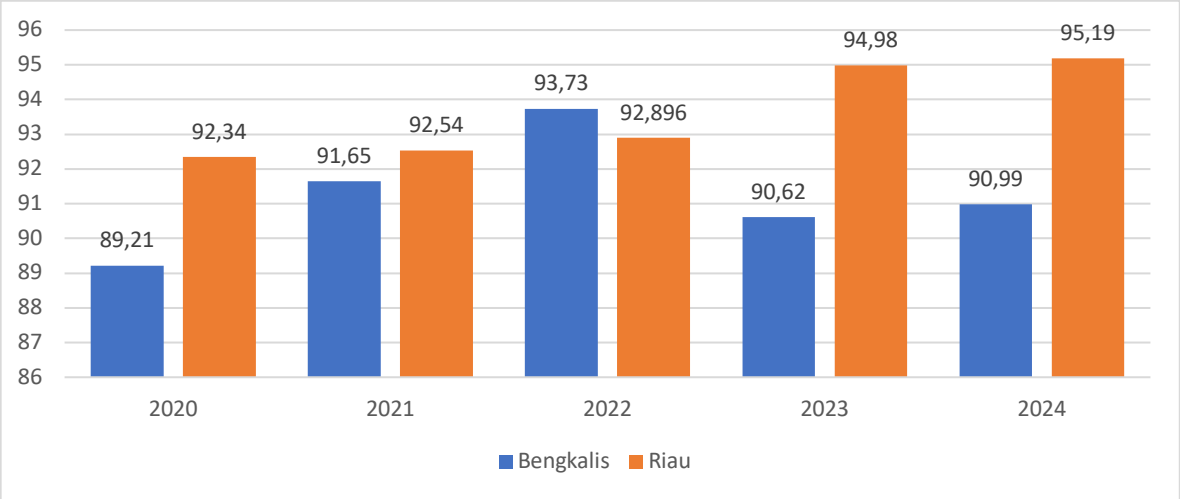
2.1.4.4.3.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Jenis pelanggan dari kategori rumah tangga merupakan pengguna utama listrik di Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2024, jumlah pelanggan rumah tangga tercatat sebanyak 223.276 dengan daya terpasang mencapai 342.359.383 KWH. Meskipun jumlah pelanggan rumah tangga mendominasi, konsumsi listrik terbesar justru berasal dari sektor industri. Dengan jumlah pelanggan sebanyak 223, sektor industri mampu mengonsumsi listrik hingga 1.252.801.883 KWH. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan listrik industri jauh lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, PLN Kabupaten Bengkalis terus berupaya menyediakan pasokan listrik yang cukup untuk seluruh pelanggan.

Tabel II.126 Banyaknya Produksi Tenaga Listrik Dirinci Menurut Golongan Tarif di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Penggunaan (KWH)
1	Tarif Sosial	5.503	26.273.487
2	Tarif Rumah Tangga	223.276	342.359.383
3	Tarif Bisnis	23.094	119.027.040
4	Tarif Industri	223	1.252.801.883
5	Tarif Penerangan	1.435	26.737.870
6	Tarif Lain-lain	41	1.205.605.552
Jumlah		253.572	253.572

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2025



Sumber: PLN dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, 2025

Gambar II.85 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi Kabupaten Bengkalis tercatat sebesar 89,21%, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau yang mencapai 92,34%. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan di Bengkalis menjadi 91,65%, namun masih berada di bawah provinsi yaitu 92,54%. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana Bengkalis mencatatkan rasio tertinggi selama lima tahun terakhir sebesar 93,73%, bahkan melampaui capaian Provinsi Riau yang sebesar 92,896%.

Namun, pada tahun 2023, rasio elektrifikasi Bengkalis menurun menjadi 90,62%, turun dibawah Provinsi Riau mengalami peningkatan hingga 94,98%. Pada tahun 2024, rasio elektrifikasi Kabupaten Bengkalis meningkat menjadi 90,99%, akan tetapi masih berada dibawah Provinsi Riay yang mencapai 95,19%.

Fluktuasi rasio elektrifikasi Kabupaten Bengkalis menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan pemerataan akses listrik di masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang secara geografis sulit dijangkau. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya berkoordinasi dengan Provinsi dalam rangka melakukan perluasan jaringan listrik PLN ke daerah terpencil, penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat dan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, sehingga diharapkan akses listrik masyarakat Kabupaten Bengkalis kedepannya terus meningkat.

2.1.4.4.3.6 Urusan Perdagangan

Keberhasilan pelayanan urusan perdagangan dapat dilihat dari indikator ekspor bersih. Pada tahun 2020, net ekspor barang dan jasa tercatat sebesar 57.283,93 miliar dan mengalami peningkatan hingga mencapai 107.313,21 miliar pada tahun 2022. Meskipun sempat mengalami penyesuaian menjadi 94.511,17 miliar pada tahun 2023, angka ini kembali meningkat menjadi 97.248,06 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh perluasan objek ekspor serta semakin terbukanya kerja sama Kabupaten Bengkalis dengan berbagai institusi di luar negeri.

Surplus neraca perdagangan di Kabupaten Bengkalis sangat dipengaruhi oleh kontribusi ekspor migas yang signifikan. Oleh karena itu, perkembangan produksi minyak masih menjadi faktor utama dalam pencapaian neraca perdagangan yang positif. Sementara itu, kontribusi net ekspor terhadap PDRB ADHB terus meningkat, dari 49,99% pada tahun 2020 menjadi 55,34% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis masih bergantung pada sektor migas. Ke depan, penguatan struktur perekonomian dapat diarahkan pada pengembangan sektor nonmigas yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel II.127 Perkembangan Ekspor Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Net Ekspor Barang dan Jasa (Miliar)	57.283,93	78.451,97	107.313,21	94.511,17	97.248,06
2	PDRB ADHB (Miliar)	114.583,99	139.613,50	175.972,46	168.635,85	175.713,79
3	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa (%)	49,99%	56,19%	60,98%	56,04%	55,34%

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Indikator urusan perdagangan lainnya pada tahun 2024 adalah persentase alat - alat ukur, takar, tumbang dan perlengkapan bertanda tera sah yang berlaku mencapai 495%, meningkat dari tahun 2023 yaitu 151%. Adapun persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan) mencapai 95% pada tahun 2024 dan persentase pengaduan konsumen yang terselesaikan turun signifikan dari 78% pada tahun 2023 menjadi 2024 pada tahun 2024.

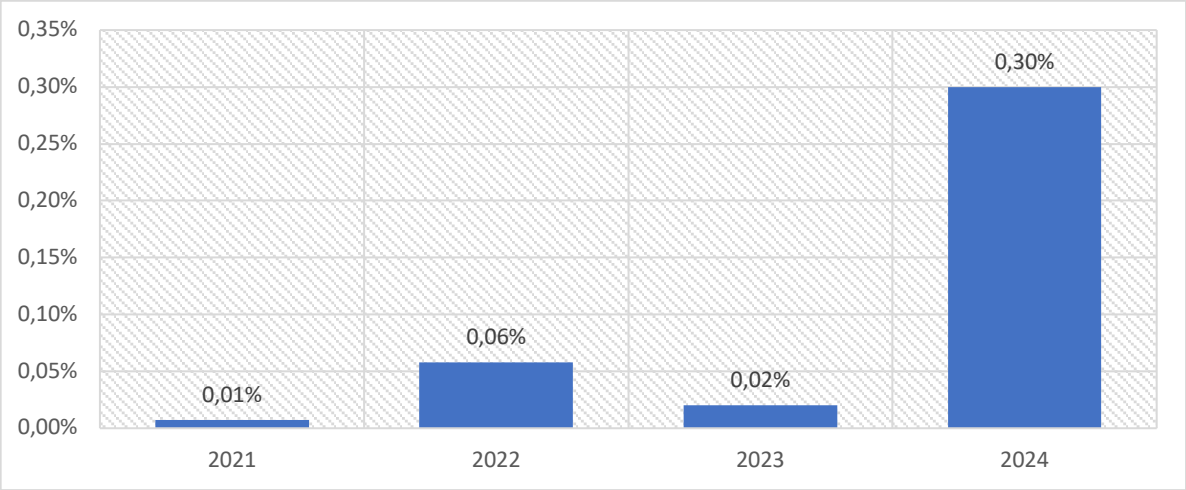
Tabel II.128 Capain Indikator Perdagangan Kabupaten bengkalis Tahun 2023-2024

Indikator	2023	2024
Persentase Alat – alat ukur, takar, tumbang dan perlengkapan (UTTP) bertanda terasah yang Berlaku	151	495
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)	90	95
Persentase pengaduan konsumen yang terselesaikan	78	0

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.4.4.3.7 Urusan Perindustrian

Perkembangan kinerja sektor perindustrian dapat diukur melalui indikator cakupan bina kelompok pengrajin. Pembinaan pengrajin memiliki arti penting bagi perkembangan industri kreatif di Kabupaten Bengkalis. Selain menyerap tenaga kerja, kelak juga akan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah apabila pengrajin dibina dengan baik.



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II.86 Perkembangan Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa cakupan bina kelompok pengrajin masih tergolong kecil, yang mana jumlah perkembangan cakupan kelompok pengrajin di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,01%, meningkat menjadi 0,06% pada tahun 2022, namun kembali turun menjadi 0,02% pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 0,30% pada tahun 2024.

Tabel II.129 Capaian indikator Perindustrian Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024

Indikator	2023	2024
Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	1,51	43
Persentase Pelaku Usaha IKM yang di fasilitasi izin produknya	7,81	20
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB harga berlaku	15,66	15,49

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, 2025

Indikator urusan perindustrian lainnya pada tahun 2024 adalah pertumbuhan jumlah IKM mencapai 43%. Adapun presentase pelaku usaha IKM yang di fasilitasi izin produknya mencapai 20% dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB harga berlaku mencapai 15,49%.

2.1.4.4.4 Fokus Penunjang Urusan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatih; dan pengawasan.

2.1.4.4.4.1 Urusan Perencanaan

Keberhasilan pelayanan pada urusan perencanaan dapat dilihat pada indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, dan persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD.

Tabel II.130 Perkembangan Indikator Perencanaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	88,78	96	98,62	98,62	100
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	88,06	100	100	100	100
Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program Pembangunan daerah	94,83	91,9	100	89,21	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memiliki dokumen RPJPD Tahun 2025-2024. Saat ini sedang disusun dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga setiap tahunnya menyusun dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. Demikian juga halnya dengan dokumen RTRW yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042.

Untuk persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD dalm lima tahun terakhir terus meningkat dengan capaian hingga tahun 2024 telah mencapai 100%. Sementara itu penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD juga menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu mencapai 100% hingga tahun 2024.

2.1.4.4.4.2 Urusan Keuangan

Kinerja pelayanan pada urusan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang cukup baik dan stabil. Berdasarkan data BPKAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, opini BPK terhadap laporan keuangan daerah selama lima tahun berturut-turut memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sementara itu, persentase tindak lanjut temuan BPK/Inspektorat menunjukkan tren menurun dari 100% pada tahun 2020–2021 menjadi 71,76% pada

tahun 2024, yang mengindikasikan perlunya penguatan kembali mekanisme pengawasan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, persentase SILPA terhadap APBD menunjukkan fluktuasi, yakni sebesar 5,50% pada tahun 2020, naik menjadi 6,48% pada tahun 2022, dan kemudian menurun menjadi 3,89% pada tahun 2024. Penurunan SILPA ini mengindikasikan semakin efisiennya serapan anggaran daerah, meskipun masih diperlukan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan program agar optimalisasi belanja publik dapat tercapai. Selanjutnya, alokasi belanja pendidikan tercatat konsisten di atas ketentuan minimal 20%, dengan capaian 21,29% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 22,79% pada tahun 2024. Demikian pula, belanja kesehatan secara konsisten berada di atas batas minimal 10%, yaitu sebesar 12,46% pada tahun 2020 dan mencapai 15,32% pada tahun 2024, menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat. Selain itu, tingkat penatausahaan aset daerah yang tertib dan terukur juga meningkat dari 40% pada tahun 2020 menjadi 63% pada tahun 2024, yang menandakan adanya perbaikan dalam manajemen aset daerah. Secara keseluruhan, capaian tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Bengkalis telah berada dalam arah yang positif, dengan tingkat akuntabilitas yang baik dan orientasi pada peningkatan pelayanan publik, meskipun perlu terus diperkuat pada aspek pengawasan internal dan pengelolaan aset yang berkelanjutan.

Tabel II.131 Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020–2024

KEUANGAN	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Presentase Temuan Inspektorat / BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%	96.55%	86.36%	71,76
Persentase SILPA	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase SILPA terhadap APBD	5,50%	5,86%	6,48%	1,81%	3,89%
Persentase belanja pendidikan (20%)	21,29	23,95	21,00	22,26	22,79
Persentase belanja kesehatan (10%)	12,46	16,04	15,50	16,59	15,32%
Persentase penatausahaan aset yang tertib dan terukur	40%	45%	50%	55%	63%
Bagi hasilkabupaten/kota dan desa	na	na	0,21	0,25	0
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.4.4.4.3 Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu indikator dalam Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Bengkalis adalah Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Indeks Profesionalitas ASN dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam

upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN. Selain itu, Indeks Profesionalitas ASN dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. Indeks Profesionalitas ASN dapat juga digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Dari tahun 2020-2024 Indeks Profesionalitas ASN masih belum berada pada kategori nilai yang cukup baik. Pada tahun 2020 dengan nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 62,57 atau berada pada kategori rendah. Selanjutnya turun hingga tahun 2022 menjadi 41,22 atau dengan kategori sangat rendah. Namun kembali meningkat hingga tahun 2024 menjadi 79,56 atau dengan kategori sedang.

Tabel II.132 Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah PNS	Dimensi				Nilai Indeks Kategori Profesionalitas ASN	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
2020	6032	12,31	20,44	24,82	5	62,57	Rendah
2021	6444	12,46	8,76	24,74	4,99	50,95	Sangat rendah
2022	6381	21,23	8,39	8,80	5	41,22	Sangat rendah
2023	6203	20,99	26,1	24,57	5	76,66	Sedang
2024	8324	20,71	28,38	25,48	5,00	79,56	Sedang

Sumber: BKPP Kabupaten Bengkalis, 2025

Beberapa indikator yang menggambarkan perkembangan keberhasilan kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2020 sebesar 2,01%, namun turun menjadi 0,52% pada tahun 2022, dan kembali meningkat hingga tahun 2024 menjadi 4,84%.

Selanjutnya, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2020 sebesar 0,52%, meningkat menjadi 12,4% pada tahun 2024. Adapun jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah sebanyak 32 pada tahun 2020, namun turun menjadi 29 pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 34. Pada tahun 2023 kembali turun menjadi 31 dan pada tahun 2024 meningkat kembali pada tahun 2024. Indikator lain dalam urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel II.133 Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2,01%	1,56%	0,52%	4,37%	4,84%
Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	0,52%	0,00%	1,40%	12,12%	12,4%
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	32	29	34	31	34

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	2.585	2.894	2.485	2.384	2.324
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	109	105	438	414	332
Rasio PNS berpendidikan Tinggi (PT)	1,74%	1,05%	0,29%	3,6%	-2,76
RasioJabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Na	Na	5,71%	6,67%	10,67
Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepegawaian	Na	82,49%	87,72%	91%	98,07%
Persentase Pelanggaran Pegawai (ASN)	0,53%	0,20%	0,16%	0,19%	0,11%

Sumber: BKPP Kabupaten Bengkalis, 2025

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah mengalami peningkatan dari 2.585 jabatan pada tahun 2020 menjadi 2.894 jabatan, kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 2.324 jabatan pada tahun 2024. Penurunan ini selaras dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan transformasi jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. Hal tersebut diperkuat oleh tren peningkatan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu. Tercatat sebanyak 109 orang pada tahun 2020, menurun menjadi 105 pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 438 pada tahun 2022, sebelum akhirnya menurun kembali menjadi 332 orang pada tahun 2024. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2024, jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020.

Rasio ASN dengan latar belakang pendidikan tinggi juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, rasio tersebut sebesar 1,74%, menurun menjadi 0,29% pada tahun 2022, namun meningkat kembali menjadi 3,6% pada tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 2,79% pada tahun 2024. Indikator lainnya adalah rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), yang menunjukkan peningkatan dari 5,71% pada tahun 2022 menjadi 10,67% pada tahun 2024.

Secara umum, capaian kinerja pelayanan kepegawaian di Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren positif, dengan peningkatan dari 82,49% pada tahun 2021 menjadi 98,07% pada tahun 2024, sejalan dengan penurunan persentase pelanggaran pegawai (ASN) dari 0,53% pada 2020 menjadi 0,16% pada 2022, sempat naik menjadi 0,19% pada 2023, dan kembali turun menjadi 0,11% pada 2024.

2.1.4.4.4.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Implementasi rencana kelitbangan baru mencapai 20% pada tahun 2023 dari keseluruhan rencana yang sudah diimplementasikan. Begitu pula dengan pemanfaatan hasil kelitbangan turun dari tahun 2022 sebesar 67%, menjadi 36,36% pada tahun 2023. Meski begitu Balitbang Kabupaten Bengkalis sudah berusaha dengan baik untuk menerapkan inovasi-inovasi baru di daerah. Diamana kebijakan inovasi yang sudah diterapkan di daerah sudah mencapai 70% pada tahun 2023. Namun indek inovasi daerah Kabupaten Bengkalis turun dari 45 pada tahun 2021, menjadi 37,78 pada tahun 2024.

Tabel II.134 Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis 2020-2024

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	4	5	10	20	16
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	70%	55%	67%	36,36%	0%
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	42%	55%	88,34%	28,26%	20,47%
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	60%	65%	65%	70%	100%
5.	Indeks Inovasi Daerah		45	44,17	42,59	37,78

Sumber: Badan Penelitidan dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis, 2025

Implementasi rencana kelitbangan baru mencapai 16% pada tahun 2024 dari keseluruhan rencana yang sudah diimplementasikan. Meski begitu Balitbang Kabupaten Bengkalis sudah berusaha dengan baik untuk menerapkan inovasi-inovasi baru di daerah. Dimana kebijakan inovasi yang sudah diterapkan di daerah sudah mencapai 100% pada tahun 2024. Namun indek inovasi daerah Kabupaten Bengkalis turun dari 42,59% pada tahun 2023 menjadi 37,78% pada tahun 2024.

2.1.4.4.4.5 Urusan Pengawasan

Kinerja pelayanan pada urusan pengawasan di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perkembangan cukup baik selama periode 2020-2024. Persentase tindak lanjut temuan pada tahun 2020 sebesar 58,2%, meningkat menjadi 71,79% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen dari Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam menindaklanjuti temuan-temuan yang didapat.

Selanjutnya jumlah temuan BPK pada tahun 2020 sebesar 580, meningkat menjadi 683 pada tahun 2024. Namun turun signifikan pada tahun 2024. Persentase pelanggaran ASN menunjukkan penurunan dari 0,30% pada tahun 2020 menjadi 0,08% pada tahun 2023. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.135 Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tindak Lanjut Temuan	58,2	61, 2	62	68	71,76
Jumlah Temuan BPK	580	602	603	683	95
Persentase Pelanggaran Pegawai (ASN)	0.53%	0.20%	0.16%	0.19%	0.11%
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bengkalis, 2025

Perkembangan indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bengkalis telah mencapai level tiga selama periode 2022-2024. Ini menunjukkan tingkat kematangan SPIP dalam pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan,

dan akuntabel, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, berada dalam tahap berkembang. Ke depannya, pemerintah daerah akan terus berupaya melakukan pengawasan dan pengendalian internal untuk memperbaiki tata kelola SPIP menjadi lebih baik..

2.1.4.4.4.6 Sekretariat Dewan

Berikut ini adalah perkembangan indikator untuk urusan penunjang atau pendukung daerah di Kabupaten Bengkalis. Perkembangan indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Bengkalis menunjukkan capaian yang sangat baik, dimana seluruh indikator tercapai. Hanya saja pada indikator tingkat kepuasan DPRD terhadap kinerja pelayanan Setwan turun pada tahun 2024 menjadi 90,15. Untuk lebih lengkap disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel II.136 Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasi Program- program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Integrasi dan sinkronisasi program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen perencanaan (Pemda/PD) (RencanaKerja Tahunan Alat Kelengkapan Dewan)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran Setwan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tingkat kesesuaian target dan realisasi anggaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tingkat kepuasan DPRD terhadap kinerja pelayanan Setwan	100	97,8	94,44	100	90,15

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.4.4.4.7 Sekretariat Daerah

Urusan penunjang pada Sekretariat Daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang semakin baik, khususnya pada tahun 2024. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat dari 88,70 pada tahun 2020 menjadi 93,74 pada tahun 2024, serta persentase produk hukum daerah yang lulus uji

harmonisasi yang mencapai 100 persen pada tahun 2024 dibandingkan 75 persen pada tahun 2020. Selain itu, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa juga mengalami peningkatan dari 65 pada tahun 2021 menjadi 75 pada tahun 2023, sedangkan Indeks Kelembagaan menunjukkan konsistensi dengan capaian 73,51 pada tahun 2022 dan 2024. Predikat LPPD mengalami fluktuasi yaitu T pada tahun 2021, R pada 2022, belum tersedia pada 2023, dan masih dalam proses rilis pada 2024, sementara nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) mengalami peningkatan dari predikat B pada 2021–2023 menjadi BB pada 2024. Indeks Reformasi Birokrasi juga memperlihatkan tren positif dari 48,62 pada 2021 menjadi 64,82 pada 2024, menunjukkan adanya pembenahan tata kelola birokrasi secara bertahap. Adapun persentase pengelolaan wilayah perbatasan masih berfluktuasi, yakni 100 persen pada tahun 2021, turun menjadi 73,31 persen pada 2023, serta belum tersedia data pada tahun 2022 dan 2024. Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut mencerminkan adanya peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pelayanan publik, akuntabilitas, dan reformasi birokrasi, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan kedepannya. Lebih rinci dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel II.137 Perkembangan indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	IKM	88,17	86,9	87,82	93,74
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	65	70	75	
3	Indeks Kelembagaan	55	73.51	N/A	73.51
4	Persentase produk hukum daerah yang lulus uji harmonisasi	75	75	100	100
5	Prediket LPPD	T	R	na	Belum Rilis
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten (LAKIP)	B	B	B	BB
7	Indek Reformasi Birokrasi	48,62	52,74	61,07	64,82
8	Persentase pengelolaan wilayah perbatasan	100	100	73,31	na

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, 2025

Adapun perkembangan IKM menurut Kecamatan secara umum menunjukkan peningkatan selama periode 2021 sampai 2024. Kecamatan dengan IKM tertinggi adalah Kecamatan Bengkalis sebesar 99,02, Kecamatan Rupat sebesar 98,35, Kecamatan Rupat Utara sebesar 98,18 dan Kecamatan Pinggir sebesar 95,99. Lebih rinci dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel II.138 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan Tahun 2021-2024

Indeks Capaian Kinerja Utama Kecamatan	2021	2022	2023	2024
Bengkalis	87,08	87,08	89,12	99,02
Bantan	89,02	90,00	90,80	92,36
Bukit Batu	82,01	82,40	87	90
Mandau	93,05	93,85	93,01	94,09

Indeks Capaian Kinerja Utama Kecamatan	2021	2022	2023	2024
Rupat	88,54	92,09	95,36	98,35
Rupat Utara	80,05	81,53	87,13	98,18
Siak Kecil	87,90	80,57	87,17	90,89
Pinggir	93,7	81,53	90,96	95,99
Bandar Laksamana	89,59	86,33	87	90
Talang Muandau	79,67	81,12	90,85	91,78
Bathin Solapan	83,33	80,54	95,45	90,81

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.5 Evaluasi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang di evaluasi berdasarkan capaian visi yang telah dijabarkan melalui setiap misi dan terukur melalui indikator tujuan, sasaran, dan program, maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan kondisi ekonomi makro Kabupaten Bengkalis relative stabil, namun sebagai catatan masih ada realisasi capaian indikator makro yang masih dibawah target. Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan informasi indikator makro ekonomi Kabupaten Bengkalis antara lain :

    - Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor migas. Pengembangan sektor non-migas seperti pariwisata, industri kreatif, pertanian, dan sektor lainnya dapat menjadi fokus dalam diversifikasi ekonomi. Perlu mendorong investasi dan menciptakan kebijakan yang menguntungkan bagi sektor ekonomi agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
    - Dalam mengendalikan inflasi, perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan inflasi. Langkah-langkah pengendalian harga barang dan jasa, pengawasan distribusi, dan kebijakan moneter yang tepat perlu diterapkan. Peningkatan produksi dan pasokan barang dan jasa lokal dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor, yang dapat berdampak positif terhadap inflasi.
    - Dalam upaya meningkatkan investasi, perlu dilakukan promosi yang lebih aktif dan efektif untuk menarik minat investor baik dalam negeri maupun asing. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan dapat membantu dalam memfasilitasi investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
    - Perlu dilakukan upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru, baik melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja maupun melalui program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
    - Perlu dilakukan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dengan mengimplementasikan program-program yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta penguatan sektor informal.

2. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang belum stabil sebagai dampak dari pandemic Covid-19. Rekomendasi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

   - Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan daerah dengan mengembangkan sektor-sektor potensial yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, sehingga memberikan peluang baru bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
   - Kabupaten Bengkalis perlu memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana perimbangan dan transfer antar daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan strategis, pertukaran informasi, dan sharing best practices dalam pengelolaan keuangan daerah.
   - Kabupaten Bengkalis perlu terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah dengan mengidentifikasi potensi penghematan, mengurangi birokrasi yang tidak efisien, serta menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
   - Perlu dilakukan pengendalian belanja operasi untuk memastikan efisiensi dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Evaluasi terhadap program-program yang tidak efektif atau tidak memberikan dampak signifikan perlu dilakukan, dan realokasi anggaran dapat dilakukan untuk mendukung program-program yang lebih prioritas.
   - Belanja modal memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan penggunaan belanja modal yang efektif dan efisien, dengan melibatkan evaluasi terhadap proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Prioritaskan proyek-proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.
   - Evaluasi berkala terhadap rencana pertumbuhan belanja daerah perlu dilakukan untuk memastikan keseimbangan fiskal. Pastikan pertumbuhan belanja sesuai dengan pertumbuhan pendapatan daerah dan kesanggupan keuangan daerah. Jika terjadi defisit, langkah-langkah pengendalian dan peningkatan pendapatan harus segera diambil.
   - Kabupaten Bengkalis perlu menginvestasikan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, dan pengembangan sektor-sektor strategis. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai daerah.

3. Secara keseluruhan capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran setiap misi dalam kategori yang tinggi. Adapun rekomendasi terhadap tujuan, sasaran pembangunan untuk setiap misi adalah sebagai berikut:

   - Dalam rangka mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang Efektif dalam memajukan perekonomian, maka Kabupaten Bengkalis perlu mendorong diversifikasi ekonomi, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan daya tarik investasi, promosi dan pemasaran yang intensif, peningkatan akses informasi, meningkatkan koordinasi

antarinstansi, dan mendorong terciptanya inisiatif pembiayaan yang mendukung investasi di daerah.

- Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter, maka Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan keterbukaan informasi publik, dan menguatkan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didorong dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh tingkatan, serta keterampilan dan pelatihan bagi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Mendorong pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama yang berkarakter dan harmonis di masyarakat, melestarikan budaya Melayu sebagai identitas lokal, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerukunan antaragama dan keberagaman budaya, serta mempromosikan dialog antaragama dan kegiatan lintas budaya.
- Dalam upaya mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat, maka Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan kualitas konektivitas Wilayah dengan mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur transportasi, termasuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Bengkalis. Mendorong pengembangan transportasi publik yang terintegrasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem transportasi. Penataan dan Pembangunan Kawasan Berwawasan Lingkungan dengan mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam pembangunan kawasan, menerapkan prinsip-prinsip tata ruang yang berkelanjutan, mengembangkan dan mengimplementasikan program pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan. Pengembangan potensi wilayah perbatasan dengan mendorong pengembangan ekonomi wilayah perbatasan dengan memperkuat kerjasama lintas batas, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada di wilayah perbatasan, meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan fasilitas dasar.

4. Rekomendasi evaluasi pelaksanaan program pembangunan adalah sebagai berikut:

    - Perlunya mempertahankan dan meningkatkan capaian program, indikator kinerja dan anggaran dari RPJMD yang telah tercapai di tahun 2021 dan 2022 agar mampu mencapai target sampai dengan akhir RPJMD tahun 2026.
    - Terdapat perbedaan indikator yang digunakan pada program di RPJMD dengan program yang terdapat pada RKPD/APBD atau indikator kerja program yang digunakan bukan indikator kerja program yang disampaikan di dalam RPJMD, sehingga yang terjadi adalah ketidaksinkronan indikator kinerja program RPJMD dengan RKPD/APBD akibatnya pada saat dilakukan evaluasi terhadap RPJMD berdasarkan program yang telah dilaksanakan nilai kinerja indikator kerja program RPJMD menjadi sangat rendah. Oleh karena itu perlu indikator kinerja program pada RKPD harus sesuai dengan indikator kinerja program pada RPJMD agar bisa mengukur tingkat ketercapaian program berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD.

- Kinerja yang ditetapkan oleh OPD pada RKPD sedikit lebih rendah dibanding target yang ditetapkan pada RPJMD. Permasalahan ini terutama adalah karena adanya penyesuaian target kinerja OPD pada RKPD dalam menghadapi situasi perubahan social, ekonomi dan politik yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap target dan capaian dari RPJMD yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik setelah melewati pandemi Covid 19.
- Terdapat beberapa program di RKPD yang tidak mempunyai target dan capaian dari indikator kerja program, sehingga pada saat dibandingkan dengan RPJMD untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD nilai kinerja menjadi sangat rendah. Kemudian rendahnya realisasi capaian target kinerja dan target anggaran pada RPJMD dimana kondisi ini terjadi karena kurangnya SDM yang kompeten dan masih lemahnya pemahaman aparatur disetiap Perangkat daerah tentang mekanisme perencanaan, sinkronisasi dan evaluasi Renja Perangkat Daerah, RPJMD, RKPD dan dokumen lainnya. Oleh karena itu perlu perlu dilakukan pelatihan untuk sumber daya manusia pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis terkait penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi, selaras, terkoordinasi antara satu dokumen dengan dokumen lainnya

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan publik yang berfungsi untuk mendukung operasional dan pembangunan di tingkat pemerintahan daerah. Secara umum, keuangan daerah mencakup seluruh aspek pendapatan dan pengeluaran yang diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah yang merupakan elemen krusial dalam mendukung pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi, pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan haruslah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dikatakan baik jika berhasil merealisasasi program-program yang direncanakan.

Untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah perlu mencemati kondisi kinerja keuangan masa lalu, baik dari sisi kinerja keuangan maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Selain itu juga perlu dilakukan analisis terhadap pengeluaran secara periodik, baik yang bersifat wajib mengikat serta yang menjadi prioritas utama. Dengan demikian akan dapat diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pengelolaan keuangan daerah secara realitas dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu pengolahan data dan analisis keuangan daerah dilakukan terhadap data APBD dan laporan keuangan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya.

2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Kinerja pengelolaan keuangan daerah pada masa lalu dapat memberikan informasi yang menunjukkan beragam pencapaian dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah

dalam mengoptimalkan sumber daya finansial untuk pembangunan dan pelayanan publik. Secara historis, beberapa aspek kunci dapat diidentifikasi dalam evaluasi kinerja keuangan daerah.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah serta neraca daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan terhadap neraca difokuskan pada perkembangan asset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkalis dijabarkan sebagai berikut:

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan Aggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat dilihat dilihat dari komponen-komponennnya antara lain Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

2.2.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut. Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang terdiri dari, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Dana transfer yang terdiri dari Tarnsfer Pemerintah Pusat yaitu alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi

3) Pendapatan daerah lain-lain yang sah adalah pendapatan yang tidak termasuk dalam PAD dan Pendapatan Transfer, seperti hibah dari pemerintah pusat, sumbangan dari masyarakat, dan pendapatan dari kerjasama antar daerah

Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dilihat dari rata-rata pertumbuhan selama periode 2020-2024. Adapun perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020-2024 disajikan pada Tabel II.135 sebagai berikut:

Tabel II.139 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata 2 Pertumbuhan
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Pendapatan Pajak Daerah	63,664,818,589.25	82,355,513,611.00	94,213,069,616.00	106,094,877,800.42	137,788,533,547.00	21.56
Pendapatan Retribusi Daerah	8,956,066,385.34	10,329,501,238.00	11,711,114,828.00	14,326,950,569.00	175,269,009,198.46	293.60
Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	20,920,504,935.00	33,292,209,969.00	27,311,794,580.00	316,861,797,346.00	73,977,162,709.00	256.17
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	158,384,480,005.94	158,257,869,755.72	216,398,406,349.15	177,304,804,088.97	16,986,091,204.26	-17.96
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	251,925,869,915.53	284,235,094,573.72	349,634,385,373.15	614,588,429,804.39	404,020,796,658.72	19.34
PENDAPATAN TRANSFER						
TRANSFER PEMPUS - DANA PERIMBANGAN						
Dana Bagi Hasil	1,728,780,988,415.00	3,066,476,067,593.00	2,077,206,468,039.00	2,410,096,284,255.00	2,151,996,944,000.00	12.61
Dana Alokasi Umum (DAU)	338,731,609,000.00	336,787,052,000.00	335,727,628,000.00	354,410,355,837.00	394,237,768,555.00	3.98
Dana Alokasi Khusus (DAK)	208,140,860,895.00	239,952,017,182.00	288,340,394,551.00	316,951,426,411.00	299,868,201,956.00	10.00
Jumlah Transfer Pempus - Dana Perimbangan	2,275,653,458,310.00	3,643,215,136,775.00	2,701,274,490,590.00	3,081,458,066,503.00	2,846,102,914,511.00	10.17
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA						
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	
Dana Penyesuaian	166,657,936,000.00	165,099,615,167.00	127,024,597,939.00	129,623,338,071.00	146,603,889,096.00	-2.21
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	166,657,936,000.00	165,099,615,167.00	127,024,597,939.00	129,623,338,071.00	146,603,889,096.00	-2.21
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	2,442,311,394,310.00	3,808,314,751,942.00	2,828,299,088,529.00	3,211,081,404,574.00	2,992,706,803,607.00	9.23
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI						
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	104,662,859,108.49	129,050,630,338.00	138,522,362,493.00	186,100,249,291.00	129,013,271,552.00	-0.01
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	26,623,226,400.00	17,763,147,160.00	12,957,842,500.00	10,166,000,000.00		-15.08
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya						
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	131,286,085,508.49	146,813,831,938.00	151,480,204,993.00	196,266,249,291.00	129,013,271,552.00	2.57-
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2,573,597,479,818.49	3,955,128,583,880.00	2,979,779,293,522.00	3,407,347,653,865.00	3,121,720,075,159.00	8.75
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
Pendapatan Hibah	91,438,330,000.00	82,544,910,000.00	808,958.15	0.00-		-25.55
Pendapatan Dana Darurat						
Pendapatan Lainnya	431,550,000.00					

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata 2 Pertumbuhan
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAATAN YANG SAH	91,869,880,000.00	82,544,910,000.00	808,958.15	0.00		-50.53
TOTAL PENDAPATAN	2,917,393,229,734.42	4,321,908,588,453.00	3,329,414,487,853.30	4,021,936,083,669.39	3,525,740,871,817.72	8.41

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2020-2024

Data tabel II.139 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan selama periode 2020-2024 pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis bertumbuh rata-rata sebesar 8.41 persen. Pertumbuhan terbesar selama periode tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang bertumbuahn rata-rata sebesar 19,34 persen. Pertumbuhan PAD yang signifikan ini disebabkan karena pada tahun 2023 Pemerintahan Kabupaten Bengkalis memperoleh pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Publik Interest dari pengelolaan pertambangan minyak dan gas yang disisihkan sebanyak 10 persen untuk daerah-daerah penghasil minyak dan gas yang disalurkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD. Komponen PAD lainnya yang tumbuh secara signifikan yaitu retribusi daerah karena berubahnya pendapatan BLUD dari lain-lain PAD yang sah menjadi retribusi pada tahun 2024. Disamping itu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah ini juga disebabkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengumpulan pajak dan retribusi daerah, serta potensi ekonomi lokal yang relatif mengalami perkembangan.

Penyumbang pertumbuhan pendapatan daerah lainnya adalah berasal dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 9,23 persen selama periode yang sama. Pertumbuhan yang moderat ini menunjukkan adanya stabilitas dalam alokasi dana dari pemerintah pusat. Meskipun tidak terlalu tinggi, pertumbuhan ini tetap penting karena dana transfer pusat merupakan komponen terbesar dari pendapatan daerah dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Hampir mirip dengan transfer pemerintah pusat, pertumbuhan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah provinsi juga mengaami pertumbuhan yang moderat yakni tumbuh rata-rata sebesar 2,57 persen. Keadaan ini mencerminkan stabilitas dalam bagi hasil pajak, retirbusi dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yang berperan dalam mendukung proyek-proyek daerah dan pengembangan infrastruktur

Penurunan yang tajam terjadi pada lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup pendapatan dari sumber-sumber lain seperti sumbangan pihak ketiga, dan sumber lainnya yang menurun rata-rata sebesar -50,53 persen. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya partisipasi pihak ketiga, kebijakan yang tidak mendukung.

Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan moderat dalam transfer pemerintah pusat dan provinsi, serta penurunan tajam dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah, hal menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis perlu fokus pada diversifikasi sumber pendapatan dan meningkatkan pengelolaan sumber pendapatan yang ada. Upaya lebih lanjut mungkin diperlukan untuk menangani penurunan dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah agar tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah secara keseluruhan.

Berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun, kinerja pendapatan daerah juga menjadi hal yang cukup penting untuk dianalisis. Hal ini disebabkan karena kinerja pendapatan daerah merupakan kemampuan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan pendapatan daerah yang sudah ditargetkan. Adapun kinerja pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.140 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	2020	2,937,425,679,887.83	2,917,393,229,734.02	99,32
2	2021	3,443,486,942,467.70	4,321,908,588,453.72	125.51
3	2022	3,347,978,859,591.00	3,329,414,487,853.30	99.45
4	2023	4,544,704,295,766.00	4,021,936,083,669.39	88.50
5	2024	3,722,315,309,917.24	3,525,740,871,817.72	94,71

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2020-2024

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa, secara umum, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis selama periode tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan trend meningkat namun semenjak tahun 2021 sampai dengan 2023 menunjukkan trend yang semakin menurun kinerja dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Dilihat dari besaran nominal realisasi pendapatan menunjukkan trend yang berfluktuasi.

Selanjutnya Jika dikaitkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan ke depan—seperti peningkatan infrastruktur, penguatan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi lokal—pertumbuhan pendapatan sebesar 8,41 persen masih tergolong belum cukup memadai. Daerah dengan orientasi pembangunan yang agresif umumnya membutuhkan pertumbuhan pendapatan di atas 10 persen per tahun agar mampu memperluas ruang fiskal dan membiayai program prioritas tanpa menambah tekanan terhadap belanja rutin.

Bekaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, efisiensi belanja publik, serta inovasi pembiayaan daerah seperti kerja sama investasi dan pengelolaan aset produktif, perbaikan basis data dan korodinasi yang intensfi dengan pemerinah pusat dan provinsi untuk penigkatan pendapatan transfer. Upaya ini penting untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan pencapaian target pembangunan secara konsisten di masa mendatang.

2.2.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , menyebutkan bahwa adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang. Belanja daerah merupakan bentuk upaya untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditentukan. Hakekat dari belanja daerah sebagai perwujudan dan amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyakat serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Secara umum komponen belanja menueut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 antara lain:

1) Belanja Operasi, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehati hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek Langsung yang

didalamnya terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,

2) Belanja Modal, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari: Belanja Tanah, Belanja, Belanja Peralatan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Asset Tetap Lainnya dan Belanja Asset Lainnya.
3) Belanja Tidak Terduga, yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. , Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
4) Belanja Transfer, yang merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer ini terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pengelolaan belanja Pemerintah Daerah dihadapkan pada semakin besarnya kebutuhan anggaran dalam melaksanakan urusan disatu sisi karena perkembangan masyarakat, sementara disisi anggaran yang tersedia sangat terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah menetapkan skala prioritas untuk penggunaan anggaran.

Belanja Daerah yang harus menjadi priroritas utama adalah pada pendanaan urusan wajib mengikat dan wajib pelayanan dasar dalam rangka untuk mencapai standar pelayanan minimal, kemudian barulah untuk pendanaan pencapaian visi dan misi dan urusan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja belanja dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang dapat diwujudkan terhadap anggaran yang disediakan. Semakin besar realisasi belanja semakin baik kinerja dalam menggunakan anggaran. Realisasi belanja daerah tahun 2020-2024, sebagaimana disajikan pada Tabel II.141 berikut:

Tabel II.141 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata rata Pertumbuhan
BELANJA						
BELANJA OPERASI						
Belanja Pegawai	967,266,480,083.00	1,018,335,441,328.20	1,052,966,396,064.00	1,163,398,270,080.00	1,273,396,081,405.00	7.16
Belanja Barang dan Jasa	933,384,530,032.00	1,097,486,691,596.15	1,381,017,141,616.88	1,381,790,584,075.05	1,234,871,516,209.16	8.21
Belanja Subsidi	9,618,696,893.00	10,642,584,920.00	23,970,315,000.00	26,215,958,998.00	21,920,833,286.00	32.21
Belanja Hibah	71,023,667,791.00	35,834,828,114.59	109,378,573,578.00	123,667,935,263.00	100,381,666,143.86	37.48
Belanja Bantuan Sosial	0.00	37,194,371,163.00	31,227,797,850.00	33,981,267,273.00	21,735,601,050.00	-14.42
Jumlah Belanja Operasi	**1,981,293,374,799.00**	**2,199,493,917,121.94**	**2,598,560,224,108.88**	**2,729,054,015,689.05**	**2,652,305,698,094.02**	7.84
BELANJA MODAL						
Belanja Tanah	815,248,000.00	412,940,853.70	0.00	0.00	0.00	
Belanja Peralatan dan Mesin	97,002,850,638.45	121,410,901,246.66	214,056,580,897.00	129,460,420,955.00	85,347,971,046.00	6.97
Belanja Gedung dan Bangunan	131,718,395,987.69	131,209,405,612.36	163,846,016,961.00	133,063,665,969.00	71,466,581,186.51	-10.15
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	260,976,621,697.70	415,733,389,785.70	720,331,145,069.00	618,021,154,762.00	283,810,720,565.64	16.07
Belanja Aset Tetap Lainnya	9,816,546,659.00	10,725,918,415.00	10,867,289,576.00	10,896,502,523.00	20,779,718,829.00	25.39
Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	613,960,614.00	48,628,000.00	173,412,000.00	82.26
Jumlah Belanja Modal	**500,329,662,982.84**	**679,492,555,913.42**	**1,109,714,993,117.00**	**891,490,372,209.00**	**461,578,403,627.15**	7.81
BELANJA TAK TERDUGA						
Belanja Tak Terduga	152,938,659,147.00	9,655,040.00	0.00	13,022,550.00	739,136,100.00	1791.94
TOTAL BELANJA	**2,634,561,696,928.84**	**2,878,996,128,075.36**	**3,708,275,217,225.88**	**3,620,557,410,448.05**	**3,114,623,237,821.17**	8.04
TRANSFER						
Transfer Bagi Hasil ke Desa	-	-				
Bagi Hasil Pajak	4,915,347,049.00	9,306,096,195.00	8,925,199,999.00	10,550,407,500.00	0.00	0.86
Bagi Hasil Retribusi	763,602,328.00	1,959,882,773.00	2,098,906,889.00	2,268,119,000.00	0.00	17.95
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya						
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	348,231,605,248.00	402,698,706,154.00	497,225,669,838.00	594,295,186,730.00	501,324,482,783.00	10.75
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Transfer	**353,910,554,625.00**	**413,964,685,122.00**	**508,249,776,726.00**	**607,113,713,230.00**	**501,324,482,783.00**	10.44
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	**2,988,472,251,553.84**	**3,292,960,813,197.36**	**4,216,524,993,951.88**	**4,227,671,123,678.05**	**3,615,947,720,604.17**	6.01

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2020-2024

Data pada tabel diatas memperlihatkan bahwa periode 2020-2024, realisasi belanja daerah dan transfer Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6.01 persen. Pertumbuhan realisasi belanja ini sejalan dengan meningkatnya kemampuan daerah secara nominal dalam membiayai belanja daerah, yang tercermin dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah selama periode yang sama.

Kemudian dilihat dari masing-masing komponen belanja daerah, pada belanja transfer mengalami pertumbuhan paling tinggi diantara komponen belanja lainnya, yakni bertumbuh rata-rata sebesar 10.44 persen selama periode 2020-2024. Pertumbuhan yang tinggi ini disebabkan karena adanya kebijakan bantuan keuangan khusus kepada Desa sebesar Rp. 1 milyar setiap desa dalam rangka mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Komponen lainya yakni belanja modal, selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun secara rata-rata mengalami pertumbuhan yang juga cukup tinggi yakni tumbuh rata-rata sebesar 7.81 persen. Tingginya pertumbuhan belanja modal ini disebabkan karena adanya peningkatan dalam belanja jalan, irigasi dan jaringan yang sebagian besar dialokasikan untuk pembuatan jalan dan perbaikan jalan yang rusak.

Komponen belanja yang juga mengalami pertumbuhan selama periode yang sama adalah komponen belanja operasi yang tumbuh rata-rata sebesar 7.84 persen. Pertumbuhan pada komponen belanja operasi ini terlihat dari peningkatan masing-masing sub komponen belanja seama periode 5 tahun secara konsisten. Diantara sub-sub komponen tersebut terlihat bahwa pada sub komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sangat mendominasi. Hal ini dapat dimaklumi karena meningkatnya kebutuhan pada kedua belanja tersebut setiap tahunnya dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum belanja daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehubungan dengan itu kinerja belanja daerah juga menjadi hal yang cukup penting untuk dianalisis, yakni kemampuan daerah untuk merealiasikan belanja yang sudah dianggarkan. Adapun kinerja belanja daerah Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.142 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
2020	3,159,516,275,514.20	2,988,472,251,553.84	94.59
2021	3,594,498,516,273.70	3,292,960,813,197.36	91.61
2022	4,517,938,208,653.00	4,216,524,993,951.88	93.33
2023	4,837,972,971,732.00	4,227,671,123,678.05	87.39
2024	4,775,268,720,819.00	3,615,947,720,604.17	**75.72**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2020-2024

Tabel di atas memperlihatkan bahwa selama periode 2020 sampai dengan 2024 kinerja realisasi belanja daerah berflutuasi. Walaupun terjadi fluktuasi selama periode tersebut, namun demikian dari tahun 2020 sampai dengan 2022 realisasi anggaran belanja diatas 90 persen. Sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan yakni 87,39 persen dan tahun

2024 juga turun hanya mencapai sebesar 75,52 persen. Dengan demikian secara umum kinerja realisasi aggaran belanja realatif cukup baik,

2.2.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabpaten Bengkalis terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
1) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.
2) Realiasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan 126,11 persen.

Penyumbang terbesar dari peningkatan tersebut berasal dari Silpa yang naik rata-rata sebesar 126,03 persen dalam kurun waktu yang sama. Berbeda dengan penerimaan pembiayaan, pada pengeluaraan pembiayaan mengalami selama kurun waktu 2020-2024 tidak ada. Secara lebih rinci pembiayaan dapat dilihat pada Tabel II.143 berikut:

Tabel II.143 Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata rata Pertumbuhan
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN						
Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	222,090,595,626.37	151,011,573,806.55	1,179,959,349,062.91	293,268,675,966.33	87,671,284,252.67	126.03
Pencairan Dana Cadangan						
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
Penerimaan Pinjaman Daerah			419,833,002.00	137,648,295.00	183,557,076.00	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
Penerimaan Piutang Daerah						
Total Penerimaan	222,090,595,626.37	151,011,573,806.55	1,180,379,182,064.91	293,406,324,261.33	87,854,841,328.67	126.111
PENGELUARAN						
Pembentukan Dana Cadangan						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah						
Pembayaran Biaya Pinjaman Luar Negeri						
Pemberian Pinjaman Daerah						
ADB						
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga						
Total Pengeluaran	0.00	0.00	0.00	0.00		
PEMBIAYAAN NETTO	222,090,595,626.37	151,011,573,806.55	1,180,379,182,064.91	293,406,324,261.33	87,854,841,328.67	126.11
SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)	151,011,573,806.55	1,179,959,349,062.91	293,268,675,966.33	87,671,284,252.67	5,411,748,080.22	110.57

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2020-2024

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan daerah yang sangat penting bagi manajemen Pemerintahan Daerah, karena dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Dengan informasi tersebut diharapkan pengambilan keputusan dapat lebih terarah sehingga pengelolaan sumberdaya ekonomi daerah dapat dilakukan secara efesien dan efektif. Neraca daerah berisikan posisi asset daerah, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal diterbitkan neraca tersebut.

Selama kurun waktu 2020-2024 asset yang tercatat dalam Neraca Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,58 persen. Diantara komponen asset yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi adalah asset lancar yang dalam kurun waktu yang sama meningkat rata-rata sebesar 44,48 persen. Penyumbang terbesar peningkatan dari asset lancar ini berasal dari piutang meningkat rata-rata sebesar 172,32 persen. Piutang ini sebagian besar berasal dari piutang dana bagi hasil yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu aset tetap, dalam periode yang sama mengalami penurunan walaupun relatif kecil yakni turun rata-rata sebesar (0,41 persen). Terjadinya penurunan asset tetap selama periode 2020-2024 disebabkan karena rendahnya pertumbuhan belanja modal dan relatif tingginya penyusutan. Namun demikian walaupun mengalami penurunan, proporsi asset tetap dalam keseluruhan asset Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dari sisi nilai nominal relatif cukup besar.

Berbeda dengan asset, pada Investasi Jangka Panjang selama periode 2020-2024 justru mengalami petumbuhan relatif besar yakni rata-rata sebesar 29.14 persen. Tingginya tingkat pertumbuhan pada investasi jangka panjang ini disebabkan adanya pertambahan pada pernyertaan modal yang jumlahnya cukup signifikan pada tahun 2023.

Selanutnya kewajiban daerah pada neraca daerah, selama perioe 2020-2024 mengalami pertumbuhan secara signifikan yakni ,rata-rata meningkat 89,26 persen. Sebagian besar peningkatan kewajiban ini berasal dari utang pihak ketiga tumbuh rata-rata sebesar 162,88 persen. Peningkatan utang pada pihak ketiga ini disebabkan adanya kewajiban dari rekanan mitra yang masih harus dilunasi.

Sementara itu Ekuitas dana selama kurun waktu 2020-2024 mengalami sedikit penurunan yakni turun rata-rata sebesar (0.71 persen). Secara lebih rinci neraca daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.144 Neraca Daerah Kabupaten Bengkalis 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata2 Pertumbuhan%)
ASET	**9,298,185,596,626.77**	**9,358,668,744,217.05**	**9,054,735,127,515.06**	**9,655,995,052,336.12**	9.875.545.224.829,68	1.58
ASET LANCAR	**684,450,486,246.14**	**1,327,884,329,697.55**	**449,421,333,248.76**	**252,957,901,018.74**	**743.163.232.800,37**	44.48
Kas	151,011,573,806.55	1,179,959,349,062.91	293,268,675,966.33	87,796,231,338.70	5,411,341,977.22	110.58
Piutang	471,659,791,236.36	64,376,895,345.60	81,130,420,442.94	75,417,555,800.62	646,067,100,491.83	172.32
Persediaan	61,779,121,203.23	83,548,085,289.04	75,022,236,839.49	89,744,113,879.42	91.684.790.331,32	11.70
ASET TETAP	**7,879,234,544,017.06**	**7,309,978,441,934.46**	**7,522,101,779,551.60**	**7,739,308,790,905.37**	**7.724.280.652.678,29**	-0.41
Tanah	1,118,098,988,741.31	1,113,920,111,347.51	1,098,122,150,466.64	1,097,923,133,576.64	1.095.419.696.139,12	-0.51
Peralatan dan mesin	1,720,936,637,948.03	1,840,891,216,160.18	2,022,886,133,980.48	2,175,277,685,394.48	2.338.082.012.954,27	7.97
Gedung dan bangunan	3,135,001,432,141.73	3,278,033,677,342.66	3,424,396,606,618.38	3,559,060,212,357.29	3.718.188.338.115,49	4.36
Jalan, irigasi, dan jaringan	8,975,413,810,264.85	9,327,286,533,125.75	9,952,564,463,988.55	10,587,566,366,492.60	11.167.026.821.417,50	5.62
Aset tetap lainnya	126,159,968,170.72	135,015,878,085.72	143,108,156,692.02	155,702,358,281.02	171.483.304.315,02	7.99
Konstruksi dalam pengerjaan	335,652,200,689.21	355,705,505,591.46	346,374,070,478.02	442,363,319,930.71	351.264.849.389,96	2.62
AKUKUMULASI PENYUSUTAN	(7,532,028,493,938.79)	(8,740,874,479,718.82)	(9,465,349,802,672.49)	(10,278,584,285,127.30)	(11.117.184.369.653,00)	10.27
INESTASI JANGKA PANJANG	**518,962,048,762.00**	**518,272,400,090.00**	**517,383,104,479.00**	**1,111,253,806,431.00**	**1.134.595.783.215,00**	29.14
ASET LAINNYA	**215,538,517,601.57**	**202,533,572,495.04**	**565,828,910,235.70**	**552,474,553,981.01**	**273.505.556.136,02**	30.12
Tagihan penjualan angsuran	0.00	0.00	0.00	0.00		
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	6,306,966,250.66	6,306,966,250.66	6,306,966,250.66	1,572,290,815.00	1.572.290.815,00	-18.77
Kemitraan dengan pihak ketiga	488,750,000.00	488,750,000.00	488,750,000.00			
Aset tak berwujud	3,604,936,620.03	2,382,272,002.28	2,226,553,925.51	1,468,180,610.08	1.018.834.268,41	-26.28
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0.00	0.00	279,720,241,835.00	295,651,477,000.00	42.575.934.000,00	-19.98
ASET LAIN-LAIN	205,137,864,730.88	193,355,584,242.10	277,086,398,224.53	253,782,605,555.93	228.338.497.052,61	4.78

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata2 Pertumbuhan%)
KEWAJIBAN	**82,537,732,628.60**	**159,418,991,183.13**	**191,836,756,276.16**	**472,869,679,682.51**	**931.831.193.721,96**	89.26
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**82,537,732,628.60**	**159,418,991,183.13**	**191,836,756,276.16**	**472,869,679,682.51**	**931.831.193.721,96**	89.26
Utang perhitungan pihak ketiga						
Uang muka dari kas daerah						
Pendapatan diterima dimuka	57,533,376,593.10	95,720,570,681.77	85,886,635,942.77	115,878,192,040.09	1.900.841.606,59	-1.83
UTANG PIHAK KETIGA	22,100,255,714.50	60,699,149,905.36	101,823,744,460.39	353,161,390,691.39	926.301.675.736,37	162.88
UTANG PENDEK LAINNYA	2,904,100,321.00	2,999,270,596.00	4,126,375,873.00	3,705,149,865.00	3.628.676.379,00	7.15
UTANG PINJAMAN LUAR NEGERI						
EKUITAS DANA	**9,215,647,863,998.17**	**9,199,249,753,033.92**	**8,862,898,371,238.90**	**9,183,125,372,653.61**	**8.943.714.031.107,72**	-0.71
EKUITAS DANA LANCAR	**9,215,647,863,998.17**	**9,199,249,753,033.92**	**8,862,898,371,238.90**	**9,183,125,372,653.61**	**8.943.714.031.107,72**	-0.71
EKUITAS DANA INVESTASI						
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**9,298,185,596,626.77**	**9,358,668,744,217.05**	**9,054,735,127,515.06**	**9,655,995,052,336.12**	**9.875.545.224.829,68**	1.58

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2020-2024

Analisis terhadap neraca daerah dapat mengetahui fundamental keuangan Pemerintah Daerah. Analisis yang dilakukan melalui analisis rasio-rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Rasio keuangan dimaksud terdiri dari tiga jenis yaitu:

1) Rasio likuiditas, yaitu abalisis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat.
2) Rasio aktivitas, adalah rasio untuk melihat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintahan. Rasio ini terdiri dari rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. dan
3) Rasio solvabilitas (leverage), adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangny. Jenis rasio ini terdiri dari rasio total hutang terhadap total asset dan rasio total hutang terhadap modal.

Adapun rasio-rasio kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II.145 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	**Rasio Likuiditas**					
1.	Rasio lancar (current ratio)	8,29	8,30	2,34	0.53	0.80
2.	Rasio cepat (quick ratio)	7.54	7.81	1.95	0.35	0.70
B.	**Rasio Solvabilitas**					
1.	Rasio total hutang terhadap total asset	0.01	0.02	0.02	0.05	0.09
2.	Rasio hutang terhadap modal	0.01	0.02	0.02	0.05	0.10
C.	**Rasio Aktivitas**					
	Rata-rata umur piutang (Hari)	64.31	22.64	7.98	7.10	42.17

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2020-2024 (data olahan)

Merujuk pada tabel diatas secara ringkas dapat dilihat kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1) Rasio Lancar (*Current Ratio*) menunjukkan selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan trend yang semakin menurun dari 8,29 pada tahun 2020 menurun menjadi 0,84 pada tahun 2024. Pada tahun 2020 Rp. 1 hutang lancar dijamin dengan Rp. 8,29 asset lancar. Sementara pada tahun 2024 terjadi penurunan yakni Rp 1 utang lancar hanya dijamin dengan Rp. 0,80 asset lancar. Kondisi ini menunjukkan dalam jangka pendek Pemerintah Kabupaten Bengkalis berada pada posisi illikuiditas.
2) Rasio Cepat *(Quick Ratio*) selama 5 tahun juga menunjukkan trend yang semakin menurun dari 7.54 pada tahun 2020 menurun menjadi 0,70 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan asset lancar dikurangi persediaan semakin menurun.

3) Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*) Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan dari 0.01 pada tahun 2020 menurun menjadi 0.09 pada tahun 2024. Artinya pada tahun 2020 hutang sebesar Rp. 0.01 dijamin dengan Rp. 1 rupiah asset, yang kemudian pada tahun 2024 menurun dimana Rp. 0.09 hutang dijamin dengan Rp. 1 asset. Ini memberikan indikasi bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis dari sisi solvabilitas mengalami penurunan. Namun demikian dari sisi rasio ini posisi keuangan Kabupaten Bengkalis masih dalam posisi baik karena besaran asset masih lebih tinggi dibandingkan dengan hutang.
4) Rasio Hutang terhadap Modal (*Total Debt Equity Ratio*) selama kurun waktu 5 tahun terakhir juga menunjukkan trend yang semakin menurun dari 0.01 tahun 2020 menurun menjadi 0.10 pada tahun 2024 . Ini berarti bahwa pada tahun 2020 hutang sebesar Rp 0.01 ndijamin dengan Rp. 1 modal, kemudian menurun dimana hutang sebesar Rp 0.10 dijamin dengan Rp. 1 modal. Walaupun terjadi penurunan, kondisi rasio ini masih berada dalam poisisi baik karena modal masih lebih besar dibandingkan hutang yang dijamin.
5) Rata-rata umur piutang (Hari). Selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan trend yang semain menurun. Pada tahun 2020 rata-rata umur piutang selama 64 hari, kemudian pada tahun 2023 rata-rata umur piutang semakin membaik menjadi 7 hari. Namun demikian demikian pada tahun 2024 rata-rata umur piutang meningkat lagi menjadi 42 hari. Hal ini menunjukkan kinerja penagihan piutang cendrung menurun pada tahun 2024.

2.2.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

2.2.1.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.

2.2.1.3.1.1 Proporsi Realisasi Belanja

Dalam struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Masing-masing jenis belanja mendapatkan alokasi, yang mencerminkan kebijakan daerah dalam belanja. Adapun realisasi Belanja Daerah selama kurun waktu Tahun Anggaran 2020–2024 secara nominal dapat dilihat pada Tabel II.146 berikut

Tabel II.146 Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2020-2024 Kabupaten Bengkalis

Uraian	Tahun 2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp	%	Rp	%
BELANJA DAERAH										
BELANJA OPERASI	**1,981,293,374,799.00**	66.30	**2,199,493,917,121.94**	66.79	**2,598,560,224,108.88**	61.63	**2,729,054,015,689.05**	**64.55**	**2,652,305,698,094.02**	**73.35**
Belanja Pegawai	967,266,480,083.00	32.37	1,018,335,441,328.20	30.92	1,052,966,396,064.00	24.97	1,163,398,270,080.00	27.52	1,273,396,081,405.00	35.22
Belanja Barang dan Jasa	933,384,530,032.00	31.23	1,097,486,691,596.15	33.33	1,381,017,141,616.88	32.75	1,381,790,584,075.05	32.68	1,234,871,516,209.16	34.15
Belanja Subsidi	9,618,696,893.00	0.32	10,642,584,920.00	0.32	23,970,315,000.00	0.57	26,215,958,998.00	0.62	21,920,833,286.00	0.61
Belanja Hibah	71,023,667,791.00	2.38	35,834,828,114.59	1.09	109,378,573,578.00	2.59	123,667,935,263.00	2.93	100,381,666,143.86	2.78
Belanja Bantuan Sosial	0	0.00	37,194,371,163.00	1.13	31,227,797,850.00	0.74	33,981,267,273.00	0.80	21,735,601,050.00	0.60
BELANJA MODAL	**500,329,662,982.84**	**16.74**	**679,492,555,913.42**	20.63	**1,109,714,993,117.00**	26.32	**891,490,372,209.00**	21.09	**461,578,403,627.15**	12.77
Belanja Tanah	815,248,000.00	0.03	412,940,853.70	0.01	0	0.00	0	0.00	0.00	
Belanja Peralatan dan Mesin	97,002,850,638.45	3.25	121,410,901,246.66	3.69	214,056,580,897.00	5.08	129,460,420,955.00	3.06	85,347,971,046.00	2.36
Belanja Gedung dan Bangunan	131,718,395,987.69	4.41	131,209,405,612.36	3.98	163,846,016,961.00	3.89	133,063,665,969.00	3.15	71,466,581,186.51	1.98
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	260,976,621,697.70	8.73	415,733,389,785.70	12.62	720,331,145,069.00	17.08	618,021,154,762.00	14.62	283,810,720,565.64	7.85
Belanja Asset Tetap Lainnya	9,816,546,659.00	0.33	10,725,918,415.00	0.33	10,867,289,576.00	0.26	10,896,502,523.00	0.26	20,779,718,829.00	0.57
Belanja Asset	0	0.00	0	0.00	613,960,614.00	0.01	48,628,000.00	0.00	173,412,000.00	0.00

Uraian	Tahun 2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp	%	Rp	%
lainnya										
BELANJA TAK TERDUGA	**152,938,659,147.00**	5.12	**9,655,040.00**	0.00	**0.00**	0.00	**13,022,550.00**	0.00	**739,136,100.00**	0.02
Belanja Tak Terduga	152,938,659,147.00	**5.12**	**9,655,040.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	13,022,550.00	**0.00**	739,136,100.00	**0.02**
BELANJA TRANSFER	**353,910,554,625.00**	**11.84**	**413,964,685,122.00**	12.57	**508,249,776,726.00**	**12.05**	**607,113,713,230.00**	**14.36**	**501,324,482,783.00**	
Transfer Bagi Hasil ke Desa										
Bagi Hasil Pajak	4,915,347,049.00	0.16	9,306,096,195.00	0.28	8,925,199,999.00	0.21	10,550,407,500.00	0.25	0.00	**0.00**
Bagi Hasil Retribusi	763,602,328.00	0.03	1,959,882,773.00	0.06	2,098,906,889.00	0.05	2,268,119,000.00	0.05	0.00	**0.00**
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya										
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	348,231,605,248.00	11.65	402,698,706,154.00	12.23	497,225,669,838.00	11.79	594,295,186,730.00	14.06	501,324,482,783.00	**13.86**
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
Total Belanja dan Transfer	**2,988,472,251,553.84**	**100**	**3,292,960,813,197.36**	**100**	**4,216,524,993,951.88**	**100**	**4,227,671,123,678.05**	**100**	**3,615,947,720,604.17**	**100.00**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2020-2024 (data olahan)

Data tabel di atas memperihatkan bahwa proporsi belanja selama periode 2020-2024, belanja barang dan jasa plus belanja modal masih cukup dominan yakni berkisar antara 47.93 persen sampai dengan 59.07 persen. Dilihat dari kecenderungan kedua jenis belanja tersebut selama periode 2020-2024 menunjukkan trend yang semakin meningkat proporsinya. Bila dicermati lagi terdapat korelasi bahwa semakin besar nominal realisasi belanja daerah Kabupaten Bengkalis, kedua jenis belanja tersebut juga ikut meningkat. Artinya ketika terjadi peningkatan belanja maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis selalu memperiotaskan pada kedua jenis belanja tersebut. Kondisi ini menunjukkan komitmen untuk mengarahkan belanja untuk kepentingan masyarakat semakin kuat.

2.2.1.3.1.2 Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Penyediaan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah adalah rangka untuk menjamin terlaksananya secara baik pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur wajib dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Secara lebih rinci belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.147 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupten Bengkalis

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Tahun anggaran 2020	967,266,480,083	2,988,472,251,553	**32.37**
2	Tahun anggaran 2021	1,018,335,441,328	3,292,960,813,197	**30.92**
3	Tahun Anggaram 2022	1,052,966,396,064	4,216,524,993,951	**24.97**
4	Tahun Anggaran 2023	1,163,398,270,080	4,227,671,123,678	**27.52**
5	Tahun Anggaran 2024	1,273,396,081,405	3,615,947,720,604	**34.15**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2020-2024 (data olahan)

Data tabel diatas memperlihatkan bahwa secara nominal selama kurun waktu 5 tahun terakhir belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkalis menunjukan kecenderungan meningkat. Dilihat dari proporsinya terhadap total pengeluaran daerah menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun pada periode 2020 sampai dengan 2022. Namun demikian pada tahun 2022 sampai dengan 2024 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap pengeluaran menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Bahkan pada tahun 2024 sudah mencapai 34,15 persen. Hal menjadi perhatian karena pada tahun 2027 sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 proporsi belanja pemenuhan aparatur paling tinggi sebesar 30 persen.

2.2.1.4 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi dalam rangka menutup defisit dan menyalurkan surplus. Analisis pembiayaan dilakukan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan

pembiayaan daerah tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Analisis ini sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Silpa tahun lalu penerimaan pinjaman, pencairan dana cadangan maupun penjualan asset yang dipisahkan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan adalah anggaran hutang, penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.148 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Realisasi Pendapatan Daerah	2,917,393,229,734.42	4,321,908,588,453.00	3,329,414,487,853.30	4,021,936,083,669.39	3,525,740,871,817.72
Dikurangi realisasi:					
Belanja Daerah	2,988,472,251,553.84	3,292,960,813,197.36	4,216,524,993,951.88	4,227,671,123,678.05	3,615,947,720,604.17
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Defisit)/surplus riil	**(71,079,021,819.42)**	**1,028,947,775,255.64**	**(887,110,506,098.58)**	**(205,735,040,008.66)**	**(90,206,848,786.45)**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2020-2024 (data olahan)

Tabel II.149 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020-2024

NO	URAIAN	Tahun Anggaran				
		2020	2021	2022	2022	2024
A	**PENDAPATAN**	2,917,393,229,734.42	4,321,908,588,453.00	3,329,414,487,853.30	4,021,936,083,669.39	3,525,740,871,817.72
B	**BELANJA**	2,988,472,251,553.84	3,292,960,813,197.36	4,216,524,993,951.88	4,227,671,123,678.05	3,615,947,720,604.17
C	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-(B+C)	**DEFISIT RIIL/surplus**	**(71,079,021,819.42)**	1,028,947,775,255.64	(887,110,506,098.58)	(205,735,040,008.66)	(90,206,848,786.45)
	Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	222,090,595,626.37	151,011,573,806.55	1,179,959,349,062.91	293,268,675,966.33	87,671,284,252.67
	Pencairan Dana Cadangan					
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang					
D	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**215,501,085,439.46**	222,090,595,626.37	151,011,573,806.55	1,179,959,349,062.91	87,671,284,252.67
D+ DEFISIT RIIL	**Sisa Lebih PembiayaanAnggaran Tahun Berkenaan (SILPA)**	151,011,573,806.55	1,179,959,349,062.91	293,268,675,966.33	87,671,284,252.67	5,411,748,080.22

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2020-2024 (data olahan)

Data tabel II.148 diatas memperlihatkan bahwa selama periode 2020-2024, terdapat defisit anggaran pada 4 tahun yakni tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024. Kondisi yang demikian ini berarti bahwa selama 4 tahun tersebut jumlah belanja lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya selama 1 tahun yakni 2021, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, berada pada posisi surplus yakni jumlah pendapatan melebihi dari jumlah belanja. Defisit yang terjadi 4 tahun tersebut ditutupi dengan melakukan kebijakan penganggaran memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya.

Mencermati data pada tabel II.149 terlihat bahwa SiLPA Kabupaten Bengkalis menunjukkan trend yang berfluktuatif. Keadaan ini menunjukan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah masih belum stabil. Namun demikian kalau dilihat besarannnya selama periode 2020-2024, pada tahun 2024 merupakan Silpa terkecil, sedangkan yang terbesar terjadi pada tahun 2021.

Selanjutnya defisit riil yang terjadi pada tahun 2020-2024 komposisi penutup pada anggaran dalam APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024 seluruhnya ditutup dengan SIlpa tahun sebelumnya. Adapun secara rinci komposisi penutup defesit rill seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel II.150 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkalis (dalam persen)

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100	-	-	100	100
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-		
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-		
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-		
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-		
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-		
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	-	-		

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2020-2024 (data olahan)

Data tabel II.150 diatas memberikan informasi bahwa pada tahun 2021 kondisi keuangan Kabupaten Bengkalis berada pada posisi surplus, dimana jumlah realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja. Sehingga dengan demikian SiLPA yang dimiliki pada tahun tersebut tidak dipergunakan untuk menutupi defesit riil.

Sementara itu sumber penerimaan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Bengkalis bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Sumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) antara lain adalah pelampauan pendapatan daerah, penghematan belanja, kewajiban kepada

pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Terhadap kondisi seperti yang telah diuraikan diatas maka kebijakan jangka menengah menyangkut pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan.

- Penguatan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah.
- Inovasi berdampak langsung pada Peningkatan Pendapatan dari Sektor Pajak dan Retribusi.
- Penguatan kinerja BUMD dalam pengelolaan PI.
- Optimalisasi *Green Finance* seperti: BPDLH dan BPDPKS
- Mengupayakan KPBU pada Pembangunan Infrastruktur Berskala Besar.
- Optimalisasi Dana Alokasi Khusus.
- Optimalisasi Usulan Usulan Inpres Jalan dan Infrastruktur lainnya

2) Belanja.

- Menjaga konsistensi 30% Belanja Pegawai terhadap APBD.
- Memperluas kapasitas fiskal untuk menampung Program Pembangunan dengan mengurangi inefisiensi pada Belanja Barang dan Jasa.

  Memperkuat management Resiko Tunda Bayar/Hutang sebagai bentuk pengelolaan APBD yang sehat dan transparan.

3) Pembiayaan.

- Membuka Kemungkinan Pinjaman Daerah baik pada PT. SMI maupun Lembaga lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- Rencana Penyertaan Modal pada BUMD yang potensial seperti: Penambahan Modal pada BRKS dan PT. BSP

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari dari kerangka keuangaan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas rill keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka memengah daerah lima tahun kedepan.

2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Peambiayaan

Proyeksi pendapatan daerah dan pembiayaan adalah untuk memperkirakan besaran kemampuan daerah keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah 5 tahun kedepan. Proyeksi pendapatan daerah merupakan rujukan untuk menentukan kapasistas keuangan

daerah dan sebagai dasar untuk membuat perkiraaan besaran belanja daeran untuk 5 tahun kedepannya.

Pada dasar proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk lima tahun kedepan berdasarkan pada rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja selama lima tahun kebelakang. Disamping rata-rata pertumbuhan, juga mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi kedepan yang mempengaruhi pendapatan daerah. proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi: proyeksi pendapatan, pembiayaan dan proyeksi belanja , dan proteksi kemampuan kapsistas daerah untuk mendanai pembbangunan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Proyeksi Pendapatan

Struktur pendapatan daerah saat ini memperlihatkan realitas yang tidak bisa diabaikan: kapasitas fiskal masih jauh dari ideal. Porsi terbesar pendapatan daerah masih ditopang oleh transfer pusat, sementara PAD yang menjadi ukuran kemandirian hanya memberi kontribusi terbatas. Dalam kondisi seperti ini, ruang fiskal untuk mendorong pembangunan yang progresif menjadi sempit.

Di sisi kebutuhan, target pembangunan ke depan semakin berat. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Semua itu membutuhkan belanja publik yang terus meningkat. Namun, laju pertumbuhan pendapatan tidak sebanding dengan akselerasi kebutuhan belanja. Konsekuensinya, terjadi fiscal gap yang semakin melebar.

Ketergantungan pada transfer pusat memang menjadi penyangga sementara, tetapi di balik itu ada risiko serius. Perubahan kebijakan nasional, penyesuaian formula DAU/DAK, hingga fluktuasi harga komoditas yang memengaruhi DBH, bisa sewaktu-waktu menggerus penerimaan daerah. Jika hal ini terjadi, target pembangunan yang sudah ditetapkan terancam tidak tercapai, atau bahkan dipangkas. Dengan kata lain, pendapatan daerah saat ini masih cukup untuk menjaga keberlangsungan roda pemerintahan, tetapi belum cukup untuk menopang lompatan pembangunan ke depan.

Kondisi ini mengandung implikasi strategis: jika tidak ada inovasi dan terobosan dalam peningkatan pendapatan, maka target pembangunan hanya akan berhenti di atas kertas. Daerah akan terjebak dalam siklus “cukup untuk bertahan, tetapi tidak cukup untuk tumbuh”. Karena itu, peningkatan pendapatan harus diupayakan melalui kebijakan yang tajam, terukur, dan berorientasi jangka panjang.

Pertama, strategi perumusan kebijakan fiskal daerah harus diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada. Pajak daerah dan retribusi, yang selama ini menjadi komponen utama PAD, tidak cukup hanya dikelola secara rutin. Diperlukan reformasi regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi lokal, melakukan Inovasi berdampak langsung pada Peningkatan Pendapatan dari Sektor Pajak dan Retribusi, kebijakan insentif dan disinsentif yang mendorong kepatuhan wajib pajak tanpa menghambat iklim usaha. Selain itu, kebijakan pengelolaan aset daerah harus

bergeser dari pola administratif menuju pola produktif, di mana aset dikelola sebagai instrumen investasi yang menghasilkan, bukan sekadar daftar inventaris.

Kedua, optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan perlu diperkuat melalui pemetaan potensi sektoral yang lebih akurat. Potensi dari sektor perkebunan, pariwisata, perdagangan, perikanan, ekonomi digital, *Green Finance* seperti: BPDLH dan BPDPKS harus diposisikan sebagai basis pendapatan baru. Retribusi daerah yang selama ini lebih banyak bersifat konsumtif perlu diseleksi, sehingga hanya retribusi yang produktif dan mendukung pembangunan ekonomi lokal yang dipertahankan. Pada saat yang sama, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus direvitalisasi terutama dalam pngeelolaan *Public Interest* agar mampu menghasilkan dividen dan tidak lagi menjadi beban anggaran. Disamping itu mengupayakan KPBU pada Pembangunan Infrastruktur Berskala Besar

Ketiga, langkah pencapaian harus dilakukan secara bertahap dan berlapis.

- Jangka Pendek**:** perbaikan basis data pajak dan retribusi, peningkatan kapasitas aparatur pemungut, serta digitalisasi sistem pembayaran untuk menekan kebocoran.
- Jangka Menengah**:** pengembangan unit usaha strategis daerah, penerapan kerja sama investasi publik-swasta, dan integrasi program Corporate Social Responsibility (CSR) ke dalam agenda pembangunan daerah.
- Jangka Panjang**:** membangun kemandirian fiskal dengan memperbesar kontribusi PAD hingga mampu mengimbangi, bahkan mengurangi, ketergantungan terhadap transfer pusat.

Dengan arah kebijakan semacam ini, peningkatan pendapatan daerah tidak lagi sekadar menambah angka dalam laporan APBD, tetapi berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengurangi fiscal gap, memperluas ruang belanja produktif, dan memastikan pembangunan daerah dapat berlanjut.

Disamping dengan melakukan kebijakan2 tersebut diatas, proyeksi terhadap pendapatan daerah tetap saja tidak dapat menafikkan variabeal kecenderungan ekonomi saat ini dan kedepannya. Perekonomian saat ini diperkirakan akan berkontribusi bagi peningkatan aktivitas perekonomian Kondisi ini akan berpengaruh kepada penrunan pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2025 sampai dengan 2030 diperkirakan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis akan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut diperikirakan akan dialami dari komponen Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari komponen pendapatan asli daerah sebesar 5 persen, sementara Transfer Pemerintah Pusat diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 1,5 persen. Rendahnya kenaikan ini diperkirakan disebabkan karena melambatnya kenaikan dari bagi hasil baik itu pajak maupun sumberdaya alam sebagai dampak semakin kecilnya produksi minyak. sedangkan tarnsfer pemerintah antar daerah yang berasal dari transfer bagai hasil pajak dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi diperkirakan akan menigkat sebesar 5 persen.

2) Proyeksi Belanja

Upaya memperluas kapasitas fiskal daerah tidak hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan, tetapi juga melalui strategi efisiensi belanja. Salah satu langkah krusial adalah mengurangi inefisiensi pada Belanja Barang dan Jasa yang selama ini sering menyerap porsi besar APBD namun tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan output pembangunan. Rasionalisasi belanja, penerapan prinsip *value for money*, serta pengendalian biaya operasional menjadi kunci agar ruang fiskal dapat diperluas untuk menampung lebih banyak program pembangunan yang bersifat produktif dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikeluarkan APBD benar-benar memberi nilai tambah bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Selain efisiensi belanja, penguatan manajemen risiko tunda bayar dan pengelolaan utang daerah juga menjadi instrumen penting untuk menciptakan APBD yang sehat dan transparan. Praktik tunda bayar yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan beban fiskal di tahun anggaran berikutnya, mengganggu arus kas, bahkan merusak kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, akan dilakukan kebijakan sistem pengendalian keuangan yang ketat, perencanaan anggaran yang realistis, serta disiplin dalam pengendalian defisit. Transparansi dalam pengelolaan kewajiban daerah juga akan memperkuat akuntabilitas dan memastikan bahwa APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan.

Selanjuthya, belanja pada tahun anggaran 2025-2030 diproyeksikan berdasarkan pertumbuhan proyeksi dari pendapatan. Artinya besaran belanja sangat tergantung pada perkiraan pendapatan daerah. Pada tahun 2025 sampai dengan 2029 pendapatan daerah diproyeksi meningkat maka belanja daerah juga diproyesi meningkat. Pada tahun 2025-2029 komponen secara rata-rata diperkirakan akan meningkat sebesar 1 persen, kecuali belanja barang dan jasa meningkat rata-rata sebesar pada tahun 2026 akan mengaami penurunan. Hal disebabkan karena pada tahun 2026 belanja barang dan jasa honorer akan dihapuskan.

3) Pembiayaan

Salah satu strategi pembiayaan untuk memperluas ruang fiskal daerah adalah dengan membuka kemungkinan pinjaman daerah baik kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun lembaga keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman daerah ini bukan semata untuk menutup defisit, melainkan diarahkan pada pembiayaan program pembangunan yang bersifat produktif, seperti infrastruktur dasar, layanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan mekanisme yang tepat, pinjaman daerah dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan tanpa harus membebani APBD secara jangka pendek, asalkan dikelola secara hati-hati, transparan, dan dengan analisis kelayakan yang matang.

Di sisi lain, penyertaan modal pada BUMD yang potensial juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat basis pendapatan daerah. Rencana penambahan modal pada Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) dan PT. Bumi Siak Pusako (BSP) misalnya, merupakan bentuk investasi daerah yang diharapkan mampu memberikan keuntungan jangka

panjang melalui peningkatan dividen dan memperluas kontribusi terhadap PAD. Dengan penguatan permodalan, BUMD tidak hanya menjadi entitas bisnis, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Langkah ini sekaligus menciptakan sinergi antara kebijakan fiskal daerah dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berbasis kemandirian.

Terkait dengan hal tersebut pembiayaan diperkirakan akan mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2025 sampai 2030. Berdasarkan besaran perkirakan peningkatan pendapatan dan belanja tersebut untuk periode RPJMD 2025-2030 dapat dilihat perkiraan belanja seperti pada tabel berikut:

Tabel II.151 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025-2030

No	Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi (Rp)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	PENDAPATAN	**3,525,740,871,817.72**	**3,689,626,108,505.00**	**3,754,523,406,402.65**	**3,819,016,589,071.11**	**3,901,864,146,421.01**	**3,987,770,600,280.41**	**4,076,878,011,688.47**
1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**404,020,796,658.72**	**471,871,344,060.00**	**495,464,911,263.00**	**520,238,156,826.15**	**546,250,064,667.46**	**573,562,567,900.83**	**602,240,696,295.87**
1.1	Pajak Daerah	137,788,533,547.00	247,532,500,000.00	259,909,125,000.00	272,904,581,250.00	286,549,810,312.50	300,877,300,828.13	315,921,165,869.53
1.2	Retribusi Daerah	175,269,009,198.46	173,715,554,145.00	182,401,331,852.25	191,521,398,444.86	201,097,468,367.11	211,152,341,785.46	221,709,958,874.73
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	73,977,162,709.00	23,391,489,915.00	24,561,064,410.75	25,789,117,631.29	27,078,573,512.85	28,432,502,188.49	29,854,127,297.92
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16,986,091,204.26	27,231,800,000.00	28,593,390,000.00	30,023,059,500.00	31,524,212,475.00	33,100,423,098.75	34,755,444,253.69
2	**Pendapatan Transfer**	**3,121,720,075,159.00**	**3,217,754,764,445.00**	**3,259,058,495,139.65**	**3,298,778,432,244.96**	**3,355,614,081,753.55**	**3,414,208,032,379.58**	**3,474,637,315,392.60**
2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**2,992,706,803,607.00**	**3,105,023,820,440.00**	**3,140,691,003,934.40**	**3,174,492,566,479.44**	**3,225,113,922,699.76**	**3,277,182,865,373.10**	**3,330,760,890,035.80**
2.1.1	**Transfer Dana Perimbangan**	**2,846,102,914,511.00**	**2,960,391,010,440.00**	**2,994,533,414,054.40**	**3,026,793,379,885.04**	**3,075,856,123,007.51**	**3,126,349,234,027.37**	**3,178,334,003,646.93**
2.1.1	Dana Bagi Hasil	2,151,996,944,000.00	2,173,516,913,440.00	2,195,252,082,574	2,217,204,603,400.14	2,239,376,649,434.15	2,261,770,415,928.49	2,284,388,120,087.77
2.1.2	Dana Alokasi Umum	394,237,768,555.00	453,849,351,000.00	462,926,338,020.00	469,870,233,090.30	493,363,744,744.82	518,031,931,982.06	543,933,528,581.16
2.1.3	Dana Alokasi Khusus	299,868,201,956.00	333,024,746,000.00	336,354,993,460.00	339,718,543,394.60	343,115,728,828.55	346,546,886,116.83	350,012,354,978.00
2.2.	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**146,603,889,096.00**	**144,632,810,000.00**	**146,157,589,880.00**	**147,699,186,594.40**	**149,257,799,692.26**	**150,833,631,345.73**	**152,426,886,388.87**
	Dana Desa	131,472,055,096.00	136,787,632,000.00	138,155,508,320.00	139,537,063,403.20	140,932,434,037.23	142,341,758,377.60	143,765,175,961.38
	Dana Insentif Fiskal	15,131,834,000.00	7,845,178,000.00	8,002,081,560.00	8,162,123,191.20	8,325,365,655.02	8,491,872,968.12	8,661,710,427.49
2.3	**Transfer Antar Daerah**	**129,013,271,552.00**	112,730,944,005.00	118,367,491,205.25	124,285,865,765.51	130,500,159,053.79	137,025,167,006.48	143,876,425,356.80

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2024 dan data olahan

Tabel II.152 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025-2030

No	Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi (Rp)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	BELANJA DAN TRANSFER	**3,615,947,720,604.17**	**3,768,768,592,115.00**	**3,825,469,051,199.54**	**3,894,321,925,245.09**	**3,955,871,584,017.34**	**4,019,068,604,691.41**	**4,083,976,358,969.56**
	BELANJA DAERAH	**3,114,623,237,821.17**	**3,324,165,041,273.00**	**3,378,435,780,301.66**	**3,444,844,718,668.02**	**3,503,936,134,389.45**	**3,564,660,512,227.26**	**3,627,081,130,799.10**
1	**BELANJA OPERASI**	**2,652,305,698,094.02**	**2,499,216,052,245.00**	**2,642,655,241,662.32**	**2,686,717,874,823.99**	**2,722,422,926,001.00**	**2,758,669,313,690.41**	**2,795,466,174,620.14**
1.1	Belanja Pegawai	1,273,396,081,405.00	1,136,558,031,683.35	1,600,244,322,211.00	1,616,246,765,433.11	1,632,409,233,087.44	1,648,733,325,418.32	1,665,220,658,672.50
1.2	Belanja barang dan Jasa	1,234,871,516,209.16	1,232,131,724,689.65	906,774,359,183.44	933,977,589,958.95	952,657,141,758.13	971,710,284,593.29	991,144,490,285.15
1.3	Belanja Subsidi	21,920,833,286.00	9,910,959,943.00	10,010,069,542.43	10,110,170,237.85	10,211,271,940.23	10,313,384,659.64	10,416,518,506.23
1.4	Belanja Hibah	100,381,666,143.86	95,125,035,929.00	99,881,287,725.45	100,380,694,164.08	100,882,597,634.90	101,387,010,623.07	101,893,945,676.19
1.5	Belanja Bantuan Sosial	21,735,601,050.00	25,490,300,000.00	25,745,203,000.00	26,002,655,030.00	26,262,681,580.30	26,525,308,396.10	26,790,561,480.06
2	**BELANJA MODAL**	**461,578,403,627.15**	**820,829,554,237.00**	**731,619,909,500.43**	**753,924,608,413.74**	**777,268,950,603.85**	**801,704,498,174.40**	**827,285,388,812.89**
2.1	Belanja Tanah		1,000,000,000.00					
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	85,347,971,046.00	155,366,777,106.00	156,143,610,991.53	156,924,329,046.49	157,708,950,691.72	158,497,495,445.18	159,289,982,922.41
2.2.1	Belanja Gedung dan Bangunan	71,466,581,186.51	141,687,050,443.00	142,395,485,695.22	143,107,463,123.69	143,823,000,439.31	144,542,115,441.51	145,264,826,018.71
2.2.2	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	283,810,720,565.64	501,933,221,470.00	412,029,882,543.50	432,631,376,670.68	454,262,945,504.21	476,976,092,779.42	500,824,897,418.39
2.2.3	Belanja Asset Tetap Lainnya	20,779,718,829.00	20,358,088,518.00	20,561,669,403.18	20,767,286,097.21	20,974,958,958.18	21,184,708,547.77	21,396,555,633.24
2.2.4.	Belanja Asset lainnya	173,412,000.00	484,416,700.00	489,260,867.00	494,153,475.67	499,095,010.43	504,085,960.53	509,126,820.14
3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**739,136,100.00**	**4,119,434,791.00**	**4,160,629,138.91**	**4,202,235,430.30**	**4,244,257,784.60**	**4,286,700,362.45**	**4,329,567,366.07**
3.1.	Belanja Tak Terduga	739,136,100.00	4,119,434,791.00	4,160,629,138.91	4,202,235,430.30	4,244,257,784.60	4,286,700,362.45	4,329,567,366.07
4	**BELANJA TRANSFER**	**501,324,482,783.00**	**444,603,550,842.00**	**447,033,270,897.89**	**449,477,206,577.07**	**451,935,449,627.89**	**454,408,092,464.15**	**456,895,228,170.47**

No	Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi (Rp)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.1	Transfer /Bagi Hasil Ke Desa		41,340,460,335.00	41,753,864,938.35	42,171,403,587.73	42,593,117,623.61	43,019,048,799.85	43,449,259,287.85
4.2	Transfer/Bantuan Keuangan	501,324,482,783.00	403,263,090,507.00	405,279,405,959.54	407,305,802,989.33	409,342,332,004.28	411,389,043,664.30	413,445,988,882.62

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2024 dan data olahan

Tabel II.153 Poyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025-2030

Uraian	2024 Tahun Dasar	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEMBIAYAAN							
PENERIMAAN	87,671,284,252.67	79,142,483,610.00	150,945,644,796.89	125,305,336,173.98	104,007,437,596.33	49,298,004,411.00	7,098,347,281.09
Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	87,671,284,252.67	79,142,483,610.00	150,945,644,796.89	125,305,336,173.98	104,007,437,596.33	49,298,004,411.00	7,098,347,281.09
Pencairan Dana Cadangan							
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							
Penerimaan Pinjaman Daerah							
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah							
Penerimaan Piutang Daerah							
Total Penerimaan							
PENGELUARAN	0.00	0.00	80,000,000,000.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	18,000,000,000.00	0.00
Pembentukan Dana Cadangan							
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00	80,000,000,000.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	18,000,000,000.00	0.00
Pembayaran Biaya Pinjaman Luar Negeri							
Pemberian Pinjaman							
ADB							

Uraian	2024 Tahun Dasar	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga							
Total Pengeluaran							
PEMBIAYAAN NETTO	**87,671,284,252.67**	**79,142,483,610.00**	**70,945,644,796.89**	**75,305,336,173.98**	**54,007,437,596.33**	**31,298,004,411.00**	**7,098,347,281.09**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2024 dan data olahan

Tabel II.154 Rekapitulasi Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2025-2030

No	Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi (Rp)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**							
	Pendapatan Asli Daerah	404,020,796,658.72	471,871,344,060.00	495,464,911,263.00	520,238,156,826.15	546,250,064,667.46	573,562,567,900.83	602,240,696,295.87
	Pendapatan Transfer	3,121,720,075,159.00	3,217,754,764,445.00	3,259,058,495,139.65	3,298,778,432,244.96	3,355,614,081,753.55	3,414,208,032,379.58	3,474,637,315,392.60
	Lain-Pendapatan Daerah yang Sah							
	JUMLAH PENDAPATAN	**3,525,740,871,817.72**	**3,689,626,108,505.00**	**3,754,523,406,402.65**	**3,819,016,589,071.11**	**3,901,864,146,421.01**	**3,987,770,600,280.41**	**4,076,878,011,688.47**
2	**BELANJA**							
	Belanja Operasi	2,652,305,698,094.02	2,499,216,052,245.00	2,642,655,241,662.32	2,686,717,874,823.99	2,722,422,926,001.00	2,758,669,313,690.41	2,795,466,174,620.14
	Belanja Modal	461,578,403,627.15	820,829,554,237.00	731,619,909,500.43	753,924,608,413.74	777,268,950,603.85	801,704,498,174.40	827,285,388,812.89
	Belanja Tak Terduga	739,136,100.00	4,119,434,791.00	4,160,629,138.91	4,202,235,430.30	4,244,257,784.60	4,286,700,362.45	4,329,567,366.07
	Belanja Transfer	501,324,482,783.00	444,603,550,842.00	447,033,270,897.89	449,477,206,577.07	451,935,449,627.89	454,408,092,464.15	456,895,228,170.47
	JUMLAH BELANJA	**3,615,947,720,604.17**	**3,768,768,592,115.00**	**3,825,469,051,199.54**	**3,894,321,925,245.09**	**3,955,871,584,017.34**	**4,019,068,604,691.41**	**4,083,976,358,969.56**
	SURPLUS/DEFISIT	**(90,206,848,786.45)**	**(79,142,483,610.00)**	**(70,945,644,796.89)**	**(75,305,336,173.98)**	**(54,007,437,596.33)**	**(31,298,004,411.00)**	**(7,098,347,281.09)**
	PEMBIAYAAN							
	Penerimaan Pembiayaan	87,671,284,252.67	79,142,483,610.00	150,945,644,796.89	125,305,336,173.98	104,007,437,596.33	49,298,004,411.00	7,098,347,281.09
	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	80,000,000,000.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	18,000,000,000.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	**87,671,284,252.67**	**79,142,483,610.00**	**70,945,644,796.89**	**75,305,336,173.98**	**54,007,437,596.33**	**31,298,004,411.00**	**7,098,347,281.09**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2024 dan data olahan

2.2.2.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang 2025-2029, diperkirakan semakin meningkat. Peningkatan ini berdasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan sedikit mengalami peningkatan seiring dengan semakin membaiknya perekonomian daerah. Sedangkan SILPA diperkikan semakin menurun dibandingkan dengan tahun 2025-2029

Perkiraan kapasitas rii kemampuan keuangan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel II.155 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025-2030

Uraian	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	**3,689,626,108,505.00**	**3,754,523,406,402.65**	**3,819,016,589,071.11**	**3,901,864,146,421.01**	**3,987,770,600,280.41**	**4,076,878,011,688.47**
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda						
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	79,142,483,610.00	150,945,644,796.89	125,305,336,173.98	104,007,437,596.33	49,298,004,411.00	7,098,347,281.09
Total Penerimaan	3,768,768,592,115.00	3,905,469,051,199.54	3,944,321,925,245.09	4,005,871,584,017.34	4,037,068,604,691.41	4,083,976,358,969.56
Belanja Tidak Langsung	1,711,687,878,397.35	2,182,914,153,376.77	2,202,217,491,442.11	2,221,701,233,870.76	2,241,367,121,561.28	2,261,216,912,505.45
Belanja Pegawai	1,136,558,031,683.35	1,600,244,322,211.00	1,616,246,765,433.11	1,632,409,233,087.44	1,648,733,325,418.32	1,665,220,658,672.50
Beanja Subsidi	9,910,959,943.00	10,010,069,542.43	10,110,170,237.85	10,211,271,940.23	10,313,384,659.64	10,416,518,506.23
Belanja Hibah	95,125,035,929.00	99,881,287,725.45	100,380,694,164.08	100,882,597,634.90	101,387,010,623.07	101,893,945,676.19
Belanja Bantuan Sosial	25,490,300,000.00	25,745,203,000.00	26,002,655,030.00	26,262,681,580.30	26,525,308,396.10	26,790,561,480.06
Belanja Transfer	444,603,550,842.00	447,033,270,897.89	449,477,206,577.07	451,935,449,627.89	454,408,092,464.15	456,895,228,170.47
Pengeluaran Pembiayaan	0.00	80,000,000,000.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	18,000,000,000.00	0.00
Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan	**1,711,687,878,397.35**	**2,262,914,153,376.77**	**2,252,217,491,442.11**	**2,271,701,233,870.76**	**2,259,367,121,561.28**	**2,261,216,912,505.45**
Kapasitas riil kemampuan keuangan	**2,057,080,713,717.65**	**1,642,554,897,822.77**	**1,692,104,433,802.98**	**1,734,170,350,146.58**	**1,777,701,483,130.13**	**1,822,759,446,464.11**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bengkalis Tahun 2024 dan data olahan

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas, setelah Bupati terpilih resmi dilantik. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I

Dialokasikan untuk mendanai membiaya belanja langsung wajib mengikat serta pemenuruhan penerapan urusan wajib pelayanan dasa, dan di dalamnya termasuk kewajiban mandatori dianatara alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen , anggaran kesehatan 10 persen, serta belanja Infrastruktur 25 persen dari transfer umum yang diterima Kabupaten Bengkalis

Prioritas II

Dialokasikan untuk pendanaan:

4) program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi BUPATI periode 2025-2029, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
5) program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD.

Prioritas III,

Merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II.

Tabel II.156 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2030

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Prioritas I**						
	Pendidikan	753,753,718,423.00	765,093,810,239.91	778,864,385,049.02	791,174,316,803.47	803,813,720,938.28	816,795,271,793.91
	Kesehatan	205,708,071,371.77	164,255,489,782.28	169,210,443,380.30	173,417,035,014.66	177,770,148,313.01	182,275,944,646.41
	Infrastruktur	514,270,178,429.41	410,638,724,455.69	423,026,108,450.75	433,542,587,536.65	444,425,370,782.53	455,689,861,616.03
2	**Prioritas II**	350,009,247,296.08	181,540,124,006.93	192,602,098,153.75	201,621,846,475.08	211,015,345,857.79	220,799,021,044.66
3	**Prioritas III**	233,339,498,197.39	121,026,749,337.96	128,401,398,769.16	134,414,564,316.72	140,676,897,238.52	147,199,347,363.10

Sumber: data olahan, 2025

2.2.2.3 Pembiayaan Alternatif

Pembiayaan alternatif pembangunan daerah adalah berbagai sumber dana selain anggaran yang sudah dtentukan menurut perutaran dan perundang-undanga, yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan daerah. Beberapa opsi pembiayaan alternatif yang dapat dmanfaatkan oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

   Kerja sama ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalin kemitraan dengan sektor badan usaha dalam pembiayaan, pengelolaan, dan pembangunan infrastruktur publik. KPBU dapat mengurangi beban anggaran daerah sambil tetap mempercepat pembangunan.

2. Obligasi Daerah

   Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi untuk menarik dana dari pasar modal. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan obligasi ini digunakan untuk membiayai proyek jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur. Meskipun ini merupakan opsi yang memerlukan perencanaan matang dan pengelolaan utang yang baik, obligasi daerah bisa menjadi solusi pembiayaan yang efisien.

3. Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

   Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi dana zakat, infaq, dan sedekah yang ada di masyarakat untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, terutama dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berbasis masyarakat.

4. Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

   Banyak perusahaan yang memiliki program CSR yang dapat diarahkan untuk mendukung proyek pembangunan daerah, seperti pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan perusahaan untuk mengoptimalkan potensi dana CSR ini.

5. Sumber Dana Internasional dan Donor

   Sumber pembiayaan lainnya adalah dana hibah atau pinjaman dari lembaga internasional atau donor, seperti Bank Dunia, ADB, atau lembaga bilateral. Dana ini umumnya ditujukan untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti program pengurangan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kapasitas pemerintahan.

6. Pendanaan Berbasis Hasil (*Results-Based Financing*/RBF)

   Pendanaan berbasis hasil mengacu pada model pembiayaan yang memberikan dana setelah terjadinya pencapaian atau hasil yang terukur, seperti dalam sektor kesehatan, pendidikan, atau pengelolaan lingkungan. Ini mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

Dengan memanfaatkan berbagai alternatif pembiayaan ini, daerah dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya anggaran tradisional, mempercepat pembangunan, dan mencapai tujuan pembangunan secara lebih efisien dan berkelanjutan

2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bengkalis dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kondisi capaian pembangunan pada periode RPJMD yang lalu. Metode identifikasi dan perumusan permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan analisis data capaian pembangunan. Permasalahan pembangunan pada setiap urusan juga dielaborasi dari permasalahan dan kendala Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan sebelumnya. Secara detail identifikasi dan analisis permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis akan dijelaskan pada bahagian berikut:

2.3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a) Ketimpangan pembangunan antar wilayah berdampak pada disparitas sebaran penduduk antar kecamatan dan tekanan pada daya dukung lahan di wilayah tertentu.

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis tersebar di Pulau Sumatera sebanyan 69%, Pulau Bengkalis 22% dan Pulau Rupat 9%. Wilayah kecamatan yang berada di Pulau Sumatera, khususnya Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bathin Solapan merupakan wilayah yang terbuka dengan akses jalan lintas Sumatera, sehingga cenderung terbuka dengan arus migrasi, baik dalam kabupaten, dalam provinsi dan antar provinsi. Pembangunan yang pesat pada daerah-daerah ini yang diiringi oleh perkembangan industri, perdagangan dan jasa menjadikan daerah-daerah ini sebagai konsentrasi penduduk terbanyak. Kabupaten Bengkalis temasuk daerah dengan kategori penduduk sangat jarang di Provinsi Riau, dengan proporsi jumlah penduduk Bengkalis sekitar 9% terhadap jumlah penduduk Provinsi Riau.

Distribusi penduduk antar wilayah kecamatan yang mengalami ketimpangan, dengan kepadatan 68 jiwa per Km2 pada tahun 2022. Kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Mandau (297 jiwa/Km2) dan terendah di Kecamatan Bandar Laksama (13 jiwa/Km2). Kecamatan Bengkalis sebagai Ibu Kota Kabupaten atau pusat pemerintahan dan Kecamatan Bathin Solapan yang berada di jalur lintas Sumatera merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk paling besar dengan pertumbuhan penduduk relatif lebih tingg dibandingkan kecamatan lainnya. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis sebesar 1,32% pada tahun 2023. Pertumbuhan penduduk pada wilaya-wilayah dengan kepadatan jarang, cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, khususnya pada Kecamatan Bandar Laksamana (2,72%) dan Siak Kecil (2,58%). Hal ini mengindikasikan bahwa mobilitas penduduk pada kepadatan jarang merupakan upaya pencarian lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi yang lebih baik pada wilayah-wilayah yang masih memiliki ketersediaan sumberdaya lahan. Pergerakan penduduk pada wilayah-wilayah dengan kepadatan jarang dalam jangka panjang akan menyebabkan terjadinya tekanan

pada daya dukung lahan yang semakin tinggi. Wilayah pedesaan atau pinggiran yang masih memiliki potensi lahan berupa hutan dan pertanian dapat menarik penduduk yang mencari pekerjaan atau mencari peluang usaha. Pemerataan pembangunan antar wilayah menjadi sangat penting dalam pembangunan daerah. Wilayah pedesaan atau terpinggirkan kan mengalami kekurangan investasi dan infrastruktur, sehingga dapat mengakibatkan kurangnya akses terhadap layanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan. Mempersempit kesenjangan sosial-ekonomi antara kota dan pedesaan dapat menjadi pilihan untuk mengurangi terjadinya asur migrasi keluar yang berlebihan dari wilayah pedesaan.

Ketidakseimbangan populasi penduduk antar wilayah meyebabkan urbanisasi yang berlebihan, kemacetan lalu lintas, tekanan pada sumberdaya alam pada daerah padat penduduk.

Konsentrasi penduduk Kabupaten Bengkalis yang dominan pada Pulau Sumatera (69%) merupakan gambaran ketidakseimbangan penyebaran populasi daerah yang dapat disebabkan oleh arus urbanisasi pada daerah-daerah perkotaan dan industri. Kepadatan penduduk yang tinggi pada Kecamatan Mandau (297 jiwa/Km2) mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan kependudukan dan kewilayahan, seperi kemacetan lalu lintas pada daerah perkotaan, tekanan pada sumberdaya alam.

Ketidakseimbangan populasi antar wilayah yang diakibatkan oleh dinamika ekonomi yang timpang. Wilayah-wilayah dengan peluang kerja dan kehidupan ekonomi yang lebih baik cenderung menarik lebih banyak penduduk, sementara wilayah yang kurang berkembang mungkin mengalami migrasi keluar yang berlebihan. Pusat-pusat ekonomi, pusat industri dan perkotaan menawarkan lebih banyak kesempatan dalam hal infrastruktur, layanan, dan aksesibilitas, sehingga menjadi destinasi utama untuk urbanisasi. Kepadatan penduduk pada setiap wilayah akan berpengaruh terhadap kebutuhan lahan dalam berbagai penggunaan. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat memicu permasalahan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan, termasuk permasalahan kriminalitas dan permasalahan lingkungan hidup. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat memicu permasalahan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan, termasuk permasalahan kriminalitas dan permasalahan lingkungan hidup.

Wiayah dengan tingkat kepadatan penduduk mengakibatkan tekanan pada sumberdaya alam. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ketergantungan wilayah pada daerah lain akibat ketidakmampuan wilayah menyediakan kebutuhan penduduk. Permasalahan penyediaan kebutuhan konsumsi yang tinggi pada daerah dengan kepadatan tinggi menuntut distribusi logistik yang lebih baik untuk menjadi kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan air, energi, dan lahan pertanian yang tinggi menyebabkan tekanan yang berlebihan pada lingkungan. Penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan pembangunan yang tidak terkendali dapat menyebabkan degradasi lingkungan seperti polusi udara, kerusakan habitat, dan penurunan kualitas air, yang berdampak pada kualitas Kesehatan penduduk dalam jangka panjang. Pemerataan pembangunan pada semua wilayah menjadi penting dalam penyelesaian masalah kependudukan.

Bonus demografi ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif (muda) yang lebih besar membutuhkan lapangan pekerjaan, sarana dan prasanan umum yang besar dan perlu pengelolaan yang tepat.

Penyiapan kebijakan pembangunan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi dan mengurangi dampak negative bonus demografi sangat diperlukan. Beberapa hal secara simultan perlu dipersiapkan, yaitu kebijakan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan akses terhadap layanan publik, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Bonus demografi ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Komposisi penduduk usia produktif (15-65 tahun) di Kabupaten Bengkalis mengalami perubahan dari 64% pada tahun 2005 menjadi 63% pada tahun 2010 dan 68% pada tahun 2022. Kemajuan dalam bidang kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan telah meningkatkan harapan hidup penduduk. Hal ini menjadi salah satu penyebab pertambahan jumlah penduduk usia produktif, selain dari peningkatan angka kelahiran beberapa dekade yang lalu yang menghasilkan generasi besar penduduk usia produktif saat ini.

Proporsi penduduk usia kerja yang meningkat menuntut kebutuhan lapangan kerja yang memadai untuk mengakomodasi penduduk usia muda. Hal ini memerlukan pasar kerja yang dinamis akibat peningkatan harapan bagi generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Peningkatan pendidikan dan aspirasi, menjadikan generasi muda cenderung mencari pekerjaan yang memadai dan menantang. Kondisi ini menuntut Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan teknologi, transportasi dan fasilitas umum lainnya dalam pembangunan. Pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut memerlukan investasi yang besar dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, pembangunan jangka panjang memerlukan perencanaan sistematis yang berkelanjutan untuk memenuhi dinamika perkembangan penduduk.

Penyediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Bengkalis masih sangat diperlukan, mengingat mayoritas tenaga kerja masih menggantungkan perekonomian pada perusahaan dan lapangan usaha milik orang lain dengan bekerja sebagai pegawai/karyawan, dan masih minimnya tenaga kerja yang membuka lapangan usaha sendiri sebagai pekerjaan utama. Hal ini terlihat bahwa, sebagian besar penduduk berumur 15 tahun keatas yang berkerja semingu lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawa dan hanya sebanyak 4,79% penduduk Bengkalis yang bekerja dengan mempekerjakan penduduk lain dengan dibayar sebagai tenaga kerja. Oleh sebab itu, bonus demografi harus dikelola sebagai modal dasar pembangunan daerah, sehingga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan bonus demografi memerlukan penciptaan lapangan kerja dan investasi serta pembangunan infrastruktur. Penyesuaian keterampilan generasi mudah dengan kebutuhan pasar kerja (link and match) perlu menjadi prinsip kebijakan pembangunan ketenagakerjaan untuk mengatasi terjadinya pengangguran struktural. Pemerataan pembangunan dan layanan publik serta infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan perlu diatasi agar tidak mengakibatkan terjadi peningkatan disparitas sosial-ekonomi. Peningkatan produktivitas, investasi dalam sumber daya manusia dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi penting bagi pengelolaan bonus demografi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.3.1.1.1 Daya saing ekonomi

a) Perkembangan ekonomi sektor non migas masih rendah dan belum mampu menjadi penopang perekonomian daerah

Perkembangan sektor non-migas yang rendah dalam perekonomian daerah mencerminkan keterbatasan dalam diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi menekankan pentingnya mengembangkan berbagai sektor dalam perekonomian daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah yang lebih unggul dan tangguh. Perkembangan sektor non-migas yang lambat mengakibatkan ketergantungan perekonomian daerah pada sektor migas. Ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor akan dapat mengurangi ketahanan ekonomi daerah terhadap fluktuasi pasar dan risiko yang terkait dengan sektor mingas.

Sampai saat ini sektor migas masih dominan sebagai pembentuk struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis dengan kontribusi melebihi 50%. Dominasi sektor migas dalam struktur perekonomian daerah berdampak pada pertumbuhan sektor non-migas. Ketika satu sektor mendominasi perekonomian daerah, sumber daya dan investasi cenderung dialokasikan ke sektor tersebut, tidak mengakibatkan terjadinya efek substitusi, sehingga mengurangi kesempatan untuk mengembangkan sektor lainnya. Dalam hal ini, perekonomian yang fokus pada sektor migas berdampak pada berkurangnya insentif dan investasi dalam pengembangan sektor non-migas. Hal ini mengakibatkan sektor non-migas tidak mampu tumbuh dan menjadi penopang utama ekonomi daerah.

Dominasi sektor migas dan kondisi sektor non-migas belum menjadi penopang ekonomi daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan inklusif menuntut terjadinya pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan peluang ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat. Namun, ketika sektor non-migas masih belum berkembang, maka peluang kerja dan pendapatan mungkin terbatas, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak terlibat dalam sektor migas. Hal ini dapat menghasilkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian diperlukan kebijakan pembangunan yang dapat mengurangi ketergantungan perekonomian daerah pada sektor migas, meningkatkan ketahanan ekonomi, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat.

Ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor migas menjadikan perekonomian Bengkalis rentan terhadap gejolak ekomoni dunia dan menghambat perkembangan ekonomi lokal

Sampai saat ini sektor pertambangan, khususnya minyak dan gas masih mendominasi perekonomian daerah Kebupaten Bengkalis (50,92% pada tahun 2023 pada PDRB ADHK 2010). Sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah pada minyak dan gas, mengakibatkan Kabupaten Bengkalis memiliki ketergantungan yang tinggi pada pendapatan sektor pertambangan. Ketergantungan ekonomi pada sektor minyak dan gas dapat menciptakan ketidakstabilan dalam perekonomian, yang disebabkan oleh fluktuasi

harga minyak dunia. Gejolak harga minyak pada pasar internasional dapat menyebabkan kerentanan ekonomi daerah. Hal ini akan diperburuk oleh kondisi penurunan produksi minyak dan gas sebagai sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources). Dalam jangka panjang kondisi ini akan dapat menciptakan ketidakpastian bagi pembangunan jangka panjang dan ketahanan ekonomi Bengkalis.

Selain mengakibatkan ketergantungan, dominasi komiditas minyak dan gas pada perekonomian Bengkalis, juga menyebabkan berkurangnya insentif pada pengembangan sektor-sektor diluar pertambangan. Hal ini disebabkan alokasi sumberdaya dan investasi cenderung mengalir pada sektor pertambangan, sehingga peluang ekonomi yang beragam dan inklusif terhambat, terutama pada sektor pertanian, industri dan pariwisata. Hal ini berakibat pada daerah tidak dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan alam secara merata. Jika kondisi ini tidak diatasi, maka Bengkalis tidak memiliki keberagaman sektor ekonomi yang kuat di luar sektor minyak dan gas. Ketika sektor migas mengalami tekanan atau penurunan, dampaknya sangat terasa pada perekonomian daerah secara keseluruhan. Ini menciptakan kerentanan ekonomi yang tinggi dan membatasi kemampuan Bengkalis untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global.

Ketergantungan perekonomian daerah pada satu sektor tertentu, mengakibatkan daerah dihadapkan dengan masalah daya saing. Daya saing daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi alamnya, tetapi juga oleh keragaman ekonomi, kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan inovasi. Pada kondisi sektor pertambangan minyak dan gas mendominasi perekonomian daerah, maka daerah cenderung kurang berinovasi dan kurang beragam dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini dapat mengurangi daya tarik Bengkalis sebagai tujuan investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Upaya mitigasi dan mengurangi risiko ketergantungan ekonomi terhadap gejolak ekonomi dunia, maka Bengkalis perlu untuk mendorong diversifikasi ekonomi dengan memberikan dukungan pengembangan sektor-sektor selain pertambangan, seperti pengembangan pariwisata, pengembangan pertanian berkelanjutan, dan investasi dalam industri lokal. Selain itu, pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong inovasi dan kewirausahaan juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menjadikan perekonomian daerah lebih tangguh terhadap perubahan ekonomi global.

Pengembangan sektor non migas belum terarah secara sistematis sehingga belum terdapat fokus pengembangan ekonomi jangka panjang pasca migas

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Bengkalis antara lain disebabkan oleh kondisi geografis daerah menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari pulau-pulau memperumit aksesibilitas dan konektivitas antarpulau, da juga meningkatkan biaya infrastruktur dan transportasi. Hal ini menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekonomi daerah. Keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan antarpulau menghambat distribusi barang, akses pasar, dan integrasi ekonomi. Oleh sebab itu diperlukan investasi infrastruktur dan transportasi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Dominasi lahan gambut dalam wilayah Bengkalis (sampai 60%) merupakan tantangan dalam pengembangan ekonomi dan lingkungan. Lahan gambut rawan terhadap kebakaran hutan, memiliki produktivitas pertanian yang rendah, dan dapat menjadi sumber gas rumah kaca jika tidak dikelola dengan baik. Strategi pemanfaatan lahan gambut yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dan meminimalkan risiko kebakaran lahan dan hutan untuk melestarikan lingkungan hidup. Investasi untuk infrastruktur yang mendukung, teknologi yang inovatif, pelatihan bagi petani dan pelaku usaha lokal, serta kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan perlu diarahkan pada pemanfaatan lahan gambut secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Tantangan untuk meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bengkalis dalah berkaitan denngan penurunan ketergantungan ekonomi globalisasi dan pembangunan integrasi ekonomi lokal. Ketergantungan pada sektor migas, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta kualitas sumber daya manusia yang rendah merupakan beberapa faktor yang menghambat daya saing daerah. Arah pembangunan Kabupaten Bengkalis perlu mengembangkan sektor-sektor ekonomi alternatif sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan minyak dan gas. Potensi pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif perlu dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung investasi, inovasi, dan pengembangan infrastruktur dalam sektor-sektor non migas secara berkelanjutan. Potensi pariwisata yang besar di Pulau Rupat dapat dimanfaatkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Bengkalis. Pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi, pelatihan tenaga kerja, permberdayaan ekonomi masyarakat lokal serta perlindungan lingkungan perlu menjadi fokus dalam pengembangan pariwisata Pulau Rupat. Pemanfaatan potensi pariwisata ini secara efektif akan menjadi pemicu perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkalis untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan minyak dan gas. Pembangunan potensi pariwisata Pulau Rupat juga akan mendorong dalam penciptaan lapangan kerja baru serta pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal melalui pengembangan keterkaitan sektor pariwisata dengan sektor-sektor perekonomian lainnya.

Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat mengakibatkan kemandirian fiskal daerah menjadi rendah

Kemandirian fiskal merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan daerah untuk mengelola keuangan public yang dimiliki secara mandiri tanpa terlalu banyak mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Kabupaten Bengkalis mungkin mengalami keterbatasan dalam hal ini, terutama jika terjadi penurunan pendapatan dari sektor minyak dan gas.

Potensi sumber daya alam dan budaya yang besar yang dimiliki Kabupaten Bengkalis merupakan potensi untuk mendiversifikasi pendapatan asli daerah. Namun, kurangnya investasi dan dukungan untuk mengembangkan sektor-sektor potensial seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif masih menjadi hambatan utama akibat dominasi sektor minyak dan gas dalam perekonomian. Ketergantungan perekonomian

pada sektor pertambangan minyak dan gas menjadi permasalahan pengembangan ekonomi di Kabupaten Bengkalis. Pada sisi lain pertumbuhan sektor pertambangan dalam pendapatan regional Kabupaten Bengkalis menunjukkan trend yang menurun. Dominasi sektor pertambangan dalam perekonian dan kurangnya diversifikasi ekonomi menyebabkan pendapatan asli daerah masih sangat bergantung pada sektor minyak dan gas. Inisiatif untuk menggali potensi sumber daya lainnya seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif masih terbatas.

2.3.1.1.2 Daya saing SDM

a) Potensi kemungkinan terjadinya pergegeseran nilai-nilai budaya sebagai dampak golablisasi dan kemajuan teknologin informasi.

Nilai-nilai budaya Melayu mencerminkan warisan budaya dan tradisi yang dipegang oleh masyarakat melayu. Nilai-nilai budaya Melayu sering kali didasarkan pada ajaran agama, tradisi lokal, dan norma sosial yang telah berkembang selama berabad-abad. Beberapa ciri khas nilai-nilai budaya Melayu meliputi, kesopanan, gotong royong kebersamaan dalam keluarga, keagamaan dan spritualitas, kehortmatan dan martabat, serta adat istiadat melayu lainnya. Nilai-nilai ini merupakan nilai yang dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melayu.

Seiring dengan perkembangan zaman arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi merupakan suatu keniscahyaan. Pada satu sisi arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi bernilai positif, karena dapat memperluas aksesibilitas dan membantu memelihara warisan budaya, mendorong budaya bahasa dan sastra berkembang lebih cepat dan mencapai audiens yang lebih luas, memfasilitasi produksi dan distribusi karya seni dan budaya secara global, memungkinkan pengembangan pendidikan multikultural yang memperkenalkan siswa pada berbagai budaya di dunia. Hal ini dapat membantu mempromosikan toleransi, pemahaman, dan kerjasama lintas budaya di antara generasi muda. Namun demikian pada sisi yang lain juga berpotensi memiliki dampak negatif diantaranya dapat membawa masuk budaya asing yang mengancam identitas budaya Melayu. Nilai-nilai tradisional Melayu, seperti gotong royong, kekeluargaan, dan keagamaan, dapat tergerus oleh nilai-nilai yang diimpor dari budaya asing yang lebih individualistik dan konsumtif. Disamping itu juga meningkatnya dalam batas-batas tertentu penggunaan bahasa Inggris dan bahasa asing dalam lingkungan digital, jika tidak berhati hati terdapat risiko terjadinya penurunan penggunaan bahasa Melayu tradisional dan penurunan minat terhadap sastra Melayu. Globalisasi sering kali juga mengubah budaya menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan. Ini dapat mengarah pada pemajuan budaya yang dangkal dan dilabeli sebagai "Melayu" tanpa mempertimbangkan makna sebenarnya dari nilai-nilai budaya Melayu.

Hal lain menyangkut kebudayaan melayu di Kabupaten Bengkalis adalah belum dimanfaatkan secara maksimal atau belum terintegrasi dengan potensi kebudayaan melayu dengan perekonomian masyarakat khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

2.3.1.1.3 Daya saing sarana prasarana pendukung

a) Belum optimalnya konektifias antar wilayah dan kualitas infastruktur yang masih rendah belum mendukung pembangunan daerah dengan baik

Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi terutama dalam hal indeks daya beli masyarakat menyebabkan pertumbuhan lalu lintas semakin meningkat signifikan, bukan hanya kendaraan penumpang tetapi juga kendaraan barang dan berat muatan. Hal tersebut membutuhkan infrastruktur pendukung dan menyebabkan umur penyusutan jalan semakin cepat dan daya dukung konstruksi jalan jembatan saat ini umumnya tidak mampu berperan sesuai umur ekonomis dan daya dukung muatan sumbu terberat (MST) nya.

Ketersediaan sarana dan prasarana umum yang belum memadai dan belum tersebar merata pada semua wilayah

Infrastuktur ekonomi belum tersedia secara merata di seluruh wilayah dan kondisinya kurang baik. Sebagai contoh masih terdapat ruas jalan dalam kondisi rusak sehingga menyebabkan terganggunya pelayanan dasar dan perputaran ekonomi. Beberapa hal yang menyebabkan persoalan penurunan kualitas jalan di Kabupaten Bengkalis antara lain adalah (1) Dinas PUPR lebih memprioritaskan pembangunan ruas jalan strategis dengan anggaran yang tersedia dan lebih besar dibandingkan dengan pemeliharaan jalan serta dampak rasionalisasi APBD Kabupaten Bengkalis yang dialihkan untuk pemeliharaan jalan, sehingga target kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik saat ini belum bisa dicapai. (2) Ruas jalan sepanjang 37,04 Km kewenangannya diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau dan terdapat ruas sepanjang 191,64 Km yang tumpang tindih dan masuk dalam status jalan lingkungan. (3) Skala prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk ruas jalan strategis yang membutuhkan anggaran besar sehingga anggaran untuk pemeliharaan ruas jalan agar berkondisi baik mengalami penurunan dari sisi penganggarannya.

2.3.1.1.4 Pelayanan Umum

2.3.1.1.4.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat

A. Pendidikan

1) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini belum terselenggara secara optimal pada semua wilayah,
2) Capaian partisipasi sekolah penduduk usia sekolah, khususnya tingkat sekolah mengengah pertama belum optimal.
3) Kualitas sumberdaya tenaga pendidik belum merata pada semua satuan penyelenggara pendidikan,
4) Kualitas sarana dan prasarana pendidikan belum merata sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan dalam penyelenggara pendidikan.
5) Angka melanjutkan studi anak lulusan SD masih rendah pada beberapa wilayah kecamatan yang mengalami kesulitan geografis, khususnya Rupat, Mandau, Talang Mandau dan Bathin Solapan,
6) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini belum terselenggara secara optimal pada semua wilayah,
7) Fasilitas pendidikan sekolah dasar dan menengah belum merata pada seluruh wilayah kecamatan

B. Kesehatan

1) Belum semua penduduk dapat mencangkau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer), terutama wilayah terpencil, pulau, pesisir dan pinggiran hutan,
2) Pencegahan dan penanganan terhadap penyakit menular masih belum optimal,
3) Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk belum merata pada semua wilayah kecamatan,
4) Jumlah kematian bayi, balita, dan neonatal masih menunjukkan tren peningkatan.
5) Kasus kematian ibu masih terjadi.
6) Cakupan pelayanan nifas dan penanganan komplikasi kebidanan belum optimal.
7) Persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten dan bersertifikat kebidanan belum optimal.
8) Persentase persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan belum sepenuhnya optimal.
9) Cakupan layanan dasar kesehatan melalui Posyandu, Puskesmas, rumah sakit, serta ketersediaan tenaga medis per penduduk belum merata.
10) Cakupan pelayanan anak balita, kunjungan bayi, serta keberadaan pembantu Puskesmas belum optimal.
11) Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin masih rendah, termasuk akses terhadap layanan rujukan.
12) Desa Siaga Aktif belum optimal menjangkau seluruh wilayah.
13) Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi masih rendah.
14) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) belum optimal
15) Persentase anak usia 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak belum optimal.
16) Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA belum optimal.
17) Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh melalui program DOTS masih rendah.
18) Kasus diare yang ditangani belum optimal.
19) Jumlah kejadian malaria menunjukkan tren peningkatan.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis masih rendah,
2) Persentase jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat masih tinggi
3) Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap IMB
4) Belum optimalnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
5) Belum optimalnya pelayanan penyediaan air bersih
6) Tingkat abrasi yang tinggi
7) Kondisi jalan kabupaten dalam keadaan baik masih rendah dan berfluktuasi.
8) Pertumbuhan panjang jaringan jalan belum sebanding dengan jumlah penduduk.
9) Belum optimalnya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak
10) Infrastruktur pengaman pantai, tebing, dan longsor masih terbatas.
11) Masih terdapat wilayah rawan banjir.
12) Sebagian jaringan irigasi belum berfungsi optimal.
13) Layanan pengolahan limbah domestik belum menjangkau seluruh rumah tangga.

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

1) Masih terdapatnya beberapa kawasan permukiman kumuh yang belum tertata
2) Masih banyak lingkungan perumahan dan permukiman yang belum didukung oleh PSU yang memadai
3) Dukungan PSU terhadap lingkungan sehat dan aman masih belum optimal
4) Penanganan sengketa tanah garapan masih belum optimal.

E. Ketenteraman, Keterttiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten kota yang ada di Bengkalis belum merata
2) Meningkatnya jumlah kejadian bencana daerah
3) Tindak kriminalitas di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan.
4) Masih rendahnya cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
5) Masih belum optimalnya penyelesaian pelanggaran trantibum

F. Sosial

1) Kondisi KAT sulit dijangkau. Masih ada KAT yang belum terdata dengan baik
2) Belum optimalnya perlindungan sosial bagi fakir miskin
3) Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang dapat direhabilitasi kehidupan sosialnya
4) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial belum optimal dan merata
5) Persentase PPKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar belum optimal dan merata
6) Persentase PPKS yang tertangani belum optimal dan merata

2.3.1.1.4.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1) Tingginya tingkat pencari kerja (pengangguran) di Kabupaten Bengkalis
2) Lapangan pekerjaan di Bengkalis masih belum terbuka Optimal
3) Penyelesaian Sengketa Pengusaha-Pekerja belum optimal
4) Masih rendahnya kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
5) Kurangnya kesadaran pemberi kerja dan tenaga kerja terhadap K3
6) Masih terdapat pekerja/buruh yang belum menjadi peserta program Jamsostek
7) Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah S1/S2/S3 masih tergolong rendah

B. Penanaman Modal

1) Masih belum stabilnya peningkatan jumlah investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Bengkalis
2) Fasilitas dan kemudahan investasi yang masih belum terpenuhi
3) Kesadaran investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih rendah
4) Maraknya investasi dibidang perikanan yang ilegal dan berada dikawasan lindung

C. Kebudayaan

1) Belum optimalnya identifikasi dan penetapan benda, situs dan kawasan cagar budaya
2) Kurangnya pemeliharaan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya
3) Belum optimalnya pengelolaan museum dan pengelolaan barang-barang bersejarah

D. Perpustakaan

1) Pemerataan layanan perpustakaan belum optimal.
2) Masih terbatasnya koleksi bahan bacaan.
3) Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga perpustakaan.
4) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan belum optimal
5) Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan masih rendah.
6) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan
7) Masih terbatas dalam penyediaan teknologi yang bisa diakses secara online
8) Pelayanan perpustakaan belum merata ke seluruh kecamatan yang ada di Bengkalis

E. Kearsipan

1) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan
2) Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal

F. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Masih rendahnya persentase koperasi aktif
2) Masih rendahnya daya saing UMKM

G. Statistika

1) Belum optimalnya dukungan data terhadap perencanaan pembangunan

H. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Belum optimalnya keterlibatan perempuan di swasta maupun di pemerintahan
2) Belum optimalnya perlindungan anak dan perempuan
3) Masih terdapat kasus KDRT

I. Pangan

1) Masih terdapat desa rawan pangan
2) Aspek daya beli dan pemerataan penyebaran atau distribusi bahan pangan masih sulit
3) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pangan dari sisi produksi lokal
4) Masih terjadinya deficit pemenuhan kebutuhan pangan misalnya akibat alih fungsi lahan

J. Pertanahan

1) Minimnya SDM pertanahan Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penataan lahan
2) Rendahnya kesadaran dokumentasi pertanahan sehingga belum optimalnya penataan aset tanah pemerintah
3) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur pengurusan tanah dalam mengurus hak atas tanah

K. Lingkungan Hidup

1) Turunnya indeks kualitas lingkungan hidup
2) Turunnya indeks kualitas udara
3) Rendahnya indeks kualitas air dan lahan
4) Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau.
5) Masih adanya permasalhan lingkungan yang perlu ditangani, yakni terkait pembuangan limbah industri ke aliran sungai sehingga mengakibatkan penurunan kualitas air.
6) Perlu adanya intervensi kebijakan alih fungsi lahan terhadap tutupan lahan yang ada
7) Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan.
8) Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah

L. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Masih adanya penduduk lahir yang belum memperoleh akte kelahiran
2) Belum optimal dan meratanya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) diseluruh wilayah
3) Belum optimalnya kepemilikan akta nikah

M. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Kebijakan daerah terkait pengendalian penduduk masih terbatas dan belum berkelanjutan.
2) Masih rendahnya penggunaan kontrasepsi
3) Angka kelahiran remaja (ASFR 15–19) masih relatif tinggi.
4) Masih terdapat pasangan usia subur di bawah 20 tahun.
5) Unmet need keluarga berencana masih ditemukan meskipun menurun.
6) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB, Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB masih belum optimal

N. Pemuda dan Olahraga

1) Belum optimalnya pembinaan terhadap cabang olah raga yang ada di Kabupaten Bengkalis
2) Belum optimalnya pembinaan terhadap atlit dan pelatih
3) Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga

O. Pemberdayaan Masyatakat dan Desa

1) Belum tergalinya potensi desa
2) Belum optimalnya tata kelola BUMDes

P. Perhubungan

1) Masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum termasuk waktu tunggu kendaraan umum, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.
2) Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas
3) Masih rendahnya pemilik angkutan umum dan perusahaan angkutan umum untuk melakukan uji kir tepat pada waktunya
4) Belum optimalnya pelayanan uji KIR
5) Belum optimalnya pelayanan RoRo

Q. Komunikasi dan Informatika

1) Masih teradapat wilayah yang belum Tercover Mobile Broadband 4G
2) Belum optimalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi pemerintah

2.3.1.1.4.3 Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar

A. Pariwisata

1) Banyak pengeluaran wisatawan yang tidak dapat dideteksi karena pengeluaran wisatawan cenderung menyasar langsung pada masyarakat dan sulit dihitung angka pastinya.
2) Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata
3) Belum optimalnya promosi pariwisata
4) Belum optimalnya kunjungan wisatawan mancanegara
5) Sulitnya aksesibilitas menuju lokasi wisata
6) Masih kecilnya kontribusi Pariwisata terhadap PAD dan PDRB
7) Masih belum optimalnya tingkat hunian akomodasi

B. Perdagangan

1) Sebagian besar komoditi ekspor adalah komoditi migas dan minyak nabati.
2) Belum optimalnya dukungan sertifikasi produk lokal dan masih rendahnya daya saing produk local berkualitas ekspor
3) Belum optimalnya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)
4) Belum optimalnya presentase pengaduan konsumen yang terselesaikan

C. Industri

1) Belum optimalnya dukungan pada pengembangan industri lokal berbasis sumber daya lokal dan masih lemahnya integrasi hulu hilir dalam pengembangan industri
2) Pengembangan industri pertanian masih terkonsentrasi pada komoditi perkebunan
3) Masih belum optimalnya dukungan pada pengembangan pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan berbasis masyarakat.
4) Belum optimalnya pertumbuhan jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)
5) Belum optimalnya Persentase pelaku usaha IKM yang di fasilitasi izin produknya

D. Kelautan dan Perikanan

1) Kualitas sarana dan prasarana tangkap nelayan terutama yang terbuat dari kayu menurun
2) Bantuan terhadap nelayan sudah tidak dapat dilakukan oleh daerah, karna wilayah laut masuk dalam kewenangan provinsi dan pusat
3) Budidaya udang vaname di 6 Kecamatan di bengkalis masih terkendala masalah izin usaha
4) Produksi perikanan belum optimal
5) Belum optimalnya cakupan bina kelompok nelayan
6) Masih rendahnya pendapatan nelayan.
7) Makan ikan yang mahal

E. Pertanian

1) Belum optimalnya produksi komoditi pertanian
2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pertanian
3) Rendahnya tingkat kesejahteraan petani
4) Lemahnya akses pasar dan rantai distribusi hasil pertanian, sehingga petani sulit memperoleh harga yang layak.
5) Belum optimalnya kelembagaan petani dan kelompok tani
6) Keterbatasan diversifikasi usaha pertanian.
7) Kurangnya pemanfaatan teknologi pertanian modern baik dalam proses budidaya maupun pascapanen.
8) Masih adanya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian

2.3.1.1.4.4 Penunjang Urusan

A. Keuangan Daerah

1) Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang belum kompeherenship
2) Rata-rata Rasio PAD terhadap Pendapatan masih berada pada angka 12,01 % belum dapat mengoptimalkan sumber pendapatan secara keseluruha. Sehingga
   tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah dari sumber keuanganyang berasal dari pemerintah pusat.
3) Dinamisasi Realisasi Penerimaan Dari Dana Transfer Pusat ke Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9.23 % lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 19,34 % yang mempengaruhi keseimbangan kebutuhan Belanja Prioritas Pembangunan secara keseluruhan.
4) Kebijakan Nasional berbasis tematik atas pengusulan pendapatan bersumber dari DAK Fisik mempengaruhi target Pembangunan Prioritas yang diajukan setiap tahunnya.
5) Keterbatasan ruang fiskal untuk pembangunan dan belum otimalnya pengelolaan aset daerah.
6) Proporsi Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa di atas Belanja Modal
7) Tunda Bayar/Hutang Tahun 2023 dan 2024 serta Potensi Tunda Bayar/Hutang Tahun 2025 mempengaruhi struktur Perencanaan dan Penganggaran Tahun Berikutnya
8) Masih rendahnya Efektifitas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pencapaian *Ultimate Outcame,* begitu juga pada efisiensi penganggarannya (Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran oleh BPKP).
9) Semakin kecilnya realisasi SILPA dari target yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya.

B. Pengawasan

1) Masih belum meratanya pengetahuan sumberdaya aparatur untuk memahami peraturan-peraturan terkait pelaksanaan kegiatan
2) Belum optimalnya pembinaan oleh pengawas internal terhadap pelaksanaan kegiatan daerah
3) Belum optimalnya pengendalian internal perangkat daerah

C. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

1) Keterbatasan data yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dalam menunjang proses perencanaan
2) Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program Pembangunan daerah belum optimal
3) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan
4) Masih belum optimalnya capaian indeks inovasi daerah

D. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1) Rendahnya Partisipasi ASN dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal
2) Masih Terbatasnya Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional
3) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik
4) Masih belum optimalnya capaian Indeks Profesionalitas ASN
5) Lemahnya tata kelola kelembagaan dan manajemen Aparatur Sipil Negara

E. Sekretariat Daerah

1) Belum optimalnya nilai reformasi birokrasi
2) Belum optimalnya pengelolaan wilayah perbatasan

F. Sekretariat DPRD

1) Belum optimalnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

G. Kesatuan Bangsa dan Politik

1) Masih rendahnya partisipasi politik masyarakat
2) Belum optimlanya pembinaan dan ideologi pancasila

2.3.1.1.4.5 Permasalahan Dominan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terhadap berbagai masalah yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bengkalis masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius. Permasalahan-permasalahan ini bersifat lintas sektor, saling berkaitan, dan memiliki dampak langsung terhadap kualitas pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perumusan permasalahan dominan berikut ini menjadi pijakan penting dalam penentuan isu strategis jangka menengah daerah Kabupaten Bengkalis kedepannya.

1. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan pendidikan, terutama di wilayah dengan keterbatasan geografis.
2. Belum meratanya akses dan kualitas layanan kesehatan antar wilayah kecamatan, terutama di daerah terpencil dan pesisir.
3. Belum optimalnya daya saing tenaga kerja dalam menghadapi bonus demografi dan percepatan perkembangan teknologi informasi.

4. Perkembangan ekonomi sektor non migas masih rendah dan belum mampu menjadi penopang perekonomian daerah
5. Masih rendahnya daya saing Koperasi, Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
6. Belum optimalnya peningkatan investasi daerah
7. Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya strategis
8. Ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor migas menjadikan perekonomian Bengkalis rentan terhadap gejolak ekonomi dunia dan menghambat perkembangan ekonomi daerah
9. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat mengakibatkan kemandirian fiskal daerah menjadi rendah
10. Belum optimalnya konektivitas antar wilayah dan kualitas infastruktur yang masih rendah belum mendukung pembangunan daerah dengan baik
11. Ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana umum yang belum memadai dan belum tersebar merata di seluruh wilayah
12. Belum optimalnya pengelolaan konservasi ekosistem daratan dan pesisir, termasuk pengendalian abrasi, risiko kebakaran hutan dan lahan, risiko banjir, dan rehabilitasi ekosistem mangrove
13. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas
14. Belum optimalnya peran Pemerintah Desa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan demi mendukung terwujudnya Kabupaten Bengkalis Bermasa.
15. Pertimbangan hasil SDA Migas yang saat ini diterima daerah belum dirasakan kebermanfaatan secara langsung terhadap masyarakat desa penghasil
16. Belum adanya kebijakan khusus di daerah yang mengafirmasi terhadap desa-desa penghasil Migas dalam perencanaan program dan pembangunan.

2.3.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan daerah, international, kebijakan nasional dan provinsi. Hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaiansasaran pembangunan daerah.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik.
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

2.3.2.1 Isu Strategis Global

1) Ketegangan Geopolitik Global dan Dampaknya terhadap Stabilitas Regional dan Harga Komoditas

Dinamika geopolitik dan geoekonomi global ke depan menjadi tantangan serius bagi seluruh negara, termasuk Indonesia, khususnya bagi Kabupaten Bengkalis. Konflik global

seperti perang Rusia-Ukraina, Pakistan-India, Iran-Israel, telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya seperti ketegangan di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut China Selatan, telah menciptakan ketidakpastian global yang memengaruhi stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi dunia.

Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah penghasil utama minyak bumi dan minyak kelapa sawit (CPO) di Provinsi Riau sangat rentan terhadap dinamika global tersebut. CPO merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Bengkalis, dengan negara tujuan utama ekspor yakni Tiongkok dan India. Melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok berpotensi menurunkan permintaan ekspor CPO dari Bengkalis. Sementara itu, perang India dan Pakistan berpotensi menurunkan volume ekspor ke kawasan Asia Selatan, yang berdampak pada penurunan penurunan kinerja perekonomian Kabupaten Bengkalis, khususnya sektor perkebunan dan sektor industri CPO yang menyumbang hampir setengah dari PDRB daerah. Di sisi lain, konflik antara Israel dan negara-negara Timur Tengah, khususnya Iran, telah mendorong kenaikan harga minyak dunia. Hal ini berpotensi memberikan dampak positif bagi Kabupaten Bengkalis sebagai daerah penghasil minyak bumi, melalui peningkatan pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

2) Risiko Resesi Global, Inflasi, dan Tekanan Nilai Tukar akibat Fluktuasi Suku Bunga Global

Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inflasi global diprakirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (International Monetary Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia, khususnya Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti Bank of England dan The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

3) Kebijakan Proteksionis Perdagangan Global yang Menurunkan Daya Saing Ekspor

Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat pada tahun 2025, melalui peningkatan tarif impor secara signifikan, memberikan dampak serius terhadap perekonomian global, khususnya bagi China dan Indonesia. Peningkatan tarif hingga 145% terhadap berbagai barang asal China menyebabkan penurunan ekspor China ke AS sebesar 34,5% pada

Mei 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dampak ini turut menekan laju pertumbuhan ekonomi China yang direvisi menjadi 4,5% dari target awal 5%, seiring dengan memburuknya kinerja sektor manufaktur yang tercermin dari penurunan indeks PMI ke level terendah sejak akhir 2023. Sementara itu, Indonesia juga terdampak melalui penerapan tarif tambahan sebesar 32% untuk sejumlah komoditas ekspor utama seperti elektronik, tekstil, alas kaki, dan furnitur. Kebijakan ini menjadi hambatan signifikan bagi akses ekspor Indonesia ke pasar Amerika dan memperlemah daya saing produk nasional di tengah ketidakpastian perdagangan global.

Dampak global dari kebijakan tarif tersebut sangat signifikan. Ketegangan dagang antara AS dan China kembali meningkat, mendorong terjadinya pembalasan tarif dan gangguan rantai pasok global. Negara-negara berkembang turut terdampak karena perlambatan aktivitas perdagangan internasional dan menurunnya permintaan ekspor dari dua ekonomi terbesar dunia. Salah satu konsekuensi paling nyata adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi China, yang sebelumnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dan mitra dagang utama bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kabupaten Bengkalis, sebagai salah satu daerah penghasil utama minyak kelapa sawit (CPO) di Indonesia, sangat bergantung pada ekspor ke negara-negara besar seperti China. Melemahnya ekonomi China akibat kebijakan tarif AS berpotensi menurunkan permintaan CPO dari Bengkalis, yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan strategi diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan nilai tambah produk untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika perdagangan global yang tidak menentu.

4) Ketidakpastian Pasar Komoditas Global dan Kebutuhan Diversifikasi Ekonomi Daerah

Ketidakpastian pasar komoditas global akibat dinamika geopolitik, kebijakan proteksionis, dan perlambatan ekonomi dunia menjadi tantangan serius bagi daerah yang bergantung pada ekspor, termasuk Kabupaten Bengkalis. Konflik global serta kebijakan proteksi Amerika Serikat menjadi ancaman terhadap pelemahan ekonomi dunia khususnya China, yang merupakan salah satu pasar terbesar CPO Kabupaten Bengkalis. Melemahnya permintaan global berisiko menurunkan pendapatan sektor Perkebunan dan industri CPO yang menjadi penyumbang besar terhadap PDRB daerah. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi sangat penting melalui hilirisasi industri, perluasan pasar ekspor, dan penguatan sektor alternatif seperti perikanan, pariwisata bahari, serta UMKM berbasis potensi daerah guna memperkuat daya tahan ekonomi daerah terhadap guncangan eksternal.

5. Krisis Energi Global dan Perlunya Transisi Menuju Energi Terbarukan

Perkembangan global saat ini ditandai oleh krisis lingkungan multidimensi yang saling terkait, yang dikenal sebagai triple planetary crisis—perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi yang menjadi ancaman nyata terhadap keberlanjutan bumi dan sistem ekonomi. Ekstraksi sumber daya alam yang masif, termasuk penggunaan energi fosil, menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi

pertambangan tertinggi ke-8 di dunia turut memberikan kontribusi terhadap tekanan lingkungan, sementara dampak lanjutan berupa kerugian ekonomi akibat bencana mencapai Rp22,8 triliun per tahun. Transisi menuju energi terbarukan menjadi agenda penting untuk menekan emisi di sektor energi, memperkuat ketahanan lingkungan, dan menjaga keberlanjutan pembangunan, terutama di daerah yang rentan terhadap bencana ekologis.

Dalam konteks Kabupaten Bengkalis, tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis mengalami 60 titik hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan luas kebakaran mencapai 145,33 hektare, 9 kejadian banjir yang berdampak pada 1.325 rumah, serta 6 kejadian abrasi pantai dengan luas mencapai 1.850 meter. Selain itu, abrasi pesisir yang semakin intensif mengancam kawasan permukiman dan infrastruktur pesisir, sementara kejadian angin puting beliung juga mengalami trend peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim telah berdampak langsung terhadap wilayah dan masyarakat Bengkalis. Oleh karena itu, Indonesia, khsusunya Kabupaten Bengkalis perlu mendorong kebijakan transisi energi melalui pemanfaatan potensi energi terbarukan seperti bioenergi dari limbah sawit dan tenaga surya, sekaligus mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim ke dalam kebijakan perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan pesisir secara berkelanjutan.

6. Perkembangan Teknologi dan Kecerdasan Buatan sebagai Peluang Transformasi Ekonomi Daerah

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) secara global mendorong transformasi cara kerja industri dan layanan publik, sekaligus membuka peluang baru bagi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektoral. Negara-negara maju kini berlomba dalam pengembangan AI, smart system, dan teknologi berbasis data yang berdampak luas terhadap rantai nilai global. Situasi ini menjadi peluang strategis bagi Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Bengkalis, untuk menarik investasi di bidang teknologi pertanian (smart farming), logistik digital, dan pendidikan vokasi yang berbasis kebutuhan industri.

Kabupaten Bengkalis dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendorong modernisasi sektor pertanian dan perikanan melalui pemanfaatan sensor berbasis IoT, pemetaan spasial digital, dan sistem prediksi cuaca untuk budidaya yang lebih presisi. Selain itu, digitalisasi logistik dapat memperkuat efisiensi rantai pasok komoditas unggulan seperti CPO dan hasil perikanan, sekaligus membuka akses pasar baru. Di sektor pendidikan, penerapan platform digital sangat penting untuk memperluas jangkauan dan kualitas layanan pendidikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital juga menjadi kunci untuk meningkatkan responsivitas birokrasi dan partisipasi masyarakat. Dengan strategi adaptif berbasis inovasi, Kabupaten Bengkalis dapat membangun ekonomi daerah yang lebih inklusif, tangguh, dan kompetitif di tengah perubahan teknologi global..

7. Komitmen Penurunan Emisi di Sektor AFOLU menuju FOLU Net Sink 2030

Penurunan emisi dari sektor AFOLU (Agriculture, Forestry, and Other Land Use) merupakan pilar utama dalam pencapaian target Indonesia’s Forest and Other Land Use

(FOLU) Net Sink 2030, yaitu kondisi di mana tingkat serapan emisi dari sektor kehutanan dan tata guna lahan melebihi jumlah emisi yang dilepaskan. Strategi ini menekankan pada penguatan tata kelola hutan, pengendalian deforestasi, rehabilitasi lahan kritis, serta peningkatan praktik pertanian berkelanjutan. Upaya ini juga mencakup peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal dan sistem agroforestri, perlindungan ekosistem gambut dan mangrove, serta integrasi pendekatan berbasis bentang alam (landscape approach) dalam perencanaan wilayah. Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Bengkalis yang memiliki ekosistem pesisir, lahan gambut, serta kawasan perkebunan sawit yang luas, peran sektor AFOLU menjadi sangat penting untuk dikendalikan agar dapat mendukung pengurangan emisi sekaligus menjaga fungsi ekologi dan produktivitas lahan. Oleh karena itu, dukungan terhadap inisiatif FOLU Net Sink 2030 harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan rendah karbon.

2.3.2.2 Isu Stategis Nasional

1) Rendahnya produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari Total Factor Productivity selama tahun 2015–2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010–2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971–1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005–2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu

pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005–2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010–2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015–2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.

Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

2) Rendahnya kualitas SDM

Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Co-operation and Development sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3) Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

4) Pergeseran struktur kelas masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019–2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami

penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

5) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berkelanjutan mensyaratkan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang selaras dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Salah satu elemen penting adalah perlindungan kawasan lindung di darat maupun perairan, termasuk kawasan suaka alam, pelestarian alam, serta konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan dan pelestarian sumber daya hayati. Keberadaan tutupan hutan primer, terutama di atas lahan gambut, harus dijaga secara ketat untuk mencapai target net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, dengan mempertahankan laju deforestasi tidak lebih dari 130.000 hektare per tahun.

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan menjadi habitat bagi berbagai spesies kunci. Oleh karena itu, pengelolaan ekosistem, spesies, dan keanekaragaman genetik secara berkelanjutan merupakan prasyarat dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Kehilangan spesies kunci dapat menimbulkan gangguan serius terhadap stabilitas dan produktivitas ekosistem. Di sisi lain, kawasan pesisir yang padat penduduk juga menghadapi tekanan akibat perubahan iklim. Sebanyak 311 kabupaten/kota, 1.643 kecamatan, dan 6.367 desa/kelurahan di wilayah pesisir teridentifikasi rentan terhadap naiknya muka air laut, abrasi, dan intrusi air laut, sehingga membutuhkan strategi mitigasi dan adaptasi terpadu untuk mencegah risiko sosial-ekonomi.

Letak Indonesia di Cincin Api Pasifik juga menjadikannya sangat rentan terhadap bencana geologi dan hidrometeorologi, yang cenderung meningkat akibat perubahan iklim global. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan penguatan kapasitas mitigasi bencana menjadi bagian penting dalam menjaga daya tampung wilayah terhadap tekanan lingkungan dan bencana. Dalam hal ketersediaan sumber daya, Indonesia memiliki potensi air permukaan sebesar 2.783,3 miliar m^3 dan air tanah dari cekungan sebesar

20.903,3 miliar m³ per tahun. Namun demikian, ketimpangan distribusi dan meningkatnya kebutuhan mengharuskan penguatan tata kelola sumber daya air untuk mencegah risiko water stress.

Selain itu, potensi energi terbarukan Indonesia yang mencapai 3.716 gigawatt perlu dioptimalkan sebagai upaya transisi energi bersih. Dengan dukungan teknologi dan kebijakan yang adaptif, pemanfaatan energi surya, angin, dan bioenergi dapat meningkatkan daya saing, menurunkan emisi, dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Secara keseluruhan, integrasi aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan pembangunan menjadi kunci untuk menjamin kelestarian lingkungan, ketahanan sumber daya alam, dan keberlanjutan ekonomi daerah di masa depan.

6) Lemahnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019–2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

7) Kapasitas dan keterbatasan ruang fiskal

Ruang fiskal Indonesia saat ini relatif terbatas di tengah upaya Indonesia untuk keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju. Hal tersebut tecermin dari indikator penerimaan perpajakan Indonesia yang terus menurun secara historis. Rasio perpajakan Indonesia pernah mencapai 20 persen produk domestik bruto pada tahun 1980-an. Namun hingga tahun 2024, rasio perpajakan Indonesia terus menurun menjadi sebesar 10,1 persen produk domestik bruto. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal Indonesia justru menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan negara lain, rasio perpajakan Indonesia merupakan salah satu yang terendah. Dibandingkan kelompok negara maju, rasio perpajakan Indonesia di tahun 2023 mencapai 10,3 persen produk domestik bruto, sangat tertinggal apabila dibandingkan dengan Inggris (27,3 persen produk domestik bruto),

Meksiko (14,3 persen produk domestik bruto), Brazil (14,2 persen produk domestik bruto), dan Kanada (14,0 persen produk domestik bruto). Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kelompok negara Association of Southeast Asian Nations, Indonesia juga relatif tertinggal dengan Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura, Laos, Malaysia, dan Timor Leste. Hal tersebut menunjukkan rasio perpajakan Indonesia yang relatif masih rendah dibandingkan dengan berbagai kelompok negara.

Studi komparatif dengan beberapa negara memperlihatkan bahwa untuk menjadi negara maju, dukungan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara sangat diperlukan. Sebagai contoh, Korea Selatan pada tahun 1995 berhasil lepas dari middle income trap dengan rasio penerimaan negara pada saat itu mencapai 17,6 persen produk domestik bruto. Chile pada tahun 2013 juga berhasil lepas dari middle income trap dengan rasio penerimaan negara sebesar 20,6 persen produk domestik bruto.

Kebutuhan pendanaan RPJMN Tahun 2020–2024 dihadapkan pada tantangan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah. Dalam periode RPJMN Tahun 2020–2024, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4–Rp35.455,6 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan badan usaha milik negara menyumbang masing-masing sebesar 8,4–10,1 persen dan 8,5–8,8 persen, sedangkan sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta. Sementara itu, dari sisi kemampuan pemerintah, pendapatan negara melalui penerimaan pajak (tax ratio) masih berada pada kisaran kurang dari 11 persen. Tantangan tersebut juga tampak pada kondisi defisit yang mencapai Rp3.192 triliun selama periode tahun 2020–2024 atau rata-rata Rp638 triliun per tahun.

Sebagai gambaran konkret lainnya, kebutuhan pendanaan infrastruktur untuk meningkatkan stok infrastruktur menjadi 50 persen gross domestic product pada tahun 2024 membutuhkan anggaran Rp6.445 triliun dengan rencana porsi pemerintah sebesar 37 persen, penugasan badan usaha milik negara/daerah sebesar 21 persen, dan peran swasta sebesar 42 persen. Kondisi ini perlu disikapi dengan memperkuat dukungan pendanaan non-anggaran pendapatan dan belanja negara, melalui swasta atau pendanaan inovatif lainnya.

2.3.2.3 Isu Strategis Provinsi

Long List Isu strategis pembangunan Provinsi Riau dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Menjamin semua individu memiliki akses dan kualitas Pendidikan yang inklusif untuk peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan dasar
2. Kualitas dan pemerataan layanan Kesehatan serta pembudayaan masyarakat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Peningkatan produktifitas tenaga kerja dan Perluasan akses Kesempatan Kerja yang responsif gender

5. Kemandirian, Keamanan dan ketahanan pangan daerah
6. Peningkatan investasi yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk komoditi unggulan serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal
7. Optimalisasi destinasi dan event wisata dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan
8. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan
9. Kemandirian Desa yang berkelanjutan dan Inklusi
10. Pembangunan Kota yang Maju, Produktif dan Berkelanjutan
11. Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi
12. ASN yang professional berbasis merit sistem
13. Penyediaan Infrastruktur dasar yang handal dan memadai.
14. Integrasi antarmoda, transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas orang yang memenuhi aspek pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan berkeselamatan
15. Riau sebagai pusat kebudayaan melayu
16. Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
17. Persatuan, Kerukunan dan Stabilitas Daerah
18. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya Long List isu strategis Provinsi Riau dilakukan pengelompokan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu yang menjadi dasar perencanaan jangka menengah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 seperti yang termuat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.157 Isu Strategis Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029

No	Long List Isu Strategis	Isu Strategis
1	Menjamin semua individu memiliki akses dan kualitas Pendidikan yang inklusif untuk peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2	Kualitas dan pemerataan layanan Kesehatan serta pembudayaan masyarakat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	
3	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
4	Peningkatan produktifitas tenaga kerja dan Perluasan akses Kesempatan Kerja yang responsif gender	

No	Long List Isu Strategis	Isu Strategis
5	Kemandirian, Keamanan dan ketahanan pangan daerah	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
6	Peningkatan investasi yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk komoditi unggulan serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal	
7	Optimalisasi destinasi dan event wisata dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan	
8	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan	
9	Kemandirian Desa yang berkelanjutan dan Inklusi	
10	Pembangunan Kota yang Maju, Produktif dan Berkelanjutan	
11	Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi	Tatakelola Pemerintahan yang baik dan berkualitas
12	ASN yang professional berbasis merit sistem	
13	Penyediaan Infrastruktur dasar yang handal dan memadai.	Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pengawasan pemanfaatannya
14	Integrasi antarmoda, transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas orang yang memenuhi aspek pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan berkeselamatan	
15	Riau sebagai pusat kebudayaan melayu	Pusat Kebudayaan Melayu
16	Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
17	Persatuan, Kerukunan dan Stabilitas Daerah	
18	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Sumber: RPJMD Provinsi Riau 2025-2029

2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Bengkalis

Isu pembangunan daerah murupakan elaborasi dari permasalahan dan kesempatan yang berasal dari luar lingkungan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan sebelumnya. Berikut beberpa isu penting pembangunan daerah yang perlu di pertimbangkan dalam pembangunan 5 tahun kedepan antara lain:

Tabel II.158 Perumusan Isu Strategis Kabupaten Bengkalis

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Posisi letak geografis daerah yang berdekatan dengan Negara Malaysia dan Jalur Pelayaran Internasional 2. Masih tingginya kontribusi sektor migas terhadap perekonomian daerah 3. Luas dan produksi Perkebunan sawit yang tinggi 4. Potensi sektor perikanan tangkap dan budidaya yang besar 5. Besarnya potensi sektor pariwisata daerah 6. Kawasan industri buruk bakul 7. Pelabuhan internasional 8. Kecamatan Pinggir memiliki gerbang tol yang menghubungkan ruas tol Pekanbaru-Dumai dengan jalan lintas Sumatera 9. Kekayaan dan keragaman budaya daerah	1. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan pendidikan, terutama di wilayah dengan keterbatasan geografis. 2. Belum meratanya akses dan kualitas layanan kesehatan antar wilayah kecamatan, terutama di daerah terpencil dan pesisir. 3. Belum optimalnya daya saing tenaga kerja dalam menghadapi bonus demografi dan percepatan perkembangan teknologi informasi. 4. Perkembangan ekonomi sektor non migas masih rendah dan belum mampu menjadi penopang perekonomian daerah 5. Masih rendahnya daya saing Koperasi, Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 6. Belum optimalnya peningkatan investasi daerah 7. Belum optimalnya	1. Belum Optimalnya Pengendalian Tata Ruang Dan Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar, Terutama Air Bersih Dan Sanitasi Untuk Pengembangan Wilayah 2. Belum Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah, Limbah B3 Dan Daur Ulang Sampah 3. Belum Optimalnya Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Masyarakat yang Mendukung Industri Menengah dan Besar 4. Distribusi Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Kurang Merata 5. Belum Optimalnya Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 6. Belum optimalnya Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pemerataan akses dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan 7. Belum Optimalnya Pengelolaan Konservasi Pada Ekosistem Daratan dan Pengendalian Abrasi, Resiko Banjir, Abrasi Serta Perbaikan	1. Ketegangan geopolitik global dan dampaknya terhadap stabilitas regional dan harga komoditas. 2. Risiko resesi global, inflasi, dan tekanan nilai tukar akibat fluktuasi suku bunga global. 3. Kebijakan proteksionis perdagangan global yang menurunkan daya saing ekspor Indonesia. 4. Ketidakpastian pasar komoditas global dan kebutuhan diversifikasi ekonomi daerah. 5. Krisis energi global dan perlunya transisi menuju energi terbarukan. 6. Perkembangan teknologi dan AI sebagai peluang transformasi sektor pertanian, logistik, dan pendidikan. 7. Komitmen penurunan emisi sektor AFOLU menuju FOLU Net Sink 2030.	1. Rendahnya produktivitas 2. Rendahnya kualitas SDM 3. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif 4. Pergeseran struktur kelas masyarakat 5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 6. Lemahnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah 7. Kapasitas dan keterbatasan ruang fiskal	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 3. Tatakelola Pemerintahan yang baik dan berkualitas 4. Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pengawasan pemanfaatannya 5. Pusat Kebudayaan Melayu 6. Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Secara Merata dan Inklusif 2. Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Efisien, Transparan, dan Berbasis Digital serta Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Daerah 4. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur serta Konektivitas Antarwilayah 5. Penguatan kearifan lokal Budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat dan landasan pembangunan daerah 6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pengembangan sektor pariwisata dan budaya strategis 8. Ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor migas menjadikan perekonomian Bengkalis rentan terhadap gejolak ekonomi dunia dan menghambat perkembangan ekonomi daerah 9. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat mengakibatkan kemandirian fiskal daerah menjadi rendah 10. Belum optimalnya konektivitas antar wilayah dan kualitas infastruktur yang masih rendah belum mendukung pembangunan daerah dengan baik 11. Ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana umum yang belum memadai dan belum tersebar merata di seluruh wilayah 12. Belum	Ekosistem Mangrove				

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	optimalnya pengelolaan konservasi ekosistem daratan dan pesisir, termasuk pengendalian abrasi, risiko kebakaran hutan dan lahan, risiko banjir, dan rehabilitasi ekosistem mangrove 13. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas					

1) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Secara Merata dan Inklusif

Isu pendidikan dan kesehatan merupakan isu penting dalam pembangunan kabupaten Bengkalis. Isu pendidikan dan kesehatan merupakan permasalahan yang dihadapi pada pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Bengkalis. Kondisi wilayah Kabupaten Bengkalis yang tersebar pada beberapa pulau besar memerlukan penyediaan infrastruktur transportasi agar tingkat aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan semakin baik.

Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Akibat kondisi wilayah yang cukup sulit karena banyak dipisah oleh sungai dan sangat tersebar, maka fasilitas dan tenaga bidang pendidikan dan kesehatan masih belum terdistribusi merata, tetapi hanya terkonsentrasi wilayah perkotaan dan wilayah pertumbuhan.

Wilayah yang tersebar dan banyak dipisahkan oleh laut dan selat dengan sarana dan prasarana transportasi yang terbatas mengakibatkan mobilitas penduduk sangat terbatas. Pembangunan infrastruktur di daerah Bengkalis relatif mahal karena daerah pesisir laut dan sungai didominasi oleh tanah rawa dan gambut yang memiliki daya dukung tanah yang rendah, mengakibatkan biaya pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan semakin mahal juga. Kondisi wilayah yang dimikian mengakibatkan sebahagian sarana pendidikan dan kesehatan terkonsentrasi diwilayah ibu kota kecamatan, yang merupakan daerah dengan kondisi yang lebih baik, jika dibandingkan dengan desa-desa lain.

Pembangunan pembangunan manusia yang terbatas akan mengakibatkan masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran terbuka dan akses penduduk untuk berusaha dan bekerja semakin terbatas. Kondisi ini secara akumulatif mengakibatkan kesejahteraan masyarakat rendah dan angka kemiskinan yang tinggi. Capaian pembangunan di Kabupaten Bengkalis yang merupakan akumulasi dari pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang didukung oleh pembangunan ekonomi telah memberikan dampak yang positif bagi pembangunan manusia. Secara akumulatif pembangunan pendidikan dan kesehatan, yang dilaksanakan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan manusia. Hasil-hasil pembangunan manusia merupakan potret dari keseriusan pembangunan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga memiliki kemampuan dalam aktivitas ekonomi yang ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan pendapatan yang dimiliki mencukupi untuk memenuhi konsumsi sehari-hari, sehingga dapat menikmati hidup yang layak, termasuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik pula.

Untuk lebih memaksimalkan pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis dan untuk memantapkan basis pembangunan yang mengakar di tingkat masyarakat, maka upaya-upaya peningkatkan kualitas SDM dan tenaga kerja harus terus dilaksanakan memalui

peningkatan basis kompetensi agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja baik lokal, nasional dan global.

Langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan merata adalah pemerataan pembangunan pendidikan dan kesehatan terutama di luar pulau Bengkalis, sehingga akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan semakin meningkat. Upaya-upaya ini tentu saja harus diiringi oleh peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kesehatan, yang terdistribusi secara merata disetiap wilayah di Kabupaten Bengkalis. Upaya peningkatan kesehatan penduduk juga harus dibarengi dengan kegiatan penyuluhan kesehatan dan penyuluhan kesehatan lingkungan agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Meningkatkan promosi, pembinaan, dan pengawasan kesehatan terhadap diri, rumah, dan lingkungan. Peningkatan akses wilayah terpencil dan sulit dijangkau perlu ditingkatkan, agar berdampak pada peningkatan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung pembangunan sumberdaya manusia.

2) Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan

Isu penting dalam perekonomian daerah adalah pelaksanaan pembangunan ekonomi untuk dapat menggantikan sektor pertambangan minyak dan gas sebagai penopang perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkalis. Sektor pertanian sebagai sektor dominan dalam perekonomian tanpa minyak dan gas juga masih didominasi oleh sektor perkebunan yang lebih banyak dikuasai oleh perusahaan swasta besar. Perkembangan perkebunan rakyat telah tumbuh berkembang dan memerlukan perhatian serius dalam mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata di Kabupaten Bengkalis.

Dalam hal mendukung sektor pertanian sebagai sektor unggulan, maka pemanfaatan keunggulan komparatif (kompetitif advantage) yakni potensi khusus wilayah Bengkalis yang beragam (pesisir, pinggir sungai, rawa, dataran rendah, rawa) belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan ekonomi kerakyatan pada sub-sektor perikanan darat dan peternakan. Disisi lain, pemanfaatan lahan untuk kegiatan perekonomian yang produktif seperti pembangunan kebun sawit untuk masyarakat juga belum berjalan secara maksimal dalam pengembangan perekonomian rakyat, dan hal ini benyak dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Perkembangan sub sektor perkebunan juga mengakibatkan dampak buruk bagi perkembangan sub sektor tanaman pangan, dimana penggunaan lahan untuk pertanian telah mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian pangan kepada perkebunan.

Upaya mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat untuk meningkatkan peranan masyarakat terhambat dengan kualitas sumberdaya manusia yang masih terbatas. Kemampuan dan wawasan kewirausahaan penduduk menjadi faktor utama terhambatnya pengembangan perekonomian kerakyatan, khususnya pengembangan usaha kecil dan menengah pada sektor industri dan jasa. Penciptaan iklim investasi dan mendorong keterlibatan rakyat dalam pengembangan perekonomian tentu saja masih memerlukan perhatian, sehingga dapat mendorong peningkatan investasi dan ekspor non

migas dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus ekonomi biaya tinggi dengan menyederhanakan prosedur perizinan investasi, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Bengkalis terus mengalami perkembangan yang kurang stabil yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mudah mengalami perubahan terhadap perkebangan ekonomi Global dan Nasional. Sektor dominan perekonomian Bengkalis adalah sektor pertambangan (khusunya minyak), dan pada perekonomian tanpa minyak dan gas sebagai tulang punggung perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan dimasa yang akan datang akan menjadikan sektor perekonomian Kabupaten Bengkalis semakin handal, karena potensi pertambangan minyak merupakan unrenewable resources atau sumberdaya yang tidak terbarukan, sehingga akan semakin menurun kontribusinya dalam struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis. Maka, untuk mendukung pembangunan perekonomian Kabupaten Bengkalis yang lebih baik dan berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan, maka diperlukan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan keunggulan koparatif (comparative advantage) yakni potensi khusus wilayah Bengkalis yang beragam (pesisir, pinggir sungai, rawa, dataran rendah, rawa, perbukitan) untuk pengembangan produksi perekonomian masyarakat.

Pemanfaatan geografis daerah sebagai keunggulan daerah untuk kegiatan perekonomian yang produktif seperti pembangunan kebun sawit untuk masyarakat harus menjadi prioritas pembangunan agar penguasaan aset lahan dan distribusi penguasaan perkebunan kelapa sawit berlangsung dengan baik. Namun, disisi lain pengawasan terhadap pemanfaatan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pertambangan perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian alam.

Dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan ekspor non migas, diperlukan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus ekonomi biaya tinggi dengan menyederhanakan prosedur perizinan investasi, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha. Pelaksanaan Pelayanan Satu Atap perlu dimaksimalkan agar prosedur pelayanan perizinan dapat berlangsung dengan baik.

Pembangunan sektor pertanian, selain dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, juga sangat penting dalam menopang pengamanan ketahanan pangan. Upaya-upaya peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan perlu menjadi prioritas pembangunan sektor pertanian agar dapat memberikan kontribusi yang semakin tinggi pada perekonomian ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor industri dan usaha kecil pada perekonomian daerah maka perlu prioritas pada program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha skala mikro. Hal ini berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan penduduk, penurunan penangguran, dan penanggulangan kemiskinan. Artinya program dan kegiatan pengembangan usaha kecil

dan menengah akan menjadi program utama yang dapat mengakomodir kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka penangguran, dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan menjadi isu strategis yang perlu dikedepankan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, terutama masalah kemiskinan dan pengangguran

3) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Efisien, Transparan, dan Berbasis Digital serta Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Daerah

Berbagai perencanaan dan program pembangunan akan terlaksana secara baik mana kala terdapat tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance). Suatu pemerintahan dikelola secara baik mana kala digunakan sejumlah prinsip, seperti adanya transparansi, keterbukaan, responsifitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan tantangan yang menjadi salah satu tugas pemerintah Kabupaten Bengkalis. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik akan memudahkan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sementara itu, adanya birokrasi yang memadai akan memungkinkan terlaksananya program-program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah dengan melakukan penataan sistem kepegawaian yang meliputi sistem pengangkatan pegawai, penempatan yang sesuai dengan latar belakang dan kompetensi, kenaikan pangkat dan karier berdasarkan kinerja dan prestasi, pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment), pelatihan berkala dan on-job training, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif.

Meningkatkan kualitas dalam melayani kebutuhan masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan menerapkan standar pelayanan minimum pada semua bidang. Termasuk di dalamnya pengurusan surat menyurat, perizinan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelayanan umum.

Menata sistem administrasi dan manajemen pemerintahan dengan bertahap menggunakan sistem teknologi informasi (IT) yang efisien, efektif, dan akurat sehingga mempercepat pelayanan pada masyarakat dan peningkatan kinerja aparatur. Menerapkan transparansi dalam penganggaran, program berbasis kinerja, dan asas-asas manajemen modern untuk melancarkan pembangunan.

Dalam bidang kependudukan, pembangunan diarahkan untuk menerapkan sistem informasi kependudukan sehingga administrasi kependudukan yang handal dapat membantu optimalisasi pelayanan publik, membangun jaringan dan program aplikasi informasi kependudukan yang tersambung (connected) di setiap kecamatan sampai ke dinas terkait, sehingga duplikasi data penduduk dapat dihindari, mempertegas penerapan ketentuan (Perda) bagi pendatang untuk mengurangi dampak-dampak sosial pengangguran yang bersumber dari arus urbanisasi, dan memperbaharui kebijakan kependudukan sesuai dengan perkembangan kota dan pembangunan.

Selain itu, tata kelola keuangan daerah khusunya dari sisi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa tantangan utama yang perlu diatasi dalam rangka untuk

meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pertama, terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. Kedua, potensi pajak daerah yang belum sepenuhnya optimal, baik dari sektor pajak daerah seperti PBB maupun pajak restoran dan hotel, yang memerlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain itu, sektor retribusi daerah juga berpotensi untuk lebih ditingkatkan melalui pengelolaan yang lebih efisien dan pelayanan yang lebih baik.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan inovatif. Keberagaman sumber pendapatan, menjadi pilihan yang strategis dengan mengembangkan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, pengelolaan sumberdaya alam dan kekayaan daerah dan memacu pusat pertumbuhan ekonomi seperti pengembangan kawasan industri buruk bakul. Disamping itu penguatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak dan retribusi juga menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan daerah. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Kabupaten Bengkalis dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat

4) Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur serta Konektivitas Antarwilayah

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah pesisir pulau Sumatera. Pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan NKRI khususnya pembangunan infrastruktur untuk pulau-pulau terluar merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam rangka kesatuan dan ketahanan Republik Indonesia. Oleh karena itu Kabupaten Bengkalis perlu menyambut isu ini agar pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dapat disinkronisasikan dengan program pembangunan nasional. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur untuk pulau Rupat yang memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan.

Sinkronisasi pembangunan tidak hanya dapat dilakukan dengan pemerintah pusat. Pada tingkat yang lebih rendah, Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau untuk pengetasan kemiskinan dapat melakukan sinergi dengan pemerintah Bengkalis hingga saat ini secara berkelanjutan membangun perumahan sederhana dan sehat serta jalan-jalan akses ke daerah-daerah terisolir. Program-program ini dapat dikomunikasikan dan disinkronisasikan dengan program-program dari Provinsi Riau.

Pembangunan infrastruktur baik darat, laut maupun udara di Kabupaten Bengkalis memerlukan dana yang relatif besar. Hal ini dikarenakan struktur tanah daerah pesisir laut dan sungai didominasi oleh tanah lunak yang memiliki daya dukung yang rendah. Disamping itu, beban infrastruktur yang cukup tinggi untuk mendukung kegiatan ekonomi dibidang perkebunan, pengolahan hasil alam dan migas yang memerlukan konstruksi yang padat modal dan teknologi yang memadai. Namun demikian, pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam misi pembangunan Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, program pembangunan dan peningkatan infrastruktur tidak bisa diabaikan seperti percepatan pembangunan jalan dan

jembatan baru untuk membuka isolasi, peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang ada, pembangunan fasilitas pelabuhan dan juga revitasisasi bandar udara suangi selari yang telah direncanakan. Program-program pembangunan infrastruktur yang strategis seperti misalnya pembangunan jembatan Sungai pakning-Pulau Bengkalis atau pembukan jalan dari kawasan industri buruk bakul menuju tol Duri diperkirakan dapat memberikan dampak pembangunan yang signifikan bagi kabupaten Bengkalis.

Untuk keperluan perumahan penduduk, terutama penduduk miskin, pembangunan rumah layak huni masih terus diperlukan. Hingga tahun 2023, tercatat Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 44,06 persen .Untuk keberlanjutan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin ini, Pemerintah dapat memberikan target baru pada kawasan kumuh dalam pembangunan rumah layak huni.

Isu strategis lain yang perlu diperhatikan adalah isu mengenai ketersediaan air bersih yang masih minim. Rencana strategis yang ramah lingkungan perlu dipetimbangkan agar sumber air baku dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan air bersih secara berkelanjutan. Selain itu, untuk keperluan irigasi diperlukan sistem pompanisasi dan jaringan irigasi teknis yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pertanian yang baik.

Selain akses air bersih, kondisi infrastruktur kelistrikan di wilayah pesisir Bengkalis masih tergolong terbatas dan perlu diantisipasi secara sistematis. Permasalahan ini berpotensi menghambat produktivitas perekonomian dan mengganggu kelancaran berbagai aktivitas pembangunan di kawasan pesisir Kabupaten Bengkalis.

Isu lain yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis secara global dan perlu dipertimbangkan serta dikonsultasikan secara baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat adalah kejelasan dan ketetapan mengenai struktur tata ruang dan wilayah. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang dilakukan tidak bertentangan dengan tata ruang dan pemanfaatan lahan yang akan disahkan nantinya.

5) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi wilayah pesisir secara berkelanjutan menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 2025–2029. Sebagai wilayah yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera dan memiliki garis pantai sepanjang 446 km, Kabupaten Bengkalis menghadapi tekanan ekologis yang tinggi, seperti abrasi pantai yang terus meningkat, degradasi hutan mangrove, pencemaran perairan, serta kerusakan lahan gambut. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi daratan dan pesisir, lemahnya pengendalian alih fungsi lahan, serta praktik pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan. Dampak dari permasalahan tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir, tetapi juga mengganggu ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di wilayah pesisir menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih kuat dan terintegrasi. Isu ini semakin relevan mengingat masih rendahnya capaian kualitas lingkungan hidup, seperti indeks kualitas air dan tutupan lahan yang berada pada kategori sedang. Selain itu, belum

tersedianya sistem pengawasan dan pengendalian lingkungan yang efektif, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi, menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lintas sektor yang adaptif dan berbasis ekosistem dalam mengelola wilayah pesisir, dengan memperkuat kelembagaan lokal, membangun sistem informasi lingkungan, dan mendorong kemitraan antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha.

Secara umum, isu ini mencerminkan pentingnya transformasi paradigma pembangunan dari eksploitasi sumber daya menuju keberlanjutan ekosistem. Pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi wilayah pesisir bukan hanya sebagai isu teknis, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya perlindungan terhadap keberlangsungan fungsi ekologis, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim dan bencana lingkungan. Dengan menjadikan isu ini sebagai prioritas strategis, Kabupaten Bengkalis dapat mewujudkan visi pembangunan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.

6) Penguatan kearifan lokal Budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat dan landasan pembangunan daerah

Memasyarakatkan Budaya Melayu melalui pendidikan di sekolah-sekolah, publikasi melalui penerbitan buku, media cetak, dan elektronik, penyelenggaraan acara seni dan budaya, dan aplikasi dalam arsitektur gedung dan lingkungan. Penerapan Budaya Melayu di tengah masyarakat harus memperhatikan adat yang bersendikan syara-syara bersendikan Kitabullah di mana Islam menjadi pilar utamanya.

Memasyarakatkan nilai-nilai mulia yang terdapat dalam tunjuk ajar Melayu seperti jujur, amanah, sopan santun, kerja keras, cerdik, dan sifat mulia lainnya ke dalam setiap lapisan kehidupan, baik di masyarakat, pemerintahan, maupun dalam perdagangan dan aktivitas lainnya, sehingga Budaya Melayu tidak hanya terwujud dalam simbol, tapi juga menjadi ruh dan motivasi dalam menjalankan pembangunan.

Menghidupkan semua sisi kebudayaan dalam Budaya Melayu termasuk dalam hal etika (perilaku, nilai, dan norma), estetika (kesenian, tarian, pola gambar dan ukiran), ilmu pengetahuan (teknologi, arsitektur), sastera (buku, puisi, sajak) dan aspek budaya lainnya. Menyediakan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu menjadi hal penting dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan ini.

Memajukan dan merangsang program pembinaan keagamaan pada semua lapisan masyarakat, aparatur pemerintah, anak-anak, dan pemuda melalui pengajian, pelatihan, perkemahan anak-anak dan pemuda, bimbingan intensif, dan diskusi sehingga pengetahuan agama dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari menjadi nyata.

Mengaplikasikan nilai positif dan mulia dari agama ke dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menjalankan pemerintahan sehingga bisa menjadi tenaga pendorong dan motivasi untuk mensukseskan pembangunan.

Memajukan dan membantu kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan institusi keagamaan dalam menjalankan dakwah dan bimbingan pada masyarakat. Menangkal pengaruh negatif dari globalisasi dan teknologi informasi terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang tidak sesuai dengan akhlak dan ajaran agama dengan mempersiapkan perangkat hukum, pengawasan, pembinaan, dan sanksi sehingga kehidupan masyarakat terlindungi dari pengaruh yang tidak baik.

Memajukan ekonomi syari'ah dengan mendukung program lembaga ekonomi umat seperti lembaga amil zakat, baitul mal wattamwil (BMT), dan perbankan syari'ah yang turut membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggiatkan perekonomian masyarakat. Menyediakan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2025-2029 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Bengkalis 2025-2045, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024. Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 adalah::

"TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA"

Penjelasan Visi, sebagai berikut:

- Bermarwah, Bermakna: Suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarakan landasan keagamaan dan kebudayaan.
- Maju, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Semua Kebutuhan Baik Pangan, Sandang, Papan, Pendidikan, Kesehatan dan Pemanfaatan Teknologi, ditandai dengan Tingginya Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Kompetitif serta Masyarakat yang lebih Mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;
- Sejahtera, Bermakna : Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar sebagai Wujud dari Pembangunan yang Adil dan Merata dan menyentuh semua Aspek Kehidupan yang ditandai dengan Tingkat Pendapatan yang Cukup, Rendahnya Angka Kemiskinan, Rendahnya Tingkat Kriminal serta Tingkat Kesehatan dan Pendidikan yang sangat baik
- Unggul, Bermakna : Suatu kondisi tercapainya semua indikator pembangunan daerah, baik dari aspek fisik maupun non fisik, berprestasi dan berinovasi serta memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan daerah lain.

3.1.2 Misi

Misi merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang dinyatakan secara tegas dan jelas sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat demi kemajuan daerah. Atas dasar itu misi Tahun 2025 – 2029 dirumuskan sebagai berikut:

1) **Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.**

Misi ini berfokus pada:

A. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif

- Efisiensi dan Transparansi Anggaran: Mengelola anggaran daerah dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar alokasi dana tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah.
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); Memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak, retribusi, dan sumber lain yang sah guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
- Optimalisasi Belanja Daerah ; Mengalokasikan belanja daerah secara strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta program peningkatan ekonomi masyarakat.

B. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

- Eksplorasi dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan: Mengelola sumber daya alam (seperti minyak, gas, pertanian, perikanan, dan kehutanan) dengan prinsip keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
- Pengembangan Hilirisasi Industri ; Meningkatkan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam melalui pengolahan industri agar daerah tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah.
- Penguatan Regulasi dan Pengawasan Lingkungan; Mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan dengan menerapkan regulasi yang ketat dan mendorong praktik ramah lingkungan.

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas

- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan ; Mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan industri serta memperkuat program pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal.
- Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan ; Memberikan dukungan kepada UMKM dan startup lokal dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, dan kemudahan regulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.
- Peningkatan Kesejahteraan dan Produktivitas Tenaga Kerja ; Meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program kesehatan, jaminan sosial, dan penguatan daya tawar tenaga kerja dalam pasar ekonomi yang kompetitif.

D. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing

- Pengembangan Infrastruktur Ekonomi; Membangun, kawasan industri, serta fasilitas perdagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.
- Peningkatan Investasi Daerah; Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan insentif kepada investor, kemudahan perizinan, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha.
- Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi; Mengembangkan ekonomi berbasis digital dengan mendorong adopsi teknologi dalam sektor industri, perdagangan, dan layanan publik guna meningkatkan efisiensi dan daya saing global.

Secara umum Misi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sehat, pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas SDM sebagai faktor utama dalam membangun ekonomi daerah yang lebih kompetitif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, daerah dapat berkembang secara mandiri dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.

Misi ini memiliki dua pilar utama, yaitu reformasi birokrasi dan penguatan nilai-nilai agama serta budaya Melayu, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan membangun masyarakat yang memiliki karakter kuat. Dalam konteks pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, berikut adalah fokus utama dari misi ini:

A. Reformasi Birokrasi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Reformasi birokrasi menjadi landasan penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Beberapa fokus utamanya adalah:

1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

- Mengembangkan layanan berbasis digital untuk mempercepat proses administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- Menerapkan sistem pelayanan terpadu (one-stop service) untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.
- Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2) Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

- Mengoptimalkan sistem e-Government untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan layanan administrasi.
- Meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan pemerintahan melalui mekanisme partisipatif dan keterbukaan informasi publik.
- Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

3) Reformasi Struktur dan Budaya Kerja Birokrasi

- Mendorong birokrasi yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan global dan perubahan teknologi.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan program pembangunan.
- Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil (performance-based) dengan evaluasi berkala terhadap kinerja birokrat.

B. Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu

Nilai-nilai agama dan budaya Melayu menjadi faktor penting dalam membentuk karakter masyarakat dan memperkuat identitas daerah. Fokus dalam lima tahun ke depan meliputi:

1) Peningkatan Peran Agama dalam Kehidupan Sosial

- Mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan pembangunan sosial dan pendidikan.
- Mendukung program-program dakwah dan pendidikan agama yang moderat dan inklusif.
- Mendorong peran tokoh agama dalam memperkuat harmoni sosial dan mencegah konflik berbasis agama.

2) Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu

- Mempromosikan budaya Melayu dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, pariwisata, dan industri kreatif.
- Mendorong penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi resmi dan edukasi sebagai bagian dari identitas daerah.
- Mengembangkan festival budaya dan seni Melayu sebagai strategi meningkatkan kebanggaan daerah serta daya tarik wisata.

3) Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal

- Memasukkan nilai-nilai budaya Melayu dalam kurikulum pendidikan sebagai bagian dari pendidikan karakter.
- Menanamkan nilai gotong royong, hormat terhadap adat, dan etika Melayu dalam kehidupan masyarakat.
- Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan berbasis budaya lokal untuk mencetak generasi yang berkarakter.

C. Menuju Masyarakat yang Berkarakter dan Berdaya Saing

Tujuan akhir dari misi ini adalah menciptakan masyarakat yang memiliki karakter kuat dan siap menghadapi tantangan zaman. Fokus utamanya adalah:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

- Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik melalui musyawarah dan forum dialog.

- Mengembangkan program pemberdayaan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
- Memperkuat nilai solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama melalui program sosial berbasis budaya dan agama.

2) Penguatan Identitas Lokal dalam Era Globalisasi

- Menyelaraskan budaya lokal dengan perkembangan teknologi dan modernisasi agar tetap relevan dalam era digital.
- Mengembangkan kebijakan ekonomi kreatif berbasis budaya Melayu untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional.
- Memanfaatkan media sosial dan digital sebagai sarana edukasi budaya serta promosi identitas lokal.

Misi ini menitikberatkan pada pembentukan pemerintahan yang transparan, efisien, dan inovatif melalui reformasi birokrasi, serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu sebagai identitas daerah. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan misi ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, serta masyarakat yang berkarakter kuat dan berdaya saing di tengah arus globalisasi.

3) Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Misi ini berfokus pada dua aspek utama: penyediaan infrastruktur berkualitas dan pengembangan potensi wilayah perbatasan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, beberapa fokus utama yang perlu diperhatikan dalam lima tahun ke depan adalah:

A. Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas

Infrastruktur yang memadai menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan mempercepat pembangunan daerah.

1) Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Transportasi

- Pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan** untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan.
- Pengembangan transportasi umum dan logistik** untuk mempermudah mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
- Optimalisasi sarana dan prasarana pelabuhan, dan terminal guna mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan pariwisata.

2) Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Kesejahteraan Masyarakat

- Memfasilitasi dan mengoordinasikan penyediaan akses listrik dan energi bagi wilayah-wilayah yang belum teraliri secara optimal.

- Pengembangan infrastruktur air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan agar masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan dasar.

B. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembangunan Infrastruktur

- Penerapan Digital dalam pembangunan daerah, seperti digitalisasi layanan publik dan pengelolaan lalu lintas berbasis teknologi.
- Pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan akses informasi di daerah perbatasan.

C. Pengembangan Potensi Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, baik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan, maupun pintu gerbang ke pasar internasional.

3) Penguatan Ekonomi di Wilayah Perbatasan

- Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
- Pendirian kawasan industri atau perdagangan di perbatasan guna menarik investasi dan mendorong ekspor produk lokal.
- Pemberdayaan UMKM di wilayah perbatasan dengan pelatihan, akses permodalan, dan fasilitas pemasaran.

4) Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Perbatasan

- Pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) yang modern untuk memperlancar arus perdagangan dan mobilitas masyarakat.
- Penguatan koordinasi dengan aparat keamanan untuk mengatasi ancaman seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal.
- Peningkatan infrastruktur pertahanan guna menjaga kedaulatan dan stabilitas sosial ekonomi di daerah perbatasan.

5) Pengembangan Sumber Daya Manusia di Wilayah Perbatasan

- Penyediaan pendidikan berkualitas di daerah perbatasan agar masyarakat setempat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
- Pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal untuk menciptakan peluang kerja baru.
- Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam meningkatkan inovasi berbasis potensi lokal.

D. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi perbatasan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Meningkatkan Akses dan Kesejahteraan Masyarakat

- Infrastruktur yang baik memungkinkan masyarakat memperoleh akses lebih mudah ke pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar ekonomi.
- Pengembangan perbatasan sebagai pusat ekonomi baru dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

7) Meningkatkan Daya Saing Daerah

- Wilayah perbatasan yang berkembang dapat menjadi pusat perdagangan dan investasi, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing daerah.
- Konektivitas yang lebih baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menarik investor untuk berinvestasi di daerah.

Misi ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas guna meningkatkan konektivitas, layanan dasar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, pengembangan potensi wilayah perbatasan diarahkan untuk menciptakan pusat ekonomi baru, memperkuat ketahanan wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan implementasi yang tepat, pembangunan infrastruktur dan wilayah perbatasan dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan daerah yang maju dan berdaya saing.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 merupakan arah dan cita-cita yang ingin dicapai oleh kepala daerah terpilih dalam periode lima tahun mendatang. Visi mencerminkan kondisi ideal Kabupaten Bengkalis yang hendak diwujudkan, sementara misi merupakan pernyataan strategis mengenai cara pencapaian visi tersebut. Setiap misi memiliki makna dan pesan yang luhur untuk mewujudkan Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera serta unggul. Dalam mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Untuk mengoperasionalisasikan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang menjadi elemen kunci dalam arsitektur perencanaan pembangunan jangka menengah.

Tujuan menggambarkan dampak (*impact*) dari berbagai program dan kegiatan prioritas, yang menunjukkan tingkat pencapaian visi secara keseluruhan. Dalam konteks perencanaan daerah, tujuan memiliki fungsi strategis sebagai simpul utama dalam arsitektur kinerja pembangunan yang akan diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator kinerja, arah kebijakan, strategi dan program prioritas. Oleh karena itu, perumusan tujuan menjadi bagian penting dalam perencanaan kebijakan (*policy planning*), karena menentukan arah perubahan yang ingin diwujudkan di berbagai bidang pembangunan. Setiap tujuan harus memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely*), sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan dievaluasi secara objektif. Sebagai turunan langsung dari tujuan, sasaran pembangunan dirumuskan untuk menggambarkan hasil antara (*intermediate outcomes*) yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perumusan

sasaran dilakukan ssecara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan Bengkalis yang bermarwah, maju, sejahtera, dan unggul, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah merumuskan tiga tujuan utama pembangunan jangka menengah yang menjadi arah strategis dalam periode tahun 2025–2029. Ketiga tujuan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis, serta membentuk masyarakat berkarakter melalui penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu; serta meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dengan mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan. Sebagai turunan dari ketiga tujuan tersebut, telah ditetapkan 20 sasaran pembangunan yang disusun secara spesifik, terukur, dan relevan terhadap permasalahan serta potensi daerah. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 20205-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA										
Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing										
1.1	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,93	1,59 - 2,83	1,71 - 2,88	1,81 - 2,93	1,92 - 2,97	2,0 - 3,02	2,09 - 3,07
			Indeks Daya Saing Daerah	3,39	3,04	3,1	3,17	3,23	3,29	3,35
			Tingkat Pengangguran Terbuka	5,88	5,54 - 5,72	5,16 - 5,56	4,80 - 5,34	4,77 - 5,16	4,58 - 5,03	4,23 - 4,93
			Rasio Gini	0,279	0,259 - 0,262	0,242 - 0,246	0,226- 0,231	0,211- 0,217	0,197- 0,204	0,183 - 0,191
			Pendapatan Perkapita (Juta)	296,91	297,96 - 298,95	311,87 - 315,41	325,78 - 331,86	339,69 - 348,315	353,6 - 364,77	367,51 - 381,23
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,37	76,65 - 76,73	77,02 - 77,28	77,49 - 77,84	77,97 - 78,4	78,45 - 78,97	78,94 - 79,55
			Tingkat Kemiskinan	6,36	6,27 - 6,33	6,12 - 6,20	6,09 - 6,16	6,06 - 6,12	6,03 - 6,09	5,92 - 5,99
	1.1.1	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	15,49	16,18	16,42	16,64	16,83	17	17,14
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,28	66,37	67,23	68,09	68,95	69,81	70,67
	1.1.2	Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan Berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	20,27	20,34	20,51	20,68	20,85	21,02	21,19
	1.1.3	Terwujudnya Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,3	0,31	0,32	0,34	0,37	0,4	0,44
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	3.311	3.417	3.526	3.639	3.756	3.876	4.000
			Rasio Kewirausahaan	3,32	4,36	4,51	4,65	4,8	4,94	5,09

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Daerah (%)							
	1.1.4	Terwujudnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	65,75	66,01	67,59	69,75	70,67	72,54	74,08
	1.1.5	Terwujudnya Petani yang Sejahtera	Nilai Tukar Petani	173,22	168,96	175,67	182,65	189,91	197,45	205,3
			Kontribusi PDRB Sektor Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan (%)	11,86	12,82	13,42	14,02	14,61	15,2	15,78
	1.1.6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,21	74,43	74,55	74,76	74,97	75,4	75,6
	1.1.7	Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata	Angka Harapan Lama Sekolah	13,44	13,62	13,78	13,94	14,1	14,26	14,42
			Rata-Rata Lama Sekolah	9,74	9,75	9,77	9,78	9,79	9,81	9,82
	1.1.8	Meningkatnya kualitas kepemudaan daerah	Jumlah Prestasi Olahraga (cabang)	10	13	16	19	22	25	28
	1.1.9	Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,47	90,48	90,49	90,5	90,51	90,52	90,53
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,4	0,4	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,05 (2023)	63,35	64,65	65,95	67,25	68,55	69,85
	1.1.10	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,29	58	59	60	61	62	63
			Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	4,88 (2023)	4,89-5,62	5,64-6,14	6,39-7,39	7,15-8,65	7,90-9,90	8,66-11,16
Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter										
2.1	Mewujudkan tata kelola		Indeks Reformasi Birokrasi	65,12	66,53	68,04	69,57	71,05	72,52	74,08

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu		Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	10,39	10,39	12,99	12,99	15,58	15,58	18,18
			Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.	100	100	100	100	100	100	100
	2.1.1	Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntable	Indeks Pemerintah Digital	NA	1,5	1,5	1,5	1,75	1,75	2
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,74	95	95,8	96,6	97,4	98,2	99
			Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	97,62	97,76	97,9	98,05	98,19	98,33	98,47
	2.1.2	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Persetase Peningkatan PAD	-34,26%	5,23%	5,34%	5,42%	5,58%	5,67%	5,73%
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	B	B	A	A	A
	2.1.3	Meniingkatnya budaya kerja Asn Yang prosesional dan Berintegritas	Indeks Profesionalis ASN	79,56	80,63	81,69	82,76	83,82	84,89	85,95
			Indeks Sistem Merit	258,5	261,5	264,5	267,5	270,5	273,5	276,5
	2.1.4	Meningkatnya pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	37,38	40,85	44,37	47,83	51,36	54,82	58,34
	2.1.5	Terciptanya kerukunan umat beragama	Persentase penyelesaian konflik SARA	60	60	60,2	60,3	60,4	60,5	60,5

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	2.1.6	Meningkatnya pelestarian budaya melayu	Indeks Pelestarian Budaya Melayu	3	3	3	5	5	5	5
Misi 3: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat										
3.1	Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan serta mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan		Rasio Konektivitas Antar Wilayah	65	65	66	67	68	69	70
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	N/A	73,11	74,36	75,60	76,85	78,09	79,34
			Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	N/A	13,95	17,17	20,37	23,88	27,75	31,52
	3.1.1	Terbangunnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	65	65	66	67	68	69	70
	3.1.2	Ketersediaan infrastruktur dasar yang handal dan merata antarwilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	52,02%	52,18%	52,56%	53,32%	54,09%	54,85%	55,61%
			Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	75,77	77,58	79,44	81,33	83,28	85,27	87,31
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (%)	95,72	95,83	96,1	96,37	96,64	96,91	97,45
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (%)	92,63	93,09	93,55	94,01	94,46	94,92	95,38
			Persentase lingkungan permukiman kumuh	1,28	1,15	1,04	0,93	0,84	0,76	0,68
			Rasio pemukiman layak huni	99,4	99,52	99,59	99,63	99,7	99,79	99,86
	3.1.3	Berkembangnya	Persentase pengelolaan	73,31	74,78	76,27	77,8	78,96	80,15	81,75

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan identitas wilayah	wilayah perbatasan							
			Persentase ketersediaan infrastruktur dasar wilayah perbatasan	62,32%	62,47%	62,77%	63,39%	64,00%	64,42%	65,39%
	3.1.4	Terjaganya kualitas lingkungan dan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,57	73,5	73,71	73,92	74,13	74,35	74,56
		meningkatnya ketangguhan daerah dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana	137,73	126,68	122,38	118,07	113,77	109,46	105,15

Sumber: Hasil Analisis

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

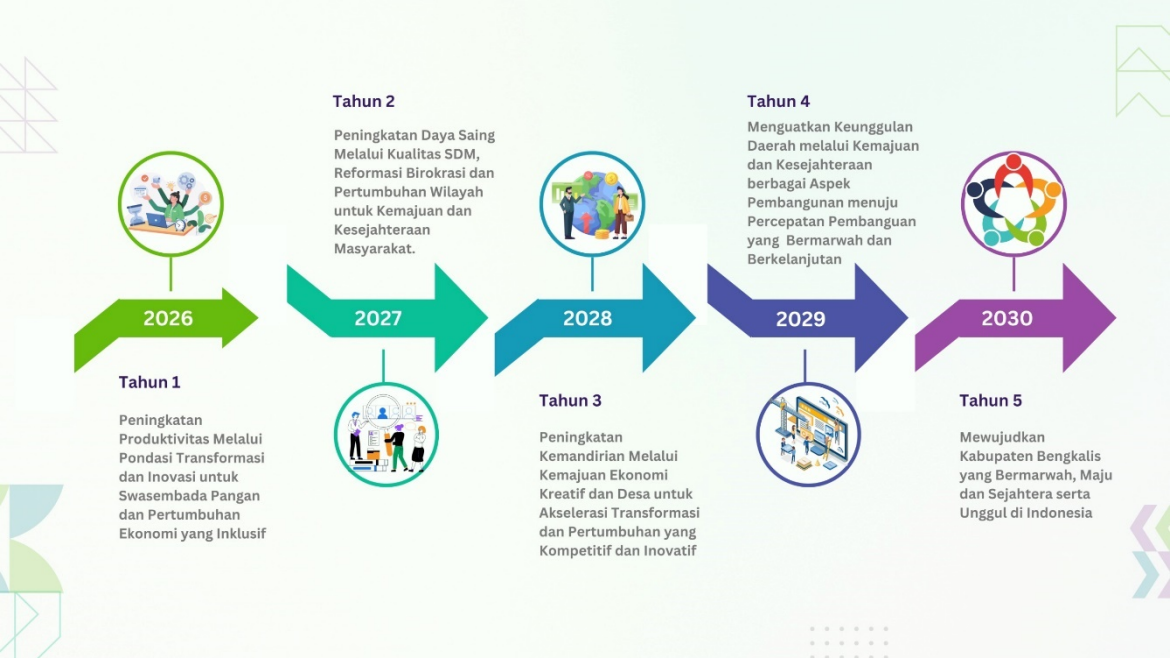
Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis merupakan langkah krusial dalam menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah ke dalam program-program pembangunan yang terukur dan terarah. Strategi dan arah kebijakan menjadi penghubung operasional antara kerangka visi-misi dengan sasaran pembangunan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk outcome. Melalui perumusan strategi yang tepat, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat memastikan bahwa capaian pembangunan lima tahunan berjalan selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional maupun kebutuhan daerah.

Strategi pembangunan daerah merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang memuat langkah-langkah sistematis dalam rangka mencapai visi pembangunan daerah. Strategi tersebut disusun secara adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, baik yang bersumber dari permasalahan aktual, potensi daerah, maupun perubahan kondisi global dan nasional. Dengan demikian, perumusan strategi didasarkan pada identifikasi isu-isu strategis daerah serta memperhatikan kesinambungan antara tujuan pembangunan dengan arah kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut, strategi pembangunan daerah dijabarkan melalui pentahapan pembangunan yang berfungsi sebagai proses prioritisasi tahunan secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pentahapan ini merupakan instrumen operasional dari strategi yang menghubungkan arah kebijakan dengan program prioritas. Penentuan prioritas pembangunan pada setiap tahapan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan daerah, namun tetap menjamin kesinambungan antarperiode pembangunan sehingga sasaran jangka menengah dapat dicapai secara bertahap dan terukur.

Pentahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 dirancang secara bertahap, integratif, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi daerah: "*Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia*." Tiap tahapan diarahkan pada penguatan fondasi pembangunan, peningkatan daya saing daerah, akselerasi transformasi ekonomi dan sosial, serta penguatan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah.

Selain itu, pentahapan pembangunan disusun dengan mempertimbangkan horizon waktu secara spesifik dalam jangka waktu lima tahun. Tema atau fokus pembangunan tahunan ditetapkan sebagai bagian dari strategi pelaksanaan RPJMD, yang dapat bersifat tahunan maupun multiyears sesuai dengan kompleksitas program dan sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini memastikan pembangunan tidak hanya berjalan secara sektoral, tetapi juga lintas dimensi, menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif serta keberlanjutan pembangunan daerah.



Gambar III.1 Pentahapan Pembangunan Kabupaten Bengkalis

Fokus Pembangunan Tahun Pertama (2026)

Fokus pembangunan pada tahap awal RPJMD ini adalah peningkatan produktivitas melalui pondasi transformasi dan inovasi guna memperkuat ketahanan daerah, khususnya di sektor pangan dan ekonomi dasar. Pemerintah daerah berkomitmen membangun sistem produksi yang lebih efisien dan berbasis teknologi, mendorong modernisasi sektor pertanian dan perikanan, serta memperluas dukungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tahun ini merupakan titik awal pembentukan pondasi pembangunan ekonomi yang tangguh, ditopang oleh peningkatan kapasitas inovasi daerah, penerapan digitalisasi, serta penguatan sistem data dan informasi pembangunan. Kegiatan prioritas diarahkan pada reformasi kebijakan pertanian, pengembangan kawasan pangan mandiri, serta transformasi pola produksi menuju praktik berkelanjutan.

Fokus Pembangunan Tahun Kedua (2027)

Pembangunan tahun kedua ini merupakan lanjutan dari tahun pertama. Fokus pembangunan diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi, serta pemerataan pembangunan wilayah. Kebijakan pembangunan pada tahun ini difokuskan untuk mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan sistem kesehatan masyarakat, serta peningkatan kinerja aparatur melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Penguatan daya saing wilayah juga dilakukan melalui pengembangan konektivitas antarwilayah, perbaikan infrastruktur dasar, dan percepatan pembangunan kawasan tertinggal serta pesisir. Dengan demikian, pembangunan tahun ini berperan sebagai pengungkit pemerataan pembangunan antarwilayah sekaligus penyokong pertumbuhan yang inklusif.

Fokus Pembangunan Tahun Ketiga (2028)

Pembangunan tahun ketiga ini merupakan lanjutan dari tahun kedua. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kemandirian daerah melalui kemajuan ekonomi kreatif dan pemberdayaan desa. Tahapan ini memfokuskan upaya pada penciptaan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis kreativitas, kearifan lokal, serta potensi sektor informal yang berkembang di masyarakat. Pemerintah daerah mendorong lahirnya ekosistem ekonomi kreatif yang terhubung dengan pasar nasional dan global, termasuk penguatan brand lokal dan digitalisasi UMKM. Di saat yang sama, kapasitas kelembagaan dan fiskal desa diperkuat untuk mempercepat kemandirian desa sebagai pusat pertumbuhan baru. Program prioritas diarahkan pada pendampingan kewirausahaan, fasilitasi infrastruktur desa produktif, dan inovasi tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Fokus Pembangunan Tahun Keempat (2029)

Pada tahap tahun keempat ini, fokus pembangunan diarahkan untuk menguatkan keunggulan daerah melalui kemajuan dan kesejahteraan diberbagai aspek pembangunan. Fokus utama pembangunan adalah memperkuat posisi Kabupaten Bengkalis dalam peta pembangunan regional dan nasional melalui pengembangan sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditas, serta penguatan jaringan kerja sama antarwilayah dan antarpelaku ekonomi. Selain itu, pemerintah berkomitmen memastikan keberlanjutan pembangunan sosial melalui penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Tahun ini menjadi tonggak penting dalam memastikan kesinambungan arah pembangunan menuju target pembangunan yang berkelanjutan.

Fokus Pembangunan Tahun Kelima (2030)

Pada tahap akhir pelaksanaan RPJMD, pembangunan tahun 2030 difokuskan untuk memastikan tercapainya seluruh sasaran jangka menengah sekaligus mempersiapkan transisi menuju periode perencanaan berikutnya yaitu 2030-2034. Tahun ini menjadi puncak konsolidasi capaian, dengan penekanan pada integrasi lintas sektor, evaluasi kinerja, dan penguatan fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia.

Dalam kerangka RPJMD, arah kebijakan memegang peran penting sebagai penghubung antara visi-misi dengan strategi pembangunan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan oleh perangkat daerah. Penyusunan arah kebijakan harus memperhatikan prinsip sinergi, kesinambungan, efisiensi, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah dengan tetap mengedepankan pendekatan partisipatif dan berbasis data. Dengan demikian, arah kebijakan menjadi instrumen kunci untuk memastikan pembangunan daerah berlangsung secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang dirancang sebagai penjabaran langsung dari misi kepala daerah, yang selanjutnya diselaraskan dengan strategi pembangunan daerah. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah kebijakan yang diambil memiliki keterkaitan langsung dengan arah pembangunan jangka menengah yang

dituju. Arah kebijakan juga menjadi panduan substantif bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas, agar selaras dengan target-target yang telah ditetapkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan demikian, arah kebijakan berperan sebagai jembatan konseptual antara visi-misi dan implementasi teknis dalam perencanaan pembangunan lima tahunan yang terukur dan terintegrasi. Selanjutnya rumusan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis dalam mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.2 Perumusan Arah Kebijakan Kabupaten Bengkalis

VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
(1)	(2)	(3)
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA		
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing	Penguatan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan daya saing Tenaga Kerja Daerah	
	Memperkuat Potensi Desa dalam Pembangunan Daerah melalui Redistribusi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas)	
	Penguatan ekosistem halal	
	Penguatan ekosistem keuangan syariah dan kelembagaan pengelolaan dana sosial syariah	
	Digitaliasi pelayaan Perizinan secara terpadu dan terintegrasi	
	Meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penguatan promosi, inovasi, dan pengembangan destinasi serta pelaku usaha kreatif, serta mendorong peran koperasi sebagai wadah kolaboratif dalam pemasaran produk, pembiayaan usaha, dan penguatan jejaring pelaku usaha	
	Meningkatkan ketahanan pangan daerah	
	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam daerah untuk mendorong nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	
	Memperkuat Derajat Kesehatan Masyarakat	
	Pemerataan aksesibiltas dan kualitas pendidikan yang unggul dan Berkeadilan	
	Mendorong prestasi olahraga dan Kualitas Kepemudaan	
	Mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah serta mengoptimalkan peran keluarga	
	Meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga	
	Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak	
	Mendorong pemenuhan pelayanan dasar Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	
Mewujudkan Reformasi	Penyempurnaan Layanan Publik	

VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
(1)	(2)	(3)
Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter	Mengoptimalkan Perencanan Daerah yang adaptif	
	Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui penguatan sistem dan peningkatan kepatuhan wajib pajak	
	Perencanaan Anggaran yang Responsif dan Berbasis Kinerja	
	Penguatan Sistem Pengawasan Internal	
	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme ASN	
	Peningkatan Budaya Inovasi di Pemerintahan	
	Penguatan tata kelola riset dan inovasi untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy)	
	Peningkatan Toleransi dan Penghargaan Terhadap Perbedaan	
	Mendorong pelestarian budaya melalui restorasi situs Melayu dan penguatan perlindungan hukum terhadap warisan budaya daerah	
Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Konektivitas wilayah antar pulau	
	Peningkatan infrastruktur dasar yang handal dan merata secara berkelanjutan	
	Peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar guna memperkuat peran strategis kawasan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan Hub Daerah	
	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan sistem pencegahan dan mitigasi bencana daerah	
	Penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan melalui penerapan insentif dan disinsentif berbasis ekologi (TAKE)	

Sumber: Hasil Analisis

Tabel III.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan dan Strategi Kabupaten Bengkalis

NO	TUJUAN/SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)		(3)	(4)
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA				
Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing				
1.1	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA			
	1.1.1	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan	Penguatan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan daya saing Tenaga Kerja Daerah	Memperkuat perekonomian masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui optimalisasi potensi daerah serta pemerataan akses ekonomi
				Penguatan perdagangan lintas batas Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis.
				Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Daerah
				Penguatan kualitas tenaga skill dengan mengoptimalkan kualitas Pendidikan informal pada workshop Latihan kerja/balai Latihan kerja daerah.
			Memperkuat Potensi Desa dalam Pembangunan Daerah melalui Redistribusi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas)	Pengembangan potensi desa melalui kebijakan pendistribusian/ membagi dana yang bersumber dari sebagian DBH SDA (Migas) yang diterima oleh Kabupaten kepada Pemerintah Desa berdasarkan tingkat keterdampakan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa penghasil.
			Penguatan ekosistem halal	Fasilitasi sertifikasi halal, penguatan kelembagaan dan SDM, pengembangan kebijakan pendukung, kemitraan strategis, serta riset inovatif untuk memperluas daya saing
			Penguatan ekosistem keuangan syariah dan kelembagaan pengelolaan dana sosial syariah	Akselerasi integrasi dan optimalisasi bauran zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF) dan pengembangan keuangan syariah untuk memperkuat peran sosial-ekonomi masyarakat.
	1.1.2	Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan Berkelanjutan	Digitaliasi pelayaan Perizinan secara terpadu dan terintegrasi	Penyederhanaan perizinan dan penguatan sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis online.
	1.1.3	Terwujudnya Pariwisata sebagai	Meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan	Meningkatkan daya Tarik dan Promosi Wisata

NO	TUJUAN/SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)		(3)	(4)
		Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru	ekonomi kreatif melalui penguatan promosi, inovasi, dan pengembangan destinasi serta pelaku usaha kreatif, serta mendorong peran koperasi sebagai wadah kolaboratif dalam pemasaran produk, pembiayaan usaha, dan penguatan jejaring pelaku usaha	Meningkatkan daya saing pelaku usaha dan kelembagaan koperasi melalui pelatihan, pembiayaan, dan akses pasar, serta mendorong memfasilitasi Koperasi Merah Putih guna mendukung pemerataan ekonomi daerah
				Penguatan ekonomi kreatif melalui tata kelola kelembagaan, pengembangan roadmap, peningkatan kapasitas komunitas, distribusi produk, serta kolaborasi multipihak.
	1.1.4	Terwujudnya ketahanan pangan daerah	Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Mengoptimalkan diversifikasi ketahanan Pangan Serta Penanganan Kerawanan Pangan
				Menjamin ketersediaan, menjaga kelancaran distribusi pangan serta akses masyarakat terhadap pangan.
				Peningkatan ketahanan pangan melalui penguatan data, infrastruktur, kapasitas petani, hilirisasi hasil pertanian, serta pengembangan pasar komoditas berbasis agro-industri.
	1.1.5	Terwujudnya Petani yang Sejahtera	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam daerah untuk mendorong nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Mengembangkan sistem pertanian modern dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi inovatif dan penguatan kelembagaan petani dalam mendukung produktivitas hasil pertanian
				Meningkatkan pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman
	1.1.6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Memperkuat Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan aksesibiltas dan kualitas pelayanan kesehatan seluruh masyarakat.
	1.1.7	Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata	Pemerataan aksesibiltas dan kualitas pendidikan yang unggul dan Berkeadilan	Peningkatan aksesibiltas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan Berkeadilan
				Peningkatan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak tempatan dan anak berprestasi
				Optimalisasi Fungsi dan Peran Dewan Pendidikan
				Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik
				Pemenuhan sarana dan prasarana dan penunjang berkualitas
				Peningkatan kompetensi dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
				Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang efektif
				Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini

NO	TUJUAN/SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)		(3)	(4)
				Mendorong penguatan perguruan tinggi lokal
				Mendorong penguatan Pendidikan keagmaan dan pesantren
	1.1.8	Meningkatnya kualitas kepemudaan daerah	Mendorong prestasi olahraga dan Kualitas Kepemudaan	Meningkatkan prestasi olahraga dan Kualitas Kepemudaan
	1.1.9	Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah serta mengoptimalkan peran keluarga	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat harmonis.
			Meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga	Meningkatkan kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan dan penguatan peran keluarga dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
				Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk pengasuhan yang layak dan stimulasi dini bagi anak
			Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak	Penguatan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.
				Optimalisasi kota layak anak.
				Peningkatan kualitas pengasuhan dan stimulasi dini pada anak melalui kerja sama dengan swasta, komunitas dan lembaga non pemerintah
				Peningkatan kesadaran dan peran orang tua serta dukungan layanan Posyandu dan PAUD terhadap penerapan pengasuhan layak dan stimulasi dini pada anak.
	1.1.10	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan	Mendorong pemenuhan pelayanan dasar Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan
Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter				
2.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu			
	2.1.1	Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntable	Penyempurnaan Layanan Publik	Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis pada kepuasan masyarakat dan meningkatkan efisiensi pelayanan.
				Penggunaan teknologi untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

NO	TUJUAN/SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)		(3)	(4)
			Mengoptimalkan Perencanan Daerah yang adaptif	Menciptakan Perencanan daerah serta ruang komunikasi publik yang baik dan terbuka.
				Penataan kelembagaan/struktur organisasi dan tata kerja yang efisien dan efektif
	2.1.2	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui penguatan sistem dan peningkatan kepatuhan wajib pajak	Optimalisasi pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi berbasis teknologi, pengawasan terpadu, insentif fiskal, dan peningkatan kepatuhan pajak.
				Penataan aset berkelanjutan untuk kepastian pengelolaan pembangunan
			Perencanaan Anggaran yang Responsif dan Berbasis Kinerja	Penguatan sistem penganggaran yang berorientasi pada program prioritas pembangunan daerah berbasis kinerja serta terintegrasi dengan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja
			Penguatan Sistem Pengawasan Internal	Meningkatkan peran lembaga pengawasan untuk Menjamin terlakasananya administrasi pemerintahan sesuai aturan.
	2.1.3	Meniingkatnya budaya kerja ASN Yang prosesional dan Berintegritas	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme ASN	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN melalui penguatan partisipasi dalam pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi jabatan.
				Penguatan manajemen ASN yang berbasis merit melalui penerapan sistem promosi, rotasi, dan evaluasi kinerja yang transparan, adil, dan berbasis kompetensi
	2.1.4	Meningkatnya pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Peningkatan Budaya Inovasi di Pemerintahan	Pengembangan R&D dalam Pembangunan Daerah
			Penguatan tata kelola riset dan inovasi untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy)	Penguatan kelembagaan dan SDM litbang, penyusunan riset prioritas, pengembangan inovasi, serta kolaborasi dan pemanfaatan hasil litbang untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy)
	2.1.5	Terciptanya kerukunan umat beragama	Peningkatan Toleransi dan Penghargaan Terhadap Perbedaan	Penguatan ketahanan ideologi dan sosial-politik melalui pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat, dialog antar umat beragama, dan penanganan konflik secara terpadu
	2.1.6	Meningkatnya pelestarian budaya melayu	Mendorong pelestarian budaya melalui restorasi situs Melayu dan penguatan perlindungan hukum terhadap warisan budaya daerah	Meningkatkan pelestarian budaya Melayu melalui pemeliharaan situs bersejarah dan penguatan perlindungan hukum terhadap karya seni dan warisan budaya.
Misi 3: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat				

NO	TUJUAN/SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)		(3)	(4)
3.1	Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan serta mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan			
	3.1.1	Terbangunnya konektivitas antar wilayah	Peningkatan Konektivitas wilayah antar pulau	Peningkatan aksesibilitas dan efisiensi layanan transportasi darat dan laut melalui penguatan infrastruktur, manajemen operasional, dan sistem pelayanan yang responsif.
	3.1.2	Ketersediaan infrastruktur dasar yang handal dan merata antarwilayah	Peningkatan infrastruktur dasar yang handal dan merata secara berkelanjutan	Pengembangan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan guna meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan infrastruktur dasar yang mendukung produktivitas daerah
				Meyediakan sarana dan prasarana umum dan ruang terbuka hijau Serta Penataan Perumahan
				Melakukan Koordinasi dan fasilitasi penyediaan kelistrikan dan EBT bagi masyarakat khususnya daerah T3
				Optimalisasi pengelolaan sumber daya air dan pengendalian abrasi secara berkelanjutan.
	3.1.3	Berkembangnya kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan identitas wilayah	Peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar guna memperkuat peran strategis kawasan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan Hub Daerah	Memfasilitasi percepatan pembangunan Infrastruktur Perbatasan dan Pulau Terluar yang berkualitas dan berperan sebagai salah ekonomi Hub Daerah
	3.1.4	Terjaganya kualitas lingkungan dan meningkatnya ketangguhan daerah dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan sistem pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Memperkuat Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik dan Berkesinambungan.
				Meningkatkan koordinasi dan memperkuat sistem pencegahan dan mitigasi bencana daerah
				Pengelolaan sistem persampahan yang efektif dan bernilai tambah
			Penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan melalui penerapan insentif dan disinsentif berbasis ekologi (TAKE).	Meningkatkan efektivitas tata kelola lingkungan melalui penerapan instrumen insentif–disinsentif berbasis ekologi guna mendorong perilaku pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sumber: Hasil Analisis

3.4 Arah Kebijakan Spasial

3.4.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Bengkalis terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Sistem pusat pemukiman terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat-pusat lain. Berikut disajikan sistem pusat pemukiman di Kabupaten Bengkalis, yaitu:

Tabel III.4 Sistem Pusat Pemukiman Kabupaten Bengkalis

No	Sistem Pusat Pemukiman	Lokasi
1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	a. Kecamatan Bengkalis b. Kecamatan Bantan
2	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	a. Kecamatan Bengkalis b. Kecamatan Bantan
3	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	a. PKL Sungai Pakning b. PKL Duri berada di Kecamatan Mandau; dan Kecamatan Bathin Solapan
4	Pusat-pusat lain	**Pusat Pelayanan Kawasan** a. Pusat Pelayanan Kawasan Lubuk Muda berada di Kecamatan Siak Kecil. b. Pusat Pelayanan Kawasan Pinggir berada di Kecamatan Pinggir. c. Pusat Pelayanan Kawasan Sebangar berada di Kecamatan Bathin Solapan; dan d. Pusat Pelayanan Kawasan Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupat Utara. **Pusat Pelayanan Lingkungan** a. Pusat Pelayanan Lingkungan Meskom berada di Kecamatan Bengkalis. b. Pusat Pelayanan Lingkungan Pematang Duku berada di Kecamatan Bengkalis. c. Pusat Pelayanan Lingkungan Teluk Pambang berada di Kecamatan Bantan. d. Pusat Pelayanan Lingkungan Sepotong berada di Kecamatan Siak Kecil. e. Pusat Pelayanan Lingkungan Bukit Batu berada di Kecamatan Bukit Batu. f. Pusat Pelayanan Lingkungan Tenggayun berada di Kecamatan Bandar Laksamana. g. Pusat Pelayanan Lingkungan Bathin Sobanga berada di Kecamatan Bathin Solapan. h. Pusat Pelayanan Lingkungan Beringin berada di Kecamatan Talang Muandau. i. Pusat Pelayanan Lingkungan Batu Panjang berada di Kecamatan Rupat. j. Pusat Pelayanan Lingkungan Pangkalan Nyirih berada di Kecamatan Rupat. k. Pusat Pelayanan Lingkungan Kadur berada di Kecamatan Rupat Utara.

Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Bengkalis 2022-2042

Sistem jaringan prasarana Kabupaten Bengkalis terdiri dari sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lainnya. Berikut disajikan sistem jaringan prasarna Kabupaten Bengkalis, yaitu:

Tabel III.5 Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten Bengkalis

No	Sistem Jaringan Prasarana	Lokasi
1	Sistem jaringan transportasi;	**Sistem Jaringan Jalan** a. Jalan arteri primer, meliputi:Bts. Kota Dumai-Duri; Duri-Kandis; dan Simpang Batang-Simpang Kulim. b. Jalan Kolektor Primer meliputi: Sei. Pakning (Km 130)-Teluk Masjid-Simpang Pusako; Dumai-Sepahat; Sepahat-Sei. Pakning (Km 130); Bengkalis-Ketam Putih; Jembatan Ketam Putih-Tanjung Padang; Sontang-Simpang Jurong-Duri; Batu Panjang-Pangkalan Nyirih; Air Putih-Selat Baru; Batu Panjang-Tanjung Kapal; Jl. Bantan; Lingkar Barat (Duri); Pangkalan Nyirih-Tanjung Medang; Bengkalis-Muntai; Buruk Bakul-Langkat; Jl. Berancah-Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja; Tanjung Kapal-Jl. Pemuda; Duri-Sei. Pakning; Selat Baru-Pantai; Bengkalis-Perapat Tunggal; Jl. Gajah Mada-Sebangar Duri; Lingkar Timur (Duri); Jembatan Rupat-Dumai; dan Jembatan Bukit Batu-Bengkalis. c. Jalan Kolektor Sekunder berupa Jl. Jenderal Sudirman. d. Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai; dan Jalan Tol Dumai-Sp. Sigambal-Rantau Prapa. e. Terminal Penumpang Tipe B berada di Kecamatan Mandau f. Terminal Penumpang Tipe C berada di seluruh Kecamatan. g. Terminal Barang di Kecamatan Bengkalis; Kecamatan Bukit Batu; Kecamatan Mandau; Kecamatan Rupat; dan Kecamatan Rupat Utara. h. Jembatan Timbang berada di Kecamatan Pinggir. i. Jembatan berada di: Kecamatan Bengkalis; Kecamatan Bantan; Kecamatan Bukit Batu; Kecamatan Bandar Laksamana; Kecamatan Siak Kecil; Kecamatan Bathin Solapan Kecamatan Rupat; Kecamatan Rupat Utara; Kecamatan Pinggir; dan Kecamatan Talang Muandau. **Sistem Jaringan Keteta Api** a. Jaringan jalur kereta api umum, meliputi: Rantau Prapat - Duri – Pekanbaru; Dumai – Pelintung – Buruk Bakul – Tanjung Buton; dan Duri – Tambusai – Ujung Batu – Kandis. b. Stasiun kereta api berupa Stasiun Penumpang berada di: Kecamatan Pinggir; Kecamatan Mandau;Kecamatan Bathin Solapan; Kecamatan Bandar Laksamana; Kecamatan Bukit Batu; dan

No	Sistem Jaringan Prasarana	Lokasi
		Kecamatan Siak Kecil. **Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan** a. Lintas Penyeberangan Antarnegara, meliputi: Tanjung Medang (Indonesia)-Port Dickson (Malaysia); dan Bengkalis (Indonesia)-Malaka (Malaysia). b. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi yaitu Bengkalis-Tanjung Balai. c. Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi meliputi: Rupat-Kota Dumai; Ketam Putih-Dakkal; Bengkalis-Mengkapan; dan Kampung Balak-Sei Selari. d. Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten meliputi: Air Putih-Sei. Selari; Prapat Tunggal-Tanjung Leban; Prapat Tunggal-Pergam/Sukarjo Mesim; dan Tanjung Leban-Pergam/Sukarjo Mesim. e. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan berupa Pelabuhan Siak Kecil berada di Kecamatan Siak Kecil. f. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II meliputi: pelabuhan penyeberangan Air Putih/Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis; pelabuhan penyeberangan Rupat/Tanjung Kapal berada di Kecamatan Rupat; dan pelabuhan penyeberangan Sei. Selari berada di Kecamatan Bukit Batu. g. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III, meliputi: pelabuhan penyeberangan Ketam Putih berada di Kecamatan Bengkalis; b. pelabuhan penyeberangan Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupat Utara; pelabuhan penyeberangan Prapat Tunggal berada di Kecamatan Bengkalis; pelabuhan penyeberangan Pergam/Sukarjo Mesim berada di Kecamatan Rupat; dan pelabuhan penyeberangan Tanjung Leban berada di Kecamatan Bandar Laksamana. **Sistem jaringan transportasi laut** a. Pelabuhan Pengumpul meliputi: Pelabuhan Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis; Pelabuhan Sungai Pakning berada di Kecamatan Bukit Batu; dan Pelabuhan Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupat Utara. b. Pelabuhan Pengumpan Regional berupa Pelabuhan Batu Panjang berada di Kecamatan Rupat. c. Pelabuhan Pengumpan Lokal meliputi: Pelabuhan Buruk Bakul berada di Kecamatan Bukit Batu; Pelabuhan Melibur berada di Kecamatan Talang Muandau; Pelabuhan Selat Baru berada di Kecamatan Bantan; Pelabuhan Teluk Rhu berada di Kecamatan Rupat Utara; Pelabuhan Bantan Tengah berada di Kecamatan Bantan; Pelabuhan Bukit Batu berada di Kecamatan Bukit Batu; Pelabuhan Darul Aman berada di Kecamatan Rupat; Pelabuhan Lubuk Muda berada di Kecamatan Siak Kecil; Pelabuhan

No	Sistem Jaringan Prasarana	Lokasi
		Selat Morong berada di Kecamatan Rupat; Pelabuhan Tanjung Kapal berada di Kecamatan Rupat; Pelabuhan Teluk Pambang berada di Kecamatan Bantan; dan Pelabuhan Titi Akar berada di Kecamatan Rupat Utara. d. Pelabuhan perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan berada di: Kecamatan Bengkalis; dan Kecamatan Rupat Utara. **Bandar Udara Umum Dan Bandar Udara Khusus**. Bandar Udara yaitu Bandar Udara Khusus Sei Selari Sei Pakning berada di Kecamatan Bukit Batu.
2	Sistem Jaringan Energi	**Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi** a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berada di seluruh Kecamatan. b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangakit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid berada di: Kecamatan Bengkalis; Kecamatan Bantan; Kecamatan Rupat; dan Kecamatan Rupat Utara. c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) Riau Peaker berada di Kecamatan Pinggir. **Jaringan Minyak dan Gas Bumi** a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi: • Landing Point Riau 2-Landing Point Bengkalis melalui: Kecamatan Bandar Laksamana; dan Kecamatan Bukit Batu. • Pakning-Siak melalui: Kecamatan Bukit Batu; dan Kecamatan Siak Kecil. • Duri-Bagan Batu melalui: Kecamatan Bathin Solapan; Kecamatan Mandau; dan Kecamatan Pinggir. • Garuda Sakti-Teluk Lembu melalui Kecamatan Pinggir. • Garuda Sakti-Balai Pungut melalui Kecamatan Bathin Solapan. • Duri-Dumai melalui Kecamatan Bathin Solapan. • Kota Dumai-Bangkinang melalui: Kecamatan Bathin Solapan; Kecamatan Mandau; dan Kecamatan Pinggir. • Balai Pungut-Duri melalui: Kecamatan Mandau; Kecamatan Bathin Solapan; dan Kecamatan Pinggir. • New Garuda Sakti-Balai Pungut melalui Kecamatan Pinggir. b. Saluran Transmisi Lainnya berupa jaringan

No	Sistem Jaringan Prasarana	Lokasi
		interkoneksi listrik Riau-Malaysia melalui: Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Rupat, Kecamatan Bandar Laksamana; dan Kecamatan Talang Muandau. c. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik berupa jaringan sistem Isolated meliputi: Dumai-Pulau Rupat melalui Selat Rupat; dan Pakning-Bengkalis melalui Selat Bengkalis. d. Gardu Listrik berada di: Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Bengkalis.
3	Sistem jaringan telekomunikasi;	a. Jaringan Tetap meliputi: Infrastruktur Jaringan Tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO) berada di Kecamatan Bengkalis; dan b. Jaringan serat optik, berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan; Kecamatan Bukit Batu; Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bathin Solapan; Kecamatan Mandau; dan Kecamatan Pinggir. b. Jaringan Bergerak Terestrial berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan; dan Kecamatan Rupat Utara; Jaringan Bergerak Seluler berupa menara Base Transceiver Station (BTS) berada di seluruh Kecamatan.
4	Sistem jaringan sumber daya air	a. Jaringan Irigasi Primer berada di: Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupat; dan Kecamatan Rupat Utara. b. Jaringan Irigasi Sekunder berada di: Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupat; dan Kecamatan Rupat Utara. c. Jaringan Irigasi Tersier berada di: Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Mandau, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupat; dan Kecamatan Rupat Utara. d. Sistem pengendalian banjir berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu; Kecamatan Bandar Laksamana; Kecamatan Rupat; dan Kecamatan Rupat Utara.
5	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	**Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)** a. Unit Air Baku, berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Rupat, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bandar Laksamana, dan Kecamatan Talang Muandau. b. Unit Produksi berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Rupat, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bandar Laksamana; dan Kecamatan Talang

No	Sistem Jaringan Prasarana	Lokasi
		Muandau. c. Unit Distribusi berada di seluruh Kecamatan. d. Unit Pelayanan berada di seluruh Kecamatan. e. Bukan jaringan perpipaan terdiri atas: Sumur Dangkal, Sumur Pompa dan Bak Penampungan Air Hujan f. Sumur Dangkal berada di seluruh Kecamatan. g. Sumur Pompa berada di seluruh Kecamatan. h. Bak Penampungan Air Hujan berada di seluruh Kecamatan. **Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)** Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berada di seluruh Kecamatan. **Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)** Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berada di seluruh Kecamatan **Sistem Jaringan Persampahan** a. Stasiun Peralihan Antara (SPA) berada di seluruh Kecamatan. b. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) berada di seluruh Kecamatan. c. Tempat Penampungan Sementara (TPS) berada di seluruh Kecamatan. d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Rupat; dan Kecamatan Rupat Utara. **Sistem Jaringan Evakuasi Bencana** a. Jalur Evakuasi Bencana banjir berada di: Kecamatan Bukit Batu; dan Kecamatan Siak Kecil. b. Jalur Evakuasi Bencana kebakaran berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara; dan Kecamatan Pinggir. c. Jalur Evakuasi Bencana abrasi berada di: Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. **Sistem Drainase** a. Jaringan Drainase Primer berada di seluruh Kecamatan. b. Jaringan Drainase Sekunder berada di seluruh Kecamatan.

Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Bengkalis 2022-2042

3.4.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis, terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. Kawasan Lindung terdiri atas badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, dan kawasan ekosistem mangrove. Berikut disajikan tabel kawasan lindung Kabupaten Bengkalis, yaitu:

Tabel III.6 Kawasan Lindung Kabupaten Bengkalis

No	Kawasan Lindung	Lokasi
1	Badan Air	Badan Air seluas lebih kurang 8.563 (delapan ribu lima ratus enam puluh tiga) hektare berada di seluruh Kecamatan.
2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	a. Kawasan Hutan Lindung seluas lebih kurang 31 (tiga puluh satu) hektare berada di Kecamatan Rupat Utara. b. Kawasan Lindung Gambut seluas lebih kurang 1.016 (seribu enam belas) hektare berada di: Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Pinggir.
3	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Perlindungan Setempat seluas lebih kurang 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) hektare berada di: Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupat, dan Kecamatan Rupat Utara.
4	Kawasan konservasi	a. Suaka Margasatwa Bukit Batu dengan luas lebih kurang 21.403 (dua puluh satu ribu empat ratus tiga) hektare berada di: Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, dan Kecamatan Bandar Laksamana. b. Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil dengan luas lebih kurang 34.540 (tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh) hektare berada di Kecamatan Talang Muandau; c. Suaka Margasatwa Sibanga/PLG dengan luas lebih kurang 5.728 (lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan) hektare berada di: Kecamatan Pinggir, dan Kecamatan Talang Muandau. d. Suaka Margasatwa Balai Raja dengan luas lebih kurang 15.330 (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh) hektare berada di: Kecamatan Pinggir, dan Kecamatan Mandau.
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	Kawasan Ekosistem Mangrove dengan luas lebih kurang 9 (sembilan) hektare berada di Kecamatan Bantan.

Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Bengkalis 2022-2042

Kawasan budi daya terdiri atas Kawasan hutan produksi, Kawasan pertanian, Kawasan perikanan, Kawasan pertambangan dan energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan

Pariwisata, Kawasan permukiman, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan. Berikut adalah kawasan budi daya Kabupaten Bengkalis, yaitu:

Tabel III.7 Kawasan Budidaya Kabupaten Bengkalis

No	Kawasan Budi Daya	Lokasi
1	Kawasan hutan produksi	a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan luas lebih kurang 109.874 (seratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektare berada di seluruh Kecamatan. b. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan luas lebih kurang 342.327 (tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) hektare berada di seluruh Kecamatan. c. Kawasan Hutan Produksi dengan luas lebih kurang 68.034 (enam puluh delapan ribu tiga puluh empat) hektare berada di seluruh Kecamatan.
2	Kawasan pertanian	a. Kawasan Tanaman Pangan dengan luas lebih kurang 2.040 (dua ribu empat puluh) hektare berada di: Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, dan Kecamatan Siak Kecil. b. Kawasan Perkebunan dengan luas lebih kurang 164.312 (seratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua belas) hektare berada di seluruh Kecamatan.
3	Kawasan perikanan	Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas lebih kurang 2.246 (dua ribu dua ratus empat puluh enam) hektare berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Rupat, dan Kecamatan Rupat Utara.
4	Kawasan pertambangan dan energi	Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dengan luas lebih kurang 8.442 (delapan ribu empat ratus empat puluh dua) hektare berada di: Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, dan Kecamatan Siak Kecil.
5	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri dengan luas lebih kurang 2.904 (dua ribu sembilan ratus empat) hektare berada di Kecamatan Bukit Batu.
6	Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata dengan luas lebih kurang 6.723 (enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektare berada di: Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara; dan Kecamatan Bantan.
7	Kawasan permukiman	a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan luas lebih kurang 24.977 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektare berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupat, dan Kecamatan Rupat Utara. b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan luas lebih kurang 41.601 (empat puluh satu ribu enam ratus

No	Kawasan Budi Daya	Lokasi
		satu) hektare berada di seluruh Kecamatan.
8	Kawasan Transportasi	Kawasan Transportasi dengan lebih kurang 20 (dua puluh) hektare berada di: Kecamatan Bengkalis, dan Kecamatan Bukit Batu.
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan berada di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Mandau, Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau.

Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Bengkalis 2022-2042

3.4.3 Kawasan Strategis Kabupaten

Kabupaten Bengkalis memiliki dua kawasan strategis yang meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari Kawasan Perkotaan Bengkalis, Kawasan Perkotaan Sungai Pakning, Kawasan Industri Buruk Bakul, Kawasan Duri-Pinggir dan Kawasan Pulau Rupat. Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

a) tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Bengkalis adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, pusat pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan;
b) tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Sungai Pakning adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Sungai Pakning sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
c) tujuan pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul adalah mewujudkan Kawasan Industri Buruk Bakul sebagai pusat kegiatan industri yang berkelanjutan;
d) tujuan pengembangan Kawasan Duri-Pinggir adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Duri dan Kawasan Perkotaan Pinggir sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pertambangan minyak dan gas; dan
e) tujuan pengembangan Kawasan Pulau Rupat adalah mewujudkan Pulau Rupat sebagai Kawasan strategis pariwisata nasional dan pusat pelayanan pintu gerbang di Kawasan perbatasan negara.

Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

a) arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Bengkalis adalah pengembangan sektor perkantoran, perdagangan dan jasa, pertahanan dan keamanan, dan permukiman;
f) arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Sungai Pakning adalah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, industri pengolahan minyak dan gas, dan permukiman;
g) arahan pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul adalah pengembangan sektor industri dan perdagangan dan jasa;
h) arahan pengembangan Kawasan Duri-Pinggir adalah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertambangan minyak dan gas, pertanian, dan permukiman.

i) arahan pengembangan Kawasan Pulau Rupat adalah pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian, keimigrasian, dan pertahanan dan keamanan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Strategis Kerajinan Tenun Bengkalis. Tujuan pengembangan Kawasan Kerajinan Tenun Bengkalis adalah mewujudkan Kawasan Kerajinan Tenun Bengkalis sebagai pusat pariwisata kesenian dan budaya khas Melayu Riau bertaraf internasional. Arahan pengembangan Kawasan Kerajinan Tenun Bengkalis adalah pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian, dan permukiman.

3.5 Empat Klaster Pembangunan Kawasan

Secara geografis dan demografi karakteristik wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari wilayah daratan sumatera dan kepulauan dengan beragam suku. Kondisi ini mencerminkan Kab. Bengkalis memiliki kekhususan dan keunikan tersendiri, sehingga dalam pendekatan spasial (Keruangan) pelaksanaan program pembangunan dibagi menjadi 4 (empat) klaster pembangunan kawasan sebagai berikut:

1) Kecamatan Bengkalis dan Bantan sebagai pusat Pemerintahan, Pendidikan, Perikanan Dan Pengembangan Budaya Melayu.
   Dalam konteks pembangunan jangka menengah, Kecamatan Bengkalis dan Bantan diarahkan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perikanan, serta pengembangan budaya Melayu dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan identitas kedaerahan. Pembangunan difokuskan pada penyediaan sekolah unggul, mendorong pendirian sekolah-sekolah agama baru, serta memperkuat keberadaan perguruan tinggi yang ada sebagai basis pengembangan pendidikan tinggi. Kurikulum sekolah disiapkan agar terintegrasi dengan pendidikan agama dan muatan lokal berbasis budaya Melayu, sekaligus didukung dengan penguatan peran Lembaga Adat Melayu Riau sebagai penjaga nilai-nilai tradisi. Di samping itu, pembangunan juga diarahkan pada penanganan abrasi yang mengancam kawasan pesisir serta percepatan penyelesaian Jalan Poros dan Lingkar Pulau Bengkalis guna meningkatkan konektivitas, memperkuat ketahanan wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pembangunan juga diarahkan pada Revitalisasi Kebun Binatang Selat Baru sebagai destinasi edukasi, rekreasi, dan pelestarian satwa yang berorientasi pada pengembangan budaya dan pariwisata daerah.
2) Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai Kawasan Pertanian, Perkebunan Dan Industri Pengolahan
   Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, dan Bandar Laksamana diarahkan sebagai kawasan pertanian, perkebunan, serta industri pengolahan dengan fokus pada penguatan basis produksi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Arah pembangunan pada kluster ini mencakup updating data perkebunan dan lahan pertanian pangan, mendorong pengembangan kawasan *food estate*, serta memaksimalkan potensi kawasan konservasi Giam Siak Kecil Bukit Batu. Selain itu, optimalisasi aset eks RPC di Desa Sepotong, review desain dan pembangunan jalan poros Duri–Pakning untuk mendukung kawasan

Industri Buruk Bakul/Bukit Bandar, serta penyelesaian jalan poros dan lingkar di ketiga kecamatan dilakukan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pada revitalisasi kawasan wisata sejarah dan cagar budaya Datuk Laksamana Raja di Laut, penguatan program perhutanan sosial, serta pengembangan sektor industri pengolahan yang sinergis dengan potensi pertanian dan perkebunan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

3) Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai Kawasan Pariwisata Unggulan dan Perikanan

   Dalam pembangunan jangka menengah, Kecamatan Rupat dan Rupat Utara diarahkan sebagai kawasan pariwisata unggulan sekaligus pusat perikanan yang strategis. Arah pembangunan difokuskan pada redesain kawasan wisata Pulau Rupat untuk memperkuat daya tarik destinasi unggulan, disertai pembangunan akses yang memadai menuju kawasan wisata. Optimalisasi fungsi RS Pratama Pulau Rupat dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung kegiatan pariwisata. Penyelesaian pembangunan jalan poros Batu Panjang–Tanjung Medang menjadi prioritas untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan wisatawan, sementara penanganan abrasi difokuskan untuk menjaga keberlanjutan kawasan pesisir. Selain itu, pengembangan konektivitas langsung Pekanbaru–Dumai–Pulau Rupat–Malaka ditargetkan dapat membuka jalur strategis yang memperkuat posisi Rupat sebagai pintu gerbang internasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan perikanan.

4) Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau sebagai Kawasan Industri Migas, Perdagangan dan Jasa

   Dalam rencana pembangunan jangka menengah, Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, dan Talang Muandau diarahkan sebagai kawasan industri migas, perdagangan, dan jasa yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus pembangunan pada kluster ini mencakup penataan kawasan perkotaan melalui peningkatan pengelolaan sampah, penyediaan pedestrian yang memadai, serta perluasan ruang terbuka hijau guna meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Penyediaan air bersih dan penataan sanitasi juga menjadi prioritas penting untuk mendukung kesehatan masyarakat sekaligus mencegah risiko banjir. Dari sisi pendidikan, pembangunan sekolah unggul ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing. Selain itu, penguatan peran perusahaan dalam pembangunan diwujudkan melalui sinergi tanggung jawab sosial dan investasi yang berdampak pada masyarakat. Pembangunan infrastruktur berupa penyelesaian beberapa ruas strategis jalan poros dan jalan lingkar di keempat kecamatan menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas wilayah, mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah.

3.6 Arah Kebijakan Pengembangan Industri Kabupten Bengkalis

1. Industri Prioritas Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, maka dapat dirumuskan identifikasi potensi daerah berdasarkan industri prioritas di Kabupaten Bengkalis :

Tabel III.8 Industri Prioritas Kabupaten Bengkalis

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Lokasi
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan, Industri Penggaraman Ikan	Kecamatan Bengkalis, Batan, Rupat, Rupat Utara
		Industri Pengolahan Tepung	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupat dan Rupat Utara.
		Industri Gula berbasis Aren dan Kelapa	Kecamatan Bantan, Rupat
2	Industri Tekstil dan Aneka	Industri Tekstil dan Produk Tekstil (Tenun Melayu)	Kecamatan Bengkalis, Bukit Batu, Bandar Laksamana dan Siak Kecil
		Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu Kelapa dan Kelapa Sawit	Kecamatan Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupat dan Rupat Utara
3	Industri Transportasi/Jasa Pelayaran	Industri Perkapalan	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana dan Siak Kecil
4	Industri Pembangkit Energi Terbarukan	Biodiesel (dari CPO) Arang Briket (dari cangkang dan batang sawit) Energi dari biomasa lainnya Energi Angin Energi Surya	Buruk Bakul, Kecamatan Bengkalis, Ban tan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau Rupat dan Ru pat Utara
5	Industri Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri	Industri mesin dan peralatan	Kecamatan Mandau, Bengkalis, Bathin, Solapan, Bantan, Pinggir, Talang Muandau, Rupat dan Rupat Utara
		Industri Komponen	Kecamatan Mandau, Bengkalis, Bathin Solapan, Bantan, Pinggir, Talang Muandau Rupat dan Rupat Utara
		Jasa Industri	Kecamatan Mandau, Bengkalis, Bathin Solapan, Bantan, Pinggir, Talang Muandau Rupat dan Rupat Utara
6	Industri Hulu Agro	Industri Oleofood	Kecamatan Bengkalis, Bantan

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Lokasi
			Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau Rupat dan Rupat Utara
		Industri Oleokimia	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupat dan Rupat Utara
		Industri Pupuk dan Pakan	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Mandau, Bathin Sola pan, Pinggir, Talang Muandau, Rupat dan Rupat Utara
		Industri Kemurgi (Biomassa)	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau Rupat dan Rupat Utara
		Jndustri Resin dan Bahan Plastik Berbasis Sawit	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupat dan Rupat Utara
		Industri karet alam dan sintetik	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupat dan Rupat Utara

Sumber: RPIK Bengkalis 2022-2042

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor industri, maka dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri yang diimplementasikan melalui Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM).

A. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Dalam RTRW Kabupaten Bengkalis rencana alokasi pemanfaatan ruang bagi kawasan industri dialokasikan di Buruk Bakul, dan disekitar kawasan perkotaan Duri. Sedangkan lokasi pengembangan kegiatan industri berbasis pertanian, perkebunan dan perikanan diarahkan di Pulau Bengkalis. Kantong-kantong produksi yang tersebar disekitar Pulau Bengkalis dan ketersediaan pelabuhan dan jalan yang memadai diharapkan dapat mendukung upaya pengembangan kegiatan industri disekitar kawasan perkotaan

Bengkalis. Proses nilai tambah produk pertanian diharapkan dapat tercipta dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan petani dan nelayan disekitarnya.

Rencana pengelolaan dan pengembangan kegiatan industri ini direncanakan, sebagai berikut:

- Mempersiapkan lahan pengembangan kegiatan Industri disekitar Pelabuhan Buruk Bakul, Pelabuhan Bengkalis dan disekitar kawasan perkotaan Duri. Lahan-lahan untuk pengembangan kegiatan industri diusulkan dapat memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif dan atau lahan kawasan hutan yang dapat dikonversi, melalui mekanisme yang masih berlaku (Peraturan Pemerintah RI No. 104 Tahun 2015, tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Funqsi Kawasan Hutan);
- Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri, antara lain pengembangan jaringan jalan, pelabuhan dan penyediaan sistem jaringan air bersih serta penyediaan prasarana energi listrik;
- Meningkatkan aksesibilitas dari kantong-kantong produksi ke lokasi kegiatan industri pengolahan;
- Mengembangkan kegiatan industri yang hemat air dan ramah lingkungan, yang didukung oleh penyediaan sistem pengelolaan limbah industri yang sesuai standar-standar perencanaan.

Sedangkan gabungan dari Kawasan industri besar dan menengah berada di Desa Buruk Bakul dengan luas kurang lebih 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar Sedangkan Kawasan industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan. Dalam Kebijakan dan Strategi pengembangan wilayah Kabupaten Bengkalis sampai tahun 2031 Kawasan Buruk Bakul dijadikan sebagai sentra industri kelautan untuk mengembangkan kawasan produksi perikanan dalam konsep minapolitan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang disingkat RIPIN telah ditetapkan 22 (dua puluh dua) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di seluruh Indonesia. Salah satu WPPI tersebut terdapat Kawasan Industri Buruk Bakul yang berlokasi di Kabupaten Bengkalis. Namun perkembangan kawasan ini masih belum terwujud dengan baik. kedepan dalam mendorong pertumbuhan pembangunan Kawasan industri Buruk Bakul ini perlu dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau. Selanjutnya dengan mengacu pada konsepsi dan kriteria WPPI sebagai suatu benteng alam yang terdiri atas beberapa daerah yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan memiliki keterkaitan ekonomi yang bersifat dinamis karena didukung oleh sistem perhubungan yang mantap, maka dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis, dapat mengacu pada pengembangan wilayah industri.

Pengembangan Kawasan Industri Bengkalis berlokasi di Desa Buruk Bakul diarahkan untuk industri yang mengolah tanaman perkebunan atau disebut juga agro industri yang bersumber dari hasil perkebunan kelapa sawit yang mempunyai areal tanaman seluas 132.360 Ha. Kawasan Industri Buruk Bakul adalah suatu wilayah yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk dijadikan Kawasan Jndustri Terpadu di daerah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan rencana program daerah, kawasan ini akan didirikan menjadi Kawasan Industri Terpadu dengan luas lahan ± 3.200 Ha. Dimana Kawasan Industri Buruk Bakul dilewati oleh jalan Provinsi Pekanbaru-Siak-Dumai, akan direncanakan Jalan Buruk Bakul-Duri Sepanjang 30 Km, akan Direncanakan Pelabuhan Kelas Nasional di Buruk Bakul dan Air Bersih Masih dalam tahap rencana keadaan sekarang masyarakat masih memanfaatkan air sungai.

B. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPI ini masuk dalam penetapan tata ruang wilayah masing masing Kabupaten/Kota, sehingga masing-masing Kabupaten/Kota harus merencanakan, melegalkan (termasuk mencantumkan dalam dokumen tata ruang wilayah masing-masing), dan merealisasikannya sesuai dengan kepentingan pembangunan industri dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lingkungan.

C. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menegah (SIKIM)

Selain industri besar dan menengah (yang difasilitasi pengembangannya melalui Kawasan Industri), pembangunan industri daerah harus memperhatikan industri kecil dan menengah. Sehubungan dengan itu perlu program fasilitasi pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui SIKIM. Sebagaimana sentra pada umumnya maka pengembangan SIKIMini termasuk didalamnya adalah tersedianya sarana dan prasarana. Pemerintah juga harus memberikan insentif khusus agar IKMdapat tumbuh dan sentra ini pun juga dapat tumbuh berkembang. Pada setiap Kecamatan diharapkan minimal dapat dibangun 1 (satu) sentra baru IKMdisamping menata kembali pusat/area kegiatan IKM yang ada sebagai sebuah sentra.

3. Tahap Pembangunan Industri

A. Tahap I (2022-2026)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Bengkalis pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten dibidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

B. Tahap II (2027-2031)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Bengkalis pada tahap ini dimaksudkan untuk berdaya guna dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas.

C. Tahap III (2023-2042)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Bengkalis pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Bengkalis menjadikan sektor industri yang mandiri serta memiliki inovasi yang berkelanjutan.

3.7 Arahan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Rancangan Teknokratik RPJMN telah mengamanatkan Tema Pembangunan Provinsi Riau sebagai berikut:

a) Gerbang integrasi ekonomi Indonesia dan ASEAN dan penumpu ketahanan bioindustri Sumatra.

Dengan target indikator keberhasilan pembangunan daerah yang akan dicapai tahun 2025-2029 adalah:



Gambar III.2 Target Capai Indikator Makro RPJMN Terhadap Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Dengan Arah Pembangunan Wilayah dan Dukungan Sarpras pada Provisi Riau Sebagai berikut :

Transformasi	Highlight Indikasi Intervensi
Ekonomi	Pengembangan jaringan rel dan layanan perkeretaapian Trans Sumatra pada segmen Dumai-Duri-Kotapinang dan Dumai-Duri-Pekanbaru-Jambi
	Peningkatan layanan dan prasarana Bandara Pinang Kampai (Kota Dumai) dan Bandara Japura (Kab. Indragiri Hulu), serta pengembangan bandara perintis di kawasan perkotaan Selatpanjang (Kab. Kep. Meranti)
	Optimalisasi dan peningkatan layanan & prasarana kepelabuhanan, termasuk peningkatan frekuensi layanan angkutan kargo bersubsidi pada Pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Selatpanjang
	Peningkatan layanan penyebrangan menuju Bengkalis dan Selatpanjang
	Pemenuhan infrastruktur perkotaan, peremajaan kota, pemenuhan layanan dasar perkotaan dan amenitas perkotaan, penguatan kerjasama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat perkotaan, terutama pada kawasan perkotaan Pekanbaru, Dumai, dan Rengat
	Pengembangan transportasi publik perkotaan di kawasan perkotaan Pekanbaru (BRT Pekanbaru)

Transformasi	Highlight Indikasi Intervensi
	Pengembangan jalan lingkar Dumai (ruas Simpang Batang-Lubukgaung) guna mendukung kegiatan industri dan pertumbuhan ekonomi pada kawasan perkotaan Dumai
	Peningkatan kemandirian kawasan perdesaan, pemenuhan infrastruktur layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat perdesaan guna mempercepat penuntasan kemiskinan pada daerah afirmasi/lambat tumbuh, terutama di Kab. Kep. Meranti, Kab. Rokan Hulu, dan Kab. Pelalawan
Tata Kelola	Harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan antara Pusat dan Daerah guna mempercepat membangunan pada daerah afirmasi/lambat tumbuh, terutama di Kab. Kep. Meranti, Kab. Rokan Hulu, dan Kab. Pelalawan
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Penguatan Lanal Dumai, guna penguatan keamanan global maritime trade route di Selat Malaka (ALKI-1) dan penegakan kedaulatan maritim Indonesia di Selat Malaka
	Penguatan gelar pertahanan dan keamanan perbatasan dan pulau terluar, terutama di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang
	Peningkatan kebermanfaatan kerja sama pembangunan IMT-GT di Provinsi Riau
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Pengembangan khazanah kebudayaan Melayu Riau melalui revitalisasi cagar budaya Istana Siak dan Benteng Tujuh Lapis
	Pemulihan ekosistem lahan gambut dan rehabilitasi lahan kritis di Riau
	Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkotaan, termasuk melalui penuntasan pengolahan sampah organik, implementasi EPR, dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah tepat guna, terutama di kawasan perkotaan Pekanbaru, Dumai, dan Rengat
	Pemenuhan akses sanitasi aman universal untuk masyarakat di Riau, terutama di Kab. Kep. Meranti, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Rokan Hilir, serta kawasan perkotaan Pekanbaru, Dumai, dan Rengat
	Penguatan ketahanan pangan daerah dan nasional melalui upaya peningkatan produktivitas padi dan pangan nabati lainnya di Riau, terutama pada Kab. Indragiri Hilir, Kab. Rokan Hilir, Kab. Pelalawan, dan Kab. Kuantan Singingi
	Pengembangan infrastruktur sistem transmisi listrik backbone terintegrasi Sumatra 500 kV di wilayah Riau
	Pengembangan infrastruktur sistem transmisi migas Dumai-Sei Mangkei
	Pengelolaan sumber daya air terpadu di Riau, terutama pada WS Rokan, WS Siak, WS Kampar, WS Indragiri-Akuaman, dan WS Bengkalis-Meranti, terutama dalam hal pengendalian banjir dan peningkatan tata air rawa/gambut
	Pemenuhan akses air minum aman universal untuk masyarakat di Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Pelalawan, serta pengembangan akses air minum perpipaan kawasan perkotaan Pekanbaru, Dumai, dan Rengat
	Pengelolaan risiko bencana multiancaman, terutama banjir dan kebakaran hutan & lahan, di Kab. Indragiri Hilir, Kab. Rokan Hilir, Kab. Pelalawan, serta kawasan perkotaan Pekanbaru, Dumai, dan Rengat

Untuk upaya penyelarsan arah kebijakan tahun 2025-2029 dengan pemerintah Provinsi dan Pusat terdapat beberapa trasformasi dimana daerah Kabupaten Bengkalis dapat memberikan kontribusi antara lain;

Traspormasi Eonomi : Pengembangan jaringan rel dan layanan perkeretaapian Trans Sumatra pada segmen Dumai-Duri-Kotapinang dan Dumai-Duri-Pekanbaru-Jambi dan Peningkatan layanan penyebrangan menuju Bengkalis dan Selatpanjang. Pada

Traspormasi ini pemerintah Kabupaten Bengkalis sebaiknya untuk dapat mempersipakan arah kebijkan yang di tunagkan dalam rencana pembangunan tahun 2025-2029

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia ; Penguatan Lanal Dumai, guna penguatan keamanan global maritime trade route di Selat Malaka (ALKI-1) dan penegakan kedaulatan maritim Indonesia di Selat Malaka Penguatan gelar pertahanan dan keamanan perbatasan dan pulau terluar, terutama di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang. Pada traspormasi ini pemerintah Bengkalis melakukan kerjasama dan Program kerja bersama dengan instasi vertikal lain dalam upaya mengambil kesempatan membangun daerah terluar pada daerah Bengkalis.

Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi ; Pengelolaan sumber daya air terpadu di Riau, terutama pada WS Rokan, WS Siak, WS Kampar, WS Indragiri-Akuaman, dan WS Bengkalis-Meranti, terutama dalam hal pengendalian banjir dan peningkatan tata air rawa/gambut. Dalam upaya percepatan pelayanan air bersih bagi masyrakat diperlukan kebijakan bersama dengan wilayah lain untuk itu, pada pemerintahan 2025-2029 diperlukan upaya bersama dalam menghasilkan air bersih dengan mengunakan mitra mitra badan usaha daerah.

3.8 Dukungan Arah kebijakan dan Program Pembangunan Spasial Kabupaten Bengkalis terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau

Disamping arah kebijakan pembangunan berbasis spasial Kabupaten Bengkalis yang telah dipaparkan diatas, Kabupaten Bengkalis juga telah mendukung dan mensinkronisasikan arah kebijakan berbasis spasial Kabupaten Bengkalis dengan kebijakan pembangunan spasial Provinsi Riau yang terkait Kabupaten Bengkalis yaitu Wilayah Pengembangan Provinsi dengan sebutan Pilar BERNILAI. Sinkronisasi arah kebijakan berbasis spasial untuk mendukung wilayah pengembangan Pilar Bernilai dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel III.9 Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Spasial Kabupaten Bengkalis untuk Mendukung Pembangunan Spasial Provinsi Riau (Wilayah Pengembangan Pilar BERNILAI)

NO	PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	KEBIJAKAN PROVINSI	DUKUNGAN PROGRAM DARI KABUPATEN/KOTA DAN CATATAN
1.	**Wilayah Pengembangan (WP) Bernilai** sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam minyak/gas bumi dan Kawasan industri terpadu meliputi: 1. Kabupaten Bengkalis 2. Kabupaten Rokan Hulu 3. Kabupaten Rokan Hilir 4. Kota Dumai	1. **Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur** meliputi: ● Pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan kawasan produksi perkebunan yaitu: ● Peningkatan ruas jalan dan jembatan Dalu Dalu-Mahato-Simpang Menggala. ● Peningkatan ruas jalan dan jembatan Simpang Suram - Simpang Bagan 7 – Sontang. ● Konektivitas lintas provinsi yaitu: ✓ Peningkatan ruas jalan dan jembatan Panipahan -Teluk Piyai - Bagansiapiapi. ✓ Peningkatan ruas jalan dan jembatan Sinaboi - Lubuk Gaung. ● Lanjutan pembangunan jalan tol Duri - Rantau Prapat. ● Preservasi jalan Trans Bengkalis. ● Pembangunan Jalan Lingkar Barat Dumai (Bukit Timah-Parit Kitang-Lubuk Gaung). ● Peningkatan fasilitas penyeberangan Ro-Ro Dumai-Rupat. ● Penyiapan jalur kereta api penunjang industri dan perekonomian masyarakat. ● Mendorong Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah.	1. **Peningkatan Konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar yang handal dan merata secara berkelanjutan** meliputi: ● Review desain dan Pembangunan Jalan poros Duri – Pakning. ● Menuntaskan Pembangunan jalan poros Batu Panjang – Tanjung Medang. 2. **Peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar guna memperkuat peran strategis kawasan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan Hubungan Daerah** meliputi: ● **OPTIMALISASI PELAYANAN TRANSPORTASI ANTAR PULAU** yaitu **:** ✓ Peningkatan fasilitas darat dan laut penyeberangan Ro-Ro. ✓ Pembangunan Jembatan Bengkalis – Sumatera. ✓ Penguatan Armada Angkutan Pelayaran yang Laik. ● Pembangunan akses ke kawasan wisata. ● Mendorong berdirinya PLBN Bantan. ● Mendorong berdirinya PLBN Rupat Utara. 3. **Peningkatan pengelolaan lingkungan**

NO	PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	KEBIJAKAN PROVINSI	DUKUNGAN PROGRAM DARI KABUPATEN/KOTA DAN CATATAN
			hidup dan penguatan sistem mitigasi bencana daerah Meliputi : ● Penataan kawasan perkotaan, antara lain; Penanganan sampah, pedestrian dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau. ● Penataan Sanitasi guna Mencegah Banjir Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau. ● Penanganan Abrasi Kecamatan Bengkalis, Bantan, Rupat dan Rupat Utara. ● Penguatan Program Perhutanan Sosial Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana
		2. Pemenuhan kebutuhan air baku melalui: ● Penyediaan dan pengelolaan unit produksi dan unit air baku SPAM Regional Dumai-Rokan-Bengkalis.	2**. Pemenuhan kebutuhan air baku** melalui: ● Penyediaan Air Bersih Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau.
		3. Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui: ● Pengelolaan dan perlindungan kawasan sekitar Cagar Biosfir Giam Siak Kecil-Bukit Batu. ● Dukungan penyelesaian masalah banjir dan rob.	3. **Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan sistem mitigasi bencana daerah** melalui : ● Memaksimalkan keberadaan Giam Siak Kecil

NO	PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	KEBIJAKAN PROVINSI	DUKUNGAN PROGRAM DARI KABUPATEN/KOTA DAN CATATAN
			Bukit Batu. ● Pembangunan BALAI RAJA ECO PARK
		4. Kegiatan pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan untuk: ● Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub sektor perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan tangkap. ● Pengembangan industri hilir sawit dan migas pada skala besar. ● Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap. ● Pengembangan input produksi, sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat. ● Pengembangan pelabuhan perikanan Bagansiapiapi. ● Pengembangan Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu: ✓ Pengembangan Kawasan Bekanhulir (Bengkalis, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir). ✓ Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Perindustrian Selinsing di Dumai. ✓ Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Wisata Pulau Rupat. ✓ Pengembangan Kawasan Industri Bandar Bukit. ● Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi.	4. **Penguatan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan daya saing Tenaga Kerja Daerah** diarahkan melalui: ● Pembangunan Kawasan Industri Buruk Bakul. ● Pengembangan KEK Pariwisata Pulau Rupat. ● Redesain Kawasan Wisata Pulau Rupat ● Ketahanan Pangan Mendukung Program Swasembada Pangan. ● Penguatan peran perusahaan dalam pembangunan

NO	PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	KEBIJAKAN PROVINSI	DUKUNGAN PROGRAM DARI KABUPATEN/KOTA DAN CATATAN
		● Pengembangan Kawasan strategis pariwisata Dumai – Rupat dan Pengembangan Kawasan parwisata religi dan budaya di Rokan Hulu dan Rokan Hilir. ● Pembangunan Kawasan perkotaan Dumai sebagai PKN dan Kawasan pengembangan perdagangan, industri dan jasa.	
		5. Kesejahteraan Masyarakat diarahkan untuk: ● Pengentasan kemiskinan. Tingkat Kemiskinan tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 9,62 persen dan Kabupaten Rokan Hilir sebesar 7,01 persen. ● Peningkatan Angka Partisipasi Murni SMA. Angka Partisipasi Murni SMA tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 52,6 persen dan Kota Dumai sebesar 67,6 persen. ● Penurunan prevalensi stunting. Prevalensi stunting tahun 2023 di kabupaten bengkalis sebesar 17,90 persen, Kabupaten Rokan Hilir sebesar 16,60 persen, Kabupaten Rokan Hulu sebesar 15,90 dan Kota Dumai sebesar 14,90 persen. ● Peningkatan Desa berkembang menjadi maju atau mandiri. Desa berkembang tahun 2023 di kabupaten rokan hilir sebanyak 62 desa dan kabupaten rokan hulu sebanyak 59 desa.	**5. Kesejahteraan Masyarakat** melalui : ● Mendorong pemenuhan pelayanan dasar Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yaitu : ✓ Akses Jaminan Sosial Bagi Masyarakat ● Optimalisaai dan Revitalisasi Kawasan Wisata Sejarah dan Cagar Budaya Datuk Laksamana Raja di Laut. ● Pemerataan aksesibiltas dan kualitas pendidikan yang unggul dan Berkeadilan yaitu: ✓ Kesehatan Total Bagi Masyarakat. ✓ Pembangunan Sekolah Unggu. ✓ Pembangunan Politeknik Duri. ✓ Mendorong penguatan Perguruan Tinggi yang ada. ✓ Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa/Mahasiswa Ekonomi Lemah dan berprestasi.

NO	PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	KEBIJAKAN PROVINSI	DUKUNGAN PROGRAM DARI KABUPATEN/KOTA DAN CATATAN
			✓ Mendorong Pendirian Sekolah-sekolah Agama yang baru. ● Memperkuat Derajat Kesehatan Masyarakat: ✓ Kesehatan Total Bagi Masyarakat. ✓ Penurunan prevalensi stunting ✓ Pembangunan RS PRATAMA Bukit Batu. ✓ Optimalisasi RS Pratama Pulau Rupat. ✓ Penyediaan dokter untuk seluruh Puskemas pembantu di Kabupaten Bengkalis. ● Pembangunan Duri Islamic Centre. ● Pembangunan Pusat Tamadun Islam Pulau Bengkalis. ● Bantuan Keuangan 1 Milyar 1 Desa Dan Dana Tambahan 1 Milyar 1 Kelurahan 1 Kecamatan. ● Revitalisasi dan penguatan sistem tata kelola Kelembagaan BUMDes ● Mendorong pemenuhan pelayanan dasar Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yaitu: ✓ Pembangunan Politeknik Duri.

Sumber: *Hasil* *Analisis*

Pembangunan Kabupaten Bengkalis lima tahun mendatang diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Fokus utama mencakup penyelesaian pembangunan jalan poros seperti Duri–Pakning dan Batu Panjang–Tanjung Medang, peningkatan fasilitas penyeberangan Ro-Ro, serta pembangunan Jembatan Bengkalis–Sumatera. Selain itu, akan didorong optimalisasi transportasi antar-pulau, penguatan pelayaran, serta penyediaan jalur kereta api penunjang industri dan pariwisata. Peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar juga menjadi prioritas guna memperkuat posisi Bengkalis sebagai simpul pertumbuhan ekonomi.

Di sektor lingkungan dan mitigasi bencana, rencana pembangunan menitikberatkan pada penataan kawasan perkotaan, pengelolaan sanitasi, penanganan banjir dan abrasi di wilayah pesisir, serta penguatan program perhutanan sosial di beberapa kecamatan. Pemenuhan kebutuhan air baku akan dilakukan melalui pembangunan dan pengelolaan SPAM Regional Dumai–Rokan–Bengkalis, termasuk penyediaan air bersih untuk wilayah Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, dan Talang Muandau. Kawasan konservasi seperti Cagar Biosfer Giam Siak Kecil–Bukit Batu akan dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan lingkungan.

Pengembangan ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti perkebunan, perikanan tangkap, dan industri hilir sawit serta migas. Kawasan strategis provinsi di Bengkalis, termasuk Kawasan Wisata Pulau Rupat dan Kawasan Industri Bandar Bukit, akan dikembangkan untuk memperkuat daya saing daerah. Di sisi kesejahteraan masyarakat, program prioritas mencakup pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan seperti Politeknik Duri, RS Pratama Pulau Rupat, Duri Islamic Centre, serta pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi. Dukungan terhadap BUMDes, desa wisata, dan pembiayaan desa/kelurahan juga menjadi strategi penting untuk pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat.

3.9 Program Prioritas Daerah

Arah kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis dijabarkan lebih lanjut ke dalam program pembangunan daerah sebagai instrumen operasional untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah. Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk serangkaian kegiatan yang menggunakan sumber daya untuk menghasilkan capaian kinerja yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Setiap program disusun berdasarkan keterkaitan antara sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta mengacu pada visi dan misi kepala daerah. Dalam konteks ini, program prioritas ditentukan melalui proses cascading kinerja, dimulai dari visi hingga outcome, bukan sekadar penurunan indikator, sehingga menjamin kesinambungan dan relevansi antar level perencanaan. Penyusunan program juga mengacu pada regulasi yang berlaku dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik daerah Kabupaten Bengkalis.

Tabel III.10 Program Prioritas Kabupaten Bengkalis

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA					
1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.	1.1. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA			- Laju Pertumbuhan Ekonomi - Indeks Daya Saing Daerah - Tingkat Pengangguran Terbuka - Rasio Gini - Pendapatan Perkapita - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tingkat Kemiskinan	
		1.1.1. Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan		- Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten (%)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
			Meningkatnnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah (Kali)	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) (IKM)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyaratan desa (LKD) dan lembaga adat desa (LAD) (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1.1.2. Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan Berkelanjutan		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN (Juta Rupiah)	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	- Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) - Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN (Juta Rupiah) - Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Izin)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		1.1.3. Terwujudnya Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru		- Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) - Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara - Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	- Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (%) - Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara (%)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Koperasi)	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	- Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari informal ke formal (UMKM) - Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya daya saing UMKM	Jumlah UMKM yang dikembangkan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		1.1.4. Terwujudnya ketahanan pangan daerah		Indeks Ketahanan Pangan Daerah	
			Meningkatnya diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		1.1.5. Terwujudnya Petani yang Sejahtera		- Nilai Tukar Petani - Kontribusi PDRB Sektor Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan (%)	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan	Peningkatan Produksi Peternakan (sapi, kerbau dan domba) (Ekor)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	- Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura (Ton/Tahun) - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton/Tahun)	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana perkebunan	Jumlah produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit, Karet dan Aren) (Ton/Tahun)	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (%)	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana perkebunan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Perkebunan (%)	
			Meningkatnya produksi	Jumlah Produksi Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			perikanan tangkap	Tangkap (Ton)	PERIKANAN TANGKAP
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		1.1.6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	- Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun - Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat - Prevalensi Obesitas > 18 tahun - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar - Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan - Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat - Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam system informasi kesehatan nasional - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar - Persentase lanjut usia yang mandiri - Persentase merokok penduduk 10-21 tahun - Cakupan penemuan kasus TB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		1.1.7. Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata		- Angka Harapan Lama Sekolah - Rata-rata Lama Sekolah	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	- Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi SD (%) - Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi SMP (%) - Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Numerisasi SD (%) - Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Numerisasi SMP (%) - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi SD (%) - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi SMP (%) - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				nasional untuk Numerasi SD (%) - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP (%) - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam SMP/MTS (APS) (%) - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD (APS) (%) - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam SD/MI (APS) (%) - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) (%)	
		1.1.8. Meningkatnya kualitas kepemudaan daerah		Jumlah Prestasi Olahraga	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	- Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) - Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi	Peningkatan Prestasi Olahraga (Peringkat)	PROGRAM PENGEMBANGAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			olahraga		KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		1.1.9. Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak		- Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Indeks Ketimpangan Gender (IKG) - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	- Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%) - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainya terhadap anak	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Tertangani (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		1.1.10. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan		- Persentase PPKS yang meningkat kesejahteraannya - Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	- Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) - Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) - Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) - Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) - Persentase Pemerlu	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) - Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (%) - Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (%) - Indeks Peranan Sosial (%)	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	- Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%) - Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%) - Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%) - Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%) - Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (%) - Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang	2.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu			- Indeks Reformasi Birokrasi - Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan - Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berkarakter				pencatatan.	
		2.1.1. Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntable		- Indeks Pemerintahan Digital - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	- Efektifitas kerjasama daerah (Nilai) - Efektifitas Pelaksanaan kebijakan Kesejateraan rakyat (Nilai) - Indeks Reformasi Hukum (Indeks) - Skor EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) (Skor)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			transmigrasi		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	- Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan - Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat - Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
			Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana	- Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (proportion of demand satisfied by modern methods) - Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun - Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Indeks pembangunan keluarga (iBANGGA) (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidng pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidangperekonomian dan SDA	- Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase) - Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) - Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Tata Kelola SPBE (Indeks)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		2.1.2. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik		- Persetase Peningkatan PAD - Indeks Akses Keuangan Daerah - Opini BPK - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	- Opini BPK terhadap laporan keuangan (Predikat) - Penetapan APBD Tepat Waktu (%) - Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase) - Persentase Penurunan SILPA (Persentase) - Persentase Realisasi Dana Mandatory dan Pembiayaan Daerah (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	- Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase) - Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) - Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Menurunya terjadi penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		2.1.3. Meningkatnya budaya kerja ASN Yang prosesional dan Berintegritas		- Indeks Profesionalis ASN - Indeks Sistem Merit	
			Meningkatnya kualitas layanan adminitrasi kepegawaian	- Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) - Persentase layanan administrasi kepegawaian (%) - Persentase pegawai dengan E-Kinerja bernilai baik (%) - Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	- Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase) - Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2.1.4. Meningkatnya pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah		Indeks Inovasi Daerah	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	- Persentase Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%) - Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (%)	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		2.1.5. Terciptanya kerukunan umat beragama		Persentase penyelesaian konflik SARA	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	- cakupan penguatan Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%) - Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikakan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
		2.1.6. Meningkatnya pelestarian budaya melayu		Indeks Pelestarian Budaya Melayu	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Jumlah Sejarah lokal yang didokumentasikan (*)	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat	3.1. Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan serta mendorong pengembangan			- Indeks konektivitas wilayah - Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur - Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	
		3.1.1. Terbangunnya konektivitas antar		Rasio Konektivitas Antar Wilayah	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan	wilayah	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	- Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (Unit) - Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui Terminal/dermaga/ bandara pertahun (%) - Rasio konektivitas kabupaten (Rasio)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			Meningkatnya kualitas layanan trasnportasi air	Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
		3.1.2. Ketersediaan infrastruktur dasar yang handal dan merata antarwilayah		- Persentase jalan dalam kondisi mantap - Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (%) - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (%) - Persentase lingkungan permukiman kumuh - Rasio pemukiman layak huni	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase luas layanan irigasi (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi-(Perkim)	Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah layak dan aman) (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
			Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Meningkatnya pembangunan rumah layak huni dalam rangka pencegahan kawasan permukiman kumuh	Pembangunan rumah layak huni dalam rangka pencegahan kawasan permukiman kumuh (Unit)	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dam Utilias Umum) (%)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		3.1.3. Berkembangnya kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan identitas wilayah		- Persentase Pengelolaan wilayah perbatasan - Persentase ketersediaan Infrastruktur dasar wilayah perbatasan	
			Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase Pengelolaan wilayah perbatasan	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3.1.4. Terjaganya kualitas lingkungan dan meningkatnya ketangguhan daerah dalam pencegahan dan mitigasi bencana		- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - Indeks Risiko Bencana	
			Menurunya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Air (Poin) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin) - Indeks Kualitas Udara (Poin)	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase pengelolaan persampahan yang tertangani (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang) - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana termasuk kebakaran hutan (%) - Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan benacana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai ancaman bencana (Orang)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Pesentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Sumber: Hasil Analisis

Setelah dilakukan cascading terhadap program prioritas daerah, langkah selanjutnya adalah menyusun program unggulan daerah. Program unggulan merupakan bagian dari program prioritas yang memiliki keterkaitan langsung dengan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode kepemimpinan 2025–2029. Untuk memperkuat pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis, ditetapkan lima program unggulan yang berfungsi sebagai faktor kunci keberhasilan pembangunan. Kelima program ini dirancang untuk memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan percepatan transformasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yakni:

Tabel III.11 Program Unggulan Daerah

Program Unggulan Daerah		Subtansi	Urusan Pemerintahan Bidang	Program OPD	Tahun					Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bidang Urusan
					2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Bantuan keuangan satu milyar satu desa dan dana tambahan untuk kecamatan dan kelurah)	Pembinaan umat satu desa satu penyuluh keagamaan	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Keuangan)	102.000.000.000	102.000.000.000	102.000.000.000	102.000.000.000	102.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
		Ketahanan Pangan Mendukung Program Swasembada Pangan								
		Revitalisasi dan penguatan sistem tata kelola Kelembagaan BUMDes	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Adiminstrasi Pemerinthan Desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Peningkatan Pelayanan di Kecamatan	Kewilayahan/Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	KECAMATAN
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota						
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan		Program Pembinaan dan Pengawasan						

Program Unggulan Daerah		Subtansi	Urusan Pemerintahan Bidang	Program OPD	Tahun					Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bidang Urusan
					2026	2027	2028	2029	2030	
		Desa		Pemerintahan Desa						
		Penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan.		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	19.000.000.000	19.000.000.000	19.000.000.000	19.000.000.000	19.000.000.000	
2.	Beasiswa pendidikan khusus dan berprestasi	Memberikan beasiswa bagi dosen yang berprestasi untuk melanjutkan jenjang S3	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	8.472.500.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH
		Memberikan Beasiswa khusus tahfis qur'an								
		Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Bagi Sisw/Mahasiswa Ekonomi Lemah	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan						Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
3.	Akses Jaminan Sosial dan Kesehatan Total Bagi Masyarakat	Pemberian Jaminan Kesehatan Total (100%) Bagi Masyarakat.	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	97.195.721.914	97.195.721.914	97.195.721.914	97.195.721.914	97.195.721.914	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
		Bantuan Sosial kepada Masyarakat	Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	35.611.099.740	35.611.099.740	35.611.099.740	35.611.099.740	35.611.099.740	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
		Pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	4.838.400.000	4.838.400.000	4.838.400.000	4.838.400.000	4.838.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

Program Unggulan Daerah		Subtansi	Urusan Pemerintahan Bidang	Program OPD	Tahun					Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bidang Urusan
					2026	2027	2028	2029	2030	
4.	Optimalisasi Pelayanan Transportasi Antar Pulau	Peningkatan fasilitas darat dan laut penyeberangan Ro-Ro.	Perhubungan	Program Pengelolaan Pelayaran	70.000.000.000	45.000.000.000	40.000.000.001	35.000.000.002	35.000.000.003	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
		Penyediaan Fasilitas Layanan Tiket Non Tunai dan Realtime.								
		Penguatan Armada Angkutan Pelayaran yang Layak.								
5.	Pelayanan Sistem Kependudukan Berbasis Mobile	Mendekatkan Petugas Pelayanan Kependudukan Kepada Masyarakat	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	3.072.000.000	1.500.000.000,00	1.500.000.001,00	1.500.000.002,00	1.500.000.003,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatkan Sistem Pelayanan Kependudukan Berbasis Online								
		Mobil Layanan Online Kependudukan (MOLDUK)		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000.000	-	-	-	-	
Total					**356.209.721.654**	**326.165.221.654**	**321.165.221.656**	**316.165.221.658**	**316.165.221.660**	

Sumber: Hasil Analisis

Selanjutnya disusun program strategis daerah yang merupakan penjabaran dari janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2029. Program ini memiliki daya ungkit besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berfungsi sebagai pendorong utama dalam percepatan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bengkalis secara berkelanjutan. Berikut diuraikan penjelasan dan pagu terkait program strategis daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu:

Tabel III.12 Penjelasan Program Strategis Daerah

NO	PROGRAM	URAIAN
1	**PEMBANGUNAN JEMBATAN BENGKALIS – SUMATERA**	Salah satu Program Strategis Nasional dengan daya ungkit Perekonomian yang sangat besar sekaligus menjadi manifestasi kehadiran negara di wilayah perbatasan dengan pertimbangan logis Kabupaten Bengkalis penghasil migas dan didukung modalitas sumberdaya yang cukup besar seperti: Kawasan Industri Buruk Bakul, Kawasan Produksi Pangan Nasional, potensi migas di Pulau Bengkalis, peluang investasi energi terbarukan serta berada pada jalur perdagangan tersibuk di dunia. **SKEMA PEMBANGUNAN: KPBU** **2029; Target akhir lahan sudah bebas, Penetapan PSN** **Keterlibatan banyak pihak salah satu isu yang harus dipertimbangkan**
2	**PEMBANGUNAN RS PRATAMA BUKIT BATU**	Untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan serta mendukung rencana pengembangan kawasan baik itu kawasan industri, *food estate*, perkebunan dan holtikultura, peternakan maupun pengembangan agroindustri lainnya. **SKEMA PEMBANGUNAN: DAK/APBN** **2029**
3	**PEMBANGUNAN BALAI RAJA ECO PARK**	Potensi pengembangan Suaka Margasatwa seluas 15.330 Ha sebagai pusat edukasi, riset, dan ruang terbuka hijau serta wisata alam dengan memanfaatkan koridor Tol Pekanbaru – Dumai. **SKEMA PEMBANGUNAN: KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BBKSDA**
4	**PEMBANGUNAN POLITEKNIK DURI**	Sebagai Kawasan strategis/Industri minyak nasional, Kota Duri sekitarnya harus didukung dengan pengembangan SDM yang mumpuni melalui fasilitas Pendidikan tinggi vokasi yang memadai agar terciptnya keseimbangan ekologis antara pemanfaatan SDA,

NO	PROGRAM	URAIAN
		Pembangunan kewilayahan dengan pengembbangan SDM. **SKEMA PEMBANGUNAN: APBD/APBN/PIHAK KETIGA**
5	**PEMBANGUNAN DURI ISLAMIC CENTRE**	DIC dibangun sebagai manifestasi transformasi nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat basis Pembangunan Masyarakat dalam Kawasan dengan kemajemukan dan heterogenitas yang tinggi agar pembangunan infrastruktur seimbang dengan pembangunan keagamaan. **SKEMA PEMBANGUNAN: APBD/PIHAK KETIGA**
6	**PEMBANGUNAN PUSAT TAMADUN ISLAM PULAU BENGKALIS**	Mempertimbangkan historis, geografis dan posisi pulau bengkalis sbg pusat pendidikan dan pengembangan budaya melayu, maka perlu didukung dengan Islamic center, pendidikan Islam Terpadu (IT) mulai SD sampai SMA, Pusat Pengkajian Alquran dan Kajian Budaya dan Museum Tamadun Melayu. **SKEMA PEMBANGUNAN: APBD/PIHAK KETIGA**
7	**PEMBANGUNGAN KAWASAN INDUSTRI BURUK BAKUL**	Beberapa pertimbangan logis pentingnya Kawasan Industri Buruk Bakul antara lain: modalitas lahan Pertanian dan Perkebunan yang luas, letak yang strategis, laut yang dalam, sesuai dengan tata ruang dan sejalan dengan agenda Nasional dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan energi. **SKEMA PEMBANGUNAN: BUMD MELALUI BADAN PENGELOLA (BP) DENGAN PIHAK SWASTA (INVESTOR)**
8	**PENGEMBANGAN KEK PARIWISATA PULAU RUPAT**	Dalam agenda Nasional 2025 – 2045 Pulau Rupat dijadikan sebagai Gerbang Integrasi Ekonomi ASEAN dengan konektivitas Pekanbaru – Dumai (Tol) – Dumai – Pulau Rupat (Jembatan/Ro-ro) dan Pulau Rupat – Malaka (Jembatan/Tunnel/Ro-ro) sebagai potensi besar daya dukung Pengembangan KEK Pariwisata Pulau Rupat. **SKEMA PEMBANGUNAN: APBD/APBN/PIHAK KETIGA**

Sumber: Hasil Analisis

Tabel III.13 Program Strategis Daerah Kabupaten Bengkalis

NO	PROGRAM STRATEGIS	SUBTANTIF	BASE LINE PADA APBD	PROYEKSI PAGU					SKEMA PEMBANGUNAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**Mendorong Percepatan Pembangunan Jembatan Pulau Sumatera – Pulau Bengkalis**	- Studi Kelayakan - Basic Desain - DED dan AMDAL - MOU - PKS - Pembebasan Lahan	25.000.000.000	0	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	**KPBU**
2	**Pembangunan RS Pratama Bukit Batu**	- Studi Kelayakan - Masterplan dan DED - AMDAL - Penyiapan Proposal Pembiayaan - Koordinasi ke Kementrian Kesehatan untuk Alokasi Anggaran - Penyiapan Lahan - Pematangan Lahan	-	1.200.000.000	70.000.000.000	35.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	**DAK/APBN**
3	**Pembangunan Balai Raja Eco Park**	- Pemetaan Ulang Rencana Kawasan Eco park - Komunikasi dan Koordinasi dengan PT. PHR - Perjanjian kerjasama dengan BBKSDA - Penyusunan MasterPlan dan DED	500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-		**KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BBKSD**

NO	PROGRAM STRATEGIS	SUBTANTIF	BASE LINE PADA APBD	PROYEKSI PAGU					SKEMA PEMBANGUNAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	**Mendorong Pembangunan Politeknik Duri**	- Studi Kelayakan - Master Plan dan DED - AMDAL - Komunikasi dan Koordinasi dengan Kemenristekdikti - Pendirian Yayasan	500.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000		**APBD/APBN/PIHAK KETIGA**
5	**Melanjutkan Pembangunan Duri Islamic Centre**	- Reviu Desain DIC - Pelaksanaan Pembangunan - Pembentukan Lembaga Pengelola	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		**APBD/PIHAK KETIGA**
6	**Pembangunan Pusat Tamadun Islam di Pulau Bengkalis**	- Studi Kelayakan - Master Plan, DED dan AMDAL - Pembentukan Lembaga Pengelola - Koordinasi dan kerjasama	1.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000		**APBD/PIHAK KETIGA**
7	**Mendorong Pecepatan Pembangunan Kawasan Industri Buruk Bakul**	- Koordinasi ke Kementrian Terkait - Pembentukan badan Pengelola Kawasan Industri - Analisis Investasi - Promosi dan kerjasama	2.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-		**BUMD MELALUI BADAN PENGELOLAAN (BP) DENGAN PIHAK SWASTA**

NO	PROGRAM STRATEGIS	SUBTANTIF	BASE LINE PADA APBD	PROYEKSI PAGU					SKEMA PEMBANGUNAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	**Mendorong Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pulau Rupat**	- Master Plan dan DED - Analisis Investasi - Koordinasi ke Kementerian Terkait/Dewan Nasional KEK - Pembentukan badan Pengelola KEK - Promosi dan kerjasama	1.000.000.000	4.500.000.000	-	-	-		**APBD/APBN/PIHAK KETIGA**
TOTAL			**35.000.000.000**	**43.700.000.000**	**312.000.000.000**	**277.000.000.000**	**245.000.000.000**	**205.000.000.000**	

Sumber: Hasil Analisis

Dalam penyusunan Program Strategis Daerah Kabupaten Bengkalis, analisis biaya yang tersedia hingga saat ini masih bersifat sangat sementara. Pagu rencana biaya yang ditampilkan lebih dimaksudkan sebagai gambaran awal dalam merancang arah pembangunan, sehingga berpotensi mengalami penyesuaian sesuai dengan hasil kajian teknis mendalam, dinamika harga pasar, maupun kebijakan fiskal nasional dan provinsi. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu menyampaikan secara terbuka bahwa estimasi biaya tersebut bukan angka final, melainkan bersifat indikatif.

Di sisi lain, skema pembiayaan masih bersifat terbuka dan fleksibel. Tidak hanya mengandalkan APBD Kabupaten Bengkalis, pembiayaan juga berpeluang diperoleh dari sumber lain seperti APBN, Dana Transfer ke Daerah, pembiayaan kreatif melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, maupun hibah lembaga donor. Pendekatan ini memberikan keleluasaan dalam mencari alternatif pendanaan, namun sekaligus menuntut perencanaan yang cermat agar tidak menimbulkan ketergantungan berlebihan pada salah satu sumber dana.

Tabel III.14 Penyelarasan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Riau dan RPJMD Kabupaten Bengkalis

No	RPJMN tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	**Program Daerah**	**Program Daerah**
1	79-Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)		
	46-Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	**Pembangunan Balai Raja Eco Park (Program Strategis Daerah)** Potensi pengembangan Suaka Margasatwa seluas 15.330 Ha sebagai pusat edukasi, riset, dan ruang terbuka hijau serta wisata alam dengan memanfaatkan koridor Tol Pekanbaru – Dumai. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**
	53-Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	**Riau Cerdas** - Dukungan Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini	**Program Unggulan Daerah** Beasiswa pendidikan khusus dan berprestasi • Memberikan beasiswa bagi Guru dan Dosen yang berprestasi untuk melanjutkan jenjang S3 • Memberikan Beasiswa khusus tahfis qur'an • Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Bagi Sisw/Mahasiswa Ekonomi Lemah **Program Pengelolaan Pendidikan**
	57-Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan	**Riau Cerdas** - Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik yang merata dan berkeadilan.	**Beasiswa Pendidikan Khusus Dan Berprestasi (Program Unggulan Daerah)** • Memberikan Beasiswa Kepada Dokter umum yang akan melanjutkan ke jenjang spesialis. • Memberikan beasiswa bagi Guru dan dosen yang berprestasi untuk melanjutkan jenjang S2/S3

No	RPJMN tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029
	hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja		**Program Pengelolaan Pendidikan**
	60-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	-	**Pembangunan Pusat Tamadun Islam Pulau Bengkalis** Mempertimbangkan historis, geografis dan posisi pulau bengkalis sbg pusat pendidikan dan pengembangan budaya melayu, maka perlu didukung dengan Islamic center, pendidikan Islam Terpadu (IT) mulai SD sampai SMA, Pusat Pengkajian Alquran dan Kajian Budaya dan Museum Tamadun Melayu.

Sumber: Hasil Analisis

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Unruk melaksanakan program tersebut maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai tahun 2025 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Prinsip peraturan tersebut diterapkan elalaui money follow program dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah. Hal ini berarti program perangkat daerah menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dan mendapatkan anggaran.

Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis, diatasi melalui Kolaborasi Pendanaan Pembangunan Daerah. Kebijakan daerah dalam pelaksanaan program prioritas daerah tidk saja terbatas pada APBD Kabuaten Bengkalis tetapi juga memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari 1) APBN, 2) APBD Provinsi 3) Dana Masyarakat/Umat, 4) Corporate Social Responsibility (CSR), 5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan 6) Hibah.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah, sebagai berikut:

Prioritas I

Dialokasikan untuk mendanai membiaya belanja langsung wajib mengikat serta pemenuruhan penerapan urusan wajib pelayanan dasa, dan di dalamnya termasuk kewajiban mandatori dianatara alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen , anggaran kesehatan 10 persen, serta belanja Infrastruktur 25 persen dari transfer umum yang diterima Kabupaten Bengkalis

Prioritas II

Dialokasikan untuk pendanaan:

1) program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi BUPATI periode 2025-2029, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan

amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

2) program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD.

Prioritas III,

Merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II.

Rencana program Perangkat Daerah untuk periode tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah tertuang dan dianalisis pada Bab II dokumen ini.

Selanjutnya, program pembangunan tahun 2030 merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah, sekaligus menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai kelanjutan dari perencanaan pembangunan periode sebelumnya, tetapi juga sebagai landasan strategis bagi kepala daerah yang menjabat pada periode 2030–2034 untuk merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan visi jangka panjang daerah. Dengan demikian, program tahun 2030 dirancang agar mampu menjamin konsistensi, kesinambungan, dan keterpaduan pembangunan daerah sehingga setiap tahapan pembangunan dapat saling mendukung, berkesinambungan, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel IV.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					902.663.476.537		911.260.576.372,00		924.063.601.548,00		930.639.563.844,71		941.452.903.198,03	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					534.545.349.118		529.074.589.670,00		525.363.380.879,00		517.825.198.104,00		512.475.710.396,00	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	534.545.349.118	100	529.074.589.670,00	100	525.363.380.879,00	100	517.825.198.104,00	100	512.475.710.396,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					361.030.576.397		374.819.844.009,00		391.020.037.033,00		404.865.253.953,71		420.716.855.541,01	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	55,11	56,56	61,33	361.030.576.397	67,68	374.819.844.009,00	75,63	391.020.037.033,00	85,16	404.865.253.953,71	94,70	420.716.855.541,01	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	98,83	99,27	99,71		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD (APS) (%)	54,04	57,22	60,40		63,58		66,77		69,95		73,13		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) (%)	21,33	25,43	29,53		33,63		37,73		41,83		45,93		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					5.543.551.022		5.761.142.693,00		6.006.183.636,00		6.216.611.787,00		6.460.003.346,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	100	5.543.551.022	100	5.761.142.693,00	100	6.006.183.636,00	100	6.216.611.787,00	100	6.460.003.346,00	1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					1.544.000.000		1.605.000.000,00		1.674.000.000,00		1.732.500.000,00		1.800.333.915,02	
Meningkatnya mutu distribusi pendidikan dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	75	80	85	1.544.000.000	90	1.605.000.000,00	95	1.674.000.000,00	100	1.732.500.000,00	100	1.800.333.915,02	1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik (%)	88	90	95		98		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					708.955.025.662		722.437.007.381,36		741.141.029.593,97		748.347.962.700,67		767.159.405.699,45	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					491.109.355.445		501.586.616.563,53		508.057.570.261,93		517.050.997.879,08		530.442.746.325,57	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	225.366.363.420	100	233.959.706.978,10	100	242.407.279.083,03	100	255.045.452.978,68	100	264.224.602.624,13	1.02.0.00.0.00.02 .0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	156.656.026.157	100	158.214.376.092,69	100	155.806.995.751,47	100	152.391.956.582,93	100	154.162.638.519,08	1.02.0.00.0.00.03 .0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	109.086.965.867	100	109.412.533.492,74	100	109.843.295.427,43	100	109.613.588.317,47	100	112.055.505.182,36	1.02.0.00.0.00.04 .0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					194.849.235.181		197.777.941.389		210.686.718.930		218.548.426.391		213.792.965.873	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	5	15	14	155.733.606.693,49	13	158.414.655.127,74	12	167.977.753.897,64	11	174.301.277.976,81	10	170.199.986.247,51	1.02.0.00.0.00.02 .0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14	18,8	17,7		16,5		15,4		14,2		13,1		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	5.988	11.000	16.000		21.000		30.000		41.500		42.000		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	23,4	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0	85	87		89		91		92		93		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	76,61	77	78		79		79,5		80		80		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	62	70	75		80		85		90		92		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam system informasi kesehatan nasional (%)	46,72	50	55		60		65		70		75		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	32,5	33	36,5		44		62,5		75,5		80		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		97		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	74,3	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	12,4	12,4	11,4		10,4		9,4		8,4		7,4		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	100	100	100	1.542.473.748,63	100	155.781.645,23	100	1.534.113.986,52	100	1.500.488.671,25	100	1.517.923.240,93	1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	100	100	100	37.573.154.739,13	100	39.207.504.616,45	100	41.174.851.045,52	100	42.746.659.742,71	100	42.075.056.384,38	1.02.0.00.0.00.04.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					21.264.408.888		20.866.152.180		20.546.183.566		10.135.775.356		20.322.938.422	
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	12	17	22	1.332.501.272,27	30	1.236.972.856,30	40	1.182.465.753,20	50	1.123.462.897,90	60	1.089.716.941,69	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	63	67	71		76		81		86		88		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000)	5,2	5,3	5,3		5,4		5,4		5,5		5,5		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	100	100	100	6.570.074.477,82	100	6.635.430.885,68	100	6.534.466.572,17	100	6.391.241.557,26	100	6.465.503.061,792	1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	100	100	100	13.361.833.137,64	100	12.993.748.438,43	100	12.829.251.241,00	100	2.621.070.900,49	100	12767718419	1.02.0.00.0.00.04.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					923.736.007		1.386.297.248,00		1.340.556.836,00		1.454.509.965,14		1.477.292.933,96	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	100	100	100	923.736.007	100	1.386.297.248,00	100	1.340.556.836,00	100	1.454.509.965,14	100	1.477.292.933,96	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					808.290.141		820.000.000,00		510.000.000,00		1.158.253.110,04		1.123.462.144,72	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	808.290.141	100	820.000.000,00	100	510.000.000,00	100	1.158.253.110,04	100	1.123.462.144,72	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					204.414.776.710		206.373.056.660,60		209.072.648.580,42		212.478.988.290,83		225.134.541.891,88	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.190.972.003		15.114.893.064,23		19.471.474.419,45		21.163.005.036,55		16.847.061.070,55	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	0	75	76	14.190.972.003	77	15.114.893.064,23	78	19.471.474.419,45	79	21.163.005.036,55	80	16.847.061.070,55	1.03.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					13.250.000.000		13.250.000.000,00		16.550.000.000,00		18.505.669.705,81		24.669.816.921,30	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	55	56	56	13.250.000.000	58	13.250.000.000,00	59	16.550.000.000,00	59	18.505.669.705,81	60	24.669.816.921,30	1.03.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	1	2	2		2		2		2		2		1.03.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					34.562.344.397		34.764.350.949,00		43.428.819.968,00		43.433.254.588,00		38.580.611.099,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	71,35	71,50	71,80	34.562.344.397	72,15	34.764.350.949,00	72,55	43.428.819.968,00	73,00	43.433.254.588,00	73,50	38.580.611.099,00	1.03.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					34.973.800.878		35.178.212.270,52		2.585.048.807,64		2.585.312.773,10		26.752.800.859,55	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	45,45	45,45	54,55	34.973.800.878	63,64	35.178.212.270,52	72,73	2.585.048.807,64	72,73	2.585.312.773,10	72,73	26.752.800.859,55	1.03.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					9.998.392.486		10.056.830.096,00		4.808.190.782,00		4.808.681.757,00		8.892.004.825,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	100	100	100	9.998.392.486	100	10.056.830.096,00	100	4.808.190.782,00	100	4.808.681.757,00	100	8.892.004.825,00	1.03.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.475.111.151		2.489.577.434,00		3.161.766.524,00		3.162.089.380,00		2.952.492.084,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	83,10	85,10	87,10	2.475.111.151	88,10	2.489.577.434,00	89,10	3.161.766.524,00	90	3.162.089.380,00	90,10	2.952.492.084,00	1.03.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					33.389.693.426		33.584.846.185,00		41.955.342.148,00		41.959.626.307,00		39.430.939.429,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	60	62	64	33.389.693.426	66	33.584.846.185,00	68	41.955.342.148,00	70	41.959.626.307,00	72	39.430.939.429,00	1.03.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					59.661.189.733		60.009.891.520,00		74.966.415.421,00		74.974.070.419,00		64.992.322.706,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	52,02	52,18	52,52	59.661.189.733	52,85	60.009.891.520,00	53,29	74.966.415.421,00	53,72	74.974.070.419,00	54,06	64.992.322.706,00	1.03.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					699.476.018		703.564.245,41		878.916.594,59		879.006.342,85		826.033.235,11	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	100	100	100	699.476.018	100	703.564.245,41	100	878.916.594,59	100	879.006.342,85	100	826.033.235,11	1.03.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.213.796.619		1.220.890.896,44		1.266.673.915,74		1.008.271.981,51		1.190.459.662,37	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten (%)	0	80	81	1.213.796.619	82	1.220.890.896,44	83	1.266.673.915,74	84	1.008.271.981,51	85	1.190.459.662,37	1.03.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					97.826.257.901		120.988.933.989,00		128.390.577.216,63		147.548.041.871,70		150.838.363.304,49	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.366.460.000		18.551.460.000,00		18.551.460.000,00		35.551.460.000,00		37.551.460.000,00	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	18.366.460.000	100	18.551.460.000,00	100	18.551.460.000,00	100	35.551.460.000,00	100	37.551.460.000,00	1.04.2.10.0.00.06.0000 - Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.650.000.000		1.850.000.000,00		4.500.000.000,00		4.710.796.357,70		4.765.532.330,66	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	97	98	98	1.650.000.000	98	1.850.000.000,00	98	4.500.000.000,00	98	4.710.796.357,70	98	4.765.532.330,66	1.04.2.10.0.00.06.0000 - Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.350.000.000		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		2.250.000.000,00		2.250.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1,85	1,28	1,15	2.350.000.000	1,04	2.300.000.000,00	0,93	2.300.000.000,00	0,84	2.250.000.000,00	0,80	2.250.000.000,00	1.04.2.10.0.00.06.0000 - Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					4.900.000.000		3.700.000.000,00		7.585.502.842,63		8.700.000.000,00		8.816.234.811,73	
Terpenuhinya rumah layak huni di kawasan permukiman kumuh dan berkurangnya kawasan permukiman kumuh	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	25,29	0	1,11	4.900.000.000	1,12	3.700.000.000,00	1,13	7.585.502.842,63	1,15	8.700.000.000,00	1,16	8.816.234.811,73	1.04.2.10.0.00.06 .0000 - Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					70.559.797.901		94.587.473.989,00		95.453.614.374,00		96.335.785.514,00		97.455.136.162,09	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	54	56	58	70.559.797.901	70	94.587.473.989,00	72	95.453.614.374,00	74	96.335.785.514,00	76	97.455.136.162,09	1.04.2.10.0.00.06 .0000 - Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					76.452.566.277		77.214.095.015,00		78.281.245.711,00		78.822.998.396,00		79.738.863.397,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					53.776.279.161		47.577.711.218,00		48.195.941.355,00		48.178.140.764,00		49.068.712.858,00	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	10.260.332.889	100	11.489.030.588,00	100	11.608.490.900,00	100	11.640.543.743,00	100	11.493.412.666,00	1.05.0.00.0.00.07 .0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	17.942.273.130	100	11.151.234.159,00	100	11.305.351.711,00	100	11.383.591.455,00	100	11.515.860.377,00	1.05.0.00.0.00.08 .0000 - Dinas Pemadam Kebakaran
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	25.573.673.142	100	24.937.446.471,00	100	25.282.098.744,00	100	25.154.005.566,00	100	26.059.439.815,00	1.05.0.00.0.00.09 .0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN					3.821.353.458		4.749.989.804,00		4.815.637.856,00		5.152.025.236,00		4.598.724.673,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	0	100	100	3.821.353.458	100	4.749.989.804,00	100	4.815.637.856,00	100	5.152.025.236,00	100	4.598.724.673,00	1.05.0.00.0.00.09 .0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.09 .0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.09 .0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.09 .0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					9.193.709.665		8.159.542.754,00		8.311.638.934,00		8.417.445.213,00		8.797.635.301,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana (Persentase)	100	100	100	9.193.709.665	100	8.159.542.754,00	100	8.311.638.934,00	100	8.417.445.213,00	100	8.797.635.301,00	1.05.0.00.0.00.07 .0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					9.661.223.993		16.726.851.239,00		16.958.027.566,00		17.075.387.183,00		17.273.790.565,00	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Pesentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (%)	100	100	100	9.661.223.993	100	16.726.851.239,00	100	16.958.027.566,00	100	17.075.387.183,00	100	17.273.790.565,00	1.05.0.00.0.00.08 .0000 - Dinas Pemadam Kebakaran
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					59.927.600.344		60.053.735.548,59		60.514.340.057,70		61.784.863.361,83		62.502.757.822,50	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.475.494.433		13.375.721.015,43		13.600.554.866,01		13.499.936.994,48		13.510.332.411,95	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	16.475.494.433	100	13.375.721.015,43	100	13.600.554.866,01	100	13.499.936.994,48	100	13.510.332.411,95	1.06.0.00.0.00.10 .0000 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					3.161.154.947		3.178.180.783,67		2.824.263.800,51		3.747.627.914,24		3.769.810.188,90	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100	3.161.154.947	100	3.178.180.783,67	100	2.824.263.800,51	100	3.747.627.914,24	100	3.769.810.188,90	1.06.0.00.0.00.10 .0000 - Dinas Sosial
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.10 .0000 - Dinas Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					14.681.901		27.344.265,71		27.508.841,97		27.640.771,34		27.804.377,54	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (%)	100	100	100	14.681.901	100	27.344.265,71	100	27.508.841,97	100	27.640.771,34	100	27.804.377,54	1.06.0.00.0.00.10 .0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					5.465.833.388		5.649.263.118,78		5.938.700.502,26		6.174.948.317,45		6.853.779.065,00	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100	5.465.833.388	100	5.649.263.118,78	100	5.938.700.502,26	100	6.174.948.317,45	100	6.853.779.065,00	1.06.0.00.0.00.10 .0000 - Dinas Sosial
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.10 .0000 - Dinas Sosial
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.10 .0000 - Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)													
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					32.573.853.554		35.677.886.424,84		35.927.464.584,17		36.128.330.860,04		36.121.593.682,16	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	100	32.573.853.554	100	35.677.886.424,84	100	35.927.464.584,17	100	36.128.330.860,04	100	36.121.593.682,16	1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.426.141.167		1.426.185.751,95		1.443.939.115,40		1.450.864.087,65		1.459.451.777,37	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	1.426.141.167	100	1.426.185.751,95	100	1.443.939.115,40	100	1.450.864.087,65	100	1.459.451.777,37	1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					810.440.953		719.154.188,21		751.908.347,38		755.514.416,63		759.986.319,58	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	810.440.953	100	719.154.188,21	100	751.908.347,38	100	755.514.416,63	100	759.986.319,58	1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					28.637.088.309		30.831.662.890,09		31.207.696.537,82		31.392.134.504,77		31.777.657.470,39	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					19.252.430.953		21.268.313.243,86		21.802.786.538,57		22.022.570.967,96		22.219.828.589,75	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	19.252.430.953	100	21.268.313.243,86	100	21.802.786.538,57	100	22.022.570.967,96	100	22.219.828.589,75	2.07.3.32.0.00.11 .0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					72.576.341		84.830.684,79		104.081.916,18		121.659.647,44		138.314.140,04	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	72.576.341	100	84.830.684,79	100	104.081.916,18	100	121.659.647,44	100	138.314.140,04	2.07.3.32.0.00.11 .0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.524.050.190		1.438.808.916,48		1.408.613.564,52		1.404.255.689,51		1.423.713.619,59	
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terlatih (%)	100	100	100	1.524.050.190	100	1.438.808.916,48	100	1.408.613.564,52	100	1.404.255.689,51	100	1.423.713.619,59	2.07.3.32.0.00.11 .0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					167.779.875		845.665.462,55		849.146.695,95		839.801.252,32		877.233.023,06	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	47,83	87	87	167.779.875	88	845.665.462,55	88	849.146.695,95	88	839.801.252,32	88	877.233.023,06	2.07.3.32.0.00.11 .0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					7.620.250.950		7.194.044.582,41		7.043.067.822,60		7.003.846.947,54		7.118.568.097,95	
Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Besaran Kasus Yang Diselesaikan (%)	75	80	85	7.620.250.950	85	7.194.044.582,41	90	7.043.067.822,60	100	7.003.846.947,54	100	7.118.568.097,95	2.07.3.32.0.00.11 .0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					14.939.028.489		15.087.635.820,00		15.296.157.090,00		15.402.015.575,00		15.580.975.616,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.502.715.798		7.650.969.842,00		7.597.949.151,00		7.407.617.917,00		7.269.052.129,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	10.502.715.798	100	7.650.969.842,00	100	7.597.949.151,00	100	7.407.617.917,00	100	7.269.052.129,00	2.08.0.00.0.00.12 .0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					2.103.702.108		1.797.540.562,00		1.784.006.418,00		1.733.454.062,00		1.695.314.258,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	89,91	90,15	90,15	2.103.702.108	90,30	1.797.540.562,00	90,30	1.784.006.418,00	90,35	1.733.454.062,00	90,35	1.695.314.258,00	2.08.0.00.0.00.12 .0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,401	0,47	0,47		0,40		0,40		0,40		0,40		2.08.0.00.0.00.12 .0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	59,80	59,80	59,80		59,90		59,90		59,95		59,95		2.08.0.00.0.00.12 .0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					996.490.472		1.116.881.897,00		1.193.008.407,00		1.408.877.273,00		1.618.571.638,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	80	80	996.490.472	85	1.116.881.897,00	85	1.193.008.407,00	90	1.408.877.273,00	100	1.618.571.638,00	2.08.0.00.0.00.12 .0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					636.646.690		1.086.797.536,00		1.222.374.767,00		1.309.007.491,00		1.356.949.067,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	100	100	100	636.646.690	100	1.086.797.536,00	100	1.222.374.767,00	100	1.309.007.491,00	100	1.356.949.067,00	2.08.0.00.0.00.12 .0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					332.163.490		300.843.608,00		293.663.607,00		285.342.232,00		279.064.075,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	100	332.163.490	100	300.843.608,00	100	293.663.607,00	100	285.342.232,00	100	279.064.075,00	2.08.0.00.0.00.12 .0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					0,00		1.191.340.690,00		1.231.184.676,00		1.261.926.023,00		1.346.484.164,00	
Terjaminya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	60,60	60,80	61,20	0,00	61,40	1.191.340.690,00	61,80	1.231.184.676,00	62,30	1.261.926.023,00	62,70	1.346.484.164,00	2.08.0.00.0.00.12 .0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					367.309.931		1.943.261.685,00		1.973.970.064,00		1.995.790.577,00		2.015.540.285,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	75,90	76,20	76,40	367.309.931	76,60	1.943.261.685,00	76,80	1.973.970.064,00	77,10	1.995.790.577,00	77,50	2.015.540.285,00	2.08.0.00.0.00.12 .0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					10.505.714.491		12.484.168.276,00		13.368.237.023,00		14.967.288.259,57		15.321.795.272,43	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.238.686.047		9.294.639.024,00		9.794.627.918,00		11.223.377.209,57		11.264.453.548,48	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	9.238.686.047	100	9.294.639.024,00	100	9.794.627.918,00	100	11.223.377.209,57	100	11.264.453.548,48	2.09.0.00.0.00.13 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					0,00		106.840.203,00		140.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedauatan dan kemandirian pangan	Persentase peningkatan kegiatan usaha masyarakat menjadi usaha ekonomi produktif (%)	100	100	100	0,00	100	106.840.203,00	100	140.000.000,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	2.09.0.00.0.00.13 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					810.540.444		2.313.935.431,00		2.512.086.964,00		2.595.720.542,00		2.774.842.667,00	
Meningkatnya diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahananan (%)	100	100	100	810.540.444	100	2.313.935.431,00	100	2.512.086.964,00	100	2.595.720.542,00	100	2.774.842.667,00	2.09.0.00.0.00.13 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan
	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.09.0.00.0.00.13 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.2.09.0.00.47 .0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					331.488.000		477.753.618,00		601.422.141,00		640.850.508,00		745.646.164,95	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan (%)	100	100	100	331.488.000	100	477.753.618,00	100	601.422.141,00	100	640.850.508,00	100	745.646.164,95	2.09.0.00.0.00.13 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					125.000.000		291.000.000,00		320.100.000,00		347.340.000,00		376.852.892,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pengawasan keamanan pangan segar (%)	100	100	100	125.000.000	100	291.000.000,00	100	320.100.000,00	100	347.340.000,00	100	376.852.892,00	2.09.0.00.0.00.13 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					400.000.000		400.000.000,00		400.000.000,00		420.000.000,00		250.000.000,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					400.000.000		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	0	5	3	400.000.000	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	1.04.2.10.0.00.06 .0000 - Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan					0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		0,00	1.04.2.10.0.00.06 .0000 - Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					48.300.382.072		48.780.854.475,00		49.455.038.674,00		49.797.296.896,00		50.107.583.331,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.546.266.487		20.792.654.178,00		22.049.265.226,00		21.851.590.089,00		22.063.528.967,00	
Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	19.546.266.487	100	20.792.654.178,00	100	22.049.265.226,00	100	21.851.590.089,00	100	22.063.528.967,00	2.11.1.03.0.00.14 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					454.348.259		457.042.356,00		0,00		940.781.303,00		983.844.994,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (%)	70	75	80	454.348.259	85	457.042.356,00	90	0,00	95	940.781.303,00	100	983.844.994,00	2.11.1.03.0.00.14 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.366.246.314		1.330.690.705,00		1.425.575.411,00		1.469.412.005,00		1.489.183.559,00	
Menurunya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	63,86	64,26	64,46	1.366.246.314	64,66	1.330.690.705,00	64,86	1.425.575.411,00	65,06	1.469.412.005,00	65,26	1.489.183.559,00	2.11.1.03.0.00.14 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	81,12	81,52	81,72		81,92		82,12		82,32		82,52		2.11.1.03.0.00.14 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					5.456.412.218		6.325.466.220,00		6.140.940.233,00		6.021.005.289,00		6.189.279.420,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	5	6	7	5.456.412.218	8	6.325.466.220,00	9	6.140.940.233,00	10	6.021.005.289,00	11	6.189.279.420,00	2.11.1.03.0.00.14 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN					80.772.324		78.737.429,00		82.244.735,00		85.118.378,00		89.440.454,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan Beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola (%)	70	75	80	80.772.324	85	78.737.429,00	90	82.244.735,00	95	85.118.378,00	100	89.440.454,00	2.11.1.03.0.00.14 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					244.762.240		263.668.649,00		265.010.813,00		268.794.878,00		272.793.384,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan /atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang di terbitkan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	100	100	100	244.762.240	100	263.668.649,00	100	265.010.813,00	100	268.794.878,00	100	272.793.384,00	2.11.1.03.0.00.14 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					50.467.082		50.274.659,00		50.260.671,00		53.758.975,00		58.136.295,00	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	70	75	80	50.467.082	85	50.274.659,00	90	50.260.671,00	95	53.758.975,00	100	58.136.295,00	2.11.1.03.0.00.14 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0,00		246.802.872,00		246.734.205,00		259.835.049,00		0,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan	70	75	80	0,00	85	246.802.872,00	90	246.734.205,00	95	259.835.049,00	100	0,00	2.11.1.03.0.00.14 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	kompetensinya (%)													
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					100.967.200		137.112.707,00		137.074.558,00		143.357.268,00		152.048.771,00	
Meningkatnya kinerka pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	70	75	80	100.967.200	85	137.112.707,00	90	137.074.558,00	95	143.357.268,00	100	152.048.771,00	2.11.1.03.0.00.14 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					293.613.422		288.310.545,00		306.133.181,00		309.114.110,00		313.041.589,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	293.613.422	100	288.310.545,00	100	306.133.181,00	100	309.114.110,00	100	313.041.589,00	2.11.1.03.0.00.14 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					20.706.526.526		18.810.094.155,00		18.751.799.641,00		18.394.529.552,00		18.496.285.898,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks)	44,80	44,90	45,00	20.706.526.526	45,10	18.810.094.155,00	45,20	18.751.799.641,00	45,30	18.394.529.552,00	45,50	18.496.285.898,00	2.11.1.03.0.00.14 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					23.970.377.076		24.208.824.563,00		24.543.406.791,00		24.713.261.736,00		25.000.411.575,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.561.776.973		16.293.736.074,00		16.284.975.765,00		16.231.762.418,00		16.457.365.481,00	
Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / Kota di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	16.561.776.973	100	16.293.736.074,00	100	16.284.975.765,00	100	16.231.762.418,00	100	16.457.365.481,00	2.12.0.00.0.00.15 .0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.764.266.927		1.960.721.075,00		2.103.740.963,00		2.187.736.588,00		2.231.137.566,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	18,67	30	30	1.764.266.927	30	1.960.721.075,00	30	2.103.740.963,00	30	2.187.736.588,00	30	2.231.137.566,00	2.12.0.00.0.00.15 .0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	70,87	60	61		62		63		64		65		2.12.0.00.0.00.15 .0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					1.934.909.138		2.171.399.006,00		2.351.257.840,00		2.466.368.797,00		2.535.879.375,00	
Meningkatanya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	1.934.909.138	100	2.171.399.006,00	100	2.351.257.840,00	100	2.466.368.797,00	100	2.535.879.375,00	2.12.0.00.0.00.15 .0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	96,68	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.15 .0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.15 .0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.15 .0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					3.515.643.901		3.655.942.009,00		3.672.136.306,00		3.695.930.310,00		3.647.004.475,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100	3.515.643.901	100	3.655.942.009,00	100	3.672.136.306,00	100	3.695.930.310,00	100	3.647.004.475,00	2.12.0.00.0.00.15 .0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					193.780.137		127.026.399,00		131.295.917,00		131.463.623,00		129.024.678,00	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	193.780.137	100	127.026.399,00	100	131.295.917,00	100	131.463.623,00	100	129.024.678,00	2.12.0.00.0.00.15 .0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN					39.438.847.649		39.831.169.140,00		40.381.662.671,00		40.661.127.746,00		41.133.580.008,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
DESA														
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.084.478.347		17.620.674.992,00		18.120.392.909,00		18.494.226.738,00		18.866.765.607,00	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	17.084.478.347	100	17.620.674.992,00	100	18.120.392.909,00	100	18.494.226.738,00	100	18.866.765.607,00	2.13.0.00.0.00.16 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					602.456.200		598.651.826,00		600.775.075,00		597.575.679,00		600.299.708,00	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	100	100	100	602.456.200	100	598.651.826,00	100	600.775.075,00	100	597.575.679,00	100	600.299.708,00	2.13.0.00.0.00.16 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					434.191.308		434.161.900,00		437.579.842,00		437.048.600,00		440.174.562,00	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentasae desa yang melakukan kerjasama (%)	100	100	100	434.191.308	100	434.161.900,00	100	437.579.842,00	100	437.048.600,00	100	440.174.562,00	2.13.0.00.0.00.16 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					5.933.260.568		5.890.368.560,00		5.881.383.197,00		5.872.445.613,00		5.896.947.581,00	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi pemerintahan desa sesuai aturan (%)	100	100	100	5.933.260.568	100	5.890.368.560,00	100	5.881.383.197,00	100	5.872.445.613,00	100	5.896.947.581,00	2.13.0.00.0.00.16 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					15.384.461.226		15.287.311.862,00		15.341.531.648,00		15.259.831.116,00		15.329.392.550,00	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif (%)	100	100	100	15.384.461.226	100	15.287.311.862,00	100	15.341.531.648,00	100	15.259.831.116,00	100	15.329.392.550,00	2.13.0.00.0.00.16 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					15.865.629.658		15.900.154.989,00		16.143.859.213,00		16.574.790.051,71		16.767.376.517,62	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.757.660.167		8.601.157.741,00		8.720.031.058,00		8.780.379.119,00		8.882.400.289,00	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	8.757.660.167	100	8.601.157.741,00	100	8.720.031.058,00	100	8.780.379.119,00	100	8.882.400.289,00	2.14.0.00.0.00.17 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.233.550.025		1.541.937.531,00		1.567.939.158,00		1.622.148.275,63		1.640.996.440,02	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	100	2,40	2,35	1.233.550.025	2,30	1.541.937.531,00	2,25	1.567.939.158,00	2,20	1.622.148.275,63	2,20	1.640.996.440,02	2.14.0.00.0.00.17 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	100	13.5-13.60	12.4-12.5		11.5-11.60		10.8-10.9		10.1-10.2		10.1-10.2	2.14.0.00.0.00.17 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	100	55,2	58,2		61,2		64,2		67,2		67,2		2.14.0.00.0.00.17 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					4.504.968.883		4.612.668.261,00		4.700.053.626,00		4.911.042.372,78		4.968.105.056,48	
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	100	96,8	97,1	4.504.968.883	97,3	4.612.668.261,00	97,5	4.700.053.626,00	97,8	4.911.042.372,78	97,8	4.968.105.056,48	2.14.0.00.0.00.17 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	100	78,5	79,5		80,5		81,5		82,5		82,5		2.14.0.00.0.00.17 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	(Persentase)													Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.369.450.583		1.144.391.456,00		1.155.835.371,00		1.261.220.284,30		1.275.874.732,12	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	100	34,5	39,0	1.369.450.583	45,0	1.144.391.456,00	52,5	1.155.835.371,00	57,0	1.261.220.284,30	57,0	1.275.874.732,12	2.14.0.00.0.00.17 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	100	62,2	62,7		63,2		63,6		64,1		64,1		2.14.0.00.0.00.17 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	100	85,9	87,0		87,9		88,8		89,7		89,7		2.14.0.00.0.00.17 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					121.673.026.495		122.883.379.890,00		124.581.710.802,00		125.443.890.188,65		126.428.570.582,82	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.357.518.354		27.741.454.159,00		28.291.862.020,00		39.624.603.699,65		40.085.012.316,82	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	29.357.518.354	100	27.741.454.159,00	100	28.291.862.020,00	100	39.624.603.699,65	100	40.085.012.316,82	2.15.0.00.0.00.18 .0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					35.249.023.626		31.551.849.400,00		32.216.218.887,00		45.120.922.236,00		45.645.194.013,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	16,2	16,2	16,5	35.249.023.626	16,6	31.551.849.400,00	16,7	32.216.218.887,00	16,8	45.120.922.236,00	16,9	45.645.194.013,00	2.15.0.00.0.00.18 .0000 - Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					57.066.484.515		63.590.076.331,00		64.073.629.895,00		40.698.364.253,00		40.698.364.253,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas layanan trasnportasi air	Konektivitas Laut (Unit)	49	49	49,2	57.066.484.515	49,4	63.590.076.331,00	49,5	64.073.629.895,00	49,6	40.698.364.253,00	49,7	40.698.364.253,00	2.15.0.00.0.00.18 .0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					19.669.146.570		19.762.160.167,00		19.767.544.131,00		20.174.491.031,00		20.399.754.098,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.185.700.084		9.705.700.084,00		10.042.870.224,00		10.382.120.742,00		10.508.761.903,00	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	9.185.700.084	100	9.705.700.084,00	100	10.042.870.224,00	100	10.382.120.742,00	100	10.508.761.903,00	2.16.2.20.2.21.19 .0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.507.660.059		2.692.456.797,00		2.731.456.801,00		2.871.647.588,00		2.915.971.965,00	
Menigkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	89,34	90,5	91	2.507.660.059	91,5	2.692.456.797,00	92	2.731.456.801,00	92,5	2.871.647.588,00	93	2.915.971.965,00	2.16.2.20.2.21.19 .0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					7.975.786.427		7.364.003.286,00		6.993.217.106,00		6.920.722.701,00		6.975.020.230,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2,79	2,88	0	7.975.786.427	0	7.364.003.286,00	0	6.993.217.106,00	0	6.920.722.701,00	0	6.975.020.230,00	2.16.2.20.2.21.19 .0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Indeks Pemerintah Digital (Indeks)	0	0	1,5		1,5		1,75		1,75		2		2.16.2.20.2.21.19 .0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					21.056.901.646		20.706.200.000,00		20.793.700.000,00		20.935.500.000,00		21.209.400.000,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.011.201.646		10.343.700.000,00		9.888.200.000,00		9.914.200.000,00		10.008.200.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	10.011.201.646	100	10.343.700.000,00	100	9.888.200.000,00	100	9.914.200.000,00	100	10.008.200.000,00	2.17.0.00.0.00.20 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					410.800.000		259.000.000,00		292.600.000,00		293.400.000,00		296.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Jumlah kualitas layanan izin simpan pinjam (%)	100	100	100	410.800.000	100	259.000.000,00	100	292.600.000,00	100	293.400.000,00	100	296.000.000,00	2.17.0.00.0.00.20 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					1.414.000.000		734.000.000,00		710.300.000,00		712.200.000,00		718.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	100	100	100	1.414.000.000	100	734.000.000,00	100	710.300.000,00	100	712.200.000,00	100	718.000.000,00	2.17.0.00.0.00.20 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					365.000.000		345.000.000,00		334.000.000,00		335.000.000,00		338.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	100	100	100	365.000.000	100	345.000.000,00	100	334.000.000,00	100	335.000.000,00	100	338.000.000,00	2.17.0.00.0.00.20 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					274.000.000		302.000.000,00		292.000.000,00		293.000.000,00		296.000.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	100	100	100	274.000.000	100	302.000.000,00	100	292.000.000,00	100	293.000.000,00	100	296.000.000,00	2.17.0.00.0.00.20 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					2.920.000.000		2.850.000.000,00		3.135.000.000,00		3.185.000.000,00		3.250.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100	2.920.000.000	100	2.850.000.000,00	100	3.135.000.000,00	100	3.185.000.000,00	100	3.250.000.000,00	2.17.0.00.0.00.20 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO					2.922.000.000		2.850.000.000,00		3.135.000.000,00		3.185.000.000,00		3.257.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
(UMKM)														
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informasi ke formal dan Jumlah Pertumbuhan Wirausaha (%)	100	100	100	2.922.000.000	100	2.850.000.000,00	100	3.135.000.000,00	100	3.185.000.000,00	100	3.257.000.000,00	2.17.0.00.0.00.20 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					2.739.900.000		3.022.500.000,00		3.006.600.000,00		3.017.700.000,00		3.046.200.000,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan Ekspor (%)	100	100	100	2.739.900.000	100	3.022.500.000,00	100	3.006.600.000,00	100	3.017.700.000,00	100	3.046.200.000,00	2.17.0.00.0.00.20 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					18.272.547.136		18.423.034.407,94		18.723.487.566,22		18.918.735.444,05		19.123.323.458,23	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.845.417.267		15.602.837.813,00		15.523.006.709,00		15.711.604.015,00		15.945.936.804,00	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	14.845.417.267	100	15.602.837.813,00	100	15.523.006.709,00	100	15.711.604.015,00	100	15.945.936.804,00	2.18.0.00.0.00.21 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					1.193.748.000		787.748.000,00		1.223.748.000,00		1.115.598.829,05		1.110.534.525,21	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100	100	1.193.748.000	100	787.748.000,00	100	1.223.748.000,00	100	1.115.598.829,05	100	1.110.534.525,21	2.18.0.00.0.00.21 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					662.774.538		566.140.372,23		552.455.017,43		548.451.801,46		545.962.083,39	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100	100	662.774.538	100	566.140.372,23	100	552.455.017,43	100	548.451.801,46	100	545.962.083,39	2.18.0.00.0.00.21 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					869.222.505		794.743.251,77		768.459.342,75		892.480.658,73		873.000.000,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	100	100	100	869.222.505	100	794.743.251,77	100	768.459.342,75	100	892.480.658,73	100	873.000.000,00	2.18.0.00.0.00.21 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					668.246.098		640.684.587,00		625.684.587,00		620.684.587,00		618.110.295,63	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	668.246.098	100	640.684.587,00	100	625.684.587,00	100	620.684.587,00	100	618.110.295,63	2.18.0.00.0.00.21 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					33.138.727		30.880.383,94		30.133.910,04		29.915.552,81		29.779.750,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	33.138.727	100	30.880.383,94	100	30.133.910,04	100	29.915.552,81	100	29.779.750,00	2.18.0.00.0.00.21 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					27.860.798.173		30.463.340.739,00		32.502.431.293,00		33.727.761.261,00		36.514.291.650,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					6.441.813.606		6.857.169.367,00		7.093.087.962,00		6.710.701.040,00		6.799.404.494,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda Mandiri (%)	1	1	1	6.441.813.606	1	6.857.169.367,00	2	7.093.087.962,00	3	6.710.701.040,00	4	6.799.404.494,00	2.19.2.22.3.26.22 .0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING					20.566.198.652		22.807.587.983,00		24.718.177.635,00		26.330.543.491,00		28.919.945.088,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KEOLAHRAGAAN														
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Jumlah atlet berprestasi (Angka)	50	50	100	20.566.198.652	110	22.807.587.983,00	120	24.718.177.635,00	130	26.330.543.491,00	150	28.919.945.088,00	2.19.2.22.3.26.22 .0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					852.785.915		798.583.389,00		691.165.696,00		686.516.730,00		794.942.068,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (16-30 Tahun) (%)	70	70	70	852.785.915	70	798.583.389,00	70	691.165.696,00	70	686.516.730,00	70	794.942.068,00	2.19.2.22.3.26.22 .0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					468.320.007		577.128.293,00		590.128.293,00		615.521.894,00		630.893.875,00	
2.20.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					183.004.246		223.004.246,00		230.004.246,00		245.004.246,00		255.004.246,00	
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang Akurat, Mutakhir dan Dapat Diakses untuk Perencanaan, Evaluasi dan Pengambilan Kebijakan Publik	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD (Persentase)	100	100	100	183.004.246	100	223.004.246,00	100	230.004.246,00	100	245.004.246,00	100	255.004.246,00	2.16.2.20.2.21.19 .0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					285.315.761		354.124.047,00		360.124.047,00		370.517.648,00		375.889.629,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,26	2,26	2,6	285.315.761	2,6	354.124.047,00	2,65	360.124.047,00	2,65	370.517.648,00	2,75	375.889.629,00	2.16.2.20.2.21.19 .0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					363.096.938		367.206.257,00		372.972.327,00		375.899.547,00		380.848.185,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					363.096.938		367.206.257,00		372.972.327,00		375.899.547,00		380.848.185,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	42,64	30,02	38	363.096.938	41	367.206.257,00	44	372.972.327,00	48	375.899.547,00	51	380.848.185,00	2.16.2.20.2.21.19 .0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					9.577.441.817		8.113.607.201,00		7.723.776.658,00		7.270.212.174,00		6.529.124.188,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					3.778.497.594		3.322.106.898,00		3.274.397.487,00		3.597.347.667,00		3.322.857.847,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (%)	70	70	70	3.778.497.594	70	3.322.106.898,00	70	3.274.397.487,00	70	3.597.347.667,00	70	3.322.857.847,00	2.19.2.22.3.26.22 .0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					196.796.749		159.716.677,00		172.791.424,00		171.629.182,00		158.988.413,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional dilestarikan (%)	70	70	70	196.796.749	70	159.716.677,00	70	172.791.424,00	70	171.629.182,00	70	158.988.413,00	2.19.2.22.3.26.22 .0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					5.379.111.158		4.418.828.056,00		4.017.400.611,00		3.226.628.633,00		2.782.297.240,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal (%)	70	70	70	5.379.111.158	70	4.418.828.056,00	70	4.017.400.611,00	70	3.226.628.633,00	70	2.782.297.240,00	2.19.2.22.3.26.22 .0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					131.197.833		106.477.785,00		129.593.568,00		137.303.346,00		132.490.344,00	
Meningkatnya warisan budaya yang di lestarikan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan (%)	70	70	70	131.197.833	70	106.477.785,00	70	129.593.568,00	70	137.303.346,00	70	132.490.344,00	2.19.2.22.3.26.22 .0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					91.838.483		106.477.785,00		129.593.568,00		137.303.346,00		132.490.344,00	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase kunjungan museum (%)	70	70	70	91.838.483	70	106.477.785,00	70	129.593.568,00	70	137.303.346,00	70	132.490.344,00	2.19.2.22.3.26.22 .0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					17.692.769.032		17.868.769.447,27		18.115.682.717,00		18.241.099.441,37		18.452.740.952,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.037.012.105		13.295.621.993,27		13.341.512.250,00		13.179.770.253,37		13.323.557.350,00	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	15.037.012.105	100	13.295.621.993,27	100	13.341.512.250,00	100	13.179.770.253,37	100	13.323.557.350,00	2.23.2.24.0.00.23 .0000 - Dinas Perpustakaan dan KearsipanÂ
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.807.928.081		3.832.223.474,00		4.035.261.883,00		4.295.072.180,00		4.358.792.384,00	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase Pengelolaan Perpustakaan (%)	100	100	100	1.807.928.081	100	3.832.223.474,00	100	4.035.261.883,00	100	4.295.072.180,00	100	4.358.792.384,00	2.23.2.24.0.00.23 .0000 - Dinas Perpustakaan dan KearsipanÂ
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					847.828.846		740.923.980,00		738.908.584,00		766.257.008,00		770.391.218,00	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Pelestarian Koleksi Nasional Naskah Kuno (%)	100	100	100	847.828.846	100	740.923.980,00	100	738.908.584,00	100	766.257.008,00	100	770.391.218,00	2.23.2.24.0.00.23 .0000 - Dinas Perpustakaan dan KearsipanÂ
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					177.863.282		179.632.592,36		182.115.236,98		183.375.581,97		185.506.269,70	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					79.526.974		125.404.466,20		128.395.579,06		129.998.169,38		133.078.542,04	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	100	100	100	79.526.974	100	125.404.466,20	100	128.395.579,06	100	129.998.169,38	100	133.078.542,04	2.23.2.24.0.00.23 .0000 - Dinas Perpustakaan dan KearsipanÂ
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					75.984.409		47.953.289,56		47.480.343,68		47.155.190,32		46.294.318,76	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	100	100	100	75.984.409	100	47.953.289,56	100	47.480.343,68	100	47.155.190,32	100	46.294.318,76	2.23.2.24.0.00.23 .0000 - Dinas Perpustakaan dan KearsipanÂ
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					22.351.899		6.274.836,60		6.239.314,24		6.222.222,27		6.133.408,90	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip (%)	100	100	100	22.351.899	100	6.274.836,60	100	6.239.314,24	100	6.222.222,27	100	6.133.408,90	2.23.2.24.0.00.23 .0000 - Dinas Perpustakaan dan KearsipanÂ

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					23.786.812.948		24.033.255.000,00		24.364.755.000,00		24.534.825.000,00		24.819.300.000,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.191.334.177		13.248.755.000,00		13.128.755.000,00		12.783.825.000,00		12.456.200.000,00	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	13.191.334.177	100	13.248.755.000,00	100	13.128.755.000,00	100	12.783.825.000,00	100	12.456.200.000,00	3.25.0.00.0.00.24 .0000 - Dinas Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					3.185.000.000		3.467.000.000,00		3.475.000.000,00		3.629.000.000,00		3.871.500.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4.328	5.558	6.788	3.185.000.000	7.018	3.467.000.000,00	8.018	3.475.000.000,00	9.248	3.629.000.000,00	9.018	3.871.500.000,00	3.25.0.00.0.00.24 .0000 - Dinas Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					5.823.000.000		5.885.000.000,00		6.282.000.000,00		6.610.000.000,00		6.943.600.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.350	3.570	4.790	5.823.000.000	5.790	5.885.000.000,00	6.010	6.282.000.000,00	7.230	6.610.000.000,00	8.450	6.943.600.000,00	3.25.0.00.0.00.24 .0000 - Dinas Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					114.478.771		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya kelestarian dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (KmÂ²)	0	0	0	114.478.771	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.25.0.00.0.00.24 .0000 - Dinas Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.473.000.000		1.432.500.000,00		1.479.000.000,00		1.512.000.000,00		1.548.000.000,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	42,94	43,20	43,46	1.473.000.000	43,72	1.432.500.000,00	43,98	1.479.000.000,00	44,24	1.512.000.000,00	44,50	1.548.000.000,00	3.25.0.00.0.00.24 .0000 - Dinas Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					27.967.815.756		27.479.740.410,00		26.743.428.264,00		26.435.132.415,00		25.173.212.875,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.931.331.348		21.972.654.939,00		21.498.293.822,00		21.655.438.404,00		20.842.460.422,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	21.931.331.348	100	21.972.654.939,00	100	21.498.293.822,00	100	21.655.438.404,00	100	20.842.460.422,00	2.19.2.22.3.26.22 .0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					4.309.507.504		3.931.564.229,00		3.744.554.730,00		3.412.272.080,00		3.091.768.145,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (%)	24,6	24,6	27,1	4.309.507.504	27,7	3.931.564.229,00	27,9	3.744.554.730,00	28,1	3.412.272.080,00	28,5	3.091.768.145,00	2.19.2.22.3.26.22 .0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					723.463.298		660.015.656,00		628.621.231,00		572.838.917,00		519.033.967,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata (%)	16,2	16,2	16,2	723.463.298	16,3	660.015.656,00	16,7	628.621.231,00	16,8	572.838.917,00	17,2	519.033.967,00	2.19.2.22.3.26.22 .0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					70.012.577		63.872.482,00		60.834.312,00		55.436.024,00		50.229.093,00	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase produk ekonomi kreatif (%)	15,8	15,8	15,9	70.012.577	16,2	63.872.482,00	16,3	60.834.312,00	16,4	55.436.024,00	16,5	50.229.093,00	2.19.2.22.3.26.22 .0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					933.501.029		851.633.104,00		811.124.169,00		739.146.990,00		669.721.248,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf tersertifikasi (%)	78	78	78,2	933.501.029	78,5	851.633.104,00	79,7	811.124.169,00	80,2	739.146.990,00	91,3	669.721.248,00	2.19.2.22.3.26.22 .0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					83.930.129.412		85.457.185.875,91		86.207.047.209,86		87.380.268.042,97		88.365.407.801,48	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					52.498.305.142		48.204.930.396,41		48.081.133.715,64		48.105.985.099,09		47.832.324.846,51	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	37.273.273.356	100	31.915.018.408,00	100	31.636.255.684,00	100	31.071.222.645,00	100	30.658.715.411,00	3.27.2.09.0.00.47 .0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	85,25	100	100	15.225.031.786	100	16.289.911.988,41	100	16.444.878.031,64	100	17.034.762.454,09	100	17.173.609.435,51	3.27.0.00.0.00.48 .0000 - Dinas Perkebunan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.381.311.056		2.122.887.495,33		2.207.130.050,20		2.306.157.275,74		2.435.658.451,34	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan dan pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	100	100	100	1.839.297.869	100	1.586.294.440,00	100	1.665.116.863,00	100	1.744.675.433,00	100	1.835.822.534,00	3.27.2.09.0.00.47 .0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.2.09.0.00.47 .0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.2.09.0.00.47 .0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana perkebunan	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Perkebunan (%)	47,67	100	100	542.013.187	100	536.593.055,33	100	542.013.187,20	100	561.481.842,74	100	599.835.917,34	3.27.0.00.0.00.48 .0000 - Dinas Perkebunan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					21.346.113.748		26.160.706.916,00		26.540.691.429,00		27.171.959.232,07		27.812.814.422,40	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan dan pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	2.992	2.992	2.992	1.262.161.775	2.992	6.729.193.016,00	2.992	7.117.525.829,00	2.992	7.496.148.022,00	2.992	7.912.353.503,00	3.27.2.09.0.00.47 .0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana perkebunan	Persentase Peningkatan Prasarana Produksi Perkebunan (%)	50,92	100	100	20.083.951.973	100	19.431.513.900,00	100	19.423.165.600,00	100	19.675.811.210,07	100	19.900.460.919,40	3.27.0.00.0.00.48 .0000 - Dinas Perkebunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.857.180.898		3.015.413.593,00		3.300.152.280,00		3.560.631.759,00		3.820.402.280,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	100	100	100	1.857.180.898	100	3.015.413.593,00	100	3.300.152.280,00	100	3.560.631.759,00	100	3.820.402.280,00	3.27.2.09.0.00.47 .0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		3.27.2.09.0.00.47 .0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					755.965.064		700.207.362,00		692.233.628,77		686.733.662,00		698.668.934,48	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perternakan dan pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	180.308.825	100	155.506.561,00	100	163.233.628,77	100	171.032.861,00	100	179.968.133,48	3.27.2.09.0.00.47 .0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.2.09.0.00.47 .0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	31,05	100	100	575.656.239	100	544.700.801,00	100	529.000.000,00	100	515.700.801,00	100	518.700.801,00	3.27.0.00.0.00.48 .0000 - Dinas Perkebunan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	0	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.48 .0000 - Dinas Perkebunan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					725.179.216		1.377.606.550,77		1.342.361.952,06		1.323.134.931,19		1.329.234.211,12	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha perkebunan	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan (%)	44,71	100	100	725.179.216	100	687.553.646,42	100	671.098.899,40	100	660.098.899,40	100	660.098.899,40	3.27.0.00.0.00.48 .0000 - Dinas Perkebunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha perkebunan					-		690.052.904,35		671.263.052,66		663.036.031,79		669.135.311,72	3.27.0.00.0.00.48 .0000 - Dinas Perkebunan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					4.366.074.288		3.875.433.562,40		4.043.344.154,19		4.225.666.083,88		4.436.304.655,64	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh peternakan dan perkebunan	Persentase Sdm Penyuluh Pertanian Dan Petani Pekebun Yang Ditingkatkan (%)	24,80	100	100	835.537.339	100	830.537.339,40	100	847.148.086,19	100	876.757.136,88	100	912.438.619,64	3.27.0.00.0.00.48 .0000 - Dinas Perkebunan
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh peternakan dan perkebunan	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	100	100	100	3.530.536.949	100	3.044.896.223,00	100	3.196.196.068,00	100	3.348.908.947,00	100	3.523.866.036,00	3.27.2.09.0.00.47 .0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.2.09.0.00.47 .0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					37.694.738.363		40.731.114.681,00		41.064.280.755,00		43.026.715.770,16		43.534.250.611,68	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.099.588.000		25.063.406.800,00		24.522.607.480,00		24.997.111.665,96		24.744.468.221,00	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	23.099.588.000	100	25.063.406.800,00	100	24.522.607.480,00	100	24.997.111.665,96	100	24.744.468.221,00	3.30.3.31.0.00.28 .0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					368.000.000		386.800.000,00		407.480.000,00		470.219.241,69		488.065.895,54	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	368.000.000	100	386.800.000,00	100	407.480.000,00	100	470.219.241,69	100	488.065.895,54	3.30.3.31.0.00.28 .0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.012.000.000		1.271.200.000,00		1.311.820.000,00		1.534.640.894,78		1.658.250.339,07	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100	100	100	1.012.000.000	100	1.271.200.000,00	100	1.311.820.000,00	100	1.534.640.894,78	100	1.658.250.339,07	3.30.3.31.0.00.28 .0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	(Persentase)													
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					11.275.150.363		11.875.707.881,00		12.509.973.275,00		13.391.049.198,02		13.899.291.733,61	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100	11.275.150.363	100	11.875.707.881,00	100	12.509.973.275,00	100	13.391.049.198,02	100	13.899.291.733,61	3.30.3.31.0.00.28 .0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi (Nilai)	0	0	0		0		0		0		0		3.30.3.31.0.00.28 .0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					590.000.000		649.000.000,00		713.900.000,00		875.898.587,46		909.142.354,43	
Meningkatya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	100	100	100	590.000.000	100	649.000.000,00	100	713.900.000,00	100	875.898.587,46	100	909.142.354,43	3.30.3.31.0.00.28 .0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					625.000.000		667.500.000,00		714.250.000,00		817.121.182,25		848.134.117,49	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase kepatuhan pelaku usaha. (%)	100	100	100	625.000.000	100	667.500.000,00	100	714.250.000,00	100	817.121.182,25	100	848.134.117,49	3.30.3.31.0.00.28 .0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					725.000.000		817.500.000,00		884.250.000,00		940.675.000,00		986.897.950,54	
Meningkatnnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	725.000.000	100	817.500.000,00	100	884.250.000,00	100	940.675.000,00	100	986.897.950,54	3.30.3.31.0.00.28 .0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					3.182.580.000		3.500.838.000,00		3.850.921.800,00		5.375.987.742,21		5.438.452.747,56	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					2.148.580.000		2.363.438.000,00		2.599.781.800,00		3.629.363.517,38		3.671.534.039,79	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	100	100	100	2.148.580.000	100	2.363.438.000,00	100	2.599.781.800,00	100	3.629.363.517,38	100	3.671.534.039,79	3.30.3.31.0.00.28 .0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					320.000.000		352.000.000,00		387.200.000,00		540.541.346,17		546.822.037,22	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	320.000.000	100	352.000.000,00	100	387.200.000,00	100	540.541.346,17	100	546.822.037,22	3.30.3.31.0.00.28 .0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					714.000.000		785.400.000,00		863.940.000,00		1.206.082.878,65		1.220.096.670,55	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	100	100	100	714.000.000	100	785.400.000,00	100	863.940.000,00	100	1.206.082.878,65	100	1.220.096.670,55	3.30.3.31.0.00.28 .0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					247.497.438		249.959.441,36		253.414.048,87		255.167.824,50		258.132.686,08	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					72.207.974		107.817.883,93		105.929.864,31		101.256.498,46		97.071.630,29	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	72.207.974	100	107.817.883,93	100	105.929.864,31	100	101.256.498,46	100	97.071.630,29	2.07.3.32.0.00.11 .0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					57.200.150		59.938.266,12		61.256.077,06		66.374.574,00		70.581.604,86	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (%)	100	100	100	57.200.150	100	59.938.266,12	100	61.256.077,06	100	66.374.574,00	100	70.581.604,86	2.07.3.32.0.00.11 .0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					118.089.315		82.203.291,31		86.228.107,50		87.536.752,04		90.479.450,93	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	118.089.315	100	82.203.291,31	100	86.228.107,50	100	87.536.752,04	100	90.479.450,93	2.07.3.32.0.00.11 .0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					148.138.413.823		149.064.589.660,63		151.043.605.750,54		153.894.611.802,57		155.678.246.844,59	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					95.671.086.185		87.594.913.120,98		85.522.962.583,28		83.564.967.223,56		79.263.224.679,52	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	95.671.086.185	100	87.594.913.120,98	100	85.522.962.583,28	100	83.564.967.223,56	100	79.263.224.679,52	4.01.5.06.0.00.27 .0000 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					37.295.618.927		47.491.797.251,27		49.898.718.208,00		52.620.729.640,92		56.090.823.274,97	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	76,48	76,48	76,65	37.295.618.927	76,75	47.491.797.251,27	77,00	49.898.718.208,00	77,50	52.620.729.640,92	77,60	56.090.823.274,97	4.01.5.06.0.00.27 .0000 - Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					15.171.708.711		13.977.879.288,38		15.621.924.959,26		17.708.914.938,09		20.324.198.890,10	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakaan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	100	100	100	15.171.708.711	100	13.977.879.288,38	100	15.621.924.959,26	100	17.708.914.938,09	100	20.324.198.890,10	4.01.5.06.0.00.27 .0000 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					102.487.962.924		103.508.618.673,96		104.940.349.759,81		105.667.788.951,17		106.895.570.583,17	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					59.917.687.637		55.834.660.160,96		51.609.539.079,81		51.715.216.080,17		52.571.114.354,17	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	59.917.687.637	100	55.834.660.160,96	100	51.609.539.079,81	100	51.715.216.080,17	100	52.571.114.354,17	4.02.0.00.0.00.28 .0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					42.570.275.287		47.673.958.513,00		53.330.810.680,00		53.952.572.871,00		54.324.456.229,00	
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan (%)	100	100	100	42.570.275.287	100	47.673.958.513,00	100	53.330.810.680,00	100	53.952.572.871,00	100	54.324.456.229,00	4.02.0.00.0.00.28 .0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					30.450.216.027		30.753.122.295,00		31.178.151.118,00		31.393.922.429,00		31.758.696.612,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.566.554.974		20.771.142.633,00		21.058.213.787,00		21.203.949.125,00		21.450.323.347,00	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	20.566.554.974	100	20.771.142.633,00	100	21.058.213.787,00	100	21.203.949.125,00	100	21.450.323.347,00	5.01.0.00.0.00.29 .0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					4.571.442.542		4.616.917.379,00		4.680.726.281,00		4.713.119.685,00		4.767.882.653,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100	100	100	4.571.442.542	100	4.616.917.379,00	100	4.680.726.281,00	100	4.713.119.685,00	100	4.767.882.653,00	5.01.0.00.0.00.29 .0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					5.312.218.511		5.365.062.283,00		5.439.211.050,00		5.476.853.619,00		5.540.490.612,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidng pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidangperekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	80	80	81	5.312.218.511	82	5.365.062.283,00	83	5.439.211.050,00	84	5.476.853.619,00	85	5.540.490.612,00	5.01.0.00.0.00.29 .0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02 - KEUANGAN					645.305.820.055		647.473.108.541,00		650.611.630.080,00		659.291.963.609,00		664.005.876.913,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					88.224.644.786		74.677.446.599,00		75.555.473.317,00		76.209.803.589,00		76.966.835.819,00	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	90,64	100	100	47.117.501.375	100	33.111.902.908,00	100	33.429.335.683,00	100	33.780.353.957,00	100	34.108.569.887,00	5.02.0.00.0.00.30 .0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	41.107.143.411	100	41.565.543.691,00	100	42.126.137.634,00	100	42.429.449.632,00	100	42.858.265.932,00	5.02.0.00.0.00.31 .0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					543.059.602.669		560.334.841.951,00		562.390.851.678,00		563.286.497.194,00		565.002.065.286,00	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	26,03	23,95	22,04	11.239.770.618	20,07	11.420.847.631,00	18,65	11.567.640.938,00	17,16	11.697.346.067,00	15,79	11.838.332.943,00	5.02.0.00.0.00.30 .0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	33,63	35,65	37,79		40,06		42,46		45,01		47,71		5.02.0.00.0.00.30 .0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	58,96	61,32	63,77	6.890.148.100	66,32	6.790.326.062,00	68,98	6.854.995.833,00	71,74	6.919.665.607,00	74,61	6.984.335.378,00	5.02.0.00.0.00.30 .0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	93,83	94,14	94,43		94,71		94,97		95,22		95,46		5.02.0.00.0.00.30 .0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	524.929.683.951	100	542.123.668.258,00	100	543.968.214.907,00	100	544.669.485.520,00	100	546.179.396.965,00	5.02.0.00.0.00.30 .0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					6.546.572.600		4.960.944.991,00		5.047.906.960,00		5.137.321.905,00		5.229.312.476,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	4,97	10,50	15,01	6.546.572.600	20,88	4.960.944.991,00	24,22	5.047.906.960,00	28,09	5.137.321.905,00	32,59	5.229.312.476,00	5.02.0.00.0.00.30 .0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					7.475.000.000		7.499.875.000,00		7.617.398.125,00		14.658.340.921,00		16.807.663.332,00	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	11,46	12,79	13,20	7.475.000.000	13,62	7.499.875.000,00	14,00	7.617.398.125,00	14,38	14.658.340.921,00	14,77	16.807.663.332,00	5.02.0.00.0.00.31 .0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					22.434.542.204		22.657.711.834,34		22.970.856.642,33		23.129.828.605,03		23.398.580.123,28	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.845.352.102		18.032.633.633,59		18.290.912.791,46		18.425.834.927,13		18.647.638.561,77	
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	17.845.352.102	100	18.032.633.633,59	100	18.290.912.791,46	100	18.425.834.927,13	100	18.647.638.561,77	5.03.5.04.0.00.32 .0000 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					4.589.190.103		4.625.078.200,75		4.679.943.850,87		4.703.993.677,90		4.750.941.561,51	
Meningkatnya kualitas layanan adminitrasi kepegawaian	Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepegawaian (%)	100	100	100	4.589.190.103	100	4.625.078.200,75	100	4.679.943.850,87	100	4.703.993.677,90	100	4.750.941.561,51	5.03.5.04.0.00.32 .0000 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.484.347.986		1.499.113.671,20		1.519.832.429,82		1.530.350.572,44		1.548.132.115,27	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.484.347.986		1.499.113.671,20		1.519.832.429,82		1.530.350.572,44		1.548.132.115,27	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur (%)	100	100	100	1.484.347.986	100	1.499.113.671,20	100	1.519.832.429,82	100	1.530.350.572,44	100	1.548.132.115,27	5.03.5.04.0.00.32 .0000 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					9.299.458.594		9.391.965.795,00		9.521.769.077,00		9.587.665.371,00		9.699.066.958,00	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.576.490.485		8.462.968.290,00		8.624.229.642,00		8.683.914.431,00		8.858.338.589,00	
Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	7.576.490.485	100	8.462.968.290,00	100	8.624.229.642,00	100	8.683.914.431,00	100	8.858.338.589,00	5.05.0.00.0.00.33 .0000 - Badan Penelitian dan PengembanganÂ
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.021.018.139		647.483.110,00		625.557.788,00		629.887.019,00		585.962.197,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oelh Perangkat Daerah (%)	50	55	68	1.021.018.139	73	647.483.110,00	77	625.557.788,00	81	629.887.019,00	85	585.962.197,00	5.05.0.00.0.00.33 .0000 - Badan Penelitian dan PengembanganÂ

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					701.949.970		281.514.395,00		271.981.647,00		273.863.921,00		254.766.172,00	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	0	25	701.949.970	32	281.514.395,00	47	271.981.647,00	52	273.863.921,00	57	254.766.172,00	5.05.0.00.0.00.33 .0000 - Badan Penelitian dan PengembanganÂ
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN					699.374.519		666.439.597,83		666.439.597,83		695.320.000,78		707.913.768,37	
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					699.374.519		666.439.597,83		666.439.597,83		695.320.000,78		707.913.768,37	
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan					699.374.519		666.439.597,83		666.439.597,83		695.320.000,78		707.913.768,37	4.01.5.06.0.00.27 .0000 - Sekretariat Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					22.981.721.313		23.210.334.056,00		23.531.116.475,00		23.693.965.769,00		23.969.272.143,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.242.241.147		19.320.676.482,00		19.492.560.493,00		19.420.942.210,00		19.599.913.066,00	
Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	20.242.241.147	100	19.320.676.482,00	100	19.492.560.493,00	100	19.420.942.210,00	100	19.599.913.066,00	6.01.0.00.0.00.34 .0000 - Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.011.908.217		2.730.954.839,00		2.827.199.515,00		2.969.306.520,00		3.034.740.388,00	
Menurunya terjadi penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (%)	100	100	100	2.011.908.217	100	2.730.954.839,00	100	2.827.199.515,00	100	2.969.306.520,00	100	3.034.740.388,00	6.01.0.00.0.00.34 .0000 - Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					727.571.949		1.158.702.735,00		1.211.356.467,00		1.303.717.039,00		1.334.618.689,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Tindak Lanjut Hasil Asistensi (%)	100	100	100	727.571.949	100	1.158.702.735,00	100	1.211.356.467,00	100	1.303.717.039,00	100	1.334.618.689,00	6.01.0.00.0.00.34 .0000 - Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					173.422.251.430		176.374.537.995,65		178.398.083.097,53		180.183.525.380,76		182.277.143.476,55	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					100.946.293.772		103.259.584.906,01		104.381.591.692,47		105.432.727.267,95		106.664.727.309,99	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	83,65	100	100	12.363.556.337	100	12.389.720.814,00	100	12.551.609.571,00	100	12.627.472.144,00	100	12.819.692.362,00	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Bengkalis
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	5.765.647.703	100	5.777.647.702,53	100	5.852.647.702,53	100	5.887.647.702,53	100	5.977.647.702,53	7.01.0.00.0.00.36.0000 - Kecamatan Bantan
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	7.012.668.573	100	7.102.109.591,43	100	7.222.416.895,23	100	7.291.225.814,57	100	7.364.324.699,73	7.01.0.00.0.00.37.0000 - Kecamatan Bukit Batu
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	5.380.959.652	100	6.680.960.283,48	100	6.380.961.241,22	100	6.994.543.302,26	100	7.064.667.768,63	7.01.0.00.0.00.38.0000 - Kecamatan Siak Kecil
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	6.454.373.615	100	6.536.694.023,84	100	6.647.423.381,55	100	6.710.754.262,20	100	6.778.033.574,36	7.01.0.00.0.00.39.0000 - Kecamatan Bandar Laksamana
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja (%)	100	100	100	14.212.617.943	100	14.353.999.240,73	100	14.552.381.158,94	100	14.653.092.274,39	100	14.822.993.379,74	7.01.0.00.0.00.40.0000 - Kecamatan Rupat
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.40.0000 - Kecamatan Rupat
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	8.150.610.999	100	8.010.387.480,00	100	8.157.084.138,00	100	8.210.645.620,00	100	8.296.616.609,00	7.01.0.00.0.00.41.0000 - Kecamatan Rupat Utara
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	13.416.635.590	100	13.550.098.781,00	100	13.737.370.255,00	100	13.832.441.011,00	100	13.993.163.755,00	7.01.0.00.0.00.42.0000 - Kecamatan Mandau
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	11.107.430.031	100	11.191.406.594,00	100	11.321.428.622,00	100	11.377.035.738,00	100	11.488.160.583,00	7.01.0.00.0.00.43.0000 - Kecamatan Pinggir

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	8.829.439.956	100	9.332.159.743,00	100	9.517.302.221,00	100	9.456.898.709,00	100	9.649.669.479,00	7.01.0.00.0.00.44 .0000 - Kecamatan Bathin Solapan
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	8.252.353.373	100	8.334.400.652,00	100	8.440.966.506,00	100	8.390.970.690,00	100	8.409.757.397,00	7.01.0.00.0.00.45 .0000 - Kecamatan Talang Muandau
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					11.242.515.550		11.692.858.692,79		11.788.342.172,84		11.841.517.093,47		11.887.217.818,95	
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)	66,03	100	100	2.011.673.978	100	2.141.545.609,00	100	2.223.763.067,00	100	2.279.151.558,00	100	2.296.755.113,00	7.01.0.00.0.00.35 .0000 - Kecamatan Bengkalis
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	938.265.075	100	998.838.516,63	100	1.037.185.569,98	100	1.063.019.321,75	100	1.071.229.798,01	7.01.0.00.0.00.36 .0000 - Kecamatan Bantan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	1.292.446.633	100	1.270.046.675,56	100	1.243.059.437,34	100	1.233.738.200,71	100	1.218.666.306,40	7.01.0.00.0.00.37 .0000 - Kecamatan Bukit Batu
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)	80	80	80	1.239.856.530	80	1.218.368.035,16	80	1.192.478.917,20	80	1.183.536.964,17	80	1.169.078.351,02	7.01.0.00.0.00.38 .0000 - Kecamatan Siak Kecil
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)	80	80	80	1.189.551.932	80	1.168.935.287,35	80	1.144.096.566,49	80	1.135.517.414,55	80	1.121.645.429,59	7.01.0.00.0.00.39 .0000 - Kecamatan Bandar Laksamana
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan publik (%)	92	92	93	956.995.703	94	966.515.314,09	95	979.873.345,83	96	986.654.374,29	97	998.118.479,93	7.01.0.00.0.00.40 .0000 - Kecamatan Rupat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	335.166.813	100	737.142.578,00	100	741.026.103,00	100	744.416.707,00	100	751.572.857,00	7.01.0.00.0.00.41 .0000 - Kecamatan Rupat Utara
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	499.026.841	100	503.990.955,00	100	510.956.449,00	100	514.492.571,00	100	520.470.595,00	7.01.0.00.0.00.42 .0000 - Kecamatan Mandau
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	1.374.352.099	100	1.381.092.722,00	100	1.393.736.938,00	100	1.397.437.437,00	100	1.408.167.724,00	7.01.0.00.0.00.43 .0000 - Kecamatan Pinggir
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	400.355.000	100	346.098.000,00	100	346.442.000,00	100	336.148.000,00	100	333.916.000,00	7.01.0.00.0.00.44 .0000 - Kecamatan Bathin Solapan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	1.004.824.946	100	960.285.000,00	100	975.723.779,00	100	967.404.545,00	100	997.597.165,00	7.01.0.00.0.00.45 .0000 - Kecamatan Talang Muandau
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					52.076.115.518		52.175.207.918,08		52.854.972.726,37		53.652.224.656,21		54.368.514.256,70	
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)	68,78	100	100	6.106.564.704	100	6.120.101.335,00	100	6.163.616.140,00	100	6.169.000.432,00	100	6.205.980.818,00	7.01.0.00.0.00.35 .0000 - Kecamatan Bengkalis
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)	100	100	100	2.848.163.496	100	2.854.477.117,93	100	2.874.772.862,90	100	2.877.284.150,80	100	2.894.532.176,66	7.01.0.00.0.00.36 .0000 - Kecamatan Bantan
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)	100	100	100	2.733.215.480	100	2.723.841.826,26	100	2.771.104.779,20	100	2.831.415.494,71	100	2.902.651.550,74	7.01.0.00.0.00.37 .0000 - Kecamatan Bukit Batu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)	100	100	100	2.621.999.992	100	2.613.007.755,68	100	2.658.347.562,57	100	2.716.204.214,47	100	2.784.541.650,58	7.01.0.00.0.00.38.0000 - Kecamatan Siak Kecil
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)	100	100	100	2.515.617.798	100	2.506.990.403,24	100	2.550.490.641,80	100	2.605.999.880,45	100	2.671.564.667,29	7.01.0.00.0.00.39.0000 - Kecamatan Bandar Laksamana
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Desa Mandiri (%)	73	75	80	8.637.212.195	85	8.723.131.646,97	90	8.843.691.196,90	95	8.904.894.792,78	100	9.008.363.596,43	7.01.0.00.0.00.40.0000 - Kecamatan Rupat
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)	100	100	100	2.064.543.333	100	1.917.934.302,00	100	1.928.038.567,00	100	1.949.497.206,00	100	1.981.085.326,00	7.01.0.00.0.00.41.0000 - Kecamatan Rupat Utara
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)	100	100	100	13.805.755.794	100	13.943.089.794,00	100	14.135.792.667,00	100	14.233.620.743,00	100	14.399.004.899,00	7.01.0.00.0.00.42.0000 - Kecamatan Mandau
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)	100	100	100	6.784.534.965	100	6.883.104.566,00	100	7.007.127.655,00	100	7.082.280.019,00	100	7.189.265.281,00	7.01.0.00.0.00.43.0000 - Kecamatan Pinggir
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)	100	100	100	2.093.633.618	100	1.993.613.000,00	100	1.995.594.000,00	100	2.223.145.000,00	100	2.208.384.000,00	7.01.0.00.0.00.44.0000 - Kecamatan Bathin Solapan
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (%)	100	100	100	1.864.874.142	100	1.895.916.171,00	100	1.926.396.654,00	100	2.058.882.723,00	100	2.123.140.291,00	7.01.0.00.0.00.45.0000 - Kecamatan Talang Muandau
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.669.173.346		1.694.093.832,07		1.713.216.776,17		1.711.263.442,57		1.732.142.322,44	
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)	92,78	100	100	40.065.927	100	40.117.119,00	100	40.402.357,00	100	40.422.501,00	100	40.664.816,00	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Bengkalis
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)	100	100	100	18.687.153	100	18.711.029,88	100	18.844.068,01	100	18.853.463,46	100	18.966.481,51	7.01.0.00.0.00.36.0000 - Kecamatan Bantan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)	100	100	100	63.910.349	100	65.767.836,58	100	67.401.050,11	100	68.702.064,46	100	71.038.920,86	7.01.0.00.0.00.37.0000 - Kecamatan Bukit Batu
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)	100	100	100	61.309.815	100	63.091.720,45	100	64.658.477,96	100	65.906.553,58	100	68.148.322,48	7.01.0.00.0.00.38.0000 - Kecamatan Siak Kecil
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)	100	100	100	58.822.297	100	60.531.905,16	100	62.035.094,75	100	63.232.532,31	100	65.383.346,10	7.01.0.00.0.00.39.0000 - Kecamatan Bandar Laksamana
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)	90	90	91	152.759.608	92	154.278.772,00	93	156.411.664,34	94	157.492.986,76	95	159.323.124,49	7.01.0.00.0.00.40.0000 - Kecamatan Rupat
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)	100	100	100	103.050.294	100	153.720.965,00	100	154.530.863,00	100	155.237.963,00	100	161.869.385,00	7.01.0.00.0.00.41.0000 - Kecamatan Rupat Utara
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)	100	100	100	543.870.267	100	549.280.465,00	100	556.871.891,00	100	560.725.775,00	100	567.240.994,00	7.01.0.00.0.00.42.0000 - Kecamatan Mandau
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)	100	100	100	50.791.285	100	51.529.210,00	100	52.457.688,00	100	53.020.304,00	100	53.821.231,00	7.01.0.00.0.00.43.0000 - Kecamatan Pinggir
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)	100	100	100	424.519.130	100	366.975.000,00	100	367.339.000,00	100	356.425.000,00	100	354.058.000,00	7.01.0.00.0.00.44.0000 - Kecamatan Bathin Solapan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan (%)	100	100	100	151.387.221	100	170.089.809,00	100	172.264.622,00	100	171.244.299,00	100	171.627.701,00	7.01.0.00.0.00.45.0000 - Kecamatan Talang Muandau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					6.817.355.649		6.781.039.943,92		6.881.527.863,33		6.752.110.126,95		6.821.201.610,43	
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)	27,77	100	100	147.711.003	100	184.599.213,00	100	185.911.740,00	100	186.004.434,00	100	187.119.447,00	7.01.0.00.0.00.35 .0000 - Kecamatan Bengkalis
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)	100	100	100	68.893.905	100	86.098.938,85	100	86.711.114,75	100	86.754.347,99	100	87.274.401,33	7.01.0.00.0.00.36 .0000 - Kecamatan Bantan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)	100	100	100	230.980.183	100	262.846.518,02	100	279.037.466,61	100	238.132.185,68	100	242.001.761,96	7.01.0.00.0.00.37 .0000 - Kecamatan Bukit Batu
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)	100	100	100	221.581.519	100	252.151.202,25	100	267.683.335,49	100	228.442.504,50	100	232.154.625,87	7.01.0.00.0.00.38 .0000 - Kecamatan Siak Kecil
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)	100	100	100	212.591.310	100	241.920.691,90	100	256.822.641,16	100	219.173.925,22	100	222.735.434,99	7.01.0.00.0.00.39 .0000 - Kecamatan Bandar Laksamana
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	90	90,50	91	480.580.001	91,50	485.360.463,90	92	492.068.477,32	92,50	495.474.534,56	93	501.231.589,28	7.01.0.00.0.00.40 .0000 - Kecamatan Rupat
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan	100	100	100	1.357.451.339	100	1.259.801.688,00	100	1.266.439.243,00	100	1.272.234.283,00	100	1.284.465.191,00	7.01.0.00.0.00.41 .0000 - Kecamatan Rupat Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pemerintah daerah (%)													
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)	100	100	100	1.039.142.909	100	1.049.479.876,00	100	1.063.984.394,00	100	1.071.347.797,00	100	1.083.796.067,00	7.01.0.00.0.00.42.0000 - Kecamatan Mandau
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)	100	100	100	421.464.843	100	427.588.125,00	100	435.292.614,00	100	439.961.184,00	100	446.607.259,00	7.01.0.00.0.00.43.0000 - Kecamatan Pinggir
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)	100	100	100	1.758.124.410	100	1.611.721.215,00	100	1.613.322.552,00	100	1.565.386.925,00	100	1.554.993.432,00	7.01.0.00.0.00.44.0000 - Kecamatan Bathin Solapan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah (%)	100	100	100	878.834.228	100	919.472.012,00	100	934.254.285,00	100	949.198.006,00	100	978.822.401,00	7.01.0.00.0.00.45.0000 - Kecamatan Talang Muandau
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					670.797.595		771.752.702,79		778.431.866,36		793.682.793,61		803.340.158,05	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	103.774.279	100	103.906.871,00	100	104.645.664,00	100	115.098.140,00	100	115.788.101,00	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Bengkalis
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	48.401.373	100	48.463.214,93	100	48.807.795,40	100	53.682.935,80	100	54.004.740,88	7.01.0.00.0.00.36.0000 - Kecamatan Bantan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	24.498.967	100	46.089.682,30	100	46.215.315,66	100	46.502.392,57	100	47.091.162,64	7.01.0.00.0.00.37.0000 - Kecamatan Bukit Batu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	23.502.096	100	44.214.277,11	100	44.334.798,40	100	44.610.194,06	100	45.175.006,63	7.01.0.00.0.00.38 .0000 - Kecamatan Siak Kecil
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	22.548.547	100	42.420.374,81	100	42.536.006,20	100	42.800.228,26	100	43.342.124,73	7.01.0.00.0.00.39 .0000 - Kecamatan Bandar Laksamana
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dalam perencanaan dan Pelaporan (Desa)	12	12	12	84.291.734	12	85.130.233,64	12	86.306.790,70	12	86.904.084,92	12	87.913.846,17	7.01.0.00.0.00.40 .0000 - Kecamatan Rupat
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	86.665.979	100	138.609.886,00	100	139.340.000,00	100	139.970.000,00	100	141.315.601,00	7.01.0.00.0.00.41 .0000 - Kecamatan Rupat Utara
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	33.920.027	100	34.257.449,00	100	34.730.910,00	100	34.971.269,00	100	35.377.609,00	7.01.0.00.0.00.42 .0000 - Kecamatan Mandau
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	44.366.486	100	45.011.068,00	100	45.822.099,00	100	46.313.547,00	100	47.013.162,00	7.01.0.00.0.00.43 .0000 - Kecamatan Pinggir
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	69.773.000	100	60.315.000,00	100	60.375.000,00	100	58.581.000,00	100	58.192.000,00	7.01.0.00.0.00.44 .0000 - Kecamatan Bathin Solapan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	129.055.107	100	123.334.646,00	100	125.317.487,00	100	124.249.002,00	100	128.126.804,00	7.01.0.00.0.00.45 .0000 - Kecamatan Talang Muandau
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					22.846.686.135		23.073.955.602,00		23.392.853.180,00		23.554.745.608,00		23.828.434.348,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.141.449.020		13.843.038.873,00		12.259.987.660,00		12.064.659.798,00		11.949.770.224,00	
Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	3,06	65	65	11.141.449.020	67	13.843.038.873,00	68	12.259.987.660,00	69	12.064.659.798,00	70	11.949.770.224,00	8.01.0.00.0.00.46 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kebangsaan (Persentase)													Politik
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (%)	0	0	0		0		0		0		0		8.01.0.00.0.00.46.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja (%)	0	0	0		0		0		0		0		8.01.0.00.0.00.46.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	0	0	0		0		0		0		0		8.01.0.00.0.00.46.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					4.129.895.021		2.756.587.542,00		3.374.523.233,00		3.443.675.647,00		3.614.750.352,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%) (%)	0	0	0	4.129.895.021	0	2.756.587.542,00	0	3.374.523.233,00	0	3.443.675.647,00	0	3.614.750.352,00	8.01.0.00.0.00.46.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					5.346.234.687		3.550.255.652,00		4.328.431.885,00		4.549.224.506,00		4.588.012.870,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	65,00	65	70	5.346.234.687	74	3.550.255.652,00	75	4.328.431.885,00	76	4.549.224.506,00	77	4.588.012.870,00	8.01.0.00.0.00.46.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik (%) (%)	0	0	0		0		0		0		0		8.01.0.00.0.00.46.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	TARGET	PAGU RENSTRA	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					259.654.933		653.994.462,00		735.413.184,00		717.220.079,00		719.446.462,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	73,80	74,00	74,00	259.654.933	75,00	653.994.462,00	75,20	735.413.184,00	75,45	717.220.079,00	75,80	719.446.462,00	8.01.0.00.0.00.46 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					374.386.182		1.009.020.027,00		1.134.637.484,00		1.106.568.123,00		1.110.003.113,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	3,13	3,17	3,18	374.386.182	3,20	1.009.020.027,00	3,25	1.134.637.484,00	3,27	1.106.568.123,00	3,29	1.110.003.113,00	8.01.0.00.0.00.46 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.595.066.292		1.261.059.046,00		1.559.859.734,00		1.673.397.455,00		1.846.451.327,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	60,00	60,00	60,20	1.595.066.292	60,30	1.261.059.046,00	60,30	1.559.859.734,00	60,50	1.673.397.455,00	60,50	1.846.451.327,00	8.01.0.00.0.00.46 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					**3.825.469.051.199,54**		**3.894.321.925.245,09**		**3.955.871.584.017,34**		**4.019.068.604.691,41**		**4.083.976.358.969,56**	

Sumber: Hasil Analisis

4.2 Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bab ini menyajikan indikator kinerja sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran pencapaian misi pembangunan dan menjadi pedoman kinerja utama kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kurun lima tahun kedepan.

Secara lengkap kedua struktur indikator tersebut disajikan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel IV.2 Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	1,59 - 2,83	1,71 - 2,88	1,81 - 2,93	1,92 - 2,97	2,0 - 3,02	2,09 - 3,07
2	Indeks Daya Saing Daerah	angka	3,04	3,1	3,17	3,23	3,29	3,35
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,54 - 5,72	5,16 - 5,56	4,80 - 5,34	4,77 - 5,16	4,58 - 5,03	4,23 - 4,93
4	Rasio Gini	angka	0,259 - 0,262	0,242 - 0,246	0,226-0,231	0,211-0,217	0,197-0,204	0,183 - 0,191
5	Pendapatan Perkapita (Juta)	juta	297,96 - 298,95	311,87 - 315,41	325,78 - 331,86	339,69 - 348,315	353,6 - 364,77	367,51 - 381,23
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	76,65 - 76,73	77,02 - 77,28	77,49 - 77,84	77,97 - 78,4	78,45 - 78,97	78,94 - 79,55
7	Tingkat Kemiskinan	%	6,27 - 6,33	6,12 - 6,20	6,09 - 6,16	6,06 - 6,12	6,03 - 6,09	5,92 - 5,99
8	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	16,18	16,42	16,64	16,83	17	17,14
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,37	67,23	68,09	68,95	69,81	70,67
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	20,34	20,51	20,68	20,85	21,02	21,19
11	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	0,31	0,32	0,34	0,37	0,4	0,44
12	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	angka	3.417	3.526	3.639	3.756	3.876	4.000
13	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	%	4,36	4,51	4,65	4,8	4,94	5,09
14	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	angka	66,01	67,59	69,75	70,67	72,54	74,08
15	Nilai Tukar Petani	angka	168,96	175,67	182,65	189,91	197,45	205,3

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan (%)	%	12,82	13,42	14,02	14,61	15,2	15,78
17	Usia Harapan Hidup	usia	74,43	74,55	74,76	74,97	75,4	75,6
18	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	13,62	13,78	13,94	14,1	14,26	14,42
19	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,75	9,77	9,78	9,79	9,81	9,82
20	Jumlah Prestasi Olahraga (cabang)	cabang	13	16	19	22	25	28
21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	90,48	90,49	90,5	90,51	90,52	90,53
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,4	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37
23	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	angka	63,35	64,65	65,95	67,25	68,55	69,85
24	Indeks Kesejahteraan Sosial	angka	58	59	60	61	62	63
25	Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	%	4,89-5,62	5,64-6,14	6,39-7,39	7,15-8,65	7,90-9,90	8,66-11,16
26	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	66,53	68,04	69,57	71,05	72,52	74,08
27	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	%	10,39	12,99	12,99	15,58	15,58	18,18

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.	%	100	100	100	100	100	100
29	Indeks Pemerintah Digital	angka	1,5	1,5	1,5	1,75	1,75	2
30	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	95	95,8	96,6	97,4	98,2	99
31	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	angka	97,76	97,9	98,05	98,19	98,33	98,47
32	Persetase Peningkatan PAD	%	5,23%	5,34%	5,42%	5,58%	5,67%	5,73%
33	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	predikat	B	B	B	A	A	A
35	Indeks Profesionalis ASN	angka	80,63	81,69	82,76	83,82	84,89	85,95
36	Indeks Sistem Merit	angka	261,5	264,5	267,5	270,5	273,5	276,5
37	Indeks Inovasi Daerah	angka	40,85	44,37	47,83	51,36	54,82	58,34
38	Persentase penyelesaian konflik SARA	%	60	60,2	60,3	60,4	60,5	60,5
39	Indeks Pelestarian Budaya Melayu	angka	3	3	5	5	5	5
40	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	%	65	66	67	68	69	70
41	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	angka	73,11	74,36	75,6	76,85	78,09	79,34

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42	Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	angka	13,95	17,17	20,37	23,88	27,75	31,52
43	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	%	65	66	67	68	69	70
44	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	52,18%	52,56%	53,32%	54,09%	54,85%	55,61%
45	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	77,58	79,44	81,33	83,28	85,27	87,31
46	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (%)	%	95,83	96,1	96,37	96,64	96,91	97,45
47	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (%)	%	93,09	93,55	94,01	94,46	94,92	95,38
48	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	1,15	1,04	0,93	0,84	0,76	0,68
49	Rasio pemukiman layak huni	%	99,52	99,59	99,63	99,7	99,79	99,86
50	Persentase pengelolaan wilayah perbatasan	%	74,78	76,27	77,8	78,96	80,15	81,75
51	Persentase ketersediaan infrastruktur dasar wilayah perbatasan	%	62,47%	62,77%	63,39%	64,00%	64,42%	65,39%

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
52	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	73,5	73,71	73,92	74,13	74,35	74,56
53	Indeks Risiko Bencana	angka	126,68	122,38	118,07	113,77	109,46	105,15

Sumber: Hasil Analilis

Tabel IV.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2030

No	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA								
Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,93	1,59 - 2,83	1,71 - 2,88	1,81 - 2,93	1,92 - 2,97	2,0 - 3,02	2,09 - 3,07
2	Indeks Daya Saing Daerah	3,39	3,04	3,1	3,17	3,23	3,29	3,35
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,88	5,54 - 5,72	5,16 - 5,56	4,80 - 5,34	4,77 - 5,16	4,58 - 5,03	4,23 - 4,93
4	Rasio Gini	0,279	0,259 - 0,262	0,242 - 0,246	0,226-0,231	0,211-0,217	0,197-0,204	0,183 - 0,191
5	Pendapatan Perkapita (Juta)	296,91	297,96 - 298,95	311,87 - 315,41	325,78 - 331,86	339,69-348,315	353,6 - 364,77	367,51 - 381,23
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,37	76,65 - 76,73	77,02 - 77,28	77,49 - 77,84	77,97 - 78,4	78,45 - 78,97	78,94 - 79,55
7	Tingkat Kemiskinan	6,36	6,27 - 6,33	6,12 - 6,20	6,09 - 6,16	6,06 - 6,12	6,03 - 6,09	5,92 - 5,99
Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	65,12	66,53	68,04	69,57	71,05	72,52	74,08
2	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	10,39	10,39	12,99	12,99	15,58	15,58	18,18
3	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.	100	100	100	100	100	100	100
Misi 3: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat								
1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	65	65	66	67	68	69	70
2	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	N/A	73,11	74,36	75,60	76,85	78,09	79,34
3	Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	N/A	13,95	17,17	20,37	23,88	27,75	31,52

4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mencerminkan capaian target pembangunan secara menyeluruh di Kabupaten Bengkalis. Indikator ini mencakup indikator makro pembangunan, serta indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Karna itu indikator ini menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas program dan kebijakan pembangunan daerah, sekaligus sebagai alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan visi "*Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia*" selama periode 2025–2029. Dengan menggunakan indikator yang terukur, terstruktur, dan relevan, pemerintah daerah dapat merumuskan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	11,09	10,48	9,88	9,28	8,68	8,09
2	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih	%	73,54	76,04	78,54	81,04	83,54	88,54
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	5,28	9,53	13.78	18,03	22,28	26,53
4	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	27	30,65	34,3	37,95	41,6	45,25
5	Indeks Ketahanan Daerah	angka	35	36	37	38	39	40
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,79%	1,76%	1,73%	1,70%	1,67%	1,63%
7	Rasio Penduduk	%	104,68	104,74	104,79	104,84	104,9	104,95
8	Kepadatan Penduduk	Orang/Km2	78,5	79,39	80,28	81,18	82,07	82,96
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Indeks Keluarga Sehat	angka	0,315	0,354	0,394	0,433	0,473	0,512
2	Angka Literasi/Numerasi							
a	Skor Literasi SD	angka	62,38	64,88	67,38	69,88	72,38	74,88
b	Skor Numerasi SD	angka	55,86	58,76	61,66	64,56	67,46	70,36
c	Skor Literasi SMP	angka	71,78	72,88	73,98	75,08	76,18	77,28
d	Skor Numerasi SMP	angka	64,05	65,55	67,05	68,55	70,05	71,55
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	44,39	50,16	55,93	61,7	67,47	73,24
4	Indeks Masyarakat Digital	angka	47,98	49,03	50,07	51,11	52,16	53,2
5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	58,53	61,51	64,50	67,48	70,46	73,44
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	66,5	67,7	68,8	69,9	70,9	71,9
7	Indeks Pembangunan Pemuda							
A	Jumlah Prestasi Olahraga	cabang	13	16	19	22	25	28
B	Persentase Wirausaha Muda	%	0,06	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Indeks Zakat Nasional	angka	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Angka Ketergantungan	%	44,24	43,07	41,9	40,73	39,56	38,39
2	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,79 – 0,81	0,79 – 0,81	0,79 – 0,81	0,79 – 0,81	0,79 – 0,81	0,79 – 0,81
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	47,96	47,97	47,98	47,99	48	48,01
4	Indeks Ekonomi Hijau	angka	59,86	61,1	62,39	64,24	65,91	67,47
5	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	angka	27,85	29,14	30,49	31,9	33,38	34,93
6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	angka	6,1	6,16	6,22	6,27	6,33	6,27
7	Rasio Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	% PDRB	55,84	56,33	56,83	57,33	57,82	58,32
8	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	81,79	82,15	82,51	82,87	83,24	83,6
9	Persentase Desa Mandiri	%	73,94	75,65	77,35	79,06	80,76	82,47
10	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,077	0,082	0,087	0,092	0,097	0,102
11	Tingkat Inflasi	%	2,9 - 3,50	2,75 - 3,57	2,61 - 3,64	2,47 - 3,71	2,3 - 3,78	2,22 - 3,85
12	Koefisien Variasi Harga Antarwilyah Tingkat Provinsi		8,27	8,11	7,96	7,80	7,64	7,48
13	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	angka	4,89	4,9	4,91	4,92	4,93	4,94
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Indeks Reformasi Hukum	angka	50,13	52,78	55,44	58,09	60,75	63,4
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	angka	2,88	2,97	3,06	3,15	3,24	3,33
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,41	4,43	4,45	4,47	4,49	4,51
4	Indeks Integritas Nasional	angka	72,25	72,99	73,73	74,47	75,21	75,95
5	Persentase Penegakan Perda	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	65	65,88	66,77	67,67	68,58	69,51
7	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	angka	65	70	74	75	76	77
8	Rasio Kriminalitas Per 10.000 penduduk	%	21,95	20,27	18,60	16,92	15,24	13,56
9	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (IPKKU)	angka	73	78	83	88	92	95

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	INDIKATOR KINERJA KUNCI							
A	**Pendidikan**							
1	Skor Literasi/Numerasi							
A	Skor Literasi SD	angka	62,38	64,88	67,38	69,88	72,38	74,88
B	Skor Numerasi SD	angka	55,86	58,76	61,66	64,56	67,46	70,36
C	Skor Literasi SMP	angka	71,78	72,88	73,98	75,08	76,18	77,28
D	Skor Numerasi SMP	angka	64,05	65,55	67,05	68,55	70,05	71,55
2	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,75	9,77	9,78	9,79	9,81	9,82
3	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,62	13,78	13,94	14,1	14,26	14,42
B	**Kesehatan**							
1	Prevalensi Balita Stunting	%	18,8	17,7	16,5	15,4	14,2	13,1
2	Jumlah kematian ibu	angka	15	14	13	12	11	10
3	Jumlah kematian balita	angka	90	85	80	75	70	65
4	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	36	46,0	55,0	61,0	70	13,1
5	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	80	85	90	93	95	73,0
6	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,6	98,6	98,7	98,7	99	97
7	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	90	90	90	90	90	99,2
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	5	15	25	32	38	90
9	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	65	68	71	75	80	45
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	59,32	60,35	61,37	62,39	63,42	64,44
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	angka	73,11	74,356	75,602	76,848	78,094	79,34
2	Persentase Gedung Pelayanan Layak	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	52,18	52,56	53,32	54,09	54,85	55,61

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
D	**Perumahan dan Kawasan Pemukiman**							
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	81,79	82,15	82,51	82,87	83,24	83,6
2	Rasio pemukiman layak huni	%	99,52	99,59	99,63	99,7	99,79	99,86
E	**Ketetraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat**							
1	Persentase Penanggulangan Bencana Banjir	%	95	95	100	100	100	100
2	Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (IPKKU)	angka	73	78	83	88	92	95
4	Indeks Manajemen Satlinmas	angka	70	75	80	85	90	95
5	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
F	**Sosial**							
1	Persentase Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentas Korban Bencana korban Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100
G	**Tenaga Kerja**							

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat Kesempatan Kerja	%	94,5	94,65	94,7	94,77	94,8	94,89
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	67	68	69	70	72	74
3	Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal	%	47,96	47,97	47,98	47,99	48	48,01
H	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	90,48	90,49	90,5	90,51	90,52	90,53
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,4	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	angka	63,35	64,65	65,95	67,25	68,55	69,85
I	**Pangan**							
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	angka	66,01	67,59	69,75	70,67	72,54	74,08
2	Persentase desa bebas dari status rawan pangan	%	98,84	98,99	99,13	99,27	99,42	99,56
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	92,78	93,32	93,85	94,39	94,93	95,47
J	**Pertanahan**							
1	Jumlah sengketa lahan yang diselesaikan melalui mediasi	angka	5	3	3	3	3	3
H	**Lingkungan Hidup**							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	73,5	73,71	73,92	74,13	74,35	74,56
2	Indeks Kualitas Air (IKA	angka	64,26	64,46	64,66	64,86	65,06	65,26
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	angka	81,52	81,82	82,12	82,42	82,72	83,02
4	Indeks Kualitas Lahan	angka	74,52	74,59	74,66	74,73	74,8	74,87
5	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42
I	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan	%	99,54	99,62	99,71	99,79	99,88	99,96
2	Rasio pasangan berakte nikah	%	83,28	85,94	88,6	91,26	93,92	96,58
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	62,93	67,73	72,52	77,31	82,11	86,9
J	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**							
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	angka	0,9191	0,9307	0,9424	0,9541	0,9657	0,9774

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) per wanita usia subur (15-49 tahun)	angka	2,40	2,35	2,30	2,25	2,20	2,10
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	66,5	67,7	68,8	69,9	70,9	71,9
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	77,2	82,10	85,10	87,00	88,10	89,20
4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Demand Satisfied of Modern Contraception)	%	96,8	97,10	97,30	97,50	97,80	98,10
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)	%	13,5	12,40	11,50	10,80	10,10	9,40
6	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	angka	14,8	13,6	12,6	11,8	11,1	10,4
7	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	angka	85,9	87	87,9	88,8	89,7	90,6
8	Indeks Lansia Berdaya	angka	62,2	62,7	63,2	63,6	64,1	64,6
9	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	55,2	58,2	61,2	64,2	67,2	70,2
L	**Perhubungan**							
1	Rasio konektivitas antar wilayah	%	65	66	67	68	69	70
M	**Komunikasi dan Informatika**							
1	Indeks SPBE	angka	2,88	2,97	3,06	3,15	3,24	3,33
2	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	angka	2	3	4	4	5	5
N	**Koperasi Usaha Kecil Menengah**							
1	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	5	5	5	5	5	5
2	Jumlah UKM menjalin kemitraan	Unit Usaha	25	25	25	25	25	25
O	**Penanaman Modal**							
1	Persentase peningkatan investasi	%	5,7	29	2	2	2	2
P	**Kepemudaan dan Olahraga**							

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Partisipasi Olahraga	angka	0,084	0,094	0,104	0,125	0,146	0,167
Q	**Statistik**							
1	Indeks Pembangunan Statistik	angka	2,26	2,6	2,6	2,65	2,65	2,75
R	**Persandian**							
1	Tingkat Kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	30,02	38	41	44	48	51
S	**Kebudayaan**							
1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	%	8	8	8	8	8	8
2	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.	%	100	100	100	100	100	100
T	**Perpustakaan**							
1	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bengkalis	angka	44,39	50,16	55,93	61,7	67,47	73,24
2	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	angka	76	78	80	82	85	87
U	**Kearsipan**							
1	Indeks Pengelolaan Kearsipan	angka	30	35	40	45	50	55
2	Tingkat Digitalisasi Arsip	%	20	23	25	28	30	33
3	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	30,02	35,48	40,94	46,4	51,86	57,31
V	**Kelautan dan Perikanan**							
1	Jumlah produksi perikanan (Ton)	ton	9.327	9.805	10.284	10.762	11.240	11.718
2	Jumlah produksi olahan perikanan (ton)	ton	100	105	107	110	112	115
W	**Pariwisata**							
1	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,31	0,32	0,34	0,37	0,4	0,44
2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	jiwa	3.417	3.526	3.639	3.756	3.876	4.000
3	Jumlah Wisatawan Nusantara	jiwa	246.151	256.554	266.957	277.360	287.762	298.165

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
X	**Pertanian**							
1	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan (%)	%	12,82	13,42	14,02	14,61	15,2	15,78
Y	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							
1	Rasio Elektrifikasi	%	92,22	93,44	94,67	95,89	97,12	98,34
Z	**Perdagangan**							
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	6,46	6,5	6,53	6,54	6,54	6,53
AA	**Perindustrian**							
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	16,18	16,42	16,64	16,83	17	17,14
AB	**Transmigrasi**							
1	Tingkat Kesempatan Kerja di Wilayah Transmigrasi	%	94,5	94,65	94,7	94,77	94,8	94,88
AC	**Sekretariat Daerah**							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	66,53	68,04	69,57	71,05	72,52	74,08
AD	**Sekretariat DPRD**							
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	91,66	93,18	94,69	96,2	97,72	99,23
AE	**Perencananaan**							
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	80	82	84	86	88	90
AF	**Keuangan**							
1	Opini BPK	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
AG	**Kepegawaian**							
1	Indeks Profesionalitas ASN	angka	80,625	81,69	82,755	83,82	84,885	85,95
AH	**Pendidikan dan Pelatihan**							
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	angka	26,76	27,09	27,41	27,74	28,07	28,4
AI	**Penelitian dan Pengembangan**							
1	Indeks Inovasi Daerah	angka	40,85	44,37	47,83	51,36	54,82	58,34
2	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	40	42	45	46	48	50

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Indeks Kapabilitas Inovasi	angka	2,01	2,10	2,19	2,28	2,37	2,46
AJ	**Pengawasan**							
1	Maturitas Penyelenggaraam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
AK	**Kesatuan Bangsa dan Poliktik**							
1	Indeks Harmoni Sosial	angka	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	70
AL	**Pengelola Perbatasan**							
1	Persentase pengelolaan wilayah perbatasan	%	74,78	76,27	77,8	78,96	80,15	81,75
AM	**Kecamatan Bengkalis**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	94	95,5	96	97	98,5	99
AN	**Kecamatan Bandar Laksamana**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	81,77	81,8	81,85	81,9	81,95	82
AO	**Kecamatan Pinggir**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	96,5	97,45	98,4	99,35	99,65	99,95
AP	**Kecamatan Siak Kecil**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	90	90	90	91	93	95
AQ	**Kecamatan Rupat Utara**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	95	96	97	98	99	99
AR	**Kecamatan Rupat**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	91	91,5	92	92,5	93	93
AS	**Kecamatan Talang Muandau**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	95	95,5	96	96,5	96,5	97
AT	**Kecamatan Bantan**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	80	80,55	81	81,55	82	82,55
AU	**Kecamatan Bathin Solapan**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	94	94,5	95	95,5	96	96,5
AV	**Kecamatan Mandau**							

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	95	95,5	95,75	96	96,25	96,5
AW	**Kecamatan Bukit Batu**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	95	95	95,5	95,5	96	96

Sumber: Hasil Analisis

BAB V
PENUTUP

RPJMD memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupatih terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah, arah kebijakan keuangan Daerah, program Perangkat Daerah, dan program lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Bertolak dari hal tersebut maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis merupakan prioritas pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi dan arah kebijakan yang efektif serta efisien, Bupati dapat didukung oleh tenaga ahli yang berasal dari akademisi atau profesional.
2) Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat, dan masyarakat termasuk dunia usaha;
3) Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Daerah;
4) Bupati berkewajiban menyebarluaskan RPJMD kepada masyarakat;
5) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD;
6) Penyusunan RKPD tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 berpedoman pada RPJMD, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029; dan
7) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

1.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Daerah, diperlukan adanya pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan dilaksanakan pada tahun 2029. Sebagaimana diketahui, Tahun 2029 adalah tahun terakhir periode RPJMD ini.

Pemerintah Daerah akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2030 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas dan berkelanjutan. Salah satu agenda penting dalam penyusunan RKPD adalah untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani atau terselesaikan sampai dengan tahun 2029. Agenda penting lainnya RKPD adalah untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2029, baik nasional maupun provinsi. Kesemua hal tersebut hendaknya dipertimbangkan secara tepat dan cermat.

5.2 Manajemen Resiko

Dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025–2030, penerapan manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk memastikan tercapainya visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah secara efektif. Dinamika lingkungan strategis, baik dari aspek fiskal, regulasi, maupun arahan pemerintah pusat, menuntut pemerintah daerah memiliki kerangka pengelolaan risiko yang komprehensif. Melalui identifikasi risiko sejak awal, analisis dampak yang mungkin terjadi, serta penyiapan langkah mitigasi yang terukur, diharapkan potensi hambatan terhadap pencapaian target pembangunan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2030 tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai pedoman adaptif bagi pemerintah daerah untuk merespons perubahan kebijakan, dinamika fiskal, maupun instruksi strategis dari pemerintah pusat dengan tetap menjaga konsistensi arah pembangunan daerah. Berikut beberpa point manajemen resiko yang dapat ditidak lanjut;

- Angka pagu yang sangat sementara

Dalam penyusunan RPJMD, penetapan pagu indikatif kerap masih bersifat sementara karena menunggu sinkronisasi dengan kebijakan fiskal nasional, proyeksi pendapatan daerah, serta realisasi transfer pusat. Risiko dari angka pagu yang sangat sementara ini adalah terjadinya deviasi anggaran antara rencana dengan kemampuan riil keuangan daerah. Hal ini dapat berdampak pada keterbatasan pendanaan program prioritas maupun tertundanya pencapaian sasaran strategis daerah. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah perlu menyiapkan skenario anggaran alternatif, melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi pendapatan, serta menerapkan prinsip fleksibilitas fiskal sehingga setiap perubahan dapat segera direspons tanpa mengorbankan tujuan pembangunan utama.

- Dinamisasi peraturan pemerintah yang cepat

Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029 disusun dengan horizon waktu lima tahun, sementara regulasi pemerintah pusat maupun provinsi dapat berubah secara cepat dan signifikan. Perubahan regulasi, baik terkait tata kelola keuangan daerah,

standar pelayanan minimal, maupun kebijakan sektoral, berpotensi mengganggu konsistensi implementasi program yang telah direncanakan. Risiko ini dapat menyebabkan perluasan atau penyempitan kewenangan daerah serta penyesuaian kembali indikator kinerja. Sebagai strategi mitigasi, pemerintah daerah perlu membangun sistem monitoring regulasi secara aktif, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta menyiapkan mekanisme revisi dokumen perencanaan secara periodik agar selaras dengan regulasi terbaru tanpa mengurangi efektivitas pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati terpilih daerah.

- Disklamer terkait intruksi pmerintah pusat

Dalam implementasi, pemerintah daerah sering kali menerima instruksi atau kebijakan khusus dari pemerintah pusat yang harus segera dilaksanakan meskipun tidak tercantum dalam dokumen perencanaan awal RPJMD. Instruksi tersebut dapat berbentuk program prioritas nasional, kewajiban pendanaan tertentu, atau kebijakan strategis lintas daerah. Risiko yang muncul adalah terganggunya konsistensi alokasi anggaran, terjadinya duplikasi program, atau bahkan bergesernya prioritas pembangunan daerah. Untuk memitigasi risiko ini, perlu ditegaskan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2030 adanya ruang disklamer yang menyatakan bahwa dokumen dapat disesuaikan dengan arahan strategis pemerintah pusat. Selain itu, mekanisme koordinasi lintas sektor dan revisi tahunan (melalui RKPD) harus dijadikan instrumen penyesuaian agar daerah tetap patuh pada arahan pusat, namun tetap menjaga keseimbangan dalam mencapai target pembangunan daerah.

5.3 Pembiayaan Pembangunan

Untuk mencapai tujuan pembangunan di Kabuapaten Bengkalis , diperlukan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Masih terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan masih diperlukan inovasi pembiayaan. Kolaborasi ini terutama difokuskan pada aspek pembiayaan program dan kegiatan guna mencapai target visi serta indikator utama pembangunan. Sebagai alternatif, sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh melalui:

1) Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH);.
2) Dana Alokasi Khusus (DAK); Usulan yang bersifat spesifik dengan dukungan data yang kuat dan sesuai tema dan prioritas Nasional di Kabupaten Bengkalis.
3) Pinjaman dan Hibah; Menjadi skema alternatif untuk mencukupi/menambah sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur kepada lembaga resmi pemerintah seperti pinjaman dari: PT. SMI, PT. BRK Syariah, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian Hibah dari: BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup), BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), serta hibah lainnya baik dari dalam maupun luar negeri seperti: MCC dari Amerika Serikat untuk pembangunan Infrastruktur Pulau Rupat.
4) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); Percepatan pembangunan infrastruktur melalui dukungan pendanaan pihak ketiga dengan asas manfaat lebih cepat dan skema pembiayaan yang lebih panjang.

5) Badan Layanan Umum (BLU); Perubahan tata kelola pada pusat layanan publik seperti: Pelabuhan Ro-ro, Pelabuhan Kapal Ferri/Kargo, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi yang terkelola secara profesional.
6) Investasi; Percepatan pembangunan dan perluasan lapangan kerja melalui kontribusi swasta.
7) Corporate Social Responsibility (CSR); Pembiayaan yang bersifat sosial, tidak mengikat namun berkontribusi banyak dalam mendorong pelaksanaan program dan kegiatan.
8) Zakat Produktif; Kontribusi wajib dari pembayar zakat kepada mustahik (masyarakat) untuk meningkatkan keberdayaan dan mengurangi kemiskinan.
9) Usulan prioritas kegiatan di K/L; Melalui komunikasi aktif Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke Pemerintah Pusat dalam mengusulkan sejumlah program kegiatan strategis yang dapat dibiayai APBN sesuai rencana strategis/prioritas Kementerian dan Lembaga.